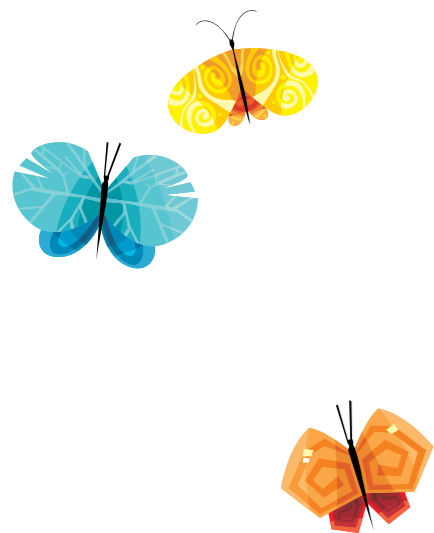


Mengelola Perubahan. Memanfaatkan Peluang.

Managing Change.
Capitalizing on Opportunity.



PT Vale Indonesia Tbk

Plaza Bapindo - Citibank Tower 22nd Floor

Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 54-55

Jakarta 12190, Indonesia

Tel: +62-21 5249000

Fax: +62-21 5249020

www.vale.com/indonesia

Catatan untuk pembaca laporan

Tabel dan grafik pada laporan ini memaparkan data numerik dengan standar bahasa Inggris. Sedangkan pemaparan numerik dalam teks menggunakan standar bahasa Inggris dan Indonesia sesuai konteksnya.

Semua satuan ukuran nikel dalam matte dan mineral lainnya dalam laporan ini adalah metrik ton, dimana satu metrik ton sama dengan 2.204,62 pon dan disajikan sebagai "ton".

Peringatan atas pernyataan-pernyataan mengenai masa depan

Dalam dokumen ini mungkin terdapat rencana, proyeksi, strategi dan tujuan Perseroan tertentu, yang bukan merupakan pernyataan fakta historis dan perlu dipahami sebagai pernyataan mengenai masa depan berdasarkan hukum yang berlaku. Pernyataan mengenai masa depan tergantung pada risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan keadaan dan hasil aktual Perseroan di masa depan berbeda dari yang diharapkan atau diindikasikan. Tidak ada jaminan bahwa hasil-hasil yang diantisipasi oleh Perseroan, atau diindikasikan oleh pernyataan-pernyataan mengenai masa depan, akan tercapai.

Note to readers of the report

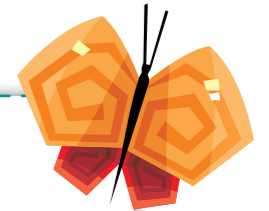
In all tables and graphs presenting numeric data, the English standard is used. Where numerical values are presented in text format, English and Indonesian standards are used respectively.

All measurements of nickel in matte and other mined materials are reported in metric tons, with one metric ton being equal to 2,204.62 pounds, and represented as "tons".

Caution regarding forward-looking statements

This document may contain certain plans, projections, and strategies and objectives of the Company that are not statements of historical fact and would be treated as forward-looking statements under applicable law. Forward-looking statements are subject to risks and uncertainties that may cause actual events, and the Company's future results, to be different than expected or indicated by such statements. No assurance can be given that the results anticipated by the Company, or indicated by such forward-looking statements, will be achieved.

Sekilas PT Vale PT Vale at a glance



Nama / Name	PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale; Perseroan; the Company)
Alamat / Address	Plaza Bapindo, Citibank Tower 22 nd Floor Jalan Jenderal Sudirman Kavling 54-55 Jakarta 12190, Indonesia Tel: +62-021 5249000 Fax: + 62-021 5249020 www.vale.com/indonesia
Tanggal pendirian Date of incorporation	Juli 1968 / July 1968
Kegiatan usaha Business activities	PT Vale memproduksi nikel dalam matte dari bijih lateritik pada fasilitas-fasilitas penambangan dan pengolahan terpadu kami di dekat Sorowako di Pulau Sulawesi. Seluruh produksi kami dijual berdasarkan kontrak jangka panjang dalam denominasi dollar AS. PT Vale produces nickel in matte from lateritic ores at our integrated mining and processing facilities near Sorowako on the island of Sulawesi. Our entire production is sold in US dollars under long-term contracts.
Jumlah karyawan Number of employees	3,183 Karyawan tetap employees 5,153 Karyawan kontrak contractors Per 31 Desember 2013 as of December 31, 2013
Bursa efek Stock exchange	Terdaftar pada tanggal 16 Mei 1990 di Bursa Efek Indonesia Listed on May 16, 1990 at the Indonesia Stock Exchange (IDX ticker: INCO)
Jumlah saham Shares	9.936.338.720 Saham ditempatkan dan disetor penuh 9,936,338,720 issued and fully paid shares
Pemegang saham Shareholders	Vale Canada Limited – 58.73% Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. – 20.09% Public and other shareholders – 21.18%

Daftar isi

Table of contents

01 Sekilas PT Vale

PT Vale at a glance

Mengelola perubahan. Memanfaatkan peluang. <i>Managing change. Capitalizing on opportunity.</i>	4
Kompeten. Kolaboratif. Kompetitif. Berkomitmen. <i>Competent. Collaborative. Competitive. Committed.</i>	6
Strategi untuk jangka panjang <i>A strategy for the long term</i>	8
Ringkasan kinerja <i>Performance highlights</i>	10

02 Tentang perusahaan

About The Company

Sekilas tahun ini <i>The year at a glance</i>	12
Penghargaan dan apresiasi <i>Awards and special recognition</i>	18
Visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan kami <i>Our vision, mission and values</i>	20
Memahami bisnis kami <i>Understanding our business</i>	22
Proses penambangan <i>Mine process</i>	26
Proses dari bijih menjadi nikel dalam matte <i>From ore to nickel in matte</i>	27
Kontrak karya kami <i>Our Contract of Work</i>	28
Struktur organisasi kami <i>Our organizational structure</i>	30

03 Laporan kepada pemegang saham

Reports to shareholders

Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	34
Laporan Dewan Komisaris <i>Report of the Board of Commissioners</i>	36
Dewan Direksi <i>Board of Directors</i>	43
Laporan Dewan Direksi <i>Report of the Board of Directors</i>	44

04 Ikhtisar keuangan dan saham tahun 2013

2013 financial and share highlights

Ikhtisar keuangan penting <i>Key financial highlights</i>	62
Profil pemegang saham <i>Shareholder profile</i>	64
Ikhtisar saham <i>Share highlights</i>	67

05 Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

Tinjauan usaha <i>Business review</i>	74
Tinjauan operasional tahun 2013 <i>Business review</i>	74
Neraca <i>Balance sheet</i>	93
Analisa kinerja keuangan <i>Financial performance analysis</i>	107
Struktur modal dan kebijakan struktur modal <i>Capital structure and capital structure policy</i>	118
Kebijakan dividen dan rasio pembayaran deviden <i>Dividend policy and dividend payout ratio</i>	122
Permasaran <i>Marketing</i>	124
Transaksi dengan pihak yang berelasi <i>Related party transactions</i>	124
Ikatan dan perjanjian-perjanjian penting yang signifikan <i>Significant commitments and agreements</i>	128
Kejadian setelah tanggal neraca pada tahun 2013 <i>Subsequent events in 2013</i>	128
Pandangan tahun 2014 <i>2014 Outlook</i>	129

06 Tata kelola perusahaan

Corporate governance

Komitmen kami terhadap tata kelola perusahaan <i>Our commitment to corporate governance</i>	136
Kebijakan dan praktik tata kelola <i>Governance policies and practices</i>	137
Rapat Umum Pemegang Saham <i>General Meetings of Shareholders</i>	138

Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	144
Direksi <i>Board of Directors</i>	153
Komite Audit <i>Audit Committee</i>	163
Komite Tata Kelola <i>Corporate Governance Committee</i>	168
Sekretaris perusahaan <i>Corporate secretary</i>	172
Hubungan investor <i>Investor relations</i>	174
Unit audit internal <i>Internal audit unit</i>	175
Glorinophika <i>Glorinophika</i>	180
Matriks kewenangan <i>Authority matrix</i>	181
Perubahan bisnis <i>Business change</i>	181
Kebijakan, prosedur dan panduan <i>Policies, procedures and guidelines</i>	182
Aktivitas pengendalian <i>Control activities</i>	182
Manajemen risiko <i>Risk management</i>	183
Kebijakan dan proses whistleblower <i>Whistleblower policy and process</i>	191
Kasus hukum yang dihadapi perseroan <i>Legal cases faced by the company</i>	194
Kode etik PT Vale <i>PT Vale code of ethical conduct</i>	194
Laporan komite audit <i>Audit committee report</i>	196

07 Tanggung jawab sosial perusahaan

Corporate social responsibility

Program terpadu pengembangan masyarakat <i>Integrated program for community development</i>	200
Menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan <i>Creating positive, sustainable change</i>	204
Rencana untuk masa depan yang berkelanjutan <i>A plan for a sustainable future</i>	206
Gambaran tahun 2013 <i>2013 in review</i>	208

08 Sumber daya manusia

Human resources

Membangun kompetensi dan kapasitas untuk masa depan <i>2013 in review</i>	214
Keselamatan dan Kesehatan Kerja <i>Occupational Health and Safety</i>	220

09 Tanggung jawab atas Laporan Tahunan 2013

Responsibility for the 2013 Annual Report

10 Laporan keuangan

Financial statements

12 Informasi perseroan

Corporate information

Jejak langkah <i>Corporate history</i>	304
Tentang PT Vale Indonesia <i>About PT Vale Indonesia</i>	306
Administrasi Saham, Auditor, dan Penasehat Hukum <i>Share Administration, Auditors and Legal Counsel</i>	312
Profil Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Profile</i>	314
Profil Direksi <i>Board of Directors' Profile</i>	326
Daftar istilah <i>Glossary of Terms</i>	

13 Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Annual Report Contents Reference To The Financial Services Authority Regulation

14 Hubungi kami

Contact us

Mengelola perubahan. Memanfaatkan peluang.

Managing change. Capitalizing on opportunity.



Terdapat banyak faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis kami, seperti tekanan pasar, kondisi legislatif dan bahkan kekuatan alam yang berada di luar kendali manusia.

Di PT Vale, investasi bisnis berkelanjutan yang kami lakukan telah membuat kami menjadi lebih siap dalam menghadapi tantangan hari ini dan memanfaatkan peluang di kemudian hari. Kami telah menambah kapasitas produksi secara efektif dan menerapkan praktik-praktik kerja terbaik yang inovatif sehingga membantu kami untuk bekerja lebih produktif. Hubungan dengan masyarakat senantiasa kami jalin demi peningkatan kesejahteraan bersama. Kami telah mengarahkan kerja kami untuk menjadi lebih kompetitif sehingga berhasil mengantarkan PT Vale menjadi perusahaan pertambangan terdepan di Indonesia.

Dengan terus memandang ke depan, kami tetap yakin dan berkomitmen untuk membangun kesuksesan dan menciptakan kemakmuran bersama bagi seluruh pemangku kepentingan.

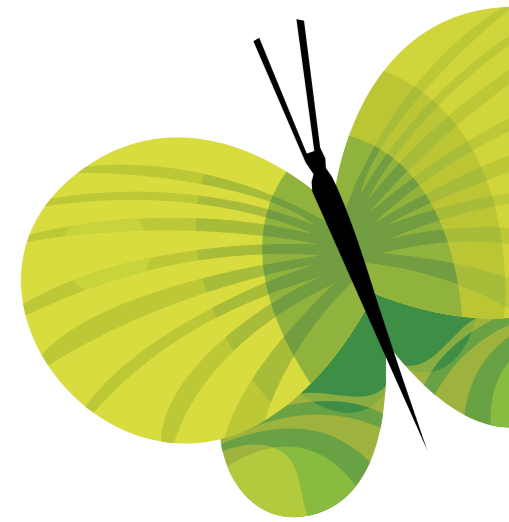
The external forces that affect our business are many. There are market pressures, legislative conditions and even natural forces that are not in our control.

At PT Vale, our continuous investment in our business has prepared us to face today's challenges and capitalize on tomorrow's opportunities. We have effectively increased our production capacity while applying innovative best practices that have helped us work more productively. Our relationships with our communities continue to grow for our collective prosperity. We have focused on being more competitive, and have succeeded in making PT Vale a leading mining company in Indonesia.

So as we look ahead to the future, we remain confident and committed to our success and the mutual prosperity of all of our valued stakeholders.

Kompeten. Kolaboratif. Kompetitif. Berkomitmen.

Kompeten. Kolaboratif. Kompetitif. Berkomitmen.



Pemerintahan

PT Vale memiliki sejarah yang membanggakan di Indonesia. Kami telah dipercaya oleh Pemerintah untuk mengelola areal tambang bijih utama di Sulawesi. Kami berkomitmen untuk terus memelihara sumber daya yang berharga ini, menyeimbangkan daya saing jangka panjang kami dengan kebutuhan jangka panjang terbaik masyarakat Indonesia. Sejak 1968, PT Vale telah berinvestasi sekitar US\$3,3 milyar di Indonesia sehingga kegiatan operasi produksi nikel kami dapat menjadi salah satu yang terbesar di dunia.

Government

PT Vale has a proud history in Indonesia. We have been entrusted by the Government to manage a significant ore body in Sulawesi. We are committed to continue to care for this precious resource, balancing our long-term competitiveness with the best long-term interests of Indonesians. Since 1968, PT Vale has invested approximately US\$ 3.3 billion in Indonesia, making us one of the largest nickel producing operations in the world.

Karyawan

PT Vale berkomitmen dalam pengembangan profesionalisme para karyawannya. Sertifikasi yang kami miliki dalam bidang kompetensi merupakan tolok ukur industri. Komitmen kami terhadap sumber daya manusia merujuk pada aksi kami untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia secara konsisten, memenuhi kebutuhan mereka secara tepat, dan memberikan pelatihan yang dapat diikuti oleh karyawan kami yang ingin mengembangkan keterampilannya.

Employees

PT Vale is committed to the professional development of our employees. Our certifications of competency are the industry benchmark. Our human resource commitment means we will develop the competency of our people consistently, address needs accurately, and provide training that is accessible to eligible employees who want to develop their skills.

Pemegang Saham

PT Vale fokus untuk dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi para pemegang saham. Kami melakukan investasi dalam bisnis yang memungkinkan kami tetap mencapai kinerja yang optimum pada saat kondisi pasar eksternal masih penuh dengan ketidakpastian dan menempatkan kami pada posisi terdepan untuk meraih peluang ketika pasar membaik. Strategi kami adalah berkelanjutan dan dirancang untuk jangka panjang.

Shareholders

PT Vale is focused on delivering excellent returns to our shareholders. We invest in our business in order to optimize our performance when external market conditions are challenging and position us to capitalize on opportunity when markets are favourable. Our strategy is sustainable and designed for the long term.

Masyarakat

PT Vale akan terus berinvestasi dan memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah tempat kami beroperasi. Hal ini diwujudkan dengan menginvestasikan dan mengalokasikan sejumlah besar dana bagi masyarakat di Sulawesi Selatan serta untuk membantu pengembangan masyarakat lokal di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Communities

PT Vale will continue to invest in and contribute to the enhancement of the quality of life and living standards in those areas where we operate. This includes significant and newly dedicated funds to invest in the communities in South Sulawesi as well as to assist in the development of the local communities in both Central Sulawesi and Southeast Sulawesi.

Lingkungan

PT Vale telah berkomitmen kuat untuk menjaga lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat. Rekam jejak kami dalam hal ini sudah terpercaya dan komitmen kami pun tak perlu diragukan lagi. Setelah lebih dari 40 tahun kami beroperasi di Sorowako, sebuah wilayah sensitif yang masih jarang terjamah manusia dengan ekosistem Danau Malili yang mengesankan, wilayah tersebut tetap menjadi salah satu harta karun terbaik Indonesia.

Environment

PT Vale has made the strongest commitment to the protection of the environment and local communities. Our track record is unquestionable and our commitment is unequivocal. After for more than 40 years of operating in a highly sensitive environment, the pristine Sorowako region, with its impressive Malili Lakes ecosystem, remains one of Indonesia's true treasures.

Strategi untuk jangka panjang

Kami akan memastikan pertumbuhan jangka panjang yang menguntungkan dengan memaksimalkan produksi melalui keunggulan operasi. Dasar dari strategi kami adalah:

1. Memaksimalkan potensi pendapatan melalui peningkatan PRODUKSI.
2. Mengoptimalkan EFISIENSI melalui inovasi dan kebersamaan.
3. Mengelola biaya untuk meningkatkan MARGIN.
4. BERINVESTASI pada proses, sumber daya manusia, dan komunitas kami untuk memastikan PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN.

A strategy for the long term

We will ensure long-term, profitable growth by maximizing production and through operational excellence. The cornerstones of our strategy are:

1. Maximize revenue potential by increasing PRODUCTION.
2. Optimize EFFICIENCY through innovation and engagement.
3. Manage costs to improve MARGIN.
4. INVEST in our processes, our people and our communities to ensure SUSTAINABLE GROWTH.

2013

Ringkasan kinerja

Performance highlights

75,802 tons

▲
7%
Produksi
Production

US\$ 11,939

▼
-12%
Harga realisasi rata-rata
Average realized price

US\$ 921.6 million

▼
-5%
Pendapatan
Revenue

US\$ 781.7 million

▼
-2%
Beban pokok pendapatan
Cost of revenue

TENTANG PERUSAHAAN

About the company



Sekilas tahun ini The year at a glance

Sekilas tahun ini The year at a glance

Januari / January



Turnamen Terbuka Bola Volley Vale Cup
Vale Cup Open Volleyball Tournament
3-12 Januari/January 3-12

Sejumlah kegiatan olahraga kerap berlangsung di Sorowako, termasuk penyelenggaraan turnamen terbuka bola volley Vale Cup 2012 pada 3-12 Januari 2013. Turnamen ini diikuti oleh 11 tim putra dan 10 tim putri.

A number of sports events took place in January in Sorowako, including the Vale Cup 2013 Open Volleyball Tournament, held January 3-12, in which 11 men's teams and 10 women's teams participated.

Februari / February



Penanganan Demam Berdarah
Fighting Dengue Fever

Sejak Januari hingga Februari 2013, Rumah Sakit Inco, tercatat menangani 17 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD). Jumlah ini mengalami penurunan dari periode yang sama pada tahun lalu, yakni sebanyak 44 kasus.

In January and February, Inco Hospital treated 17 cases of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF), considerably fewer than the 44 cases seen during the same period of 2012.

Salah satu faktor yang berperan adalah kampanye pencegahan DBD yang dilakukan selama 2012 di empat wilayah pemberdayaan PT Vale. Dalam mendukung kegiatan kampanye ini, PT Vale bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Luwu Timur, pemerintah Kecamatan, tim posyandu, aparat desa, dan warga dari Towuti, Wasuponda, dan Nuha, untuk melakukan aksi pemberantasan sarang nyamuk.

Several factors contributed to the decrease, a significant one being the ongoing Anti-Dengue educational campaigns undertaken in PT Vale's four empowerment areas during 2012. To support the campaigns, PT Vale, together with the East Luwu Health Office, government and village officials from Towuti, Wasuponda, and Nuha sub-district, the posyandu (baby clinics) team, and community members carried out mosquito nest eradication.



Konferensi Internasional dan Eksibisi CSR ke-4:
Beyond CSR: A Way of Life /
The 4th International Conference & Exhibition
on Corporate Social Responsibility: Beyond
CSR: A Way of Life
13-14 Maret/March 13-14

Maret / March

PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) berpartisipasi dalam "The 4th International Conference & Exhibition on Corporate Social Responsibility". Acara ini digelar untuk meningkatkan kesadaran publik akan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan mengenai keberadaan perusahaan, selain sebagai wadah bagi para pelaku CSR perusahaan dan pemangku kepentingan terkait untuk bertukar pikiran dan pengalaman. Konferensi ini juga menekankan pentingnya penerapan kebijakan CSR secara terpadu dengan kegiatan operasi demi keberlanjutan operasional perusahaan.

PT Vale participated in the Fourth International Conference & Exhibition on Corporate Social Responsibility (CSR), which was held to promote public awareness of the social, economic and environmental impacts of corporations. Corporation CSR representatives and interested stakeholders were encouraged to exchange their ideas and experiences, and there was a focus on the importance of integrating ethically applied CSR policies into operations in order to provide for a corporation's continuing success.

April / April



Uji Kompetensi Jurnalis
Journalist Competency Test

Jurnalis, salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis. Selain bertugas menyediakan berita dan opini terhadap isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat, jurnalis juga berperan dalam menyebarkan informasi mengenai kegiatan Perseroan pada publik. Untuk mendorong dan meningkatkan kemampuan jurnalis, PT Vale memfasilitasi pelaksanaan Uji Kompetensi Jurnalistik (UKJ) bagi jurnalis media cetak, online, dan penyiaran lokal serta nasional yang bertugas di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan pada bulan April dan Mei 2013. UKJ diikuti oleh 30 jurnalis dari Sulawesi Tengah dan 27 jurnalis dari Sulawesi Selatan.

Journalists, are strategic partners of the Company. Aside from reporting on news and commenting on topics of local interest, they provide information to the public about our company's activities. To affirm and promote excellence in journalism, PT Vale facilitated a Journalism Competency Test (UKJ) for journalists in print, online and broadcast media, both local and national. The test was held in Central Sulawesi and South Sulawesi during April and May, and was attended by 30 journalists from Central Sulawesi province and 27 journalists from South Sulawesi.

Sekilas tahun ini
The year at a glance

Sekilas tahun ini
The year at a glance

Mei / May



238 Pelajar Luwu Timur Menerima Beasiswa
238 East Luwu Students Get Scholarships

Pendidikan menjadi perhatian utama dalam kegiatan dan kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vale. Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang digelar di Lapangan Upacara Soekarno-Hatta, Malili pada tanggal 2 Mei 2013, PT Vale kembali meluncurkan program "Beasiswa Berprestasi 2013" bagi pelajar se-Luwu Timur. Beasiswa diberikan kepada 238 pelajar yang berasal dari tingkat SD/ sederajat sampai SMA/ sederajat. Penerima beasiswa dengan total nilai Rp82.300.000 tersebut meliputi 159 siswa dari tingkat SD/MIB, SMP/MTS sebanyak 49 siswa, dan SMA/MA sebanyak 30 siswa.

Education gets priority attention in PT Vale's Corporate Social Responsibility (CSR) policies and activities. During the observance of National Education Day, held at Soekarno-Hatta plaza, Malili on May 2, 2013, PT Vale launched its annual program "Scholarship for Achievers," for students in East Luwu. The scholarship was awarded to 238 students from elementary level through high school. Receiving scholarships, which totaled Rp82.3 million, were 159 elementary students, 49 junior school students and 30 senior school students.

Juni / June



Stand PT Vale Meraih Dua Penghargaan di PLI 2013 / PT Vale's Booth Awarded Two Trophies in PLI 2013

Stan PT Vale pada Pameran Lingkungan Indonesia (PLI) 2013 mendapatkan dua penghargaan atas rangkuman kinerja lingkungan dan sosial yang komprehensif. Penghargaan tersebut adalah stand terbaik dalam kategori "Perusahaan" dan "Corporate Social Responsibility".

PLI 2013 dibuka Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya, dan berlangsung pada tanggal 30 Mei-2 Juni 2013 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta. Lebih dari 100 peserta dari kalangan pemerintahan dan swasta berpartisipasi dalam acara ini.

PT Vale's booth at the Indonesian Environment Week (PLI) 2013 was awarded two trophies for its comprehensive presentation of our environmental and social performance. The award was for having the best booth in the "Companies" category and in the "Corporate Social Responsibility" category.

The Minister of Environment, Balthasar Kambuaya, opened PLI 2013, which was held from May 30 to June 2 at Jakarta Convention Center. More than 100 participants attended, representing governments and the private sector.

Juli / July



Peluncuran resmi Vale.com/Indonesia
Vale.com/Indonesia Officially Launched

Mulai 16 Juli 2013, situs valeindonesia.co.id tidak lagi digunakan dan diganti dengan vale.com/indonesia. Situs baru ini menjadi jendela bagi dunia luar untuk melihat PT Vale Indonesia.

Beginning July 16, we ceased using the website, valeindonesia.co.id, replacing it with our new website, vale.com/indonesia. The new site provides a window for the outside world to see PT Vale Indonesia.

Agustus / August



Koran Sindo: PT Vale Masuk 50 Perusahaan Publik Berpengaruh
Sindo Newspaper: PT Vale is One of the Top 50 Public Companies

Koran Sindo (Seputar Indonesia) memasukkan PT Vale sebagai salah satu dari 50 perusahaan terbuka berpengaruh di Indonesia. Pemberian penghargaan dilakukan pada Jumat, 30 Agustus 2013 di Kunstkring Palais, Jl. Teuku Umar 1, Jakarta dalam acara Malam Apresiasi bagi 50 perusahaan berprestasi terbaik di Indonesia.

The newspaper Seputar Indonesia included PT Vale as one of the 50 most influential publicly listed companies in Indonesia. The award was delivered on August 30 in Kunstkring Palais, Jl. Teuku Umar 1, Jakarta during an Appreciation Night for Indonesia's top 50 companies in achievement excellence.

Acara tersebut dihadiri ratusan tamu dari kalangan pengusaha, politisi, pengamat ekonomi, tokoh masyarakat, dan media.

The event was attended by hundreds of guests from the business community, politicians, economists, community leaders and the media.

September / September



Tim RS Inco Menjadi Juara dalam Lomba Resusitasi Trauma / Inco Hospital Team are Champions in the Trauma Resuscitation Competition

27 September 2013 menjadi hari yang istimewa bagi keluarga besar Rumah Sakit Inco. Hari itu, tim yang mewakili RS Inco meraih peringkat pertama dalam ajang lomba Resusitasi Trauma dalam "1st International Conference on Emergency Medicine In Indonesia" yang berlangsung di Malang, Jawa Timur.

September 27 was a joyful day at Inco Hospital. The hospital team was chosen champion after it took first place in the Trauma Resuscitation Competition during the First International Conference on Emergency Medicine in Indonesia, held in Malang, East Java.

Selain mendapatkan peringkat pertama, tim tersebut juga mendapat trofi "Best Performance Team" setelah mengalahkan 7 rumah sakit lainnya yang seluruhnya merupakan rumah sakit terkemuka di Pulau Jawa.

Besides first place, the team was also awarded with the "Best Performance" trophy after beating seven other major hospitals in Java.

Sekilas tahun ini The year at a glance

Sekilas tahun ini The year at a glance

Oktober / October



Peluncuran Beasiswa Komunitas PT Vale / PT Vale's Community Scholarships Launched

PT Vale mengokohkan dan memperluas komitmennya terhadap pengembangan masyarakat PT Vale di bidang pendidikan dengan meluncurkan Program Beasiswa Komunitas 2013 yang dilaksanakan di aula kantor Bupati Luwu Timur pada Rabu, 17 Oktober 2013 lalu.

Fokus Beasiswa Komunitas 2013 membidik mahasiswa tingkat Diploma, S1, S2, Program Kedokteran Spesialis, dan S3 sebagai penerima beasiswa. Sedangkan pada tahun-tahun lalu, penerima beasiswa difokuskan kepada pelajar tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

PT Vale reaffirmed and expanded upon its commitment to community development, especially education, by launching the 2013 Community Scholarship Program at the hall of East Luwu regent's office on October 17, 2013.

The scholarship program is now available to students of diploma level, undergraduate, post-graduate, medical specialist, and doctorate degrees. Previously, the scholarships had been restricted to elementary and high school students, who will continue to be eligible for the awards.

November / November



Strategi dan visi terbaik / Best in Strategy and Vision

Pada 28 November 2013, PT Vale meraih penghargaan sebagai perusahaan terbaik kategori strategi dan visi (strategy and vision) dalam Sustainable Business Awards (SBA) 2013. SBA digagas oleh Indonesian Business Council for Sustainable Development (IBC-SD) untuk menghargai upaya-upaya dan kepemimpinan dalam praktik bisnis secara berkelanjutan.

Penghargaan diserahkan oleh Kepala Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Armida Alisjahbana, di Hotel Shangri-La, Jakarta dan diterima oleh Vice President PT Vale, Bernardus Irmanto. Acara pemberian penghargaan dihadiri oleh sekitar 400 delegasi yang mewakili berbagai perusahaan, baik perusahaan nasional maupun multinasional.

On November 28, PT Vale won an award as the best company in the Strategy and Vision category of the 2013 Sustainable Business Awards (SBA). The SBAs were initiated by the Indonesian Business Council for Sustainable Development (IBC-SD) to recognize sustainable business best practices and leadership among Indonesian companies.

The award was presented by the Head of Bappenas (National Development Planning Agency), Armida Alisjahbana, at the Shangri-La Hotel, Jakarta, and was received by PT Vale's Vice President Bernardus Irmanto. The award ceremony was attended by about 400 delegates representing various national and multinational companies.

November / November



PT Vale Meraih Aditama dan Penghargaan Terbaik dalam Strategi dan Visi / PT Vale Receives Aditama and the Best in Strategy and Vision

Setelah tahun lalu meraih perak (Utama) dalam penilaian pengelolaan lingkungan pertambangan yang dilakukan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada 2013 PT Vale berhasil meraih penghargaan emas (Aditama). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Ir. Bambang Susigit, MT, di Hotel Ciputra Jakarta, Jumat, 29 November 2013.

Having achieved a Silver award (Utama) in last year's environmental management assessment, conducted by the Ministry of Energy and Mineral Resources, this year, PT Vale surpassed that distinction by winning the Gold award (Aditama). The award was presented by Ir. Bambang Susigit, MT, Director of Engineering and Environment, of Directorate General of Mineral and Coal, of Ministry of Energy and Mineral Resources at Hotel Ciputra Jakarta on November 29.

Desember / December



PT Vale Menerima Peringkat Biru dalam PROPER 2012-2013 / PT Vale Received Blue Rating in PROPER 2012-2013

PT Vale Indonesia Tbk kembali mempertahankan peringkat Biru dalam penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) periode 2012-2013. Hasil ini diumumkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Prof. DR. Balthasar Kambuaya, MBA pada 10 Desember di Jakarta. PT Vale menjadi salah satu dari 1.812 perusahaan yang dinilai oleh tim PROPER, meliputi sektor manufaktur, pertambangan, migas dan energi, agro industri, dan jasa.

PT Vale Indonesia Tbk has maintained its Blue rating in the latest assessment of Company Performance in Environmental Management (PROPER) 2012-2013. The rating was announced in Jakarta by the Minister of Environment, Prof. DR. Balthasar Kambuaya, MBA, on December 10. PT Vale was one of the 1,812 companies assessed by the PROPER team during their examination of manufacturing; mining; oil, gas and energy; agro-industrial; and services sectors.

Penghargaan dan apresiasi

Awards and special recognition

Penghargaan dan apresiasi

Awards and special recognition



Penghargaan Aditama untuk Pengelolaan Lingkungan Pertambangan dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral

Aditama awards for Environmental Management Assessment by the Ministry of Energy and Mineral Resources



Kementerian Lingkungan menilai PT Vale Indonesia pada kategori BLUE dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) / Company's Environmental Management Rating Program by Ministry of Environment rated PT Vale Indonesia in BLUE category



PT Vale mendapatkan dua penghargaan pada Pameran Lingkungan Indonesia (PLI) 2013. Penghargaan tersebut adalah stand terbaik kategori perusahaan dan kategori Corporate Social Responsibility (CSR).

PT Vale received two trophies at the Pameran Lingkungan Indonesia (Indonesia Environment Expo) 2013 for having the best booth in the "Companies" category and in the "Corporate Social Responsibility" category.



Salah satu dari 50 perusahaan terbuka berpengaruh di Indonesia

One of the 50 most influential listed companies in Indonesia



Sertifikat Lisensi untuk Lembaga Sertifikasi Profesi PT Vale Indonesia Tbk diberikan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)

License Certificate for Profession Certification Body of PT Vale Indonesia Tbk from BNSP (Indonesian National Profession Certification Body)



Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kab. Luwu Timur memberikan penghargaan kepada RS Inco PT Vale Indonesia atas partisipasinya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Luwu Timur

AIDS Prevention Commission (KPA) of East Luwu Regency awarded Inco Hospital of PT Vale Indonesia for its participation in the HIV/AIDS prevention effort in the East Luwu Regency



The Sustainable business award 2013 Jakarta 28 November 2013 Award Ceremony II – Category Winners – Strategy and Vision

The Sustainable business award 2013 Jakarta 28 November 2013 Award Ceremony II – Category Winners – Strategy and Vision



Pada "1st International Conference on Emergency Medicine in Indonesia" yang diselenggarakan tanggal 27 September 2013 di Malang, Jawa Timur, Rumah Sakit Inco meraih peringkat pertama dalam kompetisi Resusitasi Trauma dan mendapatkan trophi sebagai "Best Performance".

At the "1st International Conference on Emergency Medicine in Indonesia" held on September 27, 2013 in Malang, East Java, Inco Hospital took first place in the Trauma Resuscitation Competition and was awarded a trophy in the "best performance" category.

Visi, misi, dan nilai-nilai kami

Our vision, mission and values

Kami adalah perusahaan pertambangan. Namun keberhasilan kami tidak diukur dari berapa ton hasil tambang yang kami hasilkan atau berapa besar aset kami yang tercatat di neraca. Keberhasilan kami diukur dari kemampuan kami beroperasi dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang telah mempercayai kami.

Kami mengutamakan keselamatan di atas segalanya. Kami mencari solusi inovatif untuk memperbaiki dan memperluas bisnis kami dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial maupun lingkungan hidup. Kami bertindak berdasarkan etika dan dengan transparan. Kami hadapi tantangan terberat sekalipun, dan kami akan bekerja sama untuk mengubah tantangan tersebut menjadi peluang.

Ini kami lakukan karena kami sadar bahwa untuk tumbuh lebih kuat kami harus tumbuh dengan berkelanjutan. Itu sebabnya kami terus berinvestasi dalam bisnis, tenaga kerja dan masyarakat sekitar kami, agar kami dapat memberikan hasil terbaik bagi para pemegang saham kami dengan tetap berpegang pada nilai-nilai yang membimbing karyawan dan perusahaan kami.

We are a mining company. But our success is not measured in tons, or on a balance sheet. It is measured by our ability to operate in the very best interests of all who entrust us to do so.

We put safety first, above all else. We seek innovative solutions to improve and expand our business in an environmentally and socially responsible manner. We are ethical, and we act with transparency. We take on the toughest challenges, and we work together to turn those challenges into opportunities.

We do these things because we recognize that, to grow stronger, we must grow sustainably. That is why we continue to invest in our business, our people and our communities – so that we can deliver excellent returns to our shareholders in a way that ensures we hold true to the values that guide our people and our company.

VISI

Vision

Menjadi perusahaan sumber daya alam nomor satu di Indonesia yang menggunakan standar global dalam menciptakan nilai jangka panjang, melalui keunggulan kinerja dan kepedulian terhadap manusia dan alam.

To be Indonesia's number one natural resources company in creating long-term value, through excellence and passion for people and the planet, according to global standards.

Misi

Mission

Mengubah sumber daya alam menjadi kemakmuran dan pembangunan yang berkelanjutan.

To transform natural resources into prosperity and sustainable development.

Nilai-nilai

Our Values

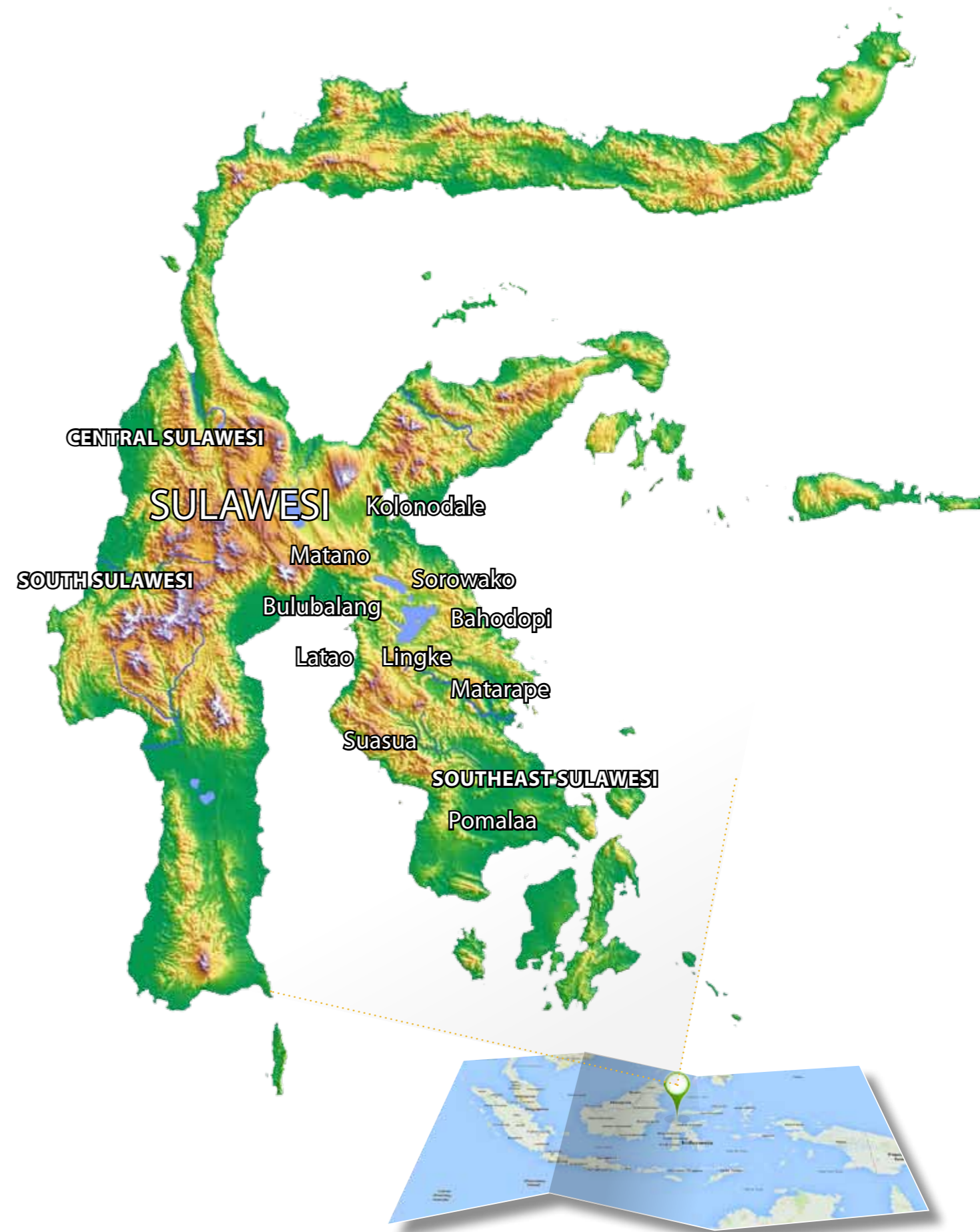
Kehidupan adalah hal yang terpenting <i>Life matters most</i>	Keselamatan jiwa lebih penting daripada keuntungan materi semata.	<i>Life is more important than results and material goods.</i>
Menghargai karyawan <i>Value our people</i>	Membimbing dan membuka peluang bagi perkembangan individu, memberikan penghargaan terhadap prestasi seseorang tanpa memandang latar belakang mereka, mendukung keberagaman dan mengakui aspirasi serta kebutuhan individu.	<i>Nurture and enable personal growth, reward accomplishments regardless of individual background, promote diversity, and recognize individual aspirations and needs.</i>
Menjaga kelestarian bumi <i>Prize our planet</i>	Komitmen terhadap perkembangan masyarakat, lingkungan dan ekonomi dalam berbagai keputusan bisnis.	<i>Commitment to social, environmental, and economic development in business decisions.</i>
Melakukan hal yang benar <i>Do what is right</i>	Mendukung kepercayaan yang didasarkan pada komunikasi yang terbuka dan jelas, bertindak adil, penuh integritas dan tunduk terhadap aturan hukum.	<i>Promote trust-based, open and clear communication, acting fairly, with integrity and in compliance with the law.</i>
Bersama-sama menjadi lebih baik <i>Improve together</i>	Berjuang untuk terjalannya kerja sama, peningkatan dan inovasi yang terus-menerus, penegakan disiplin kerja untuk meningkatkan nilai-nilai jangka panjang.	<i>Strive for collaboration, continuous improvement, innovation and discipline in the way we work to generate long-term value.</i>
Mewujudkan tujuan <i>Make it happen</i>	Suka tantangan, kemampuan beradaptasi, bangga atas prestasi dan apa yang telah dilakukan dalam membentuk dunia.	<i>Thrill for challenges, ability to adapt, pride in results and shaping the world</i>

Memahami bisnis kami

Understanding our business

PT Vale memproduksi nikel dalam matte dari bijih lateritik pada fasilitas-fasilitas penambangan dan pengolahan terpadu kami di dekat Sorowako di Pulau Sulawesi. Seluruh produksi kami dijual berdasarkan kontrak jangka panjang dalam denominasi dollar AS.

PT Vale produces nickel in matte from lateritic ores at our integrated mining and processing facilities near Sorowako on the island of Sulawesi. Our entire production is sold in US dollars under long-term contracts.



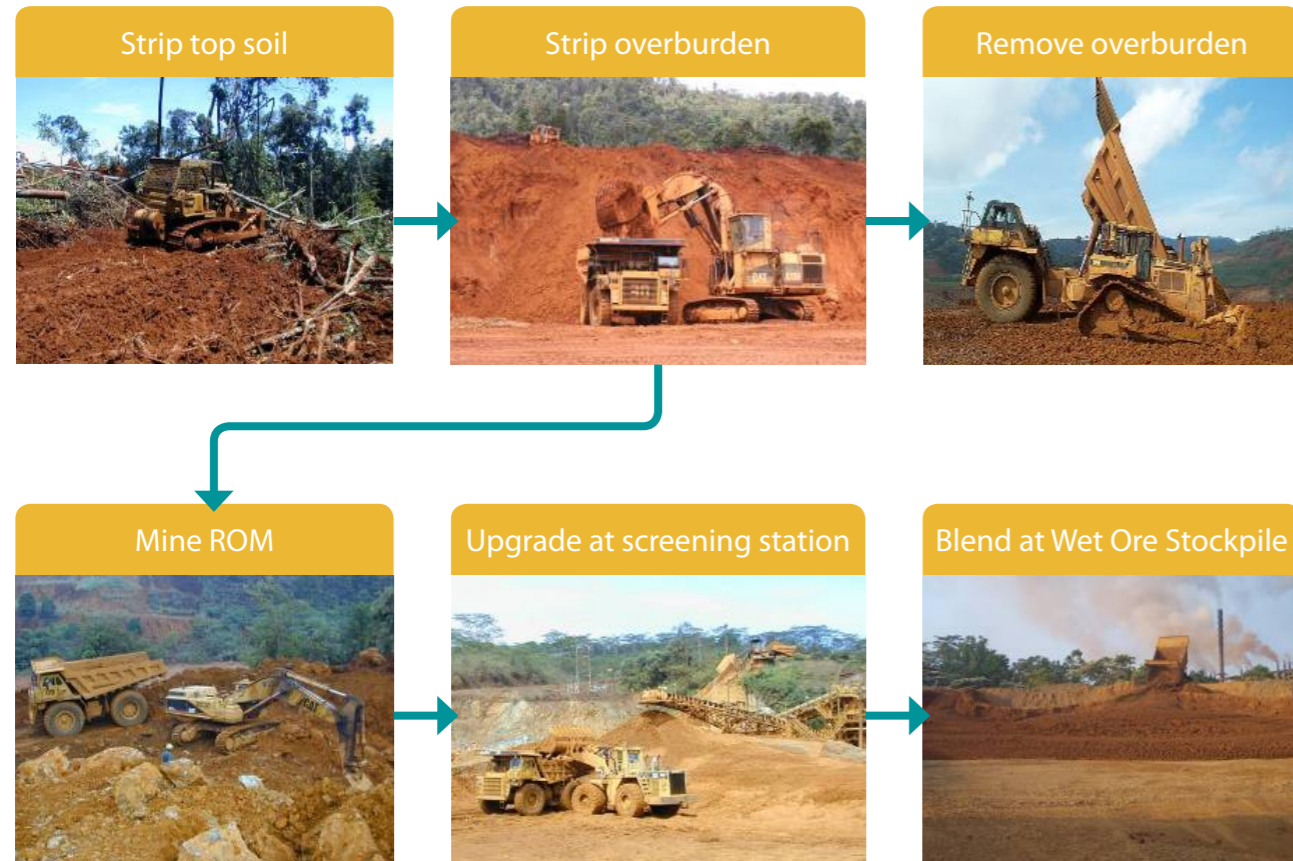
Faktor-faktor fundamental dalam bisnis kami adalah:

1. Harga produk kami ditentukan di London Metal Exchange (LME) dan tergantung dengan kondisi ekonomi global. Pendapatan kami terkait secara langsung dengan harga nikel di LME.
2. Biaya terbesar kami adalah pembelian High Sulphur Fuel Oil (HSFO). Kami tidak dapat mengendalikan sepenuhnya harga HSFO tersebut.
3. Berdasarkan kedua fakta tersebut, kami harus bisa mengelola biaya-biaya kami lainnya yang cukup signifikan dengan lebih baik, seperti tenaga kerja serta jasa dan kontrak agar dapat memaksimalkan potensi pendapatan kami.
4. Selain pengelolaan biaya, kami juga berinvestasi dalam peningkatan efisiensi dan kinerja operasional, termasuk investasi pada karyawan kami.

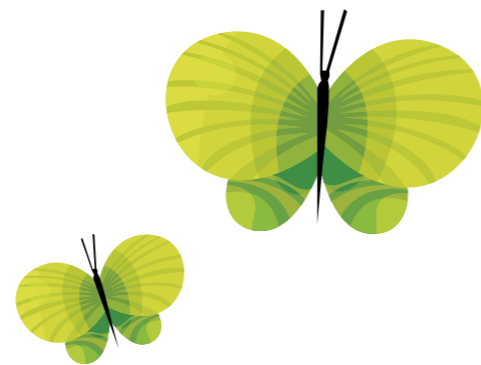
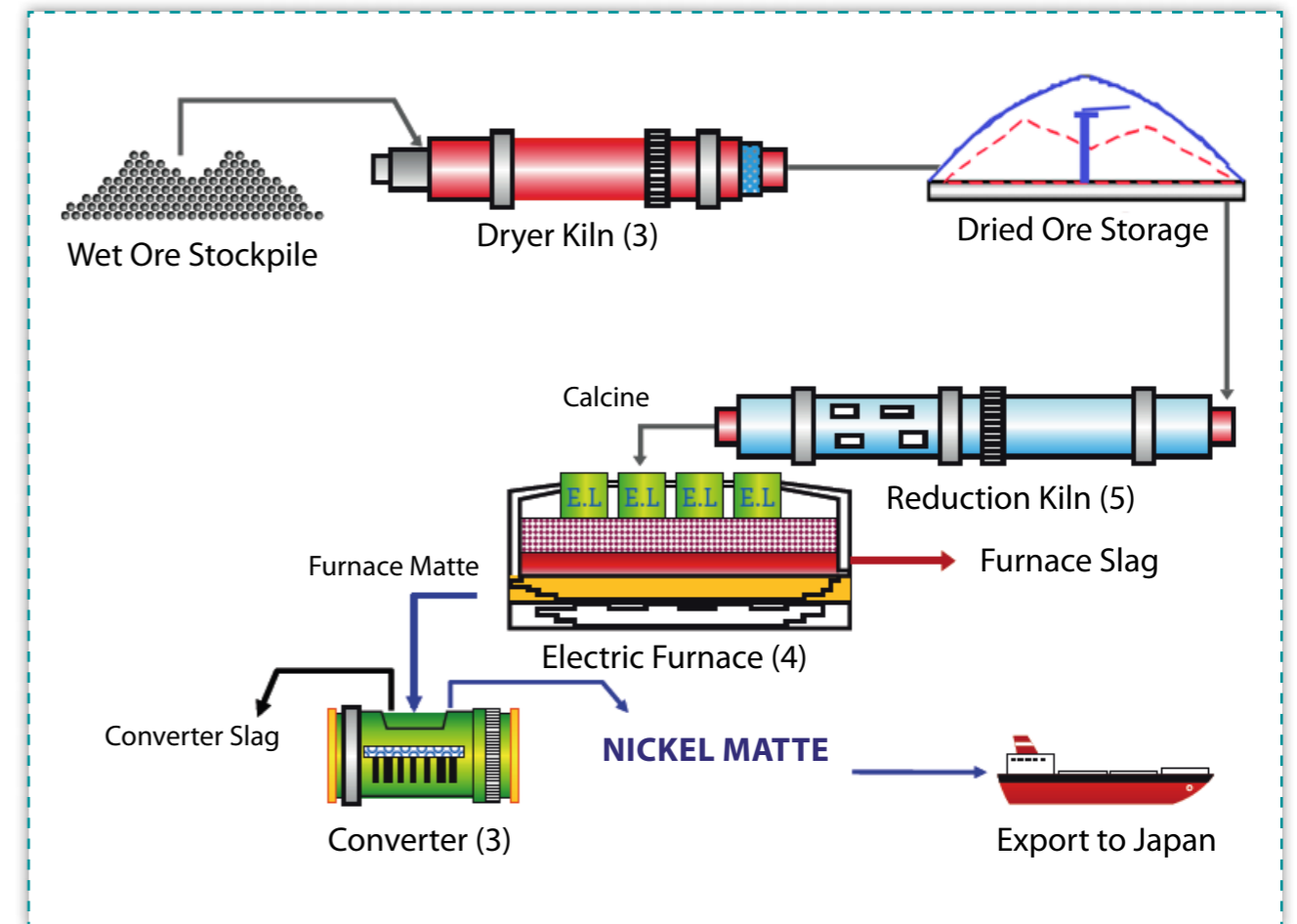
The underlying fundamentals of our business are these:

1. The price of our product is established on the London Metal Exchange and is subject to global economic conditions. Our revenue is tied directly to the price of nickel set by the LME.
2. Our most significant cost is High Sulphur Fuel Oil. We cannot control the price we pay for it.
3. Given these two facts, we must work diligently to manage our other significant costs – like labour, service and contract – to ensure we maximize our earnings.
4. In addition to managing costs, we invest in the efficiency of our operations, including investment in our people, to optimize operational performance.

Proses penambangan Mine process



Proses dari bijih menjadi nikel dalam matte From ore to nickel in matte



Kontrak Karya kami

Our Contract of Work

Kontrak Karya kami

Our Contract of Work

Didirikan pada bulan Juli 1968, PT Vale merupakan perusahaan asing yang memiliki lisensi dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan eksplorasi, penambangan, pengolahan dan produksi nikel. Saat ini, kami beroperasi di pulau Sulawesi di bawah perjanjian Kontrak Karya (KK) dengan Pemerintah Indonesia pada areal Kontrak Karya seluas hampir 190.510 hektar.

Established in July 1968, PT Vale is a foreign investment company with a license from the Government of Indonesia to explore, mine, process and produce nickel. We currently operate in Sulawesi Island under a Contract of Work (CoW) agreement with the Indonesian Government. Our CoW area is nearly 190,510 hectares (ha) in total.

Propinsi Province	Blok Konsesi Concession Block	Hektar Hectare (ha)
Sulawesi Tengah / Central Sulawesi (Total: 36,635.36 ha or 19.23%)	Kolonodale	4,512.35
	Bahodopi	32,123.01
Sulawesi Selatan / South Sulawesi (Total: 118,386.45 ha or 62.14%)	Sorowako-Towuti	108,377.25
	Matano	6,176.48
	Bulubalang Lingke	2,249.33 1,584.39
Sulawesi Tenggara / Southeast Sulawesi (Total: 35,486.35 ha or 18.63%)	Latao	3,148.11
	Matarape	1,679.87
	Pomalaa Suasua	20,286.19 10,372.68
TOTAL		190,509.66

Konsesi awal diperoleh pada 27 Juli 1968 untuk areal seluas 6,6 juta hektar di bagian timur dan tenggara Sulawesi. Luas konsesi kami kemudian berkurang menjadi 2,9% akibat serangkaian pelepasan areal konsesi, terakhir kalinya yaitu pada 10 Desember 2009.

The original concession of 6.6 million ha, covering the eastern and southeastern arms of Sulawesi, was granted on July 27, 1968. The concession area has been reduced to 2.9% of the original size under a series of relinquishments, the last of which occurred December 10, 2009.

KK awal berlaku hingga 31 Maret 2008. Melalui Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan yang ditandatangani pada bulan Januari 1996, KK tersebut telah diubah dan diperpanjang masa berlakunya hingga 28 Desember 2025.

The original CoW was valid until March 31, 2008. It was modified and extended by the Agreement on Modification and Extension signed in January 1996 and is now valid until December 28, 2025.

PT Vale, sebagai kontraktor tunggal Pemerintah Indonesia di areal KK, memiliki hak eksklusif di beberapa wilayah yang telah ditentukan di Sulawesi untuk melakukan eksplorasi, pengembangan, penambangan, pengolahan, penimbunan, pengangkutan dan penjualan nikel

PT Vale, as the sole contractor of the Government in the areas covered by the CoW, has been granted exclusive rights in specified areas on the Island of Sulawesi to explore, develop, mine, process, store, transport and sell all nickel and nickel-containing minerals in any form and all minerals found in association with nickel in the CoW

maupun mineral lain terkait nikel yang terdapat di areal KK. Kontrak Karya tersebut juga memberikan PT Vale semua lisensi dan perijinan yang diperlukan untuk operasinya, termasuk perluasan operasi sebagaimana diatur dalam KK. Selain itu, Pemerintah dapat tidak menyetujui rencana pembangunan, operasi maupun perluasan kami berdasarkan pertimbangan tertentu yang diatur dalam KK. Terkait pelaksanaan haknya sesuai KK, PT Vale dalam beberapa situasi tertentu diharuskan untuk memperoleh lisensi dan perijinan dari berbagai kementerian maupun pemerintahan di berbagai tingkat.

The CoW also grants PT Vale all necessary licenses and permits to conduct its operations, including certain expansions of our operations, as provided for in the CoW. Additionally, the Government may disapprove plans for construction, operations or expansions based on certain limited grounds regulated in the CoW. In exercising its rights under the CoW, PT Vale has been required to secure permits and licenses in certain circumstances from various government ministries and various levels of government.

Cadangan mineral

Setiap tahun, kami memberikan perkiraan Cadangan mineral Terduga dan Terbukti serta data terkait untuk areal dalam Kontrak Karya kami. Perkiraan ini sangat penting untuk menunjang bisnis kami karena perkiraan ini dapat memberi gambaran mengenai penelitian investasi dan perencanaan pengembangan operasional kami.

Mineral reserves

Every year, we provide our estimates of Proven and Probable Nickel Mineral Reserves and related data for our CoW area. These estimates are critical to our business as they inform our investment, research and development operations planning.

Cadangan Bijih (dalam juta metrik ton (mt)) Mineral Reserves (in million metric tons (mt))	Per 31 Desember 2013 As of Dec 31, 2013		Per 31 Desember 2012 As of Dec 31, 2012	
	Mt	% Ni grade	Mt	% Ni grade
Terbukti Proven	94.2	1.81	65.8	1.84
Terduga Probable	33.3	1.74	39.1	1.70
Total Terduga dan Terbukti Total Proven and Probable	127.5	1.79	104.9	1.78

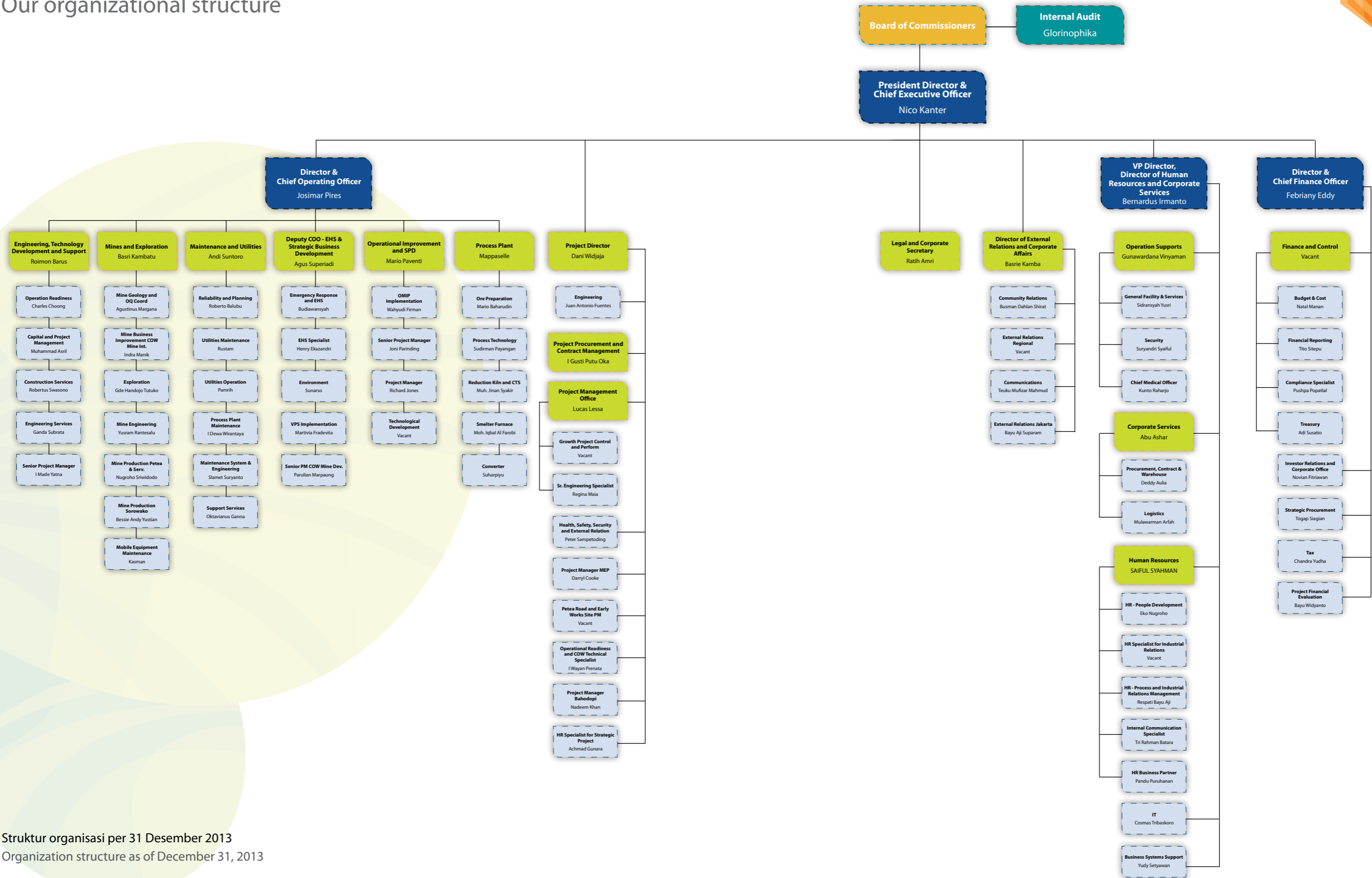
Lihat Pembahasan dan Analisa Manajemen - bagian Pandangan Tahun 2014 untuk penjelasan lebih lanjut mengenai data ini.

Please refer to the Management's Discussion and Analysis – 2014 Outlook for a detailed explanation of this data.



Struktur organisasi kami

Our organizational structure



Struktur organisasi per 31 Desember 2013
Organization structure as of December 31, 2013



LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

Reports to shareholders



Dewan Komisaris Board of Commissioners

Dewan Komisaris Kami

Dewan Komisaris PT Vale memantau manajemen Perseroan dalam menjalankan bisnis Perseroan. Dewan Komisaris memperhatikan hal-hal yang terkait dengan keuangan, operasional serta lingkungan dan tanggung jawab sosial dan memberikan teladan dalam mempraktikkan tata kelola perusahaan yang mumpuni.

Our Board of Commissioners

The Board of Commissioners provides stewardship to PT Vale's business. They oversee financial, operational, environmental and social responsibility matters, and take a leadership role in ensuring excellence in corporate governance practices.



Ricardo de Carvalho
Presiden Komisaris President Commissioner

Kewarganegaran : Brazil
Citizenship : Brazilian
Lahir Born : 1957
Sebagai komisaris sejak Commissioner since : 2012
Ketua Komite Tata Kelola Perusahaan
Chairman of the Corporate Governance Committee



Arief T. Surowidjojo
Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen
Vice President Commissioner and Independent Commissioner

Kewarganegaran : Indonesia
Citizenship : Indonesian
Lahir Born : 1953
Sebagai komisaris sejak Commissioner since : 2009
Ketua Komite Audit Chairman of the Audit Committee
Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan Member of the Corporate Governance Committee



Kevin Graham
Komisaris Commissioner

Kewarganegaran : Kanada
Citizenship : Canadian
Lahir Born : 1978
Sebagai komisaris sejak Commissioner since : 2013



Jennifer Maki
Komisaris Commissioner

Kewarganegaran : Kanada
Citizenship : Canadian
Lahir Born : 1970
Sebagai komisaris sejak Commissioner since : 2007



Akira Nozaki
Komisaris Commissioner

Kewarganegaran : Jepang
Citizenship : Japanese
Lahir Born : 1960
Sebagai komisaris sejak Commissioner since : 2013



Mikinobu Ogata
Komisaris Commissioner

Kewarganegaran : Jepang
Citizenship : Japanese
Lahir Born : 1954
Sebagai komisaris sejak Commissioner since : 2012
Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan Member of the Corporate Governance Committee



Peter Poppinga
Komisaris Commissioner

Kewarganegaran : Brazil
Citizenship : Brazilian
Lahir Born : 1959
Sebagai komisaris sejak Commissioner since : 2009



Mark Travers
Komisaris Commissioner

Kewarganegaran : Kanada
Citizenship : Canadian
Lahir Born : 1966
Sebagai komisaris sejak Commissioner since : 2009
Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan Member of the Corporate Governance Committee



Irwandy Arif
Komisaris Independen Independent Commissioner

Kewarganegaran : Indonesia
Citizenship : Indonesian
Lahir Born : 1951
Sebagai komisaris sejak Commissioner since : 2010



Idrus A. Paturusi
Komisaris Independen Independent Commissioner

Kewarganegaran : Indonesia
Citizenship : Indonesian
Lahir Born : 1950
Sebagai komisaris sejak Commissioner since : 2012

Laporan Dewan Komisaris Report of the Board of Commissioners

Strategi inovatif untuk pertumbuhan akan menjamin keberlanjutan kegiatan operasional PT Vale dan kemakmuran jangka panjang bagi negara dan seluruh rakyat Indonesia. PT Vale berkomitmen membangun kesuksesan bersama.

An innovative strategy for growth will ensure the sustainability of PT Vale's operations and long-term prosperity for Indonesia and its people. PT Vale is committed to mutual success.

Pemangku kepentingan yang terhormat,

Dengan bangga kami mempersembahkan laporan mengenai aktivitas dan pencapaian PT Vale pada tahun 2013 serta strategi Perseroan untuk keberlanjutan pertumbuhan pada tahun 2014 dan tahun-tahun mendatang.

Sebagai perusahaan pertambangan nikel, harga produk PT Vale ditentukan oleh harga nikel di Bursa Logam London (LME). Artinya, Perseroan harus sepenuhnya fokus mengoptimalkan kualitas operasi demi kelangsungan usahanya sehingga Perseroan dapat tetap bertahan pada masa-masa sulit dan juga mengembangkan bisnisnya saat kondisi pasar membaik.

Strategi yang kami tempuh terbukti memberikan hasil yang efektif pada tahun 2013. Turunnya harga nikel, terutama akibat dari melimpahnya pasokan nikel di pasar, berdampak tidak hanya pada PT Vale, tetapi juga seluruh produsen nikel di dunia. Dalam kondisi ekonomi

Dear Stakeholders,

It is our pleasure to report to you PT Vale's activities and accomplishments for 2013 and the Company's strategy for continued growth in 2014 and beyond.

As a nickel mining company, the London Metal Exchange (LME) determines price of PT Vale's product. This means that to ensure the sustainability of its business, the Company must focus intently on optimizing its operational excellence so that it can maintain its position in challenging times and grow its business when market conditions are favourable.

The strategy proved effective in the 2013. Declining nickel price, due primarily to an excess supply of nickel to the market, affected not just PT Vale but nickel producers around the world. Within this challenging economic environment, the Company maintained

Ricardo de Carvalho
Presiden Komisaris
President Commissioner

yang penuh dengan tantangan ini, Perseroan tetap fokus pada kualitas operasi dan efisiensi serta kontrol biaya yang ketat.

Investasi pada sumber energi alternatif juga memberi keuntungan bagi PT Vale. Fasilitas PLTA Karebbe yang hemat biaya dan berjalannya Proyek Konversi Batubara tahap satu berhasil membantu Perseroan dalam meredakan tekanan akibat meningkatnya harga bahan bakar, yaitu melalui pengurangan biaya produksi produk per ton.

its focus on operational excellence and efficiency as well as rigorous cost containment.

PT Vale benefitted from investment in alternative forms of energy. The availability of its low-cost hydroelectric power from the Karebbe facility and the introduction of the first phase of the Coal Conversion Project helped to offset pressure from rising fuel costs by reducing production costs on a per ton basis.

Laporan Dewan Komisaris Report of the Board of Commissioners



Laporan Dewan Komisaris

Report of the Board of Commissioners

Komponen kedua dari strategi pertumbuhan jangka panjang Perseroan adalah memperluas operasi dalam wilayah Kontrak Karyanya. Uraian lengkap mengenai strategi ini tertuang dalam rencana yang kami sebut sebagai *Indonesia Growth Project*. Proyek ini membutuhkan dana investasi sekitar lebih dari AS\$2 milyar dalam waktu lima tahun, serta mencakup perluasan kegiatan operasional di Sorowako dan dimulainya operasi di Bahodopi. Investasi ini merupakan persiapan bagi investasi berikutnya guna mendukung rencana-rencana pengembangan operasi di Pomalaa, Sulawesi Tenggara.

Namun demikian, suksesnya pelaksanaan *Indonesia Growth Project* bergantung pada hasil proses renegotiasi Kontrak Karya yang kami lakukan. Sejak 2012 dan sepanjang tahun 2013, Direksi dan Presiden Komisaris PT Vale telah puluhan kali mengadakan rapat dengan para pihak dari pemerintah pusat dan daerah menegosiasikan kembali Kontrak Karya agar selaras dengan kepentingan seluruh pihak.

Undang-Undang Pertambangan tahun 2009 mewajibkan penyesuaian Kontrak Karya terhadap ketentuan perundangan tersebut, dan PT Vale secara proaktif dan tepat waktu telah melakukan serangkaian pembicaraan dengan Menteri, Gubernur maupun Bupati terkait. PT Vale merupakan salah satu perusahaan tambang yang pertama kali melakukan hal tersebut, dimana kami telah mempersiapkan strategi pertumbuhan yang komprehensif, yang di dalamnya mencakup program-program yang bermanfaat bagi Perseroan dan masyarakat sekitar. Strategi ini juga selaras dengan Program Pengembangan Masyarakat Perseroan yang berisi serangkaian inisiatif penting.

The second component of the Company's long-term growth strategy is to expand its operations within its Contract of Work (CoW) area. The specifics of this strategy are articulated in a plan called the *Indonesia Growth Project*. It calls for an investment of more than US\$2 billion over five years, and will include the expansion of operations in Sorowako and commencement of operations in Bahodopi. This investment will set the stage for further investment in support of plans to expand operations in Pomalaa, Southeast Sulawesi.

The implementation of the *Indonesia Growth Project*, however, is contingent on the successful renegotiation of the CoW. Beginning in 2012 and throughout 2013, members of PT Vale's Board of Directors and the President Commissioner met with representatives of central and local governments dozens of times to renegotiate the CoW that will align the interests of all parties.

The adjustment of the CoW is required by the 2009 Mining Law, and PT Vale has proactively, and in a timely manner, entered discussions with central government Ministers, Governors and Bupatis. PT Vale was one of the first mining companies to do so, and has prepared a comprehensive strategy that outlines a mutually beneficial plan for the Company and its local communities. This strategy also aligns with the Company's Community Development Plan, as it has important initiatives.

PT Vale menerapkan standar tata kelola terbaik dalam praktik dan proses bisnisnya

PT Vale applies a high standard of governance to its business practices and processes

Sesuai dengan komitmen kami pada transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik, PT Vale akan terus menginformasikan perkembangan upaya tersebut kepada pemegang saham dan para pemangku kepentingan.

Tata kelola perusahaan yang prima

Tata kelola perusahaan merupakan kerangka kerja kebijakan dan praktik yang berlaku dalam sebuah perusahaan yang memastikan adanya akuntabilitas, kewajaran dan transparansi dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan.

Kebijakan tata kelola perusahaan di PT Vale memberikan kerangka kerja yang kuat sehingga Dewan Komisaris dan Direksi dapat secara efektif mengawasi dan mengevaluasi operasional bisnis Perseroan, serta memastikan bahwa kegiatan tersebut selaras dengan tujuan-tujuan strategis yang ditetapkan maupun standar praktik lingkungan dan tanggung jawab sosial terbaik.

PT Vale menerapkan standar tata kelola terbaik dalam praktik dan proses bisnisnya sehingga para pemangku kepentingan eksternal kami - termasuk pihak pemerintah, mitra usaha, lembaga-lembaga

Laporan Dewan Komisaris

Report of the Board of Commissioners

In keeping with its commitment to transparency and good corporate governance, PT Vale will keep its shareholders and other stakeholders apprised of the progress toward that goal.

Excellence in Corporate Governance

Corporate governance is the framework of rules and practices by which a company ensures accountability, fairness and transparency in its relationships with all of its stakeholders.

PT Vale's corporate governance policies ensure that a strong framework is in place so that the Board of Commissioners and Board of Directors are able to effectively review and evaluate the Company's business operations to ensure they meet strategic objectives and reflect environmental and social responsibility best practices.

PT Vale applies a high standard of governance to its business practices and processes. In so doing, the Company's external stakeholders – including governments, business partners, non-governmental

Laporan Dewan Komisaris

Report of the Board of Commissioners

non-pemerintah, serikat pekerja dan investor di pasar modal – optimis bahwa kami beroperasi dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan standar etika bisnis tertinggi sebagaimana layaknya sebuah perusahaan publik terkemuka.

Manajemen

Selain untuk memberikan masukan maupun pengarahan, Komisaris Independen pada jajaran Dewan Komisaris menggelar rapat bulanan dengan Presiden Direktur untuk memperoleh informasi mengenai kemajuan PT Vale. Hubungan kerja sama yang terbuka antara Dewan Komisaris dan Direksi PT Vale terjalin dengan sangat baik dan menjadi contoh komitmen kami pada tata kelola perusahaan.

Direksi PT Vale juga telah menunjukkan kepemimpinan yang mumpuni sepanjang tahun ini. Tiap Direktur menerapkan pengalaman dan keahliannya dalam bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu dalam kepengurusan dan operasional Perseroan. Secara bersama-sama, Direksi merupakan satu tim profesional yang terpadu dan efektif yang akan terus memimpin Perseroan dengan baik pada tahun mendatang.

Perubahan komposisi Dewan Komisaris

Anggaran Dasar PT Vale menetapkan bahwa Dewan Komisaris terdiri dari minimum 10 dan tidak lebih dari 15 komisaris. Saat ini, komisaris Perseroan berjumlah 10 orang, termasuk tiga orang Komisaris sebagai anggota independen.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan pada 23 April 2013, pemegang saham menerima pengunduran diri Conor Spollen sebagai Komisaris dan mengangkat Kevin Graham sebagai

agencies, labour unions and public market participants – can be assured that it operates with transparency, accountability and the highest ethical standards demanded of leading public companies.

Management

The Board's Independent Commissioners meet with the President Director monthly to receive information regarding PT Vale's undertakings, and to offer their input and objective guidance. The open, collaborative relationship between the Boards of Commissioners and Directors at PT Vale is an excellent practice and a vibrant illustration of commitment to excellence in corporate governance.

PT Vale's Board of Directors has demonstrated outstanding leadership during the year. Each Director assumes responsibility for particular aspects of the Company's management and operation, and brings experience and expertise to their specific roles. Collectively, the Board of Directors is an effective and integrated team of professionals who will continue to lead the Company well in the coming year.

Changes to the composition of the Board of Commissioners

PT Vale's Articles of Association stipulate that the Board of Commissioners should consist of a minimum of 10 but not more than 15 commissioners. Currently, there are 10 Commissioners, including three independent Commissioners.

At the Company's Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on April 23, 2013, shareholders accepted the resignation of Mr. Conor Spollen as Commissioner, and approved the appointment of Mr.

penggantinya. Keputusan ini berlaku sejak ditutupnya RUPS ini hingga penutupan RUPST Perseroan selanjutnya pada 2014 mendatang.

Selain itu, pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diadakan pada 24 September 2013, pemegang saham turut menerima pengunduran diri Harumasa Kuokawa sebagai Komisaris dan menunjuk Akira Nozaki sebagai penggantinya. Keputusan ini berlaku sejak ditutupnya rapat ini hingga penutupan RUPST Perseroan selanjutnya pada 2014 mendatang.

Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris: Ricardo de Carvalho
Wakil Presiden Komisaris dan
Komisaris Independen: Arief T. Surowidjojo
Komisaris: Kevin Graham
Komisaris: Jennifer Maki
Komisaris: Akira Nozaki
Komisaris: Mikinobu Ogata
Komisaris: Peter Poppinga
Komisaris: Mark Travers
Komisaris Independen: Irwandy Arif
Komisaris Independen: Idrus Paturusi

Manfaat dan Kemakmuran Bersama

Indonesia memiliki sumber daya alam yang vital, salah satunya adalah cadangan bijih nikel terbesar di dunia. Vale S.A., sebagai produsen nikel terbesar kedua di dunia, berencana untuk melakukan investasi besar di Indonesia, dan PT Vale Indonesia telah berada di posisi yang tepat untuk secara berkelanjutan mewujudkan potensi peluang ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Hingga saat ini, 4% dari pasokan nikel dunia dihasilkan dari pabrik Perseroan di Sorowako. Program-program dalam strategi pertumbuhan Perseroan

Laporan Dewan Komisaris

Report of the Board of Commissioners

Kevin Graham, effective as of the closing of the Meeting until the closing of the AGMS of the Company in the year 2014.

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders which was held on September 24, 2013, shareholders approved the resignation of Mr. Harumasa Kurokawa as Commissioner of the Company and approved the appointment of Mr. Akira Nozaki as Commissioner, effective from the closing of the meeting until the closing of the Company's AGMS in 2014.

The composition of the Board of Commissioners of the Company as of December 31, 2013 is as follows:

President Commissioner: Ricardo de Carvalho
Vice-President Commissioner and
Independent Commissioner: Arief T. Surowidjojo
Commissioner: Kevin Graham
Commissioner: Jennifer Maki
Commissioner: Akira Nozaki
Commissioner: Mikinobu Ogata
Commissioner: Peter Poppinga
Commissioner: Mark Travers
Independent Commissioner: Irwandy Arif
Independent Commissioner: Idrus Paturusi

Mutual benefit and prosperity

Indonesia's vital natural resource is one of the world's largest nickel ore reserves. As the second-largest nickel producer in the world, Vale S.A. is prepared to make a significant investment in Indonesia, and PT Vale Indonesia is well positioned to responsibly and sustainably realize the potential of this opportunity. Today, the Company's Sorowako smelter contributes 4% of the world's nickel supply. The projects outlined in its growth strategy have a medium-to-long term focus and are aligned with the Government of Indonesia's

Laporan Dewan Komisaris Report of the Board of Commissioners

memiliki fokus untuk jangka menengah dan panjang dan selaras dengan tujuan Pemerintah Indonesia untuk mendorong dan menjaga kelangsungan kegiatan tambang hilir di Indonesia.

Investasi Vale dan penerapan rencana strategis Perseroan akan berdampak positif bagi para pemangku kepentingan. PT Vale telah dan akan terus menjadi kontributor utama dalam kemajuan pembangunan dan kemakmuran Indonesia. Perseroan akan senantiasa memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dan nilai lebih bagi para pemegang saham.

Dewan Komisaris terus mendukung rencana pertumbuhan strategis Perseroan dan optimis bahwa manajemen dapat melaksanakan rencana tersebut dengan baik. Kami juga sepakat, bahwa kesuksesan jangka panjang Perseroan dan kemakmuran berkelanjutan masyarakat lokal dimana PT Vale beroperasi, dapat terwujud dan terus terjaga jika strategi ini diterapkan.

Memandang ke depan, Perseroan akan senantiasa membina hubungan yang solid dengan pemerintah, karyawan, dan masyarakat. Kami pun berharap dapat terus menginformasikan kesuksesan Perseroan kepada para investor dan pemangku kepentingan lainnya.

objective of promoting and retaining downstream operations in Indonesia.

Vale's investment and the Company's execution of its strategic plan, will produce positive results for all stakeholders. PT Vale has always been, and will remain, a key contributor to Indonesia's prosperity and development, committed to delivering benefits to all its communities and meaningful value to its shareholders.

The Board of Commissioners supports the Company's strategic growth plan, and is confident in management's ability to execute it successfully. We concur that the long-term success of the Company, and in turn the sustainable prosperity of the local communities in which PT Vale operates, can and will be achieved through the implementation of this strategy.

Looking ahead, the Company will continue to nurture the strong relationships it has developed with governments, employees, communities, and looks forward to reporting its success to investors and stakeholders.

14 Maret 2014 / March 14, 2014

Atas nama Dewan Komisaris
On behalf of the Board of Commissioners



Ricardo de Carvalho
Presiden Komisaris / President Commissioner

Direksi Board of Directors

Our Board of Directors

Direksi PT Vale bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan secara efektif, efisien dan berhati-hati. Dengan berfokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan, Direksi kami bersama dengan tim manajemen bekerja keras untuk melaksanakan rencana strategis Perseroan, memberikan tingkat pengembalian yang atraktif kepada pemegang saham dan memastikan Perseroan memenuhi komitmennya untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.



Nico Kanter
Presiden Direktur President Director

Kewarganegaraan : Indonesia
Citizenship : Indonesian
Lahir Born : 1958
Ditunjuk sejak Appointed : 2011

Our Board of Directors

PT Vale's Board of Directors is responsible for the effective, efficient and prudent management of the company. With a keen focus on sustainable growth, our Board of Directors and management teams are working diligently to execute the company's strategic plans, deliver superior returns to shareholders and ensure the company fulfills its commitment to excellence in environmental and social responsibility.



Bernardus Irmanto
Wakil Presiden Direktur Vice President Director

Kewarganegaraan : Indonesia
Citizenship : Indonesian
Lahir Born : 1975
Ditunjuk sejak Appointed : 2010



Febriany Eddy
Direktur Director

Kewarganegaraan : Indonesia
Citizenship : Indonesian
Lahir Born : 1977
Ditunjuk sejak Appointed : 2013



Josimar Pires
Direktur Director

Kewarganegaraan Citizenship : Brazil
Citizenship : Brazilian
Lahir Born : 1961
Ditunjuk sejak Appointed : 2011

Laporan Direksi

Report of the Board of Directors

Laporan Direksi

Report of the Board of Directors

Tahun 2013 pastinya menjadi tahun yang penuh dengan tantangan, karena berbagai sebab. Namun demikian, PT Vale tetap menjaga fokusnya pada strategi Perseroan untuk mengoptimalkan kinerja operasional dan keuangan serta memperkuat hubungan dengan masyarakat yang menjadi mitra kami.

There is no doubt 2013 was a challenging year, for several reasons. But despite these challenges, PT Vale maintained our focus on our strategy, optimizing our financial and operational performance and strengthening our relationships with our community partners.

Kepada pemegang saham, karyawan dan pemangku kepentingan kami,

2013 merupakan tahun yang menentukan bagi PT Vale. Selain terus melakukan berbagai inisiatif dalam meningkatkan produktivitas dan profitabilitas, secara tekun dan bijaksana kami juga berinteraksi dengan Pemerintah Indonesia, khususnya Menteri dan perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) untuk kembali menegosiasikan Kontrak Karya PT Vale Indonesia.

Oleh karena renegotiasi Kontrak Karya kami amat berpengaruh pada bisnis kami di masa depan, maka amat penting bagi kami untuk memberikan penjelasan tentang sifat dan signifikansinya dalam kegiatan usaha. Pada 10 Januari 2012, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Presiden No. 3/2012

To our shareholders, our employees and our stakeholders,

2013 was a critical year for PT Vale. In addition to our ongoing productivity and profitability initiatives, we worked diligently and thoughtfully with the Government of Indonesia, in particular the Minister and representatives from the Ministry of Energy, Mines and Resources (MEMR), to renegotiate PT Vale Indonesia's Contract of Work (CoW).

Because the renegotiation of our CoW is so critical to our future, it bears explaining both the nature and significance of the undertaking here. On January 10, 2012 the Indonesian Government issued Presidential Decree No. 3/2012 formally establishing a team tasked with evaluating existing mineral CoWs and Coal

Nico Kanter
Presiden Direktur
President Director

tentang pembentukan tim yang bertugas mengevaluasi Kontrak Karya mineral dan Kontrak Karya Batubara agar sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Pertambangan 2009 yang disahkan pada Januari 2009 lalu. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa seluruh Kontrak Karya Mineral dan Kontrak Karya Batubara harus direvisi agar selaras dengan ketentuan undang-undang. Perseroan segera mengkomunikasikan kesiapannya untuk bernegosiasi kepada pemerintah.

Contracts of Work (CCoWs), to bring them into line with the provisions of the 2009 Mining Law passed in January 2009. The Law requires all existing CoWs and CCoWs to be amended to harmonize them with the Law. The company immediately responded by informing its readiness to renegotiate to the government.



Laporan Direksi

Report of the Board of Directors

Rapat formal pertama Perseroan dalam rangka renegotiasi Kontrak Karya berlangsung pada 11 September 2012. Pemerintah Pusat menekankan enam pokok renegotiasi untuk kembali didiskusikan lebih lanjut, yaitu:

1. Luas wilayah Kontrak Karya;
2. Jangka waktu dan bentuk perpanjangan Kontrak Karya;
3. Kewajiban keuangan (royalti dan pajak);
4. Kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri;
5. Kewajiban divestasi (51%); dan
6. Kewajiban penggunaan barang dan jasa dalam negeri.

Sepanjang 2012 dan 2013, PT Vale dan Pemerintah telah mengadakan sejumlah rapat renegotiasi Kontrak Karya. Diskusi mengenai hal ini secara intensif masih terus dilakukan sejak September 2013 hingga tanggal dituliskannya laporan ini. Sampai dengan proses renegotiasi selesai, Perseroan belum dapat menentukan sepenuhnya sejauh apa dampak renegotiasi terhadap Kontrak Karya.

Meskipun masih terdapat ketidakpastian terkait proses renegotiasi, dengan bangga kami menyampaikan bahwa kami percaya PT Vale telah membuat kemajuan di dalam pembicaraannya dengan Kementerian ESDM dan pemerintah pusat dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan tambang besar lainnya yang beroperasi di Indonesia. Saat ini kami tengah bekerja dengan tim perwakilan khusus untuk menyelesaikan rincian yang terdapat dalam Kontrak Karya.

Kontrak Karya kami adalah izin resmi untuk menjalankan usaha pertambangan, pengolahan, dan produksi nikel. Tapi lebih dari itu, kontrak ini mewakili janji dan komitmen kami untuk terus mengembangkan bisnis, membangun kompetensi

The Company's first formal CoW renegotiation meeting was held on September 11, 2012. The Central Government emphasized six points of renegotiation during this meeting for further discussions, as follows:

1. size of the CoW area;
2. term and form of CoW extension;
3. financial obligations (royalty and taxes);
4. domestic processing and refining;
5. mandatory divestment (51%); and
6. priority use of domestic goods and services.

Throughout 2012 and 2013, were a number of meetings between PT Vale and the Government regarding CoW renegotiation. Discussions of CoW renegotiation have continued intensively since September 2013 up until the date of writing of this report. Until the renegotiation process is completed, the Company is unable to fully determine to what extent the CoW will be affected.

Despite the moderate degree of uncertainty that exists relative to the renegotiation, we are pleased to report that of all major mining companies operating in Indonesia, we believe PT Vale has advanced further in its talks with MEMR and the central government than any other. We are now working with a specially designated team of representatives to finalize the details of the CoW.

Our CoW is our legislative license to operate our business in Indonesia, allowing us to mine, process and produce nickel. But more importantly, it represents our promise and commitment – to continue to develop our business, build competency in our people and

PT Vale menghasilkan **75.802** ton nikel dalam matte, pada tahun 2013 7% lebih tinggi dari produksi tahun 2012.

PT Vale produced **75,802** metric ton nickel in matte, in 2013 which was 7% higher than production in 2012.



sumber daya yang kami miliki, dan berinvestasi dalam membangun kemakmuran jangka panjang dan berkelanjutan bagi masyarakat dimana kami beroperasi. Kontrak ini juga merupakan peluang untuk mewujudkan visi kami, dengan jaminan keberlanjutannya operasi kami setelah tahun 2025, PT Vale dapat mengembangkan rencana strategis yang mencakup hal-hal yang lebih ambisius yang dapat dicapai bagi perseroan dan Indonesia.

Strategi untuk pertumbuhan jangka panjang

Strategi kami untuk pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan, telah secara jelas kami sebutkan dan relevan untuk dinyatakan kembali di sini:

1. Mengelola biaya untuk meningkatkan margin.
2. Mengoptimalkan efisiensi melalui inovasi dan kebersamaan.
3. Memaksimalkan potensi pendapatan melalui peningkatan produksi
4. Berinvestasi pada proses, sumber daya manusia, dan komunitas kami untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan

Kondisi pasar eksternal kembali semakin menekan kinerja keuangan

invest in the sustainable, long-term prosperity of the communities in which we operate. It also represents the opportunity to realize our vision – with the assurance of continuation of operation beyond 2025, PT Vale will be able to expand our strategic plan to encompass an even more ambitious view of what is possible for our Company and for Indonesia.

Strategy for long-term growth

Our strategy for long-term, sustainable growth has been clearly articulated, and it is appropriate to restate it here:

1. Manage costs to improve margin.
2. Optimize efficiency through innovation and engagement.
3. Maximize revenue potential by increasing production.
4. Invest in our processes, our people and our communities to ensure sustainable growth.

External market conditions continued to put downward

Laporan Direksi

Report of the Board of Directors

kami tahun ini. Namun, strategi ini memungkinkan kami untuk mengoptimalkan pendapatan dan margin meskipun sedang dilanda kondisi yang tidak menguntungkan. Proyek Konversi Batubara (CCP) yang kami laksanakan berhasil memberikan sejumlah pengembalian atas investasi pada semester kedua tahun ini, dan kami berharap bahwa pengembalian ini akan semakin meningkat di masa mendatang. Selain proyek-proyek penting seperti Coal Conversion Project (CCP) tersebut, kami tetap berusaha mengontrol biaya secara ketat dalam setiap aspek bisnis kami. Peningkatan margin tidak hanya dihasilkan dari langkah-langkah efisiensi, tetapi juga melalui pengelolaan yang hati-hati terhadap biaya tak terduga dalam setiap bidang bisnis kami.

Berikut adalah matriks keuangan utama tahun 2013. Penjelasan lebih detail mengenai kinerja keuangan kami terdapat di bab Analisis dan Pembahasan Manajemen.

Laba

Optimal meski terjadi penurunan dalam harga penjualan rata-rata.

EBITDA kami pada tahun 2013 mencapai AS\$203,4 juta, menurun dari AS\$215,5 juta pada 2012. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan harga realisasi rata-rata nikel yang dikompensasi sebagian oleh peningkatan volume penjualan.

Produksi nikel dalam matte

Optimalisasi operasional mendorong peningkatan produksi.

Produksi nikel dalam matte kami adalah sebesar 75.802 ton pada tahun 2013, meningkat sebesar 7% atau 5.085 ton dari tahun 2012 yang sebesar 70.717 ton. Peningkatan ini terutama didorong oleh tingkat produksi kalsin yang lebih tinggi sebagai akibat dari lebih tingginya kapasitas tanur listrik serta rata-rata daya tanur listrik dari fasilitas pembangkit listrik tenaga air.

pressure on our financial performance again this year. However, our strategy allowed us to optimize revenue and margin despite these unfavourable conditions. Our Coal Conversion Project (CCP) delivered measurable return on investment in the second half of the year, and we expect to see greater upside moving forward. In addition to significant projects like CCP, we sought to rigorously control costs in every aspect of our business. Margin improvement came not only through efficiency initiatives, but through vigilant management of outside costs in every area of our business.

Here are the key financial metrics for 2013. Please refer to the Management's Discussion and Analysis for a more comprehensive review of our financial performance.

Earnings

Optimized despite decrease in average selling price.

Our EBITDA in 2013 was US\$203.4 million, down from US\$215.5 million in 2012. The decrease is attributable to a decrease in the average realized price for nickel, but was offset partially by the increase in sales volume.

Nickel in matte production

Operational optimization drives improved production.

Our nickel in matte production was 75,802 tons in 2013 compared to 70,717 tons in 2012, a 7% or 5,085 tons increase. The increase was mainly driven by higher calcine throughput as a result of higher furnace capacity as well as the average furnace power supplied by our hydroelectric power generating facilities.

Penjualan

Peningkatan pengapalan produk mengimbangi efek negatif dari penurunan harga jual.

Penjualan kami pada 2013 turun menjadi AS\$921,6 juta, menurun AS\$45,7 juta lebih rendah dari penjualan pada tahun 2012 yang sebesar AS\$967,3 juta. Penurunan penjualan disebabkan oleh harga jual realisasi rata-rata yang lebih rendah. Harga realisasi rata-rata nikel dalam matte pada 2013 adalah AS\$11.939 per ton, menurun 12% dari AS\$13.552 per ton pada tahun 2012. Efek negatif pada pendapatan kami dikompensasi dengan peningkatan pengiriman sebesar AS\$78,9 juta, karena kami mengapalkan 77.198 ton nikel dalam matte pada tahun 2013 dibandingkan 71.379 ton pada 2012.

Beban Pokok Pendapatan

Inovasi dan efisiensi mengakibatkan penurunan beban pokok pendapatan

Beban pokok pendapatan turun sebesar AS\$18,9 juta menjadi AS\$781,7 juta pada tahun 2013 dari AS\$800,6 juta pada tahun 2012. Penurunan ini bahkan diikuti dengan peningkatan produksi – yang berarti biaya produksi per ton kami menurun secara signifikan. Harga pembelian rata-rata PT Vale untuk HSFO pada tahun 2013 adalah sekitar 9% lebih rendah dari harga pembelian rata-rata pada tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, penggunaan HSFO Perseroan per ton produksi juga menurun dari sekitar 32,38 barel per ton menjadi 30,75 barel per ton pada saat produksi tahunan meningkat dan Perseroan meningkatkan efisiensi produksinya.

Sales

Higher deliveries offset negative effect of lower selling price.

Our 2013 sales decreased to US\$921.6 million, US\$45.7 million lower than 2012 sales of US\$967.3 million. The decrease in sales was caused by the lower average realized selling price. The average realized price of our nickel in matte in 2013 was US\$11,939 per ton, down 12% from US\$13,552 per ton in 2012. The negative effect on our revenue was offset by higher deliveries of US\$78.9 million as we delivered 77,198 metric tons nickel matte in 2013 compared to 71,379 metric tons in 2012.

Cost of Revenue

Innovation and efficiency result in improved costs of revenue

Cost of revenue fell by US\$18.9 million to US\$781.7 million in 2013 from US\$800.6 million in 2012. This decrease comes even with the increase in production – on a per ton basis our cost has improved significantly. PT Vale average purchase price for HSFO in 2013 was about 9% lower than average purchase price in previous year. At the same time, the Company's HSFO usage per ton production also improved from about 32.38 barrel per ton to 30.75 barrel per ton when annual production increased and the Company improved its efficiency.



Laporan Direksi

Report of the Board of Directors

Gambaran tahun 2013

Pada tahun 2013, PT Vale sedang berada pada titik yang menentukan. Kami dihadapkan pada kondisi pasar yang penuh tantangan. Meski demikian, kami tetap fokus pada strategi untuk meningkatkan produksi dan menurunkan biaya per unit. Pada saat yang sama, kami juga mempertahankan perspektif jangka panjang. Dengan menerapkan rencana pertumbuhan strategis, kami terus mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, menjalin kerja sama dengan mitra kami di pemerintahan pada semua jenjang, dan bekerja untuk membangun daya saing operasional kami – seluruhnya dikerahkan untuk persiapan keberhasilan renegotiasi Kontrak Karya dan menyambut era berikutnya dalam sejarah panjang kami yang membanggakan di Indonesia.

Kompeten

Kehadiran tenaga kerja yang mumpuni diperlukan guna meraih target peningkatan produksi yang merupakan bagian dari strategi kami untuk pertumbuhan. Berdasarkan perkiraan dampak multiplier dari Universitas Indonesia, diperkirakan bahwa *growth project* kami untuk meningkatkan kapasitas produksi nikel hingga sebesar 120.000 ton per tahun akan menciptakan kesempatan kerja di Indonesia. Berdasarkan fakta tersebut, salah satu fokus strategis kami pada tahun 2013 adalah membangun kompetensi dalam praktik sumber daya manusia kami.

Berdasarkan survei internal, penelitian dan hasil yang diperoleh, kami telah sepakat untuk melaksanakan beberapa hal penting dalam rangka memperbaiki sistem dan praktik sumber daya manusia kami. Kami telah mengembangkan pendekatan terpadu dan komprehensif untuk pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan enam pilar keunggulan: konsistensi,

The year in review

In 2013, PT Vale was at a critical juncture. We were faced with challenging market conditions, yet still maintained a focus on our strategy to increase production while containing or lower per unit costs. At the same time, we maintained our long-term perspective. With a strategic growth plan in place, we continued to develop the competency of our human resources, worked collaboratively with our partners in government at all levels, and worked to build our operational competitiveness – all in preparation for the successful renegotiation of our CoW and the beginning of the next era in our long and proud history in Indonesia.

Competent

Our strategy for growth and the increased production targets we have identified as part of that strategy will demand we employ a highly skilled workforce. It will also demand we expand our workforce significantly. Based on University of Indonesia multiplier effect estimates, it is predicted that our growth project to increase capacity to 120,000 tons per year of nickel will generate job opportunities in Indonesia. Given this, one of our key strategic focuses in 2013 was to build competency in our human resource practice.

Based on internal surveys, research and feedback, we determined the imperatives we needed to address to improve our human resources systems and practices. We developed an integrated and comprehensive approach to human resource management, based on six pillars of excellence: consistency, transparency, accuracy, responsiveness, accessibility and compliance.

transparansi, akurasi, ketanggapan, aksesibilitas, dan kepatuhan. Langkah-langkah perbaikan yang konsisten ini menekankan pada keenam pilar tersebut dalam praktik sumber daya manusia kami, yang dikenal sebagai *HR Breakthrough*.

HR Breakthrough diperkenalkan pada April 2013 dan PT Vale berharap bahwa praktik ini akan membuahkan perbaikan yang signifikan dalam fungsi SDM Perseroan pada akhir tahun 2014. Perbaikan ini akan memberikan dampak positif pada karyawan, proses, dan sistem kami. Meskipun inisiatif ini diperkenalkan oleh tim SDM, keberhasilan inisiatif ini merupakan tanggung jawab seluruh pemimpin PT Vale. Pendekatan "melatih para pelatih" kami menjamin bahwa praktik-praktik baru akan dijalankan secara efisien dan menyeluruh di dalam organisasi.

Dengan *HR Breakthrough*, kami akan terus membuat inisiatif pengembangan kompetensi secara konsisten, memenuhi kebutuhan SDM secara akurat, dan memberikan program pengembangan yang dapat diikuti oleh karyawan yang berkeinginan kuat untuk meningkatkan keterampilan mereka.

Kolaborasi

2013 merupakan tahun yang penting bagi PT Vale dan mitra-mitranya yang berada di semua tingkat pemerintahan. Kami bekerja sama untuk kembali menegosiasikan Kontrak Karya yang awalnya ditandatangani pada tahun 1968. Kemitraan yang kuat antara PT Vale dan Pemerintah, baik di daerah maupun pusat, sangat penting untuk meraih manfaat bersama dari suatu lisensi baru hasil renegotiasi yang saling menguntungkan kedua pihak. PT Vale siap dan bersedia untuk menjalankan perannya, namun demikian, seperti upaya kolaborasi lainnya, kerjasama dan itikad baik dari semua pihak diperlukan untuk mendapat hasil yang diharapkan.

Laporan Direksi

Report of the Board of Directors

This continuous improvement initiative addresses all six of these pillars in our human resource practice, and is known as the *HR Breakthrough*.

The *HR Breakthrough* was introduced in April 2013 and PT Vale expects to see measurable improvements in our HR functions by end of 2014. These improvements will positively affect our people, process and systems. Although the initiative was introduced by the HR team, the success of this initiative is responsibility of the all leaders in PT Vale. Our "train the trainers" approach ensures the new practices and efficiently and thoroughly operationalized throughout the organization.

With *HR Breakthrough*, we will pursue competency development initiatives consistently, address the needs accurately, and provide development that is accessible to eligible employees who are committed to developing their skills.

Collaborative

2013 was an important year for PT Vale and its partners in all levels of government. Together, we worked to renegotiate our CoW, which was originally signed in 1968. A strong partnership between PT Vale and the Government, at both central and all regional levels, is essential to achieve the mutual benefits a new license will provide. PT Vale is ready and willing to do its part; however, like any collaborative effort, the cooperation and goodwill of all parties is necessary to ensure a successful outcome.

Laporan Direksi

Report of the Board of Directors

PT Vale telah menyiapkan rencana investasi yang menarik sebagai bahan diskusi dengan pejabat dari Kementerian ESDM. Rencana ini mencakup ekspansi utama dalam operasi tambang dan pengolahan nikel kami, yang akan berpengaruh pada meningkatnya pendapatan Pemerintah secara signifikan, pengembangan masyarakat dan kesempatan kerja bagi rakyat Indonesia.

Proyek-proyek Tahap Pertama merupakan bagian dari rencana pengembangan strategis global Vale. Jumlah penempatan modal untuk proyek tahap pertama adalah sekitar AS\$2 milyar berdasarkan perkiraan awal. Jumlah ini termasuk sekitar AS\$1,5 milyar di Sulawesi Selatan dan AS\$500 juta di Sulawesi Tengah.

Apabila rencana ekspansi kami, yang saat ini sedang dinegosiasikan dengan Pemerintah Indonesia, disetujui, PT Vale siap untuk menginvestasikan untuk program pengembangan masyarakat terpadu untuk periode lima tahun mendatang (2013-2017) sebagai kontribusi dalam peningkatan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan di daerah-daerah dimana kami beroperasi. Kontribusi ini termasuk sejumlah dana besar yang khusus ditujukan untuk berinvestasi bagi masyarakat di Sulawesi Selatan serta untuk membantu pengembangan penduduk di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Proposal pengembangan dan investasi kami juga mencakup komitmen yang kuat terhadap perlindungan lingkungan dan masyarakat setempat.

Manfaat ekonomi yang diperoleh dari rencana kami bagi Pemerintah Indonesia juga signifikan. Melalui pembayaran royalti yang signifikan, PT Vale berkontribusi langsung pada perekonomian Indonesia. Investasi kami juga akan menambah kontribusi kami kepada Pemerintah karena peningkatan produksi akan menghasilkan pajak yang lebih tinggi. Pada tingkat nasional, renegotiasi Kontrak Karya kami menjadi sangat penting. Pada tingkat regional,

PT Vale has developed an exciting investment plan for discussion with officials from MEMR. This plan involves major expansions of our nickel mining and processing operations, which will lead to significantly increased Government revenues, community development and job opportunities for the people of Indonesia.

The First Phase projects are part of Vale's global strategic development plan. The total capital investment for the first phase projects is approximately US\$2 billion, based on preliminary estimates. This includes approximately US\$1.5 billion in South Sulawesi and US\$500 million in Central Sulawesi.

Should our expansion plans, as currently under negotiation with the Government of Indonesia, be approved, PT Vale is prepared to invest to its integrated community development programs over the next five-year (2013 – 2017) period to contribute to the enhancement of the quality of life and living standards in those areas where we operate. This includes significant and newly dedicated funds to invest in the communities in South Sulawesi as well as to assist in the development of the communities in both Central Sulawesi and Southeast Sulawesi. Our proposal for development and investment also includes the strongest commitment to the protection of the environment and local communities.

The economic benefit of our plan to the Government of Indonesia will be significant. PT Vale will contribute directly to the Indonesian economy through significant royalty payments. Our investment will also augment our contribution to the Government because the increased production will yield much higher taxes. On a national level, the renegotiation of our CoW is of paramount importance. Locally, our relationships with and investment in our communities are of equal

hubungan dengan masyarakat setempat dan investasi kami di dalamnya juga sama pentingnya. Pada tahun 2013, PT Vale memperkenalkan PTPM - Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat, yang merupakan rencana komprehensif untuk berinvestasi dan mendukung masyarakat setempat secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan jangka panjang.

Pendekatan kami dalam merambah program pemberdayaan masyarakat sangat berbeda dari kebanyakan perusahaan tambang nikel lain di Sulawesi. Jika banyak dari perusahaan tersebut mengedepankan prospek jangka pendek untuk kegiatan pertambangan dan program komunitas mereka, PT Vale sebaliknya telah memiliki kebijakan yang telah terbukti kesuksesannya, yang disertai dengan sejarah interaksi yang positif dengan masyarakat di Sulawesi dan kapasitas sumber daya yang lebih besar untuk menjalankan program pembangunan daerah di berbagai wilayah.

Dalam kurun lima tahun mendatang (2013 - 2017), kami bertujuan untuk meningkatkan investasi dalam program masyarakat terpadu kami di tiga provinsi di Sulawesi (di bagian selatan, tengah dan tenggara), dengan fokus pada kesehatan masyarakat, pendidikan, mata pencaharian, khususnya di bidang pertanian dan peternakan, usaha lokal, infrastruktur desa dan fasilitas publik tertentu serta pelestarian adat-istiadat masyarakat setempat.

Dengan menggunakan pendekatan kolaboratif yang telah terbukti dapat memperkuat dan memberdayakan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pengembangan tujuan sosial-ekonomi, kami akan terus membina hubungan kerja yang konstruktif di dalam dan di antara kelompok-kelompok pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan.

importance. In 2013, PT Vale introduced the PTPM – Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat or Integrated Program for Community Development. It is a comprehensive plan to invest in and support our communities in a sustainable manner, focusing on the empowerment of communities for long-term prosperity.

Our approach to community development programs is remarkably different from many other nickel mining companies in Sulawesi. Whereas many nickel miners maintain a short-term outlook to both their mining and community programs, PT Vale has well-established policies, a history of positive community interaction in Sulawesi and a greater resource capacity to deliver local development programs in a variety of areas.

In the coming five years (2013 – 2017), we are aiming to invest significantly to our integrated community programs in the three provinces of Sulawesi (south, central and southeast), focusing on community health, education, livelihoods particularly in the area of agriculture and farming, local businesses, selected village infrastructure and public facilities and preservation of local customs.

By employing a proven collaborative approach that strengthens and empowers stakeholders to participate in the development of socio-economic goals, we will foster constructive working relationships within and between stakeholder groups to achieve mutually beneficial objectives.

Laporan Direksi

Report of the Board of Directors

Laporan Direksi

Report of the Board of Directors

PT Vale juga akan memfasilitasi dialog yang berkelanjutan antara para pemangku kepentingan untuk memantau efektivitas proyek dan mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan sosio-ekonomi yang berkelanjutan dengan rencana bisnis internal untuk memastikan komitmen jangka panjang manajemen.

Kompetitif

Bisnis pertambangan merupakan bisnis yang mengalami siklus, dan pada tahun 2013, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia terus bergulat dengan efek-efek berantai dari krisis ekonomi global. Meskipun kondisi pasar masih menantang, investasi berkelanjutan dalam bisnis kami berhasil memberikan manfaat nyata untuk operasi yang kami jalankan. Secara bersungguh-sungguh kami terus menempuh strategi meningkatkan produksi dan mengoptimalkan kinerja operasional. Inisiatif untuk mendukung strategi ini akan memastikan peningkatan yang lebih baik lagi dari yang dicapai hari ini, dan menyiapkan kami menjadi organisasi yang lebih kuat dan kompetitif pada masa perekonomian yang lebih sehat.

Baik *capital investment* maupun *sustaining investment* sama-sama diperlukan untuk mengembangkan bisnis Perseroan dan mempertahankan tingkat produksi saat ini. Upaya-upaya substitusi energi dan efisiensi, integritas aset, pengurangan biaya dan perbaikan lingkungan merupakan titik fokus dari rencana investasi strategis kami. Perseroan berada di tengah pelaksanaan program investasi modal multi-tahunan yang meliputi: pengoptimalan operasional pabrik peleburan di Sorowako, terutama dengan pengurangan *downtime* dalam proses-proses yang ada saat ini; konversi sumber energi pada tanur pengering bijih, sehingga memungkinkan menggunakan salah satu dari dua bahan bakar HSFO maupun batubara, tergantung nilai ekonomis dari tiap jenis bahan bakar tersebut; *upgrade*

PT Vale will also facilitate ongoing dialogue between stakeholders to monitor the effectiveness of projects and integrate the principles of sustainable socio-economic development with internal business plans to ensure long-term management commitment.

Competitive

Mining is a cyclical business, and in 2013, companies around the world continued to grapple with the ripple effects of global economic downturn. Despite the still challenging market conditions, our ongoing investment in our business has delivered measurable benefit to our operations. We are aggressively pursuing our strategy to increase production and optimize operational performance. Initiatives in support of this strategy will ensure incremental improvement today, and set the stage for us to emerge as an even more robust, competitive organization in healthier economic times.

Both capital and sustaining investments are required to grow our business as well as to sustain our current levels of production. Energy substitution and efficiency, asset integrity, cost reduction and environmental improvement are focal points of our strategic investment plans. We are in the middle of a multi-year capital program, which includes: optimizing the operation of our smelter in Sorowako, primarily by eliminating downtime in the current process; the conversion of all ore dryer burners to be capable of using two fuel sources, using either HSFO or pulverized coal, which allows the flexibility to switch between these fuels, depending on the prevailing economics of each one; electric furnaces upgrade projects; preserving the existing equipment and infrastructure integrity;

projects tanur listrik; memelihara integritas peralatan dan infrastruktur yang ada saat ini; serta penggantian peralatan berat untuk meningkatkan ketersediaan fisik aset Perseroan.

Proyek Konversi Batu Bara

Pada 2013, kami menerapkan fase pertama dari dua fase Proyek Konversi Batu Bara yang akan menggantikan HSFO dengan batu bara serbuk dalam tanur pengering dan tanur pereduksi. Proyek ini meliputi peningkatan infrastruktur yang ada saat ini untuk penanganan material *bulk commodities*. Tujuan utama dari fase pertama adalah mengkonversikan sumber energi pada tanur pengering dari HSFO menjadi batu bara, termasuk peningkatan infrastruktur penanganan material *bulk commodities*. Tahap kedua meliputi konversi yang sama pada tanur pereduksi.

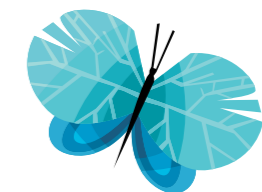
Tahap pertama dari proyek ini diluncurkan kembali pada 2011 dan pembangunan telah kami selesaikan pada triwulan keempat tahun 2013. Konsumsi HSFO pada triwulan tersebut adalah 28% lebih sedikit dibandingkan dengan kuartal ketiga pada 2013. (436.160 barel dengan biaya rata-rata AS\$99,26 per barel pada Tw4 dibandingkan dengan 608.058 barel dengan biaya rata-rata AS\$99,65 per barel pada Tw3). Manajemen PT Vale berharap bahwa konversi ini dapat lebih menghemat biaya pada tahun 2014.

and replacement of heavy equipment to improve the physical availability of our assets.

Coal Conversion Project

In 2013, we implemented the first phase of a two-phase Coal Conversion Project that will replace HSFO with pulverized coal in our rotary dryers and reduction kiln. The project includes the upgrade of our existing bulk commodity material-handling infrastructure. The main objective of phase one is to convert the primary energy source in our dryers from HSFO to pulverized coal, and upgrading our existing bulk commodity material-handling infrastructure. The second phase will involve similar conversion of the kilns.

The first phase of the project was relaunched in 2011 and we completed its construction in the fourth quarter of 2013. HSFO consumption in that quarter was 28% less than in the third quarter of 2013. (436,160 barrels at an average cost of US\$99.26 per barrel in Q4 as compared to 608,058 barrels at an average cost of US\$99.65 per barrel in Q3). The management of PT Vale expects to see more significant cost savings from this conversion in 2014.



Laporan Direksi

Report of the Board of Directors

Kepemimpinan

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 23 April 2013, pemegang saham memutuskan untuk menyetujui pengangkatan kembali Nico Kanter sebagai Presiden Direktur, Bernardus Irmanto sebagai Wakil Presiden Direktur dan Josimar Pires sebagai Direktur, dengan masa jabatan efektif sejak ditutupnya pertemuan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2014. Pemegang saham juga menyetujui pengangkatan Febriany Eddy sebagai Direktur terhitung sejak ditutupnya rapat tersebut.

Pada saat yang bersamaan, pemegang saham menerima pengunduran diri Fabio Bechara. Ia akan mengemban tanggung jawab baru dalam kelompok usaha Vale Grup. Kami mengucapkan terima kasih kepada Fabio untuk kontribusinya kepada PT Vale selama dua tahun terakhir, dan berharap beliau dapat menjalankan peran barunya dengan baik di dalam organisasi Vale lainnya. Selain itu, pengunduran diri Michael O'Sullivan juga secara resmi telah disetujui.

Selama tahun ini, Direksi, dengan bimbingan dari Dewan Komisaris, bekerja sama untuk memperbaiki dan meningkatkan pendekatan kami terhadap kepemimpinan dalam PT Vale. Selain mengemban keseluruhan manajemen dan tata kelola Perseroan, masing-masing Direktur memiliki tanggung jawab di bidang bisnis tertentu. Nico Kanter bertanggung jawab dalam upaya-upaya hubungan eksternal dan dengan pemerintah. Bernardus Irmanto bertanggung jawab untuk bagian Sumber Daya Manusia dan Corporate Services. Febriany Eddy menjalankan peran sebagai Chief Financial Officer dan Josimar Pires sebagai Chief Operating Officer Perseroan. Direksi bekerja secara

Leadership

At the Annual General Meeting of Shareholders, held on April 23, 2013, shareholders voted to approve the re-appointment of Nico Kanter as the President Director, Bernardus Irmanto as Vice-President Director and Josimar Pires as Director, effective as of the closing of this meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the company in the year 2014. The shareholders approved the appointment of Febriany Eddy as Director, effective as of the close of the meeting.

At the same time, shareholders accepted the resignation of Fabio Bechara. He will assume new responsibilities within the Vale Group. We would like to thank Fabio for his contributions to PT Vale over the past two years, and wish him well as he assumes his new role in the other Vale organization. The ratification of the resignation of Michael O'Sullivan was also concluded.

During the year, the Board of Directors, with the guidance of the Board of Commissioners, worked together to refine and improve our approach to the leadership of PT Vale. In addition to the overall management of the company and its governance, each Director has responsibility for specific area of the business. Nico Kanter leads the external and government relations efforts. Bernardus Irmanto is responsible for Human Resources and Corporate Services. Febriany Eddy assumes the role of Chief Financial Officer and Josimar Pires is the Company's Chief Operating Officer. The Board of Directors works collaboratively, ensuring that the business is managed

kolaboratif untuk memastikan bahwa bisnis ini dikelola dengan kemampuan operasional dan organisasi yang mumpuni sambil terus menjaga pendekatan terpadu dan holistik guna pelaksanaan rencana bisnis dan agenda strategis Perseroan.

Pandangan 2014

Dengan optimis dan hati-hati, kami melangkah memasuki tahun 2014. Kami tidak dapat berspekulasi akan kondisi pasar, jalannya fungsi legislatif dan dorongan-dorongan eksternal yang berpengaruh pada bisnis Perseroan. Kami percaya bahwa tindakan terbaik adalah selalu mengikuti strategi kami untuk jangka panjang dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

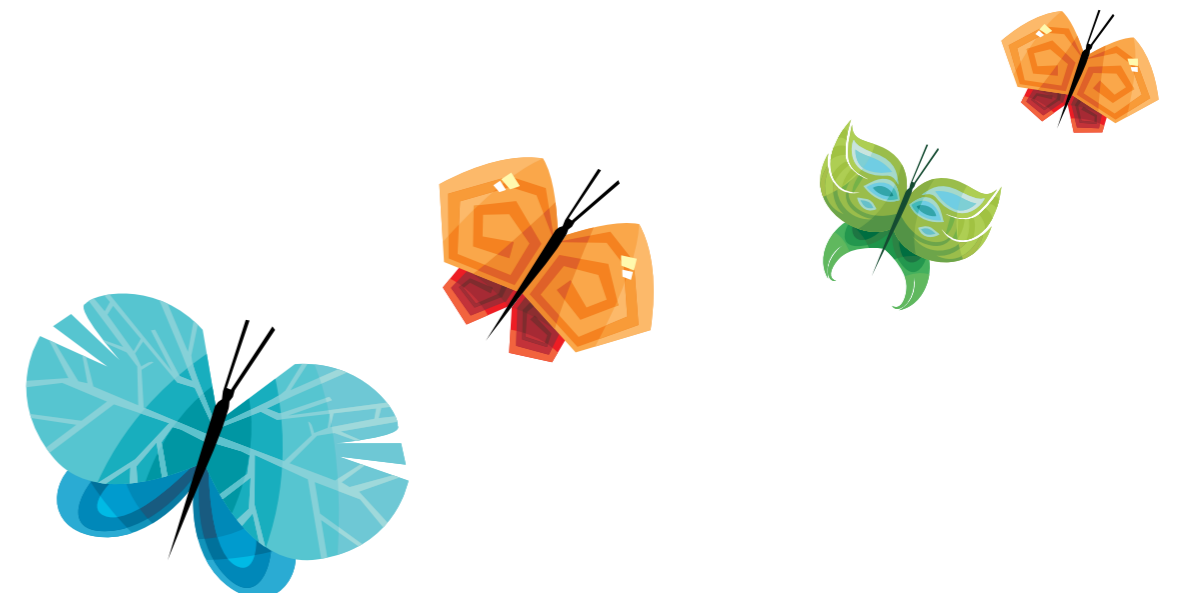
- Kami akan terus memelihara hubungan dengan para pemangku kepentingan eksternal.
- Kami akan fokus pada pembangunan kompetensi pada praktik sumber daya manusia dan dengan demikian, menumbuhkan kompetensi tenaga kerja.
- Kami akan terus meningkatkan produksi kami dengan meningkatkan kapasitas dan efisiensi, sehingga dapat mengurangi biaya per unit.
- Kami akan mengontrol pengeluaran untuk lebih meningkatkan margin.

with operational and organizational expertise while maintaining an integrated and holistic approach to the execution of business plans and our strategic agenda.

Looking ahead to 2014

We enter 2014 with cautious optimism. We cannot speculate on market conditions, nor can we foresee the course of legislative, natural or other external forces on our business. We believe that the best course of action, as it always has been, is to follow our sound strategy for long-term, sustainable growth.

- We will continue to nurture our relationships with our external stakeholders.
- We will focus on building the competency of our human resource practice and in so doing, grow the competency of our work force.
- We will continue to increase our production by improving capacity and efficiency, thereby decreasing our per unit cost.
- We will control our spending to further improve margins.



Laporan Direksi Report of the Board of Directors

Laporan Direksi Report of the Board of Directors

Penutup

Sederhananya, kami berkomitmen untuk berinvestasi dalam bisnis sehingga kami dapat meneruskan sejarah membanggakan atas terjalannya kemitraan selama 45 tahun dengan masyarakat Indonesia. Kami akan mengembangkan komunitas, menjaga lingkungan dan berusaha membangun tenaga kerja yang terampil. Kami akan berkontribusi untuk terwujudnya kemakmuran ekonomi dan stabilitas bangsa. Dan kami akan senantiasa menciptakan nilai lebih bagi pemegang saham Perseroan.

Tapi tentu saja kami tidak bisa melakukan semua ini sendirian. Pada saat laporan tahunan ini dibuat, kami tengah bekerja sama secara tekun dengan pemerintah untuk menyepakati persyaratan yang saling menguntungkan di dalam Kontrak Karya. Sudah menjadi harapan kami bahwa negosiasi ini dapat segera menemui titik penyelesaian – dan kami pun sudah sangat dekat dalam mencapai titik penyelesaian tersebut. Didukung dengan jaminan kesepakatan tersebut, kami berkomitmen untuk dapat melangkah maju dengan lebih berani.

Pada saat ini, Direksi mengucapkan terima kasih kepada lebih dari 3.100 karyawan atas dedikasi mereka untuk PT Vale dan masa depan Perseroan. Komitmen mereka telah menjadi seperti mesin yang mendorong kami bergerak maju.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemangku kepentingan atas kepercayaan mereka, dan kami pun berharap dapat membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan seiring berjalannya waktu.

In closing

It is simple really. We are committed. We are committed to investing in our business so that we can continue our proud 45-year history of partnership with the people of Indonesia. We will grow our communities, protect our environment and help build a skilled workforce. We will contribute to the financial prosperity and stability of the nation. And we will deliver value to our shareholders.

But we cannot do all of this alone. At the time of writing of the annual report, we are working closely and diligently with our government partners to agree the mutually beneficial terms of our CoW. It is our hope that these negotiations will be concluded expeditiously – we are very close. And with the assurance of an agreement, we are committed to move forward boldly.

At this time, the Board of Directors would like to thank our more than 3,100 employees for their dedication to PT Vale and our Company's future. Their commitment is the engine that propels us forward.

We would also like to thank our stakeholders for the confidence they have shown us, and we look forward to building strong and mutually beneficial relationships as we continue to grow.

Strategi kami adalah untuk jangka panjang, dan kami sedang bekerja keras untuk mewujudkan misi kami yaitu mengubah sumber daya alam menjadi kemakmuran dan pembangunan yang berkelanjutan – bagi para pemegang saham, mitra, para pemangku kepentingan dan Negara Indonesia. Pastinya kami berharap dapat terus bisa melaporkan kemajuan kami kepada Anda semua.

Our strategy is for the long term, and we are working diligently to realize our mission to transform natural resources into prosperity and sustainable development – for our shareholders, our partners and stakeholders, and all of Indonesia. We look forward to reporting our progress to you.

14 Maret 2014 / March 14, 2014



Nico Kanter
Presiden Direktur
President Director



Bernardus Irmanto
Wakil Presiden Direktur
Vice President Director



Josimar Pires
Direktur
Director



Febriany Eddy
Direktur
Director



IKHTISAR KEUANGAN DAN SAHAM TAHUN 2013

2013 financial and share highlights



Ikhtisar keuangan penting

Key financial highlights

Ikhtisar keuangan penting

Key financial highlights

Hasil-hasil operasional Results of Operations

(dalam ribuan AS dollar kecuali jika dinyatakan lain in thousands of US dollars except as otherwise indicated)

Tahun berakhir 31 Desember

Year ended December 31, 2013

	2013	2012	2011	2010	2009
Produksi nikel dalam matte (ton) Nickel in matte production (tons)	75,802	70,717	66,900	75,989	67,329
Pengiriman nikel matte (ton) Nickel matte deliveries (tons)	77,198	71,379	67,916	77,035	67,782
Harga realisasi rata-rata (dollar per ton) Average realized price (dollar per ton)	11,939	13,552	18,296	16,568	11,227
Laporan Laba Rugi Komprehensif Statements of Comprehensive Income Data:					
Pendapatan Revenue	921,638	967,327	1,242,555	1,276,323	760,952
Beban pokok pendapatan Cost of revenue	(781,744)	(800,622)	(727,194)	(651,393)	(518,931)
Laba bruto Gross profit	139,894	166,705	515,361	624,930	244,893
Pendapatan lainnya Other income	455	564	857	737	358
Beban usaha Operating expenses	(13,041)	(12,613)	(28,981)	(27,704)	(13,018)
Beban lainnya Other expenses	(57,171)	(47,748)	(29,527)	(14,563)	4,661
Laba usaha Operating profit	70,137	106,908	457,710	583,400	236,894
Biaya keuangan Finance costs	(14,678)	(15,485)	(5,388)	(2,057)	(190)
Laba sebelum pajak penghasilan Profit before income tax	55,459	91,423	452,322	581,343	236,704
Beban pajak penghasilan Income tax expense	16,807	23,929	118,559	143,980	66,287
Laba tahun berjalan Profit for the year	38,652	67,494	333,763	437,363	170,417
Saham ditempatkan dan disetorkan (dalam ribuan) ^(a) Fully paid and issued shares (in thousands) ^(a)	9,936,339	9,936,339	9,936,339	9,936,339	9,936,339
Jumlah saham yang diperdagangkan (dalam ribuan)^(a) Number of shares traded (in thousands)^(a)	2,081,042	2,204,687	1,958,013	4,314,781	4,472,088
Modal kerja bersih Net working capital	388,595	399,225	603,256	554,809	542,274
Rata-rata modal kerja tahunan Average yearly working capital	393,910	501,241	579,033	548,542	462,590
Jumlah aset Total assets	2,281,119	2,333,080	2,421,362	2,190,235	2,027,556
Belanja barang modal kas Cash capital expenditures	140,487	146,965	209,402	183,154	139,288
Jumlah kewajiban Total liabilities	566,853	611,646	652,193	510,395	446,250
Jumlah hutang bank bersih Total net bank borrowings	219,115	255,634	292,153	140,561	141,264
Jumlah ekuitas Total equity	1,714,266	1,721,434	1,769,169	1,679,840	1,581,306
EBITDA ^(b) EBITDA ^(b)	203,390	215,547	552,034	679,620	327,838
Harga saham pada akhir tahun (Rp) (jumlah penuh) ^(a) Share price at year-end (Rp) (full amount) ^(a)	2,650	2,350	3,200	4,875	3,650
Rupiah/AS\$ kurs tengah pada akhir tahun (jumlah penuh) Rupiah/US\$ mid rate at year-end (full amount)	12,198	9,822	9,059	9,000	9,500
Karyawan tetap pada akhir tahun Permanent employees at year-end	3,183	3,161	3,210	3,136	3,319
Rasio Profitabilitas Profitability Ratios					
Laba bruto/pendapatan Gross profit/revenue	0.15	0.17	0.41	0.49	0.32
Laba tahun berjalan/pendapatan Profits for the year/revenue	0.04	0.07	0.27	0.34	0.22
Laba per tahun/jumlah aset Profits for the year/total assets	0.02	0.03	0.14	0.20	0.08
Laba per tahun/ekuitas Profits for the year/equity	0.02	0.04	0.19	0.26	0.11
Tingkat pengembalian rata-rata modal (%) ^(c) Return on average capital employed (%) ^(c)	2%	5%	23%	33%	15%
Laba per saham (AS\$/saham) Earnings per share (US\$/share)	0.004	0.007	0.034	0.044	0.017

	2013	2012	2011	2010	2009
Rasio likuiditas Liquidity Ratios					
Aset lancar/kewajiban lancar Current assets/current liabilities	3.30	3.41	4.40	4.51	7.24
(Aset lancar-kewajiban lancar)/jumlah aset (Current assets - current liabilities)/Total assets	0.17	0.17	0.25	0.25	0.27
Analisa Struktur Modal/Rasio Hutang Capital Structure Analysis/Financial Leverage Ratios					
Jumlah kewajiban/jumlah ekuitas Total liabilities/total equity	0.33	0.36	0.37	0.30	0.28
Jumlah kewajiban/jumlah aset Total liabilities/total assets	0.25	0.26	0.27	0.23	0.22
Jumlah pinjaman bank bersih/jumlah aset Total net bank borrowings/total assets	0.10	0.11	0.12	0.06	0.07
Jumlah pinjaman bank bersih/jumlah ekuitas Total net bank borrowings/total equity	0.13	0.15	0.17	0.08	0.09
Jumlah pinjaman bank bersih/jumlah EBITDA Total net bank borrowings/EBITDA	1.08	1.19	0.53	0.21	0.43
Jumlah pinjaman bank bersih/jumlah nilai perusahaan Total net bank borrowings/enterprise value	0.10	0.10	0.09	0.03	0.04
Arus kas dari operasi/jumlah pinjaman bank Operating cash flow/total net bank borrowings	1.21	0.31	1.10	4.56	1.46
Jumlah pinjaman bank bersih/(arus kas dari operasi dikurangi pembayaran dividen) Total net bank / (operating cash flow minus dividends paid during the year)	1.01	(8.17)	3.74	0.46	1.42
Rasio Dividen Dividend Ratios					
Dividen/sumber dana untuk pembayaran dividen Dividends/Profits for the year	1.30	1.64	0.73	0.77	0.63
Dividen per saham/harga saham Dividends per share/share price	0.02	0.05	0.07	0.06	0.03
Rasio Pemanfaatan Arus Kas Cash Flow Coverage Ratios					
Arus kas dari operasi/penjualan Operating cash flow/revenue	0.29	0.08	0.26	0.50	0.27
Arus kas dari operasi/belanja barang modal Operating cash flow/capital expenditures	1.93	0.54	1.54	3.51	1.48
Arus kas dari operasi/dividen yang diumumkan Operating cash flow/dividends declared for the respective year	5.31	3.16	1.74	1.87	1.88
Rasio Analisa Pasar Modal Capital Market Analysis Ratios					
Kapitalisasi pasar (AS\$ juta) ^(d) Market capitalization (US\$ million) ^(d)	2,093	2,377	3,510	5,382	3,818
Nilai perusahaan (AS\$ juta) ^(d) Enterprise value (US\$ million) ^(d)	2,178	2,461	3,403	5,119	3,698
Harga terhadap nilai buku (kali) ^(e) Price to book value (times) ^(e)	1.26	1.38	1.98	3.20	2.41
Rasio harga saham terhadap laba Perseroan (kali) Price to earning ratio (times)	56	35	10	12	22

- a) Disajikan kembali untuk mencerminkan pemecahan saham Perseroan 1:4 efektif pada 3 Agustus 2004 dan 1:10 efektif pada 15 Januari 2008
- b) EBITDA = Laba sebelum pajak + beban keuangan + penyusutan, depleksi dan amortisasi.
Sejak tahun 2011, biaya keuangan termasuk beban akresi untuk provisi penghentian pengoperasian aset.
Sejak tahun 2012, perhitungan EBITDA mengeluarkan dampak dari laba/rugi selisih kurs.
- c) Laba sebelum pajak penghasilan dibagi dengan rata-rata modal tahunan yang digunakan (total ekuitas+total hutang)
- d) Nilai perusahaan = kapitalisasi pasar + jumlah hutang - kas dan setara kas; Kapitalisasi pasar = jumlah saham x harga saham (Rp)/nilai tukar
- e) Harga saham akhir tahun dalam dolar dibagi ekuitas per saham (jumlah ekuitas/jumlah saham yang diterbitkan)
- f) Berubah karena reklasifikasi aset lainnya, yaitu biaya pinjaman tanggungan menjadi pinjaman untuk menyesuaikan dengan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010
- g) Disajikan kembali untuk mencerminkan pembayaran tunai dividen untuk tahun yang bersangkutan

- a) Restated to reflect split of the Company's shares on a four-for-one basis effective August 3, 2004 and a ten-for-one basis effective January 15, 2008
- b) EBITDA = Profit before tax + interest expense + depreciation, depletion and amortization
Starting from Year 2011, finance costs included the accretion expenses for assets retirement provision
Starting from Year 2012, EBITDA calculation excluded the impact from exchange rate gain/loss
- c) Profits before income tax divided by yearly average capital employed (total equity+total debt)
- d) Enterprise value = market capitalization + total debt - cash and cash equivalents;
Market capitalization = number of shares x share price (Rp)/exchange rate
- e) Share price at year-end in dollars divided by equity per share (total equity/total issued shares)
- f) Changed due to reclassification of other assets deferred borrowing costs to borrowings to conform with the basis on which the financial statements for the year ended December 31, 2010 have been presented
- g) Restated to reflect cash dividends payment for the year

Profil pemegang saham

Shareholder profile

Pemegang saham utama dan pengendali

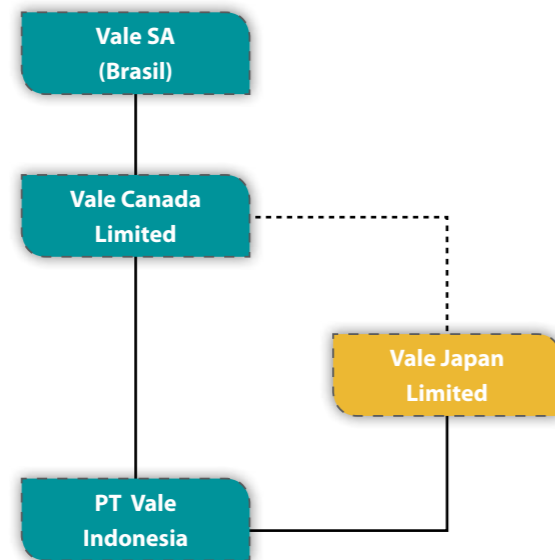
Entitas induk Perseroan adalah Vale Canada Limited dan entitas pengendali utama adalah Vale S.A., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Federal Brasil.

Major and controlling shareholders

The Company's immediate parent company is Vale Canada Limited and the ultimate parent entity is Vale S.A., a company established under the laws of the Federal Republic of Brazil.

Struktur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

The relationships are illustrated below:



Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012 hingga 31 Desember 2013, tidak terdapat perubahan dalam susunan pemegang saham utama Perseroan. Susunan tersebut adalah sebagai berikut:

There is no change in major shareholder composition from December 31, 2012 to December 31, 2013, are as follows:

	2013	2012
Vale Canada Limited*	58.73%	58.73%
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	20.09%	20.09%
Publik Public	20.49%	20.49%
Vale Japan Limited	0.55%	0.55%
Sumitomo Corporation	0.14%	0.14%

* Vale Canada Limited adalah sepenuhnya milik Vale S.A., perusahaan yang didirikan menurut undang-undang Republik Federal Brasil
* Vale Canada Limited is wholly owned by Vale S.A., a company established under the laws of the Federal Republic of Brazil

Tidak ada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi yang terdaftar sebagai pemegang saham PT Vale.

No members of the Board of Commissioners or Board of Directors own shares of PT Vale.

Kepemilikan Saham

Berikut adalah 20 pemegang saham terbesar PT Vale tanpa kepemilikan saham terafiliasi pada tahun 2013 dan 2012.

Share holdings

The 20 largest shareholders of PT Vale without affiliated shareholding for 2013 and 2012 are shown below.

2013			2012				
No	Pemegang Saham / Shareholders	Jumlah Saham / Number of Share	%	No	Pemegang Saham / Shareholders	Jumlah Saham / Number of Share	%
1	PT. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO)- JHT.	96,856,000	0.97%	1	BNYM SA/NV AS CUST OF EMPLOYEES PROVIDENT FUND	103,007,000	1.04%
2	BP2S LUXEMBOURG S/A ABERDEEN GLOBAL ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	95,175,000	0.96%	2	PT JAMSOSTEK (PERSERO) - JHT	96,856,000	0.97%
3	BNYM SA/NV AS CUST OF EMPLOYEES PROVIDENT FUND-2039844119	81,211,500	0.82%	3	JPMORGAN CHASE BANK NA RE NON-TREATY CLIENTS - 2157804006	87,915,278	0.88%
4	PT. JAMSOSTEK (PERSERO) - PROGRAM NON JHT	65,061,500	0.65%	4	PT JAMSOSTEK (PERSERO) - NON JHT	65,061,500	0.65%
5	BP2S LUXEMBOURG S/A ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND	54,696,000	0.55%	5	SSB W4B3 ACF WASATCH EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND -2144607597	55,013,416	0.55%
6	HONKY HARJO	49,222,000	0.50%	6	PICTET AND CIE	54,051,000	0.54%
7	JPMORGAN CHASE BANK NA RE NON-TREATY CLIENTS - 2157804006	48,073,969	0.48%	7	PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE-REF	49,940,500	0.50%
8	PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE-REF	44,496,500	0.45%	8	PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE-REF	48,199,500	0.49%
9	CITIBANK NEW YORK S/A DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND	42,720,500	0.43%	9	HONKY HARJO	43,772,000	0.44%
10	BBH BOSTON S/A VANGRD EMG MKTS STK INFD	38,662,927	0.39%	10	CITIBANK NEW YORK S/A DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND	41,280,500	0.42%
11	RD MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS - 831394000	33,999,000	0.34%	11	BBH BOSTON S/A VANGRD EMG MKTS STK INFD	38,838,125	0.39%
12	RD BNP PARIBAS EKUITAS - 897634000	25,172,500	0.25%	12	BP2S SINGAPORE/FULLY TAXABLE	29,530,000	0.30%
13	BP2S SINGAPORE/FULLY TAXABLE	24,793,000	0.25%	13	RD BNP PARIBAS EKUITAS - 897634000	28,200,000	0.28%
14	REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI DINAMIS	24,140,000	0.24%	14	BBH BOSTON S/A ABERDEEN INDONESIA FUND INC	22,145,500	0.22%
15	JPMCB-JPMORGAN FUNDS -2157804185	23,625,000	0.24%	15	NT TST CO S/A BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	21,485,000	0.22%
16	PT AIA FINL - UL EQUITY	22,128,000	0.22%	16	JPMCB-JPMORGAN FUND ICVC - JPM NATURAL RESOURCES FUND -2157804182	19,100,000	0.19%
17	REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS 90829.40.00	21,535,000	0.22%	17	REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS 90829.40.00	18,855,000	0.19%
18	ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA, PT - 4945-4000	18,938,500	0.19%	18	BONY LUXEMBOURG S/A EASTSPRING INVESTMENTS	18,100,000	0.18%
19	BBH BOSTON S/A ABERDEEN INDONESIA FUND INC	18,668,500	0.19%	19	SMARTLINK RUPIAH EQUITY FUND	16,755,000	0.17%
20	REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	16,940,000	0.17%	20	REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	16,331,500	0.16%



Profil pemegang saham

Shareholder profile

Kisaran saham

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah pemegang saham PT Vale berdasarkan rentang jumlah saham yang dimiliki pada tahun 2013 dan 2012.

Rentang Kepemilikan Saham / Range of Share Owned	2013		2012	
	Jumlah Saham / Number of Shares	Jumlah Pemegang Saham / Number of Shareholders	Jumlah Saham / Number of Shares	Jumlah Pemegang Saham / Number of Shareholders
1 - 1.000	1,238,933	1,555	1,487,454	1,831
1.001 - 5.000	21,540,632	6,071	23,876,384	6,783
5.001 - 10.000	15,147,927	1,822	18,566,840	2,227
10.001 - 100.000	113,224,848	3,377	141,989,748	4,188
100.001 - 1,000,000	227,105,426	732	265,925,448	883
>1,000,000	9,558,080,954	227	9,484,492,846	235
Total	9,936,338,720	13,784	9,936,338,720	16,147

Share range

The table below shows the number of PT Vale shareholders, categorized by range of shares owned, for 2013 and 2012.

Untuk informasi lebih lanjut

PT Vale menyebarkan pengumuman tentang kegiatan-kegiatan dan informasi perusahaan termasuk hasil laporan keuangan per triwulan lewat IDX E-Reporting dan situs Internetnya, distribusi jejaring surat elektronik kami dan lewat situs kami di www.vale.com/indonesia.

Pemegang saham maupun anggota masyarakat lain yang tertarik untuk mendapatkan informasi tambahan tentang PT Vale kami persilakan menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan di alamat yang tertera di bagian dalam sampul belakang laporan ini.

For more information

PT Vale disseminates releases announcing corporate material events and information as well as its quarterly financial results through IDX E-Reporting and website, an email distribution list as well as our website at www.vale.com/indonesia.

Shareholders or other members of the public who are interested in obtaining additional information about PT Vale are invited to contact the Corporate Secretary of the Company at the address shown on inside front back of this report.

Ikhtisar saham

Share highlights

Kronologi pencatatan saham

Saat ini, PT Vale memiliki 9.936.338.720 saham yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kronologi pencatatan saham adalah sebagai berikut:

Share listing chronology

Currently there are 9,936,338,720 shares of PT Vale registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Listing history of the shares is as follows:

Tanggal / Date	Nama / Name	Saham yang ditempatkan dan disetor penuh / Issued and fully paid shares	Nilai nominal / Par value	Modal ditempatkan dan disetor penuh / Issued and fully paid capital	Modal Dasar / Authorized Capital	
16 Mei 1990 / May 16, 1990	PT International Nickel Indonesia	248,408,468	Rp1,000	Rp248,408,468,000	Rp1,092,600,000,000	
14 Apr 2000 / Apr 14, 2000	PT International Nickel Indonesia Tbk.	248,408,468	Rp1,000	Rp248,408,468,000	Rp993,633,872,000	Authorized capital adjustment
3 Agt 2004 / Aug 3, 2004	PT International Nickel Indonesia Tbk.	993,633,872	Rp250	Rp248,408,468,000	Rp993,633,872,000	Stock Split 1:4
15 Jan 2008 / Jan 15, 2008	PT International Nickel Indonesia Tbk.	9,936,338,720	Rp25	Rp248,408,468,000	Rp993,633,872,000	Stock Split 1:10
24 Jan 2012 / Jan 24, 2012	PT Vale Indonesia Tbk.	9,936,338,720	Rp25	Rp248,408,468,000	Rp993,633,872,000	New Name of Vale Indonesia

Tidak terdapat perubahan jumlah saham dan suspensi saham dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Number of shares has not changed for the last five years and the share trading has not been suspended during that period.

Tidak terdapat aksi korporasi yang mempengaruhi jumlah saham sejak tanggal 15 Januari 2008.

There was no corporate action that affects number of shares since January 15, 2008.

Perusahaan tidak mengeluarkan efek lainnya hingga saat penyampaian laporan ini.

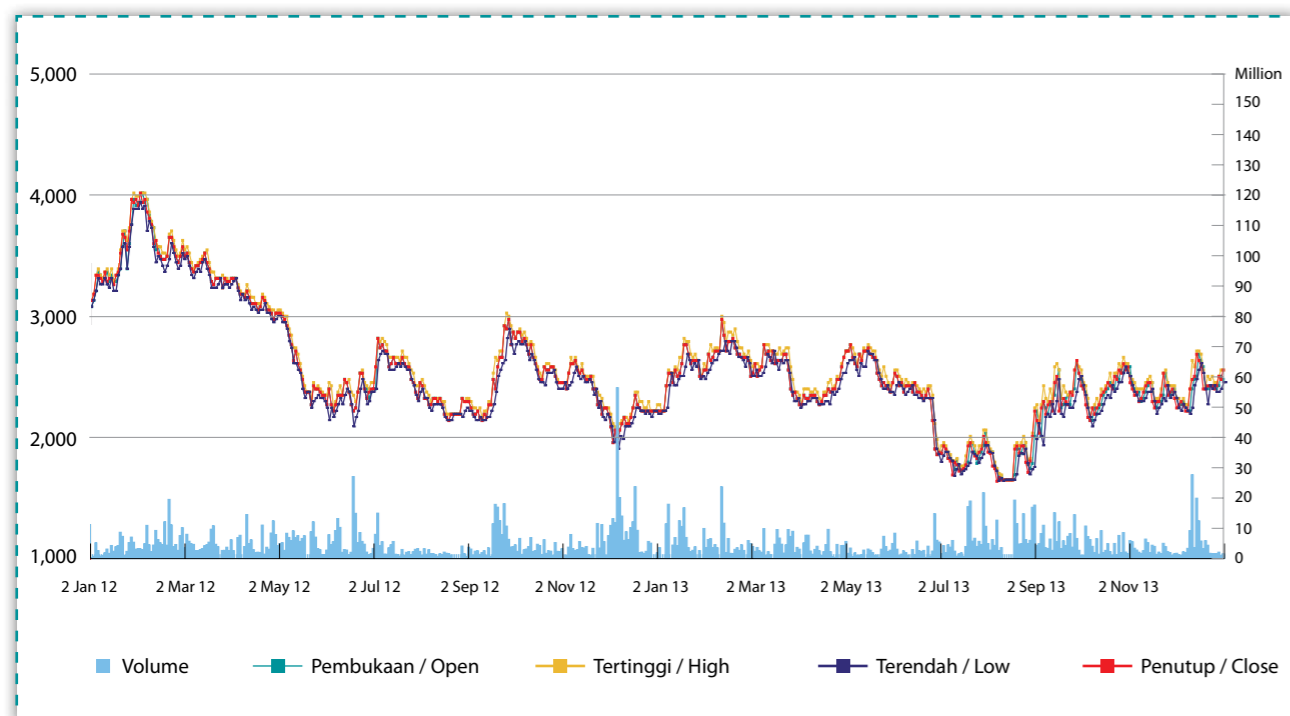
There are no other securities issued by the Company at the time of filing of the report.

Ikhtisar saham Share highlights

Ikhtisar saham Share highlights

Kinerja saham

Grafik di bawah ini memperlihatkan kinerja saham (harga saham tertinggi, rata-rata, penutup, dan terendah serta volume transaksi harian) di bursa saham pada tahun 2012 dan 2013.



Share performance

Following graph shows share performance (highest, average, closing and lowest share price, and daily trading volume) in the exchange for 2012 and 2013.

Harga saham

Tabel di bawah ini menunjukkan pergerakan harga saham per triwulan dan rata-rata volume transaksi harian pada tahun 2013 dibandingkan dengan 2012.

Tahun / Year	Triwulan / Quarter	Terendah / Lowest (Rp)	Tertinggi / Highest (Rp)	Penutupan / Closing (Rp)	Jumlah saham yang diperdagangkan (ribu) / Share trading volume (thousand)
2013	1	2,350	3,075	2,375	570,545
	2	1,920	2,850	2,025	359,853
	3	1,770	2,725	2,250	731,763
	4	2,250	2,800	2,650	418,881
2012	1	3,150	4,050	3,375	523,517
	2	2,200	3,375	2,675	638,356
	3	2,250	3,100	2,950	413,444
	4	2,025	2,950	2,350	629,370

Share price

Following table shows the quarterly changes in share price and the average daily trading volume in 2013 compared to 2012.

Sejarah dividen

Tidak terdapat tindakan perusahaan yang mempengaruhi jumlah saham sejak tanggal 15 Januari 2008.

Tahun / Year	Dividen / Dividend	Tgl pembayaran / Payment date	Jumlah Dividen / Dividend amount US\$ / Saham Share	Rp / Saham Share
2013	13 Interim / Interim	18 Des Dec	0.00252	30.14
	12 Akhir / Final	31 Mei May	0.00252	24.60
2012	12 Interim / Interim	27 Des Dec	0.00252	24,31
	11 Akhir / Final	1 Jun Jun	0.0086	79,70
2011	11 Interim / Interim	21 Nop Nov	0.0100	89,40
	10 Akhir / Final	20 Mei May	0.0146	125,06
2010	10 Interim / Interim	22 Okt Oct	0.0200	178,44
	09 Akhir / Final	-	-	-
	08 Akhir / Final	13 Apr Apr	0.0141	128,17
2009	09 Interim / Interim	29 Des Dec	0.01107	107,72
	09 Interim / Interim	-	-	-
2008	08 Interim / Interim	-	-	-
	07 Akhir / Final	06 Mei	0,02264	208,15

Dividend history

There was no corporate action that affects number of shares since January 15, 2008. Following is a summary of dividends paid in the last five years.

Dividen bagi pemegang saham asing dinyatakan dan dibayar dalam dolar AS. Bagi pemegang saham Indonesia, dividen dibayarkan dalam Rupiah yang nilainya setara dengan dividen yang dinyatakan dalam dolar AS, berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal tutup buku dividen.

Dividends are declared and paid to foreign shareholders in U.S. dollars. For Indonesian shareholders dividend are paid in Rupiah equivalent to the dividend declared in U.S. dollars, based on the middle rate determined by the Bank of Indonesia rate on the dividend record date.

Kapitalisasi Pasar

Tabel di bawah ini menunjukkan kapitalisasi pasar pada akhir tahun:

pada as of	milyar billion	juta million	Kurs Rate
31 Des / Dec 31, 2013	Rp25.536	US\$2,093	Rp12,198 /US\$1
31 Des / Dec 31, 2012	Rp23.350	US\$2,377	Rp9,822 /US\$1

Market Capitalization

Market capitalization per end of year is presented below:



PEMBAHASAN DAN ANALISA MANAJEMEN

Management's discussion
& analysis



Pembahasan dan analisa manajemen Management's discussion & analysis

Pembahasan dan Analisa Manajemen atas Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi berikut harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale atau Perseroan) dan catatan yang terkait, yang dinyatakan dalam dolar AS dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

The following Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations should be read in conjunction with PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale or The Company) financial statements and related notes included in this Annual Report, which are expressed in US dollars and prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Meskipun penurunan nilai pasar nikel terus berlanjut, kinerja keuangan dan operasional PT Vale pada tahun 2013 mencatatkan kinerja positif. Produksi nikel dalam matte telah melampaui volume yang diproduksi pada tahun 2012, dan Perseroan terus mengurangi biaya produksi. Dengan berbagai peningkatan yang dihasilkan dari pelaksanaan perdana Proyek Konversi Batu Bara, kami mampu mewujudkan penghematan biaya yang signifikan dan berkelanjutan pada tahun ini.

Despite continuing declines in the market value of nickel, PT Vale's financial and operational performance in 2013 was positive. Production of nickel in matte exceeded 2012 volumes, and the Company continued to reduce the cost of production. With improvements realized through the initial implementation of the Coal Conversion Project, we were able to realize a significant and sustainable cost saving in the year.

Pembahasan dan analisa manajemen Management's discussion & analysis

Pasokan nikel global tahun 2013



The global nickel industry in 2013



Keberhasilan kami dalam meningkatkan kapasitas produksi, disertai dengan pengelolaan biaya tetap, menunjukkan kemampuan kami dalam menerapkan strategi pertumbuhan jangka panjang secara efektif.

The success of our efforts to increase production capacity, coupled with those in managing fixed costs, indicate our ability to implement our long-term growth strategy effectively.

Penggunaan energi alternatif dari pembangkit listrik tenaga air Karebbe telah terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi konsumsi HSFO dan HSD.

The utilization of alternative energy from the Karebbe hydroelectric plant has proven effective in improving the efficiency of HSFO and HSD consumption.

Investasi infrastruktur operasional di Tanur Listrik kami telah meningkatkan kapasitas produksi.

Operational infrastructure investments in our Electric Furnaces have improved our production capacity.

Investasi yang berkesinambungan dalam Proyek Konversi Batubara dan Program Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan (OMIP), serta pengembangan beberapa proyek baru, telah memberikan hasil yang baik.

Ongoing investment in the Coal Conversion Project and the Operations and Maintenance Improvement Program (OMIP), as well as the development of new projects, have delivered measurable results.

Investasi dan inisiatif efisiensi ini telah mengurangi dampak dari rendahnya harga nikel dan tingginya harga bahan bakar memungkinkan kami untuk memberikan nilai optimal kepada para pemegang saham.

These investments and efficiency initiatives have reduced the impact of low nickel price and high fuel costs and are allowing us to deliver optimized value to shareholders.



Pembahasan dan analisa manajemen
Management's discussion & analysis

Pembahasan dan analisa manajemen
Management's discussion & analysis

TINJAUAN USAHA

Tinjauan pasar nikel 2013

Pasokan nikel global mengalami pertumbuhan yang kuat dalam beberapa tahun terakhir, di mana tahun 2013 naik hampir 7% dibandingkan dengan 2012. Pertumbuhan ini terutama berasal dari Indonesia yang memasok bijih nikel ke Cina untuk menghasilkan *nickel pig iron* dan *ferro-nickel*. Pada 2013, perkiraan produksi *nickel pig iron* dan *ferro-nickel* Cina terus meningkat, yang mewakili 25% dari produksi nikel global. Namun implementasi undang-undang pertambangan Indonesia yang membatasi ekspor bijih yang belum diproses akan mempengaruhi produksi *nickel pig iron* dan produksi *ferro-nickel* Cina dalam tahun-tahun mendatang.

BUSINESS REVIEW

Review of nickel market in 2013

The global nickel industry has experienced strong supply growth in recent years, growing almost 7% in 2013 compared to 2012. This growth came primarily from Indonesia, supplying China with nickel ores to produce nickel pig iron and ferro-nickel. In 2013, estimated Chinese nickel pig iron and ferro-nickel production continued to increase, representing 25% of global nickel output. However, the implementation of the Indonesian mining law restricting the export of unprocessed ores will impact Chinese nickel pig iron and ferro-nickel production in coming years.

dan produksi *nickel pig iron* dan *ferro-nickel* Cina menyebabkan harga nikel terus di bawah tekanan, rata-rata AS\$15.003 per ton untuk tahun 2013 ini. Namun dalam jangka panjang kami tetap positif pada prospek dan terus tumbuhnya permintaan nikel.

pressure, averaging US\$15,003 per tonne for the year. Longer-term, we remain positive on the outlook for nickel and continued demand growth.

LME harga tunai nikel (AS\$ per ton)

LME cash nickel price (US\$ per ton)



Negara Countries	Nickel Production (000)MT - estimates			
	2011	2012	2013	Change
Indonesia Indonesia	465	546	649	19%
Filipina Philippines	206	220	259	18%
Rusia Russia	274	259	243	-6%
Australia Australia	191	235	224	-5%
Kanada Canada	215	197	211	7%
Kaledonia Baru New Caledonia	128	138	164	19%
RRC China	98	110	112	2%
Brasil Brazil	95	126	88	-30%
Kuba Cuba	83	74	67	-9%
Kolombia Colombia	44	60	58	-4%
Negara lainnya Other countries	189	205	236	15%
Produksi tambang dunia Global mined production	1,990	2,171	2,313	7%

Sumber / Source: Wood Mackenzie

Permintaan global untuk nikel meningkat 9% y-o-y menjadi 1.875 kt, terutama didorong oleh permintaan domestik yang kuat dari Cina. Meskipun permintaan di tahun 2013 adalah suatu rekor, kelebihan pasokan dari penyelesaian proyek-proyek yang telah berjalan

Global demand for nickel increased 9% y-o-y to 1,875kt, driven primarily by strong domestic demand from China. Despite record demand in 2013, oversupply from projects ramping up and Chinese nickel pig iron and ferro-nickel production kept nickel prices under

Perubahan peraturan yang berdampak pada bisnis kami

Seperti yang tercatat pada Laporan Tahunan PT Vale 2012, pada 10 Januari 2012, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Presiden No. 3/2012 tentang pembentukan tim yang bertugas mengevaluasi Kontrak Karya mineral dan Kontrak Karya Batubara agar sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Pertambangan 2009 yang disahkan pada Januari 2009 lalu. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa seluruh Kontrak Karya Mineral dan Kontrak Karya Batubara harus direvisi agar selaras dengan ketentuan undang-undang.

Changes to laws affecting our business

As reported in PT Vale's 2012 Annual Report, on January 10, 2012, the Indonesian Government issued Presidential Decree No. 3/2012 formally establishing a team tasked with evaluating existing mineral CoWs and Coal Contracts of Work (CCoWs), to bring them into line with the provisions of the 2009 Mining Law passed in January 2009. The Law requires all existing CoWs and CCoWs to be amended to harmonize them with the Law.

Rapat formal pertama Perseroan dalam rangka renegotiasi Kontrak Karya berlangsung pada 11 September 2012. Pemerintah Pusat menekankan enam

The Company's first formal CoW renegotiation meeting was held on September 11, 2012. The Central Government emphasized six points of renegotiation

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis



pokok renegotiasi untuk kembali didiskusikan lebih lanjut, yaitu:

1. Luas wilayah Kontrak Karya;
2. Jangka waktu dan bentuk perpanjangan Kontrak Karya;
3. Kewajiban keuangan (royalty dan pajak);
4. Kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri;
5. Kewajiban divestasi (51%); dan
6. Prioritas penggunaan barang dan jasa dalam negeri.

Sepanjang 2012 dan 2013, PT Vale dan Pemerintah telah mengadakan sejumlah rapat renegotiasi Kontrak Karya. Diskusi mengenai hal ini berlangsung intensif sejak September 2013 hingga tanggal dituliskannya laporan ini. Sampai dengan proses renegotiasi selesai, Perseroan belum dapat menentukan sepenuhnya sejauh apa dampak renegotiasi terhadap Kontrak Karya.

Selain itu, terdapat beberapa hukum dan peraturan yang dikeluarkan pada 2013 atau tahun berikutnya, yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan.

Pada tanggal 6 Agustus 2013, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Peraturan Menteri No. 20 tahun 2013 ("Peraturan No. 20/2013") sebagai pengganti Peraturan No. 7/2012. Berdasarkan Peraturan No. 20/2013, pemegang ijin pertambangan dan ijin usaha pertambangan khusus (IUP and IUPK; Ijin Usaha Pertambangan dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus) dapat bekerja sama dengan pemegang IUP dan IUPK lainnya dengan persetujuan dari Kementerian ESDM, Gubernur, Bupati atau Walikota. Selain itu, pemegang IUP dan IPR dapat mengeksport bijih/bahan mentah setelah memperoleh izin ekspor dari Kementerian Perdagangan.

during this meeting for further discussions, as follows:

1. Size of the CoW area;
2. Term and form of CoW extension;
3. Financial obligations (royalty and taxes);
4. Domestic processing and refining;
5. Mandatory divestment (51%); and
6. Priority use of domestic goods and services.

Throughout 2012 and 2013, there were several meetings between PT Vale and the Government regarding CoW renegotiation. Discussions continued intensively from September 2013 until the time of writing of this Annual Report. Until the renegotiation process is completed, the Company is unable to fully determine to what extent its CoW will be affected.

In addition, there were other laws and regulations, issued in 2013 or after, that could affect the Company's business.

On August 6, 2013, the Minister of Energy and Mineral Resources (MEMR) issued Regulation No. 20 of 2013 ("Reg No. 20/2013") to further amend Reg No. 7/2012. Under Reg No. 20/2013, mining license and special mining license holders (IUP and IUPK; Ijin Usaha Pertambangan and Ijin Usaha Pertambangan Khusus) may cooperate with other IUP and IUPK holders with approval from the MEMR, governor, regent or mayor. In addition, IUP and IPR holders may export ore/raw materials after obtaining an export permit from the Minister of Trade.

Pada 13 September 2013, Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 27 tahun 2013 (Permen No. 27/2013). Permen No.27/2013 merupakan peraturan pelaksanaan dari PP No. 23/2010 dan PP No. 24/2012, yang menjabarkan prosedur dan penetapan harga divestasi saham dan perubahan khusus investasi dalam bisnis pertambangan mineral dan batubara.

Permen No. 27/2013 mengatur bahwa semua pemegang Kontrak Karya harus mengikuti prosedur divestasi, prosedur pembayaran, dan mekanisme penetapan harga sesuai dengan Permen No. 27/2013 dari tanggal penerbitan. Perusahaan sedang menelaah dampak dari PP No. 27/2013. Karena divestasi merupakan salah satu butir perundingan ulang KK, Perseroan akan terus membahas masalah ini dengan Pemerintah.

Pada tanggal 11 Januari 2014, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2014 sebagai perubahan kedua dari PP No. 23 yang telah dirubah dengan PP No.24/2012 (PP No. 1/2014).

Untuk melaksanakan PP No.1/2014, pada tanggal yang sama, Kementerian ESDM juga mengeluarkan Peraturan No. 1 tahun 2014 ("Permen ESDM 1/2014") untuk menggantikan Permen No. 7/2012 sebagaimana telah diamandemen dengan Permen No. 11/2012 dan Permen No. 20/2013. Berdasarkan peraturan ini, kegiatan ekspor bahan mentah pada dasarnya tidak lagi diperbolehkan sejak 12 Januari 2014. Di bawah Peraturan ESDM 1/2014, pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan pemegang IUP Operasi Produksi mineral non-logam wajib melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri sesuai dengan batas minimum sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan ini. Sebagai bagian dari peraturan larangan ekspor, produk Perseroan saat ini, yaitu nikel dalam matte, memenuhi batas minimum yang ditetapkan dalam Permen ESDM 1/2014 mengenai kegiatan ekspor.

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

On September 13, 2013, the MEMR issued Regulation No. 27 of 2013 ("Reg No. 27/2013"). Reg No. 27/2013 is one of the most important implementing regulations of GR No. 23/2010 and GR No. 24/2012, outlining the procedures and determination of share divestment prices and changes of investment particulars in the mineral and coal mining business.

Reg No. 27/2013 provides that all CoW holders must follow the divestment procedure, payment procedure, and pricing mechanism provided in Reg No. 27/2013 from its issuance date. The Company is analyzing the impact of Reg No. 27/2013. As divestment is one of the CoW renegotiation items, the Company shall continue to discuss this matter with the Government.

On January 11, 2014, the Government issued Government Regulation No. 1 of 2014 as the second amendment to GR No.23 as amended by GR No.24/2012 ("GR No. 1/2014").

To implement GR No.1/2014, on the same date, the MEMR also issued Regulation No. 1 of 2014 ("MEMR Reg 1/2014") to replace Reg No. 7/2012 as amended by Reg No. 11/2012 and Reg No. 20/2013. Based on these regulations, in principle, it is prohibited to export any raw materials as from January 12, 2014. Under MEMR Reg 1/2014, metal mineral IUP Operation Production holders and non-metal mineral IUP Operation Production holders must conduct domestic processing and refining in accordance with the minimum threshold as provided in the attachment to this regulation. As part of the export ban regulations, the Company's current product, i.e., nickel in matte, satisfies the minimum thresholds set out in the MEMR Reg 1/2014 for export.

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

Selain itu, Kementerian Keuangan mengeluarkan pajak ekspor produk mineral melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.011/2014 tanggal 11 Januari 2014 dalam Amandemen yang Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Pajak dan Tarif Pajak. Lampiran dari peraturan ini tidak merinci bijih nikel ekspor atau produk yang mengandung nikel lainnya, sebagai objek pajak dan tarif pajak tertentu.

Untuk memperjelas ketentuan dalam PP No. 1/2014 dan Permen ESDM 1/2014 yang menyatakan "jumlah tertentu", terdapat pula Peraturan Menteri No. 04/M-DAG/PER/1/2014 yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan. Peraturan ini mengatur kewajiban untuk memastikan klasifikasi produk mineral, kewajiban untuk mendaftarkan sebagai eksportir resmi dan kewajiban untuk memperoleh persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan.

Untuk PT Vale, yang produknya berada pada Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan, kewajiban yang berlaku adalah untuk memastikan klasifikasi produk dan untuk mendaftarkan sebagai eksportir resmi.

Perseroan bekerja sama dengan Kantor Pabean untuk mengejar kepatuhan dan terus mengawasi setiap perkembangan yang relevan dan menilai setiap dampak lebih lanjut terhadap operasinya, jika ada.

Hingga laporan ini dikeluarkan, Perseroan terus mengekspor produknya. Perseroan telah memperoleh surat rekomendasi dari Kementerian ESDM yang diperlukan untuk mendaftarkan sebagai eksportir resmi di Kementerian Perdagangan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai perubahan peraturan yang berdampak pada usaha kami, silakan merujuk pada Catatan atas Laporan Keuangan, dimulai di halaman 62.

In addition, the Minister of Finance issued an export tax on mineral products through Minister of Finance Regulation No. 6/PMK.011/2014 dated January 11, 2014 on the Second Amendment to the Minister of Finance Regulation No. 75/PMK.011/2012 on the Stipulation of Export Goods Subject to Tax and Tax Tariff. Attachment of this regulation does not list export nickel ore or any other nickel-contained products as subject to tax and certain tax tariff.

To clarify provisions in GR No. 1/2014 and MEMR Reg 1/2014 stating "certain amount", there is also Ministerial Regulation No. 04/M-DAG/PER/1/2014 issued by the Minister of Trade. It regulates obligations to verify classification of mineral products, obligation to register as an official exporter and obligations to obtain export approval from the Minister of Trade.

For PT Vale, whose product falls under Attachment 1 of the Trade Ministerial regulation, the applicable obligations are to verify the classification of the product and to register as an official exporter.

The Company is working together with the Customs Office to pursue compliance and continues to monitor any relevant development and assess any further impacts on its operations, if any.

As at the date of this report, the Company continues to export its product. The Company has obtained a recommendation letter from the MEMR required for the registration as an official exporter at the Minister of Trade.

For more information regarding changes to laws affecting our business, please refer to the Notes to the Financial Statements, beginning on page 62.

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

TINJAUAN OPERASIONAL TAHUN 2013

Produksi dan pengiriman

Produksi nikel dalam matte adalah 75.802 ton pada tahun 2013, dibandingkan dengan 70.717 ton pada tahun 2012, meningkat 7% atau 5.085 ton. Peningkatan ini terutama didorong oleh produksi kalsin yang lebih tinggi sebagai akibat dari kapasitas tungku yang lebih tinggi dan daya rata-rata tungku yang disediakan oleh fasilitas tenaga air pembangkit listrik kami. Peningkatan produksi ini diimbangi oleh gangguan pada tungku listrik. Pengiriman nikel dalam matte meningkat sebesar 8%, dari 71.379 ton hingga menjadi 77.198 ton pada tahun 2013. Silakan menyimak tabel di bawah ini:

2013 OPERATIONAL OVERVIEW

Production and deliveries

Our nickel in matte production was 75,802 metric tons in 2013 compared to 70,717 metric tons in 2012, a 7% or 5,085 metric tons increase. The increase was mainly driven by higher calcine throughput as result of higher furnace capacity as well as the furnace average power supplied by our hydroelectric power-generating facilities. This production increase was offset by electric furnace issues. Nickel in matte deliveries rose to 77,198 metric tons in 2013 from 71,379 metric tons in 2012 or higher by 8%. Please refer to the table for production and deliveries below.

Produksi dan pengiriman Production and deliveries	2013	2012	Δ	Var (%)
Produksi nikel dalam matte (ton) Nickel in matte product (tons)	75,802	70,717	5,085	7%
Pengiriman nikel matte (ton) Nickel matte deliveries (tons)	77,198	71,379	5,819	8%
Harga realisasi rata-rata (AS\$/mt) Average realized price (US\$/mt)	11,939	13,552	(1,613)	-12%

Pendapatan

Pada tahun 2013 penjualan turun menjadi AS\$921,6 juta, AS\$45,7 juta lebih rendah daripada tahun 2012 sebesar AS\$967,3 juta. Penurunan ini disebabkan oleh lebih rendahnya harga realisasi rata-rata. Harga realisasi rata-rata nikel dalam matte pada tahun 2013 adalah AS\$11.939 per ton, turun 12% dari AS\$13.552 per ton pada tahun 2012, penurunan ini diimbangi dengan pengiriman yang lebih tinggi sebesar \$69,5 juta dimana pengiriman nikel dalam matte pada tahun 2013 sebesar 77.198 ton dibandingkan 71.379 ton pada 2012.

Revenue

Our 2013 sales decreased to US\$921.6 million, US\$45.7 million lower than 2012 sales of US\$967.3 million. The decrease in sales was driven by the lower average realized selling price. The average realized price of our nickel in matte in 2013 was US\$11,939 per ton, down 12% from US\$13,552 per ton in 2012, offset by higher deliveries of \$69.5 million as we delivered 77,198 tons nickel matte in 2013 compared to 71,379 tons in 2012.



Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

Laporan Laba Rugi Komprehensif Statement of Comprehensive Income	2013	2012	Δ	Var (%)
(Dalam ribuan AS\$) (US\$ in thousands)				
Pendapatan Revenue	921,638	967,327	(45,689)	-5%
Beban pokok pendapatan Cost of revenue	(781,744)	(800,622)	(18,878)	-2%
Laba bruto Gross profit	139,894	166,705	(26,811)	-16%
Pendapatan lainnya Other income	(455)	(564)	(109)	-19%
Beban usaha Operating expenses	13,041	12,613	428	3%
Biaya lainnya Other expense	57,171	47,748	9,423	20%
Laba usaha Operating profit	70,137	106,908	(36,771)	-34%
Biaya keuangan Finance costs	14,678	15,485	(807)	-5%
Laba sebelum pajak penghasilan Profit before income tax	55,459	91,423	(35,964)	-39%
Beban pajak penghasilan Income tax expenses	16,807	23,929	(7,122)	-30%
Laba tahun berjalan Profit for the year	38,652	67,494	(28,842)	-43%
Pendapatan komprehensif lainnya Othe comprehensive income	(4,260)	4,737	(8,997)	-190%
Pendapatan komprehensif Comprehensive income	42,912	62,757	(19,845)	-32%
EBITDA EBITDA	203,390	215,547	(12,157)	-6%

Beban pokok pendapatan

Biaya terbesar kami terdiri dari bahan bakar minyak, bahan pembantu, pembayaran dan tunjangan karyawan, jasa dan kontrak, dan depresiasi, amortisasi, serta deplesi, yang mencakup lebih dari 90% dari total biaya produksi baik pada tahun 2013 maupun 2012. Beban pokok pendapatan mengalami penurunan sebesar 2% menjadi AS\$781,7 juta pada tahun 2013 dari AS\$800,6 juta pada tahun 2012. Penurunan ini terutama disebabkan oleh biaya produksi yang lebih rendah. Lihat pembahasan Beban pokok produksi pada halaman selanjutnya untuk penjelasan lebih lanjut mengenai kecenderungan tingkat biaya pada tahun 2013.

Cost of revenue

Our largest costs are fuels, supplies, employee payments and benefits, services and contracts and depreciation, amortization and depletion. These comprise more than 90% of total production costs in both 2013 and 2012. Cost of revenue decreased by 2% to US\$781.7 million in 2013 from US\$800.6 million in 2012. This decrease is mainly resulted from lower costs of production. Please refer to the Cost of Production discussion below for further explanation of the trends in costs during 2013.

Beban Pokok Pendapatan Cost of revenue	2013	2012	Δ	Var (%)
(Dalam ribuan AS\$) (US\$ in thousands)				
Bahan bakar minyak dan pelumas Fuels and lubricants	290,665	305,350	(14,685)	-5%
Bahan pembantu Supplies	141,095	131,947	9,148	7%
Penyusutan, amortisasi dan deplesi Depreciation, amortization and depletion	110,748	102,286	8,462	8%
Biaya karyawan Employee costs	100,360	105,979	(5,619)	-5%
Jasa dan kontrak Services and contracts	88,608	90,240	(1,632)	-2%
Pajak dan asuransi Taxes and insurance	27,191	24,920	2,271	9%
Royalti Royalties	7,093	5,663	1,430	25%
Lainnya Others	16,003	17,936	(1,933)	-11%
Persediaan dalam proses In process inventories	(2,308)	18,509	(20,817)	-112%
Harga pokok produksi Cost of production	779,455	802,830	(23,375)	-3%
Barang jadi Finished goods	2,289	(2,208)	4,497	-204%
Beban pokok pendapatan Cost of revenue	781,744	800,622	(18,878)	-2%

Beban pokok produksi

Biaya produksi turun sebesar AS\$23,4 juta menjadi AS\$779,5 juta pada tahun 2013 dari AS\$ 802,8 juta pada tahun 2012. Penurunan ini terutama disebabkan oleh biaya yang lebih rendah untuk High Sulphur Fuel Oil (HSFO), biaya karyawan, jasa dan kontrak, dan biaya operasional lainnya. Sementara itu, penurunan pada biaya bahan bakar dan pelumas terutama disebabkan oleh harga HSFO yang lebih rendah, dan keuntungan yang dihasilkan dari proyek konversi batu bara pada pabrik pengolahan ini sebagian dikompensasi oleh konsumsi High Speed Diesel (HSD) yang lebih tinggi akibat tingginya konsumsi yang berhubungan dengan banyaknya material yang dipindahkan dalam tambang. Biaya karyawan menurun terutama karena penyusutan yang signifikan atas nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS. Penurunan biaya lain berasal

Cost of production

The cost of production fell by US\$23.4 million to US\$779.5 million in 2013 from US\$802.8 million in 2012. The decrease was mainly due to lower costs for High Sulphur Fuel Oil (HSFO), employee costs, service and contracts, and other operational expenses. While the decrease in fuels & lubricant costs was largely due to a lower HSFO price, and the benefits realized by coal conversion in the processing plant this was partially offset by higher High Speed Diesel (HSD) consumption owing to higher consumption related to more material being moved within the mine. Employee costs decreased mainly due significant depreciation of the Rupiah exchange rate against the US dollar. The other cost decrease was from cost savings in services and contracts and other corporate charges. These decreases were partially offset by higher supplies, taxes

Pembahasan dan analisa manajemen Management's discussion & analysis

dari penghematan biaya jasa dan kontrak dan biaya perusahaan lainnya. Penurunan ini juga sebagian diimbangi oleh peningkatan bahan pembantu, pajak dan asuransi, royalti dan penyusutan, amortisasi dan depleksi. Peningkatan bahan pembantu terkait dengan pemeliharaan perbaikan atas insiden tanur listrik, perbaikan atap tanur listrik, pemeliharaan pengering dan tanur reduksi, konsumsi tingginya produksi matte, peningkatan royalti akibat peningkatan hasil produksi, dan volume penjualan.

PT Vale menyelesaikan Proyek Konversi Batubara (CCP) tahap 1 pada kuartal keempat tahun 2013. Proyek ini mengurangi biaya produksi kami sekitar US\$12 juta pada tahun 2013. Dengan keberhasilan ini, kami terus melanjutkan studi atas Proyek Konversi Batubara tahap 2 (CCP2), yang diharapkan dapat mengurangi penggunaan HSFO dalam Tanur Pereduksi.

Bahan Bakar. Bahan bakar merupakan komponen terbesar dari biaya produksi, sekitar 37% pada tahun 2013, yang turun dari 38% pada tahun 2012. Kami mengutamakan penggunaan HSFO untuk mengoperasikan pabrik pengolahan kami, dan HSD sebagai bahan bakar armada tambang dan pembangkit thermal listrik. HSFO menyumbang sekitar 81% dari biaya bahan bakar pada tahun 2013, dibandingkan dengan 83% pada tahun 2012. HSD menyumbang sekitar 18% dari biaya bahan bakar pada tahun 2013, dibandingkan dengan 16% pada tahun 2012. Sebesar 1% sisanya adalah untuk bahan bakar lain pada tahun 2013 dan 2012.

Biaya HSFO menurun sebesar 7% pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012, didorong oleh harga HSFO rata-rata yang lebih rendah namun diimbangi oleh peningkatan konsumsi akibat produksi yang lebih tinggi. Konsumsi HSFO pada kuartal keempat menurun 33% dibandingkan konsumsi pada periode

and insurance, royalty and depreciation, amortization and depletion. The increase in supplies relates to the maintenance repair for the electric furnace incident, electric furnace roof repair, maintenance for dryers and kilns, major bulks consumption due to higher consumption volume as matte production increased, royalty expense increases as a result of the production, and the sales volume increase.

PT Vale completed the Coal Conversion Project (CCP) phase 1 in fourth quarter of 2013. It reduced our production cost by about US\$12 million in 2013. With this success, we are continuing our study of Coal Conversion Project phase 2 (CCP2), which is expected to reduce HSFO consumption in the Reduction Kilns.

Fuels. Fuels are the largest components of our production cost at about 37% in 2013, down slightly from 38% in 2012. We primarily use HSFO to operate our processing plant and HSD to fuel our mining fleets and thermal power generators. HSFO accounted for about 81% of our fuels cost in 2013, compared to 83% in 2012. Meanwhile, HSD accounted for about 18% of our fuels cost in 2013, compared to 16% in 2012, with the remaining 1% for other fuels in 2013 and 2012.

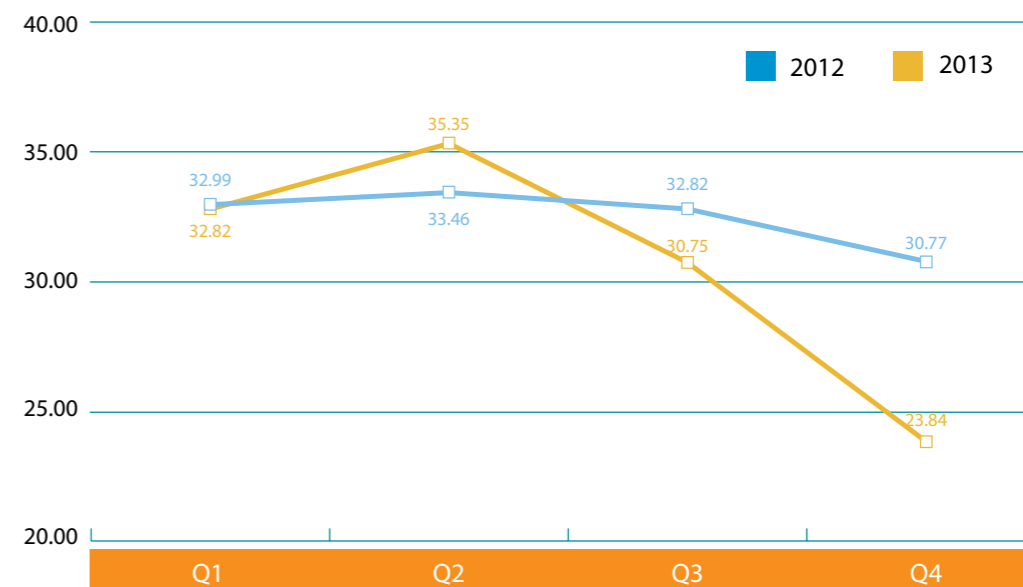
HSFO cost decreased 7% in 2013 compared to 2012, driven by a lower average HSFO price but offset by an increase in consumption due to higher production. The fourth quarter HSFO consumption was down 33% from the fourth quarter in 2012 owing to the ramp up of our coal conversion project. Our HSFO consumption

Pembahasan dan analisa manajemen Management's discussion & analysis

yang sama tahun 2012 karena adanya peningkatan proyek konversi batubara. Konsumsi HSFO sebanyak 2,3 juta barel pada tahun 2013 meningkat sebesar 0,04 juta barel dibandingkan dengan tahun 2012 (41,079 barel), pada harga rata-rata AS\$100,79 per barel, dibandingkan harga rata-rata AS\$110,50 per barel pada tahun 2012. Efisiensi konsumsi operasi HSFO terhadap tingkat produksi nikel meningkat dari 32.38 barel per ton pada tahun 2012 menjadi 30,75 barel per ton pada tahun 2013, atau sekitar AS\$23 juta dalam hal efisiensi produksi.

was 2.3 million barrels in 2013, slightly higher by 0.04 million barrels (41,079 barrels) compared to 2012, at an average price of US\$100.79 per barrel, compared to an average price of US\$110.50 per barrel in 2012. The HSFO operational consumption efficiency over nickel production rate was improved from 32.38 barrel per ton in 2012 compared to 30.75 barrel per ton in 2013, or about US\$23 million in terms of production efficiency.

Kebutuhan HSFO untuk produksi nikel per ton
HSFO consumption per tonne nickel



Harga HSFO kami didasarkan pada indeks Platts Singapura. PT Vale menyadari pentingnya biaya HSFO terhadap biaya keseluruhan dan terus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi konsumsi HSFO seraya mencari sumber energi alternatif yang lebih ekonomis.

Our HSFO price is based on the Singapore Platts indices. PT Vale recognizes the significance of HSFO cost to overall costs and is continuously seeking ways to increase the efficiency of our HSFO consumption while looking for alternative and less-expensive energy



Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

Salah satu langkah penghematan energi yang sedang diuji kelayakannya adalah Proyek Konversi Batubara tahap 2 atau CCP2 untuk mengurangi biaya konsumsi HSFO pada Tanur Pereduksi.

Biaya HSD meningkat 8% pada tahun 2013 dari 2012, terutama akibat konsumsi yang lebih tinggi di bagian pertambangan, sejalan dengan pasokan bahan tambang yang lebih tinggi akibat dari peningkatan produksi. Konsumsi HSD meningkat menjadi 59.2 juta liter pada tahun 2013, dari 54,9 juta liter pada tahun 2012. Harga rata-rata HSD meningkat, dari AS\$0,86 per liter menjadi AS\$0,87 per liter pada tahun 2013.

Bahan Pembantu. Bahan pembantu mengambil porsi sekitar 18% dari total biaya produksi pada tahun 2013, merupakan komponen biaya produksi terbesar kedua. Komponen utama dari biaya bahan pembantu adalah *bulk commodities* (seperti batubara, sulfur dan pasta elektroda), ban, suku cadang dan peralatan pembantu mekanikal. Kenaikan pada tahun 2013 terutama akibat peningkatan *bulk commodities* sebesar AS\$6,3 juta; ban sebesar AS\$1,1 juta; dan suku cadang dan perlengkapan mekanikal senilai AS\$1,8 juta. konsumsi *bulk commodities* meningkat pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh kenaikan volume batu bara, sulfur dan silika, sebagai akibat dari produksi yang lebih tinggi dan pelaksanaan konversi batubara pada tahun 2013 sebesar AS\$ 8,5 juta. Peningkatan volume ini diimbangi dengan harga yang lebih rendah, terutama pada harga batubara, pasta elektroda dan sulfur sebesar AS\$2,2 juta. Biaya ban meningkat pada tahun 2013, sejalan dengan meningkatnya jumlah material yang ditambang dengan kenaikan produksi. Suku cadang dan peralatan pembantu mekanikal meningkat dari tahun 2012 terutama karena pemeliharaan dan perbaikan tanur listrik.

sources. One of the energy saving that is currently in the feasibility study process is Coal Conversion Project phase 2 or named as CCP2 to reduce fuel (HSFO) cost in the Reduction Kilns.

HSD costs increased 8% in 2013 from 2012, largely because of higher consumption in mining, is in line with the higher mine material moved resulting in higher production. The HSD consumption increased to 59.2 million liters in 2013 from 54.9 million liters in 2012. Average HSD price increased slightly from US\$0.86 per liter to US\$0.87 per liter in 2013.

Supplies. Supplies accounted for about 18% of our production cost in 2013, representing the second-largest component in our cost of production. The major components of supply costs are bulk commodities (for example coal, sulphur and electrode paste), tires, spare parts and other mechanical consumables for equipment. The increase in 2013 was mainly due to costs increase in bulks commodities by US\$6.3 million; tires by US\$1.1 million; spare parts and mechanical consumables by US\$1.8 million. Bulk commodities increased in 2013 also due to higher volume in coal, sulphur and silica as a result of higher production and coal conversion implementation in 2013 by US\$8.5 million. This volume increase was offset by lower price mainly in coal, electro paste and sulphur, by US\$2.2 million. Tires increased in 2013 mainly due to higher material moved reflected by higher production volume compared to 2012. Spare parts and mechanical consumables increased from 2012 were mainly due to maintenance repair for Electric Furnaces.

Beban karyawan. Beban karyawan turun sebesar 5%, lebih rendah AS\$5,6 juta dari tahun 2012. Beban ini menjadi penyumbang sekitar 13% dari jumlah biaya produksi pada 2013, sama seperti pada 2012. Melemahnya nilai tukar Rupiah Indonesia terhadap dolar AS rata-rata pada tahun 2013 menurunkan biaya karyawan. Jumlah karyawan tahun 2013 secara konsisten berada pada tingkat yang sama dengan tahun 2012.

Depresiasi, amortisasi dan depleksi. Beban depresiasi, amortisasi dan depleksi meningkat 8% atau senilai AS\$8,5 juta lebih tinggi pada tahun 2013 dibandingkan 2012, terutama akibat dari depresiasi mesin pabrik pengolahan dan peralatan, diantaranya depresiasi peralatan untuk konversi batubara dan transportasi batubara yang dimulai pada akhir tahun 2013 dan peralatan lain pada tanur reduksi, tungku listrik dan konverter, yang mulai didepresiasi pada tahun 2013.

Kontrak dan jasa. Beban kontrak dan jasa mewakili 12% dari biaya produksi pada tahun 2013, meningkat dari 11% pada tahun 2012. Komponen utamanya adalah jasa pemeliharaan dan mekanikal, penyewaan peralatan pertambangan, jasa tenaga kerja dan transportasi, dan konsultasi. Jumlah biaya tahun 2013 turun sebesar AS\$1,6 juta dari tahun 2012, dengan biaya yang lebih rendah berasal dari konsultasi, biaya perjalanan dan biaya layanan lainnya. Hal ini merupakan bagian dari inisiatif penghematan biaya untuk mengendalikan biaya produksi.

Pajak dan asuransi. Pajak dan asuransi tahun 2013 meningkat sebesar 9% dari tahun 2012, terutama karena peningkatan nilai aset yang diasuransikan, yang disebabkan kenaikan premi asuransi sebesar AS\$5 juta pada 2013, dibandingkan dengan 2012. Peningkatan ini diimbangi dengan pembayaran pajak tidak langsung yang lebih rendah kepada pemerintah sebesar AS\$2,7

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

Employee costs. Employee costs decreased by 5%, US\$5.6 million lower than 2012. These accounted for approximately 13% of 2013 total production costs, the same as 2012. The weakening of the Indonesian Rupiah, against the US dollar on average in 2013, lowered the employee cost. The employment headcount in 2013 was consistently with the level for 2012.

Depreciation, amortization and depletion. Depreciation, amortization and depletion, rose 8%, or US\$8.5 million higher in 2013 from 2012, mainly due to machinery and equipment depreciation in processing plant, as the equipment for coal conversion and coal transportation was depreciated toward the end of 2013 and as well as other equipment in dryer, kiln, furnace and converter were depreciated in year 2013.

Services and contracts. Services and contracts accounted for 12% of our production cost in 2013 slightly increase from 2012 of 11% production cost portion. The major components were maintenance and mechanical services, mining equipment rental and services, labor and transportation services and consulting. Total costs in 2013 were down by US\$1.6 million from 2012 level, the lower cost were in consulting, travel and other services and contract cost. This lower cost was part of the cost saving initiatives to control production cost.

Taxes and insurance. Taxes and insurance in 2013 increased by 9% from 2012, mainly due to a higher asset value insured resulting in additional insurance premiums of US\$5 million in 2013, compared to 2012. This increase was offset by lower local indirect tax payments to government in the amount of US\$2.7 million. The lower indirect taxes were mainly due to

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

juta. Pajak-pajak tidak langsung yang lebih rendah terutama disebabkan oleh turunnya harga nikel dan melemahnya nilai tukar rupiah Indonesia terhadap dolar AS rata-rata, karena pajak-pajak tersebut dibayarkan dalam mata uang Rupiah.

Royalti. Komposisi beban royalti terhadap beban pokok produksi masih tetap konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini karena royalti dipatok pada AS\$78 per ton berdasarkan volume penjualan. Biaya royalti meningkat 25% akibat volume penjualan 2013 yang lebih tinggi dibandingkan dengan pada tahun 2012.

Beban Lain-lain. Beban produksi lain-lain menurun sebesar AS\$2,0 juta. Hal ini terutama terkait dengan pengeluaran diskresioner.

Laba bruto

Laba bruto pada tahun 2013 turun sebesar 16% menjadi AS\$139,9 juta dari AS\$166,7 juta pada tahun 2012 akibat penurunan pendapatan yang disebabkan oleh harga nikel yang lebih rendah. Akibatnya, margin laba kotor turun 15% pada 2013, dibandingkan dengan tahun 2012 yang sebesar 17%.

Pendapatan dan beban lain-lain.

Beban operasional. Beban operasional meningkat sebesar AS\$0,4 juta, atau 3%, dari AS\$12,6 juta pada tahun 2012 menjadi AS\$13,0 juta pada tahun 2013. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perjanjian baru dengan Grup Vale untuk layanan jasa dan royalti, yang menggantikan perjanjian manajemen dan bantuan teknis sebelumnya dengan Vale Canada Limited. Kenaikan tersebut dikompensasi dengan penurunan biaya profesional sejalan dengan inisiatif penghematan biaya sebesar AS\$2,4 juta dan biaya lain-lain sebesar AS\$1,2 juta

the lower nickel price and the weakening of Indonesian rupiah against the US dollar on average, as these local taxes were paid in Indonesian rupiahs.

Royalties. Royalty expense to cost of production is consistent from year to year, since the royalty is set at US\$78 per ton based on sales volume. The amount of the royalty increased 25% due to higher sales volume in 2013 compared to 2012.

Others. Other costs of production decreased by US\$2.0 million are mainly associated with discretionary expenses.

Gross profit

Gross profit in 2013 was down by 16% to US\$139.9 million from US\$166.7 million in year 2012 because of the decrease in revenue due to lower nickel price. Consequently, gross profit margin was down to 15% in 2013 compared to 17% in 2012.

Other Income and Expenses

Operating expense. Operating expense increased by US\$0.4 million or 3% from US\$12.6 million in 2012 to US\$13.0 million in 2013. The increase is primarily due to a new services and royalty arrangement with the Vale Group replacing the previous management and technical assistance agreement with Vale Canada Limited. The increase was offset by the decrease in professional fees in line with cost saving initiative of US\$2.4 million and others of US\$1.2 million.

Perjanjian baru untuk layanan jasa dan royalti meningkat sebesar AS\$4,1 juta menjadi AS\$8,8 juta pada tahun 2013, dibandingkan dengan AS\$4,7 juta pada tahun 2012. Dengan perjanjian baru ini biaya manajemen dan jasa teknis dihitung sesuai dengan biaya yang sebenarnya, yang dikeluarkan untuk membiayai jasa yang diminta PT Vale, ditambah biaya jasa sebesar 10%, sedangkan lisensi dan royalti dihitung sebesar 0,8% dari hasil penjualan. Rumusan ini menggantikan perjanjian manajemen dan bantuan teknis sebelumnya, dimana manajemen dan biaya bantuan teknis dihitung berdasarkan nilai yang lebih rendah 1,8% dari pendapatan atau 4% dari penghasilan antara terkena pajak.

Biaya jasa dan royalti yang lebih besar pada 2013 terutama disebabkan oleh lebih besarnya cakupan jasa yang diajukan oleh PT Vale dari Vale Group, dan tidak adanya lagi pembatasan maksimum senilai 4% dari laba kena pajak bersih yang dilaporkan oleh PT Vale.

Beban lain-lain. Beban lain-lain terdiri dari biaya pengembangan proyek, rugi/laba selisih kurs dan berbagai macam hal lainnya. Pembahasan lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut dapat dilihat dalam daftar di bawah ini. Pada 2013, Perseroan membukukan beban lain-lain sebesar AS\$57,2 juta, dibandingkan pada tahun 2012 yaitu AS\$47,7 juta. Rincian komponen beban lain-lain disajikan pada tabel di bawah ini.

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

The new service and royalty arrangements resulted in an increase of US\$4.1 million to US\$8.8 million in 2013, compared to US\$4.7 million in 2012. The management and technical service fees are calculated at actual cost incurred for services requested by PT Vale, plus a service fee of 10%, and the royalty and license fee is calculated at 0.8% of sales. These pricing methods replace the previous management and technical assistance agreement, which provided for the management and technical assistance fees equal to the lower of 1.8% of sales or 4% of net taxable income.

The higher service and royalty fees in 2013 is due primarily to the scope of services requested by PT Vale from the Vale Group coupled with the elimination of the cap equal to 4% of taxable income reported by PT Vale.

Other expenses. Other expenses consist of project development costs, loss/gain on currency translation adjustments and other miscellaneous items. Further discussion on each of these items set out in the list below. In 2013, we recorded other expenses of US\$57.2 million compared to US\$47.7 million in 2012. Please refer to the table of breakdown of other expenses below.



Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

Beban lainnya Other expenses	2013	2012	Δ	Var (%)
(Dalam ribuan AS\$) (US\$ in thousands)				
Beban pengembangan proyek Project development costs	36,484	38,704	(2,220)	-6%
Rugi/(laba) selisih kurs Loss/(gain) on currency translation adjustments	22,505	6,353	16,152	254%
Lainnya Others	(1,818)	2,691	(4,509)	-168%
Jumlah beban lainnya Total other expenses	57,171	47,748	9,423	20%

Beban pengembangan proyek. Kegiatan pengembangan proyek menurun pada tahun 2013 dibandingkan dengan 2012. Kegiatan-kegiatan pengembangan proyek meliputi penelitian fasilitas pengolahan yang baru di Sorowako, pabrik pengolahan nikel di Bahodopi, studi rencana penambangan untuk mendukung pertumbuhan, eksplorasi, program SO2, dan proyek konversi batubara di tanur reduksi. Penurunan kegiatan tersebut senilai AS\$2,2 juta, membuat biaya pengembangan proyek menjadi AS\$36,5 juta pada tahun 2013, dibandingkan AS\$38,7 juta pada 2012.

Rugi/(laba) selisih kurs. Pada tahun 2013, PT Vale mencatat rugi selisih kurs sebesar AS\$22,5 juta dibandingkan rugi selisih kurs sebesar AS\$6,4 juta pada tahun 2012. Hal ini terutama disebabkan karena menguatnya mata uang Dolar AS terhadap rupiah sepanjang tahun 2013, serta saldo aset moneter dalam mata uang asing selain Dolar AS, terutama Pajak Pertambahan Nilai dan pajak dibayar dimuka – dalam mata uang Rupiah.

Lain-lain. Pada 2013, laba lain-lain tercatat sebesar AS\$1,8 juta dibandingkan rugi AS\$2,7 juta pada tahun 2012. Perubahan ini adalah akibat dari pengembalian akrual asuransi tahun sebelumnya.

Project development costs. Project development activities decreased in 2013, compared to 2012. Project development activities include studies for a proposed new processing line at Sorowako, Bahodopi nickel processing plant, growth mining plan studies, exploration, SO2 program and kiln coal conversion project. The decreased activities totaled US\$2.2 million, pushing the figure of project development costs to US\$36.5 million in 2013, compared to US\$38.7 million in 2012.

Loss (gain) on currency translation adjustments. In 2013, PT Vale recorded a significant loss on currency translation adjustment of US\$22.5 million compared to loss of US\$6.4 million in 2012. This is mainly due to significant appreciation of US\$ against Rupiah during 2013, and the balance of monetary assets denominated in currencies other than US\$, mainly consisting of VAT and prepaid taxes – denominated in IDR.

Others. In 2013, other items of gain US\$1.8 million were reported compared to lost US\$2.7 million in 2012. The change was mainly due to reversal of accrual of the previous year's insurance.

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

Beban keuangan

Beban keuangan yang terdiri dari beban bunga, biaya jaminan, dan amortisasi biaya pinjaman SEFA dan beban akresi untuk penyisihan penghentian pengoperasian aset turun sebesar AS\$0,8 juta, terutama akibat dari penurunan beban bunga atas pinjaman SEFA, sejalan dengan LIBOR yang lebih rendah pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012, dan juga penurunan biaya jaminan. Saldo beban bunga, biaya jaminan dan amortisasi beban biaya pinjaman untuk pinjaman SEFA pada tahun 2013 adalah AS\$ 10,9 juta, dibandingkan dengan AS\$ 13,2 juta pada tahun 2012. Penurunan ini dikompensasi oleh peningkatan beban akresi sebesar AS\$1,4 juta dalam kaitannya dengan penyisihan penghentian pengoperasian aset.

Beban pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak penghasilan tahun berjalan dan pajak penghasilan tangguhan. Beban pajak penghasilan turun menjadi AS\$16,8 juta pada tahun 2013, dari AS\$23,9 juta pada tahun 2012, sehubungan dengan penurunan beban pajak penghasilan tahun berjalan sebesar AS\$8,0 juta pada tahun 2013 dibandingkan 2012, diimbangi oleh kenaikan manfaat pajak penghasilan tangguhan sebesar AS\$0,9 juta. Beban pajak penghasilan tahun berjalan yang lebih rendah pada tahun 2013 konsisten dengan penurunan laba kena pajak, sementara manfaat pajak penghasilan tangguhan tahun berjalan naik sehubungan dengan lebih rendahnya akrual dan penyisihan yang menghasilkan saldo pajak penghasilan tangguhan. Perseroan dikenakan tarif pajak penghasilan badan sebesar 25%, dan tidak ada perubahan tarif pajak penghasilan badan pada tahun 2013 dan 2012.

Finance Costs

Finance costs comprised of interest expense, guarantee fee, and the amortization of debt issuance costs for SEFA loan and accretion cost for the provision of asset retirement finance costs decreased by US\$0.8 million mainly due to the decrease of interest expense on the SEFA loan, in line with lower LIBOR in 2013 compared to 2012 and as well the decrease of the guarantee fee. The balance of interest expense, guarantee fee and the amortization of debt issuance cost for SEFA loan in 2013 of US\$10.9 million compared to US\$13.2 million in 2012. This decrease was offset by an increase in accretion costs of US\$1.4 million in relation to provision for asset retirement.

Income tax expense

Income tax expense consists of the current and deferred income tax expenses. Income tax expense decreased to US\$16.8 million in 2013 from US\$23.9 million in 2012 due to a decrease in current income tax expense of US\$8.0 million in 2013 compared to 2012, partially offset by an an increase of deferred income tax benefit by US\$0.9 million. The lower current income tax expense in 2013 was consistent with the decreased 2013 taxable income, while the current year deferred income tax benefit increased due to a lower amount of accruals and provisions that result in the deferred income tax balances. The Company is subject to a 25% corporate income tax rate, and there were no corporate income tax rate changes in 2013 and 2012.

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

Laba tahun berjalan

PT Vale membukukan laba tahun berjalan sebesar AS\$38,7 juta pada tahun 2013 dari AS\$67,5 juta pada tahun 2012. Hasil yang lebih rendah pada tahun 2013 dikarenakan adanya penurunan pada harga realisasi rata-rata nikel dalam matte, yang sebagian dikompensasi oleh volume penjualan yang lebih besar dan beban pokok pendapatan yang lebih rendah.

Penghasilan sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi (EBITDA)

EBITDA Perseroan pada tahun 2013 adalah sebesar AS\$203,4 juta, menurun dari AS\$215,5 juta pada tahun 2012. Sama halnya dengan laba pada tahun berjalan, penurunan tersebut diakibatkan oleh penurunan harga realisasi rata-rata nikel dalam matte, yang sebagian dikompensasi dari kenaikan volume penjualan.

Arus Kas Tahun Berjalan

Silakan merujuk pada tabel berikut ini untuk pembahasan arus kas.

Profit for the year

PT Vale recorded Profit for the year of US\$38.7 million in 2013 compared to US\$67.5 million in 2012. The lower 2013 result was driven mainly by the decrease in average realized price of nickel in matte and partially offset by higher sales volume and lower cost of revenue.

Earnings before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA)

Our EBITDA in 2013 was US\$203.4 million from US\$215.5 million in 2012. Similar with profit for the year, the decrease is driven by the decrease of average realized price, and offset partially by the increase in sales volume.

Cash flow for the year

Please refer to following table below for next discussion on cash flows.

Laporan arus kas Statements of Cash Flows	2013	2012	Δ	Var (%)
(Dalam ribuan AS\$) (US\$ in thousands)				
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk): Net cash flows provided from (used for):				
Aktivitas operasi Operating activities	265,892	79,162	186,730	236%
Aktivitas investasi Investing activities	(140,487)	(146,965)	6,478	4%
Aktivitas pendanaan Financing activities	(95,396)	(158,553)	63,157	40%
Penurunan bersih kas dan setara kas Net increase/(decrease) in cash & cash equivalents	30,009	(226,356)	256,365	-113%
Kas dan setara kas pada awal tahun Cash & cash equivalents at the beginning of the year	172,239	399,155	(226,916)	-57%
Efek perubahan kurs pada kas dan setara kas Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	(2,228)	(560)	(1,668)	298%
Kas dan setara kas pada akhir tahun Cash & cash equivalents at the end of the year	200,020	172,239	27,781	16%

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi

Kas yang diperoleh dari aktivitas operasional adalah sebesar AS\$265,9 juta pada tahun 2013, dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu sebesar AS\$79,2 juta. Kenaikan sebesar AS\$186,7 juta pada tahun 2013 tersebut disebabkan oleh adanya penerimaan kas dari pelanggan yang lebih tinggi yaitu sebesar AS\$47,7 juta, penurunan pembayaran kepada pemasok sebesar \$52,1 juta, penurunan pembayaran pajak penghasilan perusahaan sebesar \$82,8 juta, dan kenaikan pengembalian uang dari pajak penghasilan Perseroan sebesar \$40,2 juta. Semua faktor ini diimbangi oleh pengembalian uang yang lebih rendah dari pajak lain yaitu sebesar \$33,6 juta.

Sebagian besar penurunan pembayaran kepada pemasok disebabkan oleh lebih rendahnya biaya bahan bakar dan pelumas yang diakibatkan oleh rendahnya harga HSFO pada tahun 2013, yang selanjutnya ditambah dengan rendahnya konsumsi HSFO sebagai hasil dari Tahap 1 Proyek Konversi Batubara. Lebih rendahnya biaya jasa dan kontrak, dan biaya lain-lain, juga memberikan kontribusi terhadap penurunan pembayaran kepada pemasok. Silakan lihat Analisa Kinerja Keuangan - Beban Pokok Pendapatan untuk penjelasan lebih lanjut atas komponen-komponen biaya. Penurunan pembayaran pajak penghasilan Perseroan merupakan hasil dari angsuran yang lebih rendah untuk pajak penghasilan Perseroan tahun 2013, yang didasarkan dari penghasilan kena pajak yang lebih rendah pada tahun 2012 dibandingkan dengan 2011. Pengembalian pajak penghasilan Perseroan merupakan pengembalian yang diterima oleh Perseroan dari kelebihan pembayaran pajak penghasilan pada tahun

Cash flows provided from operating activities

Cash provided from operating activities was US\$265.9 million in 2013 compared to US\$79.2 million in 2012. The US\$186.7 million increase in 2013 occurred due to higher receipts from customers of US\$47.7 million, lower payments to suppliers of US\$52.1 million, lower payments of corporate income tax of US\$82.8 million, higher refunds of corporate income tax of US\$40.2 million. All these factors were offset by the lower refunds of other taxes of US\$33.6 million.

Most of the decrease in the payments to suppliers was due to lower fuel and lubricants cost derived from the lower HSFO price in 2013 and further added by the lower HSFO consumption due to the application of Coal Conversion Phase 1 project. Lower services and contracts cost, and others also contribute to the decrease in the payments to suppliers. Please refer to the Financial performance analysis – Cost of Revenue section for further fluctuation analysis of these components. The decrease in the payments of corporate income tax was a result of lower installments for corporate income tax in 2013, as they were based on a lower taxable income in 2012 compared to 2011. Refunds of corporate income taxes represent the refund received by the Company from our overpayment of 2011 corporate income tax. Lower refunds of other taxes in 2013 represent lower VAT refund received in 2013 compared to 2012. As noted in the Financial performance analysis – Prepaid Taxes – current, the

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

2011. Pengembalian yang lebih rendah dari pajak lainnya pada tahun 2013 disebabkan lebih rendahnya PPN yang diterima pada tahun 2013, dibandingkan dengan 2012. Sebagaimana dicatat dalam Analisa Kinerja Keuangan – Pajak Dibayar Dimuka – Lancar, mayoritas ketetapan pajak yang dibayar di tahun-tahun sebelumnya sedang dalam proses banding, dan Perseroan berharap untuk menerima pengembalian dana untuk sebagian besar pembayaran ini pada tahun-tahun mendatang.

Arus Kas digunakan untuk aktivitas Investasi

Pembayaran atas pembelanjaan barang modal menurun sebesar AS\$140,5 juta di tahun 2013, dari AS\$147,0 juta di tahun 2012. Pengeluaran utama belanja barang modal mencakup proyek perbaikan seperti konversi ke batu bara, transportasi batu bara, dan armada tambahan; proyek penggantian alat seperti pembangunan ulang tanur listrik 1 dan penggantian dozer serta proyek-proyek berkelanjutan seperti pembaruan jalan dan pembangunan infrastruktur Bahodopi.

Arus Kas digunakan untuk aktivitas pendanaan

Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar AS\$95,4 juta di tahun 2013, dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar AS\$158,6 juta. Penurunan pada kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan disebabkan oleh rendahnya pembayaran dividen sebesar AS\$61,2 juta – seiring dengan harga nikel dan laba bersih yang tercatat lebih rendah pada 2013.

majority of the tax assessment paid in previous years are being appealed, and we expect to receive a refund for the majority of these payments in future years.

Cash flows used for investing activities

Payments for capital expenditures decreased to US\$140.5 million in 2013 from US\$147.0 million in 2012. Major capital expenditures involved betterment projects such as coal conversion, coal transportation, additional fleets; replacement projects such as Electric Furnace #1 rebuild and dozer replacement; and sustainability projects such as Bahodopi road upgrade and infrastructure.

Cash flows used for financing activities

Cash used for financing activities was US\$95.4 million in 2013 compared with the US\$158.6 million in 2012. The decrease in cash used for financing was the result of lower dividend payments of US\$61.2 million - in line with the lower nickel prices and lower net earnings in 2013.

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

Rasio Pemanfaatan Arus Kas Cash Flow Coverage Ratios

	2013	2012
Pemanfaatan arus kas dari operasi (Arus kas dari operasi/pendapatan) Operating cash flow coverage (Operating cash flow/revenue)	0.29	0.08
Pemanfaatan arus kas dari belanja barang modal (Arus kas dari operasi/penambahan konstruksi berjalan sepanjang tahun) Capital expenditure coverage (Operating cash flow/Construction In Progress during the year)	1.93	0.54
Pemanfaatan dividen (arus kas dari operasi/dividen yang dinyatakan untuk tahun yang berlaku) Dividend coverage (Operating cash flow/dividends declared for the respective year)	5.31	0.72

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel rasio pemanfaatan arus kas di atas, arus kas operasional yang lebih tinggi pada tahun 2013 telah meningkatkan seluruh rasio pemanfaatan arus kas kami.

NERACA

Aset

Total aset pada tahun 2013 menurun sebesar AS\$52,0 juta menjadi AS\$2.281,1 dari tahun sebelumnya, disebabkan karena lebih rendahnya aset lancar dan aset tidak lancar. Pada tahun 2013, 24% dari total aset Perseroan merupakan aset lancar dan 76% lagi merupakan aset tidak lancar, sebuah perbandingan yang sama dengan tahun lalu. Lihat table di bawah ini yang menggambarkan komposisi aset lancar dan aset tidak lancar.

As shown in the table of cash flow coverage ratios above, higher operating cash flows in 2013 have improved all of our cash flow coverage ratios.

BALANCE SHEET

Assets

Total assets in 2013 decreased by US\$52.0 million to US\$2,281.1 million from last year, driven by lower both in current assets and non-current assets. The 24% of our total assets were in the form of current assets and 76% were in the form of non-current assets in 2013, the same portion as last year. Please refer to the table illustrating the composition of current and non-current assets.



Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

Aset Assets	2013	%	2012	%	Δ	Var (%)
(AS\$ dalam ribuan) (US\$ in thousands)						
ASET LANCAR CURRENT ASSETS						
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	200,020	9%	172,239	7%	27,781	16%
Kas yang dibatasi penggunaannya Restricted Cash	16,723	1%	17,333	1%	(610)	-4%
Piutang usaha - pihak-pihak berelasi Trade receivables - related parties	65,902	3%	112,640	5%	(46,738)	-41%
Persediaan Inventories	150,996	7%	152,849	7%	(1,853)	-1%
Pajak dibayar dimuka Prepaid taxes	111,841	5%	89,622	4%	22,219	25%
Biaya dibayar dimuka dan uang muka Prepayments and advances	4,209	0%	9,659	0%	(5,450)	-56%
Aset keuangan lancar lainnya Other current financial assets	7,804	0%	10,548	0%	(2,744)	-26%
Jumlah aset lancar Total current assets	557,495	24%	564,890	24%	(7,395)	-1%
ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS						
Pajak dibayar dimuka Prepaid Taxes	58,142	3%	126,885	5%	(68,743)	-54%
Piutang non-usaha pihak-pihak berelasi Non-trade receivables related parties	305	0%	111	0%	194	175%
Aset tetap Fixed assets	1,651,762	72%	1,624,571	70%	27,191	2%
Aset keuangan tidak lancar lainnya Other non-current financial assets	13,415	1%	16,623	1%	(3,208)	-19%
Jumlah aset tidak lancar Total non-current assets	1,723,624	76%	1,768,190	76%	(44,566)	-3%
JUMLAH ASET TOTAL ASSETS	2,281,119	100%	2,333,080	100%	(51,961)	-2%

Aset Lancar

Aset lancar tanggal 31 Desember 2013 menurun sebesar AS\$7.4 juta atau setara dengan 1% dari tanggal 31 Desember 2012. Penyebab utama dari penurunan ini adalah piutang usaha – pihak yang berelasi sebesar AS\$46,7 juta, persediaan sebesar AS\$1,9 juta, pembayaran di muka dan uang muka sebesar AS\$ 5,5 juta dan aset keuangan lancar lainnya sebesar AS\$2,7 juta, yang sebagian dikompensasi oleh peningkatan kas dan setara kas sebesar AS\$27,8 juta dan pajak dibayar dimuka sebesar AS\$22,2 juta.

Current assets

Current assets at December 31, 2013 were down US\$7.4 million or 1% from December 31, 2012. The primary drivers of the decrease were trade receivables-related parties of US\$46.7 million, inventories of US\$1.9 million, prepayment and advances of US\$5.5 million and other current financial assets of US\$2.7 million, partially offset by increases in cash and cash equivalents of US\$27.8 million and prepaid taxes of US\$22.2 million

Kas dan Setara Kas. Pos ini terdiri dari kas dan rekening bank sebesar AS\$84,3 juta dan deposito berjangka yang tidak terikat sebesar AS\$115,7 juta. Komposisi kas dan setara kas berdasarkan mata uang disajikan pada tabel di bawah ini. Tidak ada perubahan pada suku bunga rata-rata deposito berjangka dalam dolar AS pada tahun 2013 dan 2012 yang stabil pada 0,2%, sementara suku bunga rata-rata deposito berjangka dalam Rupiah adalah 5,0% di tahun 2013 dan 2012. Lihat tabel kas dan setara kas berikut.

Cash and cash equivalents. This balance consists of cash on hand and in the bank accounts amounting to US\$84.3 million and unrestricted time deposits of US\$115.7 million. The composition of cash and cash equivalents based on currency is presented in the table below. There is no change in average interest rate of U.S. dollar time deposits between 2013 and 2012 as it was stable at 0.2%, as well as the average interest rate for Rupiah time deposits in 2013 and 2012 was 5.0%. Please refer to the table which shows the cash and cash equivalent.

Kas dan setara Kas Cash and cash equivalent	2013	%	2012	%	Δ	Var (%)
(AS\$ dalam ribuan) (US\$ in thousands)						
Kas Cash on hand	8	0%	26	0%	(18)	-69%
Bank Cash in banks						
IDR IDR	9,207	5%	6,625	4%	2,582	39%
AS\$ US\$	75,065	38%	19,628	11%	55,437	282%
Jumlah kas di bank Total cash in banks	84,272	42%	26,253	15%	58,019	221%
Deposito berjangka Time deposits						
IDR IDR	-	0%	3	0%	(3)	-100%
AS\$ US\$	115,740	58%	145,957	85%	(30,217)	-21%
Jumlah deposito berjangka Total time deposits	115,740	58%	145,960	85%	(30,220)	-21%
Jumlah kas dan setara kas Total cash and cash equivalents	200,020	100%	172,239	100%	27,781	16%

Sebagaimana terlihat pada tabel, total kas dan setara kas meningkat dari AS\$172,2 juta pada tahun 2012 menjadi AS\$200,0 juta pada 2013, terutama akibat dari lebih tingginya arus kas dari aktivitas operasional dan lebih rendahnya arus kas yang digunakan untuk kegiatan investasi dan pendanaan.

As shown in the table, total cash and cash equivalents increased from US\$172.2 million in 2012 to US\$200.0 million in 2013, mainly due to higher operating cash flow activities and lower cash flows used for investing and financing activities.

Kas yang dibatasi penggunaannya. Jumlah kas yang dibatasi penggunaannya sebesar AS\$16,7 juta pada tahun 2013 mengacu kepada rekening pada Union Bank N.A. yang digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman (AS\$18,75 juta setiap angsuran pinjaman)

Restricted cash. The restricted cash balance of US\$16.7 million in 2013 represents the account with Union Bank N.A. intended for payment of loan principal (US\$18.75 million for each loan installment) and interest expense payable semi annually in the months of February

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

dan bunga yang dibayarkan dua kali setahun yaitu di bulan Februari dan Agustus setiap tahun di mulai di tahun 2012. Rekening ini diadakan sebagai persyaratan persetujuan pinjaman antara PT Vale, Mizuho Corporate Bank Ltd. dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. terkait dengan fasilitas pinjaman SEFA untuk pendanaan Proyek Karebbe.

Piutang usaha. Piutang usaha pada 31 Desember 2013 tercatat sebesar 41%, atau AS\$46,7 juta lebih rendah dibandingkan tahun 2012, disebabkan lebih rendahnya volume penjualan yang membentuk saldo piutang 2013 (2013: 6.153 ton dan 2012: 8.787 ton), selanjutnya ditambah penurunan harga jual rata-rata atas saldo piutang di tahun 2013 (2013: AS\$10,711 per ton versus 2012: AS\$12,819 per ton), sejalan dengan penurunan harga nikel global.

Seluruh produksi nikel dalam matte kami dijual melalui kontrak penjualan jangka panjang yang harus diambil dalam mata uang Dolar AS dengan dua pemegang saham terbesar, VCL dan SMM; Oleh karena itu, semua piutang dagang kami adalah kepada pihak-pihak berelasi. VCL dan SMM memiliki kepentingan strategis jangka panjang terhadap kesinambungan keberhasilan operasi kami. Pada umumnya, piutang usaha kami dibayar dalam jangka waktu 30 sampai dengan 60 hari setelah tanggal pengapalan. Berdasarkan fakta ini, tidak ada saldo piutang yang dipertimbangkan tidak dapat ditagih.

Seperti terlihat pada tabel berikut, rata-rata hari pembayaran piutang adalah 35 hari pada tahun 2013 dibandingkan 33 hari pada tahun 2012. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan penjualan pada 2013 akibat rendahnya harga nikel, sementara saldo piutang rata-rata tetap stabil.

and August each year, starting in 2012. This account was established in order to fulfill the loan agreement requirements related to the SEFA loan between PT Vale, Mizuho Corporate Bank Ltd. and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. for the Karebbe Project.

Trade receivables. Trade receivables at December 31, 2013 were 41% or US\$46.7 million lower from 2012, due to the lower quantity of outstanding receivables in 2013 (2013: 6,153 metric tons vs. 2012: 8,787 metric tons), and further added by the lower average realized sales price of the outstanding receivables in 2013 (2013: US\$10,711 per ton vs. 2012: US\$12,819 per ton), in line with lower global nickel prices.

All of our nickel in matte is sold under long-term, "must-take" US dollar-denominated sales contracts with our two largest shareholders, VCL and SMM; accordingly, all of our trade receivables are due to related parties. VCL and SMM have long-term strategic interests in the continuing success of our operations. Normally our trade receivables are collected within 30-to-60 days from shipment date. Based on these facts, no accounts were determined to be impaired or uncollectible.

As shown in the next table, the number of days of sales outstanding was 35 days in 2013 compared to 33 days in 2012. The slight increase was mainly driven by the lower revenue in 2013 due to lower nickel price while the average receivable balance remain stable.

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

Rasio siklus operasional Operating cycle ratios	2013	2012
Rata-rata saldo piutang usaha pada awal dan akhir tahun Average of trade receivables balance at beginning & end of the year	89,271	89,327
Jumlah rata-rata hari untuk pengumpulan piutang (360/(pendapatan/rata-rata saldo piutang usaha)) Days of sales outstanding (360/(revenue/average trade receivables balance))	35	33

Persediaan bersih. Persediaan bersih setelah penyisihan untuk bahan pembantu usang tercatat menurun sebesar AS\$1,9 juta di 2013 dari 2012, karena adanya penurunan pada persediaan nikel sebesar AS\$2,3 juta, penurunan dalam persediaan bahan pembantu sebesar AS\$0,7 juta, dan peningkatan penyisihan untuk bahan pembantu usang sebesar AS\$1,1 juta, dikompensasi oleh kenaikan persediaan nikel dalam proses sebesar AS\$2,3 juta.

Penurunan persediaan nikel ini disebabkan oleh adanya pemenuhan pengiriman produk nikel terhadap pelanggan, sedangkan peningkatan persediaan nikel dalam proses terutama disebabkan oleh kenaikan persediaan furnace matte dan bijih kering akibat dari gangguan pada tanur listrik yang terjadi pada kuartal keempat. Silakan lihat tabel persediaan tercantum di bawah ini

Rasio Siklus Operasional Operating cycle ratios	2013	2012
Rata-rata persediaan bahan pembantu, bersih (saldo awal dan akhir tahun – Dalam ribuan AS\$) Average supplies inventories, net (balance of beginning and ending of the year)	100,240	98,237
Jumlah persediaan bahan pembantu (360/(beban pokok pendapatan (biaya bahan bakar dan persediaan bahan pembantu)/rata-rata saldo persediaan)) Days of supplies inventories (360/(COGS (fuels & supplies expense)/average Inventories balance)	84	81

Penurunan persediaan bahan pembantu terutama disebabkan oleh persediaan HSFO dan harga HSFO yang lebih rendah.

Inventories. Inventory net of provision for obsolete supplies decreased by US\$1.9 million in 2013 from the 2012 level, due to decrease in finished nickel in-matte inventories of US\$2.3 million, decrease in supplies inventories of US\$0.7 million and decrease in the provision for obsolete supplies of US\$1.1 million, offset by increased in nickel in-process inventories of US\$2.3 million.

The decrease in finished nickel in matte was due to fulfill the deliveries to customers, while the increase in nickel in-process inventory mainly due to higher inventory of furnace matte and dried ore as the interruption of electric furnace run-out, furnace cut-out and roof repair occurred in the fourth quarter. Please refer to the table of inventories here.

The decrease in supplies inventory was mainly due to lower inventory of HSFO as well as by lower HSFO price.

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

Kenaikan hari pasokan persediaan untuk 84 hari pada tahun 2013 jika dibandingkan dengan 81 hari pada tahun 2012 disebabkan oleh peningkatan saldo rata-rata persediaan pada tanggal 31 Desember 2013, dibandingkan dengan 31 Desember 2012, yang peningkatan melebihi kenaikan biaya persediaan.

Pajak dibayar dimuka. Jumlah pajak dibayar di muka pada Desember 2013 (baik lancar dan tidak lancar) adalah sebesar AS\$170,0 juta, lebih rendah AS\$46,5 juta dari pajak dibayar di muka pada tahun 2012 yaitu sebesar AS\$ 216,5 juta. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh pengembalian pajak atas pajak penghasilan Perseroan (CIT) untuk tahun 2011 yang diterima pada Mei 2013 sebesar AS\$40,2 juta, kerugian selisih kurs mata uang pada revaluasi pajak yang dalam proses banding sebesar AS\$15,2 juta dan nilai pajak pertambahan nilai dibayar di muka yang lebih rendah sebesar AS\$7,8 juta.

Pengurangan diatas sebagian diimbangi oleh tambahan pajak dibayar di muka karena kelebihan pembayaran pajak penghasilan Perseroan pada tahun 2013 yaitu sebesar AS\$13 juta dan angsuran pajak bulan Desember 2012 yang dibayarkan pada Januari 2013 sebesar AS\$4,1. Sengketa pajak impor sebagai hasil dari audit bea cukai untuk periode April 2011 - Maret 2013 sebesar US \$ 1,7 juta.

Biaya dibayar dimuka dan uang muka. Biaya dibayar dimuka dan uang muka menurun sebesar AS\$5,5 juta, disebabkan oleh menurunnya pembayaran uang muka kepada kontraktor dan pemasok sebesar AS\$6,0 juta dan meningkatnya saldo biaya asuransi dibayar di muka sebesar AS\$0,5 juta.

The increase in days of supplies inventory to 84 days in 2013 compared 81 days in 2012 was due to higher average supplies balance as of December 31, 2013 compared to December 31, 2012 outweighing increase in supplies expense.

Prepaid taxes. Total prepaid taxes in December 2013 (current and non-current) were US\$170.0 million, US\$46.5 million lower than prepaid taxes in 2012 of US\$216.5 million. Mostly due to Tax Refund on Corporate Income Tax (CIT) 2011 received in May 2013 at amount of US\$ 40.2 million, currency translation adjustment loss impact on Tax Dispute revaluation amounting to of US\$ 15.2 million and lower prepaid VAT amounting to US\$7.8 million.

The above reduction is partially offset by additional prepaid tax due to the overpayment of Corporate Tax 2013 of US\$13 million and a December 2012 tax installment which was paid in January 2013 at amount of US\$4.1 million. Tax Dispute on Import Tax as a result of Custom Audit for the period of April 2011 – March 2013 amounting to US\$1.7 million.

Prepayments and advances. Prepayments and advances down by US\$5.5 million, due to lower advances to contractors and suppliers by US\$6.0 million and partially offset by higher prepaid insurance balance by US\$0.5 million.

Aset keuangan lancar lainnya. Aset keuangan lancar lainnya menurun sebesar AS\$2,7 juta, atau 26%, disebabkan oleh menurunnya piutang karyawan sebesar AS\$2,3 juta dan menurunnya piutang dari kontraktor sebesar AS\$0,4 juta.

Aset tidak lancar

Aset Tidak Lancar turun sebesar AS\$44,6 juta, didorong oleh penurunan pajak dibayar di muka sebesar AS\$68,7 juta, dan aset keuangan tidak lancar lainnya sebesar AS\$3,2 juta, diimbangi oleh kenaikan aset tetap sebesar AS\$27,2 juta.

Pajak dibayar dimuka. Pajak dibayar di muka tidak lancar tahun 2013 adalah sebesar AS\$68,7 juta lebih rendah dari 2012, karena adanya kerugian dari revaluasi kurs atas pajak dalam proses banding untuk tahun 2004 dan 2006 sebesar AS\$10,2 juta. Pengurangan lain timbul dari pencabutan CIT Banding 2004 & 2006 dengan dampak sebesar AS\$1,6 juta. Selain itu, adanya pajak dibayar di muka tidak lancar disebabkan oleh kelebihan pembayaran pajak penghasilan Perseroan tahun 2013 sebesar AS\$13 juta, sengketa pajak impor sebesar AS\$1,7 juta dan keberatan 2011 CIT sebesar AS\$4,9 juta. Item tambahan lain terkait dengan perubahan klasifikasi sengketa CIT 2008 sebesar AS\$1,9 juta, dan sengketa pajak lainnya sebesar AS\$1,2 juta dari aset tidak lancar pada tahun 2012 menjadi aset lancar pada tahun 2013.

Pembahasan dan analisa manajemen

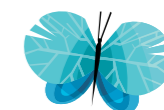
Management's discussion & analysis

Other current financial assets. Other current financial assets decreased by US\$2.7 million, or 26%, due to a decrease in the employee receivables of US\$2.3 million and a decrease in the receivables from contractors of US\$0.4 million.

Non-current assets

Non-current assets were down by US\$44.6 million, driven by a decrease in prepaid taxes of US\$68.7 million, in other non-current financial assets by US\$3.2 million, offset by an increase in fixed assets by US\$27.2 million.

Prepaid taxes. The 2013 non-current prepaid taxes were US\$68.7 million lower than 2012 due to loss impact on Tax Dispute revaluation of 2004 & 2006 case at amount of US\$ 10.2 million. Another reduction of non-current prepaid tax are consist of revocation of CIT Appeal 2004 & 2006 at US\$ 1.6 million. On the other hand, there were some additional non-current prepaid tax due to overpayment of Corporate Tax 2013 of US\$ 13 million, additional tax disputes on import tax at amount US\$ 1.7 million and objected amount of 2011 CIT amounting to US\$ 4.9 million. Other additional are related to classification changes of 2008 CIT dispute at amount US\$ 1.9 million and other tax disputes of US\$ 1.2 million from non-current in 2012 to current in 2013.



Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

Piutang selain usaha. Piutang selain usaha dari pihak-pihak yang berelasi mencerminkan porsi tidak lancar dari pinjaman yang diberikan pada karyawan manajemen inti di tahun 2013 sebesar AS\$ 0,1 juta.

Aset tetap, bersih. Aset tetap meningkat sebesar AS\$27,2 juta, didorong oleh belanja barang modal tahun 2013 sebesar AS\$137,9 juta, seperti terlihat pada penambahan dalam aset tetap dalam penyelesaian, dan diimbangi oleh penyusutan sebesar AS\$110,7 juta. Lihat pembahasan mengenai proyek-proyek utama di bagian investasi modal untuk informasi mengenai peningkatan aset tetap dalam penyelesaian.

Aset keuangan tidak lancar lainnya. Aset keuangan tidak lancar lainnya menurun sebesar AS\$3,2 juta, terutama didorong oleh penurunan pinjaman pada karyawan Perseroan.

Liabilitas

Liabilitas PT Vale pada tahun 2013 menurun sebesar AS\$44,8 juta, atau 7%, sejalan dengan menurunnya liabilitas jangka pendek sebesar 48,0 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar AS\$3,2 juta. Lihat tabel berikut untuk komposisi liabilitas.

Non-trade receivables. The non-trade receivables from related parties reflects non-current portion of loans given to key management personnel in 2013 of US\$0.1 million.

Fixed assets. Fixed assets increased by US\$27.2 million, driven by the 2013 capital acquisitions of US\$137.9 million, through additions in construction in progress. This was offset by depreciation of US\$110.7 million. Please refer to our major capital projects discussion in the "Capital Investment" section for information about the increase in construction in progress.

Other non-current financial assets. Other non-current financial assets decreased by US\$3.2 million mainly driven by the decrease in the Company's loan to employees.

Liabilities

PT Vale's liabilities in 2013 decreased by US\$44.8 million, or 7%, a decrease in non-current liabilities by US\$48.0 million, while current liabilities increased by US\$3.2 million. Please refer to the next table of composition of liabilities.



Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

Liabilitas Liabilities	2013	%	2012	%	Δ	Var (%)
(AS\$ dalam ribuan) (US\$ in thousands)						
LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES						
Utang usaha - pihak-pihak berelasi Trade payables - related parties	11,211	2%	10,888	2%	323	3%
Utang usaha - pihak ketiga Trade payables - third parties	64,304	11%	68,171	11%	(3,867)	-6%
Akrua Accruals	29,972	5%	31,614	5%	(1,642)	-5%
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Short-term employee benefit liabilities	16,650	3%	12,914	2%	3,736	29%
Utang pajak Taxes payable	6,905	1%	4,654	1%	2,251	48%
Bagian lancar atas pinjaman bank jangka panjang Current portion of long-term bank borrowings	35,863	6%	35,643	6%	220	1%
Bagian lancar atas liabilitas imbalan pascakerja Current portion of post-employment benefit liabilities	345	0%	345	0%	-	0%
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham Share-based payment liabilities	430	0%	14	0%	416	2971%
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya Other current financial liabilities	3,220	1%	1,422	0%	1,798	126%
Jumlah liabilitas jangka pendek Total current liabilities	168,900	30%	165,665	27%	3,235	2%
LIABILITAS JANGKA PANJANG NON - CURRENT LIABILITIES						
Pinjaman bank jangka panjang Long-term bank borrowings	183,252	32%	219,991	36%	(36,739)	-17%
Liabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang Long-term post-employment benefit liabilities	11,557	2%	21,875	4%	(10,318)	-47%
Liabilitas pajak tangguhan Deferred tax liabilities	157,302	28%	162,005	26%	(4,703)	-3%
Provisi atas penghentian pengoperasian aset Provision for asset retirement	45,842	8%	42,110	7%	3,732	9%
Jumlah liabilitas jangka panjang Total non-current liabilities	397,953	70%	445,981	73%	(48,028)	-11%
JUMLAH LIABILITAS TOTAL LIABILITIES	566,853	100%	611,646	100%	(44,793)	-7%

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

Liabilitas jangka pendek

Peningkatan liabilitas jangka pendek berasal dari peningkatan pada utang usaha – pihak terkait sebesar AS\$0,3 juta, liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek sebesar AS\$3,7 juta, utang pajak sebesar AS\$2,3 juta; serta porsi lancar pinjaman bank jangka panjang, liabilitas atas pembayaran berbasis saham, serta liabilitas keuangan jangka pendek lainnya saat ini sebesar masing-masing AS\$0,2 juta, AS\$0,4 juta, dan AS\$1,8 juta. Peningkatan-peningkatan tersebut diimbangi oleh penurunan pada utang usaha – pihak ketiga sebesar AS\$3,9 juta, serta akrual sebesar AS\$1,6 juta.

Utang usaha - pihak berelasi. Utang usaha – pihak berelasi meningkat sebesar AS\$0,3 juta, terutama disebabkan oleh beban jasa manajemen, lisensi dan royalti, serta hutang Perseroan dari proyek-proyek besar di masa depan yang belum terbayar pada 2013.

Hutang usaha – pihak ketiga. Penurunan pada utang usaha – pihak ketiga terutama disebabkan oleh rendahnya utang usaha kepada pemasok utama. Utang usaha rata-rata untuk pihak terkait dan pihak ketiga sedikit menurun, dari 37 hari pada 2012 menjadi 36 hari di 2013.

Current liabilities

The increase in current liabilities is derived from increase of trade payables – related parties of US\$0.3 million, short-term employee benefit liabilities of US\$3.7 million, taxes payables of US\$2.3 million, current portion of long-term bank borrowings, share based payment liabilities and other current financial liabilities of US\$0.2 million, US\$0.4 million and US\$1.8 million respectively. These increases were offset by a decrease in trade payables – third parties of US\$3.9 million and accruals of US\$1.6 million.

Trade payables – related parties. Trade payables – related parties increased by US\$0.3 million, mainly due to outstanding 2013 Management service, license and royalty fees and payables of the Company's future major projects.

Trade payables – third parties. Lower trade payables – third parties were mainly due to lower payables to major vendors. The average trade payables for related parties and third parties, slightly decreased from 37 days in 2012 to 36 days in 2013.

Rasio siklus operasional Operating cycle ratios

	2013	2012
Rata-rata saldo piutang usaha pada awal dan akhir tahun Average of trade payables balance at beginning and end of the year	77,287	81,605
Jumlah rata-rata hari untuk pengumpulan saldo piutang usaha (360/(beban pokok pendapatan/rata-rata saldo piutang usaha)) Days of trade payable outstanding (360/(cost of revenue/average trade payables balance))	36	37

Fokus kami adalah menjaga modal kerja pada tingkat yang optimal dan memelihara kerja sama yang saling menguntungkan dengan para pemasok.

Our focus here is to maintain the working capital at an optimum level while at the same time maintain our mutually beneficial relationships with our vendors.

Akrual. Penurunan sebesar AS\$1,6 juta pada akrual berasal dari penurunan akrual dibayar untuk barang dan jasa sebesar AS\$0,8 juta, biaya keuangan sebesar AS\$0,7 juta dan pengeluaran barang modal sebesar AS\$1,1 juta, dikompensasi oleh peningkatan akrual untuk royalti, retribusi air, sewa tanah dan lainnya sebesar AS\$0,9 juta. Tingginya akrual untuk royalti pada 2013 disebabkan oleh meningkatnya volume pengiriman pada 2013 dibandingkan dengan 2012.

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek. Peningkatan liabilitas imbalan kerja jangka pendek sebesar AS\$3,7 juta, atau 29%, berhubungan dengan gaji, upah, dan liabilitas imbalan kerja lainnya. Liabilitas ini menurun secara signifikan akibat dampak perbedaan nilai tukar sebesar 24% (2013: AS\$1 = Rp12.198 vs 2012: AS\$1 = Rp9.822).

Utang pajak. Kenaikan utang pajak sebesar AS\$2,3 juta terutama disebabkan oleh kenaikan pada pemotongan PPh (Pasal 21, 23, dan 26) dan utang PPh masing-masing sebesar AS\$1,8 juta dan AS\$0,5 juta. Kenaikan pada utang PPh adalah akibat dari tingginya biaya barang dan jasa yang masih harus dibayar pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012. Peningkatan pada pemotongan PPh terutama disebabkan oleh dividen yang masih harus dibayar pada Desember 2013 dan akan dibayar pada Januari 2014, sementara dividen pada 2012 masih harus dibayar dan akan dibayar pada tahun yang sama.

Bagian lancar pinjaman bank jangka panjang. Pembayaran angsuran pinjaman SEFA adalah sebagai bagian dari liabilitas jangka pendek untuk 2013 dan 2012. Lihat pembahasan pada bagian Informasi Material untuk Investasi Barang Modal, Ekspansi, Divestasi, Merger/Akuisisi, atau Restrukturisasi Utang untuk rincian mengenai fasilitas SEFA. Penurunan sebesar

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

Accruals. A decrease of US\$1.6 million in accruals was derived from lower accruals for goods and services of US\$0.8 million, finance costs of US\$0.7 million and capital items of US\$1.1 million, offset by higher accruals for royalties, water levy, land rent and others of US\$0.9 million. Higher royalty accrual in 2013 was due to higher shipment volume in 2013 compared to 2012.

Short-term employee benefits liabilities. The increase of US\$3.7 million or 29% in short-term employee benefit liabilities is related with salaries, wages and other employee benefits liabilities. This liabilities was actually significantly decrease as the impact of the average exchange rate difference by 24% (2013: US\$1 = Rp12,198 vs 2012: US\$1 = Rp9,822).

Taxes payable. The increase of US\$2.3 million in taxes payable was mainly due to increase in withholding tax payables (Article 21, 23 and 26) and VAT payable in the amount of US\$1.8 million and US\$0.5 million, respectively. The increase of VAT payable was due to higher accrued goods and services in 2013 compared to 2012, increase in withholding tax payable was mainly due to dividend accrued in December 2013 and to be paid in January 2014, while the dividend in 2012 was accrued and paid in the same year.

Current portion of long term bank borrowings. The amount of US\$37.5 million for SEFA loan installment are paid as part of current liabilities both in 2013 and 2012. Please refer to Material Information for Capital Investment, Expansion, Divestment, Merger / Acquisition, or Debt Restructuring section for detailed analysis and discussion about this facility. The decrease

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

AS\$0,2 juta ini disebabkan oleh amortisasi tambahan untuk biaya penerbitan surat utang yang tidak diamortisasi pada 2013.

Liabilitas jangka panjang

Penurunan liabilitas jangka panjang disebabkan oleh menurunnya pinjaman jangka panjang sebesar AS\$36,7 juta, liabilitas kerja jangka panjang sebesar AS\$10,3 juta, liabilitas pajak tangguhan sebesar AS\$4,7 juta, yang dikompensasi dengan kenaikan penyisihan untuk penghentian pengoperasian aset sebesar AS\$3,7 juta.

Pinjaman bank jangka panjang. Pinjaman bank jangka panjang mencerminkan pengucuran pertama dan kedua dari fasilitas pinjaman SEFA untuk pembiayaan Proyek Karebbe, biaya pinjaman yang tidak diamortisasi untuk premi Nippon Export and Investment (NEXI) dan biaya dimuka, dikurangi porsi jatuh tempo jangka pendek dari liabilitas jangka panjang seperti dijelaskan di atas. Penurunan saldo pinjaman jangka panjang, baik lancar atau tidak lancar sebesar AS\$36,5 juta mengacu pada pembayaran angsuran kredit sebesar AS\$37,5 juta di tahun 2013, dan biaya amortisasi biaya pinjaman sebesar AS\$1,0 juta.

Liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang.

Penyisihan bagi imbalan kerja terdiri dari tunjangan yang berhubungan dengan peraturan tenaga kerja dan tunjangan kesehatan bagi para pensiunan (PRMC). Perseroan memiliki izin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Kep-434/KM.17/1997 tertanggal 31 Juli 1997, diterbitkan dalam Lembaran Negara No.73/1997 tertanggal 12 September 1997, tentang pembentukan Dana Pensiun International Nickel Indonesia (DPI), suatu dana pensiun yang dikelola tersendiri, dimana karyawan tertentu yang diterima sebelum 1 Januari 2011 dan telah memenuhi persyaratan masa kerja berhak menerima imbalan tertentu pada saat pensiun, cacat atau meninggal dunia.

of US\$0.2 million was due to the additional amortization of unamortized debt issuance costs in 2013.

Non-current liabilities

The decrease in non-current liabilities is derived from decrease of long-term bank borrowings of US\$36.7 million, long-term employee benefit liabilities of US\$10.3 million, deferred tax liabilities of US\$4.7 million and partially offset by an increase in provision for asset retirement of US\$3.7 million.

Long term bank borrowings. The long-term bank borrowings reflect the first and second drawdown of the SEFA loan for financing the Karebbe Project, unamortized deferred issuance costs for the Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) premium and upfront fee, minus the current maturities portion of long-term bank borrowings as explained above. The decrease in the balance of the long-term borrowings, both current and noncurrent of US\$36.5 million represents the payment of loan installment of US\$37.5 million in 2013, and amortization of debt issuance costs of US\$1.0 million.

Long-term post-employment benefits liabilities.

The long-term post-employment benefits liabilities consist of benefits in relation to the labor law and post-retirement medical benefits (PRMC). The Company received approval from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. Kep-434/KM.17/1997 dated July 31, 1997, as published in State Gazette No. 73/1997 dated September 12, 1997, to establish Dana Pensiun International Nickel Indonesia (DPI), a separate trustee administer pension fund, from which qualified employees hired prior to January 1, 2011, after serving for a qualifying period are entitled to a defined benefit on retirement, disability or death.

Pada tanggal 17 Desember 2012, Perseroan menerima surat Menteri Keuangan No. 733/KM.10/2012 terkait persetujuan likuidasi DPI.

Sebagai konsekuensi dari likuidasi DPI, dana pensiun karyawan Perseroan akan dialihkan dan dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") yang ditunjuk oleh Perseroan. Hal ini mencakup saldo dana pensiun saat ini yang sebelumnya dikelola oleh DPI dan dana pensiun masa depan yang dibayarkan berdasarkan pendekatan DC. Semua karyawan Perseroan yang sebelumnya menjadi peserta DPI rencana DB akan dimasukkan ke dalam rencana DC yang dikelola oleh DPLK. Saat ini proses likuidasi masih berlangsung.

Saldo liabilitas imbalan kerja 2013 sebesar AS\$11,6 juta lebih rendah dari tahun 2012 sebesar AS\$21,9 juta, berdasarkan penetapan akuarial oleh aktuaris independen, PT Tower Watson Purbajaga, dengan laporannya pada tanggal 12 Februari 2014 dan 29 Januari 2013. Faktor potongan harga yang lebih rendah disebabkan oleh perubahan rencana pensiun Perseroan dari Manfaat Pasti menjadi Kontribusi pasti ditambah dengan faktor diskon yang lebih tinggi (2013: 9% vs 2012: 6%) dalam perhitungan valuasi yang mengakibatkan turunnya nilai liabilitas aktuarial. Penurunan yang signifikan dalam nilai tukar rupiah turut mempengaruhi rendahnya saldo.

Liabilitas pajak tangguhan. Penurunan liabilitas pajak pendapatan tangguhan terutama akibat dari realisasi perbedaan waktu antara penyusutan pajak dan penyusutan komersial dari aset tetap sejumlah AS\$4,0 juta, ditambah dengan meningkatnya penyisihan untuk bahan pembantu usang sebesar AS\$0,3 juta dan penyisihan untuk penghentian pengoperasian aset sebesar AS\$0,9 juta, liabilitas atas pembayaran berbasis saham sebesar AS\$1,9 juta dan akrual/provisi lain-lain. Hal ini dikompensasi dengan penurunan liabilitas imbalan pasca kerja sebesar AS\$2,6 juta.

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

On December 17, 2012 the Company received a letter from The Minister of Finance No.733/KM.10/2012 regarding the approval for the liquidation of DPI.

As a consequence of liquidating DPI, the pension plan funds of the Company's employees will be transferred and managed by a pension fund financial institution ("DPLK") that has been appointed by the Company. This will include the current pension funds previously managed by DPI and future pension funds paid based on a Defined Contribution approach. All of the Company's employees who were previously participants of DPI Defined Benefit plan will be included in the Defined Contribution plan managed by the DPLK. The liquidation process is currently in progress.

The 2013 balance of US\$11.6 million was lower than the 2012 balance of US\$21.9 million, based on the actuarial assessment by an independent actuary, PT Tower Watson Purbajaga, with its report dated February 12, 2014 and January 29, 2013. Lower accrual of pension and PRMC expenses were due to the change in the Company's pension plan from Defined Benefit to Defined Contribution and further added by the higher discount factor (2013: 9% vs. 2012: 6%) used in the valuation calculation has decreased the value of the actuarial liability. The significant decrease in IDR conversion rate also further contribute to the lower balance.

Deferred tax liabilities. The decrease in deferred income tax liabilities mainly resulted from realization of timing difference between tax and commercial depreciation of fixed assets for the amount of US\$4.0 million, added by higher provision for obsolete supplies of US\$0.3 million, provision for asset retirement of US\$0.9 million, share-based payment liabilities of US\$0.1 million and other accruals/provisions of US\$1.9 million. This was offset by decreased post-employment benefit liabilities of US\$2.6 million.

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

Provisi atas penghentian pengoperasian aset. Provisi atas penghentian pengoperasian aset mengacu pada kewajiban hukum terkait dengan penghentian pengoperasian aset berwujud jangka panjang tertentu yang timbul dari akuisisi, pembangunan atau pengembangan dan/atau pengoperasian aset jangka panjang. Provisi yang lebih tinggi pada tahun 2013 mencerminkan akumulasi provisi termasuk jumlah provisi pada tahun 2012 sebagai saldo awal. Beban akresi sebesar AS\$3,7 juta dibukukan sebagai bagian dari beban keuangan dalam laporan laba rugi komprehensif Perseroan

Ekuitas

Total ekuitas turun sebesar AS\$7,2 juta disebabkan oleh pembagian dividen pada tahun tersebut sebesar AS\$50,1 juta dan diimbangi sebagian oleh laba tahun berjalan sebesar AS\$38,7 juta.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara No. 961/30/DJB/2012 tertanggal 12 Maret 2012 untuk wilayah Sorowako, dan Surat Keputusan No. 4166/37/DJB/2011 tertanggal 8 Desember 2011 untuk wilayah Pomalaa, sejumlah AS\$5,0 juta telah dipindahkan pada tahun 2012 dari cadangan jaminan reklamasi ke saldo laba ditahan untuk menggambarkan sisa kewajiban reklamasi berdasarkan surat keputusan di atas.

Perseroan menerima surat keputusan tersebut pada tanggal 10 Oktober 2013 terkait penetapan cadangan jaminan reklamasi periode 2013 – 2017 untuk wilayah Sorowako dari Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara No.1718/30/DJB/2013. Perseroan juga menerima surat keputusan terkait penetapan cadangan jaminan reklamasi periode 2012 – 2016 untuk wilayah Pomalaa dari Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara No. 786/37/DJB/2013 tertanggal

Provision for asset retirement. The provision for asset retirement provides for legal obligations associated with the retirement of a tangible long-lived asset that results from the acquisition, construction or development and/or the normal operation of long-lived assets. Higher provision in year 2013 reflects the provision accumulated by the Company which includes total provision of year 2012 as beginning balance. Accretion expense of US\$3.7 million is recognized as part of finance costs in the statement of comprehensive income.

Equity

Total equity decreased by US\$7.2 million due to the dividends declared during the year of US\$50.1 million and partially offset by profit for the year of US\$38.7 million.

Based on the latest Decision Letter of the Directorate General of Minerals and Coal No. 961/30/DJB/2012 dated March 12, 2012 for Sorowako area, and the Decision Letter No. 4166/37/DJB/2011 dated December 8, 2011 for Pomalaa area, US\$5.0 million was transferred during 2012 from the reclamation guarantee reserve to retained earnings to reflect the remaining reclamation liabilities based on the above letters.

The Company received a decision letter on October 10, 2013 regarding the establishment of the reclamation guarantee reserve for the period 2013 – 2017 for the Sorowako area from the Government in accordance with its Decision Letters of the Directorate General of Minerals and Coal No. 1718/30/DJB/2013. The Company also received a decision letter regarding the establishment of the reclamation guarantee reserve for the period 2012 – 2016 for the Pomalaa area from the Government in its Decision Letters of the Directorate

8 Mei 2013. Berdasarkan surat-surat keputusan tersebut, Perseroan mengirimkan uang yang berasal dari laba ditahan sebesar AS\$28,0 juta kepada jaminan reklamasi pada 2013 sebagai refleksi penambahan cadangan sebagaimana disyaratkan di atas.

Tidak ada perubahan pada jumlah cadangan umum yang telah ditetapkan, dan sesuai dengan UU No. 40/2007, Perseroan wajib memiliki cadangan sebesar AS\$12,1 juta (2012: AS\$5,3 juta) berdasarkan jumlah modal ditetapkan dan dibayar penuh sejumlah Rp248.408.468.00 (jumlah keseluruhan) atau setara dengan AS\$136,4 juta. Selain itu, pendapatan komprehensif lainnya sebesar AS\$4,3 juta berupa kerugian aktuarial dari program pensiun manfaat pasti dan asuransi kesehatan pasca-pensiun setelah dikurangi pajak.

ANALISA KINERJA KEUANGAN

Imbal hasil dan rasio-rasio PT Vale tetap kuat pada 2013, meskipun terdapat banyak tantangan yang disebabkan oleh penurunan harga nikel yang signifikan.

Profitabilitas

Rasio-rasio profitabilitas PT Vale lebih rendah pada tahun 2013 jika dibandingkan dengan 2012. Lihat tabel Rasio Profitabilitas di halaman berikutnya. Hal ini terutama disebabkan oleh dampak turunnya harga realisasi rata-rata nikel dalam matte sebesar 12%, walaupun volume penjualan meningkat sebesar 8% dibandingkan dengan 2012.

PT Vale saat ini memiliki 9.936.338.720 lembar saham diterbitkan dan beredar. Laba bersih komprehensif per saham menurun hingga sebesar AS\$0,004 pada 2013 jika dibandingkan dengan 2012 sebesar AS\$0,007, sebagai akibat dari kondisi yang dijelaskan di atas.

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

General of Minerals and Coal No. 786/37/DJB/2013 dated May 8, 2013. Based on the letters, the Company transferred US\$28.0 million in 2013 from retained earnings to the reclamation guarantee reserve to reflect the addition in the reserve as required in the above mentioned letters.

The general reserve balance established remain the same in accordance with Indonesian Company Law No. 40/2007, the Company set up a reserve amounting to US\$12.1 million (2012: US\$5.3 million), based upon the issued and paid up capital of IDR248,408,468,000 (full amount) or equivalent to US\$136.4 million. In addition, the other comprehensive income of US\$4.3 million was the actuarial loss from defined benefit plan and post-retirement medical benefits net off tax.

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS

PT Vale's financial returns and ratios remained strong in 2013 despite challenges due to the significant fall in nickel price.

Profitability

PT Vale's profitability ratios were lower in 2013 compared to 2012. Please see Profitability Ratios table on following page. This lower profitability ratio was mainly impacted by a decrease in average realized price of nickel in matte by 12%, even though the sales volume was higher by 8% compared to 2012.

PT Vale has 9,936,338,720 shares issued and outstanding. Basic earnings per share were US\$0.004 in 2013 compared to US\$0.007 in 2012, with the decrease resulting from the conditions explained above.

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

Rasio Profitabilitas (dalam %, kecuali Laba per Saham) Profitability ratios (in %, except EPS)	2013	2012
Marjin laba kotor (Laba kotor/pendapatan) Gross profit margin (Gross profit/revenue)	15%	17%
Marjin laba bersih (Laba bersih keseluruhan/pendapatan) Net profit margin (Profit for the year/revenue)	4%	7%
Pengembalian Aset (Laba bersih keseluruhan/jumlah aset) Return on assets (Profit for the year/total assets)	2%	3%
Pengembalian Ekuitas (Laba bersih keseluruhan/jumlah ekuitas) Return on equity (Profit for the year/total equity)	2%	4%
Tingkat Pengembalian rata-rata Modal (Laba sebelum pajak penghasilan/rata-rata jumlah hutang dan ekuitas di awal dan akhir tahun) Return on average capital employed (Profit before income tax/average of total net borrowings and total equity at the beginning and end of the year)	3%	5%
Laba bersih per saham (Laba bersih keseluruhan/ saham yang beredar) - AS\$/saham Basic earnings per share (Profit for the year/outstanding shares) - US\$/share	0.004	0.007

Apabila diasumsikan bahwa harga realisasi nikel dalam matte rata-rata tahun ini setara dengan harga realisasi nikel rata-rata pada 2012, maka rasio profitabilitas akan terlihat lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan harga nikel rata-rata.

Assuming the average realized price of nickel in matte is at the same level as 2012 average realized nickel price, the profitability ratio will be much profitable compared to actual average nickel price.

Tabel berikut menunjukkan perbandingan rasio profitabilitas pada tahun 2013 dan 2012, berdasarkan harga realisasi nikel rata-rata.

Below table is the 2013 profitability ratio comparison between 2013 actual average realized nickel price compared to 2012 actual price.



Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

Rasio Profitabilitas (dalam %, kecuali Laba per Saham) Profitability ratios (in %, except EPS)	2013*	2013
Marjin laba kotor (Laba kotor/pendapatan) Gross profit margin (Gross profit/revenue)	25%	15%
Marjin laba bersih (Laba bersih keseluruhan/pendapatan) Net profit margin (Profit for the year/revenue)	12%	4%
Pengembalian Aset (Laba bersih keseluruhan/jumlah aset) Return on assets (Profit for the year/total assets)	5%	2%
Pengembalian Ekuitas (Laba bersih keseluruhan/jumlah ekuitas) Return on equity (Profit for the year/total equity)	7%	2%
Tingkat Pengembalian rata-rata Modal (Laba sebelum pajak penghasilan/rata-rata jumlah hutang dan ekuitas di awal dan akhir tahun) Return on average capital employed (Profit before income tax/average of total net borrowings and total equity at the beginning and end of the year)	9%	3%
Laba bersih per saham (Laba bersih keseluruhan/ saham yang beredar) - AS\$/saham Basic earnings per share (Profit for the year/outstanding shares) - US\$/share	0.013	0.004

* menggunakan konsumsi harga realisasi nikel rata-rata tahun 2012
* using 2012 average realized nickel price assumption

Likuiditas

Risiko likuiditas muncul jika PT Vale mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Manajemen risiko likuiditas yang berhati-berhati berarti mempertahankan kecukupan kas dan setara kas. PT Vale mengelola risiko likuiditas dengan terus memantau arus kas perkiraan dan aktual, serta menyelaraskan jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Kami yakin likuiditas kami tetap baik, dengan rasio lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 yang stabil berkisar pada tingkat lebih dari 3 kali. Rasio Likuiditas terdapat pada tabel pada halaman berikutnya.

Rasio lancar per 31 Desember 2013 adalah 3,30 - 3% lebih rendah dari rasio lancar 3,41 pada tahun di 2012, yang disebabkan oleh penurunan aset lancar sebesar 1% dan penurunan liabilitas jangka pendek sebesar 2%. Penurunan aset lancar didorong oleh kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, persediaan, biaya dibayar dimuka dan aset keuangan lancar

Liquidity

Liquidity risk arises in situations where PT Vale has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. PT Vale manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities. We believe our liquidity remained strong given the current ratio at December 31, 2013 and 2012 were stable at more than 3 times. Please see Liquidity Ratio table on the next page.

The current ratio at December 31, 2013 was 3.30, slightly lower by 3% from the 2012 ratio of 3.41, due to a 1% decrease in current assets and 2% decrease in current liabilities. The decrease in current assets was driven by a decrease in restricted cash, trade receivables, inventories, prepayment and advances and other current financial assets, offset by an increase in cash

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

lainnya, diimbangi oleh peningkatan kas dan setara kas serta pajak dibayar di muka. Peningkatan pada liabilitas jangka pendek didorong oleh penurunan pada utang usaha pihak-pihak berelasi, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, utang pajak, bagian lancar atas pinjaman bank jangka panjang, liabilitas atas pembayaran berbasis saham dan liabilitas keuangan jangka pendek lainnya. Peningkatan ini diimbangi oleh utang usaha – pihak ketiga dan akrual. Penjelasan tentang analisa aset lancar dan liabilitas jangka pendek disajikan pada bagian “Pembahasan dan analisa manajemen – Aset Lancar dan Liabilitas Jangka Pendek”.

Rasio modal kerja bersih terhadap total aset adalah sebesar 0,17 kali untuk tahun 2013 dan 2012.

and cash equivalent and prepaid taxes. The increase in current liabilities was driven by higher trade payables – related parties, short-term employee benefits liabilities, taxes payable, current portion of long-term bank borrowings, share-based payment liabilities and other current financial liabilities, offset by lower trade payables – third parties and accruals. Please refer to “Management's Discussion and Analysis – Current Assets and Current Liabilities” section for further analysis about current assets and current liabilities.

The net working capital to total assets ratio was at 0.17 both for 2013 and 2012.

Rasio likuiditas Liquidity ratio

	2013	2012
Rasio lancar (Aset lancar/kewajiban lancar) Current ratio (Current assets/current liabilities)	3.30	3.41
Rasio modal kerja bersih terhadap total aset ((aset lancar - kewajiban lancar)/total aset) Net working capital to asset ratio (current assets - current liabilities)/total assets	0.17	0.17

Leverage keuangan

Sebagian besar penurunan pada rasio-rasio leverage keuangan dapat dikaitkan dengan penurunan pada total liabilitas karena adanya pembayaran pinjaman Perjanjian Fasilitas Ekspor Senior (SEFA) sebesar AS\$37,5 juta yang telah dibayar pada tahun 2013. Penurunan pada total ekuitas berujung pada dibagikannya dividen pada tahun tersebut, yang dikompensasi oleh laba 2013, sementara total aset menurun terutama akibat penurunan pada piutang usaha – pihak-pihak berelasi, pajak dibayar dimuka dan biaya dibayar dimuka dan uang muka, yang dikompensasi oleh kenaikan kas dan setara kas serta aset tetap. Lihat tabel Rasio leverage keuangan berikut ini.

Financial leverage

Most of the decreases in the financial leverage ratios were related to the decrease of total liabilities as the installment of Senior Export Facility Agreement (SEFA) loan of US\$37.5 million was paid in 2013. Decrease in total equities resulted dividends declared during the year and partially offset by additional profit during 2013, while total assets decreased mostly due to the decrease in trade receivables – related parties, prepaid taxes and prepayments and advances, offset by the increase in cash and cash equivalents and fixed assets. Please see Financial Leverage Ratios table.

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

Rasio kewajiban Financial leverage ratios

	2013	2012
Rasio hutang terhadap ekuitas (Total kewajiban/total ekuitas) Debt to equity ratio (Total liabilities/total equity)	0.33	0.36
Rasio hutang (Total kewajiban/total aset) Debt ratio (Total liabilities/total assets)	0.25	0.26
Rasio hutang tertentu (Total pinjaman bank bersih*/total aset) Specific debt ratio (Total net bank borrowings*/total assets)	0.10	0.11
Rasio hutang tertentu terhadap ekuitas (Total pinjaman bank bersih*/total ekuitas) Specific debt to equity ratio (Total net bank borrowings*/total equity)	0.13	0.15
Hutang terhadap EBITDA (Total pinjaman bank bersih*/total EBITDA) Debt to EBITDA coverage (Total net bank borrowings*/total EBITDA)	1.21	1.22
Hutang terhadap nilai Perseroan (Total pinjaman bank bersih*/nilai Perseroan) Debt to enterprise value (Total net bank borrowings*/enterprise value)	0.10	0.10
Arus kas dari operasi terhadap hutang (Arus kas dari operasi/total pinjaman bank bersih*) Operating cash flow to debt coverage (Operating cash flow/total net bank borrowings*)	1.21	0.31
Total pinjaman bank bersih*/(Arus kas dari operasi dikurangi dividen) Total net bank borrowings*/(Operating cash flow minus dividends paid) coverage	1.01	(8.17)

*Pinjaman bank bersih termasuk biaya pinjaman

*Net of total bank borrowings including debt issuance cost

Rasio utang terhadap ekuitas tahun 2013 sebesar 0,33 adalah sedikit lebih rendah dari tahun 2012, yaitu 0,36, disebabkan oleh penurunan pada total ekuitas. Penurunan pada total aset juga lebih besar dari penurunan pada total liabilitas, sehingga rasio utang menurun menjadi 0,25 pada 2013 dari 0,26 pada 2012.

Sama seperti kondisi di atas, rasio utang tertentu dan rasio utang terhadap ekuitas tertentu menurun dari tahun sebelumnya, disebabkan oleh adanya pembayaran pinjaman SEFA.

Rasio utang terhadap EBITDA menurun menjadi 1,21 dari 1,22 terutama akibat penurunan EBITDA yang didorong oleh penurunan harga realisasi rata-rata nikel dalam matte.

The 2013 debt to equity ratio 0.33 was slightly lower than 0.36 in year 2012 due to the decrease in total liabilities and the decrease in total equity. The decrease in total assets also outweighed the decrease in total liabilities, resulting in a decrease in debt ratio to 0.25 in 2013 from 0.26 in 2012.

Similar to the above, specific debt ratio and specific debt to equity ratio were decreased from last year due to the SEFA loan installment.

Debt to EBITDA coverage slightly decreased to 1.21 from 1.22 mainly because of the decrease of EBITDA driven by lower average realized price of nickel.

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

Rasio utang terhadap nilai Perseroan pada tahun 2013 adalah sama seperti 2012. Karena nilai Perseroan menurun oleh karena rendahnya kapitalisasi pasar pada 2013 (yang disebabkan oleh melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS rata-rata pada tanggal 31 Desember 2013, dibandingkan dengan 2012), meskipun harga saham 2013 meningkat sebesar 13% dari 2012.

Rasio arus kas operasi terhadap utang meningkat dari 0,31 pada tahun 2012 menjadi 1,21 pada tahun 2013, diakibatkan karena arus kas operasi yang lebih besar dan penurunan total utang.

Solvabilitas

Rasio solvabilitas diukur dengan EBITDA yang dibandingkan dengan total pinjaman. Rasio ini merupakan ukuran sejauh mana Perseroan dapat memenuhi komitmennya untuk membayar pinjaman jangka panjang. Lihat daftar rasio solvabilitas di bawah ini.

Rasio Solvabilitas Solvency ratio	2013	2012
(AS\$ dalam ribuan) (US\$ in thousands)		
EBITDA EBITDA	203,390	215,547
Total pinjaman bank bersih (AS\$ dalam ribuan) Total borrowings (US\$ in thousands)	219,115	255,634
Rasio solvabilitas (EBITDA/total pinjaman) Solvency ratio (EBITDA/total borrowings)	0.93	0.84

Rasio tersebut dihitung dengan membagi EBITDA PT Vale dengan jumlah pinjaman bank bersih. Pinjaman Perseroan, baik yang jatuh tempo dalam satu tahun dan jangka panjang, per 31 Desember 2012 adalah sebesar AS\$219,1 juta dibandingkan AS\$255,6 juta per 31 Desember 2012. Penurunan EBITDA PT Vale 2013 dari sebelumnya AS\$215,5 juta menjadi AS\$203,4 juta sebagian diimbangi oleh penurunan jumlah pinjaman, sehingga berhasil

Debt to Enterprise ratio in 2013 was at the same ratio as 2012 as the enterprise value decreased driven by lower market capitalization in 2013 because of the weakening of Indonesian Rupiah against US dollar on average at 31 December 2013 compared to the same period in 2012, even though the share price in 2013 increased 13% from 2012.

Operating cash flow to debt coverage increased from 0.31 in 2012 to 1.21 in 2013 driven by higher operating cash flow and decrease in total debt.

Solvency

The solvency ratio measures the size of a company's EBITDA, as compared to its total borrowings. It provides a measurement of how likely a company will be to continue meeting its commitment for borrowings. Please refer to the table of solvency ratio below.

The ratio is calculated by dividing PT Vale's EBITDA to our total net bank borrowings. Our bank borrowings, both current maturities and long term, as of December 31, 2013 were US\$219.1 million compared to US\$255.6 million as of December 31, 2012. The decrease in PT Vale's 2013 EBITDA to US\$203.4 million from US\$215.5 million, but partially offset by the decrease of total borrowing resulting the increase in solvency ratio from 0.84 in 2012 to 0.93 in 2013. The increase in solvency

meningkatkan rasio solvabilitas Perseroan, dari 0,84 pada 2012 menjadi 0,93 pada tahun 2013. Peningkatan rasio solvabilitas menunjukkan keyakinan Perseroan dalam membayar utang sesuai jadwal.

Kolektibilitas

Seluruh piutang usaha kami terhutang kepada dua pemegang saham terbesar kami, VCL dan SMM. VCL dan SMM memiliki kepentingan atas strategi jangka panjang terhadap kesinambungan keberhasilan operasi kami. Pada umumnya piutang usaha kami dibayar dalam waktu 30 sampai 60 hari setelah pengapalan; tidak pernah ada kesulitan dalam menagih piutang dan kami yakin akan tetap demikian.

Investasi modal dan berkelanjutan

Investasi modal dan investasi berkelanjutan diperlukan untuk menjaga bisnis Perseroan tetap tumbuh dan menjaga kesinambungan tingkat produksi. Upaya-upaya substitusi sumber energi dan efisiensi, pengurangan biaya dan perbaikan lingkungan adalah poin penting dari program-program investasi modal dan investasi yang berkelanjutan pada tahun berjalan. Perseroan berada di tengah pelaksanaan program investasi modal multi-tahun yang meliputi: pengoptimalan operasional pabrik peleburan di Sorowako, terutama dengan pengurangan penghentian dalam proses-proses yang ada saat ini; konversi energi pengeringan bijih menggunakan HSFO maupun batubara, sehingga memungkinkan pertukaran antara dua bahan bakar ini meski tergantung nilai ekonomis dari tiap jenis bahan bakar tersebut; proyek peningkatan tanur listrik; memelihara integritas peralatan dan infrastruktur yang ada saat ini; serta penggantian peralatan besar untuk meningkatkan ketersediaan aset fisik Perseroan. Nilai proyek-proyek tersebut adalah 65% dari investasi modal dan berkelanjutan Perseroan untuk aset tetap dalam penyelesaian adalah sebesar AS\$137,9 juta pada tahun 2013.

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

ratio shown the confident in our ability to perform our repayments on schedule.

Collectability

All of our trade receivables are due from our two largest shareholders, VCL and SMM. VCL and SMM have a long-term strategic interest in the continuing success of our operations. Normally our trade receivables are collected within 30-to-60 days of shipment; there has never been any difficulty with the collection and we are confident that this will continue to be the case.

Capital and sustaining investments

Capital and sustaining investments are required to grow our business as well as to sustain our current levels of production. Energy substitution and efficiency, asset integrity, cost reduction and environmental improvement are focal points of our current capital and sustaining investment program. We are in the middle of a multi-year capital program, which includes optimizing the operation of our smelter in Sorowako, primarily by eliminating downtime in the current process; the conversion of all ore dryer burners to be capable of using two fuel sources, using either HSFO or pulverized coal, which allows the flexibility to switch between these fuels, depending on the prevailing economics of each one; electric furnaces upgrade projects; preserving the existing equipment and infrastructure integrity; and replacement of heavy equipment to improve the physical availability of our assets. These projects constituted 66% of our 2013 capital and sustaining investments for construction-in-progress budget of US\$137.9 million.

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

Sebagian besar investasi modal pada tahun berjalan didanai dari arus kas internal PT Vale. Namun demikian, selama periode 2008 sampai 2011, Proyek Karebbe didanai dari pinjaman SEFA. Silakan lihat bagian "Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal" untuk melihat pembahasan mengenai fasilitas ini. Sebagian besar dari belanja modal Perseroan dinyatakan dalam dolar AS, yang merupakan mata uang fungsional Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan tidak terekspos terhadap mata uang asing secara signifikan.

Proyek PLTA Karebbe

Fasilitas PLTA Karebbe merupakan komponen pembangkit energi dari program investasi modal PT Vale. Proyek Karebbe memproduksi energi listrik tenaga air untuk mengoperasikan tanur listrik di fasilitas Sorowako dan merupakan inisiatif utama Perseroan dalam program efisiensi energi dan penurunan biaya. Sumber energi diperbaharui ini menghapus beberapa ratus ribu ton emisi gas rumah kaca setiap tahun, dibandingkan dengan pasokan listrik energi termal konvensional.

Proyek ini telah selesai dibangun dan resmi beroperasi secara komersial sejak Oktober 2011.

Proyek konversi batubara

Perseroan telah memulai fase pertama dari dua fase yang akan menggantikan HSFO dengan batubara serbuk dalam tanur pengering dan tanur pereduksi. Proyek ini meliputi peningkatan infrastruktur yang ada saat ini untuk penanganan material *bulk commodities*. Tahap kedua meliputi konversi tanur pereduksi.

Pada tahun 2013, sekitar AS\$36,5 juta (2012:AS\$28,4 juta) digunakan untuk proyek ini. Proyek tersebut telah selesai dikerjakan dan mulai dijalankan pada triwulan ke-4 tahun 2013.

All of our capital investments in the current year were funded by PT Vale's internally generated cash flow, however during the period 2008 to 2011 our Karebbe project which was funded by the SEFA loan. Please refer to our Capital Structure and Capital Structure Policy discussed below. " for discussion about this facility. A large portion of our capital expenditures are denominated in US dollars, which is our functional currency. Therefore, we do not expect to have significant foreign currency exposure.

Karebbe hydroelectric generation project

The Karebbe hydroelectric power facility is the energy generation component of PT Vale's capital program. The Karebbe facility produces sufficient hydroelectric energy to operate the Electric Furnaces at the Sorowako facility and is the main initiative in our energy efficiency and cost reduction program. This renewable energy source eliminates several hundred thousand tons of greenhouse gas emissions per year, compared to conventional thermal power supplies.

The construction of this project has been concluded and it has been commercially operational since October 2011.

Coal conversion project

We have begun the first phase of a two-phase project that will replace HSFO with pulverized coal in our rotary dryers and reduction kiln. It also involves the upgrade of our existing bulk commodity material-handling infrastructure. The second phase will involve a similar conversion of the kilns.

In 2013, about US\$36.5 million (2012: US\$28.4 million) was spent on this project. The project has been completed and commissioned in fourth quarter of 2013.

Proyek peningkatan kapasitas tanur listrik

Perseroan terus mencari cara-cara untuk meningkatkan kapasitas produksi. Kami melakukan studi multi-tahunan mengenai optimalisasi pengoperasian tanur peleburan di Sorowako, terutama dengan menghilangkan hambatan (bottleneck) pada proses yang ada saat ini. Perseroan meninjau kembali bisnisnya untuk tercapainya efisiensi dan perbaikan produktivitas, termasuk meningkatkan stabilitas dan keandalan peralatan.

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat produksi melalui investasi modal. Salah satu proyek utama ini adalah pembangunan kembali dan peningkatan kapasitas nominal Tanur Listrik 2 dan Tanur Listrik 1, dari 75 MW menjadi 90MW, sehingga tanur dapat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi untuk mendukung peningkatan produksi.

Setelah kapasitas tanur listrik selesai ditingkatkan pada 2012, kami terus mengembangkan dan meningkatkan kapasitas Tanur Listrik 1 pada tahun 2013. Proses tersebut secara umum telah berjalan sesuai rencana – engineering design, pengadaan item timah panjang dan fabrikasi material telah dimulai sejak 2013.

Selama periode penghentian operasi ini, kami juga menyelaraskan tanur produksi 2 dan 4 serta memasang sistem stabilisasi permintaan tenaga listrik pada Tanur Listrik 1. Tujuan dari pemasangan ini adalah untuk menurunkan pergerakan dan fluktuasi daya Tanur Listrik sehingga Tanur dapat beroperasi pada kapasitas megawatt rata-rata yang lebih tinggi secara lebih berkelanjutan.

Sistem ini diharapkan dapat berkontribusi pada kenaikan produksi nikel dan memperpanjang umur pemakaian. Sistem stabilisasi permintaan tenaga listrik ini merupakan prototipe dan saat ini masih dalam

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

Electric furnace upgrade projects

We are continuously looking for ways to increase our production capacity. Currently, we are in the middle of multi-year studies to find ways to optimize the operation of our smelter in Sorowako, primarily by eliminating bottlenecks in the current process. We are reviewing our business to identify areas for efficiency and productivity improvements, including enhancing process stability and equipment reliability.

This project sets the stage for production increases through capital investment. One main project is the rebuilding and upgrading of Electric Furnace 2 and Electric Furnace 1 from 75 MW to 90 MW nominal capacities, enabling operation at a higher power level to support increased production.

After the completion of the electric furnace upgrade in 2012, we continued to rebuild and upgrade Electric Furnace 1 in 2013. The overall progress is on track – engineering design, procurement of long-lead items and fabrication material began in 2013.

During the same shutdown window we will also have projects to reline two of our kilns and install the power demand stabilization system on Electric Furnace 1. The primary objective of having the power demand stabilization system is to reduce the Electric Furnace's power variability and fluctuation, so it can sustainably operate at a higher average megawatt capacity more sustainably.

This system is expected to further increase in nickel production and asset life. This power demand stabilization system is a prototype and is still being fine-tuned after a successful installation. We continue

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis



proses maksimalisasi setelah berhasil dipasang. Kami senantiasa memonitor kinerja sistem tersebut pada Tanur Listrik 2, dan jika proyek ini berjalan lancar, Perseroan berencana memasang sistem stabilisasi serupa untuk tanur listrik 1 dan tanur listrik lainnya.

Pada tahun 2013, belanja pengeluaran untuk proyek-proyek peningkatan Tanur Listrik 1 adalah sebesar AS\$22,8 juta.

Proyek integritas aset

Tujuan dari proyek integritas aset adalah untuk mempertahankan integritas infrastruktur/alat yang ada, termasuk memperbaiki, mengganti suku cadang, penguatan struktur, merenovasi, menyeleksi dan membuat konstruksi kerangka bangunan dalam pabrik kami. Proyek ini termasuk mengganti berbagai struktur dan fasilitas mekanikal di Sorowako.

Proyek ini mencerminkan komitmen Perseroan terhadap keberlanjutan operasional dan keselamatan karyawan dan kontraktor. Selama tahun 2013, sebanyak AS\$6,3 juta (2011: AS\$9,9 juta) telah dikeluarkan untuk proyek integritas aset.

Peningkatan jalan umum Bahodopi dan jalan angkutan tambang Petea

Tujuan proyek jalan umum Bahodopi adalah membangun jalan penghubung yang tahan cuaca dari Bahodopi ke Sorowako yang menghubungkan jalan raya Trans Sulawesi di daerah pantai Bahodopi dengan jalan kabupaten Luwu Timur di lembah Lampasue. Pembangunan jalan ini adalah bagian dari komitmen kepada Pemerintah Indonesia di dalam Kontrak Karya PT Vale, dan akan terbuka untuk umum.

to monitor the performance of the power demand stabilization system on Electric Furnace 2 and, if the expected results are confirmed, the same configuration will be applied to the power demand stabilization system for Electric Furnace 1 and the other furnaces.

In 2013, total spending on the Electric Furnace 1 upgrade project was US\$22.8 million.

Asset integrity projects

The purpose of asset integrity projects is to preserve the existing infrastructure integrity, including the repair, retrofit, structural strengthening and refurbishment of steel structures in our plant. Various structural and mechanical facilities in the Sorowako facilities were included in the scope.

These projects demonstrate our commitment to operational sustainability and the well-being of our employees and contractors. During 2013, a total of US\$6.3million (2012: US\$9.9million) has been spent on asset integrity projects.

Bahodopi public road and Petea haul road upgrading

The objective for Bahodopi public road project is to construct an all-weather road from Bahodopi to Sorowako, connecting the Trans Sulawesi highway at the Bahodopi coastal area with the East Luwu Regional Road in the Lampasue Valley. This road is part of the commitment to the Government of Indonesia in PT Vale's CoW and will be available for public use.



Proyek peningkatan jalan angkutan tambang Petea adalah memulai konstruksi jalan tahan cuaca yang membuka akses ke Sulawesi Selatan dan blok pertambangan Bahodopi di propinsi Sulawesi Tengah. Proyek ini adalah bagian dari pengembangan tambang Bahodopi dan diharapkan akan membuka akses yang lebih baik ke cadangan mineral Bahodopi dan mengoptimalkan kualitas nikel.

Pada tahun 2013, sekitar AS\$6,5 juta telah dikeluarkan untuk proyek ini, dan sekitar AS\$22 juta telah dibukukan dalam pos aset tetap dalam penyelesaian per tanggal 31 Desember 2013.

Rehabilitasi jalan utama

Jalan penyangga antara lokasi pabrik dan Balantang adalah komponen vital dalam efisiensi operasional Perseroan. Seluruh bahan mentah dikirim melalui jalan ini dan semua produk akhir dikirim dari lokasi pabrik pengolahan melalui jalan yang sama.

Proyek ini merehabilitasi jalan penyangga yang menghubungkan lokasi pabrik ke pelabuhan Balantang yang meliputi pengaspalan kembali, pengerasan dan penambalan jalan. Proyek tersebut rampung dilaksanakan pada 2013 dengan total biaya modal sebesar AS\$4,7 juta.

Penggantian alat berat

Cakupan dari proyek penggantian alat berat ini adalah untuk mengganti alat berat yang ada yang telah melampaui usia ekonomisnya. Peningkatan biaya perawatan serta penurunan kinerja alat merupakan indikator utama untuk penggantian alat berat. Proyek ini memperlihatkan komitmen kami untuk mempertahankan tingkat produksi dan efisiensi biaya. Per tanggal 31 Desember 2013, sekitar AS\$1,4 juta telah dicatat di dalam akun aset tetap dalam penyelesaian.

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

The Petea haul-road upgrading project will begin construction of an all-weather road that will allow access to the South Sulawesi and Bahodopi mining blocks in the province of Central Sulawesi. The project is part of the Bahodopi mine development project and will provide better access to Bahodopi mineral deposits and to optimize the nickel grade.

In 2013, US\$6.5 million was spent on this project and approximately US\$22 million had been recorded in the construction in progress account as of December 31, 2013.

Major road rehabilitation

The logistic road between the plant site and Balantang is a vital component in the efficiency of operations of the Company. All raw materials are delivered using this road and all finished products leave the site by the same route.

The scope of this project is to rehabilitate the logistic road serving from plant site to Balantang port, which involves overlaying, stabilizing and patching of the road. This project is completed and capitalized in 2013 with total capital cost of US\$4.7 million.

Heavy equipment replacement

The scope of the heavy equipment replacement project is to replace the existing heavy equipment which has reached the end of economical life. Increasing maintenance costs as well as decreases in equipment physical availability are the main indicators for heavy equipment replacement. This project demonstrates our commitment to sustain our current levels of safety, production and cost efficiency. As of December 31, 2013, about US\$1.4 million had been recorded in our construction in progress account.

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

Penelitian pengembangan proyek

PT Vale terus mempelajari berbagai peluang untuk pertumbuhan, efisiensi, pengurangan biaya dan perbaikan lingkungan, sesuai dengan strategi kami dalam menumbuhkan bisnis nikel dan mengamankan ijin operasi kami. Di antara inisiatif utama yang sedang dievaluasi adalah Indonesia Growth Projects.

Rencana untuk mencapai efisiensi operasional di peleburan Sorowako, termasuk rencana penambangan secara selektif untuk mendukung rencana pertumbuhan kami, program peningkatan operasional dan pemeliharaan, penangkap debu, serta rencana pengembangan tambang dan Indonesia Growth Project sebagai basis dari rencana jangka panjang untuk mencapai target kapasitas produksi nikel tahunan sebesar 120.000 ton. Biaya penelitian ini dibukukan sebagai biaya pengembangan proyek sebagai bagian dari akun beban lainnya dalam Laporan Laba Rugi Perseroan.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL

Kebijakan struktur modal PT Vale dibuat untuk memfasilitasi pendanaan bagi pertumbuhan dan pada saat yang sama menjaga neraca yang sehat. Oleh karena itu kami mengupayakan tingkat pemanfaatan hutang yang rendah pada saat pasar nikel sedang menguat untuk mengantisipasi dampak melemahnya arus kas pada saat siklus pasar menurun.

Kami selalu berusaha keras untuk menjaga profil keuangan konservatif yang sesuai untuk industri kami.

Struktur ekuitas modal Perseroan terdiri dari modal dasar sebesar AS\$136,4 juta dan tambahan modal disetor sebesar AS\$277,8 juta di tahun 2012 dan 2011.

Project development studies

PT Vale continues to study various opportunities for growth, efficiency, cost reduction and environmental improvement, consistent with our strategy to grow the nickel business and to continue to secure our license to operate. The major initiatives being evaluated are outlined in the Indonesia Growth Project.

The plan to capture operational efficiency gains at our existing Sorowako smelter, including our Operational and Maintenance Improvement Program (OMIP), dust insufflations, growth mining plan and Indonesia Growth Project are the basis for the long-term target of an annual production capacity of 120,000 tons of nickel in matte. The costs of these studies are reported as project development costs as part of Other Expenses in our Statements of Earnings.

CAPITAL STRUCTURE AND CAPITAL STRUCTURE POLICY

PT Vale's capital structure policy is set to facilitate the financing of our growth while maintaining a sound balance sheet. Accordingly, we emphasize low leverage when nickel markets are strong in order to prepare for the impact of weaker cash flows during weak cycles.

We strive to maintain a conservative financial profile that is appropriate for our industry.

PT Vale holds a consistent level of share capital of US\$136.4 million and additional paid-in capital of US\$277.8 million in both 2013 and 2012.

Informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, merger, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi afiliasi dan benturan kepentingan, dan transaksi pihak terkait

Perjanjian fasilitas ekspor senior (SEFA)

Pada 30 November 2009, PT Vale menandatangani SEFA dengan Mizuho Corporate Bank, Ltd. dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, sebagai Pemberi Pinjaman, Agen Fasilitas dan Agen Kolateral bersama dengan Vale S.A sebagai pemberi garansi. Fasilitas pinjaman sebesar AS\$300,0 juta (terdiri dari kredit dari Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. sebesar AS\$200,0 juta dan dari Mizuho Corporate Bank, Ltd. sebesar AS\$100,0 juta) digunakan untuk membiayai Proyek Karebbe dengan estimasi biaya sebesar AS\$410,0 juta. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga pada LIBOR plus 1,5% per tahun untuk periode bunga yang relevan; bunga mulai dibayarkan pada 19 Februari 2010. Angsuran pokok akan dibayar kembali melalui 16 angsuran semitahunan dan dimulai pada 19 Februari 2012.

Terhitung tanggal 31 Desember 2009, PT Vale telah membayar jasa di muka dan jasa agensi sebesar AS\$5 juta, premi asuransi NEXI sebesar AS\$6,0 juta, dan jasa lainnya sebesar AS\$0,2 juta. Jumlah-jumlah ini telah dikapitalisasi sebagai pinjaman jangka panjang dan diamortisasi sampai akhir periode SEFA.

Terhitung tanggal 31 Desember 2010, PT Vale telah menarik AS\$150 juta dari fasilitas SEFA. Per 31 Desember 2011, saldo pinjaman telah meningkat menjadi sebesar AS\$300 juta pada saat Perseroan menarik fasilitas kedua sebesar AS\$150 juta di bulan Maret 2011.

Berikut ini adalah jasa yang harus dibayarkan selama kredit SEFA oleh PT Vale:

- Jasa agensi pada Agen Fasilitas, sebesar AS\$20.000,0 per tahun, dibayar setiap tanggal 30 November, sampai seluruh pinjaman dibayar penuh;

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

Material information on investment, expansion, divestment, merger, acquisition, debt/capital restructuring, affiliated transaction and conflict of interest and related party transactions

Senior Export Facility Agreement (SEFA)

On November 30, 2009, PT Vale entered into a SEFA with Mizuho Corporate Bank, Ltd. and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., as the Lender, Facility Agent and Collateral Agent, respectively, with Vale S.A. as the guarantor. The facility of US\$300.0 million (consisting of loans from the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. of US\$200.0 million and from Mizuho Corporate Bank, Ltd. of US\$100.0 million) was used to finance Karebbe Project which was estimated at US\$410.0 million. The facility is subject to interest at LIBOR plus 1.5% per annum for the relevant interest period; interest started being paid on February 19, 2010. The principal started being repaid in 16 semi-annual installments beginning on February 19, 2012.

As of December 31, 2009, PT Vale had paid upfront fees and agency fees of US\$5 million, NEXI insurance premium of US\$6.0 million, and other fees of US\$0.2 million. These amounts have been capitalized as long-term borrowing and amortized until the end of SEFA facility period.

As of December 31, 2010, PT Vale had drawn down US\$150 million of the SEFA facility. As of December 31, 2011 the loan balance has increased to US\$300.0 million as the Company has withdrawn its remaining facility of US\$150.0 million in March 2011.

The following fees are to be paid over the life of the SEFA loan by PT Vale:

- Agency fee to the Facility Agent, amounting to US\$20,000 per annum, on every November 30, until all loans have been paid in full;

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

- Jasa Agen Kolateral kurang lebih sebesar AS\$15,000 setiap tahun; dan
- Jasa garansi pada pemberi garansi sebesar 1,5% per tahun dari jumlah kredit yang belum dibayar; dan

Fasilitas SEFA adalah subyek dari perjanjian tertentu, di antaranya:

- wajib menyerahkan kepada agen fasilitas dalam jangka waktu masing-masing 180 hari dan 90 hari sejak akhir tiap tahun dan periode fiskal, laporan keuangan yang telah diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan laporan keuangan triwulanan yang tidak diaudit;
- dana dari pinjaman ini hanya akan digunakan untuk membiayai konstruksi, pembangunan dan operasi dari proyek Karebbe;
- memastikan setidaknya perlakuan dari passu dengan semua pinjaman senior lain baik yang tidak dijamin maupun yang bersifat unsubordinated milik obligor pada saat ini maupun di masa mendatang;
- sehubungan dengan periode penilaian (setiap enam bulan), nilai pasar dari Designated Off-Take Agreement (setiap perjanjian ekspor awal dan setiap perjanjian ekspor lainnya yang dari waktu ke waktu dibentuk oleh peminjam) tidak boleh kurang dari 110% dari jumlah hutang berjalan (bunga ditambah dengan pokok cicilan) pada periode penilaian;
- Selalu menjaga agar nilai pasar dari Designated Off-Take Agreement tidak kurang dari 110% dari jumlah komitmen ditambah dengan jumlah pokok pinjaman dan jumlah debt service coverage;

- Collateral Agent fees of approximately US\$15,000 annually; and
- Guarantee fee to the guarantor of 1.5% per annum on the outstanding loan amount; and

The SEFA facility is subject to certain covenants, among others:

- to furnish the facility agent within 180 days and 90 days from the end of each fiscal year and period, respectively, with PT Vale's audited financial statements with an unqualified opinion and the unaudited quarterly financial statements;
- proceeds of the loan will be used solely to finance the construction, development and operation of the Karebbe project;
- ensure pari passu ranking for all other present and future senior unsecured and unsubordinated indebtedness of the obligor;
- with respect to the measurement period (six months basis), the market value of the Designated Off-Take Agreement (each of the initial export agreements and each other export agreement from time-to-time designated by the borrower under the facility) will not be less than 110% of the debt service amount (interest plus principal installment) with respect to the measurement period;
- at all times the market value of the Designated Off-Take Agreement will not be less than 110% of the then sum of the commitments plus the outstanding principal amount of the loans outstanding and the debt service coverage amount;

- Peminjam akan menginstruksikan kepada JP Morgan Chase Bank, N.A. untuk mentransfer cicilan sebagai berikut:
 - Periode bulan kalender pertama bunga 20%
 - Periode bulan kalender kedua bunga 40%
 - Periode bulan kalender ketiga bunga 60%
 - Periode bulan kalender keempat bunga 80%; dan
 - Periode bulan kalender kelima bunga 100%
- peminjam tidak akan memberikan hak atas penjaminan asetnya kepada Pemberi Pinjaman lain selain dari Pemberi Pinjaman yang disebutkan dalam Perjanjian Penjaminan;
- peminjam dan Penjamin, tanpa izin dari Pemberi Pinjaman, tidak akan mengkonsolidasikan atau melakukan penggabungan usaha dengan perusahaan lain atau memindahkan keseluruhan atau bagian signifikan asetnya kepada pihak lain;
- tidak diperbolehkan menghapus aset yang berkaitan dengan proyek Karebbe tanpa persetujuan terlebih dahulu;
- Pemberi Jaminan akan menjaga agar, pada setiap pemeriksaan keuangan akhir periode Pemberi Jaminan, yaitu pada hari terakhir setiap semester fiskal, selalu memenuhi persyaratan keuangan berikut:
 - a. Rasio Hutang terhadap EBITDA yang telah disesuaikan tidak lebih dari 4.5:1.0; dan
 - b. Rasio EBITDA yang telah disesuaikan terhadap biaya bunga tidak kurang dari 2.0:1.0. Kejadian wanprestasi akan timbul apabila: tidak membayar pokok pinjaman, tidak membayar biaya jasa atau bunga, gagal memenuhi persyaratan perjanjian, dan bangkrut atau tidak solven.

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

- the borrower will instruct JP Morgan Chase Bank, N.A. to transfer the installment portion as follows:
 - in the first calendar month of the interest period 20%;
 - in the second calendar month of the interest period 40%;
 - in the third calendar month of the interest period 60%;
 - in the fourth calendar month of the interest period 80%;
 - in the fifth calendar month of the interest period 100%;
- the borrower will not create or permit to exist any lien on any collateral, except for the lien created by the Security Agreement;
- no obligor will, without the consent of the lenders, consolidate with or merge into any other corporation or convey or transfer all or substantially all of its assets to any other person;
- no disposal of assets related to the Karebbe project without prior consent;
- the guarantor will maintain, for each financial test period ending on the last day of each fiscal semester of the Guarantor, the following financial covenants:
 - a. Debt-to-Adjusted EBITDA ratio of not more than 4.5:1.0;
 - b. and Adjusted EBITDA-to-Interest Expense ratio of not less than 2.0:1.0. An event of default will be triggered under the following circumstances: non-payment of principal, non-payment of fee or interest, failure to perform any covenant, involuntary proceedings and bankruptcy or insolvency.

Pembahasan dan analisa manajemen Management's discussion & analysis

KEBIJAKAN DIVIDEN DAN RASIO PEMBAYARAN DEVIDEN

Kebijakan dividen PT Vale didasarkan pada dana tunai yang tersedia, sampai pada jumlah saldo laba ditahan, setelah penyisihan yang berhati-hati untuk modal kerja, keperluan pembayaran hutang dan belanja barang modal. Kebijakan ini adalah bagian dari komitmen Perseroan untuk memberi hasil yang optimal bagi pemegang saham.

DIVIDEND POLICY AND DIVIDEND PAYOUT RATIO

PT Vale's policy is to make dividend payments based on available cash, up to the amount of retained earnings, after prudently making provision for working capital, debt service requirements and capital expenditures. This policy is part of the Company's commitment to provide optimum shareholder returns.

Rasio-rasio dividen (dalam %) Dividend Ratios (in%)	2013	2012
Pembayaran Dividen (Dividen dibayar/laba tahun berjalan dana untuk dividen) Dividend payout (Dividend payment/profit for the year)	128%	164%
Hasil Dividen (Dividen per saham/harga saham) Dividend yield (Dividend per share/share price)	2%	5%
Rasio Analisa Pasar Modal Capital market analysis ratios		
Harga pasar pada penutupan 31 Desember Market price at close of 31 December	2,650	2,350
Kapitalisasi pasar (AS\$ juta) Market capitalization (US\$ million)	2,159	2,377
Nilai Perseroan (AS\$ juta) Enterprise value (US\$ million)	2,178	2,461
Harga terhadap nilai buku (Harga pasar pada penutupan/(Total ekuitas/saham yang beredar) Price to book value (Market price at close/(total equity/shares outstanding))	1.26	1.38
Rasio harga terhadap laba (Harga pasar pada penutupan/laba per satuan) Price to earning ratio (Market price at close 31 December/earnings per share)	56	35

Rasio pembayaran dividen menurun dari sebesar 164% pada tahun 2012 menjadi 128% pada tahun 2013 yield dividen juga mengalami kecenderungan yang serupa. Penurunan pada kapitalisasi pasar terutama diakibatkan oleh melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Hal ini berdampak lebih jauh pada nilai perusahaan, rasio harga terhadap nilai buku menurun.

Pada bulan November 2013, Dewan Komisaris menyetujui pembagian dividen interim untuk tahun 2013 sebesar AS\$0,00252 per saham. Sedangkan

The dividend payout ratio decreased from 164% in 2012 to 128% in year 2013 the dividend yield. The decrease in market capitalization was mainly the result of the weakening of Indonesian Rupiah against U.S. dollar. This was further caused the enterprise value and price to book value to decrease.

In November, 2013, the Board of Commissioners approved an interim dividend distribution for 2013 of US\$0.00252 per share. While distribution of final

Pembahasan dan analisa manajemen Management's discussion & analysis



pembagian dividen final menunggu keputusan para pemegang saham pada RUPST yang direncanakan pada 1 April 2014.

dividend shall wait for approval from shareholders in the AGMS planned on April 1, 2014.

	2013	2012	2011	2010	2009
Laba bersih (AS\$ juta) Profit for the year (US\$ million)	39	67	334	437	170
Dividen yang diumumkan dari laba tahunan (AS\$ juta) Dividends declared from annual earnings (US\$ million)	25	50	185	344	110
Dividen yang diumumkan dari laba tahunan (AS\$/saham) Dividends declared from annual earnings (US\$/share)	0.0025	0.0025	0.0186	0.0346	0.0111
Total pembayaran dividen tunai dalam setahun (AS\$ juta) Total cash dividends paid out in a year (US\$ million)	50	110	243	339	110

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

Konflik kepentingan dan transaksi dengan pihak berelasi

Transaksi yang mengandung konflik kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung konflik kepentingan dengan pihak manapun pada tahun 2012 dan 2013.

PEMASARAN

PT Vale membayar biaya jasa bantuan manajemen dan teknis terkait dengan realisasi proyek-proyek kami, kebutuhan-kebutuhan pembiayaan kami, pembangunan dan pengoperasian fasilitas-fasilitas kami, dan pemasaran produk kami. Pemasaran produk akhir nikel kepada pelanggan, seperti pabrik-pabrik pengolahan baja nirkarat dan produsen-produsen logam campuran, dilakukan oleh tenaga penjualan VCL dan SMM. Sebagai hasilnya, kami tidak menanggung biaya pemasaran dan penjualan.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG BERELASI

Perseroan dikuasai oleh Vale Canada Limited (VCL). Induk Perseroan adalah Vale S.A. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Penjualan dan piutang usaha

Transaksi terbesar kami dengan pihak yang berelasi adalah penjualan kami, karena seluruh produksi nikel dalam matte kami terikat pada komitmen untuk dijual kepada VCL dan SMM. Pengikatan ini ditetapkan dalam perjanjian penjualan bersifat jangka panjang, "harus ambil", dalam denominasi dolar AS, yang berakhir pada tahun 2025, kecuali diperpanjang, dimodifikasi atau diperbaharui. Harga jual adalah yang lebih tinggi di antara nilai rata-rata realisasi harga bersih nikel Vale dengan nilai yang dihitung dengan formula berdasarkan harga tunai nikel di Bursa Logam London (LME). Penjualan kepada VCL adalah AS\$737,3 juta pada tahun 2013 dan AS\$773.1 juta pada tahun 2012, sementara penjualan kepada Sumitomo adalah

Conflict of interest and related party transactions

Conflict of interest transactions

There was no transaction containing a conflict of interest with any parties in 2013 and 2012.

MARKETING

PT Vale paid management service, license and royalty fees related to the realization of our projects, our financing needs, construction and operation of our facilities, and the marketing of our products. The marketing of finished nickel to customers such as stainless steel mills and alloy steel producers is carried out by VCL's and SMM's sales forces. As a result of this arrangement, we do not incur any marketing and selling expenses.

RELATED PARTY TRANSACTIONS

The Company is controlled by Vale Canada Limited (VCL). The ultimate parent company is Vale S.A. Transactions with related parties are as follows:

Revenue and trade receivables

Our largest related party transactions are our sales, as all of our nickel in matte production is committed to be sold to VCL and SMM. These arrangements are set forth in long-term, "must-take", US dollar-denominated sales agreements that end in 2025, unless extended, modified or renewed. The selling price is the greater of the value determined by a formula based on Vale's net average realized price for nickel and the value determined by a formula based on the LME cash price for nickel. Sales to VCL were US\$737.3 million in 2013 and US\$773.1 million in 2012, while our sales to SMM amounted to S\$184.4 million in 2013 and US\$194.2 million in 2012. Trade receivables outstanding from VCL and SMM on December 31, 2013 were US\$52.3 million (2012:US\$76.6

AS\$184,4 juta pada tahun 2013 dan AS\$194,2 juta pada tahun 2012. Per 31 Desember 2013, piutang usaha berjalan dari VCL dan SMM adalah masing-masing AS\$52,3 juta (2012: AS\$76,6 juta) dan AS\$13,6 juta (2012: AS\$36,1 juta).

Biaya jasa manajemen, lisensi, dan royalti

Pada tahun 2013, Perseroan kembali menegosiasi dan mengubah perjanjian bantuan manajemen dan teknis dengan Vale Group dan membahas tiga perjanjian berbeda dan terpisah: i. perjanjian jasa manajemen dengan VCL; ii. perjanjian jasa teknis dengan Vale Technology Development Limited dan iii. royalti dan perjanjian izin royalti dengan VCL. Meskipun sifat, jenis, dan cakupan kerja dari ketiga perjanjian yang telah diubah ini pada dasarnya sama dengan perjanjian sebelumnya, perjanjian kontraktual terbaru memberikan wadah yang lebih baik bagi PT Vale untuk menjaga layanan dan bantuan yang diperlukan oleh Vale Group. Jasa manajemen, bantuan teknis, ijin dan biaya royalti dikategorikan sebagai beban operasi pada pendapatan.

Dengan perjanjian manajemen dan bantuan teknis sebelumnya, biaya-biaya ini tercatat lebih rendah 1,8% dari penjualan bersih atau 4% dari laba kena pajak bersih, selama jumlah yang dibayarkan setiap triwulan tidak lebih rendah dari AS\$25.000. Berdasarkan pada perubahan tersebut, biaya jasa manajemen dan bantuan teknis dihitung dengan biaya sebenarnya, yang dikeluarkan untuk jasa yang diminta oleh PT Vale, ditambah dengan biaya jasa sebesar 10%, sedangkan biaya ijin dan royalti tercatat sebesar 0,8% dari total biaya penjualan.

Biaya jasa yang dibayarkan pada tahun 2013 dan 2012 adalah AS\$8,8 juta dan AS\$4,7 juta, yang merupakan 67% dan 37% dari total beban operasi pada tahun 2012 dan 2011.

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

million) and US\$13.6 million (2012: US\$36.1 million), respectively.

Management service, license and royalty fees

In 2013, the Company re-negotiated and amended the management and technical assistance agreements with the Vale Group, entering into three distinct and separate agreements: i. a management service agreement with VCL; ii. a technical services agreement with Vale Technology Development Limited and iii. a royalty and licensing royalty agreement with VCL. Although the nature, type and scope of work of these three revised agreements is substantially similar to the prior agreements, the revised contractual arrangements provides for a better platform for PT Vale to secure required support and services from the Vale Group. The management services, technical services and royalty & license fees are classified as operating expense in the profit or loss.

Under the prior management and technical assistance agreement, the fees were calculated as the lower of 1.8% of sales or 4% of net taxable income, provided that the amount payable for each quarter is not less than US\$25,000. Under the new arrangements, the management service and technical service fee is calculated at actual cost incurred for services requested by PT Vale plus a service fee of 10% of those costs, and the royalty and license fee is calculated at 0.8% of sales.

The fees incurred in 2013 and 2012 were US\$8.8 million and US\$4.7 million respectively, which represented 67% and 37% of total operating expenses in 2013 and 2012.

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis



Biaya lainnya

Biaya jasa dibayarkan kepada Vale Europe Limited untuk tagihan asuransi global (2013: AS\$0,04 juta dibandingkan 2012: AS\$0,4 juta) dan Vale Japan Limited untuk nickel bag (2012: AS\$0,08 juta dibandingkan 2012: AS\$0,9 juta). Biaya jasa juga dibayarkan kepada Vale Technology Development (Canada) Limited untuk melakukan studi terhadap proyek-proyek besar PT Vale (2013: AS\$0,9 juta dibandingkan 2012: AS\$4,2 juta) yang merupakan 2,36% dan 10,85% dari total biaya pengembangan proyek masing-masing untuk tahun 2013 dan 2012.

Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi

Gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris dan Direksi adalah AS\$3,0 juta pada tahun 2013, dan AS\$4,2 juta pada tahun 2012, yang merupakan 3% dan 4% dari total biaya karyawan masing-masing untuk tahun 2013 dan 2012.

Opsi setara saham

Perseroan juga memberi opsi kepada karyawan-karyawan penting berkebangsaan Indonesia untuk membeli "opsi setara saham" Perseroan dengan harga yang telah ditentukan terlebih dahulu. "Opsi setara saham" mempunyai nilai yang sama dengan saham biasa Perseroan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Eksekusi opsi ini biasanya dilakukan secara tunai. Opsi yang dieksekusi dicatat sebagai biaya karyawan. Opsi yang dieksekusi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012 adalah nihil. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, biaya kompensasi setara saham adalah nol.

Pada tanggal 31 Desember 2013 terdapat opsi yang belum dilaksanakan dengan jumlah agregat 1,886,400 setara saham (31 Desember 2011: 2.030.800 setara saham) dengan harga yang ditentukan terlebih dahulu, berkisar antara IDR1.804 sampai dengan IDR7.350

Other costs

Fees are paid to Vale Europe Limited for the global insurance charges (2013: US\$ 0.04 million compared to 2012: US\$0.4 million) and Vale Japan Limited for the nickel bag (2013: US\$0.08 million compared to 2012: US\$0.9 million). Fees are also paid to Vale Technology Development (Canada) Limited for the studies of the PT Vale's major projects (2013: US\$0.9 million compared to 2012: US\$4.2 million) which represent 2.36% and 10.85% of total project development costs for year 2013 and 2012 respectively.

Salaries and allowances of the Boards of Commissioners and Directors

Salaries and allowances of the Boards of Commissioners and Directors were US\$3.0 million in 2013, and US\$4.2 million in 2012, representing 3% and 4% of total employee costs in 2013 and 2012 respectively.

Share option equivalents

The Company has also awarded key Indonesian employees and directors options to purchase "share option equivalents" of the Company at a predetermined exercise price. A "share option equivalent" has the same value as a common share of the Company traded on the Indonesia Stock Exchange. The exercise / expiration of such options are usually settled in cash. Options exercised are included in compensation expense. Options exercised for the years ended December 31, 2013 and 2012 were nil. For the year ended December 31, 2013 and 2012, share equivalent compensation cost were nil.

As at December 31, 2013, there were outstanding options to purchase an aggregate of 1,886,400 share equivalents (December 31, 2011: 2,030,800 share equivalents) with predetermined prices ranging from IDR1,804 to IDR7,350 in full amount (December 31,

dalam nilai penuh (31 Desember 2011: antara IDR1.804 sampai dengan IDR7.350). Pada tanggal 31 Desember 2013, kewajiban Perseroan sehubungan dengan imbalan ini berjumlah AS\$15.000 ribu (31 Desember 2012: AS\$14.000 ribu).

Pinjaman kepada karyawan penting

Jumlah pinjaman yang diberikan PT Vale kepada karyawan-karyawan penting per 31 Desember 2012 adalah sebesar AS\$0,4 juta.

Hutang usaha

Kami membayarkan kembali kepada afiliasi kami di luar negeri biaya-biaya tertentu yang ditanggung dalam memberikan jasa atau bertindak atas nama PT Vale. Jumlah hutang usaha terkait dengan transaksi ini per 31 Desember 2013 adalah AS\$11,2 juta dan pada 31 Desember 2012 adalah AS\$10,9 juta.

Biaya jaminan yang masih harus dibayar

Sehubungan dengan pinjaman SEFA, PT Vale dan Vale S.A., entitas induk usaha PT Vale, menandatangani perjanjian jaminan pinjaman, yaitu Vale S.A. setuju untuk menjamin fasilitas pinjaman sebesar AS\$300,0 juta yang diperoleh Perseroan. Biaya jasa penjaminan sebesar 1,5% per tahun dari setiap penarikan pinjaman yang dilakukan PT Vale berdasarkan pinjaman SEFA wajib dibayarkan kepada Vale S.A. pada setiap tanggal pembayaran bunga (tanggal pembayaran bunga pertama adalah hari kerja terakhir pada bulan Februari 2010, dan selanjutnya hari kerja terakhir setiap bulan Agustus dan Februari). Biaya jaminan yang masih harus dibayar per 31 Desember 2013 adalah AS\$1,2 juta dan pada 2012 adalah AS\$1,3 juta.

Dampak perubahan harga terhadap pendapatan, laba kotor dan pendapatan sebelum pajak

Penurunan dari rata-rata harga realisasi dari AS\$13.552 per ton pada tahun 2012 menjadi AS\$11.939 per ton pada tahun 2013 berdampak secara signifikan terhadap

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

2011: from IDR 1,804 to IDR7,350). As at December 31, 2013, the Company's obligation relating to this benefit was US\$15 thousand (December 31, 2012: US\$14 thousand).

Loans to key employees

PT Vale's outstanding loans to key employees on December 31, 2013 were \$0.4 million.

Trade payables

We reimburse our other overseas affiliated companies for certain expenditures incurred in providing services or acting on behalf of PT Vale. Outstanding trade payables related to these transactions on December 31, 2013 were US\$11.2 million and on December 31, 2012 were US\$10.9 million.

Accrued guarantee fee

In connection with the SEFA loan, PT Vale and Vale S.A., the ultimate parent entity of PT Vale, entered into a loan guarantee agreement whereby Vale S.A. has agreed to guarantee a US\$300.0 million debt facility obtained by the Company. A guarantee fee of 1.5% per annum on each loan drawdown made by PT Vale under the SEFA is payable to Vale S.A. by PT Vale on each interest payment date (the first interest payment date was the last business day in February 2010, and thereafter, the last business day of each August and February). Accrued guarantee fees at December 31, 2013 were US\$1.2 million and 2012 were US\$1.3 million.

Impact of price changes on company's revenue, gross profit and earnings before tax

The decreased average realized price from US\$13,552 per ton in 2012 to US\$11,939 per ton in 2013 significantly impacted the company's revenue, gross

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

pendapatan, laba kotor dan penghasilan sebelum pajak Perseroan. Perseroan telah meningkatkan produksinya dari 70.717 ton pada tahun 2012 menjadi 75.802 ton pada 2013, serta meningkatkan pengiriman nikel dalam matte dari 71.379 ton menjadi 77.198 ton untuk mengurangi dampak negatif dari penurunan harga realisasi rata-rata pada tahun 2013.

IKATAN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING YANG SIGNIFIKAN

Ikatan dan perjanjian-perjanjian penting dibahas pada catatan nomor 30 di bagian Laporan Keuangan.

KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA PADA TAHUN 2013

Kejadian setelah tanggal neraca dibahas pada catatan nomor 36 j pada bagian Laporan Keuangan.

Informasi dan fakta material setelah tanggal laporan akuntan

Tidak terdapat informasi dan fakta material setelah tanggal pelaporan akuntan yang teridentifikasi.

Perubahan kebijakan akuntansi dan dampaknya terhadap laporan keuangan

Berikut ini adalah amandemen terhadap standar yang diterapkan PT Vale untuk pertama kali pada tahun keuangan yang dimulai 1 Januari 2013:

- Perubahan tahunan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 60 – Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

Peningkatan standar ini terutama berkaitan dengan pengungkapan aset keuangan, termasuk penghapusan beberapa pengungkapan yang disyaratkan sebelumnya.

profit and earnings before tax. The Company has increased its production from 70,717 ton in 2012 to 75,802 ton in 2013 and also increase its nickel in matte deliveries from 71,379 ton to 77,198 ton to reduce the negative impact of decreased average realized price in 2013.

SIGNIFICANT COMMITMENTS AND AGREEMENTS

Significant commitment and contingencies is discussed in the notes number 30 in the Financial Statements.

SUBSEQUENT EVENTS IN 2013

Subsequent events is discussed in the notes number 36 j. in the Financial Statements.

Materials information and facts subsequent to the accountant's report date

There was no materials information and facts subsequent to the accountant's report date identified.

Changes to accounting policies and its impact to financial statements

New and amended standards adopted by the Company that are mandatory for the first time for the financial year beginning on January 1, 2013.

- Annual improvement of Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") No. 60 - Financial Instruments: Disclosures.

The improvement of this standard mainly relates to the disclosure of financial assets, including the removal of some previously required disclosures.

PANDANGAN TAHUN 2014

Pada tahun 2014, PT Vale terus memberdayakan kapasitas peleburannya yang meningkat dan proses optimalisasi dan berencana untuk meningkatkan produksi nikel dalam matte sebesar 5% atau sekitar 79.600 ton. Perseroan akan tetap fokus pada langkah penghematan biaya untuk menjaga daya saingnya dalam jangka panjang tanpa mempertaruhkan nilai utama Perseroan: kehidupan adalah yang terpenting.

Perseroan berupaya untuk membidik perolehan keuntungan dari efisiensi operasional di pabrik peleburan Sorowako serta implementasi tahap pertama dari Proyek Konversi Batubara pada tahun 2014. Tujuan utama dari proyek tersebut adalah mengkonversi sumber energi utama dari HSFO ke batubara dan meningkatkan infrastruktur penanganan material *bulk commodities* Perseroan.

PT Vale terus menelaah berbagai peluang untuk pertumbuhan, efisiensi, penurunan biaya dan kesejahteraan lingkungan yang selaras dengan strategi kami untuk mengembangkan usaha produksi nikel Perseroan. Inisiatif utama yang tengah kami tinjau adalah penambahan lini produksi ke-5 di Sorowako, berbagai peluang di sekitar pabrik pengolahan nikel Bahodopi dan infrastruktur di dalamnya, termasuk pengembangan tambang Bahodopi, serta penelitian rencana penambangan strategis untuk mengoptimalkan pasokan peleburan di Sorowako. Hal ini termasuk kegiatan eksplorasi dan pengeboran.

Pembahasan dan analisa manajemen

Management's discussion & analysis

2014 OUTLOOK

In 2014, PT Vale continues to leverage its enhanced smelting capacity and process optimization and plans to produce 5% more nickel in matte or around 79,600 tons. The Company will remain focused on its cost savings initiatives to sustain long-term competitiveness without compromising our foremost value: life matters most.

The Company plan to capture gains in operational efficiency at our Sorowako smelter, as well as to benefit fully from the first phase of the Coal Conversion Project in 2014, the main objectives of which were to convert the primary energy source in our dryers from HSFO to coal and upgrade our existing bulk commodity material handling infrastructure.

PT Vale continues to study various opportunities for growth, efficiency, cost reduction and environmental improvement, consistent with our strategy to grow our nickel business. The major initiatives being evaluated include the addition of a 5th line at Sorowako, opportunities around Bahodopi nickel processing plant and infrastructure, including Bahodopi mine development, growth mining plan studies to optimize the feed to the Sorowako smelter, including exploration and drilling activities.

Pembahasan dan analisa manajemen Management's discussion & analysis

Cadangan Mineral Nikel Terbukti dan Terduga

Setiap tahun, kami memberikan perkiraan Cadangan Mineral Terduga dan Terbukti serta data terkait untuk areal dalam Kontrak Karya kami. Perkiraan ini sangat penting untuk menunjang bisnis kami karena perkiraan ini dapat memberi gambaran mengenai penelitian investasi dan perencanaan pengembangan operasional kami.

Tabel dan catatan di bawah menunjukkan perkiraan kami terhadap Cadangan Mineral Terduga dan Terbukti serta data terkait terhitung tanggal 31 Desember tahun 2012 dan 2013. Informasi yang tertera dalam tabel dan catatan di bawah dapat mencakup perbedaan karena pembulatan, sehingga menjadi tidak konsisten dengan beberapa angka yang dibahas sebelumnya.

Cadangan Bijih (dalam juta ton) Mineral Reserves (in million metric tons (Mt))	Per 31 Desember 2013 As of Dec.31, 2013		Per 31 Desember 2012 As of Dec.31, 2012	
	Mt	% grade	Mt	% grade
Terbukti Proven	94.2	1.81	65.8	1.84
Terduga Probable	33.3	1.74	39.1	1.70
Total Terduga dan Terbukti Total Proven and Probable	127.5	1.79	104.9	1.78

CATATAN:

- (1) Vale Base Metals mengadopsi Instrumen Nasional 43-101 (NI 43-101) sebagai standar untuk memperkirakan dan melaporkan sumber daya dan cadangan mineral. Standar NI 43-101 adalah yang berlaku umum di pasar internasional. NI 43-101, sesuai dengan Definisi Standar Canadian Institute of Mining, memberikan klasifikasi perkiraan sumber daya dan cadangan mineral dalam berbagai kategori.

PT Vale Indonesia Tbk, sebagai salah satu unit usah Vale Base Metal, wajib mengikuti aturan standar CIM dalam pelaporan sumber daya dan cadangan mineralnya.

Proven and Probable Nickel Mineral Reserves

Every year, we provide our estimates of Proven and Probable Nickel Mineral Reserves and related data for our CoW area. These estimates are critical to our business, as they inform our investment, research and development, and operations planning.

The following table and notes show our estimates of Proven and Probable Nickel Mineral Reserves and related data as of December 31, 2013 and 2012. The reporting shown in the table and notes reflect rounding differences and, accordingly, may be inconsistent.

NOTES:

- (1) Vale Base Metals adopted National Instrument 43-101 (NI 43-101) as its standard for estimating and reporting mineral resources and mineral reserves. NI 43-101 is internationally accepted by markets. NI 43-101, in accordance with Canadian Institute of Mining (CIM) Definition Standards, provides classification of mineral resources and mineral reserves estimates into various categories.

PT Vale Indonesia Tbk, as one of Vale Base Metal business units, must be consistent in its use of CIM standards to report its mineral resources and mineral reserves.

Pembahasan dan analisa manajemen Management's discussion & analysis

Cadangan mineral diartikan sebagai bagian dari endapan mineral yang secara ekonomis dan sah diekstraksi atau diproduksi pada saat cadangan ditentukan. Endapan tidak dapat didefinisikan sebagai "diekstraksi secara ekonomis dan sah" jika tidak didukung dengan studi kelayakan akhir.

- (2) Perseroan, sesuai dengan NI 43-101, menyatakan terdapat dua kategori cadangan mineral dalam pengungkapan informasinya pada publik: cadangan mineral terbukti dan cadangan mineral terduga.

CIM mengartikan cadangan mineral terduga sebagai bagian dari sumber daya terduga yang dilihat secara ekonomi dapat ditambang, didukung oleh paling tidak studi kelayakan awal. Studi ini harus mencakup informasi yang memadai terkait penambangan, pengolahan, unsur metalurgi, ekonomi, dan faktor-faktor relevan lainnya yang menunjukkan bahwa pada saat pelaporan, ekstraksi ekonomi tersebut dapat dibuktikan kebenarannya.

Cadangan mineral terbukti merupakan bagian dari cadangan mineral terukur yang secara ekonomi dapat ditambang, didukung oleh paling tidak studi kelayakan awal. Studi ini harus mencakup informasi yang memadai terkait penambangan, pengolahan, unsur metalurgi, ekonomi, dan faktor-faktor relevan lainnya yang menunjukkan bahwa pada saat pelaporan, ekstraksi ekonomi tersebut dapat dibuktikan kebenarannya.

Vale Base Metal membentuk beberapa tahap pertanggungjawaban dalam mendokumentasikan informasi yang mendukung perkiraan mengenai sumber daya dan cadangan mineral. Perkiraan cadangan mineral dan cadangan sumber daya dibuat dan disertifikasi oleh Operational Responsible Persons (RPs) dan selanjutnya ditinjau ulang oleh Vale Corporate Qualified Persons (QPs)

Berdasarkan Pedoman Vale Base Metal, pengumuman cadangan mineral wajib menyertai dukungan minimal dari:

- Rencana penambangan dan Laporan Teknis tahunan atau laporan teknis dan berkas-berkas pendukung untuk kegiatan mineralisasi yang akan dieksploitasi melalui infrastruktur tambang saat ini (biasanya didanai dari biaya operasi atau modal berkelanjutan);
- Studi Kelayakan Awal (atau setara dengannya) untuk area mineralisasi brownfield yang baru, yang terjadi di luar namun masih di dalam akses yang memadai dan menggunakan infrastruktur saat ini (konstruksi biasanya didanai dari modal proyek yang telah khusus dianggarkan); atau

Mineral reserves is defined as part of mineral deposit which could be economically and legally extracted or produced at the time of the reserve determination. A deposit cannot be designated as "economically and legally extracted" unless supported by final feasibility study.

- (2) The Company, in accordance with NI 43-101, recognizes two mineral reserves categories in its public disclosure: proven mineral reserves and probable mineral reserves.

CIM defines probable mineral reserve as the economically mineable part of an indicated resource demonstrated by at least a preliminary feasibility study. This study must include adequate information on mining, processing, metallurgical, economic, and other relevant factors that demonstrate, at the time of reporting, that economic extraction can be justified.

Proven mineral reserve is the economically mineable part of a measured mineral resource demonstrated by at least a preliminary feasibility study. This study must include adequate information on mining, processing, metallurgical, economic, and other relevant factors that demonstrate, at the time of reporting, that economic extraction is justified.

Vale Base Metal establishes layered responsibility for documenting the information supporting the mineral resources and mineral reserves estimates. Mineral resources and mineral reserves estimates are prepared and certified by Operational Responsible Persons (RPs) and are subsequently reviewed by the Vale Corporate Qualified Persons (QPs).

Based on Vale Base Metal Guidelines, a mineral reserve declaration must be supported by at least:

- A mine plan and an annual Technical Report or technical statement and supporting files for mineralization that is to be exploited from existing mine infrastructure (typically funded with operating costs or sustaining capital);
- A Preliminary Feasibility Study (or equivalent) for new brownfields area mineralization occurring beyond but within reasonable access of and using existing infrastructure (construction typically funded using dedicated project capital); or

Pembahasan dan analisa manajemen Management's discussion & analysis

- Studi Kelayakan (atau setara dengannya) untuk kegiatan mineralisasi baru di area greenfield yang masih memerlukan penambahan infrastruktur, termasuk pembangunan fasilitas baru untuk pengolahan mineral.
- (3) Indonesia Growth Project PT Vale Tahap 1 telah lulus studi kelayakan awal. Oleh karena itu, skenario produksi Tahap 1 digunakan sebagai dasar untuk melaporkan cadangan mineral. Tahap 1 proyek ini termasuk:
- Lini produksi tanur listrik ke-5 di Area Proyek di Soroako
 - Pabrik pemurnian Bahodopi
 - Infrastruktur Bahodopi
- Area tambang yang dilaporkan mengandung cadangan mineral adalah di Blok Barat Sorowako, Blok Timur Sorowako, Petea, Blok 1 Bahodopi, Lantoa Utara dan Lantoa Selatan. Area-area ini diproyeksikan akan menjadi pusat kegiatan pertambangan pada 2014 hingga 2035.
- (4) Evaluasi keuangan dilakukan untuk mengevaluasi nilai ekonomi dari cadangan mineral. Seluruh biaya, termasuk biaya produksi, penjualan dan modal, diperhitungkan di dalam evaluasi kinerja. Perkiraan terhadap harga nikel, nilai tukar asing, dan tingkat diskon akan diberikan oleh Vale S.A.
- (5) Perkiraan cadangan mineral dilaporkan atas dasar kepemilikan 100%.
- Perubahan cadangan mineral dari tahun 2012 ke 2013 terutama mencerminkan deplesi tambang dari Blok 1 Bahodopi, Lantoa Utara, dan Lantoa Selatan.
- Total cadangan mineral terbukti dan terduga di Kegiatan Operasi Sorowako telah meningkat sekitar 22,7 Mt (DKP/dmt) dari tahun 2012:
- Pengurangan sebesar 4,67 Mt akibat deplesi produksi tambang.
 - Pengurangan sebesar 6,26 Mt akibat model blok baru
 - Pengurangan sebesar 0,41 Mt akibat rancang ulang lubang tambang
 - Penambahan sebesar 10,73 Mt akibat konversi cadangan mineral ke sumber daya mineral
 - Pengurangan sebesar 0,57 Mt akibat sterilisasi karena penghapusan
 - Peningkatan sebesar 23,7 Mt akibat cadangan mineral baru dari Blok 1 Bahodopi, Lantoa Utara, Lantoa Selatan dan Petea C01
 - Peningkatan sebesar 0,16 Mt akibat hal lain
- A Feasibility Study (or equivalent) for new mineralization in a greenfields area that requires additional new standalone infrastructure which may also include the construction of new mineral processing facilities.
- (3) PT Vale's Indonesia Growth Project Phase 1 has passed preliminary feasibility study, therefore the Phase 1 production scenario is used as baseline to report mineral reserves. This Phase 1 Growth projects include:
- New 5th line Furnace in Soroako Project Area
 - Bahodopi Refinery
 - Bahodopi Infrastructure
- Mining areas reported as reserve are Sorowako West Block, Sorowako East Block, Petea, Bahodopi Block 1, Lantoa North and Lantoa South. These areas are projected in life of mine 2014 to 2035.
- (4) Financial evaluation is performed to evaluate mineral reserve economic value. All costs, including production, sales and capital costs, are considered in financial evaluation. Forecast of nickel price, foreign exchange rate and discount rate is provided by Vale S.A.
- (5) Mineral reserves estimates are reported as if 100% ownership.
- The changes in mineral reserves from 2012 to 2013 are largely the result of additional mineral reserves from Bahodopi Block 1, Lantoa North and Lantoa South.
- Total proven and probable mineral reserves at the Sorowako Operation have increased by about 22.7 Mt (DKP/dmt) from 2012:
- Decrease of 4.67 Mt due to mining production depletion
 - Decrease of 6.26 Mt due to new block model
 - Decrease of 0.41 Mt due to pit redesign
 - Increase of 10.73 Mt due to conversion of mineral resources to mineral reserves
 - Decrease 0.57 Mt due to sterilized from disposal
 - Increase 23.7 Mt due to new mineral reserves from Bahodopi Block 1, Lantoa North, Lantoa South and Petea C01
 - Increase of 0.16 Mt due to others

Pembahasan dan analisa manajemen Management's discussion & analysis

Kesimpulan

Pemberlakuan undang-undang baru Indonesia yang melarang kegiatan ekspor bijih belum terolah akan berdampak pada produksi nikel pig-iron dan ferronikel di Cina pada tahun-tahun mendatang, dan dapat membantu mengatur tingkat persediaan. Oleh karena itu, kami berharap bahwa pelarangan ini tidak serta-merta langsung berdampak pada pasar global. Dalam jangka waktu yang lebih panjang, kami tetap optimis bahwa prospek nikel akan tetap baik, begitu juga dengan pertumbuhan permintaan.

Manajemen PT Vale yakin bahwa Perseroan telah berada di jalur yang tepat dalam melaksanakan strateginya untuk menjamin pertumbuhan menguntungkan dalam jangka panjang dengan memaksimalkan produksi melalui keunggulan operasi.

In summary

The implementation of the Indonesian law restricting the export of unprocessed ores will impact Chinese nickel pig iron and ferro-nickel production in coming years, and may help to regulate inventory levels. However, we do not expect to see any sudden effects from the ban on the global market. Longer-term, we remain positive on the outlook for nickel and continued demand growth.

The management of PT Vale believes that the Company is on track to execute its strategy to ensure long-term profitable growth by maximizing production through operational excellence.





TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate governance



Tata kelola perusahaan

Corporate governance

Komitmen kami terhadap tata kelola perusahaan

Praktik tata kelola perusahaan yang baik merupakan landasan ekonomi pasar yang penting untuk meneguhkan dan meningkatkan kepercayaan para investor, baik dalam perusahaan-perusahaan yang terkelola dengan baik maupun lingkungan bisnis. Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik akan mendorong persaingan yang sehat dan kondisi bisnis yang kondusif, sehingga pertumbuhan dan kestabilan ekonomi yang berkelanjutan dapat tercapai. Praktik tata kelola perusahaan yang baik merupakan dasar dari komitmen Perseroan terhadap para pemangku kepentingan, sekaligus esensial bagi keberlanjutan aktivitas operasi kami. Keberadaan kebijakan serta praktik tata kelola perusahaan dan operasional mendukung komitmen kami untuk melakukan hal yang benar, dengan memberikan kerangka bagi pelaksanaan keterbukaan, integritas, kepercayaan dan kepatuhan dalam setiap aktivitas kami.

Para pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi berperan penting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang efektif. Setiap organ menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban masing-masing sesuai dengan prinsip dan kepentingan PT Vale.

Rapat Umum Pemegang Saham berperan dalam membantu para pemegang saham dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang terkait dengan investasi mereka di PT Vale melalui Anggaran Dasar (AD) Perseroan serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris dan Direksi bertugas mengawasi jalannya organisasi dan berkomitmen untuk mengembangkan dan menerapkan praktik tata kelola

Our commitment to corporate governance

Good corporate governance is an important pillar of the market economy because it affirms and promotes investors' confidence, both in well-governed companies and the overall business environment. Implementation of good corporate governance encourages fair competition and a conducive business climate leading to sustainable economic growth and stability. Good corporate governance has always been the cornerstone of our commitment to our stakeholders and fundamental in sustaining our operations. Our corporate and operational governance policies and practices support our commitment to do what is right. They establish a framework for transparency, accountability, responsibility, integrity, trust and compliance in everything we do.

Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors have important roles in implementing good corporate governance effectively. Each group acts according to the principle that they independently carry out their duties, functions and responsibilities in the best interests of PT Vale.

A General Meeting of Shareholders facilitates shareholders in making important decisions regarding their investment in PT Vale through PT Vale's Articles of Association (AoA) and the prevailing laws and regulations. The Board of Commissioners and the Board of Directors provide organizational oversight and are committed to designing and implementing corporate governance practices through an effective and efficient

perusahaan melalui pengendalian internal yang efektif dan efisien serta ketentuan-ketentuan manajemen risiko. Hal ini dilakukan agar Dewan Komisaris dan Direksi dapat memastikan bahwa Perseroan dikelola sesuai standar integritas tertinggi sehingga kami dapat memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dalam jangka panjang serta membantu mensejahterakan masyarakat di wilayah operasi kami.

Kebijakan dan praktik tata kelola

Perangkat kebijakan tata kelola PT Vale dirancang untuk memberikan suatu struktur yang kokoh sehingga Dewan Komisaris dan Direksi dapat secara efektif mengkaji dan mengevaluasi operasional bisnis Perseroan, guna memastikan tercapainya sasaran-sasaran strategis Perseroan maupun kesesuaian dengan standar praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan terbaik.

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan kebijakan tata kelola perusahaan serta bertanggung jawab untuk mempertahankan fokus Perseroan pada keberlanjutan jangka panjang. Dengan adanya tujuan ini, Dewan Komisaris dan Direksi bekerja sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham

Sesuai dengan ketentuan AD Perseroan serta berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham digolongkan menjadi dua jenis, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

internal control and risk management protocol. In doing so, the Board of Commissioners and the Board of Directors ensure that PT Vale is managed with the highest standards of integrity so that we maximize long-term shareholder value and improve the communities in which we operate.

Governance policies and practices

PT Vale's corporate governance policies ensure that a strong framework is in place so the Board of Commissioners and the Board of Directors are able to effectively review and evaluate PT Vale's business operations to ensure they meet PT Vale's strategic objectives and reflect environmental and social-responsibility best practices.

The Board of Commissioners and the Board of Directors are instrumental in implementing corporate governance policies and are responsible for maintaining the Company's focus on sustainability for the long term. With this goal, the Board of Directors and the Board of Commissioners share in the Company's vision, mission and values.

General Meetings of Shareholders

As set out in the AoA, and in accordance with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, there are two types of General Meeting of Shareholders – Annual General Meetings of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meetings of Shareholders (EGMS).

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

RUPST wajib dilaksanakan satu kali dalam setahun sebelum akhir bulan Juni pada tahun yang sama, sedangkan RUPSLB dapat dilaksanakan kapan saja apabila diperlukan oleh Direksi melalui permohonan tertulis yang disampaikan oleh:

- (i) Satu atau lebih pemegang saham, baik individu maupun gabungan, yang mewakili sekurang-kurangnya 10% atau lebih dari total saham yang memiliki hak suara; atau
- (ii) Dewan Komisaris.

Selama tahun 2013, PT Vale telah mengadakan RUPST di bulan April dan hanya satu RUPSLB di bulan September.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2013 (RUPST 2013)

Hari : Selasa, 23 April 2013
Pukul : 8:30 WIB
Tempat : The Ritz Carlton Jakarta, Pacific Place Glass House, 8th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

Pengumuman RUPST 2013 dimuat pada tanggal 22 Maret 2013 di tiga surat kabar harian, Bisnis Indonesia dan Media Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan Jakarta Globe dalam bahasa Inggris, disusul dengan penerbitan undangan rapat di ketiga surat kabar tersebut pada tanggal 8 April 2013.

Berikut adalah agenda yang telah dipublikasikan untuk RUPST tahun 2013:

1. Laporan Direksi
2. Laporan Dewan Komisaris
3. Persetujuan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2012.
4. Pembagian laba Perseroan dan pertimbangan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2012.

An AGMS must be held once a year, no later than the end of June of that current year, while an EGMS can be held at any time deemed necessary by the Board of Directors, and upon written request by:

- (i) one or more shareholders, individually or jointly, representing at least 10% or more of the total shares with legal voting rights; or
- (ii) the Board of Commissioners.

During 2013, PT Vale held the AGMS in April and only one EGMS, in September.

Annual General Meeting of Shareholders 2013 (AGMS 2013)

Day/date : Tuesday, April 23, 2013
Time : 8:30 am
Venue : The Ritz Carlton Jakarta, Pacific Place Glass House, 8th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

Notice for AGMS 2013 was announced March 22, 2013, in three daily newspapers, Bisnis Indonesia and Media Indonesia in Bahasa Indonesian, and Jakarta Globe in English. Subsequently, an invitation to attend the meeting was published in the same newspapers April 8, 2013.

The published Agenda for AGMS 2013 was as follows:

1. Report of the Board of Directors
2. Report of the Board of Commissioners
3. Approval and ratification of the Company's financial statements for the year ended December 31, 2012
4. Appropriation of Company's profits and consideration of dividend for the year ended December 31, 2012

5. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris
6. Pengangkatan anggota Direksi
7. Persetujuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris
8. Persetujuan pendelegasian wewenang dari pemegang saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan remunerasi lain bagi Direksi
9. Penunjukan auditor eksternal untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2013
10. Melakukan transaksi atas usaha-usaha lain sebagaimana dilakukan sebelum pelaksanaan rapat

RUPST 2013 dihadiri oleh para pemegang saham dengan saham sebanyak 8.699.937.494 lembar maupun perwakilannya, yang mewakili 87,556% dari total saham yang diterbitkan di Perseroan dengan hak suara yang sah, sehingga memenuhi kuorum yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

RUPST 2013 dipimpin oleh Presiden Komisaris yang membuka rapat secara resmi. Perseroan menunjuk Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito selaku Notaris untuk mengelola dan mengesahkan pengambilan suara, yang mana berdasarkan AD Perseroan, tiap saham dapat memberikan satu hak suara.

Keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPST 2013 adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan Direksi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012.
2. Menerima laporan Dewan Komisaris tentang pengawasan manajemen Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012.

5. Appointment of members to the Board of Commissioners
6. Appointment of members to the Board of Directors
7. Approval of remuneration for members of the Board of Commissioners
8. Approval of delegation of authority by shareholders to the Board of Commissioners to determine the amount of the Board of Directors' salaries and other remuneration
9. Appointment of external auditors to audit the Company's financial statements for the year ended December 31, 2013
10. Transacting such other business as may properly be brought before the meeting

AGMS 2013 was attended by the holders of 8,699,937,494 shares or their proxies, which represented 87.556% of the total issued shares in the Company with valid voting rights and therefore met the quorum required by the Company's AoA.

AGMS 2013 was chaired by the President Commissioner by who called the meeting to order. The Company appointed Notary Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito to administer and validate voting. In accordance with AoA, each share entitles the holder to cast one vote.

Resolutions of AGMS 2013 were as follows:

1. Accepted the report of the Board of Directors for the year ended December 31, 2012.
2. Accepted the report of the Board of Commissioners on its supervision of the management of the Company for the year ended December 31, 2012.

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

3. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, sebagaimana tertuang dalam Laporan Auditor tanggal 22 Maret 2013, serta membebaskan dan melepaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sepenuhnya dari segala pertanggungjawaban, dan mengesahkan sepenuhnya semua tindakan yang diambil dalam rangka pengelolaan dan pengawasan Perusahaan selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan.
4. a. Menyetujui pengalokasian laba bersih Perseroan sebesar AS\$6,7 juta untuk cadangan umum; dan
b. Menyetujui dividen total sebesar AS\$0,00504 per saham untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2012 yang terdiri dari dividen interim terbayar sebesar AS\$0,00252 per saham dan dividen final sebesar AS\$0,00252 per saham yang akan dibayar pada tanggal 31 Mei 2013 untuk pemegang saham yang tercatat tanggal 17 Mei 2013.
5. Menerima pengunduran diri Conor Spollen sebagai Komisaris dan menyetujui pengangkatan Kevin Graham sebagai Komisaris, dengan masa jabatan efektif sejak ditutupnya RUPST ini hingga penutupan RUPST pada tahun 2014.
3. Approved and ratified the audited Financial Statements of the Company as at and for the year ended December 31, 2012, as set forth in the Auditors' Report dated March 22, 2013, and fully released and discharged the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners of the Company from any liabilities, and fully ratified all actions taken in the course of their management and supervision of the Company during the year ended December 31, 2012, to the extent such actions are reflected in the books of the Company.
4. a. Approved the allocation of US\$6.7 million of the Company's net profit to general reserve; and
b. Approved the total dividend for the financial year ending December 31, 2012, is US\$0.00504 per share, consisting of the interim dividend of US\$0.00252 per share already paid and the final dividend of US\$0.00252 per share which will be payable on May 31, 2013, to shareholders of record as at May 17, 2013.
5. Accepted the resignation of Conor Spollen as Commissioner and approved the appointment of Kevin Graham as Commissioner, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the AGMS in the year 2014.

Dengan demikian, susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak tanggal penutupan RUPST 2013 adalah sebagai berikut:

President Komisaris	: Ricardo Carvalho
Wakil President Komisaris dan Komisaris Independen	: Arief T. Surowidjojo
Komisaris	: Kevin Graham
Komisaris	: Harumasa Kurokawa
Komisaris	: Jennifer Maki
Komisaris	: Mikinobu Ogata
Komisaris	: Peter Poppinga

Accordingly, the composition of the Board of Commissioners of the Company, effective as of the closing date of the AGMS 2013, is as follows:

President Commissioner	: Ricardo Carvalho
Vice-President Commissioner and Independent Commissioner	: Arief T. Surowidjojo
Commissioner	: Kevin Graham
Commissioner	: Harumasa Kurokawa
Commissioner	: Jennifer Maki
Commissioner	: Mikinobu Ogata
Commissioner	: Peter Poppinga

Komisaris	: Mark Travers	Commissioner	: Mark Travers
Komisaris Independen	: Irwandy Arif	Commissioner Independent	: Irwandy Arif
Komisaris Independen	: Idrus Paturusi	Commissioner Independent	: Idrus Paturusi

6. a. Mengesahkan pengunduran diri Michael O'Sullivan sebagai Direktur dan menerima pengunduran diri Fabio Bachara sebagai Direktur.
b. Menerima penunjukan kembali Josimar Pires sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak penutupan RUPST 2013 hingga penutupan RUPST pada tahun 2015.
c. Menerima penunjukan Febriany Eddy sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak penutupan RUPST 2013 hingga penutupan RUPST pada tahun 2014.
6. a. Ratified the resignation of Michael O'Sullivan as Director and accepted the resignation of Fabio Bechara as Director.
b. Approved the re-appointment of Josimar Pires as Director of the Company, effective as of the closing of AGMS 2013 until the closing of the AGMS in the year 2015.
c. Approved the appointment of Febriany Eddy as Director of the Company, effective as of the closing of AGMS 2013 until the closing of the AGMS in the year 2014.

Susunan keanggotaan Dewan Direksi Perseroan, efektif sejak tanggal penutupan RUPST 2013, adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur	: Nico Kanter
Wakil Presiden Direktur	: Bernardus Irmanto
Direktur	: Josimar Pires
Direktur	: Febriany Eddy

The composition of the members of the Board of Directors of the Company, effective as of the closing date of AGMS 2013, is as follows:

President Director	: Nico Kanter
Vice-President Director	: Bernardus Irmanto
Director	: Josimar Pires
Director	: Febriany Eddy

7. Menyetujui jumlah remunerasi Komisaris Independen untuk tahun 2013 yang meliputi pembayaran-pembayaran sebagai berikut:
(a) Kompensasi per triwulan sebesar AS\$12.500; dan
(b) AS\$2.500 per rapat Komisaris.
7. Approved the amount of remuneration of the Independent Commissioners for 2013, which includes the following payments:
(a) US\$12,500 quarterly retainer; and
(b) US\$2,500 per meeting.
8. Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah gaji untuk anggota Dewan Direksi dan/atau remunerasi lain berdasarkan rekomendasi *Corporate Governance Committee*.
8. Approved the delegation of authority of the General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners to determine the amount of the members of the Board of Directors' salaries and/or other remuneration as recommended by the Corporate Governance Committee.
9. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC Indonesia) sebagai auditor eksternal untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk
9. Approved the re-appointment of Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC Indonesia) as external auditor to audit the Company's books for the year ending December 31,

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

tahun yang berakhir 31 Desember 2013, sepanjang auditor tersebut bekerja sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku di Indonesia.

2013, subject to such member firm being fully in compliance at the time of its engagement with all applicable Indonesian regulatory requirements.

Keterangan Domisili tersebut harus didasarkan pada Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009.

of Taxation Regulation No. PER-61/PJ/2009 dated November 5, 2009.

Keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPST 2013 diumumkan pada tanggal 24 April 2013 di tiga surat kabar harian, Bisnis Indonesia dan Media Indonesia dalam Bahasa Indonesia, dan Jakarta Globe dalam bahasa Inggris.

The resolutions adopted in AGMS 2013 were announced April 24, 2013, in three daily newspapers, Bisnis Indonesia and Media Indonesia in Bahasa Indonesian, and Jakarta Globe in English.

Surat Keterangan Domisili wajib diserahkan sebelum pukul 4:00 WIB pada tanggal 17 Mei 2013 dan akan dikenai pemotongan pajak sebesar 20% apabila melewati tenggang waktu tersebut.

The Certificate of Domicile should be submitted not later than 4:00 pm West Indonesia Time on May 17, 2013, otherwise 20% withholding tax rate will be applied.

Selain meliputi pengambilan keputusan dalam RUPST 2013, pengumuman tersebut juga meliputi tata cara pembayaran dividen sebagai berikut:

In addition to the resolutions adopted in AGMS 2013, the announcement included the dividend payment procedure, as follows:

1. Dividen bagi pemegang saham Indonesia dibayarkan dalam Rupiah yang nilainya setara dengan dividen yang dinyatakan dalam dollar AS, berdasarkan tarif kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 17 Mei 2013, sedangkan dividen bagi pemegang saham asing dibayarkan dalam dolar AS.
2. Dividen-dividen tersebut dikenakan pemotongan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Semua pemegang saham yang merupakan wajib pajak lokal wajib menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pukul 16:15 WIB pada tanggal 17 Mei 2013 dan akan dikenai pemotongan pajak sebesar 30% apabila terjadi keterlambatan penyerahan.
4. Mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008, semua pemegang saham yang merupakan penduduk negara-negara yang terikat oleh perjanjian pajak Indonesia wajib menyerahkan Surat Keterangan Domisili kepada Perseroan dari instansi berwenang di negara perjanjian untuk mendapatkan pengecualian atau pengurangan nilai pemotongan berdasarkan pasal 26. Surat

1. Dividends for Indonesian shareholders are paid in the Rupiah equivalent of the dividend declared in US Dollars, based upon the middle rate determined by the Bank of Indonesia rate on May 17, 2013. Foreign shareholders are paid in US dollars.
2. The above dividends are subject to withholding tax in accordance with the prevailing tax regulations.
3. All shareholders who are local legal entity taxpayers need to submit a Tax Identity Number. The Tax Identity Number should be submitted not later than 4:15 pm West Indonesia Time on May 17, 2013, otherwise a 30% withholding tax rate will be applied.
4. With reference to Income Tax Law No. 36/2008, all shareholders who are residents of countries with which Indonesia has a tax treaty need to supply to the Company a Certificate of Domicile from a competent authority in that treaty country in order to obtain an exemption or a reduced rate from withholding under tax article 26. The Certificate of Domicile must be based on Directorate General

Para pemegang saham yang menyimpan sertifikat saham wajib menyerahkan persyaratan-persyaratan tersebut (Surat Keterangan Domisili/NPWP) ke kantor Perseroan yang berada di Citibank Tower Lantai 22, Bapindo Plaza, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190, sedangkan pemegang saham yang memiliki akun di KSEI wajib menyerahkan persyaratan tersebut pada KSEI.

Shareholders who keep their certificates should submit the requirements (Certificate of Domicile/ NPWP) to the Company's office, Citibank Tower 22nd Floor, Bapindo Plaza, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190, and shareholders who have an account in Indonesian Central Securities Depository (KSEI) should submit the requirement to KSEI.

5. Pembayaran hanya melalui transfer bank saja. Para pemegang saham yang memiliki akun di KSEI akan menerima dividen melalui transfer ke rekening KSEI.

5. Payment by bank transfer only. Shareholders who have an account in KSEI, will receive the dividend by transfer to their participant account in KSEI.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB 2013)

Hari/tanggal	: Selasa, 24 September 2013
Pukul	: 9:00 WIB
Tempat	: Financial Club, Board Room I Graha Niaga Lantai 27, Jakarta
Agenda	: Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris
Keputusan	: Mengesahkan pengunduran diri Harumasa Kurokawa sebagai Komisaris Perseroan dan mengangkat Akira Nozaki sebagai Komisaris Perseroan, efektif sejak penutupan RUPSLB hingga penutupan RUPST pada tahun 2014.

Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS 2013)

Day/date	: Tuesday, September 24, 2013
Time	: 9:00 am
Venue	: Financial Club, Board Room I Graha Niaga 27 th Floor, Jakarta
Agenda	: Change of members of the Board of Commissioners
Resolution	: To ratify the resignation of Harumasa Kurokawa as Commissioner of the Company and to appoint Akira Nozaki as Commissioner of the Company, effective from the closing of the EGMS until the closing of the AGMS in 2014.

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

Agenda tersebut diberikan dalam pemberitahuan RUPSLB 2013 yang dipublikasikan pada tanggal 23 Agustus 2013 dalam tiga surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Media Indonesia dalam Bahasa Indonesia, dan Jakarta Globe dalam bahasa Inggris, disusul dengan penerbitan undangan rapat yang diterbitkan pada tanggal 9 September 2013 di surat kabar yang sama.

RUPSLB 2013 dihadiri oleh para pemegang saham maupun perwakilannya yang mewakili 86,14% dari jumlah saham yang diterbitkan di Perseroan dengan hak suara sah, sehingga memenuhi kuorum yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

RUPSLB dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris yang membuka rapat secara resmi.

Keputusan-keputusan yang disahkan dalam RUPSLB 2013 diterbitkan pada tanggal 25 September 2013 dalam harian berbahasa Indonesia yaitu Bisnis Indonesia dan Media Indonesia, dan Jakarta Globe dalam bahasa Inggris.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT Vale merupakan organ yang bertanggung jawab mengawasi Direksi dan manajemen Perseroan dalam pengelolaan bisnis dan pemantauan strategi Perseroan secara keseluruhan. Dewan Komisaris, baik diminta ataupun tidak oleh Direksi, bertugas memberi nasihat kepada Direksi berkenaan dengan masalah atau topik tertentu. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak diperbolehkan untuk ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan operasional.

Piagam Dewan Komisaris

Dalam menjalankan peran, tugas, dan kewajibannya, Dewan Komisaris senantiasa mengacu pada Piagam Dewan Komisaris tanggal 22 Juli 2008 yang dibuat

The Agenda was provided in the notification for the EGMS 2013, which was published August 23, 2013 in three daily newspapers, *Bisnis Indonesia* and *Media Indonesia* in Bahasa Indonesian, and *Jakarta Globe* in English. Subsequently, an invitation to attend the meeting was published in the same newspapers September 9, 2013.

The EGMS 2013 was attended by shareholders or their proxies representing 86.14% of the total issued shares in the Company with valid voting rights and therefore met the quorum required by the Company's AoA.

The EGMS 2013 was chaired by the Vice President Commissioner, who called the meeting to order.

The resolution ratified by the EGMS 2013 was published September 25, 2013, in *Bisnis Indonesia* and *Media Indonesia* in Bahasa Indonesian, and *Jakarta Globe* in English.

Board of Commissioners

The Board of Commissioners of PT Vale is a supervisory body responsible for overseeing the Board of Directors and management of the Company, and for providing overall stewardship in setting the business strategy. The Board of Commissioners advises the Board of Directors on some agenda items or topics, whether requested by the Board of Directors or not. However, the Board of Commissioners is prohibited from participating in making any operational decisions.

Charter of the Board of Commissioners

In carrying out its role, duties and responsibilities, the Board of Commissioners is guided by Charter of the Board of Commissioners dated July 22, 2008,

berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan PT Vale; Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Ketentuan Tata Kelola Perusahaan Indonesia oleh Komite Nasional Tata Kelola Perusahaan; *Scorecard* Tata Kelola Perusahaan ASEAN; dan Prinsip OECD tentang Tata Kelola Perusahaan. Piagam Dewan Komisaris dapat diperbaharui sewaktu-waktu agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku atau apabila terdapat perubahan yang dianggap perlu oleh Perseroan.

Piagam Dewan Komisaris meletakkan pedoman-pedoman terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris
2. Tanggung jawab pengawasan
3. Rapat Dewan Komisaris
4. Pengelolaan risiko dan kontrol internal
5. Tanggung jawab sosial Perseroan
6. Kepemilikan dan perdagangan saham
7. Benturan kepentingan
8. Keterbukaan informasi
9. Hubungan dengan pemegang saham mayoritas
10. Laporan rutin dari Direksi
11. Pendidikan dan pelatihan
12. Jasa profesional atau bisnis oleh komisaris.

Tiap-tiap anggota Dewan Komisaris memiliki kedudukan yang sama di dalam Dewan, namun Presiden Komisaris memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi jalannya fungsi Dewan Komisaris. Agar dapat menjalankan kinerjanya dengan efektif, Dewan Komisaris telah menetapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Semua anggota wajib bekerja sama menjalankan fungsi Dewan Komisaris agar dapat membuat keputusan yang efektif, tepat guna, dan tepat sasaran serta bertindak secara mandiri.

that was established based on PT Vale's Articles of Association; Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies; Indonesia's Code of Corporate Governance by National Committee on Governance; ASEAN Corporate Governance Scorecard; and OECD Principles of Corporate Governance. The Charter of the Board of Commissioners can be updated from time to time to ensure that it satisfies the requirements of prevailing laws and regulations, or according to changes deemed necessary by the Company.

The Charter of the Board of Commissioners sets out guidelines on the following matters:

1. Role and responsibilities of the Board of Commissioners
2. Supervisory responsibilities
3. The Board of Commissioners' meeting
4. Internal risk management and control
5. Corporate social responsibility
6. Holding and trading of shares
7. Conflict of interest
8. Disclosure of information
9. Relationship with majority shareholder
10. Regular reporting from the Board of Directors
11. Education and training
12. Professional or business service by the commissioner.

Each member of the Board of Commissioners holds an equal position on the Board but the President of Commissioners is primarily responsible for monitoring the proper functioning of the Board of Commissioners. To perform effectively, the Board of Commissioners has adopted the following principles:

1. The combination of members should enable the Board of Commissioners to make effective, appropriate and timely decisions and to act independently

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib memiliki kesungguhan dan kemampuan untuk menjalankan kewajibannya dengan baik serta bekerja secara profesional untuk memastikan bahwa Direksi tetap mengutamakan keinginan para pemangku kepentingan.
3. Memiliki kemampuan sebagai pengawas dan penasihat bagi Direksi, mencakup pemberian tindakan-tindakan pencegahan, penambahan insentif, serta penanguhan.

Peran, tugas dan tanggung jawab

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah untuk mengawasi dan memberi saran kepada Direksi serta memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan, pengelolaan, dan operasional Perseroan oleh Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya dengan tulus, teliti, dan penuh tanggung jawab, serta mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan, Piagam Dewan Komisaris, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah penjelasan tentang peran, tugas, dan tanggung jawab Dewan Komisaris:

1. Mengawasi manajemen Direksi atas Perseroan dengan cara (i) mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi serta (ii) merundingkan atas permintaan Direksi untuk memberikan pengarahannya terhadap Direksi, atau meneruskan permohonan tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham.
2. Melaksanakan tugas-tugas, wewenang, serta tanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

2. Each member of the Board of Commissioners must have the integrity and capability to carry out their role properly, working professionally to ensure that the Board of Directors is taking into account the interests of all stakeholders
3. Oversight and advisory capabilities regarding the Board of Directors includes preventive actions, improvement incentives, and suspension

Role, duties and responsibilities

In general terms, the duties and responsibilities of the Board of Commissioners are to oversee and provide advice to the Board of Directors, ensuring that the Board of Directors is implementing good corporate governance, management and operation of the Company. Each member of the Board of Commissioners must perform their duties in good faith, with due care and full responsibility, and in accordance with the Company's AoA, the Charter of the Board of Commissioners, and prevailing laws and regulations.

Description of role, duties and responsibilities of the Board of Commissioners:

1. Overseeing the Board of Directors' management of the Company by (i) supervising and providing advice to the Board of Directors and (ii) deliberating on requests by the Board of Directors to provide direction to the Board of Directors, or further referring such requests to the General Meeting of Shareholders for shareholders' approval.
2. Undertaking tasks, authorized action and responsibilities in accordance with the AoA, prevailing laws and regulations and/or the General Meeting of Shareholders to implement the good corporate governance principles of transparency, accountability, responsibility, independency and fairness.

3. Melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana didelegasikan oleh Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan Perseroan.
5. Mengesahkan RKAP selambat-lambatnya 30 hari sebelum awal tahun buku Perseroan yang baru. RKAP sebelumnya akan berlaku apabila RKAP tersebut belum dapat disahkan dalam jangka waktu tersebut.
6. Meninjau dan menyetujui setiap perubahan pada Kontrak Karya Perseroan.
7. Meninjau kinerja Perseroan dalam menjalankan rencana tanggung jawab sosial perusahaan serta memutuskan langkah-langkah yang akan diambil oleh Direksi untuk pelaksanaannya.
8. Mengangkat, memindahtugaskan, atau memberhentikan sementara anggota manajemen senior dengan tanggung jawab utama dalam tanggung jawab sosial perusahaan, audit internal, serta kepatuhan. Meninjau, menyetujui, serta menandatangani laporan tahunan yang dibuat oleh Direksi.
9. Mewakili Perseroan apabila terdapat benturan kepentingan di antara satu atau semua anggota Direksi dengan memperhatikan pasar modal tempat saham Perseroan dicatat dan/atau peraturan saham yang berlaku.
10. Melaporkan tugas pengawasan selama tahun berjalan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
11. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas pengawasan dan penasihatannya terhadap Direksi dengan tulus, teliti, dan bertanggung jawab demi kepentingan dan keuntungan Perseroan.

3. Undertaking such other tasks delegated to it by the AoA, prevailing laws and regulations and/or the General Meeting of Shareholders.
4. Approving the Company's Annual Work Plan and Budget (RKAP).
5. Ratifying RKAP, at the latest 30 days prior to the beginning of the Company's new financial year. If the RKAP is not ratified within the timeline, then the previous RKAP will apply.
6. Reviewing and approving any amendment to the Company's Contract of Work.
7. Reviewing the Company's performance in carrying out its corporate social responsibility plan and deciding on the steps the Board of Directors will take in further implementing it.
8. Appointing, transferring or temporarily discharging any member of senior management with primary responsibility in corporate social and responsibility, and internal audit and compliance. Reviewing, approving and signing off on the annual report prepared by the Board of Directors.
9. Representing the Company, in any case of conflict of interest between one or all members of the Board of Directors, with observance of the prevailing capital market and/or stock regulations where the Company is listed.
10. Reporting on its supervisory duties over the preceding financial year to the General Meeting of Shareholders.
11. Each member of the Board of Commissioners must have good faith, due care and full responsibility in carrying out the Board's oversight and advisory duties to the Board of Directors for the sole interest and benefit of the Company.

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

12. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas.

Berikut adalah wewenang yang dimiliki Dewan Komisaris:

1. Dewan Komisaris memiliki akses pada informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan tugas pengawasannya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, kebijakan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dewan Komisaris dapat sewaktu-waktu bertindak secara independen apabila diperlukan untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penasihatan.
3. Dewan Komisaris berhak mengusulkan pelaksanaan perubahan yang dianggap perlu atau tindakan korektif kepada Direksi berdasarkan tinjauan tahunan pada sistem pengelolaan resiko internal dan pengendalian Perseroan.
4. Membentuk komite atau pelaksana tugas di bawah Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan peran, tugas, dan tanggung jawabnya.
5. Dewan Komisaris dapat setiap saat memberhentikan sementara satu atau lebih anggota Direksi serta menegur anggota Direksi yang bersangkutan apabila terjadi pelanggaran terhadap Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, kelalaian dalam menjalankan tugas, atau alasan-alasan lain yang dianggap penting oleh Dewan Direksi
6. Apabila terdapat kasus pemberhentian sementara anggota Direksi, Dewan Komisaris wajib melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam jangka waktu 45 hari setelah tanggal pemberhentian sementara untuk membuat keputusan pemberhentian tetap atau

12. Each member of the Board of Commissioners would be personally liable for the Company's loss if found guilty or negligent in carrying out their duties.

Authorities of the Board of Commissioners:

1. The Board of Commissioners shall, in accordance with the Company's AoA and policies, as well as the prevailing laws and regulations, have access to any information needed for the performance of its supervisory duties.
2. At any time, to engage independent advisors as appropriate and necessary to fulfill its supervisory and oversight functions.
3. Entitled to recommend to the Board of Directors the implementation of any necessary changes or corrective actions based on its annual review on the Company's internal risk management and control system.
4. To establish committees or task forces under the Board of Commissioners to assist it in the performance of its role, duties and responsibilities.
5. At any time, the Board of Commissioners can temporarily discharge any one or more member(s) of the Board of Directors and notify the respective member(s) of the Board of Directors, provided that such member has conducted any act contrary to the AoA, or any prevailing laws and regulations, or neglected their duty, or for any other reasons deemed to be important by the Board of Commissioners.
6. In case any member(s) of the Board of Directors is/are temporarily suspended, the Board of Commissioners must hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders, within 45 days after the date of temporary suspension, to decide whether such member(s) of the Board of Directors will

pengembalian jabatan terhadap anggota yang melanggar, namun tetap memberikan kesempatan bagi anggota Direksi untuk mengajukan pembelaan diri dalam rapat.

Berdasarkan keputusan dalam Anggaran Dasar Perseroan PT Vale, beberapa keputusan yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Status korporasi, struktur saham, serta rencana bisnis dan strategi tahunan dan jangka panjang Perseroan
2. Laporan keuangan triwulanan dan tahunan
3. Pendapatan atau divestasi besar
4. Kerjasama strategis dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan berdasarkan Anggaran Dasar
5. Investasi saham PT Vale dan pengeluaran lainnya yang melebihi batas-batas yang telah ditentukan oleh Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berharap agar keterangan tentang peran, tugas, dan tanggung jawab akan diperbarui setiap saat sebagai wujud praktik terbaik sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan.

Susunan Anggota Dewan Komisaris

Sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan PT Vale, susunan keanggotaan Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 10 orang namun tidak melebihi 15 orang komisaris. Masa jabatan setiap anggota Dewan Komisaris terhitung efektif sejak penutupan RUPST saat penunjukkan dan berakhir saat penutupan dua RUPST selanjutnya. Setiap anggota Dewan Komisaris berkesempatan untuk ditunjuk kembali di masa akhir jabatan.

Susunan anggota Dewan Komisaris saat ini terdiri dari 10 anggota, dengan tiga anggota menduduki jabatan sebagai Komisaris Independen.

be permanently discharged or returned to their original position, while giving opportunity for the member(s) of the Board of Directors to present a defence at the meeting.

PT Vale's AoA specifically stipulates that certain decisions, such as the following, must be approved by the Board of Commissioners:

1. The Company's corporate status, capital structure, annual and long-term business and strategic plans
2. Quarterly and annual financial statements
3. Major acquisitions or divestitures
4. Strategic alliances and other actions as required under the AoA
5. PT Vale's capital investments and other expenditures that exceed certain limits established by the Board of Commissioners

The Board of Commissioners expects that, as part of a continuous improvement, the foregoing lists of roles, duties and responsibilities will be updated from time to time to reflect prevailing best practices.

Composition of the Board of Commissioners

PT Vale's AoA stipulates that the Board of Commissioners should consist of a minimum of 10 but not more than 15 commissioners. The tenure of each member of the Board of Commissioners is effective as of the close of the AGMS during which they are appointed and ends at the close of the following two AGMS. At the end of their tenure, members of the Board of Commissioners may be re-appointed.

The current Board of Commissioners consists of 10 members, with three members acting as Independent Commissioners.

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

Dalam RUPST yang diadakan pada tanggal 23 April 2013, para pemegang saham menyetujui penerimaan pengunduran diri Connor Spollen sebagai Komisaris Perseroan serta menyetujui pengangkatan Kevin Graham sebagai penggantinya, efektif sejak penutupan RUPST tahun 2013 hingga penutupan RUPST pada tahun 2014.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 24 September 2013, para pemegang saham juga menyetujui penunjukkan Akira Nozaki sebagai Komisaris Perseroan menggantikan Harumasa Kurokawa, efektif hingga penutupan RUPST tahun 2014.

Selama tahun 2013, tidak terdapat situasi yang mengandung benturan kepentingan di antara anggota Dewan Komisaris atau di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam proses pengambilan keputusan. Selama masa jabatan, setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham atau pemegang saham pengendali karena tidak terdapat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, ke atas maupun ke samping, ataupun hubungan karena perkawinan di antara mereka.

Komisaris Independen

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jumlah anggota Komisaris Independen adalah sebanyak 30% dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris.

PT Vale mengadakan penilaian terhadap Komisaris Independen setiap tahun untuk memastikan independensi mereka dengan mempertimbangkan persyaratan-persyaratan di dalam Peraturan Bapepam-LK IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Komite Audit, yaitu:

At the AGMS held April 23, 2013, the shareholders resolved to accept the resignation of Connor Spollen as a Commissioner of the Company and to approve the appointment of Kevin Graham as his replacement effective from the close of the AGMS of 2013 until the close of the AGMS in 2014.

In the Extraordinary General Meeting of Shareholders September 24, 2013, the shareholders also resolved the appointment of Akira Nozaki as Commissioner of the Company replacing Harumasa Kurokawa effective until the close of the AGMS in 2014.

During 2013, there were no situations of conflicts of interest between the members of the Board of Commissioners or between the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in any decision-making process. During their tenure, each member of the Board of Commissioner has no affiliation with the majority shareholders or controlling shareholders, as there are no blood relatives, up to the third degree, vertically, horizontally, or by marriage.

Independent Commissioners

As required by the prevailing laws and regulations, the number of independent commissioners is 30% of the total members of the Board of Commissioners.

PT Vale annually assesses the Independent Commissioners to ensure their independence by taking into consideration the following requirements under Bapepam-LK Regulation IX.I.5 on the Establishment and Guidelines of Audit Committee:

1. Bukan merupakan karyawan atau orang yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengontrol, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam enam bulan terakhir
2. Tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam Perseroan
3. Tidak memiliki hubungan dengan Perseroan, Direksi, atau pemegang saham mayoritas Perseroan
4. Tidak memiliki hubungan bisnis dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung

Setiap awal tahun, PT Vale mewajibkan setiap anggota Dewan Komisaris untuk menanda tangani surat pernyataan status independensi serta mengungkapkan kondisi apapun yang dianggap sebagai konflik kepentingan yang bertentangan dengan setiap tindakan yang diambil oleh Dewan Komisaris.

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris beserta Keluarga

PT Vale memiliki Daftar Khusus yang mencatat secara periodik setiap kepemilikan saham di dalam Perseroan atau perusahaan lain oleh anggota Direksi beserta keluarga mereka.

Remunerasi untuk Dewan Komisaris

Kecuali kepada Komisaris Independen, PT Vale tidak memberikan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris. Komite Tata Kelola Perusahaan merekomendasikan remunerasi tahunan kepada Dewan Komisaris, kemudian usulan remunerasi tersebut disampaikan dalam RUPST untuk mendapatkan persetujuan.

Semua biaya perjalanan, akomodasi, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh Komisaris Independen sehubungan dengan pengadaan rapat Dewan Komisaris menjadi tanggungan PT Vale.

1. Not an employee or a person with authority and responsibility to plan, lead, control or supervise activities of the Company within the last six months
2. Does not own any shares either directly or indirectly in the Company
3. Does not have any affiliation with the Company, any member of the Board of Commissioners, any member of the Board of Directors or majority shareholder(s) of the Company
4. Does not engage in any business relationship either directly or indirectly with the Company

At the beginning of each year, PT Vale requires each member of the Board of Commissioners to sign a statement to indicate their independency status and disclose any condition that may be considered as conflict of interest to any actions taken by the Board of Commissioners.

Shares Ownership of Members of the Board of Commissioners and their Families

PT Vale maintains a Special Register, which periodically records any share ownership in the Company or other companies by members of the Board of Commissioners and their families.

Remuneration for the Board of Commissioners

Except for the Independent Commissioners, PT Vale does not provide remuneration to members of the Board of Commissioners. The Corporate Governance Committee recommends annual remuneration to the Board of Commissioners. The resulting proposed annual remuneration is presented to the AGMS for approval.

All travel, accommodation and other expenses incurred by Independent Commissioners in connection with meetings of the Board of Commissioners are borne by PT Vale.

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

Tabel berikut menggambarkan kisaran kompensasi yang didapatkan oleh Komisaris Independen:

Compensation range for the Independent Commissioners is shown in the following table:

Untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2013 For the period ended December 31, 2013		
(Dalam ribuan Dolar AS) (US dollars, in thousands)	% ¹⁾	Amount
Gaji dan imbalan pekerjaan jangka pendek Salaries and other short-term employee benefits	0.32	338
Imbalan pasca kerja Post-employment benefits	-	-
Pembayaran berbasis saham Share-based payments	-	-
	0.32	338

¹⁾ % dari jumlah biaya karyawan / % of total employee costs

Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2012 ditampilkan dan disetujui pada RUPST 2013 pada April 2013.

Rapat Dewan Komisaris

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar, rapat Dewan Komisaris dapat diadakan apabila dianggap perlu oleh Presiden Komisaris, atas permintaan komisaris yang mewakili lebih dari 50% keanggotaan Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10% saham Perseroan. Bahan-bahan rapat Dewan Komisaris disiapkan untuk semua anggota Dewan Komisaris paling lambat tujuh hari sebelum tanggal rapat, baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy* yang dikirimkan lewat email (atau alat komunikasi elektronik lainnya).

Selain komunikasi yang intensif antar anggota Dewan Komisaris maupun antara Dewan Komisaris dengan Direksi, Dewan Komisaris tercatat telah menyelenggarakan 3 kali rapat Dewan Komisaris pada tahun 2013. Sudah umum di PT Vale bahwa setiap rapat

Accountability of the Board of Commissioners

The report on the Board of Commissioners supervisory duties for the financial year of 2012 was presented at and approved by the AGMS 2013 in April 2013.

Meetings of the Board of Commissioners

The AoA stipulates that a Board of Commissioners meeting can be held when it is considered necessary by the President Commissioner, solicited by more than 50% of the members of the Board of Commissioners, or based on a written request from the Board of Directors and holders of at least 10% of shares of the Company. The Board of Commissioners' meeting material must be made available to each member of the Board of Commissioners not more than seven days prior to the meeting, either by hand in hard copy or by email (or other electronic means of communication) for a soft copy.

In addition to ongoing communication among Board of Commissioners members, and between the Board of Commissioners the Board of Directors, the Board of Commissioners held three Board of Commissioners meetings in 2013. It is a common practice at PT Vale

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

Dewan Komisaris umumnya diikuti oleh rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi dan meningkatkan koordinasi.

that the members of Board of Directors are always present at the Board of Commissioners meetings for communication efficiency and to improve coordination by the Boards.

Selama tahun 2013, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 22 April di Jakarta, 19 Juli di Jakarta, dan 12 November di Tokyo.

During 2013, the Board of Commissioners held three meetings: April 22 in Jakarta, July 19 in Jakarta, and November 12 in Tokyo.

Tabel berikut menjelaskan tingkat kehadiran komisaris di rapat Dewan Komisaris:

Commissioner attendance at the Board of Commissioners' meetings is shown in the table below:

Anggota Dewan Komisaris Members of the Board of Commissioners	Jumlah Rapat Yang Harus Dihadiri Number of meetings eligible to attend	Jumlah Rapat Yang Dihadiri Meetings attended
Ricardo de Carvalho	3	3
Arief T. Surowidjojo	3	2
Kevin Graham	2	2
Jennifer Maki	3	3
Akira Nozaki	1	1
Mikinobu Ogata	3	3
Peter Poppinga	3	2
Mark Travers	3	3
Irwandy Arif	3	3
Idrus A. Paturusi	3	1

Direksi

Direksi bertanggung jawab untuk mengelola Perseroan secara efektif, efisien dan hati-hati untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud, tujuan dan kegiatan usahanya. Di bawah koordinasi Presiden Direktur, Direksi mengawasi fungsi operasional, urusan korporat, hukum dan keuangan Perseroan. Seluruh Direksi bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur untuk memastikan bahwa Presiden Direktur mengetahui perkembangan seluruh aspek yang terkait dengan aktivitas operasi Perseroan. Dalam menjalankan

Board of Directors

The Board of Directors is responsible for the effective, efficient and prudent management of the Company, in the best interests of the Company, and in accordance with the Company's purposes, objectives and business activities. Led by the President Director, the Board of Directors oversees the operations, corporate affairs, legal, and finance functions of the Company. All members of the Board of Directors report directly to the President Director to ensure that the President Director is well informed of all matters relating to the Company's

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

tugasnya, Direksi berada dalam pengawasan serta mendapat pengarahan langsung dari Dewan Komisaris. Direksi wajib meminta persetujuan dari Dewan Komisaris untuk pelaksanaan tugas-tugas tertentu.

Direksi berperan selaku pemimpin serta penentu profil risiko yang dapat diterima Perseroan dalam hal yang berhubungan serta yang berkesepakatan dengan para pemangku kepentingan Perseroan.

Direksi diharapkan memenuhi tugas-tugas utama berikut ini:

1. Melaporkan secara komprehensif, akurat dan tepat waktu, mengenai aktivitas bisnis dan sosial PT Vale secara umum, ataupun mengenai hal-hal tertentu yang dianggap material atau dapat berdampak signifikan pada PT Vale, pemegang saham ataupun pemangku kepentingan Perseroan.
2. Bertindak secara tepat waktu dan mengambil segala keputusan yang diperlukan sehubungan dengan bisnis dan operasi PT Vale, sesuai dengan seluruh ketentuan hukum dan persyaratan atau kewajiban lainnya yang berlaku, serta dalam kerangka kebijakan perusahaan yang berlaku, dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dalam jangka panjang.
3. Melakukan proses penetapan anggaran tahunan secara komprehensif dan memantau kinerja keuangan dan operasional PT Vale secara seksama sesuai dengan rencana bisnis tahunan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
4. Mengkaji secara berkesinambungan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pelaksanaannya dalam semua bidang kegiatan utama, dengan memerhatikan faktor-faktor penting seperti, antara lain, perkembangan kondisi pasar dan perubahan peraturan, hukum dan teknologi yang terkait.

operation. In performing its duties, the Board of Directors is supervised by, and may receive advice from, the Board of Commissioners. For certain actions, the Board of Directors may be required to have prior approval from the Board of Commissioners.

The Board of Directors plays a leadership role in defining the tolerance for risk in the Company's dealings and relationships with its stakeholders.

The Board of Directors is expected to meet the following key objectives:

1. To report, in a comprehensive, accurate and timely fashion, business operations and social affairs of PT Vale generally, and on any specific matters that are considered material or can bring significant consequence to PT Vale, its shareholders and other stakeholders.
2. To take timely action and make all appropriate decisions necessary with respect to PT Vale's business and operations, in accordance with all applicable legal and other requirements or obligations and within the framework of corporate policies in effect, with a view to maximizing long-term shareholder value.
3. To conduct a comprehensive annual budgeting process and monitor closely PT Vale's financial and operating performance in conjunction with its annual business plan approved by the Board of Commissioners.
4. To review, on an ongoing basis, near-term and long-term strategic plans and their implementation in all key areas of activity in light of, among other critical factors, evolving market conditions and changes in applicable laws, regulations and technology.

5. Menerapkan kebijakan, prosedur dan proses-proses yang diperlukan guna memastikan standar integritas dan perilaku etis tertinggi di kalangan manajemen dan karyawan PT Vale.
6. Memastikan keberkelanjutan bisnis Perseroan dengan meminimalkan dampak operasional terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Sebagai bagian dari proses dalam meningkatkan praktik tata kelola perusahaan, Direksi berharap dapat terus dinamis menjalankan tugas-tugas tersebut mengikuti perkembangan zaman agar dapat sesuai dengan standar praktik terkini.

Piagam Direksi

Dalam menjalankan peran, tugas, dan kewajibannya, Direksi berpedoman pada Piagam Direksi tanggal 22 Juli 2008 yang diterbitkan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan PT Vale Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Pedoman Umum GCG Indonesia dari Komite Nasional Corporate Governance; ASEAN Corporate Governance Scorecard; dan OECD Principles of Corporate Governance. Piagam Direksi dapat diperbaharui sewaktu-waktu untuk memastikan agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku atau apabila terdapat perubahan yang dianggap perlu oleh Perseroan.

Piagam Direksi meletakkan pedoman-pedoman terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Peran Direksi
2. Tanggung jawab Direksi
3. Pengambilan keputusan
4. Pengendalian internal dan manajemen risiko
5. Tanggung jawab sosial perusahaan
6. Struktur pelaporan
7. Kebijakan Perseroan
8. Kepemilikan dan perdagangan saham

5. To implement appropriate policies, procedures and processes to ensure the highest level of conduct and integrity of PT Vale's management and employees.
6. To ensure the sustainability of the business by minimizing impact to surrounding communities and environment.

The Board of Directors expects that, as part of a continuous process of improving corporate governance practices, the foregoing list will be revised from time to time to reflect prevailing best practices.

Charter of the Board of Directors

In carrying out its role, duties and responsibilities, the Board of Directors is guided by the Charter of the Board of Directors dated July 22, 2008, that was established based on PT Vale's Articles of Association; Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies; Indonesia's Code of Corporate Governance by National Committee on Governance; ASEAN Corporate Governance Scorecard; and OECD Principles of Corporate Governance. The Charter of the Board of Directors can be updated from time to time to ensure that it satisfies the requirements of prevailing laws and regulations, or according to changes deemed necessary by the Company.

The Charter of the Board of Directors sets out guidelines on the following matters:

1. Role of the Board of Directors
2. Director responsibilities
3. Decision-making
4. Internal risk management and control
5. Corporate social responsibility
6. Reporting structure
7. Company policies
8. Holding and trading of shares

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

9. Benturan kepentingan
10. Keterbukaan informasi
11. Hubungan dengan pemegang saham mayoritas
12. Laporan rutin pada Dewan Komisaris
13. Pendidikan dan pelatihan
14. Jasa layanan profesional atau bisnis oleh direktur

Tiap-tiap anggota Direksi memiliki kedudukan yang sama, termasuk Presiden Direktur. Presiden Direktur memiliki peran untuk mengkoordinasikan semua kegiatan Direksi. Agar dapat menjalankan tugas dengan efektif, Direksi telah menyusun prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Semua anggota wajib bekerja sama menjalankan fungsi Direksi agar dapat membuat keputusan yang efektif, tepat guna, dan tepat sasaran serta bergerak secara mandiri.
2. Setiap anggota Direksi wajib memiliki integritas, pengalaman, dan kemampuan untuk menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan tugas masing-masing.
3. Direksi bertanggung jawab dalam mengelola Perseroan dalam mencapai keuntungan serta menjaga keberlangsungan Perseroan.
4. Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban atas pengelolaan Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran, tugas, dan tanggung jawab

Direksi secara bersama-sama berwenang untuk mengambil keputusan Perseroan dan memiliki lima tugas utama, yaitu terkait manajemen operasional, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi dan tanggung jawab sosial. Pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Conflicts of interest
10. Disclosure of information
11. Relationship with majority shareholder
12. Regular reporting to the Board of Commissioners
13. Education and training
14. Professional or business service by the directors

Each member of the Board of Directors holds an equal position on the Board, including the President Director. The President Director coordinates the activities of the Board of Directors. For the purpose of carrying out its duties effectively, the Board of Directors has adopted the following principles:

1. The combination of members should enable the Board of Directors to make effective, appropriate and timely decisions and to act independently
2. Each member of the Board of Directors must possess the integrity, experience and capability required for professionally carrying out their respective duties
3. The Board of Directors is responsible for managing the Company to achieve profitability and ensure the Company's sustainability
4. The Board of Directors is accountable for its management to the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and regulations

Roles, duties and responsibilities

The Board of Directors is a collegial decision-making body. Its duties consist of five main tasks: operational management, risk management, internal control, communication and social responsibility. The distribution of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is determined in accordance with the Company's AoA and applicable laws and regulations.

Berikut adalah penjelasan tentang peran, tugas, dan tanggung jawab Direksi:

1. Bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam menjalankan manajemen harian Perseroan.
3. Mengontrol, memelihara, serta mengelola aset-aset Perseroan.
4. Mempersiapkan dan memelihara daftar pemilik saham, daftar khusus, notulensi Rapat Umum Pemegang Saham serta notulensi rapat Direksi.
5. Melaporkan setiap saham yang dimiliki anggota Direksi maupun keluarga mereka di Perseroan maupun di perusahaan lain dengan cara memasukkan informasi ke dalam daftar khusus
6. Mencatat setiap transaksi saham di daftar pemegang saham dan melaporkan setiap perubahan pemegang saham Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
7. Mempersiapkan laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk diserahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.
8. Menyimpan semua catatan, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan.
9. Mempersiapkan RKAP Perseroan secara tepat waktu dan diserahkan kepada Dewan Direksi untuk disetujui.
10. Meninjau dan memberikan masukan untuk semua masalah yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar atau ketentuan yang berlaku.

Description of role, duties and responsibilities of the Board of Directors:

1. Responsible for managing the Company in good faith and with full responsibility for the best interests of the Company and in accordance with the objectives and purposes of the Company
2. Applying good corporate governance principles in carrying out the day-to-day management of the Company
3. Controlling, maintaining and managing the Company's assets
4. Preparing and maintaining the shareholder register, special register, minutes of General Meetings of Shareholders and minutes of the meetings of the Board of Directors
5. Reporting any shares they or their families own in the Company and other companies through entering information this in a special register
6. Recording any transfer of shares in the shareholder register and notifying the Minister of Law and Human Rights of any change of shareholding in the Company for registration in the Company registry
7. Preparing annual reports and financial statements of the Company in accordance with the prevailing laws and regulations and presenting them to the General Meeting of Shareholders upon review by the Board of Commissioners
8. Maintaining all records, minutes and any financial documents of the Company
9. Preparing RKAP of the Company on a timely basis and submitting it to the Board of Commissioners for their approval
10. Reviewing and providing recommendations on any matter that requires the approval of the Board of Commissioners and/or the General Meeting of Shareholders under the AoA or prevailing laws and regulations

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

11. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan pada tiap perkara dan dalam peristiwa apapun.
2. Mengikutsertakan dan mengikat Perseroan secara hukum dengan pihak-pihak lain dan antara pihak lain dengan Perseroan.
3. Menjalankan semua tugas, baik yang terkait dengan manajemen maupun kepemilikan, dalam mengelola/melepaskan aset Perseroan, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengambil tindakan hukum untuk memindahkan atau menghilangkan hak atau penjaminan total aktiva bersih Perseroan sejumlah lebih dari 50%, baik dalam transaksi tunggal maupun beberapa transaksi yang berkaitan dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Tanpa mengurangi tanggung-jawabnya, Direksi melalui dua direktur dapat mengangkat satu atau lebih karyawan atau pihak lain sebagai kuasanya sesuai dengan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar.
6. Mengangkat, mengakhiri atau menanggihkan jabatan perorangan pada tingkat manajer atau di atasnya (atau setara dengannya).
7. Mengangkat, mengakhiri jabatan, atau memberhentikan dengan sementara sekretaris perusahaan Perseroan.
8. Mengangkat, mengakhiri jabatan, atau memberhentikan dengan sementara karyawan senior pada divisi hubungan investor.

11. Holding a General Meeting of Shareholders in accordance with the AoA and prevailing laws and regulations

Authorities of the Board of Directors:

1. Representing the Company inside and outside the court in all matters and at any events
2. Engaging and legally binding the Company with other parties and between other parties and the Company
3. Performing all actions, whether regarding management or ownership, in disposing of the Company's assets, except as stipulated otherwise in the AoA or the prevailing laws and regulations
4. Taking legal action to transfer or dispose of any right or pledge of the Company's assets of more than 50% of total net assets of the Company, either in a single transaction or several related transactions, subject to prior approval of the General Meeting of Shareholders
5. Without prejudice to its responsibilities, the Board of Directors, through two directors may appoint one or more employee(s) or other person(s) as its attorney(s) in accordance with the criteria and standards established by the Board of Commissioners and the Company's AoA
6. Appointing, removing or suspending any individual at or higher than the general manager level (or equivalent)
7. Appointing, removing or suspending the Company's corporate secretary
8. Appointing, removing or suspending a senior employee responsible for investor relations

9. Mengambil keputusan dalam setiap kontribusi terkait urusan amal, politik, dan masyarakat atau dalam bentuk lain (uang tunai atau barang) dari atau atas nama Perseroan maupun anak perusahaan, sesuai dengan batasan yang digariskan oleh standar yang telah diberlakukan sebelumnya oleh Dewan Komisaris.
10. Menata ulang organ-organ di bawah setiap anggota Direksi serta setiap perubahan komposisi pegawai di tingkat Manajer Umum atau di atasnya.
11. Menentukan kebijakan umum Perseroan mengenai sumber daya manusia serta menjalankan kebijakan yang telah disetujui.
12. Mematuhi pedoman umum dan kebijakan bisnis Perseroan sebagaimana disarankan oleh Dewan Komisaris.
13. Menentukan rencana strategis, anggaran tahunan, serta kebijakan pengelolaan keuangan dan risiko Perseroan sebelum diserahkan kepada Dewan Komisaris, kemudian melaksanakan inisiatif-inisiatif tersebut.
14. Memeriksa operasional Perseroan dalam hal material dan isi setiap laporan tertulis atau presentasi kepada Dewan Komisaris.
15. Mengidentifikasi dan mengevaluasi investasi, divestasi, dan peluang-peluang material lainnya yang tersedia untuk Perseroan.
16. Membuka dan menutup kantor-kantor cabang Perseroan atau anak perusahaan dari kantor cabang tersebut.
17. Mengecualikan setiap penawaran hak kontraktual yang dimiliki Perseroan (atau setiap anak perusahaan), kecuali telah dibuat berdasarkan kriteria dan standar yang telah ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar Perseroan.
18. Menetapkan kebijakan internal terkait batasan kewenangan setiap anggota Direksi dan di seluruh jajaran administratif Perseroan.

9. Making decisions on any charitable, political, community or other contribution or donation (in cash or in kind) by or on behalf of the Company or any Company subsidiary, to an extent based on standards previously established by the Board of Commissioners
10. Restructuring the organization of departments under each member of the Board of Directors and any changes in personnel at the General Manager level or higher
11. Setting the Company's general policies on human resources and executing the approved policies
12. Complying with the general guidelines and business policies of the Company as recommended by the Board of Commissioners
13. Setting the Company's strategic plan, annual budget, and finance and risk management policies, submitting them to the Board of Commissioners, and subsequently carrying out those initiatives
14. Overseeing the Company's material operational matters and the content of any written report or presentation to the Board of Commissioners
15. Identifying and evaluating investments, divestures and other material opportunities available to the Company
16. Opening and closing of branch offices of the Company or subsidiaries of those offices
17. Waiving of any proposed contractual right belonging to the Company (or any subsidiary), unless it has been made in accordance with criteria and standards previously established by the Board of Commissioners and the Company's AoA
18. Establishing internal policies regarding limits on the authority of each member of the Board of Directors and throughout the whole of the Company's administrative organization

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

Tata kelola perusahaan Corporate governance

19. Mengatur strategi pengambilan suara yang akan diikuti dengan kuasanya dalam perusahaan, lembaga - lembaga, dan organisasi lain yang pengelolaan atau hak suaranya dimiliki oleh Perseroan.
20. Menangani setiap permasalahan yang dianggap dapat memiliki atau memberi dampak terhadap Kontrak Karya atau hak dan kewajiban Perseroan yang tercantum dalam Kontrak Karya.
21. Menangani setiap kegiatan akuisisi, divestasi, atau hibah atau hak atas tanah atau hak darat, termasuk tanpa pengecualian, hak atas air, kayu, atau akses.
22. Membentuk komite atau satuan tugas untuk membantu Direksi menjalankan tugas dan kewajibannya.

Komposisi Direksi

Telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT Vale bahwa Perseroan dikelola oleh Direksi yang terdiri dari tidak kurang dari tiga dan tidak lebih dari 10 direktur dengan komposisi sebagai berikut:

- Satu orang Presiden Direktur
- Satu orang Wakil Presiden Direktur
- Tidak lebih dari delapan Direktur

Masa jabatan anggota Direksi berlaku sejak penutupan RUPST saat mereka diangkat dan berakhir pada penutupan dua RUPST berikutnya. Di akhir masa jabatan, anggota Direksi dapat diangkat kembali.

Michael O'Sullivan, Direktur Perseroan, telah mengajukan pengunduran dirinya pada tanggal 2 November 2012 dan berlaku efektif per 1 Januari 2013. Fabio Hilal Bechara mengajukan pengunduran dirinya sebagai Direktur Perseroan pada tanggal 22 Maret 2013 dan berlaku efektif sejak penutupan RUPST 2013 pada tanggal 23 April 2013.

Pada RUPST 2013 tanggal 23 April 2013, para pemegang saham menerima pengunduran diri Michael O'Sullivan

19. Setting the voting strategy to be followed by its proxies in the companies, foundations and other organizations in which the Company has management or voting rights;
20. Attending to any matter which could be reasonably be believed to have or result in an impact on the Contract of Work or the Company's rights and obligations under at Contract of Work
21. Attending to any acquisition, divestiture or other grant or receipt of land or land-based rights, including without limitation, rights related to water, timber or access
22. Establishing committee(s) or task force(s) to assist in the performance of its duties and responsibilities

Composition of the Board of Directors

PT Vale's AoA stipulates that the Company is managed by a Board of Directors that consists of not less than three and not more than 10 directors with the following composition:

- a President Director
- a v Vice President Director
- no more than eight Directors

The tenure of each member of the Board of Directors is effective as of the close of the AGMS at which they are appointed and ends on the close of the following two AGMS. At the end of their tenure, members of the Board of Directors may be re-appointed.

Michael O'Sullivan, a Director of the Company, tendered his resignation on November 2, 2012, and that was to be effective as of January 1, 2013. Fabio Hilal Bechara tendered his resignation as a Director of the Company on March 22, 2013, and that was to be effective at the close of 2013 AGMS on April 23, 2013.

At the 2013 AGMS on April 23, 2013, shareholders accepted the resignation of Michael O'Sullivan and

dan Fabio Hilal Bechara sebagai Direktur Perseroan dan mengangkat Febriany Eddy untuk menggantikan Fabio Hilal Bechara. Penunjukan ini berlaku sejak penutupan RUPST 2013 pada tanggal 23 April 2013 hingga penutupan RUPST tahun 2014. Pengesahan penunjukan kembali Josimar Pires sebagai Direktur Perseroan juga dilakukan dalam RUPST 2013, berlaku sejak penutupan RUPST 2013 hingga penutupan RUPST tahun 2015.

Remunerasi Direksi

Serupa dengan kompensasi untuk Komisaris Independen, para pemegang saham menentukan remunerasi Direksi di dalam RUPST. Praktik pendelegasian kewenangan oleh pemegang saham kepada Direksi ini telah dilakukan selama beberapa tahun. Dewan Komisaris kemudian akan menentukan jumlah gaji selama setahun dan/atau paket remunerasi berdasarkan tinjauan dan rekomendasi dari Komite Tata Kelola Perusahaan di bawah Dewan Komisaris. Dalam melakukan peninjauan, Komite Tata Kelola Perusahaan akan menimbang beberapa faktor, antara lain, standar pasar, yaitu untuk menentukan insentif yang dibutuhkan agar dapat menarik dan mempertahankan manajemen yang unggul.

Remunerasi anggota Direksi pada tahun 2013 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2013/ For the period ended December 31, 2013		
Dewan Direksi Board of Directors		
(Dalam ribuan Dolar AS) (US dollars, in thousands)	% *	Amount
Gaji dan imbalan pekerjaan jangka pendek Salaries and other short-term employee benefits	0.97	1,015
Imbalan pasca kerja Post-employment benefits	1.62	1,686
Pembayaran berbasis saham Share-based payments	-	-
	2.59	2,701

* % dari jumlah biaya karyawan / % of total employee costs

Fabio Hilal Bechara as Directors of the Company and appointed Febriany Eddy to replace Fabio Hilal Bechara. This appointment was effective from the close of the 2013 AGMS on April 23, 2013, until the close of the 2014 AGMS. The 2013 AGMS also ratified the re-appointment of Josimar Pires as a Director of the Company, effective from the close of the 2013 AGMS until the close of 2015 AGMS.

Remuneration for the Board of Directors

Similar to compensation to the Independent Commissioners, shareholders determine remuneration of the Board of Directors at their AGMS. It has been practiced for several years that the shareholders will delegate that authority to the Board of Commissioners. Board of Commissioners will then decide the amount of annual salaries and / or other remuneration package based on reviews and recommendations from the Corporate Governance Committee of the Board of Commissioners. In reviewing it, the Corporate Governance Committee will consider, among others factors, market standards the incentive necessary to attract and retain outstanding management talent.

Remuneration of the members of the Board of Directors in 2013 is shown below:

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

Rapat Direksi

Untuk melaksanakan mandatnya, Direksi mengadakan rapat sesuai keperluan. Pada umumnya, rapat Direksi dijadwalkan untuk membahas hasil-hasil keuangan triwulanan dan rekomendasi pembagian dividen. Akan tetapi, rapat Direksi juga dapat diadakan untuk membahas permasalahan yang mungkin muncul.

Pada tahun 2013, Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 19 kali. Daftar kehadiran dalam rapat-rapat Direksi ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Anggota Direksi Members of the Board of Directors	Jumlah Rapat yang Harus Dihadiri Number of meetings eligible to attend	Jumlah Rapat yang Dihadiri Meetings attended
Nico D. Kanter	19	17
Bernardus Irmanto	19	19
Febriany Eddy	12	11
Josimar Pires	19	17

Risalah rapat Direksi didokumentasikan dalam notulen rapat yang dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Sekretaris Perusahaan.

Continuous improvement

PT Vale berkomitmen untuk memberikan kesempatan dan dukungan bagi para Direksi untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas profesional mereka untuk menjalankan praktik manajemen dengan standar tertinggi.

Untuk itu, Direksi Perseroan mengikuti dan berpartisipasi dalam berbagai program berikut ini pada tahun 2013:

- Konferensi mengenai *base metals*
- Konferensi mengenai pertambangan dan komoditas
- Konferensi dan seminar keuangan
- Konferensi internasional mengenai sumber daya manusia

Meetings of the Board of Directors

In order to carry out its mandate, the Board of Directors holds meetings as required. Generally, meetings are scheduled to consider quarterly financial results and dividend recommendations, but meetings can be called to deal with matters that may arise from time to time.

During 2013, the Board of Directors conducted 19 meetings. Director attendance at the Board of Directors'

The Corporate Secretary prepares and maintains the minutes of the meetings of the Board of Directors.

Continuous improvement

PT Vale is committed to providing its Directors with the opportunity and support necessary to continuously develop and upgrade their professional skills, ensuring that only superior management practices are followed.

In order to meet this commitment, PT Vale's Directors participated in or attended the following programs during 2013:

- Base metals conference,
- Mining and commodities conferences
- Financial courses and conferences
- International human resources conferences

Komite Audit

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawab pengawasan dengan menjaga integritas pelaporan keuangan, manajemen risiko, dan audit keuangan untuk Perseroan. Komite Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan peran, tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit bekerja secara independen dengan mengacu pada Piagam Komite Audit dari Dewan Komisaris tanggal 22 Juli 2010. Piagam tersebut disusun untuk melengkapi, dan bukan menggantikan atau memberikan interpretasi tentang Anggaran Dasar PT Vale; misi dan visi Perseroan; Piagam Dewan Komisaris; Piagam Direksi; atau hukum dan undang-undang yang berlaku. Piagam Komite Audit dari Dewan Komisaris tersedia di situs web Perseroan. Komite Audit bekerja dan bertukar informasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, Grup Manajemen Risiko, Unit Audit Internal, dan auditor eksternal.

Setiap anggota Komite Audit diharapkan melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian, bertanggung jawab penuh dan sesuai dengan: (i) hukum dan undang-undang yang berlaku; (ii) semua persyaratan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia; (iii) Anggaran Dasar dan kebijakan Perseroan; (iv) Piagam Komite Audit dari Dewan Komisaris dan (v) instruksi Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

1. Meninjau dan menilai keandalan dan objektivitas laporan keuangan Perseroan yang ditujukan untuk diberitakan kepada publik dan pihak-pihak eksternal lain (termasuk entitas pemerintah dan badan pengawas).

Audit Committee

The Audit Committee assists the Board of Commissioners in fulfilling its oversight responsibilities by attending to the integrity of financial reporting, risk management and financial audit for the Company. The Audit Committee reports directly to the Board of Commissioners.

In carrying out its role, duties and responsibilities, the Audit Committee must act independently and is guided by the Charter of the Audit Committee of the Board of Commissioners dated July 22, 2010. The Charter was established to complement, and not substitute for, nor provide an interpretation of, PT Vale's Articles of Association; its mission and vision; the Charter of the Board of Commissioners; the Charter of the Board of Directors; or applicable laws and regulations. The Charter of the Audit Committee of the Board of Commissioners is available at the Company's website. The Audit Committee works with and exchanges information with the Board of Commissioners, Board of Directors, Risk Management Group, Internal Audit Unit and external auditors.

Members of the Audit Committee are expected to perform their duties and responsibilities in good faith and with due care, having full responsibility and in accordance with: (i) all prevailing laws and regulations; (ii) all requirements of the Authority of Financial Services and the Indonesian Stock Exchange; (iii) the Company's AoA and policies; (iv) the Charter of Audit Committee of the Board of Commissioners and (v) instructions received from the Board of Commissioners.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

1. Reviewing and assessing the reliability and objectivity of the Company's financial reports intended for issuance to the public and other external parties (including governmental entities and regulatory agencies)

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

- Meninjau dan menilai tindakan-tindakan Perseroan untuk mengidentifikasi dan mengontrol risiko keuangan dan bisnis.
- Meninjau dan menilai semua rencana, kemajuan dan hasil aktivitas yang dilakukan oleh Unit Audit Internal – termasuk laporan audit dan rekomendasi kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris; meninjau dan menilai auditor eksternal Perseroan untuk menentukan apabila risiko-risiko utama telah dievaluasi dan ditangani dengan tepat; serta memastikan kecukupan kebijakan kontrol internal.
- Meninjau dan menilai objektivitas dan independensi Unit Audit Internal dan auditor eksternal Perseroan.
- Meninjau dan menilai kecukupan kepatuhan Perseroan terhadap hukum pasar modal dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Mengawasi setiap perubahan audit Perseroan yang signifikan serta prinsip-prinsip akuntansi, kebijakan, control, prosedur dan praktek yang diusulkan atau dirundingkan oleh auditor eksternal Perseroan, Unit Audit Internal, atau manajemen.
- Mengambil tindakan atas permasalahan lain sebagai antisipasi apabila sewaktu-waktu diminta oleh Direksi.

Keanggotaan Komite Audit

Komite Audit terdiri dari tidak kurang dari tiga anggota yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Anggota Komite Audit hanya dapat menjabat selama maksimum dua kali periode berturut-turut, dengan satu periode berjangka waktu dua tahun.

Komite Audit PT Vale terdiri dari tiga anggota, yaitu:

Arief T. Surowidjojo, Ketua dan Anggota Independen Arief T. Surowidjojo diangkat sebagai Ketua Komite Audit sejak tanggal 16 April 2010 dan oleh karenanya

- Reviewing and assessing actions taken by the Company to identify and control financial and business risks
- Reviewing and assessing the plans, progress and results of activities conducted by the Internal Audit Unit – including its audit report and recommendations to the President Director and the Board of Commissioners; reviewing and assessing the Company's external auditors to determine whether key risks are appropriately evaluated and addressed; and ensuring the adequacy of internal control policies
- Reviewing and assessing the objectivity and independency of the Internal Audit Unit and the Company's external auditors
- Reviewing and assessing the adequacy of the Company's compliance with capital market law and regulations
- Monitoring significant changes to the Company's auditing and accounting principles, policies, controls, procedures and practices proposed or contemplated by the Company's external auditor, the Internal Audit Unit, or management
- Taking action on such other matters as the Board of Directors may from time to time request

Membership of the Audit Committee

The Audit Committee consists of no less than three members who are appointed and discharged by the Board of Commissioners. Members of the Audit Committee are only eligible to serve a maximum of two consecutive two-year terms.

PT Vale's Audit Committee consists of three members, as follows:

Arief T. Surowidjojo, Chairman and Independent member Mr. Arief T. Surowidjojo was appointed as chairman of the Audit Committee since 16 April 2010 and therefore

telah memenuhi batas masa jabatan maksimum yang diperbolehkan dalam Piagam Komite Audit dari Dewan Komisaris serta hukum dan undang-undang yang berlaku. Beliau juga bertindak sebagai Wakil Komisaris Utama dan sebagai Komisaris Independen.

Erry Firmansyah, Anggota Independen

Erry Firmansyah diangkat sebagai anggota Komite Audit sejak tanggal 16 April 2010 dan oleh karenanya telah memenuhi batas masa jabatan maksimum yang diperbolehkan dalam Piagam Komite Audit dari Dewan Komisaris serta hukum dan undang-undang yang berlaku.

Firmansyah lulus dari Fakultas Akuntansi Universitas Indonesia pada tahun 1975. Beliau memulai karirnya sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto (Correspondent Price Waterhouse) pada tahun 1982 sebelum bekerja untuk PT Sumarno Pabottinggi Management dan Lippo Group sebagai Direktur Eksekutif hingga tahun 1998. Beliau menjabat sebagai Presiden Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sejak tahun 1998 hingga tahun 2002. Beliau juga menjadi Presiden Direktur Bursa Efek Indonesia pada tahun 1998 hingga bulan Juli 2009.

Saat ini, Firmansyah menjabat sebagai Komisaris Independen di berbagai perusahaan, termasuk PT Unilever Indonesia Tbk., PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), PT Astra Internasional Tbk. dan PT Pefindo (Persero). Beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Beliau berkontribusi aktif dalam berbagai organisasi, termasuk dalam KADIN sebagai Wakil Ketua Komite Keuangan, Anggota Dewan Penyumbang Universitas Andalas, Anggota Dewan Penasihat Institut Akuntansi Indonesia, Anggota Dewan Penasihat IAMI serta Anggota Dewan Penasihat CWMA.

has served the maximum tenure allowed by the Charter of the Audit Committee of the Board of Commissioners and the prevailing laws and regulations. He is also acting as the Vice President Commissioner and an Independent Commissioner.

Erry Firmansyah, Independent member

Mr. Erry Firmansyah was appointed as member of the Audit Committee since 16 April 2010 and therefore has served the maximum tenure allowed by the Charter of the Audit Committee of the Board of Commissioners and the prevailing laws and regulations.

Mr. Firmansyah graduated in accounting from the University of Indonesia in 1975. He began his career as an auditor in the accounting firm Drs. Hadi Sutanto (Correspondent Price Waterhouse) in 1982. He then worked for PT Sumarno Pabottinggi Management and Lippo Group as an Executive Director until 1998. Mr. Firmansyah served as a President Director of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia from 1998 to 2002. Also in 1998, he became President Director of the Indonesia Stock Exchange (IDX), a position he held until July 2009.

Currently, Mr. Firmansyah serves as an Independent Commissioner for number of companies including PT Unilever Indonesia Tbk., PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), PT Astra International Tbk. and PT Pefindo (Persero). He also serves as President Commissioner of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

He actively contributes to organizations including KADIN as a Vice Chief of Finance Committee, Member of Donating Council of Andalas University, Member of Advisory Council of Indonesian Institute of Accountants (IAI), Member of Advisory Council of IAMI and Member of Advisory Council of CWMA.

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

Sidharta Utama, Anggota Independen

Sidharta Utama diangkat sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 1 Juli 2012 dan oleh karenanya telah memenuhi satu periode jabatan, berdasarkan Piagam Komite Audit dari Dewan Komisaris serta hukum dan undang-undang yang berlaku.

Sidharta Utama adalah profesor dan anggota Senat Akademi Universitas Indonesia. Selain jabatan-jabatan akademisnya, beliau juga merupakan Komisaris Independen di PT Axa Mandiri, anggota Komite Pengawasan Perpajakan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan menjadi anggota Komite Audit di PT Hero Tbk, PT Astra Graphia Tbk dan PT Astra International Tbk.

Sidharta Utama dikenal sebagai pakar di bidang tata kelola perusahaan, akuntansi keuangan, keuangan perusahaan, investasi dan pasar modal. Tulisan-tulisan beliau mengenai subyek-subyek tersebut telah banyak dipublikasikan secara internasional dalam berbagai jurnal akademik dan profesi.

Saat ini, Sidharta Utama adalah anggota Dewan Nasional pada Ikatan Akuntan Indonesia, dan Ketua Management Board pada Indonesian Institute for Corporate Directorship. Beliau juga menjadi anggota redaksi di berbagai publikasi akademik bergengsi.

Sidharta Utama adalah lulusan jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, meraih gelar Master di bidang Administrasi Bisnis dari Indiana University dan gelar Doktor dari Texas A&M University. Beliau adalah seorang Chartered Financial Analyst (CFA) terdaftar.

Mr. Sidharta Utama, Independent member

Mr. Sidharta Utama was appointed as member of the Audit Committee July 1, 2012, and therefore has fulfilled one period of service, based on the Charter of the Audit Committee of the Board of Commissioners and the prevailing laws and regulations.

Mr. Utama is a full professor and member of the University Academic Senate at University of Indonesia. In addition to his academic roles, he serves as an Independent Commissioner of PT Axa Mandiri, a member of the Tax Oversight Committee and member of the Ministry of Finance of the Government of Indonesia; and as an Audit Committee member of PT Hero Tbk, PT Astra Graphia Tbk and PT Astra International Tbk.

Mr. Utama has extensive expertise in the areas of corporate governance, financial accounting, corporate finance, investments and capital markets. He has written extensively on these subjects, and his work has been published in both academic and professional journals internationally.

Mr. Utama is currently a member of the National Council, The Indonesian Institute of Accountants, and Chairman of Management Board, Indonesian Institute for Corporate Directorship. He also serves as a member of the editorial board of several distinguished academic publications.

Mr. Utama holds a bachelors degree in accounting from the Faculty of Economics at the University of Indonesia, a masters of business administration degree from Indiana University and a PhD from Texas A&M University. He is also a Chartered Financial Analyst (CFA) charter holder.

Rapat Komite Audit

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam- LK No. Kep-29/PM/2004 tertanggal 24 September 2004 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Komite Audit wajib mengadakan rapat sebanyak paling tidak sama dengan jumlah ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Berdasarkan Piagam Komite Audit dari Dewan Komisaris, Komite Audit telah mengadakan lima kali rapat pada tahun 2013 dengan pembahasan meliputi laporan keuangan, masalah hukum dan lingkungan, proses pengendalian internal dan manajemen risiko, kegiatan audit internal, dan masalah audit. Selain rapat rutin, anggota Komite Audit, secara bersama-sama atau sendiri, juga bertemu dengan Kepala Audit Internal untuk membahas perkembangan terbaru maupun untuk memberikan dukungan teknis bagi proses audit internal.

Berikut ini adalah ringkasan aktivitas utama yang dilakukan, termasuk kajian atas:

- Presentasi dari auditor eksternal Perseroan mengenai audit atas laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2012 dan 2013, termasuk komentar mengenai perbaikan proses-proses pengendalian serta tanggapan manajemen.
- Laporan keuangan triwulanan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2013, 30 Juni 2013, 30 September 2013, dan 31 Desember 2013
- Penilaian dan perlakuan pajak yang berpotensi berdampak pada laporan keuangan Perseroan
- Kasus hukum dan lingkungan berpotensi memiliki dampak keuangan terhadap Perseroan
- Laporan audit internal serta status rekomendasi auditor dan implementasinya

Meetings of the Audit Committee

According to Bapepam-LK Regulation No. IX.1.5, attachment to the Decision of Chairman of Bapepam-LK No. Kep-29/PM/2004, dated September 24, 2004, regarding Guidelines on Establishment and Working Implementations of Audit Committee, the Audit Committee shall hold meetings whose frequency must meet minimum requirements of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association.

In accordance with the Charter of the Audit Committee of the Board of Commissioners, there were five Audit Committee meetings in 2013. At those meetings, discussion covered financial reporting, potential legal and environmental issues, internal control and risk management processes, internal audit activities and audit issues. Other than the regular Audit Committee meetings, members – either as a group or individually – met with the Head of Internal Audit to discuss any new developments and to provide technical support for the internal audit process.

The following is a summary of the primary activities undertaken, which included reviews of:

- Presentations given by the Company's external auditor with regard to the audit of the annual financial statements of the Company for fiscal years 2012 and 2013, including comments with respect to control improvements and management's responses.
- The quarterly financial statements for the periods ended March 31, 2013, June 30, 2013, September 30, 2013 and December 31, 2013.
- Tax assessments and treatments that potentially affect financial statements.
- Legal and environmental cases with potential financial impact on the Company.
- Internal audit reports and the status of audit recommendations and their implementation.

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

- Rencana kerja audit internal untuk tahun 2013 beserta penilaian risiko, lingkup, dan metodologi audit internal yang relevan
- Revisi atas Piagam Unit Audit Internal

- The Internal Audit plan for 2013 and its relevant internal audit risk assessment, scopes and methodology.
- Revision of the Internal Audit Unit Charter.

Meetings of the Audit Committee in 2013

Meetings of the Audit Committee in 2013

Anggota Komite Audit Members of the Audit Committee	Jumlah Rapat Yang Harus Dihadiri Number of meetings eligible to attend	Jumlah Rapat Yang Dihadiri Meetings attended
Arief T. Surowidjojo	5	5
Erry Firmansyah	5	5
Sidharta Utama	5	5

Komite Tata Kelola

Dewan Komisaris membentuk Komite Tata Kelola, yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris terkait aspek tata kelola perusahaan dan kompensasi.

Dalam menjalankan peran, tugas dan kewajibannya, Komite Tata Kelola berpedoman pada Piagam Komite Audit dari Dewan Komisaris, tanggal 28 Oktober 2010, yang disusun untuk melengkapi, dan bukan untuk menggantikan, atau memberikan interpretasi atas Anggaran Dasar Perseroan; visi dan misinya; Piagam Dewan Komisaris; Piagam Direksi; atau hukum dan peraturan yang berlaku. Piagam Komite Tata Kelola dari Dewan Komisaris tersedia di dalam situs web Perseroan. Komite Tata Kelola bekerja dan bertukar informasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi, serta bekerja dengan, melalui Direksi, karyawan Perseroan dan pihak-pihak eksternal yang terkait.

Corporate Governance Committee

To assist in performing its oversight responsibilities regarding corporate governance and compensation, the Board of Commissioners established the Corporate Governance Committee, which reports directly to the Board of Commissioners.

In carrying out its role, duties and responsibilities, the Corporate Governance Committee is guided by the Charter of the Audit Committee of the Board of Commissioners, dated October 28, 2010, that was established to complement, and not substitute for, nor provide an interpretation of, PT Vale's Articles of Association; its mission and vision; the Charter of the Board of Commissioners; the Charter of the Board of Directors; or applicable laws and regulations. The Charter of the Corporate Governance Committee of the Board of Commissioners is available at the Company's website. The Corporate Governance Committee works with and exchanges information with the Board of Commissioners and the Board of Directors and, through the Board of Directors, the Company's employees and relevant external parties.

Setiap anggota Komite Tata Kelola diharapkan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian, bertanggung jawab penuh dan sesuai dengan: (i) hukum dan undang-undang yang berlaku; (ii) semua persyaratan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia; (iii) Anggaran Dasar dan kebijakan Perseroan; (iv) Piagam Komite Tata kelola dari Dewan Komisaris dan (v) instruksi Dewan Komisaris.

Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola

Tugas dan tanggung jawab utama Komite Tata Kelola adalah untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris terkait dengan aspek tata kelola perusahaan, nominasi dan remunerasi. Komite Tata Kelola bertanggung jawab memantau secara tahunan perkembangan praktik terbaik, standar, maupun persyaratan tata kelola perusahaan yang dikeluarkan oleh regulator, self-regulatory organization (SRO) dan bursa efek. Komite Tata Kelola juga bertugas menetapkan prosedur untuk melakukan pengawasan atas evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta secara rutin melakukan penilaian atas kinerja dan efektivitas Dewan Komisaris maupun Direksi sebagai satu kesatuan.

Komite Tata Kelola mengidentifikasi individu-individu yang dianggap kompeten untuk jabatan Komisaris Independen dalam Dewan Komisaris sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan, serta memilih, atau merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, kandidat-kandidat yang dinominasikan untuk dipilih menjabat sebagai Komisaris Independen dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham. Selain itu, Komite Tata Kelola juga bertugas mengkaji independensi anggota Dewan Komisaris, terutama pihak Komisaris Independen, serta

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

Members of the Corporate Governance Committee are expected to perform their duties and responsibilities in good faith and with due care, having full responsibility and in accordance with: (i) all prevailing laws and regulations; (ii) all requirements of the Authority of Financial Services and the Indonesian Stock Exchange; (iii) the Company's AoA and policies; (iv) the Charter of the Corporate Governance Committee of the Board of Commissioners and (v) instructions received from the Board of Commissioners.

Duties and responsibilities of Corporate Governance Committee

The main duties and responsibilities of the Corporate Governance Committee are to assist the Board of Commissioners with respect to corporate governance, nomination, and compensation matters. The Corporate Governance Committee is responsible for the annual monitoring of developments in corporate governance best practices; the standards and requirements of all applicable regulatory agencies, self-regulatory bodies and stock exchanges; and for establishing procedures for the Corporate Governance Committee to exercise oversight in the evaluation of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, assessing, on a regular basis, the performance and effectiveness of each of the Board of Commissioners and the Board of Directors as a whole.

The Corporate Governance Committee identifies candidates, who are considered to be qualified to become Independent Commissioners on the Board of Commissioners according to criteria approved by the Board of Commissioners, and selects, or recommends to the Board of Commissioners, the nominees to stand for election as Independent Commissioners at the Company's AGMS. The Corporate Governance Committee is also responsible for reviewing the independence of the members of the Board of Commissioners, particularly the Independent

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

mempertimbangkan kemungkinan adanya benturan kepentingan di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Terkait dengan aspek kompensasi, Komite Tata Kelola bertanggung jawab untuk:

1. Mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan komisaris mengenai kompensasi untuk Komisaris Independen serta anggota komite-komite Dewan Komisaris.
2. Mengkaji dan memberikan persetujuan atas kompensasi dan remunerasi bagi Direksi dan pejabat senior Perseroan.
3. Mengawasi administrasi program-program kompensasi insentif di PT Vale dan menyetujui pemberian insentif dalam program-program tersebut.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Komite Tata Kelola diberikan kewenangan oleh Dewan Komisaris untuk melakukan segala kegiatan yang diperlukan dalam lingkup tanggung jawabnya, termasuk untuk mencari dan meminta, pada setiap waktu, informasi yang sekiranya diperlukan dari Dewan Komisaris, Direksi, dan melalui Direksi, karyawan Perseroan serta pihak-pihak luar yang relevan. Komite Tata Kelola bersama Dewan Komisaris menyiapkan dan mengkaji evaluasi kinerja tahunan Komite Tata Kelola, untuk diperbandingkan dengan persyaratan dalam Piagam Komite Tata Kelola. Evaluasi tersebut juga mencakup rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai perbaikan yang dianggap perlu oleh Komite atau yang sebaiknya dilakukan untuk menyempurnakan Piagam Komite Tata Kelola.

Commissioners, and questions any potential conflicts of interest involving the members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Regarding compensation, the Corporate Governance Committee's is responsible for

1. Reviewing and making recommendations as to the compensation of the Independent Commissioners and committee members to the Board of Commissioners
2. Reviewing and approving the compensation and remuneration of the PT Vale's Board of Directors and senior officers
3. Overseeing the administration of PT Vale's incentive compensation plans and approving awards of incentive compensation under such plans

In performing its duties and responsibilities, the Corporate Governance Committee is authorized by the Board of Commissioners to perform any activity within its scope of responsibilities and to seek and request, at any time, information it reasonably requires from the Board of Commissioners, Board of Directors and, through the Board of Directors, the Company's employees and relevant external parties. The Corporate Governance Committee prepares and reviews, with the Board of Commissioners, an annual performance evaluation of the Corporate Governance Committee, which compares the performance of the Corporate Governance Committee with the requirements of the Corporate Governance Committee Charter. The performance evaluation also recommends to the Board of Commissioners any improvements to the Corporate Governance Committee's charter considered necessary or desirable by the Committee.

Keanggotaan Komite Tata Kelola

Komite Tata Kelola terdiri dari tidak kurang dari empat anggota, dengan semua anggota memiliki jangka waktu masa jabatan selama dua tahun. Dewan Komisaris menunjuk salah satu dari keempat anggota tersebut sebagai ketua komite. Selain itu, setiap anggota Komite Tata Kelola juga merupakan anggota Dewan Komisaris.

Pada akhir tahun 2013, terdapat empat anggota Komite Tata Kelola yang dipilih setiap tahunnya dari Dewan Komisaris, termasuk dua nominator dari Vale Canada Limited, satu nominator dari Sumitomo dan satu Komisaris Independen.

Rincian anggota Komite Tata Kelola adalah sebagai berikut:

Ketua	: Ricardo Carvalho Ditunjuk pada tahun 2012
Anggota	: Mark Travers Ditunjuk pada tahun 2010
Anggota	: Mikinobu Ogata Ditunjuk pada tahun 2012
Anggota	: Arief T. Surowidjojo Ditunjuk pada tahun 2009

Biografi anggota Komite Tata Kelola telah dimuat dalam bab Informasi Perseroan dalam laporan tahunan ini.

Rapat Komite Tata Kelola

Selama tahun 2013, Komite Tata Kelola mengadakan rapat pada tanggal 28 Maret 2013.

Membership of Corporate Governance Committee

The Corporate Governance Committee consists of no less than four members. All members of the Corporate Governance Committee are eligible to serve for a two-year term. The Board of Commissioners designates the chairman from among those members. Each member of the Corporate Governance Committee is also a member of the Board of Commissioners.

At the end of 2013, the committee consisted of four members elected annually from the Board of Commissioners, including two nominees of Vale Canada Limited, one nominee of Sumitomo and one Independent Commissioner.

Members of the Corporate Governance Committee are as follows:

Chairman	: Ricardo Carvalho Appointed in 2012
Member	: Mark Travers Appointed in 2010
Member	: Mikinobu Ogata Appointed in 2012
Member	: Arief T. Surowidjojo Appointed in 2009

Biographies of Corporate Governance Committee members are included in the Corporate Information section of this report.

Meetings of the Corporate Governance Committee

During 2013, the Corporate Governance Committee held meeting March 28, 2013.

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

Rapat Komite Tata Kelola

Meetings of the Corporate Governance Committee

Anggota Komite Tata Kelola Members of the CGC	Jumlah Rapat Yang Harus Dihadiri Number of meetings eligible to attend	Jumlah Rapat Yang Dihadiri Meetings attended
Ricardo de Carvalho	1	1
Arief T. Surowidjojo	1	1
Mark Travers	1	1
Mikinobu Ogata	1	1

Sekretaris perusahaan

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.4 dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No.1-A, PT Vale telah menunjuk seorang Sekretaris Perusahaan untuk berperan sebagai penghubung antara Perseroan, organ-organ perusahaan, dan para pemangku kepentingan Perseroan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas berbagai fungsi terkait dengan kepatuhan dan pengungkapan informasi, khususnya yang menyangkut pasar modal, Bapepam-LK, pemegang saham dan masyarakat.

Tugas dan Kewajiban Sekretaris Perusahaan

Karena PT Vale melakukan pencatatan daftar pemegang saham secara internal, Sekretaris Perusahaan berperan penting dalam memastikan bahwa Daftar Pemegang Saham terus diperbaharui, tersedianya informasi yang komprehensif dan tepat waktu mengenai kinerja dan prospek usaha Perseroan bagi pemegang saham, serta terpenuhinya seluruh kewajiban Perseroan terhadap pemegang saham.

Sekretaris Perusahaan berperan penting dalam penatalaksanaan urusan Direksi serta urusan korporat penting lainnya. Sekretaris Perusahaan hadir dalam rapat-rapat strategis Direksi agar dapat mengetahui perkembangan terkini terkait rencana strategis, operasional dan masalah-masalah penting yang dihadapi Perseroan. Sekretaris Perusahaan memastikan

Corporate secretary

With reference to Bapepam and LK Regulation No. IX.1.4 and Indonesian Stock Exchange (IDX) Regulation No. I-A, PT Vale must appoint a Corporate Secretary to act as the liaison between the Company, its corporate entities and stakeholders. The Corporate Secretary is responsible for various activities related to compliance and disclosure of information, especially those dealing with the capital market, OJK, shareholders and the public.

Duties and Responsibilities of Corporate Secretary

As PT Vale manages its shareholder register internally, it is important that the Corporate Secretary maintains an updated Shareholder List and provides shareholders with comprehensive and timely information about the Company's business performance and prospects, as well as ensuring that the Company meets all obligations to the shareholders.

The Corporate Secretary has a key role in the administration of the Board of Directors and critical corporate matters. The Corporate Secretary attends all strategic Board of Directors' meetings to keep abreast of the Company's strategic plans, operations and potential concerns. The Corporate Secretary ensures that all management meetings are properly recorded and that

bahwa seluruh rapat manajemen terdokumentasikan dengan baik dan bahwa dokumentasi tindakan-tindakan Direksi mencerminkan pelaksanaan yang semestinya atas tugas-tugas yang dipercayakan kepada Direksi. Sekretaris Perusahaan juga memastikan bahwa Direksi telah mengikuti prosedur yang benar dalam tiap aksi korporasi, terutama yang bersifat signifikan, seperti dalam pembagian dividen sesuai dengan peraturan pasar modal.

Sekretaris Perusahaan juga bertugas memberikan nasehat mengenai aspek tata kelola perusahaan, terutama yang terkait dengan pemegang saham, termasuk Rapat Umum Pemegang Saham. Secara internal, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas pedoman tata kelola perusahaan di Perseroan. Sekretaris Perusahaan memastikan bahwa seluruh tindakan Perseroan telah sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku dari pihak regulator, self-regulatory organization (SRO), dan otoritas pasar modal.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris Perusahaan dituntut untuk mengetahui perkembangan terakhir peraturan pasar modal maupun praktik dan pedoman tata kelola perusahaan. Apabila diperlukan, Sekretaris Perusahaan berkoordinasi dengan Komite Tata Kelola yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tata kelola perusahaan di lingkungan Perseroan.

Ratih Amri

Sekretaris Perusahaan dan Direktur Legal 14 Februari 2011 – sekarang

Ratih Amri bergabung dengan PT Vale pada bulan September 2005 sebagai Penasihat Perusahaan dan menjabat sebagai Direktur Legal pada bulan April 2007, kemudian sebagai Sekretaris Perusahaan pada bulan Februari 2011. Sebagai Direktur Legal, beliau bertanggung jawab atas masalah-masalah hukum,

the records of the Board of Directors' actions reflect the proper exercise of those fiduciary duties. It also ensures that Board of Directors follows the proper steps for all corporate actions, particularly the major ones, such as declarations of dividends in compliance with capital market regulations.

The Corporate Secretary also provides advice on corporate governance issues, particularly shareholder-related matters, including the AGMS. Internally, the Corporate Secretary is responsible for the Company's corporate governance principles and guidelines. The Corporate Secretary ensures that all of the Company's actions are in compliance with the requirements of all applicable regulatory agencies, self-regulatory bodies and stock exchanges.

In performing its duties and responsibilities, the Corporate Secretary keeps itself abreast of the development of capital market regulations and corporate governance practices and guidelines. If required, the Corporate Secretary may also liaise with the Corporate Governance Committee, which is responsible for the Company's corporate governance practices.

Ratih Amri

Corporate Secretary and Director of Legal February 14, 2011 – present

Ms. Amri joined PT Vale in September 2005 as Corporate Counsel, assuming the role of Director of Legal in April 2007, and of Corporate Secretary in February 2011. As Director of Legal, she is responsible for various legal matters, among others, strategic corporate legal matters, compliance, litigation, industrial relations and

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

antara lain, masalah hukum strategis perusahaan, kepatuhan, litigasi, hubungan industrial serta aspek hukum dari masalah terkait operasional dan proyek. Beliau juga memiliki kewajiban tambahan seperti masalah kesekretariatan perusahaan terkait dengan Hukum Pasar Modal dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, beliau memberikan laporan langsung kepada Direksi.

Ratih Amri memulai karirnya sebagai kolega di salah satu firma hukum terkemuka di Jakarta. Beliau lulus dengan gelar Sarjana Hukum dan Ekonomi dari Universitas Indonesia, serta gelar Master di bidang hukum bisnis internasional dari Universitas Leiden, Belanda.

Hubungan investor

Selain pengungkapan informasi korporat yang bersifat wajib, Hubungan Investor juga bertugas memastikan bahwa investor dan calon investor dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan terkini di Perseroan maupun di industrinya. Fungsi ini memadukan aspek keuangan, komunikasi, pemasaran dan kepatuhan dengan peraturan pasar saham, sehingga dapat tercipta komunikasi dua arah yang efektif antara Perseroan dengan komunitas finansial dan pihak-pihak lain, yang kemudian mempengaruhi bentuk valuasi yang wajar atas nilai saham Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Hubungan Investor
Tugas-tugas utama Hubungan Investor adalah:

1. Membentuk citra Perseroan yang positif dengan membina hubungan yang baik dengan kalangan investor/analisis secara interaktif, terutama melalui penyampaian informasi mengenai kinerja dan prospek Perseroan secara berkala. Informasi bagi investor/analisis disampaikan melalui *roadshow*, *analyst meetings*, *earning calls*, temu investor, dan media komunikasi lain-lain.

the legal aspects of operational and project-related matters. Additional responsibilities include corporate secretarial matters related to Capital Market Law and good corporate governance principles. In carrying out her duties and responsibilities, she reports directly to the Board of Directors.

Ms Amri began her career as an associate in one of Jakarta's leading law firms. She holds bachelor's degrees in law and economics, both from the University of Indonesia, and a master's degree in international business law from the University of Leiden, the Netherlands.

Investor relations

In addition to releasing the required corporate information, Investor Relations ensures that investors and potential investors are kept abreast of important developments, both with the Company and within the business environment. This function integrates finance, communications, marketing, and compliance with securities regulations, allowing for the creation of effective two-way communication between the Company, the financial community, and other parties, to ultimately influence the formation of a reasonable valuation on the Company's shares.

Duties and Responsibilities of Investor Relations
The main duties of Investor Relations are:

1. Building a positive corporate image through fostering good relations with investors/analysts in an interactive manner and through periodic information publication, mainly concerning Company performance and prospects. Information delivery to investors/analysts is accomplished through road shows, analyst meetings, earnings calls, investor conferences and other communication media.

2. Mengamati perkembangan di pasar modal dan memberikan saran kepada manajemen mengenai saham Perseroan.
3. Melakukan korespondensi dan menanggapi permintaan informasi dari komunitas finansial.

Sebagai perusahaan publik yang mengedepankan prinsip keterbukaan informasi, PT Vale senantiasa mengupayakan peningkatan kualitas informasi maupun akses terhadap informasi bagi masyarakat dan investor melalui situs web Perseroan, yang menyajikan informasi terkini mengenai kemajuan pengembangan proyek, pergerakan harga saham, aksi korporasi dan informasi lain yang penting. Informasi perkembangan terkini juga disampaikan dalam format tertulis yang dikirim kepada pihak-pihak yang relevan.

Unit Audit Internal

Piagam Unit Audit Internal (IAU) PT Vale yang telah diperbaharui pada tahun 2011 merupakan pedoman bagi IAU dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara lebih independen. Piagam tersebut menetapkan bahwa IAU bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, dan secara administratif kepada Presiden Direktur Perseroan. Anggota Direksi dapat meminta IAU untuk melakukan audit/assessment khusus tertentu, bersama dengan alokasi sumber daya yang diperlukan, dengan persetujuan Komite Audit dan Presiden Direktur.

Secara umum, Piagam Audit Internal menetapkan bahwa fungsi utama IAU adalah untuk memberikan layanan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif dalam rangka meningkatkan nilai Perseroan maupun efektivitas operasionalnya, melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses-proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola Perseroan.

2. Observing stock market developments and giving advice to management concerning the Company shares
3. Performing correspondence and responding to inquiries from the financial community

As a publicly-listed company upholding the principles of information transparency, PT Vale consistently strives to improve information quality and access for the general public and investors through its official website, which presents recent information on project progress, share price movement, corporate actions, and other pertinent information. PT Vale also administers mailings that convey up-to-date information to relevant parties.

Internal Audit Unit

PT Vale's 2011 renewed Charter of the Internal Audit Unit (IAU) serves as a working guideline for the IAU in performing its duties and responsibilities with greater independence. This charter stipulates that the IAU reports directly to the Board of Commissioners through the Audit Committee and administratively to the President Director of the Company. A member of the Board of Directors can request the IAU to perform a specific audit/assessment, including resource allocation, with the approval of the Audit Committee and President Director.

In general, the Charter dictates that the IAU's primary function is to provide independent, objective assurance and consulting services to increase the value of the Company, and to improve the Company's operations by bringing a systematic, disciplined approach to evaluating and improving the effectiveness of its risk management, control and governance processes.

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

Secara khusus, IAU melakukan penilaian atas pengendalian, prosedur, dan sistem yang ada untuk memastikan:

1. Keandalan dan integritas dari informasi keuangan dan operasional, maupun dari cara cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, memperoleh, dan melaporkan informasi tersebut
2. Keutuhan aset Perseroan
3. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur Perseroan maupun terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dari sisi biaya

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, IAU bekerja sama dan memperoleh informasi dari Dewan Komisaris, Direksi, Group Risk Management, dan auditor eksternal Perseroan.

Unit Audit Internal bertanggung jawab atas hal-hal berikut:

1. Rencana Kerja Audit Internal - mengembangkan rencana kerja audit tahunan yang fleksibel dengan menggunakan metodologi berbasis risiko yang sesuai, termasuk terhadap risiko atau aspek pengendalian lain yang diidentifikasi oleh Direksi, serta menerapkan rencana kerja audit internal yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, termasuk, apabila dipandang perlu, penugasan atau proyek khusus sebagaimana diminta oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
2. Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko - mengkaji dan menilai sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, termasuk kepatuhan/kesesuaiannya dengan kebijakan-kebijakan Perseroan;

In particular, the IAU assesses the controls, procedures, and systems in place to ensure:

1. Reliability and integrity of financial and operational information, and the means used to identify, classify, secure, and report such information
2. Safeguarding of assets
3. Compliance with Company policies and procedures, as well as the prevailing laws and regulations
4. Cost-effective and efficient uses of resources

In performing its duties and responsibilities, the IAU works with and exchanges information with the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Company's Risk Management Group and the Company's external auditors.

The Internal Audit Unit is responsible for the following matters:

1. Internal Audit Plan – Developing a flexible annual audit plan using an appropriate risk-based methodology, including any risks or control concerns identified by the Board of Directors, and implementing the internal audit plan, as approved by the Board of Commissioners, including, and as appropriate, any special tasks or projects requested by the Board of Directors and/or Board of Commissioners
2. Internal Control and Risk Management System – Reviewing and assessing internal control and risk management systems and determining whether they are in compliance with the Company's policies

3. Efisiensi dan Efektivitas - Mengkaji dan menilai efisiensi dan efektivitas aspek keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan bagian-bagian lain Perseroan;
4. Langkah Perbaikan - Memantau, menganalisis dan melaporkan implementasi serta dampak dari langkah-langkah perbaikan yang direkomendasikan oleh Unit Audit Internal, Direksi dan Dewan Komisaris;
5. Audit Khusus - Melakukan penugasan audit khusus sebagaimana diperlukan dan diminta oleh Direksi atau Dewan Komisaris;
6. Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku - Mengkaji dan menilai kecukupan dari kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundangan yang berlaku bagi Perseroan, termasuk undang-undang dan peraturan pasar modal;
7. Kepatuhan terhadap Standar Internasional bagi Praktik Profesi Audit Internal – Memantau perubahan-perubahan yang signifikan pada prinsip, kebijakan, pengendalian, prosedur dan praktik audit internal di Perseroan sebagaimana diusulkan atau dipertimbangkan oleh auditor eksternal Perseroan, Komite Audit, atau Direksi;
8. Lain-Lain - Melakukan penugasan atas hal-hal lain sebagaimana dapat diminta oleh Direksi dari waktu ke waktu.

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, IAU mempersiapkan laporan-laporan berikut ini:

1. Laporan Audit Internal – Menyampaikan Laporan Audit Internal tahunan kepada Presiden Direktur, Direksi dan Dewan Komisaris mengenai kecukupan dan efektivitas proses-proses yang ada untuk

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

3. Efficiency and effectiveness – Reviewing and assessing the effectiveness and efficiency of the financial, accounting, operational, human resources, information technology and other departments of the Company
4. Corrective actions – Monitoring, analyzing and reporting on the implementation and impact of corrective actions recommended by the Internal Audit Unit, the Board of Directors and the Board of Commissioners
5. Special audit – Carrying out special audits when required and requested by the Board of Directors or the Board of Commissioners
6. Compliance with applicable laws and regulations – Reviewing and assessing of the adequacy of the Company's compliance with laws and regulations applicable to the Company, including capital market law and regulations
7. Compliance with International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing – Monitoring significant changes to the Company's internal auditing principles, policies, controls, procedures and practices proposed or contemplated by the Company's external auditor, the Audit Committee of the Board of Commissioners (the Audit Committee) or the Board of Directors
8. Miscellaneous – Taking action on such other matters as the Board of Directors may from time to time request

Reporting is a primary obligation of the IAU. This obligation includes:

1. Internal Audit Report – Preparing an annual report to the President Director, Board of Directors and the Board of Commissioners on the adequacy and effectiveness of the Company's processes

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

mengendalikan aktivitas dan risiko Perseroan, termasuk rekomendasi dan informasi objektif mengenai temuan-temuan audit.

2. Kajian berkala atas tindakan yang direkomendasi
 - Memberikan kajian berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas hal-hal berikut:
 - i. Kecukupan dari tindakan yang diambil atas hal-hal yang sebelumnya telah diidentifikasi oleh Direksi atau Unit Audit Internal sebagai memerlukan tindak lanjut.
 - ii. Perkara yang signifikan terkait dengan proses-proses yang ada untuk mengendalikan aktivitas Perseroan dan afliasinya, termasuk potensi perbaikan atas proses-proses tersebut.
 - iii. Status dan hasil dari rencana kerja audit tahunan dan kecukupan sumber daya Unit Audit Internal, dan
 - iv. Kemajuan yang dicapai sesuai matriks kinerja yang ditetapkan.

Unit Audit Internal terdiri dari setidaknya satu auditor internal. Unit Audit Internal PT Vale saat ini terdiri dari dua auditor internal; yang keduanya telah memiliki sertifikasi Certified Internal Auditor (CIA). Unit Internal Audit tidak diperbolehkan menjabat posisi di departemen atau divisi operasional Perseroan, selain di Unit Audit Internal. Personil auditor bertanggung jawab kepada Kepala Unit Audit Internal.

Kepala Audit Internal diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden Direktur, dengan persetujuan sebelumnya dari Dewan Komisaris. Presiden Direktur dapat memberhentikan Kepala Audit Internal sewaktu-waktu dengan persetujuan Dewan Komisaris apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan peraturan pasar modal, gagal atau tidak mampu

for controlling its activities and managing its risk, including recommendations and objective information on internal audit results

2. Periodic assessment of recommended actions
 - Providing periodic assessment to the Board of Directors and the Board of Commissioners of:
 - i. The adequacy of action taken regarding matters previously identified by the Board of Directors or the Internal Audit Unit as requiring action
 - ii. Significant issues relating to the Company's processes for controlling the activities of the Company and its affiliates, including potential improvements to those processes
 - iii. Status and results of the annual audit plan and sufficiency of Internal Audit Unit resources
 - iv. Progress towards achieving defined performance metrics

The Internal Audit Unit consists of at least one internal auditor. The Internal Audit Unit of PT Vale currently is composed of two internal auditors; who are fully Certified Internal Auditor (CIA). Members of the Internal Audit Unit are prohibited from holding a position as an officer of other operational departments or divisions of the Company outside of the Internal Audit Unit. The auditors of the Internal Audit are responsible to the IAU Head.

The Head of the Internal Audit is appointed and discharged by the President Director, subject to prior approval of the Board of Commissioners. The President Director may terminate the Head upon approval from the Board of Commissioners if the Head does not meet the requirements of Capital Market Regulations, fails to carry out his/her functions or is incapable in the

dalam menjalankan fungsinya. Kepala Audit Internal bertanggung jawab secara fungsional kepada Dewan Komisaris dan secara administratif kepada Presiden Direktur.

Tiap personil di Unit Audit Internal diharuskan untuk:

1. Memiliki integritas, profesionalisme, independensi, kejujuran dan objektivitas.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam praktik audit dan disiplin ilmu terkait lainnya.
3. Memiliki pengetahuan akan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal dan peraturan lain yang berlaku bagi Perseroan.
4. Berkomunikasi secara efektif.
5. Mematuhi standar profesi yang relevan seperti dari Institute of Internal Auditors.
6. Mematuhi kode etik profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Audit Internal Indonesia dan/ atau standar Kode Etik Audit Internal yang berlaku umum secara internasional.
7. Memahami praktik tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang ada di Perseroan.
8. Mematuhi Kode Etik Perseroan.
9. Mengembangkan pengetahuan dan kompetensi audit internal yang dimiliki, antara lain dengan senantiasa mengikuti perkembangan terbaru serta praktik terbaik di profesi audit internal.

Unit Audit Internal wajib untuk:

1. Mengkaji dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris perbaikan yang dianggap perlu pada Piagam Audit Internal.
2. Mengevaluasi kinerjanya secara berkala dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Dewan Komisaris.
3. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

role. The Head is responsible functionally to the Board of Commissioners and administratively to President Director.

Each member of the Internal Audit Unit is required to:

1. Display integrity, professionalism, independence, honesty and objectivity
2. Be knowledgeable and experienced in audit practices and other relevant sciences
3. Have knowledge of laws and regulations relating to capital markets and other laws and regulations relevant to the Company
4. Effectively communicate
5. Comply with professional standards issued by applicable internal audit associations, such as The Institute of Internal Auditors
6. Comply with the code of ethics established by the Indonesian Internal Audit Association and/or with generally and internationally acceptable Internal Audit Code of Ethics
7. Understand the Company's corporate governance practices and risk management plan
8. Comply with the Company's code of conduct
9. Maintain and build upon his/her knowledge and competence in the area of internal audit by, among other things, keeping abreast of new developments and best practices in the industry

The Internal Audit Unit:

1. Reviews and recommends to the Board of Commissioners updates to this Charter as appropriate
2. Evaluates its performance and presents such evaluation to the Board of Commissioner on a regular basis
3. Maintains the confidentiality of all Company documentation, data and information

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

4. Mematuhi seluruh kebijakan perseroan (termasuk, tanpa terbatas, Kebijakan Perdagangan Saham Perseroan dan Kebijakan Pengungkapan Informasi Perseroan, dan
5. Bekerja sama dengan Komite Audit Perseroan.

Glorinophika

Kepala Unit Audit Internal Saat Ini 1 September 2013 – sekarang

Glorinophika bergabung dengan PT Vale pada tahun 2003 sebagai anggota Unit Audit Internal dan ditunjuk sebagai Kepala Unit Audit Internal Saat Ini, efektif sejak tanggal 1 September 2013. Beliau merupakan lulusan Universitas Indonesia pada tahun 2002 dengan gelar Sarjana Akuntansi. Beliau memiliki sertifikat CIA dan saat ini tengah menyelesaikan studi psikologi sumber daya manusia di Universitas Indonesia.

Kerangka Kerja Pengendalian Internal

PT Vale merupakan entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung oleh Vale S.A. (Vale), perusahaan publik yang tercatat di Amerika Serikat. Oleh karenanya, Vale wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan bab 404 Sarbanes-Oxley Act 2002, peraturan perundangan AS mengenai kewajiban pelaporan bagi perusahaan. Vale telah mengembangkan kerangka kerja pengendalian internal atas pelaporan keuangan berdasarkan standar Internal Control - Integrated Framework yang dikeluarkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Kerangka kerja ini diterapkan di seluruh entitas anak Vale, termasuk PT Vale.

Kerangka kerja pengendalian internal tersebut mencakup:

1. Matriks Kewenangan, yang mengatur persetujuan atas transaksi dan fungsi-fungsi.
2. Kajian dan pengelolaan risiko akibat perubahan bisnis yang signifikan.

4. Complies with all Company policies (including, without limitation, the Company's Securities Trading Policy and Information Disclosure Policy)
5. Cooperates with the Audit Committee

Glorinophika

Acting Head of Internal Audit Unit 1 September 2013 - present

Ms. Glorinophika joined PT Vale in 2003 as member of IAU and was appointed as Acting Head of Internal Audit, effective as of September 1, 2013. Ms. Glorinophika graduated from University of Indonesia in 2002 and holds a bachelor degree in accounting. She is a Certified Internal Auditor and currently is studying psychology of human resources at the University of Indonesia.

Internal control framework

PT Vale is an indirect subsidiary of Vale S.A. (Vale), a public company registered in the United States. As such, Vale is required to comply with Section 404 requirements of the Sarbanes-Oxley Act 2002, a US regulation dealing with corporate reporting and related requirements. Vale has developed an internal control framework over financial reporting based on the framework established in Internal Control – Integrated Framework, issued by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). This framework is applied in all subsidiaries of Vale including PT Vale.

The internal control framework addresses:

1. An Authority Matrix to regulate and govern approvals of transactions and functions
2. The review and management of business risks due to significant changes

3. Kebijakan, prosedur, dan panduan.
4. Aktivitas pengendalian atas pelaporan keuangan.
5. Manajemen perubahan untuk mengkomunikasikan informasi dan perubahan

Matriks kewenangan

Dewan Komisaris telah menyetujui Matriks Kewenangan yang mengatur bidang-bidang yang kompeten dengan limit persetujuan masing-masing agar terdapat pemisahan tugas yang jelas, serta merinci transaksi dan fungsi yang harus dimintakan persetujuan dari Presiden Komisaris atau Dewan Komisaris. Matriks Kewenangan tersebut juga selaras dengan Anggaran Dasar, yang menetapkan kewenangan dan tanggung jawab Direksi. Matriks Kewenangan diperbaharui dari waktu ke waktu sesuai tuntutan perubahan bisnis.

Perubahan bisnis

Implementasi sistem SAP pada Juli 2011 merupakan perubahan besar bagi Perseroan. Perubahan pada proses-proses bisnis dilakukan setelah melalui analisis terhadap faktor-faktor risiko dan dampak bisnis yang utama. PT Vale memanfaatkan sistem-sistem pengendalian yang terintegrasi (built-in) dalam template global sistem SAP. Pembaharuan berkala pada pengembangan sistem juga berdampak pada aktivitas operasional.

Sistem bekerja berdasarkan pada metodologi yang memastikan bahwa seluruh perubahan sistem didokumentasikan dan disetujui melalui proses alur kerja yang ada, termasuk dampak dan risiko serta rencana mitigasi yang terkait dengan perubahan bersangkutan.

3. Policies, procedures and guidelines
4. Control activities over financial reporting
5. Change management to communicate changes and information

Authority matrix

The Authority Matrix approved by the Board of Commissioners regulates operational competence areas with corresponding action approval limits to ensure proper segregation of duties, and indicates the transactions and functions that would be referred to the Chairman or the Board of Commissioners for approval. The Authority Matrix is also aligned with the Articles of Association, which define the authorities and responsibilities of the Board of Directors. There are regular updates to the Authority Matrix based on the evolving requirements of the business.

Business change

The implementation of the SAP system in July 2011 was a significant change for the Company. The changes to business processes were conducted through an analysis of key risk and business impacts. PT Vale leveraged on SAP's inherent controls and adopted the global template, which had controls built-in. There are regular updates on the development of the new system and its impact on operations.

The system is operated on a methodology that ensures all system changes are documented and approved through a workflow process, including documented impacts, risks and a mitigation plan associated with the change.

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

Kebijakan, prosedur dan panduan

PT Vale telah mengembangkan perangkat kebijakan dan prosedur formal bagi aspek keuangan maupun operasional. Kebijakan dan prosedur diformulasikan untuk memberikan standar-standar bagi pelaksanaan bisnis sesuai dengan Kode Etik, peraturan hukum, serta standar akuntansi.

Aktivitas-aktivitas utama di aspek keuangan dan akuntansi diatur oleh kebijakan dan prosedur yang selaras dengan Norma dan Kebijakan Global dari Vale.

Aktivitas pengendalian

Divisi Comptroller bertanggung jawab memperbaharui kebijakan dan prosedur akuntansi saat terjadi perubahan atau pembaharuan yang signifikan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Indonesia, atau saat menerima pembaharuan pada IFRS dari Departemen Akuntansi Vale Kanada.

Perseroan menerima informasi material terkini mengenai standar akuntansi ataupun peraturan baru dalam pelaporan keuangan dari auditor eksternal, konsultan independen dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), informasi berlangganan, perwakilan pemegang saham, serta Departemen Akuntansi Vale Kanada.

Setelah sistem SAP diimplementasikan, penilaian atas sistem pengendalian juga telah dilakukan saat pemakai melaporkan kelemahan-kelemahan atau yang diidentifikasi saat proses penilaian.

Pada tahun 2012, Perseroan melakukan kajian komprehensif atas profil akses SAP untuk memastikan bahwa pemisahan tugas telah berjalan dengan baik untuk menangani dan melakukan mitigasi setiap potensi risiko. Setelah periode stabilisasi, Perseroan

Policies, procedures and guidelines

PT Vale has a formal system of policies and procedures covering financial and operational areas. The policies and procedures are defined to set standards in the ways business is conducted in compliance with the Code of Ethical Conduct, legal and accounting standards.

All key financial and accounting activities are governed by finance policies and procedures in alignment with Vale Global Norms and Policies.

Control activities

The Comptroller department updates the accounting policies and procedures when there is a significant change or update in the Indonesian Financial Accounting Standard (PSAK) or when receiving any updates in the IFRS from the Accounting Department of Vale Canada.

The Company collects updated information on new accounting standards or regulations on financial reporting from the Company's external auditors, independent consultants and Indonesian Institute of Accountants, subscriptions, shareholder representatives, and the Vale Canada Accounting department.

Now that SAP is being implemented, the control assessment is also done whenever users report deficiencies or identified during assessments.

In 2012, the Company conducted a full SAP access profiles review to ensure the appropriate Segregation of Duties to address and mitigate any potential risks. The Company started mapping and revalidating the internal controls at a detailed level and created new process

mulai melakukan pemetaan dan re-validasi atas pengendalian internal di tingkat yang lebih detail, serta mengembangkan narasi proses, matriks risiko dan pengendalian serta bagan-alur baru di tahun 2013.

Proses-proses untuk Pelaporan Akun Umum dan Akhir Periode, Pengadaan dan Hutang juga dikaji dan diperbaharui pada tahun 2012.

Manajemen risiko

PT Vale menyadari bahwa keberhasilan kami juga bergantung pada seberapa baik kami mengelola risiko yang ada di setiap aspek operasional. Kami telah memiliki standar manajemen risiko serta sistem, proses dan sumber daya manajemen risiko yang mendukung pencegahan dan mitigasi risiko secara proaktif dan sistematis. Standar, sistem, proses dan sumber daya tersebut telah dikembangkan selaras dengan standar Vale dan disesuaikan seperlunya dengan konteks PT Vale.

Risiko terdapat di setiap tingkatan organisasi kami dan di sepanjang siklus bisnis kami. Oleh karenanya, diperlukan pengelolaan risiko strategis di tingkat perusahaan maupun pengelolaan risiko operasional sehari-hari. Perbedaan karakteristik pengelolaan kedua aspek risiko tersebut mensyaratkan adanya sistem dan sumber daya manajemen risiko yang berbeda pula. Meskipun demikian, proses dasar manajemen risiko adalah sama, seperti pada diagram berikut ini.

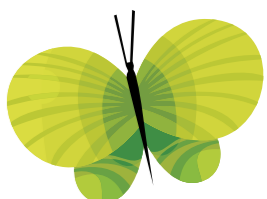
narratives, risk and control matrixes and flowcharts in 2013 after a stabilization period.

The General Account and Period End Reporting and the Procurement and Accounts Payables processes were also reviewed and updated in 2012.

Risk management

PT Vale acknowledges that risk is present in all operations and that our success depends on how well we manage it. We have a risk management normative, multiple risk management systems, and processes and resources in place to support a proactive and systematic approach to risk prevention and mitigation. This normative, and the management systems, processes and resources, are based on and aligned with Vale standards, which have been customized for PT Vale context.

Risks exist at all levels of our organization and throughout our entire business cycle. It is necessary to manage strategic, enterprise-level risk as well as day-to-day operational risks. As the requirements to address strategic risks are different from the requirements to address operational risks, it is necessary for PT Vale to have multiple risk management systems and resources. However, the underlying risk management process is the same and is shown in the diagram below:

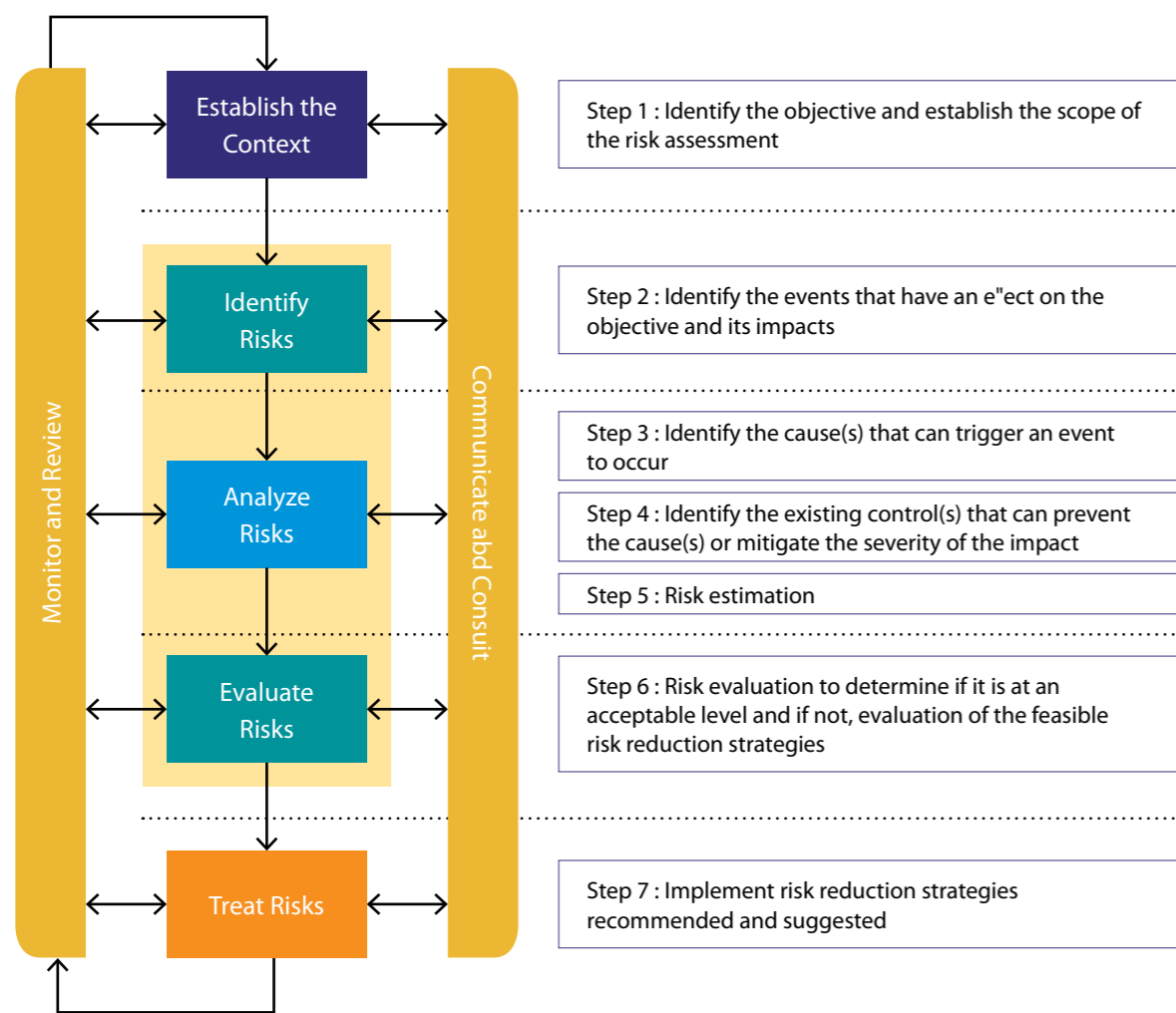


Tata kelola perusahaan
Corporate governance

Tata kelola perusahaan
Corporate governance

Proses manajemen risiko PT Vale

PT Vale risk management process



Manajemen risiko strategis

PT Vale memiliki sistem pengelolaan risiko strategis perusahaan yang disebut Framework for Integrated Risk Management (FIRM) yang sesuai dengan standar ISO 31000. Sistem FIRM digunakan untuk risiko-risiko yang bersifat strategis, yang berpengaruh pada keseluruhan organisasi kami dan berdampak negatif terhadap tujuan-tujuan usaha kami.

Strategic risk management

PT Vale's system for strategic, enterprise risk management is called the Framework for Integrated Risk Management (FIRM) and is ISO 31000 compliant. The FIRM is mainly used for risks that are strategic in nature, risks that impact the entire organization and risks that have a negative impact on our business objectives.

Sistem FIRM memberikan panduan dan perangkat untuk mengevaluasi dan mengelola risiko bagi tiap Risk Event strategis yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebelumnya. Panduan ini mensyaratkan dikembangkannya Maximum Foreseeable Loss (MFL) atau skenario terburuk yang mungkin ada dalam hal terjadi suatu Risk Event. Selain itu, sistem FIRM mensyaratkan adanya pemahaman akan faktor penyebab Risk Event, kemungkinan terjadinya faktor penyebab tersebut, serta tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan. Berbagai metode standar telah dikembangkan untuk menilai dan mengklasifikasi faktor penyebab, kemungkinan kejadian serta keseriusan dampak Risk Event.

Di PT Vale, proses ini merupakan kerja sama kelompok melalui workshop tahunan Enterprise Risk Assessment (ERA) dimana tim manajemen inti PT Vale, termasuk Direksi, berpartisipasi mendiskusikan Risk Event, penyebab, kemungkinan kejadian serta tingkat keseriusan dampaknya. Difasilitasi oleh Risk Specialist PT Vale, seluruh Risk Event yang ada di atas ambang batas tertentu dievaluasi menggunakan salah satu perangkat utama dalam FIRM yaitu Bowtie Analysis. Perangkat ini digunakan untuk memahami suatu Risk Event melalui hubungan yang ada antara faktor penyebab, kemungkinan kejadian risiko, dampak risiko, serta faktor-faktor pengendali yang ada untuk mencegah dan mitigasi risiko. Bowtie Analysis juga digunakan untuk mengembangkan faktor-faktor pengendali di masa mendatang untuk pencegahan dan mitigasi risiko.

Proses Bowtie Analysis dilakukan untuk setiap Risk Event yang diidentifikasi, dan hasilnya adalah nilai risiko residual. Besaran nilai ini merupakan indikator akan signifikansi suatu Risk Event dalam hal Risk Event tersebut terjadi setelah seluruh faktor pengendali yang

The FIRM provides guidelines and tools to assess and manage risks after various strategic Risk Events have been identified and agreed. These guidelines require us to articulate the Maximum Foreseeable Loss (MFL), that is, the plausible worst-case scenario should a Risk Event occur. In addition, the system requires us to have an understanding of Risk Event causes, the likelihood of these causes occurring and the impact severity should a Risk Event occur. There are standardized methods to assess and categorize the likelihood of the cause and the severity of the Risk Event impact.

This process is a team effort: PT Vale conducts an annual Enterprise Risk Assessment (ERA) workshop where key members of the PT Vale Management team, including its Board of Directors, discuss risk events, causes, likelihood of occurrence and impact severity. The workshop is facilitated by PT Vale Risk Specialists and all risk events above predefined thresholds are further assessed using a primary FIRM tool called the Bowtie Analysis. It is used to understand Risk Events by highlighting the relationships between causes, events, impacts, and existing preventive and mitigating controls. Future preventive and mitigating controls are also discussed and developed in the Bowtie Analysis.

One Bowtie Analysis is prepared for one Risk Event and the result is a residual risk materiality score. This residual risk score indicates the significance of a Risk Event should it occur after all existing and future controls are implemented and functioning as designed. Based

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

ada saat ini maupun yang akan datang telah diterapkan dan berfungsi sesuai dengan direncanakan. Dari hasil Enterprise Risk Management Cycle 2012, berikut ini adalah risiko-risiko utama PT Vale pada tahun 2012 berdasarkan urutan signifikansi nilai risiko residual:

1. Risiko Kontrak Karya dan UU Pertambangan Tahun 2009. Kontrak Karya PT Vale merupakan landasan hukum bagi kami dalam melakukan usaha. Sepanjang tahun 2013, Indonesia terus dipengaruhi ketidakpastian politik dan hukum. Beberapa dari ketidakpastian ini ada dalam beberapa bagian dari UU Pertambangan Mineral dan Batubara tahun 2009.
2. Risiko struktural. Seluruh operasi dan aset material PT Vale berada di Indonesia. Kinerja PT Vale dapat dipengaruhi oleh risiko-risiko tertentu yang terkait dengan lokasi operasi dan berada di luar kendali kami. Beberapa contoh risiko tersebut mencakup ketidakstabilan sosial dan terorisme, ketidakstabilan politik, ekonomi dan hukum yang disebabkan oleh terjadinya perubahan kebijakan pemerintah dan penerapan kebijakan yang tidak konsisten, peristiwa-peristiwa geofisika seperti banjir, semburan lumpur, atau gempa bumi, dan peristiwa-peristiwa geopolitik seperti resesi ekonomi dunia.
3. Risiko otonomi daerah. Selain kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di tingkat pemerintah pusat, PT Vale juga tunduk pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di mana lokasi penambangan dan operasional kami berada. Termasuk di dalamnya adalah kepatuhan terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi

on the 2012 Enterprise Risk Management Cycle, the following were the major risks for PT Vale in 2012 in order of residual risk score significance:

1. CoW and 2009 Mining Law risks. PT Vale's CoW is the fundamental legal instrument under which we conduct our business. Indonesia continued to be impacted by political and legal uncertainties during 2013. Some of these uncertainties stem from the passage of the 2009 Law on Mineral and Coal Mining.
2. Structural risks. All PT Vale's material assets and operations are located in Indonesia. The Company's performance could be affected by certain risks beyond our control that are associated with the location of our operations. Examples of these risks include social instability and terrorism, political, economic and legal instability caused by changes in government policies and the inconsistent application of governmental jurisdiction, geophysical events such as floods, mudflows, or earthquakes and geopolitical events such as a global economic recession.
3. Regional autonomy risks. In addition to compliance with laws and regulations at the central government level, PT Vale is also subject to regulations issued by regional authorities where our mining and related operations are located. This includes regulations issued by regional governments of the South, Central and South East Sulawesi Provinces and the respective Regencies. While we continually work to meet local requirements and resolve conflicts with

Tenggara, maupun pemerintah Kabupaten yang bersangkutan. Sementara kami terus berupaya memenuhi persyaratan-persyaratan setempat dan menyelesaikan benturan-benturan yang terkait dengan Kontrak Karya, permasalahan di tingkat daerah maupun lokal dapat timbul kapanpun dan berdampak terhadap bisnis dan operasi kami.

4. Risiko harga nikel. Harga nikel merupakan faktor utama yang mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil-hasil operasional kami. Pendapatan PT Vale diperoleh dari perjanjian penjualan dengan VCL dan SMM. Harga nikel dalam matte dalam perjanjian penjualan tersebut dikaitkan dengan rata-rata harian harga nikel pada penutupan LME. Dengan demikian, kinerja keuangan kami selama ini terkait dan akan selalu terkait dengan harga nikel. Harga nikel sangat berfluktuasi dan dipengaruhi oleh kesetimbangan permintaan dan pasokan global maupun oleh ketersediaan dan harga produk pengganti nikel.

Karena harga nikel berada di luar kendali kami, maka kami terus mengupayakan penerapan pengelolaan biaya yang lebih hemat dan terus mencari kesempatan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan untuk memastikan daya saing kami.

5. Risiko operasional. Risiko operasional mencakup risiko terhadap karyawan, lingkungan hidup, produksi, aset, reputasi dan masyarakat sekitar wilayah di mana kami beroperasi. Kami memiliki program-program yang ditujukan untuk meminimalkan risiko-risiko tersebut, seperti: Program Perbaikan Layanan Darurat dan Kebakaran, Standar Keadaan Darurat Utama (program yang dirancang untuk mengurangi risiko kecelakaan

the CoW, from time to time issues may arise at the regional or local levels, which could have an effect on our business and operations.

4. Nickel price risks. The price of nickel represents the major factor influencing our financial condition and results of operations. PT Vale's revenue is derived from its sales agreements with Vale Canada Limited (VCL) and Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (SMM). The price for nickel in matte sold under our sales agreements is tied to the average daily LME closing price for nickel. Thus our financial performance has been, and is expected to remain, closely linked to the price of nickel. This price is volatile and is largely influenced by global supply and demand factors as well as by the availability and prices of other sources of substitutes for nickel.

As the nickel price is beyond our control, we maintain prudent cost management practices and continuously explore further opportunities to enhance our cost efficiencies to ensure our competitiveness.

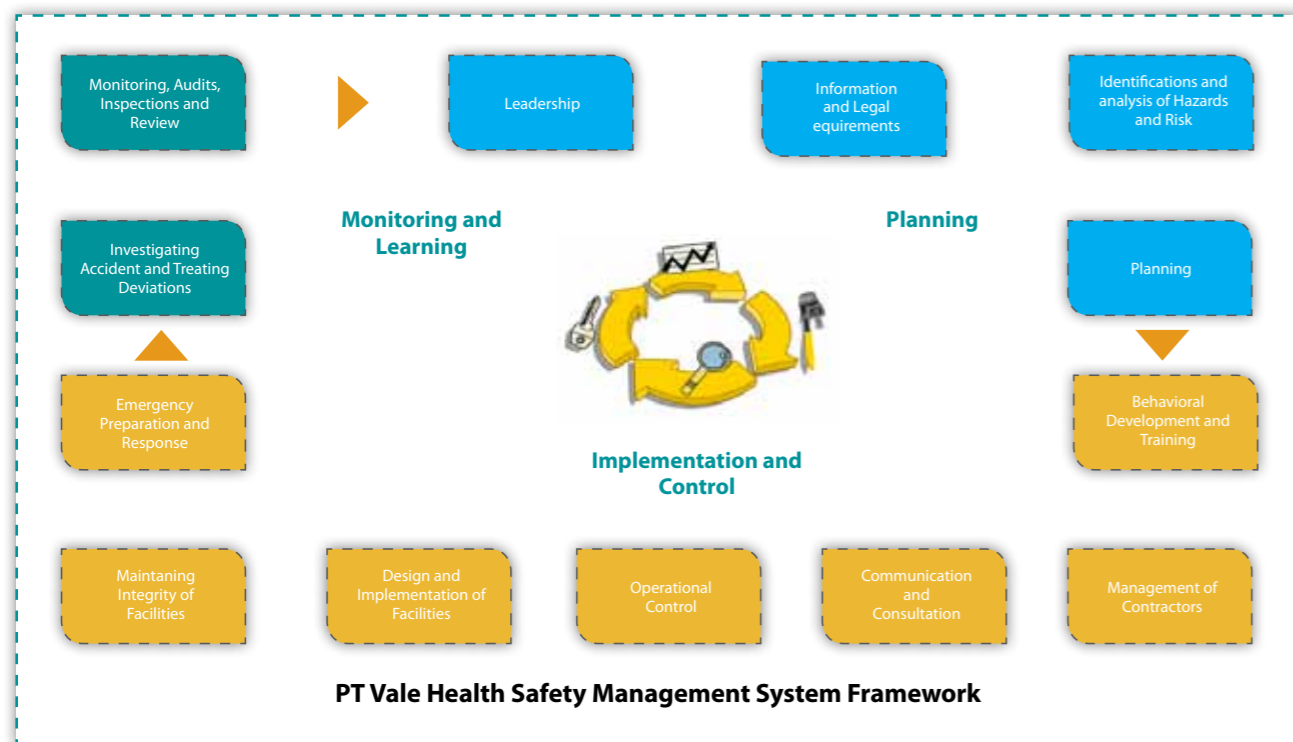
5. Operational risks. Operational risk includes risks to our employees, the environment, production, assets, reputation and the local communities in which we operate. We have programs targeting the minimization of these risks, such as a Fire and Emergency Services Improvement Program, our Critical Activity Requirement Program (a program designed to reduce the risk of serious accidents), Health Safety Management System (HSMS),

Tata kelola perusahaan
Corporate governance

Tata kelola perusahaan
Corporate governance

fatal), Health Safety Management System (HSMS), Environmental Management System (EMS), Kajian Dampak Danau (dilakukan oleh pakar aquatic toxicology internasional) untuk perlindungan danau di wilayah Kontrak Karya, Golden Rules, dan kebijakan nihil-kecelakaan.

Environmental Management System (EMS), Lake Impact Studies (conducted by internationally recognized aquatic toxicologists) to address the protection of lakes in our CoW area, Golden Rules and a zero-accident policy.



6. Risiko biaya bahan bakar minyak. Harga minyak juga dapat berpengaruh signifikan terhadap Perseroan. Bagian terbesar dari biaya produksi kami adalah biaya bahan bakar. Biaya terbesar dikeluarkan untuk HSFO, yaitu sekitar dua pertiga dari biaya bahan bakar dan pelumas pada tahun 2011 dan 2012. Angka ini termasuk biaya untuk HSFO yang digunakan di tanur pengering dan tanur pereduksi dalam proses pengolahan bijih nikel. Kami terus mempelajari opsi untuk mengurangi biaya bahan bakar melalui transaksi lindung nilai.

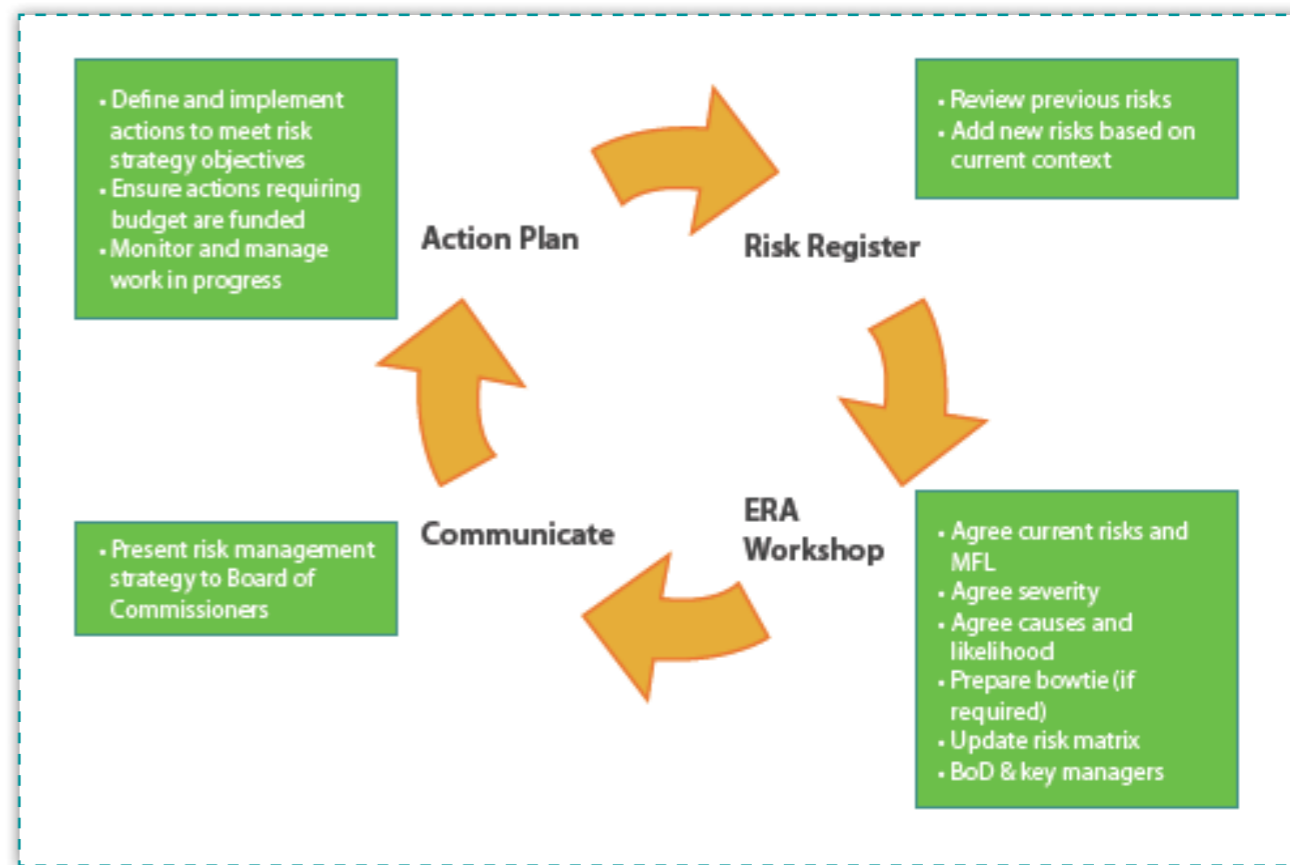
6. Fuel cost risks. We can also be significantly affected by the price of oil. Fuel costs represent the largest portion of our production costs. Our highest cost fuel source is HSFO, which is about two-thirds of our fuels and lubricants cost in 2011 and 2012. This included the cost of HSFO used in our dryers and kilns during the processing of ore. We continue to study options to reduce our fuel cost risk through hedging operations.

Workshop ERA dan proses Analysis Bowtie harus diselesaikan sebelum dimulainya siklus anggaran PT Vale, agar dana yang diperlukan bagi seluruh faktor pengendalian yang ada maupun yang akan datang dapat dialokasikan guna menangani faktor-faktor risiko utama dalam organisasi. Faktor pengendalian yang akan datang dimasukkan dalam suatu rencana aksi, yang dikelola dan diperbaharui secara rutin oleh para Risk Specialist kami, dan dapat diakses oleh personil yang berwenang di PT Vale maupun Vale. Diagram di bawah ini menggambarkan siklus tahunan Enterprise Risk Management di PT Vale.

It is necessary for the ERA workshop and the required Bowtie Analyses to be completed before PT Vale's budget cycle, so that funding for all of the required and future controls can be secured in order to address the high-risk events in the organization. The future required controls are captured in a system as an action plan, which is regularly managed and updated by our Risk Specialists and accessible to authorized personnel in PT Vale and Vale. This diagram below illustrates the annual Enterprise Risk Management Cycle at PT Vale.

Siklus Enterprise Risk Manajemen PT Vale

PT Vale Enterprise Risk Management Cycle



Tata kelola perusahaan

Corporate governance

Manajemen risiko operasional

Untuk mengelola risiko operasional, PT Vale memiliki sistem dan perangkat yang melekat dalam proses-proses operasional sehari-hari.

- **HAZAN (Hazardous Analysis)** merupakan prosedur untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam pengembangan dan pengoperasian proyek-proyek utama, sehingga risiko-risiko tersebut dapat ditangani semaksimal mungkin pada tahap desain dan rekayasa proyek.
- **HAZOP (Hazardous Operations)** merupakan prosedur untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi pada saat modifikasi yang signifikan pada suatu peralatan atau pemasangan peralatan baru, termasuk pengembangan rencana aksi untuk mengurangi atau mengeliminasi risiko-risiko tersebut.
- **JSA (Job Safety Analysis)** merupakan prosedur untuk menganalisa risiko-risiko yang terkait dengan suatu pekerjaan lapangan yang spesifik sebelum pekerjaan tersebut dilakukan, dan kemudian mengembangkan prosedur operasi standar yang fokus kepada aspek keselamatan untuk mengurangi atau mengeliminasi risiko-risiko tersebut. Prosedur-prosedur operasi standar tersebut diperbaharui secara rutin selama pekerjaan dilakukan dan juga dibahas dalam sesi-sesi *Safety Talks* sebelum giliran kerja.
- **Safety Talks** adalah sesi pertemuan seluruh personil operasional yang dilakukan sebelum dimulainya suatu giliran kerja. Untuk fungsi-fungsi korporat atau pendukung, pertemuan diadakan secara mingguan.
- **RAC (Critical Activity Requirements)** merupakan serangkaian standar keselamatan kerja yang dikembangkan melalui evaluasi atas aktivitas-aktivitas berisiko tinggi. Seluruh prosedur, peralatan,

Operational risk management

PT Vale also has several tools and systems embedded in its day-to-day processes to manage operational risks.

- **HAZAN (Hazardous Analysis)** is a procedure to identify the potential risks that could occur when major projects are constructed and operated, in order to address these risks as far as possible through project design and engineering.
- **HAZOP (Hazardous Operations)** is a procedure to identify potential risks when equipment is significantly modified or when new equipment is installed, including the development of action plans to reduce or eliminate these operational risks.
- **JSA (Job Safety Analysis)** is a procedure to analyze risks associated with specific, on-the-field jobs prior to commencing, and the development of specific safety-focused standard operating procedures to reduce or eliminate these risks while the job is in progress. These standard operating procedures are updated regularly during job execution and discussed regularly during pre-shift Safety Talks.
- **Safety Talks** are safety reinforcement meetings for all operational employees conducted prior to the start of each shift. In corporate and support areas this is done on a weekly basis.
- **RAC (Critical Activity Requirements)** are a set of safety standards developed as a result of assessments of high-risk activities. All procedures, equipment, structures and activities at PT Vale are

struktur dan aktivitas di PT Vale diwajibkan memenuhi standar-standar ini. RAC merupakan penyempurnaan dari perangkat sebelumnya yaitu Major Hazard Standards (MHS).

- **GIP (General Induction Program) and SSIP (Site Specific Induction Program)** adalah program-program orientasi untuk karyawan baru, kontraktor dan tamu yang berkunjung mengenai aspek keselamatan secara umum (GIP) maupun yang secara khusus terkait dengan instalasi-instalasi spesifik (SSIP) yang akan dimasuki.
- **Mandatory Audits/Inspections** adalah kegiatan audit/inspeksi wajib yang harus dilakukan oleh setiap personil pimpinan di Sorowako untuk menghilangkan atau mencegah kondisi dan/atau perilaku yang membahayakan. Setiap personil pimpinan diharuskan memenuhi sejumlah audit/inspeksi tertentu setiap tahunnya.

Efektivitas sistem manajemen risiko di PT Vale umumnya diukur berdasarkan hasil yang dicapai. Sebagai contoh, efektivitas sistem-sistem manajemen risiko operasional diukur dengan matriks kinerja keselamatan kerja seperti TRIFR (Total Reporting Incident Frequency Rate) dan Environmental Exceedances. Hasil-hasil yang tidak memuaskan ataupun berulangnya kejadian risiko yang signifikan akibat tidak memadainya pengendalian merupakan indikator untuk melakukan peninjauan terhadap sistem-sistem manajemen risiko yang ada. Hal ini berlaku di PT Vale maupun untuk Vale.

Kebijakan dan proses whistleblower

PT Vale memiliki kegiatan operasional di beberapa lokasi yang terpencil di Indonesia dan berinteraksi secara erat dengan pemasok, kontraktor, masyarakat dan aparat pemerintahan di berbagai wilayah di mana kami beroperasi. Interaksi – interaksi tersebut dapat memiliki implikasi positif maupun negatif, sehingga

required to comply with these procedures. This is an improved version of our previous Major Hazard Standards (MHS).

- **GIP (General Induction Program) and SSIP (Site Specific Induction Program)** are general safety induction – to promote general safety awareness; and site-specific safety induction – for new employees, contractors and visitors – that provides safety awareness regarding specific plants they will be entering.
- **Mandatory Audits/Inspections** are required of all Sorowako-based leadership to stop or prevent unsafe conditions and/or unsafe behaviors. Each leader has a specific number of audits and inspections that they must complete each year.

The effectiveness of PT Vale's risk management systems are generally measured based on results. For example, the effectiveness of the operational risk management systems is based on the safety performance metrics such as TRIFR (Total Reporting Incident Frequency Rate) and Environmental Exceedances. Poor results or occurrences of significant risk events due to inadequate controls are the primary triggers to review our various risk management systems. This is the case at both the PT Vale and Vale levels.

Whistleblower policy and process

PT Vale has operations in several remote parts in Indonesia and requires a close relationship with the suppliers, contractors, community and the government in the areas where we operate. These relationships can have both positive and negative implications. As a result, there is a potential of collusion and conflict

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

terdapat potensi kolusi dan konflik antara Perseroan, karyawan serta pihak-pihak lain yang terlibat di sana.

Kami mempekerjakan lebih dari 3.100 karyawan, sebagian besar diantaranya berada di wilayah Sorowako. Populasi yang besar ini rentan terhadap konflik hubungan industrial, praktik-praktik yang menyimpang, tindakan kriminal, dan/atau permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja. Hal-hal tersebut dapat berdampak pada kegiatan operasional kami.

Untuk memitigasi risiko-risiko ini, PT Vale telah mengembangkan beberapa mekanisme pelaporan bagi karyawan maupun pihak-pihak lain untuk menyampaikan keluhan atau mengkomunikasikan sesuatu kepada Perseroan dan manajemen.

PT Vale menyediakan beberapa jalur komunikasi di bawah ini untuk melaporkan dugaan atas suatu ketidakwajaran:

1. **Industrial Relations: Perjanjian Kerja Bersama (PKB)**
PT Vale membantu karyawan untuk menyampaikan masalah yang mereka alami, seperti penyimpangan, pelecehan, dan lain sebagainya, kepada HR Industrial Relations dan unit-unit lain seperti tercantum dalam bab Panduan Hubungan Industrial dalam PKB. Komunikasi dapat dilakukan melalui email, telepon ke nomor yang tersedia ataupun langsung ke HR Industrial Relations.
2. **Security Department:** Kebanyakan laporan yang masuk ke Security Department adalah yang terkait dengan tindakan kriminal yang terjadi di lingkungan Perseroan dan membutuhkan keterlibatan langsung aparat penegak hukum.
3. **Internal Audit:** Fungsi Internal Audit juga memungkinkan untuk menerima laporan atau masukan dari karyawan, kontraktor dan pihak-pihak

between the Company, employees and the different parties involved.

The Company employs more than 3,100 people and they are mostly based in the Sorowako area. This is a relatively large population that can be susceptible to industrial relations conflicts, fraud, other criminal activities and/or health and safety issues. These events can adversely impact our operations.

In order to mitigate these risks, PT Vale has developed several reporting mechanisms through which the employees and other parties can communicate their grievances or deliver a message to the Company and to management.

PT Vale has the following communication channels for people to report suspected improprieties:

1. **Industrial Relations:** The PT Vale Contract Labor Agreement (CLA) allows employees to communicate problems or issues that they encounter to HR Industrial Relations and other bodies as governed in the CLA Industrial Relations Guidebook section, such as fraud, harassment, etc. Communication options are email, a telephone call to a designated number, or through direct contact with Industrial Relations.
2. **Security department:** Most issues reported to the security department are in relation to criminal activities within the Company's premises requiring direct attention by law enforcement.
3. **Internal Audit:** As one of its functions, Internal Audit can receive messages or feedback from employees, contractors and other parties. They will discuss the

lain. Internal Audit akan mendiskusikan hal-hal yang dilaporkan tersebut bersama Direksi, yang dapat memberikan persetujuan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan permasalahan tersebut.

4. Forum interaksi langsung antara manajemen, karyawan dan/atau masyarakat, dimana mereka dapat berkomunikasi langsung kepada manajemen, yang kemudian akan memutuskan mengenai cara penanganan masalah yang disampaikan tersebut.
5. Melalui menu 'Call Me' di situs web PT Vale, dimana pemangku kepentingan dapat menyampaikan keluhan, pendapat dan gagasan mereka kepada manajemen.

Walaupun kami memperbolehkan anonimitas, pelapor dianjurkan untuk memberikan atau mengungkapkan identitas mereka, terutama untuk mencegah informasi yang salah, tidak akurat ataupun palsu. Informasi yang akurat akan membantu Perseroan untuk melakukan penyelidikan.

Berbagai saluran komunikasi tersebut telah digunakan oleh karyawan maupun anggota masyarakat.

Masukan dibatasi kepada Direksi atau kepada Dewan Komisaris, tergantung pada keterlibatan seorang Direktur dalam kasus yang dilaporkan. Kami tidak memiliki kebijakan perlindungan saksi, sehingga untuk mencegah adanya tindakan balasan, informasi dibatasi hanya kepada Direksi atau Dewan Komisaris, yang memiliki kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan. Imunitas diberikan hanya kepada karyawan yang menyampaikan informasi yang sah, dengan tata-cara sebagaimana diatur dalam panduan pada PKB.

reported items with the Board of Directors who will provide approval to pursue an investigation of the alleged issues and/or problems.

4. Direct contact with management, employees and/or communities, where they are able to communicate matters to management, who will subsequently decide how the reported items will be resolved.
5. The PT Vale website also has a CALL ME button, where stakeholders can deliver their complaints, opinions and ideas to management.

Anonymity is permitted, however, we encourage individuals to disclose or reveal their identities. This is primarily to prevent wrong, inaccurate or misleading information. The Company is only able to perform an investigation with accurate information.

Some employees and community members have used these channels.

The feedback is limited to the Board of Directors or the Board of Commissioners, depending on the involvement of a Director in the respective reported case. We do not have 'witness protection' policies. As such, to prevent any reprisals, the information is limited to the Board of Directors or the Board of Commissioners, who have the ultimate authority in decision-making. Immunity is only applied to staff that provide legitimate information and the guidelines established in the CLA will be used.

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

Kasus hukum yang dihadapi Perseroan

Perseroan tidak memiliki kasus hukum yang signifikan dan material di tahun 2013.

Kode etik PT Vale

Dalam melakukan berbagai aktivitas bisnis, PT Vale berpedoman pada nilai-nilai yang mencerminkan standar etika dan moral yang tinggi untuk memastikan kredibilitas Perseroan serta menjaga citra dan reputasinya di tengah masyarakat, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Citra positif yang dimiliki PT Vale merupakan aset yang bermanfaat bagi pemegang saham, pemangku kepentingan dan karyawan.

Kami telah menerapkan standar perilaku etis yang tercermin dalam Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan komite-komite di bawahnya, anggota Direksi, seluruh karyawan dan calon karyawan Perseroan. Selain itu, kami juga telah mengadopsi dan menerapkan standar perilaku etis yang tercermin dalam Kode Etik dan Perjanjian Kerja Bersama yang wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan Perseroan. Lebih jauh, PT Vale juga memiliki Panduan Perilaku Bagi Pemasok dan Kebijakan Praktik Etis yang wajib dipatuhi oleh semua mitra bisnis. Penerapan perilaku ini bertujuan untuk (i) menciptakan kondisi dan mekanisme yang memastikan semua karyawan akan berperilaku etis dalam menjalin relasi dengan para pemangku kepentingan dan (ii) untuk mendorong mitra-mitra bisnis, secara langsung maupun tak langsung, mendukung penerapan praktik-praktik terbaik dalam menjalankan bisnis mereka.

Sebagaimana yang diatur dalam kebijakan *Whistleblower*, Perseroan menyediakan sarana bagi karyawan dan pemangku kepentingan untuk melaporkan pelanggaran etika atau peraturan yang dilakukan karyawan Perseroan. Perseroan menjamin kerahasiaan nama pelapor.

Legal cases faced by the Company

There were no significant and material legal cases faced by the Company in 2013.

PT Vale code of ethical conduct

PT Vale conducts its business activities guided by a set of values that reflects high ethical and moral standards, aimed at assuring credibility and preserving the Company's image and reputation in the markets it participates in, for the short and long term. PT Vale's positive image is an asset that benefits its shareholders, stakeholders and employees.

We have adopted and implemented standards for ethical behavior, and they are reflected in the Code of Ethical Conduct that is to be followed by the members of the Board of Commissioners and its working committees, members of the Board of Directors, all employees and trainees of the Company. In addition, we have adopted and implemented standards for ethical behavior in the Collaborative Labor Agreements that are mandatory for all Company employees. Further, the PT Vale Supplier Conduct Guidelines and Ethical Practices Policy are mandatory for all the Company's business partners. Adoption and implementation of ethical conduct standards in these areas is intended (i) to provide conditions and mechanisms to guarantee that all employees behave in an ethical manner in relationships with different stakeholders and (ii) to stimulate direct and indirect business partners' engagement in the adoption of best practices for managing their businesses.

As described in our Whistleblower Policy, the Company has also established an ethics and compliance reporting process for employees and other stakeholders to confidentially or anonymously report ethical concerns or improper conduct related to any of our employees' behaviour.

Perilaku etis yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama dan Kode Etik Perseroan mencakup prinsip-prinsip dan panduan bagi Perseroan dan seluruh karyawannya yang mencerminkan integritas dan etika Perseroan dalam menjalankan misi Perseroan. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh karyawan mematuhi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kode etik perusahaan. Kami yakin, hanya bila seluruh karyawan dan pejabat Perseroan memiliki komitmen untuk menjunjung nilai-nilai etis perusahaan maka Perseroan dapat mewujudkan bisnis yang berkelanjutan.

Walaupun Perseroan memahami dan menerima bahwa mitra-mitra bisnisnya telah memiliki panduan atas standar perilaku sendiri dalam menjalankan bisnisnya, namun Perseroan menyusun PT Vale Supplier Conduct Guidelines dan Ethical Practices Policy untuk memastikan semua perusahaan yang bekerja sama dengan Perseroan juga menjalankan standar etika dan integritas yang tinggi yang paling tidak sejalan dengan PT Vale Supplier Conduct Guidelines & Ethical Practices Policy. Hal ini merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk senantiasa mematuhi hukum, peraturan dan persyaratan yang berlaku dan terkait dengan bisnis Perseroan.

The ethical conduct described in both the Collaborative Labor Agreement and the Code of Ethical Conduct includes principles and guidelines for the Company and all of its employees that reflect the highest standard of integrity and ethical conduct in the pursuit of the Company's mission. This is to ensure that our people abide by solid ethical standards and are fully responsible. We believe that business sustainability can be promoted and achieved only if all of the Company's employees and officers are committed to our ethical values.

While the Company understands and accepts that its business partners may have in place their own guidelines or standards of conduct for their business and employees, the Company has established PT Vale Supplier Conduct Guidelines and Ethical Practices Policy to ensure that all firms that do business with the Company share PT Vale's values and adhere to standards of integrity and ethical conduct that at least correspond to that policy. This is part of Company's ongoing effort to at all times meet the applicable laws, regulations and other requirements relating to Company's business.

Tata kelola perusahaan

Corporate governance

Laporan Komite Audit

Audit Committee Report

Dewan Komisaris memiliki Komite Audit yang terdiri dari Arief T. Surowidjojo sebagai Ketua, serta Erry Firmansyah dan Sidharta Utama sebagai anggota independen. Ketua Komite Audit juga menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit yang ditetapkan pada 22 Juli 2010. Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk memantau proses serta keakuratan pelaporan keuangan, pengelolaan risiko dan audit Perseroan.

Sepanjang tahun 2013 hingga tiga bulan pertama tahun 2014, Komite Audit telah mengadakan enam kali rapat dengan manajemen dan unit Audit Internal Perseroan. Rapat-rapat tersebut membahas laporan keuangan, permasalahan hukum dan lingkungan hidup, pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen risiko, serta kegiatan dan permasalahan audit internal.

Selain rapat rutin Komite Audit, anggota-anggota komite, baik secara kelompok maupun individual, juga mengadakan rapat dengan Kepala Audit Internal untuk membahas kemajuan proses audit dan memberi bantuan teknis dalam menjalankan audit internal.

Berikut rangkuman dari kegiatan utama yang dilakukan di dalam rapat-rapat Komite Audit, termasuk peninjauan terhadap:

- Presentasi yang dilakukan oleh auditor eksternal Perseroan terkait dengan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2012 dan 2013, termasuk penilaian terhadap kemajuan pengendalian dan tanggapan manajemen.

The Audit Committee of the Board of Commissioners consists of Mr. Arief T. Surowidjojo as Chairman and Mr. Erry Firmansyah and Mr. Sidharta Utama as independent members. The Chairman of the Audit Committee is also the Vice President Commissioner and an Independent Commissioner.

The Audit Committee's roles and responsibilities are governed by the Audit Committee charter, dated July 22, 2010. The Audit Committee reports directly to the Board of Commissioners and assists the Board in fulfilling its oversight responsibilities with regard to the process and integrity of financial reporting risk management and audit of the Company.

In 2013 and the first three months of 2014, the Audit Committee met with the Company's management and Internal Audit Unit on six different occasions. In these Audit Committee meetings, financial reports, potential legal and environmental issues, internal control and risk management processes, internal audit activities and audit issues were discussed.

Other than the regular Audit Committee meetings, members, either as group or individually, met with the Head of Internal Audit to discuss any new developments and also to provide technical support for the internal audit process.

Here is a summary of the main activities undertaken in the Audit Committee meetings, including reviews of:

- Presentations given by the Company's external auditor with regard to the audit of the annual financial statements of the Company for fiscal years 2012 and 2013, including comments with respect to control improvements and management's responses.

Laporan Komite Audit

Audit Committee Report

- Laporan keuangan triwulanan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2013, 30 Juni 2013, 30 September 2013, dan 31 Desember 2013.
- Pelaporan dan perlakuan pajak yang berpotensi mempengaruhi laporan keuangan.
- Kasus hukum dan lingkungan hidup yang berpotensi memiliki dampak keuangan terhadap Perseroan.
- Laporan audit internal dan status rekomendasi auditor serta implementasinya.
- Status rencana kerja Audit Internal 2013 dan dukungan yang diperlukan oleh Audit Internal dalam pelaksanaan tugasnya.
- Rencana kerja Audit Internal untuk tahun 2014 serta aspek penilaian risiko, lingkup dan metodologi audit internal yang relevan.

Pendapat utama yang disampaikan Komite Audit adalah sebagai berikut:

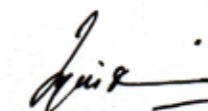
- Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2012 dan 2013 telah dibuat secara wajar sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia.
- Telah diambil tindakan untuk mengatasi permasalahan yang dibahas oleh Auditor Eksternal.
- Mengetahui bahwa manajemen telah mengambil langkah penting untuk meningkatkan pengendalian internal Perseroan.

- The quarterly financial statements for the periods ended March 31, 2013, June 30, 2013, September 30, 2013 and December 31, 2013.
- Tax assessments and treatments that potentially affect financial statements.
- Legal and environmental cases with potential financial impact to the Company.
- Internal audit reports and status of audit recommendations and their implementation.
- Status of Internal Audit Plan 2013 and support required by Internal Audit to perform audit jobs.
- Internal Audit Plan 2014 and its relevant internal audit risk assessment, scopes and methodology.

Key opinions expressed by the Audit Committee include:

- The financial statements of the Company for the fiscal years 2012 and 2013 have been prepared and fairly presented according to Indonesian Accounting Principles (PSAK).
- Action has been taken to address issues noted by the External Auditor.
- Acknowledgement that management has taken significant effort in improving the Company's internal controls.

Maret 2014 / March 2014



Arief T. Surowidjojo
Ketua Komite Audit

Chairman of the Audit Committee



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate social responsibility



Tanggung jawab sosial perusahaan

Corporate social responsibility

Rencana untuk kolaborasi dan kesuksesan berkelanjutan

PT Vale memiliki misi untuk mengubah sumber daya alam menjadi kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan. Tidak ada fokus dalam misi kami yang lebih nyata selain pendekatan kami terhadap pengembangan masyarakat.

Program pengembangan masyarakat telah dijalankan sejak dimulainya operasi kami lebih dari 45 tahun yang lalu. Dahulu kami mendukung pengembangan masyarakat melalui penyaluran donasi dengan pendekatan *project-by-project*. Meskipun banyak proyek yang telah terealisasi, pendekatan tersebut belum terarah pada rencana jangka panjang yang akan memberikan kesuksesan berkelanjutan yang nyata bagi masyarakat, Perseroan, maupun negara.

Amat jelas bahwa kami perlu mengembangkan sebuah rencana jangka panjang yang strategis sebagai investasi untuk masyarakat – dan kami pun telah melakukannya.

Program terpadu pengembangan masyarakat

Pada tahun 2012, PT Vale melakukan penelitian penting, termasuk penilaian kebutuhan masyarakat, pemetaan pemangku kepentingan, dan studi praktik pertanian. Hasil penelitian tersebut menjadi landasan bagi Strategi Pengelolaan Pemangku Kepentingan dan Rencana Pengelolaan Sosial (RPS) tahun 2013 – 2017.

RPS tersebut ditulis secara konsultatif berdasarkan masukan yang diterima melalui serangkaian diskusi dan lokakarya, baik secara internal di PT Vale maupun bersama dengan masyarakat dan perwakilan pemerintah setempat dari tingkat desa hingga Kabupaten. RPS lima tahun tersebut

A plan for collaboration and sustainable success

PT Vale's mission is to transform natural resources into prosperity and sustainable development. Nowhere is our focus on our mission more evident than in our approach to community development.

Community development programs have been implemented in the community since we began our operations more than 45 years ago. Traditionally, donations were distributed to support the community on a project-by-project basis. While many successful projects were implemented, the approach did not provide communities, the Company or our country with a long-term plan to achieve measurable and sustainable success.

It was clear that we needed to develop a strategic, long-term plan for investment in our communities – and so we did.

Integrated program for community development

In 2012, PT Vale conducted primary research, including community need assessments, stakeholder mapping and studies on agriculture practices. The results of the studies became the basis for our Stakeholder Management Strategy (SMS) and Social Management Plan (SMP) 2013 – 2017.

The SMP was written consultatively, based on input received in a series of discussions and workshops, both internally at PT Vale and with community and local government representatives from the village level to the Regency level. The five-year SMP succeeds in integrating goals which the Company aims to achieve in community

berhasil mengintegrasikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai Perseroan dalam pengembangan masyarakat, memenuhi kebutuhan para penduduk yang kurang mampu, serta berkontribusi pada prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Timur. Fokus jangka panjang dari inisiatif pengembangan masyarakat kami ditujukan agar masyarakat siap memasuki ekonomi pascatambang, mengutamakan pengembangan pertanian berkelanjutan, serta menumbuhkan kemandirian masyarakat melalui kewirausahaan, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. Model baru inisiatif pengembangan masyarakat PT Vale tersebut bernama Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM). Prinsip utama dari PTPM adalah sinergi pembangunan berkelanjutan melalui alokasi sumber daya baik oleh Perseroan, masyarakat, maupun Pemda.

Fokus pertama dari PTPM adalah memberi manfaat bagi 7,888 keluarga tidak mampu di 38 desa di empat kecamatan yang terkena dampak operasi Perseroan, yaitu kecamatan Nuha, Wasuponda, Towuti, dan Malili.

Kemitraan tiga pihak

Komponen terpenting dalam PTPM adalah disepakatinya kemitraan tiga pihak antara Perseroan, masyarakat, dan pemerintah setempat. Tim koordinasi yang dipimpin oleh Kepala Badan Pengembangan Daerah (Bapedda) telah terbentuk sehingga dapat tercipta koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan program dan langkah-langkah baru secara sinergis agar tidak ada tumpang-tindih dalam pelaksanaan program. Kemitraan ini menjamin terintegrasinya kegiatan pengembangan masyarakat oleh Perseroan dan Kabupaten Luwu Timur berdasarkan prioritas.

Tanggung jawab sosial perusahaan

Corporate social responsibility

development, meeting the needs of underprivileged communities, as well as contributing to the prioritized development of East Luwu Regency. The long-term focus of our community development initiatives are aimed to prepare East Luwu communities for a post-mining economy, prioritizing the development of sustainable agriculture, and building the community's independence through entrepreneurship, particularly in micro, small, and medium enterprises. The new plan for PT Vale's community development initiatives is called the Integrated Program for Community Development (IPCD). Its guiding principle is sustainable, synergistic development through strategic resource allocation by the Company, communities and local governments.

The first focus of the IPCD is 7,888 underprivileged households in 38 villages across four sub-districts, namely Nuha, Wasuponda, Towuti, and Malili sub-districts, that are affected by the Company's operations.

Trisector partnership

The most important component of the IPCD is the agreement of a three-party partnership between the Company, communities, and local governments. A co-ordination team, chaired by the Head of the Regional Development Planning Agency (Bapedda), has been established to enable better co-ordination between government institutions in implementing programs and initiatives in a synergized manner, while avoiding overlaps or gaps in the delivery of programs. The partnership guarantees the integration of community development work by the Company and East Luwu Regency on a prioritized basis.

Tanggung jawab sosial perusahaan

Corporate social responsibility

Program mitra desa mandiri

Program Mitra Desa Mandiri merupakan fokus utama PTPM. Program ini memberikan kemudahan bagi desa-desa untuk menentukan sendiri prioritas pengembangan setiap tahun, serta mengarahkan pendanaan program untuk inisiatif yang ditujukan pada prioritas tersebut. Usulan kegiatan dari masyarakat dibicarakan dalam musyawarah desa dan pengambilan keputusan didasarkan pada prioritas pengembangan desa yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Program Mitra Desa Mandiri menyalurkan dana untuk mendorong kegiatan-kegiatan pengembangan kesehatan dan ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat tidak mampu dan rumah tangga miskin.

Prinsip-prinsip Program Kemitraan Desa Mandiri meliputi:

1. Keberpihakan kepada masyarakat rentan dan miskin;
2. Keberpihakan kepada perempuan: memberikan akses, kesempatan dan peran kepada perempuan dalam setiap tahapan program;
3. Fokus pada pembangunan sumber daya manusia tidak pada infrastruktur fisik;
4. Partisipasi dalam setiap tahapan program;
5. Akuntabilitas: seluruh tahapan program harus dikelola secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan kepada semua pihak, baik secara moral, teknis, administratif dan ketentuan yang berlaku;
6. Transparansi: masyarakat memiliki akses terhadap seluruh informasi dan pengambilan keputusan secara terbuka;
7. Kemandirian: masyarakat diberikan kewenangan untuk mengatur secara mandiri, berkontribusi dan secara mandiri menentukan pilihan kegiatan sesuai dengan permasalahan, kapasitas dan kebutuhan pembangunan di desanya;
8. Kemitraan antara masyarakat, pemda dan PT Vale.

Independent village partnership program

The Independent Village Partnership Program is a central focus of the IPCD. The program gives villages the flexibility to determine their development priorities every year, and direct program funding to initiatives aimed at those priorities. Suggestions for activities from the communities are discussed in village meetings and decision-making is based on village development priorities stipulated in the Medium-Term Village Development Plan document (RPJMDes).

The Independent Village Partnership Program funds activities that promote health and economic development, especially for underprivileged groups and poor households.

The principles of Independent Village Partnership Program include:

1. Support for poor and underprivileged communities.
2. Support for women: providing access, opportunities and roles for women in every program level.
3. A focus on human resource development instead of physical infrastructure.
4. Active participation in every program level.
5. Accountability: all program levels must be properly managed and their accountability must be demonstrated through moral, technical and administrative standards to all parties.
6. Transparency: the communities have access to all disclosed information and decision-making.
7. Independence: the communities are given the authority to manage, contribute and independently determine activities according to the issues, capacity and needs of village development.
8. Partnership: between the communities, regional government, and PT Vale.

Program kesehatan

PT Vale mendorong perubahan fokus layanan kesehatan dengan mengembangkan dan mendukung program kesehatan berbasis masyarakat yang berfokus pada upaya pencegahan. Perubahan fokus dari model kuratif menuju pola pencegahan ini memerlukan inisiatif yang diarahkan pada peningkatan sanitasi lingkungan serta perubahan tingkah laku positif untuk hidup sehat.

Program Kesehatan PTPM dirancang untuk mendorong perubahan menuju paradigma sehat yang mengubah kesadaran masyarakat untuk mengutamakan pencegahan dan pemeliharaan kesehatan. Seluruh kegiatan yang mendorong upaya pencegahan dan gaya hidup sehat menjadi bagian terbesar Program Kesehatan PTPM. Peran Puskesmas dan Puskesmas pembantu diperkuat, dan kapasitas dan kemampuan tenaga medis dari tingkat desa dan kecamatan akan diasah melalui berbagai program pelatihan.

Program pendidikan

PT Vale berkomitmen untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan telah menyiapkan berbagai program sebagai investasi strategis di masa depan. Program-program tersebut bervariasi mulai dari mendukung ketersediaan guru, menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat terpencil, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan seperti pendidikan anak usia dini, akses ke pendidikan tinggi, program pelatihan kejuruan dan magang.

Pusat pembelajaran masyarakat untuk pertanian berkelanjutan

Setelah pertambangan, pertanian adalah sektor usaha terbesar yang menyokong ekonomi masyarakat Luwu Timur. Luwu Timur terkenal dengan komoditas lada, padi, kakao, dan rumput laut serta merupakan salah satu penghasil lada terbesar dan terbaik di dunia.

Tanggung jawab sosial perusahaan

Corporate social responsibility

Health program

PT Vale encourages the refocusing of health services delivery by developing and supporting community-based health programs that focus on prevention. This shift from a curative model to a preventative model requires initiatives directed toward improving environmental sanitation, and positive behaviour changes for healthy living.

The IPCD Health Program is designed to affect a shift toward a healthy paradigm that changes the community conscience to one that prioritizes prevention and health maintenance. Activities that promote healthy lifestyle and disease prevention comprise the majority of the IPCD Health Program. The role of health centers and supporting health centers is strengthened, and the capacity and skills of medical personnel from villages and sub-districts will be improved through numerous training programs.

Education program

PT Vale is committed to supporting human resource development through education and has established various programs as a strategic investment in the future. The programs vary from support the availability of teachers, providing access to education for remote communities, capacity building of local human resources through activities such as early childhood education, access to higher education, vocational training, and internship program.

Community learning center for sustainable agriculture

In addition to mining, the agriculture sector is a significant contributor to the financial strength of East Luwu. East Luwu is well known for its pepper, rice, cocoa and seaweed commodities and is the biggest and best pepper producer in the world. Cocoa has become a

Tanggung jawab sosial perusahaan

Corporate social responsibility

Kakao telah menjadi tanaman yang berkontribusi besar kepada pendapatan rumah tangga petani di Luwu Timur. PTPM mendukung pengembangan praktik pertanian unggulan melalui berbagai inisiatif.

PT Vale telah memprakarsai pembentukan Pusat Pembelajaran Masyarakat atau Community Learning Centres (CLC) di 16 desa untuk petani lada, padi dan kakao. CLC merupakan wadah yang menjadi tempat belajar bagi para petani, tempat untuk mempraktikkan uji coba teknologi budidaya pertanian yang lebih maju, mensosialisasikan dan mengadopsi teknologi baru, membangun kelembagaan petani yang solid, serta meningkatkan kapasitas petani. Program pertanian melalui CLC akan memberdayakan lebih dari 6.500 petani di wilayah pemberdayaan.

Menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan

Pelaksanaan PTPM akan memberi manfaat positif dan jangka panjang bagi anggota masyarakat dan demi kemakmuran ekonomi Indonesia yang lebih luas lagi.

1. Penyelarasan kepentingan yang lebih baik di tingkat desa berdasarkan prinsip kerja sama dan saling menghormati.
2. Peningkatan kerja sama antar mitra untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Program.
3. Peningkatan pengawasan berbasis masyarakat untuk mengurangi penyalahgunaan program.

Tantangan di Masa Depan

Pelaksanaan PTPM melalui kemitraan tiga pihak membutuhkan kerja keras. Komunikasi intensif di antara semua pihak merupakan syarat utama keberhasilan program, begitu juga dengan kedisiplinan semua pihak untuk patuh pada prosedur yang telah disepakati.

crop that greatly contributes to income for farmers in East Luwu. The IPCD supports the development of high quality agricultural practices in several ways.

PT Vale has initiated the formation of Community Learning Centres (CLC) in 16 villages for pepper, rice, and cocoa growers. The CLC's are a venue to encourage knowledge transfer between farmers, encourage advanced practices in agricultural cultivation, disseminate and adopt new technologies, build a solid organization for farmers, and enhance the capacity of farmers. Agricultural programs through the CLC will empower more than 6,500 farmers in the area.

Creating positive, sustainable change

The implementation of the IPCD will deliver positive and lasting benefit to the members of our communities and to the greater economic prosperity of Indonesia.

1. Greater alignment of interests at the village level, based on collaboration and mutual respect.
2. Increased collaboration between partners from planning, execution and monitoring of the Program.
3. Increased community-based supervision that reduces program misuse.

Future Challenges

IPCD implementation through a three-party partnership requires hard work. Intensive communication between all parties is a critical prerequisite of success, as is the discipline of all parties to comply with the procedures that have been agreed upon.

Untuk membantu memfasilitasi komunikasi dan kerja sama antara semua pihak, IPCD melibatkan fasilitator pembangunan yang terlatih, ulet, dan sabar dalam membantu komunitas lokal dalam proses perencanaan dan penentuan prioritas pembangunan desa.

Kemitraan berkelanjutan dengan masyarakat dan pemerintah setempat

PT Vale bersama anggota masyarakat dan pemerintah setempat di Sorowako, Luwu Timur, dan Sulawesi Selatan sedang membangun kemitraan berkelanjutan.

Tujuan kemitraan ini adalah untuk memaksimalkan kontribusi ketiga pihak untuk pencapaian pengembangan masyarakat jangka panjang dan berkelanjutan.

Kemitraan ini ditujukan tidak hanya untuk menyelaraskan program dan jadwal, namun juga untuk menyamakan distribusi sumber daya. Pada tahun 2013, para pemangku kepentingan telah sepakat untuk berkontribusi dalam agenda pembangunan berkelanjutan untuk inisiatif dalam pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi, mitra kelembagaan, kesenian, dan kebudayaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan

Corporate social responsibility

To help facilitate communication and cooperation between all parties, the IPCD provides for the involvement of skilled development facilitators who are resilient and patient in assisting the local community in the process of determining priorities and program development.

Sustainable partnership with community and local government

PT Vale and members of the communities and local governments of Sorowako, East Luwu, South Sulawesi are building a sustainable partnership.

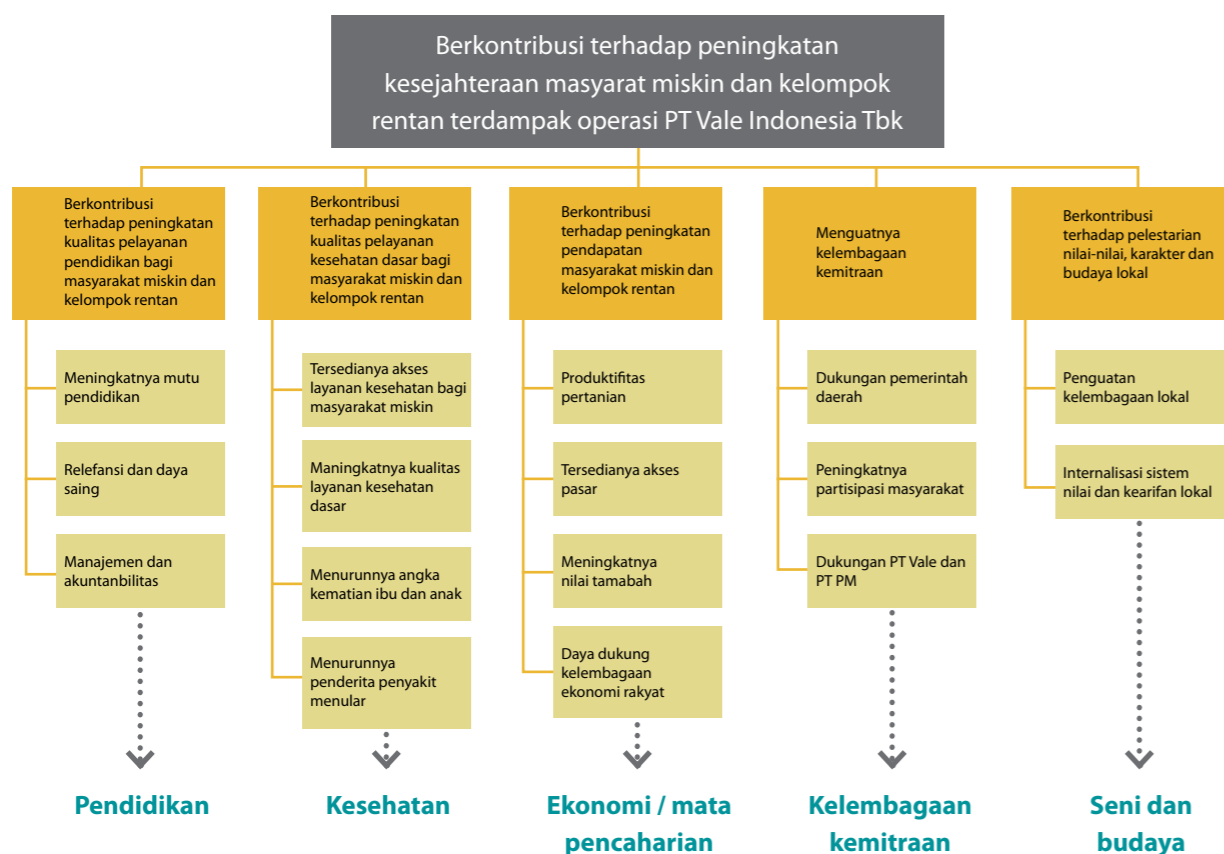
The purpose of this partnership is to maximize the contributions of all three parties towards the achievement of long-term and sustainable community development.

The partnership not only synchronizes programs and schedules, it also synchronizes the distribution of resources. In 2013, stakeholders agreed to contribute to the sustainable development agenda for initiatives in education, health, economic development, institutional partners, arts and culture.

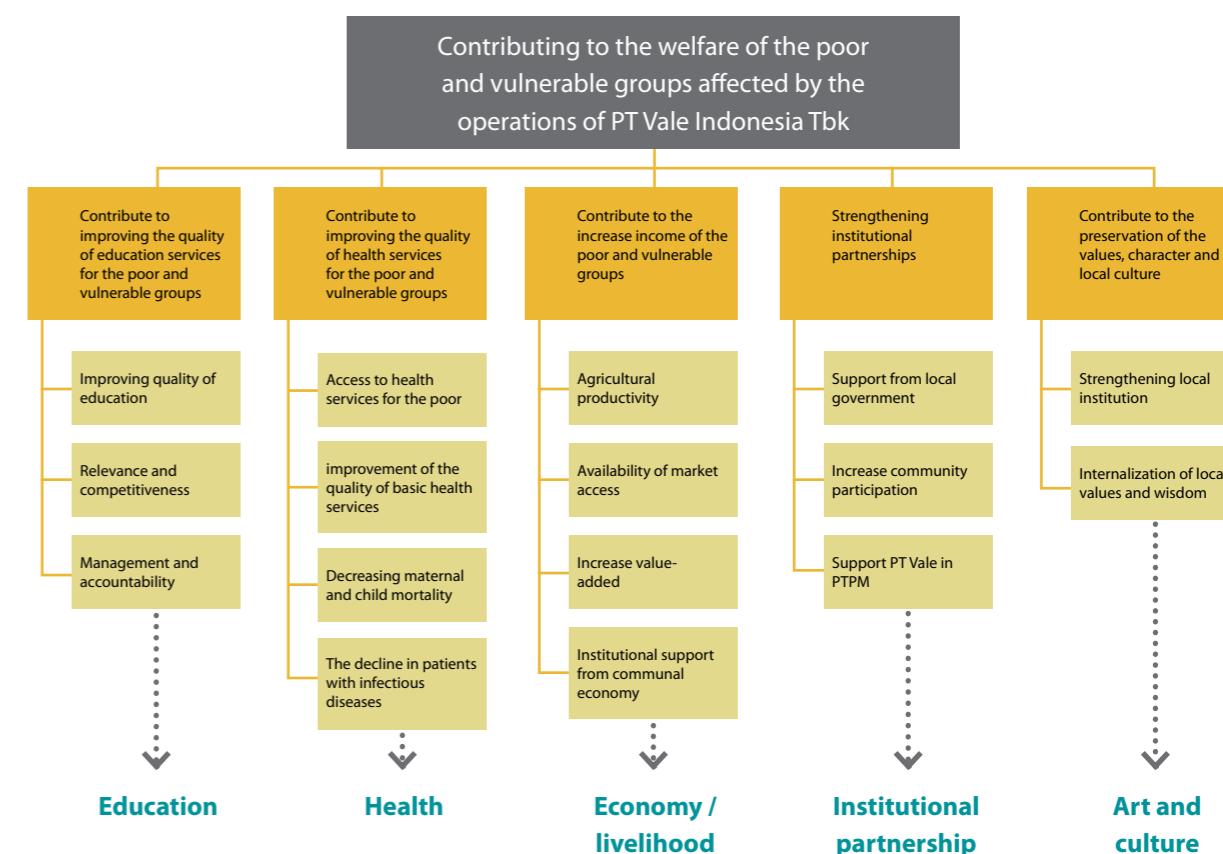
Tanggung jawab sosial perusahaan Corporate social responsibility

Tanggung jawab sosial perusahaan Corporate social responsibility

Program Terpadu Pengembangan Masyarakat



Integrated Program for Community Development



Rencana untuk masa depan yang berkelanjutan

PTPM secara signifikan telah mengubah paradigma tanggung jawab sosial PT Vale, yang berdampak pula pada berubahnya cara pandang mitra masyarakat dan pemerintah kami, yaitu dari "memberi" dan "bergantung" menjadi saling kerja sama dan pembangunan berkelanjutan.

Seiring dengan langkah ke depan, kunci kesuksesan rencana tersebut adalah dengan menjaga pendekatan kepemimpinan yang secara positif akan memperkuat dasar-dasar program dan menjaga komitmen terhadap pola pikir "kerja sama" yang sebelumnya telah terbentuk.

A plan for a sustainable future

The IPCD fundamentally changes PT Vale's social responsibility paradigm, and as importantly, the perspective of our community and government partners from a view of "giving" and "dependent" to a model of collaborative and sustainable development.

Moving forward, the keys to success will be to nurture a leadership approach that positively reinforces the principles of the plan and ensures ongoing commitment to the collaborative partnership framework that has been established.

Di samping itu, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan daerah dan nasional dalam aspek sosial, lingkungan dan ekonomi akan tetap diutamakan.

Inisiatif tanggung jawab sosial PT Vale berfungsi untuk menjalankan dan melembagakan tidak hanya kelangsungan program-program dan proses di dalamnya, tetapi juga semangat terhadap pemberdayaan dan kerja sama yang berkelanjutan. Kami yakin bahwa langkah ini adalah kunci kesuksesan keberlanjutan usaha kami dan akan menjadi warisan sejarah perusahaan kami di Indonesia.

In addition, compliance with local and national regulatory standards for social, environmental and economic issues will continue to be a priority.

PT Vale's corporate social responsibility initiative will serve to operationalize and institutionalize not just programs and processes, but also the spirit of sustainable empowerment and partnership. We believe this is the key to sustaining our business successfully, and that it ultimately will be the legacy of our history in Indonesia.

Tanggung jawab sosial perusahaan

Corporate social responsibility

Gambaran tahun 2013

Dalam konteks PTPM, PT Vale mengarahkan pendanaan kegiatan pengembangan masyarakat pada program pengembangan berkelanjutan. Pada tahun 2013, PT Vale mengalokasikan dana sebesar lebih dari AS\$3,5 juta atau sekitar Rp35 milyar untuk program pengembangan masyarakat secara rutin di tiga provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Tengah, dan Tenggara.

Kesehatan

Pendanaan program pengembangan masyarakat di bidang kesehatan memerlukan sekitar lebih dari Rp10 milyar. Di wilayah Sulawesi Selatan, sebagian besar dana tersebut digunakan untuk keperluan bantuan medis bagi masyarakat non-karyawan yang telah melakukan sebanyak lebih dari 7.000 kunjungan medis. Selain itu, sebagian dari dana tersebut juga digunakan untuk menggalakkan upaya pencegahan dan dukungan terhadap peningkatan kondisi kesehatan, seperti pemberantasan sarang nyamuk di kabupaten Nuha, Malili, Wasuponda dan Towuti. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan puskesmas setempat dan Dinas Kesehatan Luwu Timur.

Di Sulawesi Tenggara, Perseroan mengeluarkan lebih dari Rp530 juta untuk membangun klinik di Kolaka Utara; dan di Sulawesi Tengah, Perseroan juga menyokong dana untuk beberapa pusat kesehatan di Bahodopi dan Bahomoteve.

Pendidikan

Total dana untuk program pendidikan pada tahun 2013 mencapai lebih dari Rp5,32 milyar, terutama untuk Sulawesi Selatan.

Inisiatif PT Vale dalam bidang pendidikan meliputi:

- Bantuan dana sebesar lebih dari Rp190 juta untuk 32 tenaga guru honorer di empat wilayah pemberdayaan PT Vale.

2013 in review

Within the context of the IPCD, PT Vale focused our community development funding towards sustainable program development. In 2013, PT Vale provided funds for regular community development programs totaling more than US\$3.5 million, or about Rp35 billion for the three provinces of South Sulawesi, Central Sulawesi and Southeast Sulawesi.

Health

Programs in the health sector accounted for more than Rp10 billion of community development funding. In South Sulawesi, a major portion of the fund subsidized medical assistance for more than 7,000 visits by the non-employee general public. A further portion of the fund was used to promote preventive and supportive efforts to improve health conditions, such as the mosquito nest eradication efforts in the districts of Nuha, Malili, Wasuponda and Towuti, carried out in cooperation with the local health centres and District Health Office of East Luwu.

In Southeast Sulawesi, the Company contributed more than Rp530 million to building clinics in North Kolaka; and in Central Sulawesi, the Company assisted several health centres in Bahodopi and Bahomoteve.

Education

Total funding for educational programs in 2013 was more than Rp5.32 billion, mainly in South Sulawesi.

PT Vale's initiatives in education included:

- Assistance of more than Rp190 million for 32 intern teachers in four of PT Vale's empowerment districts.

- Dana untuk program beasiswa. Sebagai contoh, kami bekerja sama dengan kantor administrasi kabupaten Luwu Timur untuk memberi beasiswa bagi empat pelajar Luwu Timur untuk kuliah di Universitas Islam Negeri Hidayatullah, Jakarta; kami memberi beasiswa bagi para anak asuh; dan total dana yang dikucurkan mencapai Rp1,1 milyar.
- Bantuan bagi 50 pemuda setempat untuk mengadakan pelatihan kompetensi di Pusat Pelatihan Industri Makassar (BLKI – Balai Latihan Kerja Industri) dengan perkiraan dana sebesar Rp680 juta.
- Memberi dukungan dana untuk beragam acara terkait pendidikan, termasuk Kegiatan Sosial pelajar SMP Towuti, ujian try-out ikatan mahasiswa dan pengembangan perpustakaan setempat.
- Bantuan sebesar Rp190 juta bagi ratusan pelajar SMA di Kabupaten Luwu Timur untuk mengikuti program ujian tutorial masuk perguruan tinggi.
- Bantuan dana sekitar Rp400 juta untuk pengembangan dan perbaikan TK Sorowako.
- Bantuan penyediaan sebuah bis sekolah bagi pelajar di Desa Balambano (Daerah Wasuponda) serta biaya operasional bis melalui dana sebesar lebih dari Rp130 juta. Jumlah yang hampir sama juga diberikan untuk Daerah Malili untuk bantuan transportasi sehingga total mencapai Rp370 juta.
- Dana untuk membuka kesempatan kerja dan magang industri sebesar Rp480 juta.

Sosial budaya dan Keagamaan

PT Vale mendukung berbagai kegiatan terkait pemeliharaan budaya lokal, pertunjukkan seni, dan aktivitas lainnya yang mendorong kehidupan sosial yang harmonis. Termasuk di dalam kegiatan yang melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama.

Tanggung jawab sosial perusahaan

Corporate social responsibility

- Funding for scholarship programs. For example, we cooperated with the East Luwu Regency administration to fund four students from East Luwu to study at Hidayatullah State Islamic University, Jakarta; we funded scholarships for Foster Children; and scholarships were provided to the community totaling Rp1.1 billion.
- Assistance for 50 local youths to conduct competency training in Makassar Industrial Training Center (BLKI – Balai Latihan Kerja Industri) through a contribution of approximately Rp680 million.
- Support funding for various education-related events, including Towuti administration junior high school student's Social Activity, students' association exam try-outs, and the development of a local library.
- Assistance of Rp190 million to help hundreds of high school students in East Luwu Regency to participate in a college admission exam tutorial program.
- Support of approximately Rp400 million for the development and improvement of Sorowako Kindergarten.
- Help in getting to school for local students in Balambano Village (Wasuponda District) by providing a school bus and its operational expenses through a donation of more than Rp130 million. About the same amount was donated to Malili District for transportation assistance, making the total donation approximately Rp370 million.
- Funding for employment opportunities and industrial internships for a total of Rp480 million.

Social Culture and Religion

PT Vale supports various events related to the preservation of local culture, the performing arts and activities that promote a harmonious social life. This has included activities involving the Forum for Inter-Religions Harmony (FKUB - Forum Kerukunan Umat

Tanggung jawab sosial perusahaan

Corporate social responsibility

Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain perayaan Natal bersama, acara tabligh akbar, safari Ramadhan, perayaan Idul Fitri, Hari Jadi Luwu – hari perayaan berdirinya kabupaten Luwu, Hari Jadi Morowali, dan lain-lain. Pada tahun 2013, PT Vale telah mengeluarkan dana lebih dari Rp2,07 milyar untuk bidang kegiatan budaya dan keagamaan.

Olahraga dan Kepemudaan

PT Vale mendukung kegiatan olahraga dan kepemudaan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah untuk olahraga basket, voli, badminton, sepak bola, karate, tenis meja, catur, balap dan rugby. Jumlah dana yang dikeluarkan untuk semua kegiatan tersebut adalah lebih dari Rp1,21 milyar.

Usaha Masyarakat

Kategori pendanaan ini meliputi pertanian, hortikultura, perikanan, peternakan, serta pengembangan usaha kecil dan menengah. PT Vale telah menyalurkan bantuan sebesar lebih dari Rp10 milyar untuk kepentingan ini.

Provinsi Sulawesi Selatan telah menerima Rp9 milyar untuk mendukung sejumlah program, antara lain:

- Pengadaan traktor tangan di Kabupaten Malili
- Dukungan keuangan dan operasional untuk pemilik perkebunan lada
- Peternakan sapi dan kambing
- Kegiatan studi banding di Jawa Timur untuk pengembangan pertanian padi di Kawasan Towuti
- Mendukung aktivitas Program Mitra Desa Mandiri (PMDM) di Luwu Timur

Provinsi Sulawesi Tengah telah menerima bantuan sebesar kurang lebih Rp320 juta, yang dialokasikan untuk program pengembangan kanal irigasi dan akses jalan untuk petani.

Beragama) such as a Christmas mass celebration, the *tabligh akbar* event, a Safari Ramadhan trip in the holy month of Ramadhan, an Eid Fitri celebration, Independence Day, Luwu Anniversary – celebration of establishment of Luwu, Morowali Anniversary, and others. In 2013, PT Vale contributed more than Rp2.07 billion toward culture and religion.

Sports and Youth

PT Vale supported sports and youth events in South Sulawesi and Central Sulawesi for basketball, volleyball, badminton, football, karate, table tennis, chess, road racing and rugby. Total support for these events was more than Rp1.21 billion.

Civic and Community Affairs

This funding category includes agriculture, horticulture, fisheries, animal husbandry, and the development of small- and medium-sized enterprises. PT Vale has distributed aid of more than Rp10 billion in total to these concerns.

South Sulawesi received Rp9 billion to support a variety of programs such as:

- Procuring hand tractors in Malili District.
- Financial and operations support for pepper plantation owners.
- Farming of cattle and goats.
- Conducting a comparative study in East Java for the development of rice farming in the Towuti District.
- Supporting activities of the Independent Village Partnership Program (PMDM – Program Mitra Desa Mandiri) in East Luwu.

Central Sulawesi received assistance of approximately Rp320 million, which was allocated to programs for improvements to irrigation canals and the farmers' access road.

Provinsi Sulawesi Tenggara telah menerima sekitar Rp669 juta yang dialokasikan untuk program-program sebagai berikut:

- Bantuan untuk pelatihan nelayan dan usaha kecil
- Pengadaan alat penyemprot tangan, traktor tangan, serta perlengkapan pertanian dan lokakarya yang lain dan peralatan untuk petani di berbagai daerah.

Dukungan tambahan untuk fasilitas umum dan bantuan bencana

Selain kategori-kategori yang telah disebutkan di atas, selama tahun 2013 PT Vale juga telah menyediakan bantuan fasilitas umum dan bantuan bencana sebesar Rp5,89 milyar .

Di Provinsi Sulawesi Selatan, Perseroan mendukung pembangunan fasilitas umum, di antaranya:

- Papan informasi di empat wilayah yang menjelaskan program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh Perseroan dan pemerintah setempat
- Memasok generator ke desa Matano (kecamatan Nuha) serta memperbaiki akses jalan menuju Desa Tapuondau di wilayah Nuha

Provinsi Sulawesi Tengah telah menerima kurang lebih Rp590 juta untuk mendukung pembangunan baru, kanal, serta air bersih untuk masyarakat setempat.

Provinsi Sulawesi Tenggara telah menerima lebih dari Rp1,369 milyar untuk pengadaan air bersih di Desa Manggolo (Kabupaten Kolaka), perbaikan rumah dan sekolah, serta penyediaan perumahan untuk para dokter dan paramedis.

Selain itu, dengan dana tersebut, Perseroan membantu pembangunan masjid di Desa Rantelimbong (Kabupaten Kolaka Utara).

Southeast Sulawesi received approximately Rp669 million, allocated to such programs as:

- Aid for coaching and training for fishermen and small businesses.
- Supplying hand sprayers, hand tractors and other farm and workshop machinery and tools to farmers in the regions.

Additional support for public facilities and disaster relief

In addition to the areas traditionally supported by our community development funds, PT Vale also provided aid for public facilities and disaster relief in the amount of Rp5.89 billion in 2013.

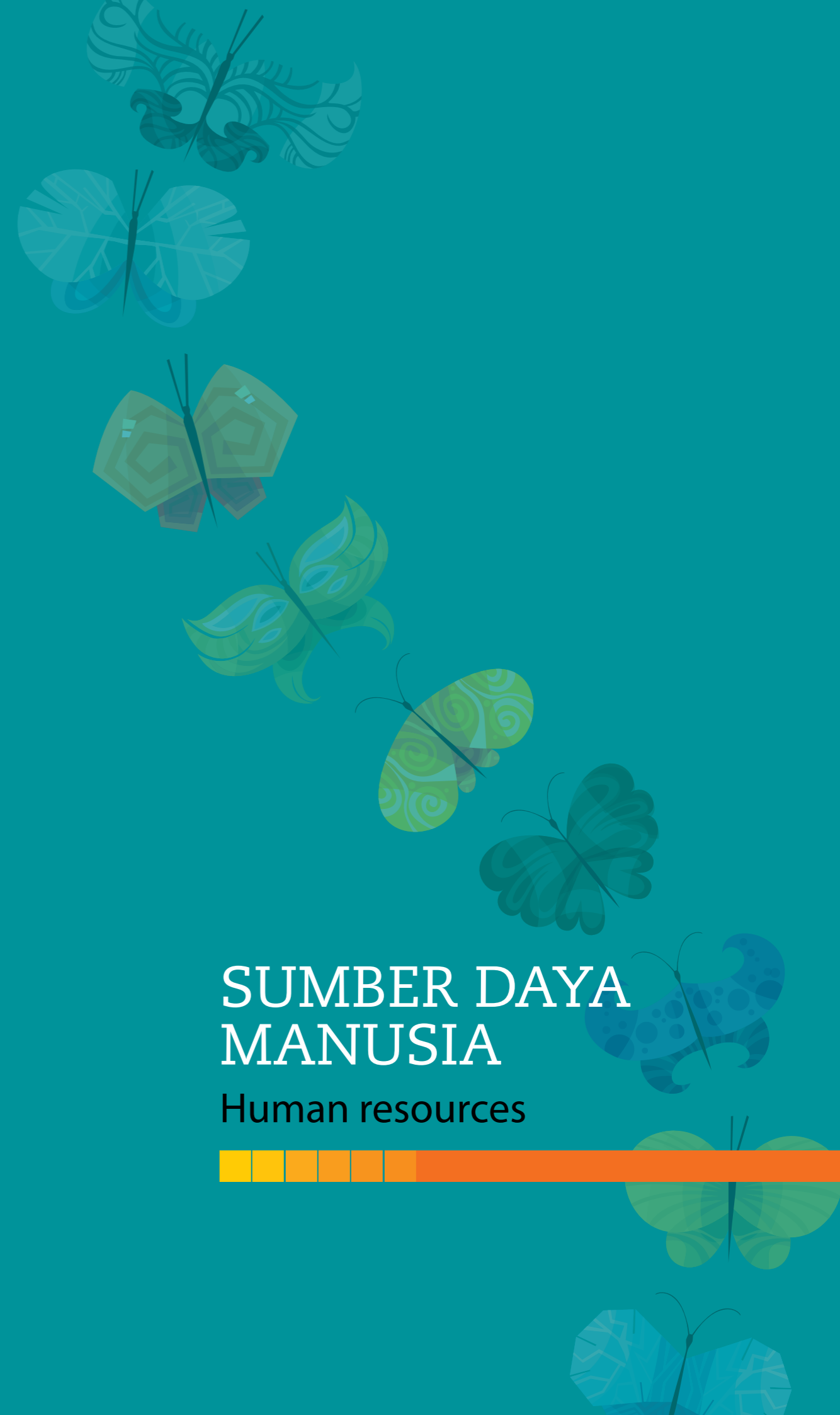
In South Sulawesi, the Company supported the construction of public facilities, among them:

- Information boards in four districts that explain community development programs initiated by the Company and local government .
- Supplying a generator to the village of Matano (Nuha sub-district) and improving road access to Tapuondau Village in Nuha district.

Central Sulawesi received approximately Rp590 million to support new building construction, canals and clean water for local communities.

Southeast Sulawesi received more than Rp1.369 billion to provide a clean water supply in Manggolo Village (Kolaka Regency), home and school improvements, and housing for doctors and paramedics.

In addition, with that fund, the Company supported construction of a mosque in the Rantelimbong Village (North Kolaka Regency).



SUMBER DAYA MANUSIA

Human resources



Sumber daya manusia

Human resources

Membangun kompetensi dan kapasitas untuk masa depan

Strategi kami untuk pertumbuhan dilandasi oleh dua tujuan utama – meningkatkan kapasitas produksi dan memaksimalkan produktivitas melalui kualitas operasi dan efisiensi. Tentunya banyaknya tenaga kerja yang mumpuni diperlukan untuk meraih kedua tujuan ini.

Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia yang dapat memenuhi tujuan strategis Perseroan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan pendekatan fundamental kami terhadap praktik sumber daya manusia. Hal ini merupakan fokus kerja Perseroan pada tahun 2013 yang kami sebut sebagai *HR Breakthrough*.

HR Breakthrough

HR Breakthrough diperkenalkan pada April 2013 dan PT Vale berharap bahwa praktik ini akan membuahkan peningkatan yang signifikan dalam fungsi SDM kami pada akhir tahun 2014. Peningkatan ini akan memberi dampak positif pada karyawan, proses, dan sistem kami. Dengan *HR Breakthrough*, kami akan terus membuat inisiatif pengembangan kompetensi secara konsisten, memenuhi kebutuhan SDM secara akurat, dan memberikan program pengembangan yang dapat diikuti oleh segenap karyawan. Semua ini kami lakukan guna mendukung strategi pertumbuhan.

Ada ungkapan yang mengatakan bahwa kita tidak bisa memperbaiki sesuatu yang tidak terukur. Oleh karena itu, kami telah mulai menjalankan dengan ketat proses pemantauan dan pengukuran hasil kinerja utama berdasarkan lima landasan proses:

1. Merencanakan dan menyelaraskan karyawan
2. Mempekerjakan karyawan
3. Memberdayakan karyawan
4. Mengembangkan karyawan
5. Memperkuat kinerja

Building competency and capacity for the future

Our strategy for growth is based on two key imperatives – increasing our production capacity and maximizing productivity through operational efficiency and excellence. Both of these imperatives will demand a significantly larger and highly skilled workforce.

In order to develop the human resource necessary to meet our strategic objectives, we first had to improve our fundamental approach to our human resources practice. That was our focus in 2013, and we refer to it as *HR Breakthrough*.

HR Breakthrough

The *HR Breakthrough* was introduced in April 2013 and PT Vale expects to see measurable improvements in HR functions by end of 2014. These improvements will positively affect our people, process and systems. With *HR Breakthrough*, we will pursue competency development initiatives consistently, address the needs accurately, and provide development that is accessible to employees, all in support of our growth strategy.

It is true that you can't fix what you don't measure. To that end, we have begun to develop a rigorous process of monitoring and measuring key performance metrics based on five process pillars:

1. Plan and align workforce
2. Hire workforce
3. Deploy workforce
4. Develop workforce
5. Reinforce performance

Kami mulai melakukan pemetaan terhadap tolok ukur kompetensi dan produktivitas pada tahun 2013, dimana langkah ini telah menunjukkan hasil yang positif.

- Pada akhir tahun 2013, jumlah karyawan mengalami penurunan sebesar 15 orang dibandingkan dengan bulan November akibat pensiun dan berakhirnya masa kontrak. Angka ini merupakan yang terendah selama delapan bulan terakhir. Saat ini kami tengah menyesuaikan jumlah tenaga kerja sesuai kebutuhan, dan hal ini merupakan langkah penting mencapai produktivitas.
- Terdapat peningkatan jumlah kenaikan jabatan internal dibandingkan dengan rekrutmen eksternal, terutama dalam *leadership roles*. Hal ini memperlihatkan telah tumbuhnya kesadaran akan pentingnya pengembangan bakat internal dan proses suksesi karir.
- Penggunaan cuti sakit terus menurun. Kampanye kesehatan yang digalakkan oleh *Medical Services* serta komunikasi intensif terkait penggunaan cuti sakit telah memberi kontribusi terhadap penurunan penggunaan cuti sakit.
- Dampak lanjutannya adalah penggunaan lembur semakin turun. Hal ini juga mendorong peningkatan produktivitas Perseroan.
- Kinerja *Employee Services* terus menunjukkan tren yang baik dan konsisten pada paruh terakhir tahun 2013. Tim terus menilai peluang untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat layanan. Penyusunan kembali kantor dan pengalokasian kembali sumber daya bertujuan untuk mengatasi masalah aksesibilitas yang sering dikeluhkan oleh karyawan.
- Para pemimpin telah memakai sistem survei global untuk memantau dan mengukur hasil kinerja. Hasil-hasil yang memuaskannya dari survei tersebut menjadi dasar untuk menekankan dan mendukung keterlibatan karyawan sejalan dengan tujuan pertumbuhan kami untuk terus melakukan peningkatan.

We began competency and productivity benchmark mapping initiatives in 2013, and have already seen positive trends.

- At the end of 2013, headcount decreased by 15 compared to November's number due to the completion of contracts and retirements. This is the lowest figure for the past eight months. We are right-sizing our workforce, and this is an important productivity initiative.
- We saw an increasing number of internal promotions compared to external recruitment, especially in leadership roles. There has been growing awareness of the importance of developing internal talent and the significance of career succession process.
- The decreasing use of sick leave showed a sustainable trend. Ongoing health-improvement campaigns conducted by medical services and our encouragement for employees to not abuse sick leave benefits have contributed to the decrease.
- As a result of decreased sick leave, overtime usage has decreased. This is also attributable to the Company's improved productivity performance.
- Performance by *Employee Services*' employees showed a sustainable improvement in the last half of 2013. The team continuously assess opportunities to improve and sustain service levels. For example, ongoing office re-arrangement and resource re-allocations are aimed at addressing accessibility concerns that are raised by employees.
- Leaders have embraced our global survey system for monitoring and measuring performance metrics. The strengths revealed in the survey provide a baseline for affirming and promoting employee engagement in line with our growth objective of improving.

Sumber daya manusia

Human resources

Sumber daya manusia

Human resources

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) PT Vale

Agar tenaga kerja nasional dapat lebih siap untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menetapkan standar bagi kompetensi profesional dengan membentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia yang bertanggung jawab dalam mengawasi program sertifikasi kompetensi. Sebagai bagian dari pelaksanaan program tersebut, pemerintah mengajak sektor industri dan swasta untuk mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam rangka mengembangkan kompetensi karyawan melalui seperangkat standar nasional yang jelas, terukur, dan dapat diverifikasi.

LSP merespon program dari Pemerintah Indonesia ini dengan mendirikan LSP-P1 (pihak pertama), dimana PT Vale berada di bawah koordinasi langsung Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), lembaga sertifikasi nasional. PT Vale adalah perusahaan tambang pertama yang memiliki LSP pihak pertama (P1) di Indonesia, dan dianggap sebagai perusahaan yang menjadi tolok ukur dalam hal kompetensi di industri yang kami geluti.

Dengan LSP PT Vale, Perseroan dan karyawan kami memiliki pemahaman yang jelas mengenai persyaratan profesional setiap pekerjaan atau jabatan serta jalur pengembangan yang terdokumentasi dengan baik untuk mendapat sertifikasi yang tepat.

LSP PT Vale telah diakreditasi oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) pada tanggal 21 Mei 2013. Hal ini menunjukkan komitmen kami untuk siap menghadapi pasar terbuka ASEAN pada tahun 2015. Hingga saat ini, kami berwenang untuk menyertifikasi 23 kelompok jabatan untuk 152 standar kompetensi dan memiliki 124 penilai bersertifikat serta akan mempersiapkan tujuh master penilai.

PT Vale Profession Certification Body

To better prepare the national workforce to meet the demands of a growing economy, the Government of Indonesia has been trying to standardize professional competency and has established the Indonesian National Profession Certification Body, responsible for oversight of the certification program. As part of the program, the government has invited industry and private sector organizations to establish Professional Certification Body (Lembaga Sertifikasi Profesi/LSP) to develop employee competencies through a set of clear, measurable and verifiable national standards.

PT Vale has responded to the Government of Indonesia program by establishing LSP-P1 (first party). PT Vale is positioned under the direct coordination of Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), the national certification body. PT Vale is the first mining company to have LSP first party (P1) in Indonesia, and is regarded as the benchmark for competency in our industry.

With the LSP PT Vale, the Company and our employees have a clear understanding of the professional requirements of each job or position, and a well-documented development path for achieving appropriate certifications.

LSP PT Vale was accredited by BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) on May 21, 2013, and represents our commitment to prepare for the ASEAN open market in 2015. To date, we are authorized to certify 23 job clusters for 152 standard competencies and have 124 certified assessors and preparing seven master assessors.

Program Pengembangan Kepemimpinan

Program Pengembangan Kepemimpinan Perseroan dirancang dan diselenggarakan untuk membekali para manajer PT Vale dengan kompetensi kepemimpinan yang memadai, sehingga mereka dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam pekerjaan masing-masing serta dalam melatih dan membina karyawan di bawahnya. Sebagai program inti, Program Pengembangan Kepemimpinan mengasah keterampilan seluruh pemimpin PT Vale melalui pengembangan kompetensi tertentu, seperti pemikiran strategis, perubahan kepemimpinan dan pengelolaan hasil.

Sebagai bagian dari Program Pengembangan Kepemimpinan, kami telah menjalankan program *Effective Mentoring* serta program *Feedback and Coaching Skills* pada tahun 2013. Kedua program tersebut telah berjalan dengan sukses dan disambut dengan sangat baik serta akan ditawarkan kembali pada tahun 2014.

Sebagai bagian integral dari perencanaan suksesi, pengembangan kepemimpinan merupakan fokus penting pada tahun 2013. Selain program pembinaan dan pelatihan, tim HR juga mengembangkan proyek berbagi pengetahuan, dimana senior dari tim manajemen senior bertemu dengan para pemimpin di lapangan untuk mendiskusikan isu-isu dan peluang serta bertukar pikiran mengenai aspek penting dalam operasi kami. Kami berharap bahwa sesi ini akan mendorong komunikasi yang lebih kuat di seluruh organisasi.

Leadership Development Program

Our Leadership Development Program equips PT Vale managers with leadership competencies that support them in performing their own jobs and in coaching and mentoring their teams. The Leadership Development Program, as a core program of our competency strategy, strengthens the skills of all PT Vale leaders by developing specific competencies, such as strategic thinking, change leadership and results management.

As part of Leadership Development Program, we introduced the *Effective Mentoring* program and the *Feedback and Coaching Skills* program in 2013. Both of these programs were extremely well received and highly successful, and will be offered again in 2014.

Leadership development, as an integral part of succession planning was an important focus in 2013. The HR team also piloted a knowledge-sharing project, where members of the senior management team met with our leaders in the field to discuss issues and opportunities and exchange ideas on important aspects of our operations. We expect that these sessions will foster more robust communication across the organization.

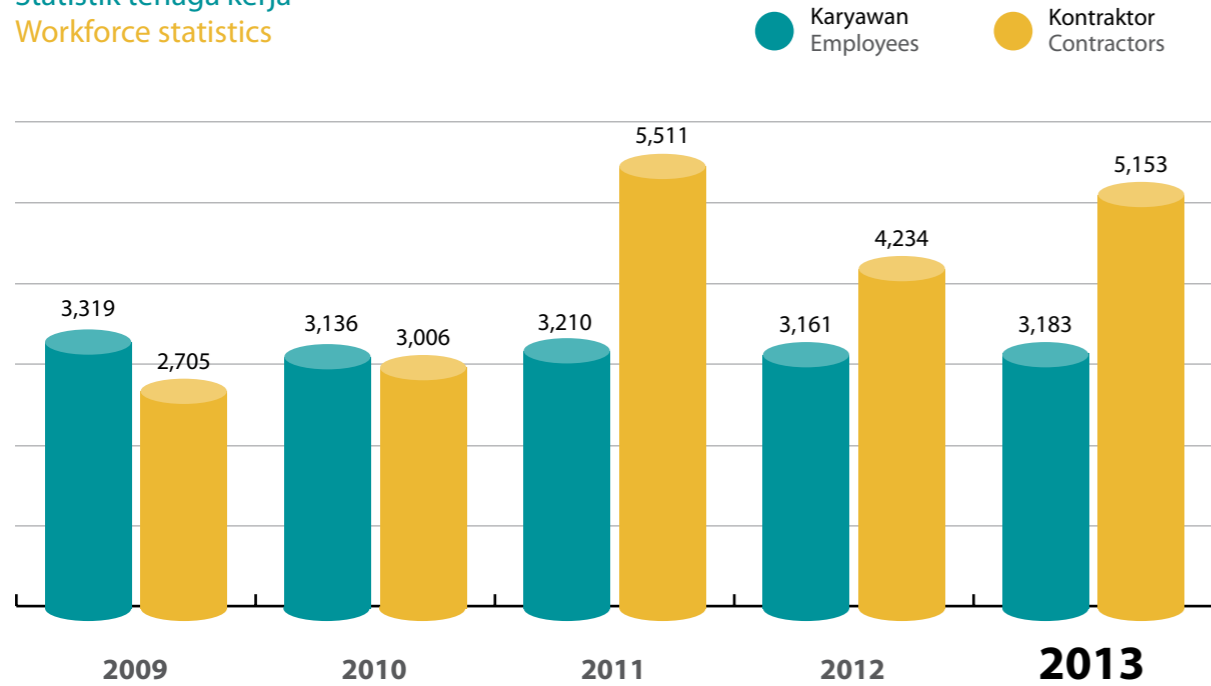
Sumber daya manusia

Human resources

Sumber daya manusia Human resources

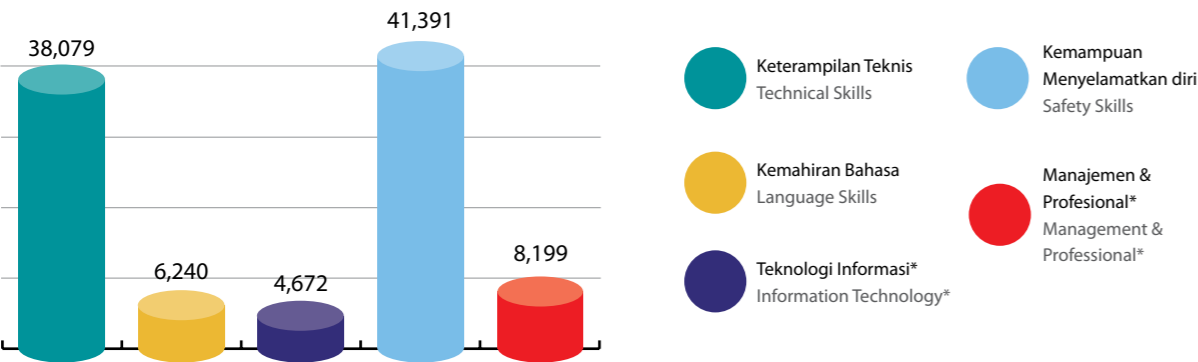
Sumber daya manusia Human resources

Statistik tenaga kerja Workforce statistics



Sebagai tambahan, PT Vale juga mempekerjakan 29, 26, 24, dan 17 karyawan asing masing-masing pada tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013. In addition, PT Vale also employed 29, 26, 24 and 17 expatriates in 2010, 2011, 2012 and 2013 respectively.

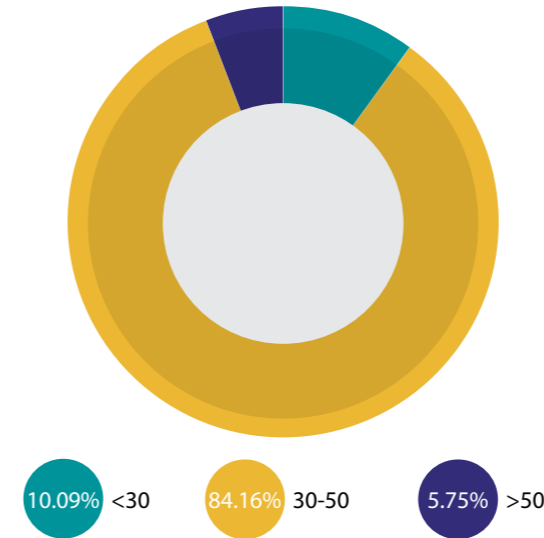
Pengembangan Karyawan Employee development



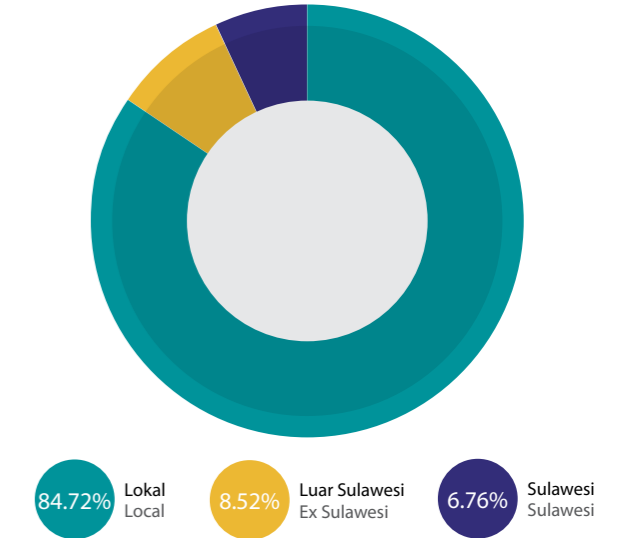
*Sebagai langkah penghematan biaya yang Perseroan lakukan, diperlukan pendekatan yang bijak dalam berinvestasi pada pelatihan karyawan tahun 2013. Agar dapat menutupi semua biaya pada area ini, diputuskan untuk membatasi jumlah pelatihan teknologi informasi dan pelatihan manajemen dan profesional untuk terus fokus pada pelatihan dan keterampilan mengenai keselamatan diri.

*Our cost saving initiatives required that we prudently invest in employee training in 2013. In order to better contain costs in this area, the decision was made to limit information technology and management and professional training in order to continue to focus on safety training and skills.

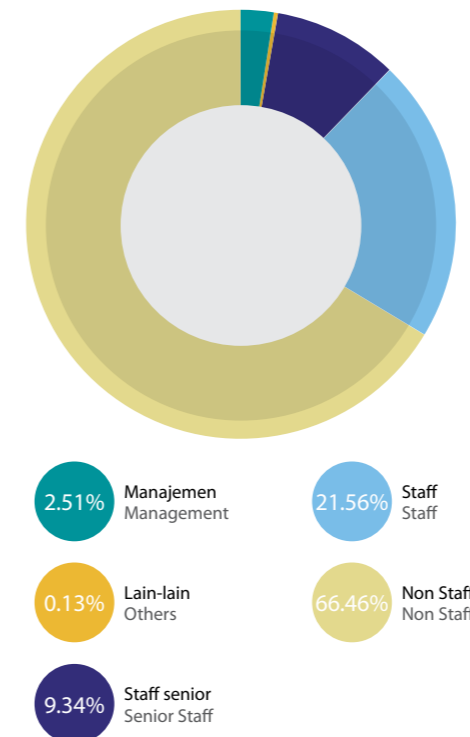
Demografi berdasarkan usia Demographics by age



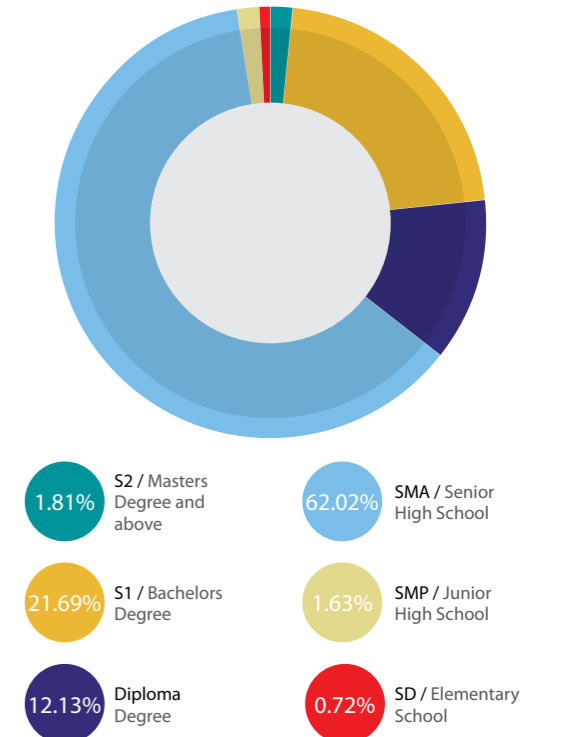
Demografi berdasarkan tempat penerimaan Demographics by point of hire



Demografi berdasarkan tingkat pekerjaan Demographics by job level



Demografi berdasarkan tingkat pendidikan Demographics by education level



Sumber daya manusia

Human resources

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Karyawan kami adalah motor pertumbuhan Perseroan, dan kami terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan para karyawan dengan memberikan pelatihan untuk mendukung pengembangan karir. Berbagai program pelatihan kami dirancang sesuai dengan standar kualifikasi profesi dan teknis yang disyaratkan dalam industri pertambangan. Pelatihan ini tidak hanya membantu karyawan untuk semakin memenuhi standar jabatan, tetapi juga meningkatkan kinerja mereka sehingga nantinya akan tercipta produktivitas dan efisiensi.

Seluruh karyawan berhak untuk bekerja dalam kondisi aman. Di PT Vale, zero harm merupakan tujuan kami. Seluruh program manajemen kesehatan dan keselamatan kami didasarkan pada tujuan tersebut dan nilai Perseroan, yaitu kehidupan adalah hal yang terpenting.

Kesejahteraan karyawan dijaga melalui pemberlakuan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang ketat. Praktik K3 ini merupakan bagian penting dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB), serta kebijakan dan praktik lainnya terkait kesehatan dan keselamatan yang mencakup Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (disebut HSMS). Sistem inilah yang mendukung tujuan kami untuk mencapai Zero Harm (Bebas Cidera). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, PT Vale telah membentuk pengawasan operasional yang mencakup beberapa standar, persyaratan, dan kompetensi dalam berbagai aspek K3. Standar ini diantaranya adalah Critical Activities Requirements, Golden Rules (CAR), pelatihan pengembangan K3, inspeksi dan program audit (untuk kondisi dan perilaku dalam bekerja) serta peninjauan berkala dan langkah-langkah perbaikan praktik K3 Perseroan.

Occupational Health and Safety

Our employees are the engine propelling the growth of the Company, and we continually strive to improve their welfare by providing training to support career advancement. Our various training programs are designed according to standards of professional and technical qualifications required in the mining industry, and not only better qualify our employees, but improve their performance on the job and ultimately, our productivity and efficiency.

All employees have the right to be safe at work. At PT Vale we have a zero harm objective. All our health and safety management programs are based on this objective, and our value of 'life matters most.

The welfare of our employees is safeguarded through the provision of rigorous Occupational Health and Safety (OHS) practices. OHS practices are an important part of our Collective Labour Agreement (CLA), together with other policies and practices in OHS that comprise our Health and Safety Management System (HSMS). To support our Zero Harm goal, PT Vale has established operational controls that include several standards, requirements and competencies in various aspects of OHS. These standards include Critical Activities Requirements (CAR), Golden Rules, OHS training development, Inspection and Audit programs (for both work conditions and behaviours) and regular Company review and improvement.

Kami terus memantau praktik-praktik ini di bawah kepemimpinan "champions" K3 yang ditunjuk untuk masing-masing departemen. Para *champion* ini bekerja sama dengan para karyawan dan manajemen PT Vale untuk memastikan pelaksanaan HSMS dan terus dilakukannya upaya-upaya perbaikan pelaksanaan K3 ini.

Kegiatan kampanye K3 secara rutin kami lakukan kepada seluruh karyawan, kontraktor dan anggota masyarakat. Pada tahun 2013, kami mengadakan Pelatihan Dasar Keselamatan Diri untuk seluruh karyawan dan kontraktor serta menyediakan layanan cek kesehatan bagi calon karyawan serta karyawan dan kontraktor kami sendiri. Kami juga menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi gejala sakit pinggang dan getaran di seluruh tubuh, serta membangun ulang kondisi kerja untuk mengurangi paparan gas berbahaya pada tanur.

Pada tahun 2013, kami juga terus melaksanakan program Major Hazard Standard (MHS) dan sebagai bagian dari upaya kami untuk meningkatkan pengendalian operasional kami sebagai bagian dari HSMS.

We continuously monitor these practices under the leadership of OHS "champions", appointed in each department. The champions work with employees and PT Vale management to ensure the implementation of HSMS and continuous improvement of our practices is implemented.

Our OHS campaign is delivered to all employees, contractors and members of our communities on a regular basis. In 2013, we delivered Basic Safety Training to all employees and new contractors and provided medical check up services to candidate employees, employees and contractors. We also implemented measures to reduce instances of low back pain and whole body vibration, and reengineered working conditions to reduce exposure to harmful gases in the furnaces.

In 2013, we also continued the implementation of Major Hazard Standard (MHS) and CAR in our efforts to improve our operational control as part of HSMS.

Sumber daya manusia

Human resources

Sumber daya manusia

Human resources

Jumlah karyawan di bidang K3 / Number of employees in OHS field

UNIT KERJA WORKING UNIT	PERIODE PELAPORAN REPORTING PERIOD			
	2010	2011	2012	2013
Keselamatan Kerja Occupational Safety	98	91	105	62
Kesehatan Kerja Occupational Health	96	96	99	89
Jumlah Total	194	187	204	151

Total Reportable Injury Frequency Rate (TRIFR) / Total Reportable Injury Frequency Rate (TRIFR)

Tahun Year	Jumlah Terjadinya Kecelakaan Number of reportable injuries (TRI)	TRIFR
2010	28	1.55
2011	26	1.62
2012	25	1.25
2013	25	1.38

TRIFR = jumlah terjadinya kecelakaan / total man hour x 1,000,000
Tidak ada kecelakaan fatal yang terjadi selama tahun 2013.

TRIFR = number of reportable injuries / total man hour x 1,000,000
There were no fatal incidents in 2013.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2013

Responsibility for the 2013 Annual Report

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas ketepatan dari Laporan Tahunan ini berikut laporan-laporan keuangan dan informasi lainnya yang terkait.

Board of Commissioners and Board of Directors are fully responsible for the correctness of this Annual Report and the accompanying financial statement and related financial information.

14 Maret 2013
March 14, 2013

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Ricardo de Carvalho
Presiden Komisaris
President Commissioner

Arief T. Surowidjojo
Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen
Vice President Commissioner and Independent Commissioner

Peter Poppinga
Komisaris
Commissioner

Mark Travers
Komisaris
Commissioner

Jennifer Maki
Komisaris
Commissioner

Kevin Graham
Komisaris
Commissioner

Akira Nozaki
Komisaris
Commissioner

Mikinobu Ogata
Komisaris
Commissioner

Irwandy Arif
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Idrus A. Paturusi
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Direksi Board of Directors

Nico Kanter
Presiden Direktur
President Director

Bernardus Irmanto
Wakil Presiden Direktur
Vice President Director

Josimar Pires
Direktur
Director

Febriany Eddy
Direktur
Director



LAPORAN
KEUANGAN
Financial statements



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN PADA DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

**DIRECTORS' STATEMENT REGARDING
RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS AS AT AND FOR
THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2013 AND 2012**

PT VALE INDONESIA Tbk

Atas nama Dewan Direksi, yang bertanda tangan di bawah ini:

On behalf of the Board of Directors, we, the undersigned:

1.	Nama	Nicolas D. Kanter	Name
	Alamat	Plaza Bapindo, Citibank Tower, Lt. 22 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190	Office Address
	Alamat Domisili (sesuai KTP)	Jl. Cikatomas II No. 5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Address of Domicile (as per Identity Card)
	Nomor Telepon	+62 21 524 9001/524 9000	Telephone
	Jabatan	Presiden Direktur/President Director	Position
2.	Nama	Febriany Eddy	Name
	Alamat	Plaza Bapindo, Citibank Tower, Lt. 22 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190	Office Address
	Alamat Domisili (sesuai KTP)	Jl. Senopati Raya, RT/RW 008/003 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Address of Domicile (as per Identity Card)
	Nomor Telepon	+62 21 524 9002/524 9000	Telephone
	Jabatan	Direktur Keuangan/Chief Financial Officer	Position

Menyatakan bahwa:

Declare that:

- | | |
|--|--|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Vale Indonesia Tbk ("Perseroan"); | 1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Vale Indonesia Tbk (the "Company");</i> |
| 2. Laporan keuangan Perseroan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; | 2. <i>The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perseroan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Perseroan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan | 3. a. <i>All information in the Company's financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;</i>
b. <i>The Company's financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts, and</i> |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perseroan. | 4. <i>We are responsible for the Company's internal control systems.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus, this statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi

For and on behalf of the Board of Directors

Jakarta, 26 Februari 2014/February 26, 2014

Presiden Direktur/President Director

Direktur Keuangan/Chief Financial Officer






(Nicolas D. Kanter)

(Febriany Eddy)

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

PT VALE INDONESIA TBK

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Vale Indonesia Tbk ("Perseroan") yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2013, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

We have audited the accompanying financial statements of PT Vale Indonesia Tbk (the "Company") which comprise the statement of financial position as at 31 December 2013, and the statement of comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Vale Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2013 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Vale Indonesia Tbk as at 31 December 2013 and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA
26 Februari/February 2014



Drs. Haryanto Sahari, CPA

Surat Ijin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0223

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan

Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 - INDONESIA, P.O. Box 2473 JKP 10001
T: +62 21 5212901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-151/KM.1/2010.

A140226002/DC2/HSH/II/2014

PT Vale Indonesia Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PADA 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2013 AND 2012

(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2013	2012
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2.3, 5a	200,020	172,239
Kas yang dibatasi penggunaannya	2.3, 5b	16,723	17,333
Piutang usaha			
- Pihak-pihak berelasi	2.4, 2.23, 6, 31e	65,902	112,640
Persediaan	2.5, 8	150,996	152,849
Pajak dibayar dimuka	2.14, 14a		
- Pajak penghasilan badan		83,833	45,289
- Pajak lainnya		28,008	44,333
Biaya dibayar di muka dan uang muka	2.6, 9	4,209	9,659
Aset keuangan lancar lainnya	7, 31e	7,804	10,548
Jumlah aset lancar		557,495	564,890
ASET TIDAK LANCAR			
Pajak dibayar dimuka	2.14, 14a		
- Pajak penghasilan badan		17,913	79,668
- Pajak lainnya		40,229	47,217
Piutang non-usaha			
- Pihak-pihak berelasi	2.4, 2.23, 31e	305	111
	2.7, 2.8, 2.9, 2.10,		
Aset tetap	10, 11	1,651,762	1,624,571
Aset keuangan tidak lancar lainnya	12	13,415	16,623
Jumlah aset tidak lancar		1,723,624	1,768,190
JUMLAH ASET		2,281,119	2,333,080

ASSETS

CURRENT ASSETS	
Cash and cash equivalents	
Restricted cash	
Trade receivables	
- Related parties	
Inventories	
Prepaid taxes	
- Corporate income tax	
- Other taxes	
Prepayments and advances	
Other current financial assets	
Total current assets	

NON-CURRENT ASSETS

Prepaid taxes	
- Corporate income tax	
- Other taxes	
Non-trade receivables	
- Related parties	
Fixed assets	
Other non-current financial assets	
Total non-current assets	

TOTAL ASSETS

PT Vale Indonesia Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PADA 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2013 AND 2012

(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2013	2012
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha			
- Pihak-pihak berelasi	2.21, 2.23, 13, 31f	11,211	10,888
- Pihak ketiga	2.21, 13	64,304	68,171
Akrual	2.13, 15a, 31f	29,972	31,614
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	2.15, 16	16,650	12,914
Utang pajak	2.14, 14b	6,905	4,654
Bagian lancar atas pinjaman bank jangka panjang	2.20, 17	35,863	35,643
Bagian lancar atas liabilitas imbalan pascakerja	2.15, 18	345	345
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	2.15, 31f	430	14
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	15b	3,220	1,422
Jumlah liabilitas jangka pendek		168,900	165,665
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pinjaman bank jangka panjang	2.20, 17	183,252	219,991
Liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang	2.15, 18	11,557	21,875
Liabilitas pajak tangguhan	2.14, 14d	157,302	162,005
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	2.12, 26	45,842	42,110
Jumlah liabilitas jangka panjang		397,953	445,981
JUMLAH LIABILITAS		566,853	611,646
EKUITAS			
Modal saham			
- Modal dasar - 39.745.354.880 saham dengan nilai nominal Rp25 per saham (nilai penuh) pada 31 Desember 2013 dan 2012			
- Modal ditempatkan dan disetor penuh - 9.936.338.720 saham pada 31 Desember 2013 dan 2012	19	136,413	136,413
Tambahan modal disetor	21	277,760	277,760
Saldo Laba	2.12, 22a, 22b		
- Dicadangkan		47,713	12,925
- Belum dicadangkan		1,252,380	1,294,336
JUMLAH EKUITAS		1,714,266	1,721,434
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		2,281,119	2,333,080

LIABILITIES

CURRENT LIABILITIES	
Trade payables	
- Related parties	
- Third parties	
Accruals	
Short-term employee benefit liabilities	
Taxes payable	
Current portion of long-term bank borrowings	
Current portion of post-employment benefit liabilities	
Share-based payment liabilities	
Other current financial liabilities	
Total current liabilities	

NON-CURRENT LIABILITIES

Long-term bank borrowings	
Long-term post-employment benefit liabilities	
Deferred tax liabilities	
Provision for asset retirement	
Total non-current liabilities	

TOTAL LIABILITIES

EQUITY

Share capital	
- Authorized capital - 39,745,354,880 shares with par value Rp25 per share (full amount) as at December 31, 2013 and 2012	
- Issued and fully paid capital - 9,936,338,720 shares as at December 31, 2013 and 2012	
Additional paid-in capital	
Retained earnings	
- Appropriated	
- Unappropriated	
TOTAL EQUITY	

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT Vale Indonesia Tbk

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2013 AND 2012
(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2013	2012	
Pendapatan	2.13, 2.23, 31a	921,638	967,327	Revenue
Beban pokok pendapatan	2.13, 23	(781,744)	(800,622)	Cost of revenue
LABA BRUTO		139,894	166,705	GROSS PROFIT
Pendapatan lainnya	2.13, 25a	(455)	(564)	Other income
Beban usaha	2.13, 24	13,041	12,613	Operating expenses
Beban lainnya	2.13, 25b	57,171	47,748	Other expenses
LABA USAHA		70,137	106,908	OPERATING PROFIT
Biaya keuangan	2.12, 2.20, 17, 26	14,678	15,485	Finance costs
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		55,459	91,423	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban pajak penghasilan	2.14, 14c	16,807	23,929	Income tax expense
LABA TAHUN BERJALAN		38,652	67,494	PROFIT FOR THE YEAR
Pendapatan komprehensif lain (Keuntungan)/Kerugian aktuarial dari program pensiun manfaat pasti dan imbalan kesehatan pascakerja, bersih	2.15, 18	(4,260)	4,737	Other comprehensive income Actuarial (gain)/loss from defined benefit plan and post- retirement medical benefits, net
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		42,912	62,757	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM - Dasar (dalam Dolar AS)	2.16, 29	0.004	0.007	EARNINGS PER SHARE - Basic (in US Dollars)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

4

PT Vale Indonesia Tbk

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2013 AND 2012
(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	Tersedia untuk pemilik Perseroan/Atributable to the owners of the Company					Saldo labal/Retained earnings
	Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Dicadangkan/ jaminan reklamasii/ Reclamation guarantee reserve	Cadangan umum/ General reserve	
Saldo 1 Januari 2012		136,413	277,760	12,641	5,342	1,337,013
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	67,494
Keuntungan/(Kerugian) aktuarial dari program pensiun manfaat pasti dan imbalan kesehatan pascakerja, bersih	2.22, 20	-	-	-	-	(4,737)
Dividen yang dideklarasikan	2.22, 20	-	-	(5,058)	-	(110,492)
Cadangan jaminan reklamasii	22a	-	-	-	-	5,058
Saldo 31 Desember 2012		136,413	277,760	7,583	5,342	1,294,336
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	38,652
Keuntungan/(Kerugian) aktuarial dari program pensiun manfaat pasti dan imbalan kesehatan pascakerja, bersih	2.22, 20	-	-	-	-	4,260
Dividen yang dideklarasikan	2.22, 20	-	-	28,039	-	(50,080)
Cadangan jaminan reklamasii	22a	-	-	-	6,749	-
Cadangan umum	22b	-	-	-	-	(6,749)
Saldo 31 Desember 2013		136,413	277,760	35,622	12,091	1,714,266

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT Vale Indonesia Tbk

LAPORAN ARUS KAS
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

	2013	2012
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	968,376	920,700
Pembayaran kas ke pemasok	(596,532)	(648,586)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(38,261)	(121,055)
Pengembalian pajak penghasilan badan	40,159	-
Pengembalian pajak lainnya	8,197	41,765
Pembayaran ke karyawan	(100,607)	(100,130)
Penerimaan lainnya	455	564
Pembayaran lainnya	(15,895)	(14,096)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	265,892	79,162
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembayaran untuk pembelian aset tetap	(140,487)	(146,965)
Arus kas bersih untuk aktivitas investasi	(140,487)	(146,965)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran dividen	(49,314)	(110,460)
Penempatan dana yang dibatasi penggunaannya	(42,244)	(43,686)
Penggunaan dana yang dibatasi penggunaannya	42,854	43,817
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(37,500)	(37,500)
Pembayaran beban keuangan	(9,192)	(10,724)
Arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan	(95,396)	(158,553)
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas	30,009	(226,356)
Kas dan setara kas pada awal tahun	172,239	399,155
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	(2,228)	(560)
Kas dan setara kas pada akhir tahun	200,020	172,239

STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2013 AND 2012

(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Receipts from customers
Payments to suppliers
Payments of corporate income tax
Refunds of corporate income tax
Refunds of other taxes
Payments to employees
Other receipts
Other payments
Net cash flows provided from operating activities
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Payments for acquisition of fixed assets
Net cash flows used for investing activities
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Payments of dividends
Placement of restricted cash
Usage of restricted cash
Payments of long-term borrowings
Payments of finance costs
Net cash flows used for financing activities
Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at the end of the year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Catatan atas Laporan Keuangan
PT Vale Indonesia Tbk
31 Desember 2013 dan 2012

1. Umum

PT Vale Indonesia Tbk, ("Perseroan") didirikan pada tanggal 25 Juli 1968 dengan akta No. 49 tanggal 25 Juli 1968, yang dibuat dihadapan Eliza Pondaag, notaris publik di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/59/18 tanggal 26 Juli 1968 dan diumumkan dalam Tambahan No. 93, Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 2 Agustus 1968. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan yang terakhir diubah dengan akta No. 75 tanggal 27 September 2011, yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., notaris di Jakarta tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada tanggal 27 September 2011. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-48198.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 4 Oktober 2011. Sekitar 58,73% saham Perseroan dimiliki oleh Vale Canada Limited, sekitar 20,49% oleh masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia, sekitar 20,09% oleh Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., dan oleh lainnya sekitar 0,69% (lihat Catatan 19).

Entitas induk langsung Perseroan adalah Vale Canada Limited dan entitas pengendali utama adalah Vale S.A., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Federal Brasil.

Pabrik Perseroan berlokasi di Sorowako, Sulawesi Selatan dan kantor yang terdaftar berlokasi di Plaza Bapindo, Citibank Tower, Lt. 22, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta.

Operasi Perseroan didasarkan atas Kontrak Karya yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") dan Perseroan. Kontrak Karya ini memberikan hak kepada Perseroan untuk mengembangkan dan mengoperasikan proyek nikel dan mineral-mineral tertentu lainnya di daerah yang sudah ditentukan di pulau Sulawesi. Kontrak Karya ini pada awalnya ditandatangani pada tanggal 27 Juli 1968 ("Kontrak Karya 1968") dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2008. Pada tanggal 15 Januari 1996, Perseroan dan Pemerintah menandatangani Persetujuan Perubahan dan Perpanjangan Kontrak Karya 1968 ("Persetujuan Perpanjangan"), yang memperpanjang operasi Perseroan sampai tahun 2025.

Sebagai tambahan, Perseroan telah menyepakati, tergantung pada kelayakan ekonomis dan teknis, untuk mengembangkan potensi endapan nikel di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Menurut Persetujuan Perpanjangan, ketentuan-ketentuan dan kondisi-kondisi dari Kontrak Karya 1968 secara umum tetap berlaku sampai 31 Maret 2008, kecuali untuk aturan-aturan tertentu yang terkait dengan bidang fiskal. Mulai tanggal 29 Desember 1995 (ditetapkan sebagai Tanggal Efektif dalam Persetujuan Perpanjangan), ketentuan-ketentuan perpajakan tertentu dari Kontrak Karya 1968, khususnya di bidang pemotongan pajak dan kredit investasi, telah diubah untuk lebih sejalan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia ketika Persetujuan Perpanjangan ditandatangani pada 29 Desember 1995. Sejak tanggal 1 April 2008, semua ketentuan-ketentuan dan kondisi-kondisi Persetujuan Perpanjangan diberlakukan.

Berikut adalah perubahan-perubahan prinsip dalam Persetujuan Perpanjangan yang berlaku mulai tanggal 1 April 2008:

- Royalti bijih nikel (garnierite) akan dibayarkan berdasarkan tarif tetap sebesar AS\$70,00 hingga AS\$78,00 per ton, tergantung jumlah produksi;
- Tarif sewa tanah per tahun akan naik menjadi AS\$1,50 per hektar dari AS\$1,00 per hektar;
- Aset yang tidak berhubungan dengan kegiatan ekspansi yang disepakati dalam Persetujuan Perpanjangan dan digunakan setelah tanggal 31 Maret 2008 untuk tujuan perhitungan Pajak penghasilan badan dapat diatur dengan formula depresiasi yang berbeda dari formula yang digunakan sebelumnya;

Notes to the Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk
December 31, 2013 and 2012

1. General

PT Vale Indonesia Tbk, ("the Company") was established on July 25, 1968 by deed No. 49 dated July 25, 1968 drawn up before Eliza Pondaag, a public notary in Jakarta. The Company's Articles of Association were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its decision letter No. J.A.5/59/18 dated July 26, 1968 and published in Supplement No. 93 to State Gazette of the Republic of Indonesia No. 62 dated August 2, 1968. These Articles of Association have been amended several times with the latest amendment made by deed No. 75, dated September 27, 2011, drawn up before Poerbaningsih Adi Warsito S.H., a notary in Jakarta, to reflect amendments to the Company's Articles of Association as approved in the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") on September 27, 2011. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through letter No. AHU-48198.AH.01.02.Tahun 2011 dated October 4, 2011. Approximately 58.73% of the Company's shares are currently owned by Vale Canada Limited, approximately 20.49% by the public through the Indonesia Stock Exchange, approximately 20.09% by Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., and by others approximately 0.69% (refer to Note 19).

The Company's immediate parent company is Vale Canada Limited and the ultimate parent entity is Vale S.A., a company established under the laws of the Federal Republic of Brazil.

The Company's plant is located in Sorowako, South Sulawesi and the registered office is located in Plaza Bapindo, Citibank Tower, 22nd floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta.

The Company's operations are conducted pursuant to a Contract of Work ("CoW") entered into by the Government of the Republic of Indonesia ("the Government") and the Company. The CoW grants the Company the right to develop and operate a project for nickel and certain other minerals in defined areas within the island of Sulawesi. The CoW originally entered into on July 27, 1968 ("the 1968 Contract") expired on March 31, 2008. On January 15, 1996, the Company and the Government signed the Agreement on Modification and Extension of the 1968 Contract ("the Extension Agreement"), extending the Company's operations to 2025.

In addition, the Company has undertaken, subject to economic and technical feasibility, to explore the potential development of its nickel deposits in Southeast Sulawesi and Central Sulawesi.

According to the Extension Agreement, the terms and conditions of the 1968 Contract generally remained in place until March 31, 2008, except for certain fiscal related provisions. Effective December 29, 1995 (defined as the Effective Date in the Extension Agreement), these provisions of the 1968 Contract, notably in the area of withholding taxes and investment credits, were modified to bring them more in line with applicable tax legislation in Indonesia when the Extension Agreement was signed on December 29, 1995. As at April 1, 2008, all of the remaining terms and conditions of the Extension Agreement took effect.

The following are the principal changes in the Extension Agreement that had immediate impact beginning on April 1, 2008:

- Royalties on nickel ore (garnierite) are payable at a fixed rate of US\$70.00 to US\$78.00 per metric ton, depending on total production;
- Land lease increased to US\$1.50 per hectare per annum from US\$1.00 per hectare;
- Assets not related to expansion undertakings agreed in the Extension Agreement and placed in service after March 31, 2008 could be subject to different formulas of depreciation for corporate income tax calculation purposes;

**Catatan atas Laporan Keuangan
PT Vale Indonesia Tbk
31 Desember 2013 dan 2012**

1. Umum (lanjutan)

- Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham pendiri hingga 31 Maret 2008 dibebaskan dari pungutan pajak. Pembayaran dividen kepada pemegang saham pendiri yang dideklarasikan antara tanggal 1 April 2008 hingga dan meliputi tanggal 1 April 2010 juga akan dibebaskan dari pemotongan pajak jika jumlahnya tidak melebihi saldo laba ditahan Perseroan seperti yang dilaporkan dalam neraca Perseroan pada tanggal 31 Maret 2008;
- Perseroan wajib membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan Kontrak Karya 1968 Perseroan tidak perlu membayar pajak bumi dan bangunan; dan
- Perseroan membayar berbagai retribusi, pajak, beban dan pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah di area operasional Perseroan sepanjang hal tersebut disetujui oleh Pemerintah Pusat. Tarif yang dikenakan tidak boleh melebihi tarif yang berlaku pada tanggal 29 Desember 1995 (tanggal yang dimuat dalam Perjanjian Perpanjangan). Ketentuan ini berlaku untuk semua perusahaan tambang lainnya dengan ketentuan dan persyaratan yang sama.

Fasilitas pembangkit listrik tenaga air ("PLTA") Perseroan yang ada pada saat ini dibangun dan beroperasi berdasarkan Keputusan Pemerintah tahun 1975. Keputusan ini, yang secara efektif juga mencakup pembangkit listrik Karebbe dan Balambano yang merupakan tambahan dari fasilitas pembangkit listrik awal Larona, yang memberikan hak kepada Pemerintah Indonesia untuk mengambil alih fasilitas listrik tenaga air tersebut dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dua tahun sebelum pengambilalihan. Tidak ada pemberitahuan tertulis yang diterima oleh Perseroan sampai saat ini. Apabila hak tersebut digunakan, fasilitas tersebut akan dialihkan sebesar nilai bukunya dengan syarat Pemerintah menyediakan tenaga listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasi Perseroan, yang tarifnya ditentukan berdasarkan biaya ditambah dengan margin laba yang normal, selama sisa masa Kontrak Karya.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan utama Perseroan adalah dalam eksplorasi dan penambangan, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan pemasaran nikel beserta produk mineral terkait lainnya. Perseroan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1978.

Pada tahun 1990, Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah 49,7 juta lembar saham atau 20% dari 248,4 juta lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Saham yang ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana tersebut dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia), pada tanggal 16 Mei 1990.

Saham yang diterbitkan oleh Perseroan terdiri atas saham biasa, dimana setiap satu saham memberikan satu hak suara bagi pemegang saham ataupun kuasanya yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan dan hak atas dividen dan pembagian sisa aset Perseroan dalam hal Perseroan dibubarkan, proporsional terhadap jumlah saham yang dimiliki.

Dalam RUPSLB yang diselenggarakan pada 6 Juli 2004, para pemegang saham menyetujui dilakukannya pemecahan saham biasa, dari satu saham menjadi empat saham. Hal ini berlaku efektif mulai 3 Agustus 2004.

Pada RUPSLB yang diselenggarakan pada 17 Desember 2007, para pemegang saham menyetujui pemecahan saham biasa, dari satu saham menjadi sepuluh saham, yang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas saham Perseroan. Hal ini berlaku efektif di Bursa Efek Indonesia mulai 15 Januari 2008.

**Notes to the Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk
December 31, 2013 and 2012**

1. General (continued)

- Dividends paid to the founding shareholders until March 31, 2008 are exempt from withholding tax. Payment of dividends to the founding shareholders declared between April 1, 2008 up to and including April 1, 2010 will also be exempted from withholding tax, in an aggregate amount not to exceed the amount of the Company's retained earnings as reported in the Company's balance sheet on March 31, 2008;
- The Company must pay land and building taxes. Under the 1968 Contract the Company was not required to pay these taxes; and
- The Company pays levies, taxes, charges and duties imposed by local governments with jurisdiction over the Company's operational area, if approved by the Central Government. The rates must not be higher than those prevailing on December 29, 1995 (the date stipulated in the Extension Agreement) and are imposed on all other mining companies in the applicable jurisdiction on the same terms and conditions.

The Company's existing hydroelectric facilities were constructed and are currently operating pursuant to the Governmental Decree of 1975. This decree, which effectively covers the Karebbe and the Balambano power plants which are additions to the original Larona facility, provided the Government with the right to acquire the hydroelectric facilities, with two years' prior written notice to the Company. No such notice has been given to date. If this right is exercised, the facilities will be transferred at their net book value under the condition that the Government shall supply the Company with sufficient electrical power for its operations, at a rate based on cost plus a normal profit margin, for the remaining term of the CoW.

As stated in Article 3 of its Articles of Association, the Company's main activities are exploration and mining, processing, storage, transportation and marketing of nickel and associated mineral products. The Company started its commercial operations in 1978.

In 1990, the Company conducted an Initial Public Offering ("IPO") of 49.7 million shares or 20% of the 248.4 million shares issued and fully paid. The shares offered to the public in the IPO were registered on the Jakarta Stock Exchange (now the Indonesia Stock Exchange) on May 16, 1990.

The Company's shares consist of common shares, where the holder of one share or his proxy is entitled to one vote at the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and to dividends and the proceeds upon winding up of the Company in proportion to the number of and amounts paid on the shares held.

At an EGMS held on July 6, 2004, the shareholders approved a four-for-one stock split of the Company's common shares. This became effective on August 3, 2004.

At an EGMS held on December 17, 2007, the shareholders approved a ten-for-one stock split of the Company's common shares, with the objective of increasing the liquidity of the Company's shares. This became effective on the Indonesia Stock Exchange on January 15, 2008.

**Catatan atas Laporan Keuangan
PT Vale Indonesia Tbk
31 Desember 2013 dan 2012**

1. Umum (lanjutan)

Per 31 Desember 2013 dan 2012, komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

31 Desember	2013	2012	December 31
Presiden Komisaris	Ricardo Rodrigues de Carvalho	Ricardo Rodrigues de Carvalho	President Commissioner
Wakil Presiden Komisaris	Arief T. Surowidjojo*)	Arief T. Surowidjojo *)	Vice President Commissioner
Komisaris	Jennifer Anne Maki Gerd Peter Poppinga Mark James Travers Akira Nozaki Mikinobu Ogata Kevin James Graham Irwandy Arif *) Idrus Paturusi *)	Jennifer Anne Maki Gerd Peter Poppinga Mark James Travers Harumasa Kurokawa Mikinobu Ogata Conor Spollen Irwandy Arif *) Idrus Paturusi *)	Commissioners
Ketua Komite Audit	Arief T. Surowidjojo	Arief T. Surowidjojo	Chairman of Audit Committee
Anggota Komite Audit	Erry Firmansyah Sidharta Utama	Erry Firmansyah Sidharta Utama	Audit Committee Members
Presiden Direktur	Nicolas D. Kanter	Nicolas D. Kanter	President Director
Wakil Presiden Direktur	Bernardus Irmanto	Bernardus Irmanto	Vice President Director
Direktur	Febriany Eddy Josimar Souza Pires	Fabio Hilal Bechara Josimar Souza Pires Michael J. O'Sullivan	Directors

*) Komisaris Independen

Perseroan mengadakan RUPST pada 23 April 2013 yang menyetujui antara lain, pembagian dividen final untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, penyisihan laba Perseroan sebagai dana cadangan sebesar AS\$6,7 juta, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Terkait dengan susunan Direksi, pemegang saham menyetujui penunjukan kembali anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir pada penutupan RUPST 2013, yaitu, Josimar Souza Pires sebagai Direktur, efektif sejak penutupan RUPST 2013 sampai dengan penutupan RUPST di tahun 2015. Lebih lanjut, para pemegang saham juga mengukuhkan pengunduran diri Michael J. O'Sullivan dan menyetujui penunjukan anggota Direksi baru, yaitu Febriany Eddy, efektif sejak penutupan RUPST 2013 sampai dengan penutupan RUPST di tahun 2014, yang diangkat sebagai Direktur menggantikan Fabio Hilal Bechara, yang telah secara efektif mengundurkan diri sebelum RUPST 2013. Terkait dengan susunan Dewan Komisaris, pemegang saham menyetujui penunjukan anggota baru Dewan Komisaris yaitu, Kevin James Graham, efektif sejak penutupan RUPST 2013 sampai dengan penutupan RUPST di tahun 2014, yang diangkat sebagai Komisaris menggantikan Conor Spollen yang telah secara efektif mengundurkan diri sebelum RUPST 2013.

Pada tanggal 24 September 2013, Perseroan mengadakan RUPSLB, guna mengukuhkan pengunduran diri Harumasa Kurokawa, yang telah secara efektif mengundurkan diri sebagai Komisaris Perseroan sebelum RUPSLB. Pemegang saham juga menyetujui pengundukan anggota Dewan Komisaris baru, Akira Nozaki, efektif sejak penutupan RUPSLB sampai dengan penutupan RUPST di tahun 2014.

Jumlah seluruh karyawan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah 3.183 (2012: 3.161) (tidak diaudit).

**Notes to the Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk
December 31, 2013 and 2012**

1. General (continued)

As at December 31, 2013 and 2012, the composition of the Company's Board of Commissioners, Audit Committee and Board of Directors were as follows:

2012	December 31
Ricardo Rodrigues de Carvalho	President Commissioner
Arief T. Surowidjojo *)	Vice President Commissioner
Jennifer Anne Maki Gerd Peter Poppinga Mark James Travers Harumasa Kurokawa Mikinobu Ogata Conor Spollen Irwandy Arif *) Idrus Paturusi *)	Commissioners
Arief T. Surowidjojo	Chairman of Audit Committee
Erry Firmansyah Sidharta Utama	Audit Committee Members
Nicolas D. Kanter	President Director
Bernardus Irmanto	Vice President Director
Fabio Hilal Bechara Josimar Souza Pires Michael J. O'Sullivan	Directors

*) Independent Commissioners

The Company held an AGMS on April 23, 2013, which approved, amongst others, distribution of the final dividend for the year ended December 31, 2012, the appropriation of US\$6.7 million of the Company's net profit to the general reserve, the appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company and appointment of the public accountant who will audit the Company's financial statements for the year ending December 31, 2013.

With regard to composition of the Board of Directors, the shareholders approved the re-appointment of the member of the Board of Directors whose term of office ended at the closing of the 2013 AGMS, namely, Josimar Souza Pires as Director, effective as at the closing of the 2013 AGMS until the closing of the AGMS in 2015. Further, the shareholders also confirmed the resignation of Michael J. O'Sullivan and approved the appointment of a new member of the Board of Directors, Febriany Eddy, effective as at the closing of the 2013 AGMS until the closing of the AGMS in 2014, who was appointed as Director replacing Fabio Hilal Bechara, who effectively resigned as Director prior to the 2013 AGMS. With regard to composition of the Board of Commissioners, the shareholders approved the appointment of a new member of the Board of Commissioners, namely, Kevin James Graham, effective as at the closing of the 2013 AGMS until the closing of the AGMS in 2014, who was appointed as Commissioner replacing Conor Spollen, who has effectively resigned as Commissioner prior to the 2013 AGMS.

On 24 September 2013, the Company held an EGMS to ratify the resignation of Harumasa Kurokawa, who has effectively resigned as Commissioner prior to the EGMS. The shareholders also approved the appointment of a new member of the Board of Commissioners, Akira Nozaki, effective as at the closing of the EGMS until the closing of the AGMS in 2014.

The total number of employees as at December 31, 2013 was 3,183 (2012: 3,161) (unaudited).

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan

Ikhtisar kebijakan akuntansi Perseroan yang signifikan berikut ini disajikan untuk membantu pembaca dalam mengevaluasi laporan keuangan terlampir. Kebijakan akuntansi ini telah diterapkan secara konsisten dalam semua hal yang material untuk periode yang tercakup oleh laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan lain. Laporan keuangan Perseroan dibuat dan disetujui oleh Direksi pada tanggal 26 Februari 2014.

2.1. Penyajian laporan keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Kontrak Karya dengan Pemerintah, pembukuan Perseroan dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS" atau "AS\$") dan dalam Bahasa Inggris.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang didasarkan pada konsep harga perolehan historis kecuali aset dan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.

Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, memerlukan penggunaan estimasi akuntansi penting tertentu. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia juga mengharuskan manajemen untuk melakukan pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan. Area-area yang memerlukan tingkat pertimbangan atau kompleksitas yang tinggi, atau area dimana asumsi dan estimasi merupakan hal yang signifikan dalam laporan keuangan, diungkapkan dalam Catatan 4.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dibulatkan menjadi ribuan Dolar AS yang terdekat, yang merupakan mata uang penyajian dan fungsional, kecuali dinyatakan lain.

Item-item yang disertakan dalam laporan keuangan diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi.

2.2. Penjabaran mata uang

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter yang signifikan dalam mata uang selain Dolar AS dijabarkan ke Dolar AS dengan kurs yang berlaku pada akhir periode. Penjabaran dari aset dan liabilitas lainnya umumnya dilakukan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Selama tahun berjalan, transaksi-transaksi dalam mata uang selain Dolar AS dijabarkan ke Dolar AS dengan kurs yang berlaku selama bulan berjalan. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penjabaran dan transaksi dalam mata uang asing dibukukan pada laporan laba rugi.

2.3. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas, kas pada bank, dan investasi jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang, dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya disajikan secara terpisah sebagai "kas yang dibatasi penggunaannya".

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dengan mengklarifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas disajikan setelah dikurangi cerukan.

2.4. Piutang usaha dan non-usaha

Piutang usaha adalah jumlah yang masih harus dibayar oleh pelanggan untuk nikel dalam *matte* yang dijual dalam transaksi bisnis pada umumnya. Jika pembayaran piutang diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang, piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang non-usaha dari pihak berelasi merupakan saldo piutang yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi Perseroan.

2. Summary of significant accounting policies

The following summary of the significant accounting policies of the Company is presented to assist the reader in evaluating the accompanying financial statements. These policies have been followed consistently in all material respects for the periods covered in the financial statements, unless otherwise stated. The Company's financial statements were prepared and approved by the Board of Directors on February 26, 2014.

2.1. Presentation of financial statements

As required by its CoW with the Government, the Company maintains its books in United States Dollars ("US Dollars" or "US\$") and in English.

The financial statements are prepared in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, based on the historical cost concept except for financial assets and liabilities at fair value through profit or loss, and using the accrual basis except for the statements of cash flows.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. The accounting principles generally accepted in Indonesia also require management to exercise its judgement in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 4.

Figures in the financial statements are rounded to and stated in thousands of US Dollars, which is the presentation and functional currency, unless otherwise stated.

Items included in the financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates.

2.2. Translation of currencies

At each statement of financial position date, significant monetary assets and liabilities in currencies other than US Dollars are translated into US Dollars at period-end exchange rates. The translation of all other assets and liabilities are generally recognized at the exchange rates prevailing at the dates of the transactions.

During the year, transactions in currencies other than US Dollars are translated at rates prevailing during each month. Gains or losses resulting from the translation and from foreign exchange transactions are included in profit or loss.

2.3. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and time deposits with a maturity period of three months or less at the time of placement and which are not used as collateral or are not restricted.

Cash and cash equivalents which are restricted for use, are presented separately as "restricted cash".

The statements of cash flows have been prepared using the direct method by classifying the cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents are presented net of overdrafts.

2.4. Trade and non-trade receivables

Trade receivables are amounts due from customers for nickel in matte sold in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Non-trade receivables from related parties are receivables reflecting loans given to related parties of the Company.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.4. Piutang usaha dan non-usaha (lanjutan)

Piutang usaha dan non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penyisihan untuk penurunan nilai. Penyisihan untuk penurunan nilai dari piutang usaha dan non-usaha dibuat ketika terdapat bukti objektif bahwa Perseroan tidak dapat menagih keseluruhan nilai yang terdapat pada ketentuan awal dari piutang tersebut. Kesulitan keuangan yang signifikan pada debitur, kemungkinan bahwa debitur mengalami kebangkrutan atau reorganisasi keuangan, dan wanprestasi atau tunggakan terhadap pembayaran dipertimbangkan sebagai indikator bahwa piutang usaha dan non-usaha mengalami penurunan nilai. Nilai dari penyisihan adalah selisih antara nilai tercatat piutang dengan nilai kini dari perkiraan arus kas dimasa datang, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga efektif awal. Nilai tercatat dari aset dikurangi pos cadangan, dan jumlah kerugian diakui pada laporan laba rugi. Ketika piutang usaha dan non-usaha tidak dapat tertagih, piutang usaha dan non-usaha dihapus terhadap pos cadangan untuk piutang usaha dan non-usaha. Pemulihan jumlah tertagih yang sebelumnya dihapus dikreditkan pada laporan laba rugi.

2.5. Persediaan

Persediaan dinyatakan dengan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai dari persediaan barang jadi nikel dan nikel dalam proses dinilai dengan metode biaya produksi rata-rata dan persediaan bahan pembantu (*supplies*) dinilai dengan metode harga pembelian rata-rata.

Harga perolehan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja serta alokasi biaya overhead yang terkait secara langsung baik yang bersifat tetap maupun variabel. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan estimasi biaya penjualan.

2.6. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar di muka dibebankan ke laporan laba rugi tahun berjalan berdasarkan metode garis lurus selama masa manfaatnya.

2.7. Aset tetap – pemilikan langsung

Aset tetap yang diperoleh secara langsung diakui berdasarkan harga perolehan historis, dikurangi akumulasi penyusutan. Harga perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap.

Biaya pengembangan tambang merupakan biaya-biaya yang terjadi di area penambangan sebelum aktivitas penambangan dimulai. Termasuk kedalam biaya ini adalah biaya-biaya untuk pembuatan jalan yang memberikan akses ke area-area tambang.

Biaya-biaya selanjutnya diikutsertakan kedalam nilai tercatat aset atau diakui sebagai aset terpisah, jika memadai, hanya ketika besar kemungkinan masa manfaat ekonomis di masa yang akan datang terkait dengan aset tetap akan mengalir kedalam Perseroan dan biaya dari aset tetap tersebut dapat diukur secara andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihentikan pengakuannya. Keseluruhan perbaikan dan perawatan dibebankan kedalam laporan laba rugi pada periode keuangan dimana hal tersebut terjadi.

Biaya eksplorasi dibebankan pada saat terjadinya.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatatnya dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi sebagai akibat dari penghapusan aset tetap tersebut diakui dalam laporan laba rugi.

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.4. Trade and non-trade receivables (continued)

Trade and non-trade receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method, less provision for impairment. A provision for impairment of trade and non-trade receivables is established when there is objective evidence that the Company will not be able to collect all amounts due according to the original terms of the receivables. Significant financial difficulties of the debtor, the probability that the debtor will enter bankruptcy or financial reorganization, and default or delinquency in payments are considered indicators that the trade and non-trade receivable is impaired. The amount of the provision is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account, and the amount of the loss is recognized in profit or loss. When a trade and non-trade receivable is uncollectible, it is written off against the allowance account for trade and non-trade receivables. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited to profit or loss.

2.5. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost of finished nickel inventory and nickel in process is determined on an average production cost basis and supplies at an average purchase cost basis.

Cost of finished goods and work in progress is comprised of materials, labor and an appropriate proportion of directly attributable fixed and variable overheads. Net realizable value is the estimate of the selling price in the ordinary course of business, less the costs of completion and the estimated selling expenses.

2.6. Prepayments

Prepaid expenses are charged to profit or loss on a straight-line basis over the expected period of benefit.

2.7. Fixed assets – direct ownership

Fixed assets directly acquired are stated at historical cost, less accumulated depreciation. Historical cost includes expenditures that are directly attributable to the acquisition of the items.

Mine development costs represent expenditures incurred in a mining area before mining activities commence. Included in these costs is construction of roads providing access to mining areas.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that the future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognized. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

Exploration costs are expensed as incurred.

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values are eliminated from the financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of fixed assets are recognized in profit or loss.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.8. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset-aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Apabila dalam suatu kontrak sewa porsi yang signifikan atas risiko dan manfaat kepemilikan aset tetap berada ditangan *lessor*, maka sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi dibebankan ke laporan laba rugi atas dasar garis lurus selama masa sewa.

Sewa aset tetap dimana Perseroan memiliki secara substansi seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini pembayaran sewa minimum.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara bagian yang merupakan pelunasan liabilitas dan bagian yang merupakan beban keuangan sedemikian rupa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo pembiayaan. Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disusutkan dengan metode yang sama dengan metode penyusutan aset tetap yang dimiliki sendiri. Jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa Perseroan akan mendapatkan kepemilikan atas aset pada akhir masa sewa, aset tersebut disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset dan masa sewa.

2.9. Aset tetap dalam penyelesaian

Akumulasi biaya dari konstruksi bangunan dan instalasi mesin dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam penyelesaian. Biaya-biaya ini direklasifikasi kedalam aset tetap ketika konstruksi telah selesai. Depresiasi dibebankan sejak tanggal dimana aset tersebut siap digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

Biaya keuangan dan biaya pinjaman lain, seperti biaya diskonto atas pinjaman baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tertentu yang memenuhi syarat, dikapitalisasi sampai proses pembangunan tersebut selesai. Untuk pinjaman yang dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset tertentu yang memenuhi syarat, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama tahun berjalan, dikurangi pendapatan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset tertentu yang memenuhi syarat, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aset tertentu yang memenuhi syarat. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang seluruh biaya pinjaman atas seluruh pinjaman yang belum dibayarkan, diluar pinjaman yang secara khusus digunakan untuk perolehan aset dalam penyelesaian tertentu yang memenuhi syarat.

2.10. Penyusutan, deplesi dan amortisasi

Penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus yang didasarkan atas taksiran masa manfaat suatu aset, estimasi masa produksi cadangan bijih, atau selama masa berlakunya Kontrak Karya yang mana yang lebih dulu. Pengecualian terhadap kebijakan ini adalah untuk fasilitas bendungan air yang penyusutannya dilakukan selama masa manfaat 40 tahun berdasarkan Keputusan Pemerintah Indonesia tahun 1975, seperti yang dijelaskan pada Catatan 1 atas laporan keuangan ini.

Estimasi masa manfaat untuk penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	5 - 40
Jalan dan jembatan	5 - 30
Bangunan	5 - 30
Pengembangan tambang	5 - 30
Pabrik dan mesin	5 - 30
Perabotan dan peralatan kantor	5

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.8. Leases

Determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is based on substance of the arrangement and assessment of whether fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets, and the arrangement conveys a right to use the asset.

Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases. Payments made under operating leases are charged to profit or loss on a straight-line basis over the period of the lease.

Leases of fixed assets where the Company has substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalized at the lease's commencement at the lower of the fair value of the leased property and the present value of the minimum lease payments.

Each lease payment is allocated between the liability and finance charges so as to achieve a constant rate of interest on the finance balance outstanding. Fixed assets acquired under finance leases are depreciated similarly to owned assets. If there is no reasonable certainty that the Company will hold the ownership by the end of the lease term, the asset is depreciated over the shorter of the useful life of the asset and the lease term.

2.9. Construction in progress

The accumulated costs of the construction of buildings and the installation of machinery are capitalized as construction in progress. These costs are reclassified to fixed assets when the construction is complete. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use in the manner intended by management.

Finance and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when construction is complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalization rate to the amount expended on the qualifying asset. The capitalization rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings made specially for the purpose of obtaining a qualifying asset under construction.

2.10. Depreciation, depletion and amortization

Depreciation of fixed assets is calculated on the straight-line method based on the earlier of the estimated useful life of the asset, the estimated period of production from ore reserves, or the period of the CoW. An exception to this policy is the hydroelectric dam facilities, which are depreciated over a 40-year useful life based on the 1975 Decree of the Indonesian Government, as referred to in Note 1 to these financial statements.

The estimated useful lives of fixed assets used for depreciation are as follows:

	Years
Hydroelectric dam buildings and facilities	5 - 40
Roads and bridges	5 - 30
Buildings	5 - 30
Mine development	5 - 30
Plant and machinery	5 - 30
Furniture and office equipment	5

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.10. Penyusutan, deplesi dan amortisasi (lanjutan)

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir periode pelaporan.

Perseroan mengalokasikan bagian dari aset tetap yang biaya perolehannya signifikan dan mendepresiasi komponen tersebut secara terpisah jika bagian tersebut memiliki masa manfaat yang berbeda.

Amortisasi biaya pemugaran dihitung berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya dengan menggunakan metode garis lurus.

2.11. Penurunan nilai dari aset non-keuangan

Aset yang memiliki umur manfaat tidak terbatas - sebagai contoh, goodwill atau aset tak berwujud yang belum siap digunakan - tidak diamortisasi dan dilakukan pengujian penurunan nilai secara tahunan. Aset yang diamortisasi atau disusutkan ditelaah untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau perubahan dalam keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui sebesar jumlah dimana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas). Aset non-keuangan selain goodwill yang mengalami penurunan nilai, ditelaah untuk kemungkinan pembalikan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasi sesuai dengan standar akuntansi lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

2.12. Pengeluaran untuk lingkungan hidup

Operasi Perseroan telah, dan di masa akan datang mungkin akan dipengaruhi oleh secara berbeda dari waktu ke waktu perubahan-perubahan dalam peraturan perundangan mengenai lingkungan hidup. Kebijakan Perseroan adalah memenuhi atau, jika mungkin, melampaui semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut, dengan menerapkan langkah-langkah yang secara teknis telah teruji dan layak secara ekonomis.

Pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan program lingkungan hidup dan reklamasi yang sedang berjalan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya, atau dikapitalisasi dan disusutkan tergantung pada masa manfaat ekonomisnya. Cadangan Jaminan Reklamasi juga telah dibentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku (lihat Catatan 22a). Disamping itu, provisi atas penghentian pengoperasian aset telah diakui sebesar taksiran biaya penutupan area tambang, penghentian dan pembongkaran fasilitas.

Provisi atas penghentian pengoperasian aset dicatat untuk mengakui kewajiban hukum atau konstruktif yang berkaitan dengan penghentian penggunaan aset tetap yang berasal dari akuisisi, pembangunan atau pengembangan dan/atau operasi normal aset tetap. Penghentian penggunaan aset tetap ini adalah penarikan selain penghentian sementara pemakaian termasuk penjualan, penelantaran, pendaur-ulangan/penghapusan dengan cara lainnya.

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.10. Depreciation, depletion and amortization (continued)

The assets' residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

The Company allocates significant parts of the fixed asset costs and depreciates separately each significant part if those parts have different useful lives.

Amortization of refurbishment costs is calculated on the estimated economic useful life of the refurbishment using a straight-line method.

2.11. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life - for example, goodwill or intangible assets not ready to use - are not subject to amortization and are tested annually for impairment. Assets that are subject to amortization or depreciation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash-generating units). Non-financial assets other than goodwill that suffered impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal of impairment losses for assets other than goodwill would be recognized if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal of impairment losses will be immediately recognized in profit or loss, except for assets measured using the revaluation model as required by other accounting standards. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

2.12. Environmental expenditures

The operations of the Company have been, and may in the future be affected from time to time to varying degrees by changes in environmental regulations. The Company's policy is to meet or, if possible, surpass the requirements of all applicable regulations issued by the Government by the application of technically proven and economically feasible measures.

Expenditures that relate to ongoing environmental and reclamation programs are charged to profit or loss as incurred, or capitalized and depreciated depending on their future economic benefits. A Reclamation Guarantee Reserve has also been set up in accordance with applicable Government requirements (refer to Note 22a). In addition, a provision for asset retirement has been recognized for the estimated costs of mine closure, decommissioning and dismantling of facilities.

The provision for asset retirement is provided for legal or constructive obligations associated with the retirement of a tangible long-lived asset that results from the acquisition, construction or development and/or the normal operation of a long-lived asset. The retirement of a long-lived asset is its other than temporary removal from service including its sale, abandonment, recycling or disposal in some other manner.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.12. Pengeluaran untuk lingkungan hidup (lanjutan)

Provisi atas penghentian pengoperasian aset diakui sebagai liabilitas pada saat kewajiban hukum atau konstruktif yang berkaitan dengan penghentian pengoperasian sebuah aset timbul, dan pada awalnya diukur pada nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Disamping itu, biaya penghentian pengoperasian aset dalam jumlah yang sama dengan jumlah liabilitasnya dikapitalisasi sebagai bagian dari aset yang berkaitan yang kemudian disusutkan nilainya sepanjang masa manfaat aset tersebut. Peningkatan kewajiban ini sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai biaya keuangan. Kewajiban ini dibebankan pada lebih dari satu periode pelaporan, jika kejadian yang menimbulkan kewajiban itu timbul dalam lebih dari satu periode pelaporan. Misalnya, bila ada sebuah fasilitas yang ditutup untuk selamanya tetapi rencana penutupan ditetapkan lebih dari satu periode pelaporan, biaya penutupan tersebut akan diakui selama periode pelaporan sampai rencana penutupan selesai.

Perubahan dalam pengukuran kewajiban tersebut yang timbul dari perubahan estimasi waktu atau jumlah pengeluaran sumber daya ekonomis (contohnya: arus kas) yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, atau perubahan dalam tingkat diskonto, akan ditambahkan pada atau dikurangkan dari, harga perolehan aset yang bersangkutan pada periode berjalan. Jumlah yang dikurangkan dari harga perolehan aset tidak boleh melebihi jumlah tercatatnya. Jika penurunan dalam liabilitas melebihi nilai tercatat aset, kelebihan tersebut segera diakui dalam laporan laba rugi. Jika penyesuaian tersebut menghasilkan penambahan pada harga perolehan aset, Perseroan akan mempertimbangkan apakah hal ini mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset yang baru mungkin tidak bisa dipulihkan secara penuh. Jika terdapat indikasi tersebut, Perseroan akan melakukan pengujian penurunan nilai terhadap aset tersebut dengan melakukan estimasi atas nilai yang dapat dipulihkan dan akan mencatat kerugian dari penurunan nilai, jika ada.

Untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan yang tidak berkaitan dengan penghentian pengoperasian aset, dimana Perseroan merupakan pihak yang bertanggung jawab dan diidentifikasi adanya suatu liabilitas serta jumlahnya dapat diukur, maka Perseroan akan mencatat estimasi liabilitas tersebut. Dalam menentukan keberadaan liabilitas yang berkaitan dengan lingkungan, Perseroan mengacu pada kriteria pengakuan liabilitas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

2.13. Pengakuan pendapatan dan beban

Penjualan merupakan penghasilan yang diperoleh dari penjualan produk Perseroan. Penjualan diakui sebagai penghasilan ketika terjadi pengalihan risiko kepada pelanggan berdasarkan ketentuan dalam kontrak penjualan, dan:

- Produk tersebut berada dalam kondisi yang layak untuk dikirimkan dan tidak diperlukan proses lebih lanjut oleh, atau atas nama, Perseroan;
- Besar kemungkinan Perseroan memperoleh manfaat ekonomis dari transaksi tersebut;
- Produk telah diserahkan kepada pelanggan dan secara fisik sudah tidak berada dalam pengendalian Perseroan (atau kepemilikan atas produk telah terlebih dahulu beralih ke pelanggan); dan
- Harga dan serta biaya penjualan dapat ditentukan dengan tingkat akurasi yang memadai.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan metode akrual.

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.12. Environmental expenditures (continued)

Provisions for asset retirement are recognized as liabilities when a legal or constructive obligation with respect to the retirement of an asset is incurred, with the initial measurement of the obligation measured at the present value of the expenditures expected to be required to settle the obligation using a pre-tax rate that reflects the current market assessment of the time value of money and the risks specific to the obligation. In addition, an asset retirement cost equivalent to the liabilities is capitalized as part of the related asset's carrying value and is subsequently depreciated or depleted over the asset's useful life. The increase in these obligations due to passage of time is recognized as finance costs. These obligations are incurred over more than one reporting period when the events that create the obligation occur over more than one reporting period. For example, if a facility is permanently closed but the closure plan is developed over more than one reporting period, the cost of the closure of the facility is incurred over the reporting periods when the closure plan is finalized.

The changes in the measurement of these obligations that result from changes in the estimated timing or amount of the outflow of resources embodying economic benefits (e.g. cash flows) required to settle the obligation, or a change in the discount rate will be added to or deducted from, the cost of the related asset in the current period. The amount deducted from the cost of the asset should not exceed its carrying amount. If a decrease in the liability exceeds the carrying amount of the asset, the excess is recognized immediately in profit or loss. If the adjustment results in an addition to the cost of an asset, the Company will consider whether this is an indication that the new carrying amount of the asset may not be fully recoverable. If there is such an indication, the Company will test the asset for impairment by estimating its recoverable amount and will account for any impairment loss incurred, if any.

For environmental issues that may not involve the retirement of an asset, where the Company is a responsible party and it is determined that a liability exists, and amounts can be quantified, the Company accrues the estimated liability. In determining whether a liability exists in respect of such environmental issues, the Company applies the criteria for liability recognition under applicable accounting standards.

2.13. Revenue and expense recognition

Sales represent revenue earned from the sale of the Company's products. Sales are recognized as revenue when there has been passing of the risk of ownership to the customer, based on the terms of the contract, and:

- The product is in a form suitable for delivery and no further processing is required by, or on behalf of, the Company;
- Economic inflow related to the transaction is probable;
- The product has been dispatched to the customer and is no longer under the physical control of the Company (or ownership in the product has earlier been passed to the customer); and
- The selling price and expenses can be determined with reasonable accuracy.

Expenses are recognized as incurred on an accrual basis.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.14. Pajak penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak itu berkaitan dengan kejadian atau transaksi yang diakui pada laba komprehensif lainnya atau secara langsung dicatat ke ekuitas. Pada kasus ini, masing-masing beban pajak juga diakui pada laba komprehensif lainnya atau secara langsung dicatat ke ekuitas. Pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca dalam negara dimana Perseroan beroperasi dan menghasilkan penghasilan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam laporan pajak terkait dengan situasi dimana peraturan pajak yang berlaku memerlukan interpretasi. Provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan untuk dibayarkan pada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan memakai metode "balance sheet liability", untuk semua perbedaan temporer yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan antara dasar perpajakan untuk aset dan liabilitas dengan nilainya dalam laporan keuangan. Untuk menentukan jumlah pajak penghasilan tangguhan digunakan tarif pajak yang berlaku saat ini atau yang secara substansial telah berlaku.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dimanfaatkan.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan Perseroan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan banding, pada saat keputusan banding tersebut ditetapkan.

2.15. Liabilitas imbalan kerja

a. Imbalan pensiun

Perseroan memiliki program pensiun imbalan pasti dan program pensiun iuran pasti yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dan/atau kebijakan yang dimiliki oleh Perseroan. Program pensiun imbalan pasti pada umumnya didanai melalui pembayaran kepada pengelola dana pensiun yang besarnya ditentukan dengan perhitungan aktuarial berkala. Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menyatakan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi. Program pensiun imbalan pasti ini kemudian diubah menjadi program pensiun iuran pasti pada akhir 2012. Lihat Catatan 18 tentang proses pembubaran Dana Pensiun International Nickel Indonesia ("DPI").

Liabilitas program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal posisi keuangan dikurangi dengan nilai wajar aset program, setelah disesuaikan dengan keuntungan/kerugian aktuarial yang belum diakui dan biaya jasa lalu. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi Pemerintah yang berkualitas tinggi (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan saat jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan saat jatuh tempo liabilitas pensiun yang bersangkutan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas pada pos pendapatan komprehensif lainnya pada periode terjadinya. Akibat dari perubahan metode pengakuan, kerugian atau keuntungan aktuarial dari periode sebelum 1 Januari 2012 diakui segera ke pos ekuitas pada pendapatan komprehensif lainnya.

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.14. Income taxes

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax expense is recognized in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax expense is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively. The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the balance sheet date in the country where the Company operates and generates taxable income. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which an applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes a provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income taxes are provided, using the "balance sheet liability method", for all temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying values in the financial statements. Currently enacted or substantively enacted tax rates are used to determine deferred income taxes.

Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilized.

Amendments to the Company's taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed, when the result of the appeal is determined.

2.15. Employment benefit liabilities

a. Pension benefits

The Company has maintained both defined benefit and defined contribution pension plans in accordance with prevailing labor-related laws and regulations and/or the Company's policies. The defined benefit pension plan was previously funded through payments to trustee-administered funds as determined by periodic actuarial calculations. A defined benefit pension plan is a pension plan that defines an amount of pension benefits to be provided, usually as a function of one or more factors such as age, years of service or compensation. The defined benefit pension plan was subsequently replaced by a defined contribution pension plan at the end of 2012. Refer to Note 18 regarding the liquidation process of Dana Pensiun International Nickel Indonesia ("DPI").

The liability recognized in the statements of financial position in respect of the defined benefit pension plan is the present value of the defined benefit obligation at the balance sheet date less the value of plan assets, together with adjustments for unrecognized actuarial gains or losses and past service costs. The defined benefit pension plan liability is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit pension plan liabilities is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of high-quality Government bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the term of the related pension liability.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period of which they arise. Due to the change in method of recognition, the actuarial gain or loss from the period before January 1, 2012 was recognized immediately to equity in other comprehensive income.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.15. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

a. Imbalan pensiun (lanjutan)

Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak (*vested*). Jika belum menjadi hak (*non-vested*) akan diakui sebagai beban selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi *vested* dengan metode garis lurus.

Sebagaimana dijelaskan diatas, program pensiun iuran pasti berlaku semenjak akhir 2012. Program pensiun iuran pasti merupakan program pensiun yang dibayarkan oleh Perseroan dengan metode iuran tetap kepada pengelola dana pensiun baik yang wajib, berdasarkan kontrak maupun sukarela. Namun, dikarenakan Undang-undang ("UU") Ketenagakerjaan No. 13/2003 mewajibkan Perseroan untuk memberikan imbalan kepada karyawan dalam usia pensiun dengan jumlah manfaat tertentu berdasarkan masa kerjanya, ada kemungkinan bahwa Perseroan harus melakukan pembayaran imbalan tambahan apabila jumlah akumulasi dana iuran pensiun pada program pensiun iuran pasti lebih kecil dari jumlah imbalan pensiun yang diharuskan berdasarkan UU Ketenagakerjaan (lihat Catatan 18).

Perseroan mengakui kelebihan pembayaran (jika ada) yang akan diperlukan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, atas program pensiun iuran pasti, sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan, akun liabilitas imbalan pascakerja.

Perhitungan kewajiban atas imbalan pensiun yang dilakukan oleh aktuaris independen menunjukkan bahwa perkiraan imbalan pensiun yang disediakan oleh program pensiun Perseroan yang ada akan memenuhi persyaratan minimal yang ditentukan oleh UU Ketenagakerjaan.

Termasuk di dalam liabilitas imbalan pensiun ini adalah bonus masa kerja yaitu tambahan imbalan yang diberikan oleh Perseroan kepada karyawan yang mencapai usia pensiun normal (55 tahun). Imbalan ini merupakan tambahan dari program pensiun reguler. Besarnya imbalan ini dihitung oleh Perseroan berdasarkan golongan dan usia karyawan.

b. Imbalan kesehatan pascakerja

Perseroan memberikan imbalan kesehatan pascakerja untuk para karyawan yang telah pensiun. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun dan dipekerjakan sebelum Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") ditandatangani pada bulan Januari 2011. Perkiraan biaya imbalan ini diakui sebagai akrual sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti. Liabilitas ini dinilai setiap tahun oleh aktuaris independen yang berkualifikasi.

c. Imbalan pesangon

Pesangon adalah pemutusan hubungan kerja terhutang pada saat karyawan diberhentikan sebelum usia pensiun normal. Perseroan mengakui pesangon pemutusan hubungan kerja pada saat Perseroan menunjukkan komitmennya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan berdasarkan suatu rencana formal terinci yang kecil kemungkinannya untuk dibatalkan. Pesangon yang akan dibayarkan dalam waktu lebih 12 bulan setelah tanggal posisi keuangan didiskontokan untuk mencerminkan nilai kininya.

d. Program bagi laba dan bonus

Perseroan mengakui liabilitas dan beban untuk bonus dan pembagian laba, berdasarkan rumus-rumus tertentu yang mempertimbangkan berbagai aspek kinerja Perseroan. Perseroan mengakui adanya provisi ini apabila terdapat kewajiban kontraktual atau apabila praktik di masa lalu telah menimbulkan kewajiban ini.

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.15. Employment benefit liabilities (continued)

a. Pension benefits (continued)

Past service costs are directly expensed if benefits are already vested. Where benefits are not yet vested the past service costs are recognized over the average vesting period under a straight-line method.

As mentioned above, the defined contribution pension plan is applicable starting from the end of 2012. The defined contribution pension plan is a pension plan under which the Company pays fixed contributions to trustee-administered pension plans on a mandatory, contractual or voluntary basis. However, since Labor Law No. 13/2003 requires the Company to pay to a worker entering into pension age a certain amount based on the worker's length of service, the Company is exposed to the possibility of having to make further payments to reach that certain amount, as required by the Labor Law, in particular when the cumulative contributions are less than that amount (refer to Note 18).

The Company recognizes the excess (if any) of the payments that would be required under the Labor Law, over the defined contributions paid, as a liability in the statements of financial position, accounted for as post-employment benefit liabilities.

The calculation of the pension benefit obligation performed by the independent actuary, shows that the expected pension benefits provided by the Company's pension plan will meet the minimum requirements of the Labor Law.

Included in the liabilities recognized for pension benefits, is an additional benefit provided by the Company, referred to as a service bonus, which is provided to employees who reach normal retirement age (55 years). This benefit is in addition to the regular pension benefit provided under the plan. The Company has calculated this benefit based on the grade and age of employees.

b. Post-retirement medical benefits

The Company provides post-retirement healthcare benefits to eligible retirees. The entitlement to these benefits is usually given to those employees who remain in service up to retirement age and were hired prior to the signing of the Collective Labor Agreement ("CLA") in January 2011. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment, using an accounting methodology similar to that for defined benefit pension plans. A qualified independent actuary values this liability annually.

c. Termination benefits

Termination benefits are payable whenever an employee's employment is terminated before the normal retirement date. The Company recognizes termination benefits when it is demonstrably committed to terminate the employment of current employees according to a detailed formal plan with low possibility of withdrawal. Termination benefits payable more than 12 months after the financial position date are discounted to reflect present value.

d. Profit sharing and bonus plans

The Company recognizes a liability and an expense for bonuses and profit sharing, based on the applicable formulas which consider various aspects of the Company's performance. The Company recognizes a provision where it is contractually obligated or when a past practice has created a constructive obligation.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.15. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

e. Pembayaran berbasis saham

Perseroan memberikan imbalan opsi saham kepada karyawan tertentu yang besarnya setara dengan kas, sebesar selisih antara harga pasar saham dengan harga opsi saham pada tanggal jatuh tempo. Biaya imbalan ini dicatat ketika harga pasar melebihi harga opsi saham, sebesar selisih antara kedua harga tersebut. Perubahan yang terjadi pada harga pasar saham antara tanggal pemberian imbalan dan tanggal pencatatan akan dicatat sebagai perubahan estimasi biaya imbalan tersebut dan diakui pada laporan laba rugi.

2.16. Laba per saham dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang tersedia untuk pemegang saham dengan jumlah rata-rata saham biasa yang beredar dalam tahun yang bersangkutan.

2.17. Pelaporan segmen

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

2.18. Aset keuangan

Perseroan mengklasifikasikan aset keuangannya ke dalam kategori berikut (i) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman dan piutang, dan (iii) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Pengklasifikasian tergantung kepada tujuan perolehan aset keuangan. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangannya saat pengakuan awal. Pengakuan atas pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (reguler) diakui pada tanggal perdagangan – tanggal dimana Perseroan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

(i) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang diklasifikasikan untuk tujuan diperdagangkan. Aset keuangan akan diklasifikasikan untuk tujuan diperdagangkan apabila tujuan utama perolehannya adalah untuk dijual atau dibeli kembali dalam jangka pendek dan terdapat bukti aktual akan adanya pola pengambilan keuntungan dalam jangka pendek. Derivatif juga dikategorikan sebagai diperdagangkan kecuali jika mereka ditujukan dan berlaku efektif sebagai instrumen lindung nilai. Aset pada kategori ini diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan; jika tidak, aset tersebut diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Pada tanggal 31 Desember 2013, tidak ada aset keuangan yang dikategorikan sebagai diperdagangkan (2012: nil).

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.15. Employment benefit liabilities (continued)

e. Share-based payments

The Company awards certain employees share option equivalents to receive cash, equal to the excess of the market price of the Company's shares at the exercise date over the option price. The cost is measured as the amount by which the quoted market value of the vested shares covered by the grant exceeds the option price. The changes in the quoted market value of the shares between the date of the grant and the measurement date result in a change in the estimate of the compensation and are recognized in profit or loss.

2.16. Basic earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing income for the year attributable to shareholders by the weighted average number of common shares outstanding for the relevant year.

2.17. Segment reporting

An operating segment is a component of an enterprise:

- that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenue and expenses related to the transactions with different components within the same entity);
- whose operating results are regularly reviewed by the enterprise's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and to assess its performance; and
- for which discrete financial information is available.

2.18. Financial assets

The Company classifies its financial assets into the categories of (i) financial assets at fair value through profit or loss, (ii) loans and receivables, and (iii) available-for-sale financial assets. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition. Recognition of regular purchases and sale of financial assets are recognized on the trade-date – the date on which the Company commits to purchase or sell the asset.

(i) Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets classified as held for trading. A financial asset is classified as held for trading if it is acquired principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term and for which there is evidence of a recent actual pattern of short term profit taking. Derivatives are also categorized as held for trading unless they are designated and effective as hedging instruments. Assets in this category are classified as current assets if they are expected to be settled within 12 months; otherwise, they are classified as non-current.

As at December 31, 2013 there are no financial assets categorized as held for trading (2012: nil).

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.18. Aset keuangan (lanjutan)

(ii) Pinjaman dan piutang

Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran yang tetap dan dapat ditentukan dan tidak diperdagangkan pada pasar aktif. Piutang dan pinjaman awalnya diakui pada nilai wajarnya ditambah dengan biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pinjaman yang diberikan dan piutang dimasukkan sebagai aset lancar, kecuali jika jatuh temponya melebihi 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Pinjaman yang diberikan dan piutang ini dimasukkan sebagai aset tidak lancar. Pinjaman dan piutang terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, aset keuangan lancar lainnya, piutang pihak berelasi non-usaha dan aset keuangan tidak lancar lainnya.

(iii) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual merupakan aset keuangan yang diperoleh dan disimpan untuk periode tidak dapat ditentukan, dimana dapat dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, nilai tukar atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo maupun aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan tersedia untuk dijual dimasukkan sebagai aset tidak lancar kecuali investasinya jatuh tempo atau manajemen bermaksud melepasnya dalam kurun waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual diakui awalnya pada nilai wajar, ditambah dengan biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada nilai wajar dengan laba atau ruginya dilaporkan pada pendapatan komprehensif lainnya, kecuali untuk rugi penurunan nilai dan laba atau rugi selisih kurs, sampai aset bersangkutan dihentikan pengakuannya. Jika suatu aset keuangan yang tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, laba atau rugi kumulatif yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lainnya akan diakui pada laporan laba rugi. Akan tetapi, bunga akan dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan laba atau rugi selisih kurs untuk aset moneter yang diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual akan diakui pada laporan laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2013, tidak ada aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual (2012: nil).

Liabilitas keuangan

Perseroan mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori (i) liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba atau rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

(i) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba atau rugi

Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan akan diklasifikasikan sebagai tersedia untuk diperdagangkan apabila pada saat perolehan awalnya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam jangka pendek dan terdapat bukti aktual akan adanya pola pengambilan keuntungan dalam jangka pendek. Derivatif juga dikategorikan sebagai diperdagangkan kecuali jika mereka ditujukan dan berlaku efektif sebagai instrument lindung nilai.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada nilai wajarnya, dimana keuntungannya atau kerugiannya diakui dalam laporan laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2013, tidak ada liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas pada nilai wajar melalui laba rugi (2012: nil).

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.18. Financial assets (continued)

(ii) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed and determinable payments that are not quoted in an active market. Loans and receivables are initially recognized at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. They are included in current assets, except for maturities greater than 12 months after the end of reporting period. These are classified as non-current assets. Loans and receivables consist of cash and cash equivalents, trade receivables, other current financial assets, non-trade receivables from related parties and other non-current assets.

(iii) Available-for-sale financial assets

Available-for-sale financial assets are financial assets that are intended to be held for an indefinite period of time, which may be sold in response to needs for liquidity or changes in interest rates, exchange rates or that are not classified as loans and receivables, held-to-maturity investments or financial assets at fair value through profit or loss. They are included in non-current assets unless the investment matures or management intends to dispose of it within 12 months of the end of the reporting period.

Available-for-sale financial assets are initially recognized at fair value, plus transaction costs, and measured subsequently at fair value with gains and losses being recognized in other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses, until the financial assets are derecognized. If an available-for-sale financial asset is determined to be impaired, the cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. However, interest is calculated using the effective interest rate method and foreign currency gains or losses on monetary assets classified as available-for-sale are recognized in profit or loss.

As at December 31, 2013, there are no financial assets classified as available-for-sale financial assets (2012: nil).

Financial liabilities

The Company classifies its financial liabilities into the categories of (i) financial liabilities at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

(i) Financial liabilities at fair value through profit or loss

Financial liabilities at fair value through profit or loss are financial liabilities classified as held for trading. A financial liability is classified as held for trading if it is acquired principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term and for which there is evidence of a recent actual pattern of short term profit taking. Derivatives are also categorized as held for trading unless they are designated and effective as hedging instruments.

Financial liabilities carried at fair value through profit or loss are initially recognized at fair value and subsequently carried at fair value, with gains and losses recognized in profit or loss.

As at December 31, 2013, there are no financial liabilities classified as liabilities at fair value through profit or loss (2012: nil).

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.18. Aset keuangan (lanjutan)

(ii) Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi akan masuk ke dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi adalah utang lainnya, biaya yang masih harus dibayar dan pinjaman.

Estimasi nilai wajar

Nilai wajar dari instrumen keuangan yang diperdagangkan pada pasar aktif ditentukan melalui kuotasi harga pasar pada tanggal posisi keuangan. Kuotasi harga pasar yang terdaftar digunakan untuk aset keuangan yang dimiliki Perseroan adalah harga penawaran saat ini, sedangkan untuk liabilitas keuangan, digunakan harga permintaannya.

Nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan melalui teknik valuasi. Perseroan menggunakan arus kas yang didiskontokan dan menggunakan asumsi yang didasarkan pada kondisi pasar pada setiap tanggal posisi keuangan dimana digunakan juga untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan lainnya.

Instrumen keuangan disalinghapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

2.19. Penurunan nilai aset keuangan

(i) Aset yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Pada setiap tanggal posisi keuangan Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Kriteria yang Perseroan gunakan untuk menentukan bahwa ada bukti objektif dari suatu penurunan nilai meliputi:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak pemegang;
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak pemegang, memberikan keringanan pada pihak pemegang yang tidak mungkin diberikan jika pihak pemegang tidak mengalami kesulitan tersebut;
- terdapat kemungkinan bahwa pihak pemegang akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur sejak estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
 - memburuknya status pembayaran pihak pemegang dalam kelompok tersebut; dan
 - kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.18. Financial assets (continued)

(ii) Financial liabilities measured at amortized cost

Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss fall into this category and are measured at amortized cost. Financial liabilities measured at amortized cost are other payables, accrued expenses and borrowings.

Fair value estimation

The fair value of financial instruments traded in active markets is determined based on quoted market prices at the financial position date. The quoted market price used for financial assets held by the Company is the current bid price while for financial liabilities it uses offer price.

The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined by using valuation techniques. The Company uses discounted cash flow methods and makes assumptions that are based on market conditions existing at each financial position date which are used to determine the fair value of the remaining financial instruments.

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realize the asset and settle the liability simultaneously.

2.19. Impairment of financial assets

(i) Assets carried at amortized cost

The Company assesses at each balance sheet date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

The criteria that the Company uses to determine that there is objective evidence of an impairment loss include:

- significant financial difficulty of the issuer or obligor;
- a breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;
- the lenders, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, granting to the borrower a concession that the lender would not otherwise consider, if the borrower did not experience such difficulty;
- it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;
- the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
- observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease cannot yet be identified with the individual financial assets in the portfolio, including:
 - adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and
 - national or local economic conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.19. Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

(i) Aset yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi, baik secara langsung maupun menggunakan pos cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, baik secara langsung, atau dengan menyesuaikan pos cadangan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi.

(ii) Aset yang tersedia untuk dijual

Ketika penurunan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual telah diakui secara langsung dalam ekuitas dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui secara langsung dalam ekuitas harus dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi merupakan selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi.

Kerugian penurunan nilai yang diakui pada laporan laba rugi atas investasi instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas yang tersedia untuk dijual tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi.

Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara objektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi.

2.20. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Perseroan mempunyai hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran untuk paling tidak 12 bulan setelah tanggal posisi keuangan.

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.19. Impairment of financial assets (continued)

(i) Assets carried at amortized cost (continued)

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the carrying amount of the asset and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the original effective interest rate of the financial asset. The carrying amount of the asset is reduced either directly or through the use of an allowance account. The amount of the loss is recognized in profit or loss.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized (such as an improvement in the debtor's credit rating), the previously recognized impairment loss will be reversed either directly or by adjusting an allowance account. The reversal will not result in the carrying value of the financial asset exceeding what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized at the date of the impairment reversal. The reversal amount will be recognized in profit or loss.

(ii) Assets classified as available-for-sale

When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognized directly in equity and there is objective evidence that the assets are impaired, the cumulative loss that had been recognized in equity will be reclassified from equity to profit or loss even though the financial asset has not been derecognized. The amount of the cumulative loss that is reclassified from equity to profit or loss will be the difference between the acquisition cost and the current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss.

The impairment losses recognized in profit or loss for an investment in an equity instrument classified as available-for-sale will not be reversed through profit or loss.

If, in a subsequent period, the fair value of a debt instrument classified as available-for-sale increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in profit or loss, the impairment loss is reversed through profit or loss.

2.20. Borrowings

Borrowings are recognized initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortized cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognized in profit or loss over the period of the borrowings, using the effective interest rate method.

Fees paid on establishment of loan facilities are recognized as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until draw-down occurs. To the extent there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalized as a pre-payment for liquidity services and amortized over the period of the facility to which it relates.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Company has an unconditional right to defer settlement of the liability for at least 12 months after the balance sheet date.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.21. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar atas barang atau jasa yang telah diperoleh dari pemasok dalam transaksi bisnis pada umumnya. Utang usaha dikelompokkan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayaran jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui pada nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2.22. Dividen

Pembayaran dividen kepada pemegang saham Perseroan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan Perseroan pada periode dimana dividen tersebut dideklarasikan.

2.23. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Seorang individu atau anggota keluarga dekat dari individu tersebut akan berelasi dengan entitas pelapor ketika invidu bersangkutan:

- (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- (iii) merupakan manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
- (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh individu berelasi seperti didefinisikan diatas.
- (vii) Orang yang memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

3. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan

3.1. Standar baru dan revisi yang diadopsi oleh Perseroan yang wajib diterapkan untuk pertama kali pada tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013

- Penyempurnaan tahunan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 60 - Instrumen Keuangan: Pengungkapan

Perkembangan dari standar ini terutama berhubungan dengan pengungkapan aset keuangan, termasuk penghapusan beberapa pengungkapan yang diwajibkan sebelumnya.

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.21. Trade payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade payables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

2.22. Dividends

Dividend distributions to the Company's shareholders are recognized as a liability in the Company's statements of financial position in the period in which the dividends are declared.

2.23. Related party transactions

A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:

- (i) has control or joint control over the reporting entity;
- (ii) has significant influence over the reporting entity; or
- (iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:

- (i) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
- (ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
- (iii) Both entities are joint ventures of the same third party.
- (iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
- (v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity itself is such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
- (vi) The entity is controlled or jointly controlled by a related person as identified above.
- (vii) A person that has control or joint control over the reporting entity that has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

3. Changes in accounting policies and disclosure

3.1. New and amended standards adopted by the Company that are mandatory for the first time for the financial year beginning on January 1, 2013

- Annual improvement of Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") No. 60 - Financial Instruments: Disclosures

The improvement of this standard mainly relates to the disclosure of financial assets, including the removal of some previously required disclosures.

3. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

3.2. Standar dan interpretasi baru dan revisi yang wajib diterapkan untuk pertama kali untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 atau periode setelahnya, tetapi saat ini tidak material dan/atau tidak relevan terhadap Perseroan (meskipun dapat mempengaruhi akuntansi untuk transaksi dan peristiwa masa depan)

- PSAK No. 38 - Kombinasi Bisnis pada Entitas Sepengendali.

Pencabutan standar akuntansi

Pencabutan standar dan interpretasi ini tidak menyebabkan perubahan signifikan terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak berdampak material atas jumlah yang dilaporkan atas periode berjalan atau periode sebelumnya:

- PSAK No. 51 - Akuntansi Kuasi-Reorganisasi.

3.3. Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan, tetapi berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014 dan tidak diterapkan lebih awal

- Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") No. 29 - Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi pada Tambang Terbuka.

ISAK No. 29 menetapkan akuntansi untuk biaya pembuangan material *overburden* (pengupasan) dalam tahap produksi tambang. Interpretasi ini dikembangkan untuk mengatasi keragaman saat ini dalam praktik. Beberapa entitas telah mengakui semua biaya pengupasan sebagai biaya produksi sementara entitas lain memanfaatkan sebagian atau seluruh biaya pengupasan tanah sebagai aset.

Interpretasi ini mungkin memerlukan entitas pertambangan untuk menghapus aset pengupasan untuk saldo laba jika aset tidak dapat dikaitkan dengan komponen utama yang diidentifikasi. Interpretasi tersebut juga mungkin memerlukan entitas yang saat ini mengalokasikan biaya pengupasan tanah mereka sebagai biaya produksi untuk meninjau kembali pendekatan mereka dan mengkapitalisasi sebagian dari biaya mereka.

Perseroan sedang mengevaluasi dampak atas standar ini terhadap kebijakan akuntansinya saat ini, yang mengakui biaya pengupasan tanah semata-mata sebagai biaya produksi. Interpretasi ini berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014, dimana penerapan dini atas interpretasi ini diperbolehkan.

Berikut adalah interpretasi standar baru yang berlaku efektif untuk pertama kalinya pada tahun buku yang akan dimulai 1 Januari 2014, yang tidak akan berdampak material terhadap laporan keuangan Perseroan:

- ISAK No. 27 - Pengalihan Aset dari Pelanggan; dan
- ISAK No. 28 - Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas.

Pada saat penerbitan laporan keuangan ini, manajemen masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar/interpretasi ini dan pengaruhnya pada laporan keuangan Perseroan.

3. Changes in accounting policies and disclosure (continued)

3.2. New and amended standards and interpretations mandatory for the first time for financial years beginning on or after January 1, 2013 or later periods, but not currently material and/or not relevant to the Company (although they may affect the accounting for future transactions and events)

- SFAS No. 38 - Business Combination on Entities under Common Control.

Withdrawal of accounting standards

The withdrawal of these standards and interpretations did not result in significant changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial period:

- SFAS No. 51 - Quasi Reorganization.

3.3. New standards, amendments and interpretations issued but effective for financial years beginning on or after January 1, 2014 and not early adopted

- Interpretation of Statement of Financial Accounting Standards ("ISFAS") No. 29 - Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine.

ISFAS No. 29 sets out the accounting for overburden waste removal (stripping) costs in the production phase of a mine. The interpretation was developed to address current diversity in practice. Some entities have judged all stripping costs as a cost of production while other entities capitalize some or all stripping costs as an asset.

The interpretation may require mining entities to write off existing stripping assets to opening retained earnings if the assets cannot be attributed to an identifiable component of an ore body. The interpretation may also require entities that presently allocate their stripping costs as a production cost to revisit their approach and capitalize a portion of their costs.

The Company is currently assessing the impact that this standard will have on its existing accounting policy, which is to treat stripping costs solely as production costs. This interpretation is effective for annual periods beginning on or after January 1, 2014, wherein earlier application of this interpretation is allowed.

Below are the new ISFAS that are effective for the first time for the financial year beginning on January 1, 2014 that expected will not have a material impact for the Company's financial statements:

- ISFAS No. 27 - Transfer of Assets from Customers; and
- ISFAS No. 28 - Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments.

As at the issuance of these financial statements, management is still evaluating the impact of these revised standards/interpretations and their effect on the Company's financial statements.

3. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

3.4 Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan, tetapi berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015 dan tidak diterapkan lebih awal

- PSAK No. 65 - Laporan Keuangan Konsolidasian *);
- PSAK No. 66 - Pengaturan Bersama *);
- PSAK No. 67 - Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain *);
- PSAK No. 68 - Pengukuran Nilai Wajar *);
- PSAK No. 1 (Revisi 2013) - Penyajian Laporan Keuangan *);
- PSAK No. 4 (Revisi 2013) - Laporan Keuangan Tersendiri *);
- PSAK No.15 (Revisi 2013) - Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama *); dan
- PSAK No.24 (Revisi 2013) - Imbalan Kerja *).

Pada saat penerbitan laporan keuangan ini, manajemen masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar/interpretasi ini dan pengaruhnya pada laporan keuangan Perseroan.

*) Penerapan dini revisi dan standar baru diatas sebelum 1 Januari 2015 tidak diijinkan.

4. Estimasi dan pertimbangan akuntansi penting

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjen pada tanggal laporan keuangan, serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Estimasi, asumsi dan penilaian tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa mendatang yang memungkinkan berdasarkan kondisi yang ada.

Perseroan telah mengidentifikasi kebijakan akuntansi penting berikut di mana dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat dan di mana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut berdasarkan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan yang dilaporkan dalam periode mendatang.

Rincian lebih lanjut mengenai sifat dari asumsi-asumsi dan kondisi-kondisi tersebut dapat ditemukan dalam catatan yang relevan atas laporan keuangan.

4.1. Estimasi cadangan

Cadangan adalah estimasi jumlah produk yang dapat secara ekonomis maupun legal diekstraksi dari aset Perseroan. Untuk memperkirakan cadangan bijih nikel, perlu ditentukan asumsi mengenai faktor-faktor geologis, teknis dan ekonomis termasuk jumlah produksi, teknik produksi, nisbah kupasan, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga-harga komoditas dan nilai tukar mata uang.

Memperkirakan jumlah dan/atau kadar cadangan membutuhkan ukuran, bentuk dan kedalaman lapisan bijih atau lapangan yang akan ditentukan dengan menganalisis data geologi seperti "uji petik" (sampel) pengeboran. Proses ini mungkin memerlukan penilaian geologi yang kompleks dan sulit untuk menginterpretasikan data.

Karena asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan berubah dari waktu ke waktu, dan karena data geologi tambahan yang dihasilkan selama operasi, perkiraan cadangan dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan Perseroan dalam berbagai cara, diantaranya:

- Nilai tercatat aset dapat terpengaruh akibat perubahan estimasi arus kas masa depan.
- Penyusutan dan amortisasi yang dibebankan ke dalam laporan laba rugi dapat berubah jika masa manfaat ekonomi umur aset berubah.
- Provisi untuk aktivitas purna operasi, restorasi lokasi aset, dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam perkiraan cadangan yang mempengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan ini.
- Nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi pemulihan manfaat pajak.

3. Changes in accounting policies and disclosure (continued)

3.4 New standards, amendments and interpretations issued but not yet effective for the financial year beginning January 1, 2015 and not early adopted

- SFAS No. 65 - Consolidated Financial Statements *);
- SFAS No. 66 - Joint Arrangements *);
- SFAS No. 67 - Disclosure of Interests in Other Entities *);
- SFAS No. 68 - Fair Value Measurement *);
- SFAS No. 1 (Revised 2013) - Presentation of Financial Statements *);
- SFAS No. 4 (Revised 2013) - Separate Financial Statements *);
- SFAS No. 15 (Revised 2013) Investment in Associates and Joint Ventures *); and
- SFAS No. 24 (Revised 2013) Employee Benefits *).

As at the issuance of these financial statements, management is still evaluating the impact of these revised standards/interpretations and their effect on the Company's financial statements.

*) Early adoption of these new and revised standards prior to January 1, 2015 is not permitted.

4. Critical accounting estimates and judgements

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting period. Estimates, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Company has identified the following critical accounting policies under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect financial results or the financial position reported in future periods.

Further details of the nature of these assumptions and conditions may be found in the relevant notes to the financial statements.

4.1. Reserve estimates

Reserves are estimates of the amount of product that can be economically and legally extracted from the Company's properties. In order to estimate nickel ore reserves, assumptions are required about a range of geological, technical and economic factors, including quantities, production techniques, stripping ratio, production costs, transport costs, commodity demand, commodity prices and exchange rates.

Estimating the quantity and/or grade of reserves requires the size, shape and depth of ore bodies or fields to be determined by analyzing geological data such as drilling samples. This process may require complex and difficult geological judgements to interpret the data.

Because the economic assumptions used to estimate reserves change from period to period, and because additional geological data is generated during the course of operations, estimates of reserves may change from period to period. Changes in reported reserves may affect the Company's financial results and financial position in a number of ways, including:

- Carrying values of assets may be affected due to changes in estimated future cash flows.
- Depreciation and amortization charged in the profit or loss may change where the useful economic lives of assets change.
- Decommissioning, site restoration and environmental provisions may change where changes in estimated reserves affect expectations about the timing or cost of these activities.
- The carrying value of deferred tax assets/liabilities may change due to changes in estimates of the likely recovery of the tax benefits.

4. Estimasi dan pertimbangan akuntansi penting (lanjutan)

4.2. Provisi atas penghentian pengoperasian aset

Kebijakan akuntansi Perseroan atas pengakuan provisi untuk reklamasi lingkungan dan penutupan tambang dan penghentian dan pembongkaran fasilitas membutuhkan penggunaan estimasi dan asumsi yang signifikan seperti: persyaratan kerangka hukum dan peraturan yang relevan; besarnya kemungkinan kontaminasi atau kerusakan serta waktu, luas dan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang. Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan perbedaan antara jumlah pengeluaran aktual di masa depan dari jumlah yang disisihkan pada saat ini. Provisi yang diakui pada setiap lokasi di tinjau secara berkala dan diperbarui berdasarkan fakta-fakta dan keadaan pada saat itu.

4.3. Pajak penghasilan

Pertimbangan dan asumsi dibutuhkan dalam menentukan penyisihan modal dan pengurangan beban tertentu selama estimasi provisi pajak penghasilan untuk setiap perusahaan dalam Perseroan. Banyaknya transaksi dan perhitungan yang dapat menyebabkan ketidakpastian di dalam penentuan kewajiban pajak. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam periode dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari kumulatif rugi fiskal, penyisihan modal, dan perbedaan temporer, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan bergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas dimasa depan. Hal ini bergantung pada estimasi produksi, volume penjualan barang, harga komoditas, cadangan, biaya operasi, biaya penutupan dan rehabilitasi tambang, belanja modal, dividen dan transaksi manajemen lainnya di masa depan.

4.4. Penurunan nilai aset non-keuangan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan, setiap aset atau unit penghasil kas dievaluasi pada setiap periode pelaporan untuk menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi tersebut, akan dilakukan perkiraan atas nilai aset yang dapat kembali dan kerugian akibat penurunan nilai akan diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat dipulihkan kembali dari aset tersebut. Jumlah nilai yang dapat dipulihkan kembali dari sebuah aset atau kelompok aset penghasil kas diukur berdasarkan nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset.

Penentuan nilai wajar dan nilai pakai membutuhkan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi atas produksi yang diharapkan dan volume penjualan, harga komoditas (mempertimbangkan harga saat ini dan masa lalu, tren harga dan faktor-faktor terkait), cadangan (lihat 'Estimasi cadangan' di atas), biaya operasi, biaya reklamasi lingkungan dan penutupan tambang serta belanja modal di masa depan. Estimasi dan asumsi ini terpapar risiko dan ketidakpastian; sehingga ada kemungkinan perubahan situasi dapat mengubah proyeksi ini, yang dapat mempengaruhi nilai aset yang dapat dipulihkan kembali. Dalam keadaan seperti itu, sebagian atau seluruh nilai tercatat aset mungkin akan mengalami penurunan nilai lebih lanjut atau terjadi pengurangan rugi penurunan nilai yang dampaknya akan dicatat dalam laba rugi.

4.5. Imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja

Nilai kini kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuaria dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya (pendapatan) bersih untuk imbalan dimaksud termasuk tingkat diskonto, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup dan periode sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja.

4. Critical accounting estimates and judgements (continued)

4.2. Provision for asset retirement

The Company's accounting policy for the recognition of provisions for environmental reclamation and mine closure and decommissioning and dismantling of facilities requires the use of significant estimates and assumptions such as: requirements of the relevant legal and regulatory framework; the magnitude of possible contamination or disturbance and the timing, extent and costs of required environmental reclamation and mine closure activities. These uncertainties may result in future actual expenditure differing from the amounts currently provided. The provision recognized for each site is periodically reviewed and updated based on the facts and circumstances available at the time.

4.3. Income taxes

Judgement and assumptions are required in determining capital allowances and the deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income taxes for the Company. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, these differences will have an impact on the current income tax and deferred income tax provisions in the period in which the determination was made.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward, capital allowances and temporary differences, are recognized only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. Assumptions about the generation of future taxable profits depend on management's estimates of future cash flows. These depend on estimates of future production, sales volumes, commodity prices, reserves, operating costs, closure and rehabilitation costs, capital expenditure, dividends and other capital management transactions.

4.4. Impairment of non-financial assets

In accordance with the Company's accounting policy, each asset or cash generating unit is evaluated at every reporting period to determine whether there are any indications of impairment. If any such indication exists, a formal estimate of the recoverable amount is performed and an impairment loss is recognized to the extent that the carrying amount exceeds the recoverable amount. The recoverable amount of an asset or cash generating group of assets is measured at the higher of fair value less costs to sell and value in use.

The determination of fair value and value in use requires management to make estimates and assumptions about expected production and sales volumes, commodity prices (considering current and historical prices, price trends and related factors), reserves (see 'Reserve estimates' above), operating costs, environmental reclamation and mine closure costs, and future capital expenditure. These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty; hence there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may impact the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired, or the impairment charge reduced, with the impact recorded in the profit or loss.

4.5. Pension benefits and post-retirement medical benefits

The present value of the pension benefits and post-retirement medical benefits obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost (income) for the pension benefits and post-retirement medical benefits include the discount rate, future remuneration changes, employee attrition rates, life expectancy and expected remaining periods of service of employees. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the pension benefits and post-retirement medical benefits.

4. Estimasi dan pertimbangan akuntansi penting (lanjutan)

4.5. Imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja (lanjutan)

Perseroan menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan akan dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, Perseroan menggunakan tingkat suku bunga obligasi korporat berkualitas tinggi (atau obligasi Pemerintah, dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja.

Asumsi kunci lainnya untuk kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja didasarkan sebagian pada kondisi pasar saat ini.

Jika tingkat diskonto yang digunakan berbeda 1% dari estimasi manajemen, pada tanggal 31 Desember 2013 nilai tercatat kewajiban pensiun diestimasikan akan menjadi lebih rendah sebesar AS\$1,2 juta atau lebih tinggi AS\$1,7 juta (2012: lebih rendah sebesar AS\$2,9 juta atau lebih tinggi AS\$3,6 juta) (nilai penuh).

5a. Kas dan setara kas

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Kas	8	26	Cash on hand
Bank:			Cash in bank:
Pihak ketiga			Third parties
Dalam mata uang Dolar AS			Denominated in US Dollars
JP Morgan Chase Bank N.A.	66,154	1,871	JP Morgan Chase Bank N.A.
Citibank N.A.	8,911	17,757	Citibank N.A.
Pihak ketiga			Third parties
Dalam mata uang Rupiah			Denominated in Rupiah
Citibank N.A.	6,803	4,669	Citibank N.A.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	2,339	1,547	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	65	409	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
	84,272	26,253	
Deposito berjangka:			Time deposits:
Pihak ketiga			Third parties
Dalam mata uang Dolar AS			Denominated in US Dollars
ANZ Bank	43,012	28,321	ANZ Bank
Standard Chartered Bank	42,728	98,494	Standard Chartered Bank
Bank of America	30,000	-	Bank of America
JP Morgan Chase Bank N.A.	-	19,142	JP Morgan Chase Bank N.A.
Pihak ketiga			Third parties
Dalam mata uang Rupiah			Denominated in Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	-	3	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
	115,740	145,960	
Jumlah	200,020	172,239	Total

Rata-rata suku bunga deposito berjangka di atas adalah:

The average interest rates on the above time deposits are as follows:

31 Desember	2013	2012	December 31
Deposito Dolar AS	0.2%	0.2%	US Dollar deposits
Deposito Rupiah	5.0%	5.0%	Rupiah deposits

Tidak ada kas dan setara kas pada pihak-pihak berelasi.

There are no cash and cash equivalents held with related parties.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas kas dan setara kas sebagaimana dijabarkan diatas.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of cash and cash equivalents mentioned above.

5b. Kas yang dibatasi penggunaannya

5b. Restricted cash

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Dalam mata uang Dolar AS Union Bank N.A.	16,723	17,333	Denominated in US Dollars Union Bank N.A.
Rekening Union Bank N.A. tersebut ditujukan untuk pembayaran pokok pinjaman dan bunga terhutang. Rekening ini dibuka untuk memenuhi persyaratan perjanjian pinjaman Perjanjian Fasilitas Ekspor Senior ("SEFA") antara Perseroan dengan Mizuho Corporate Bank, Ltd. dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. untuk Proyek Karebbe (lihat Catatan 17).			The account with Union Bank N.A. is intended for payment of loan principal and interest payable. This account was established to fulfill the requirement of the Senior Export Facility Agreement ("SEFA") between the Company and Mizuho Corporate Bank, Ltd. and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. for the Karebbe Project (refer to Note 17).

6. Piutang usaha

6. Trade receivables

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Pihak-pihak berelasi	65,902	112,640	Related parties
Karena jatuh temponya yang pendek, jumlah tercatat piutang usaha kurang lebih sama dengan nilai wajarnya.			Due to the short-term nature of trade receivables, their carrying amount approximates their fair values.
Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas piutang sebagaimana dijabarkan diatas.			The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of receivables mentioned above.
Pada tanggal 31 Desember 2013, piutang usaha sebesar AS\$65,3 juta (2012: AS\$95,4 juta) (nilai penuh) belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai. Piutang tersebut akan jatuh tempo dalam 30 hari ke depan.			As at December 31, 2013, trade receivables of US\$65.3 million (2012: US\$95.4 million) (full amount) are not yet past due nor impaired. Those receivables will be due within 30 days.
Pada tanggal 31 Desember 2013, piutang usaha sebesar AS\$0,6 juta (2012: AS\$17,2 juta) (nilai penuh) telah lewat jatuh tempo sampai dengan 60 hari namun tidak mengalami penurunan nilai.			As at December 31, 2013, trade receivables of US\$0.6 million (2012: US\$17.2 million) were past due up to 60 days but not impaired.
Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode, manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa tidak diperlukan adanya penyisihan penurunan nilai atas kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.			Based on a review of the status of each customer's receivable accounts at the end of the period, the Company's management believes that no provision for impairment is necessary to provide for losses from the potential non-collection of these accounts as at December 31, 2013 and 2012.
Tidak ada piutang usaha yang dijaminkan pada tanggal 31 Desember 2013 (2012: nil).			There were no trade receivables pledged as collateral as at December 31, 2013 (2012: nil).
Lihat Catatan 31e untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.			Refer to Note 31e for details of related party balances and transactions.

7. Aset keuangan lancar lainnya

7. Other current financial assets

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Pinjaman kepada karyawan	6,893	9,195	Loans to employees
Tagihan kepada kontraktor	809	1,251	Receivables from contractors
Lainnya	102	102	Others
Jumlah	7,804	10,548	Total

Karena jatuh temponya yang pendek, jumlah nilai tercatat kurang lebih sama dengan nilai wajarnya. Due to the short-term nature, the carrying amount approximates their fair values.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas piutang sebagaimana dijabarkan diatas. The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of receivables mentioned above.

7. Aset keuangan lancar lainnya (lanjutan)

7. Other current financial assets (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2013, aset keuangan lancar lainnya belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai. Analisis umur aset keuangan lancar lainnya adalah sebagai berikut:

As at December 31, 2013, other current financial assets are not yet past due nor impaired. The ageing analysis of these other current financial assets is as follows:

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Sampai dengan 3 bulan	2,161	1,781	Up to 3 months
3 bulan sampai 1 tahun	5,643	8,767	3 months to 1 year
Jumlah	7,804	10,548	Total

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan setiap akun pada akhir periode, manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa tidak diperlukan adanya penyisihan penurunan nilai atas kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya nilai di atas pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

Based on a review of the status of each account at the end of the period, the Company's management believes that no provision for impairment is necessary to provide for losses from the potential non-collection of these accounts as at December 31, 2013 and 2012.

Lihat Catatan 31e untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 31e for details of related party balances and transactions.

8. Persediaan

8. Inventories

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Nikel			Nickel
Dalam proses	40,699	38,391	In process
Barang jadi	10,993	13,282	Finished
	51,692	51,673	
Bahan pembantu	101,528	102,268	Supplies
Dikurangi: Penyisihan untuk bahan pembantu usang	(2,224)	(1,092)	Less: Provision for obsolete supplies
	99,304	101,176	
Jumlah	150,996	152,849	Total
Mutasi penyisihan bahan pembantu usang adalah sebagai berikut:			Movement in the provision for obsolete supplies is as follows:
31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Saldo awal – 1 Januari	(1,092)	(1,164)	Beginning balance – January 1
(Penyisihan)/Pemulihan untuk bahan pembantu usang	(1,132)	72	(Provision)/Recovery for obsolete supplies
Saldo akhir	(2,224)	(1,092)	Ending balance

Manajemen Perseroan yakin bahwa penyisihan untuk bahan pembantu usang telah mencukupi terhadap kemungkinan kerugian yang timbul dari bahan pembantu usang. Tidak ada persediaan yang dijaminkan pada tanggal 31 Desember 2013 (2012: nil).

The Company's management believes that the provision for obsolete supplies is adequate to cover possible losses from obsolete supplies. There were no inventories pledged as collateral as at December 31, 2013 (2012: nil).

Biaya persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam "beban pokok pendapatan" sebesar AS\$782 juta (2012: AS\$801 juta) (nilai penuh).

The cost of inventories recognized and included in "cost of revenue" amounted to US\$782 million (2012: US\$801 million) (full amount).

Pada tanggal 31 Desember 2013, semua aset Perseroan termasuk persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh semua risiko industri berikut, tapi tidak terbatas pada gempa bumi, kebakaran, kerusakan mekanis atau listrik dan termasuk gangguan usaha lainnya. Jumlah pertanggungan untuk aset Perseroan dan eksposur atas risiko gangguan usaha terkait per 31 Desember 2013 adalah AS\$5.990 juta (2012: AS\$3.359 juta), dengan batasan sebesar AS\$700 juta per kejadian (2012: AS\$500 juta) (nilai penuh). Bahan pembantu diasuransikan sebesar biaya penggantian, nikel dalam proses sebesar biaya bahan baku bijih dan tenaga kerja ditambah proporsi tertentu atas biaya tidak langsung, sedangkan untuk barang jadi nikel dalam *matte* sebesar mana yang lebih tinggi antara harga jual tunai bersih atau biaya memproduksinya kembali. Menurut pendapat manajemen, pertanggungan asuransi telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut.

As at December 31, 2013, all of the Company's assets including inventories were insured against the risk of direct physical loss or damage caused by industrial all risks, including but not limited to earthquake, fire and electrical or mechanical breakdown and including related business interruption. The total insured value of the Company's assets and related business interruption exposure as at December 31, 2013 was US\$5,990 million (2012: US\$3,359 million), with policy limits of US\$700 million per occurrence (2012: US\$500 million) (full amount). Supplies are insured at replacement cost, nickel in process at the cost of ore raw materials and labor expended plus a proper proportion of overhead charges, while nickel in matte finished goods are insured at the regular net cash selling price or at reproduction cost, whichever is higher. In management's opinion, the insurance is adequate to cover possible losses from such risks.

9. Biaya dibayar dimuka dan uang muka

9. Prepayments and advances

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)			
Asuransi dibayar dimuka	3,270	2,764	Prepaid insurance
Uang muka ke kontraktor dan pemasok	939	6,895	Advance to contractors and suppliers
Jumlah	4,209	9,659	Total

10. Aset tetap

10. Fixed assets

	1 Januari/ January 1, 2013	Penambahan/ Additions	Transfer/ Transfers	Pengurangan/ Disposals	31 Desember/ December 31, 2013	
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)						
Harga perolehan						Cost
Pemilikan langsung						Direct ownership
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	928,616	–	1,210	–	929,826	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	35,074	–	4,937	–	40,011	Roads and bridges
Bangunan	577,927	–	23,468	–	601,395	Buildings
Pabrik dan mesin	1,291,163	–	139,899	(1,628)	1,429,434	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	32,602	–	287	–	32,889	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	26,639	–	3,031	–	29,670	Mine development
Aset tetap dalam penyelesaian *)	210,710	137,939	(172,832)	–	175,817	Construction in progress *)
Jumlah	3,102,731	137,939	–	(1,628)	3,239,042	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung						Direct ownership
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	(240,739)	(23,830)	–	–	(264,569)	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	(16,815)	(2,073)	–	–	(18,888)	Roads and bridges
Bangunan	(393,846)	(15,638)	–	–	(409,484)	Buildings
Pabrik dan mesin	(784,155)	(67,555)	–	1,628	(850,082)	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	(32,378)	(177)	–	–	(32,555)	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	(10,227)	(1,475)	–	–	(11,702)	Mine development
Jumlah	(1,478,160)	(110,748)	–	1,628	(1,587,280)	Total
Nilai buku bersih	1,624,571				1,651,762	Net book value

*) Lihat Catatan 11 untuk rincian aset tetap dalam penyelesaian.

*) Refer to Note 11 for details of construction in progress.

10. Aset tetap (lanjutan)

10. Fixed assets (continued)

	1 Januari/ January 1, 2012	Penambahan/ Additions	Transfer/ Transfers	Pengurangan/ Disposals	31 Desember/ December 31, 2012	
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)						
Harga perolehan						Cost
Pemilikan langsung						Direct ownership
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	895,198	–	33,418	–	928,616	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	35,074	–	–	–	35,074	Roads and bridges
Bangunan	577,314	–	613	–	577,927	Buildings
Pabrik dan mesin	1,185,121	–	106,042	–	1,291,163	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	32,579	–	23	–	32,602	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	24,703	–	1,936	–	26,639	Mine development
Aset tetap dalam penyelesaian *)	205,236	147,506	(142,032)	–	210,710	Construction in progress *)
Jumlah	2,955,225	147,506	–	–	3,102,731	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung						Direct ownership
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	(215,328)	(25,411)	–	–	(240,739)	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	(14,816)	(1,999)	–	–	(16,815)	Roads and bridges
Bangunan	(379,230)	(14,616)	–	–	(393,846)	Buildings
Pabrik dan mesin	(725,270)	(58,885)	–	–	(784,155)	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	(32,181)	(197)	–	–	(32,378)	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	(9,049)	(1,178)	–	–	(10,227)	Mine development
Jumlah	(1,375,874)	(102,286)	–	–	(1,478,160)	Total
Nilai buku bersih	1,579,351				1,624,571	Net book value

*) Lihat Catatan 11 untuk rincian aset tetap dalam penyelesaian.

*) Refer to Note 11 for details of construction in progress.

Seluruh biaya penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dibebankan ke biaya produksi.

All depreciation expenses for the years ended December 31, 2013 and 2012 were allocated to production costs.

Pada tanggal 31 Desember 2013, semua aset Perseroan termasuk aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh semua risiko industri dan, tapi tidak terbatas pada gempa bumi, kebakaran, kerusakan mekanis atau listrik termasuk gangguan usaha lainnya. Jumlah pertanggungan untuk aset Perseroan dan eksposur atas risiko gangguan usaha terkait per 31 Desember 2013 adalah AS\$5.990 juta (2012: AS\$3.359 juta), dengan batasan sebesar AS\$700 juta per kejadian (2012: AS\$500 juta) (nilai penuh). Sebagian besar dari aset tetap diasuransikan sebesar biaya penggantian. Menurut pendapat manajemen, pertanggungan asuransi telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Tidak ada aset tetap yang dijamin pada tanggal 31 Desember 2013 (2012: nil).

As at December 31, 2013, all of the Company's assets including fixed assets were insured against the risk of direct physical loss or damage caused by industrial all risks, including but not limited to earthquake, fire and electrical or mechanical breakdown and including related business interruption. The total insured value for the Company's assets and related business interruption exposure as at December 31, 2013 was US\$5,990 million (2012: US\$3,359 million), with policy limits of US\$700 million per occurrence (2012: US\$500 million) (full amount). The fixed assets are mostly insured at replacement cost. In management's opinion, the insurance is appropriate and adequate to cover possible losses arising from such risks. There were no fixed assets pledged as collateral as at December 31, 2013 (2012: nil).

Jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebesar AS\$214,8 juta (2012: AS\$285 juta). Aset tetap yang tidak dipakai sementara pada tanggal 31 Desember 2013 dengan nilai buku bersih AS\$0,3 juta (2012: nil) (nilai penuh).

The gross carrying value of each fixed asset that is fully depreciated and still in use was US\$214.8 million (2012: US\$285 million). There were temporary idle fixed assets as at December 31, 2013 with a net book value of US\$0.3 million (2012: nil) (full amount).

Perseroan telah melakukan pengkajian kembali atas masa manfaat aset tetap dan berdasarkan pengkajian tersebut, Perseroan tidak mengidentifikasi adanya perubahan atas masa manfaat aset tetap yang ada.

The Company has performed a review of the useful lives of the Company's fixed assets and based on that review, the Company did not identify any changes in the useful lives of the fixed assets.

Pelepasan aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 adalah AS\$1,6 juta (2012: nil) (nilai penuh).

Disposals of fixed assets for the year ended December 31, 2013 were US\$1.6 million (2012: nil) (full amount).

Catatan atas Laporan Keuangan
PT Vale Indonesia Tbk
31 Desember 2013 dan 2012

Notes to the Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk
December 31, 2013 and 2012

11. Aset tetap dalam penyelesaian

11. Construction in progress

Aset tetap dalam penyelesaian terdiri dari proyek yang belum selesai pada tanggal laporan posisi keuangan.

Construction in progress represents capital projects that have not been completed at the statements of financial position dates.

Aset tetap dalam penyelesaian terdiri dari:

The construction in progress is as follows:

31 Desember	2013	% penyelesaian/ % of completion	Perkiraan waktu penyelesaian/ Estimated completion date	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)				
Perbaikan Jalan Tambang Petea	22,020	93	2014	Petea Haul Road Upgrade
Perbaikan Tanur Listrik #1	19,969	27	2015	Electric Furnace #1 Rebuild
Reaktor Adaptif Tanur Listrik	18,379	98	2014	Adaptive Reactor Furnace
Lainnya di bawah AS\$10 juta	115,449	-	-	Others below US\$10 million
Jumlah	175,817			Total

31 Desember	2012	% penyelesaian/ % of completion	Perkiraan waktu penyelesaian/ Estimated completion date	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)				
Konversi Batubara Tahap I	48,827	70	2013	Coal Conversion Phase I
Reaktor Adaptif Tanur Listrik	17,361	93	2013	Adaptive Reactor Furnace
Perbaikan Jalan Tambang Petea	15,495	66	2013	Petea Haul Road Upgrade
Proyek Pengangkutan Batu Bara	14,271	35	2013	Coal Transportation Project
Lainnya di bawah AS\$10 juta	114,756	-	-	Others below US\$10 million
Jumlah	210,710			Total

12. Aset keuangan tidak lancar lainnya

12. Other non-current financial assets

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)			
Pinjaman kepada karyawan Dikurangi: Bagian jangka pendek (Catatan 7)	20,308 (6,893)	25,818 (9,195)	Loans to employees Less: Current portion (Note 7)
Bagian jangka panjang	13,415	16,623	Non-current portion

Lihat Catatan 31e untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 31e for details of related party balances and transactions.

13. Utang usaha

13. Trade payables

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)			
Pihak-pihak berelasi			Related parties
Dalam mata uang Dolar AS	11,181	10,868	Denominated in US Dollars
Dalam mata uang Yen Jepang	30	20	Denominated in Japanese Yen
	11,211	10,888	
Pihak ketiga			Third parties
Dalam mata uang Dolar AS	51,676	47,863	Denominated in US Dollars
Dalam mata uang Rupiah Indonesia	6,496	16,036	Denominated in Indonesian Rupiah
Dalam mata uang Euro	3,063	1,215	Denominated in Euro
Dalam mata uang Dolar Australia	1,035	597	Denominated in Australian Dollars
Dalam mata uang lainnya (di bawah AS\$1 juta)	2,034	2,460	Denominated in other currencies (below US\$1 million)
	64,304	68,171	
Jumlah	75,515	79,059	Total

Catatan atas Laporan Keuangan
PT Vale Indonesia Tbk
31 Desember 2013 dan 2012

Notes to the Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk
December 31, 2013 and 2012

13. Utang usaha (lanjutan)

13. Trade payables (continued)

Utang usaha timbul dari pembelian barang dan jasa. Jumlah yang disebutkan di atas adalah lancar sesuai dengan ketentuan pembayaran seperti yang tertuang dalam perjanjian yang bersangkutan, sehingga nilai wajar utang usaha sama dengan nilai tercatatnya.

The trade payables arose from the purchase of goods and services. The amounts are current within the payment terms as set out in the relevant agreement, as such, the carrying value of trade payables approximates their fair value.

Rincian pemasok dengan saldo melebihi 10% dari jumlah utang usaha, selain saldo pihak-pihak berelasi yang dijelaskan di Catatan 31f adalah sebagai berikut:

Details of suppliers that make up more than 10% of the trade payables balance, other than related party balances disclosed in Note 31f, are:

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)			
Pihak ketiga			Third parties
Kuo Oil (S) Pte Ltd.	11,447	12,657	Kuo Oil (S) Pte Ltd.
Tidak ada jaminan yang diberikan oleh Perseroan atas utang usahanya pada tanggal 31 Desember 2013 (2012: nil).			

There were no guarantees made by the Company for its payables as at December 31, 2013 (2012: nil).

14. Perpajakan

14. Taxation

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)			
Pajak penghasilan ("PPH")			Corporate income tax ("CIT")
- PPh Badan 2011	-	45,289	- CIT 2011
- PPh Badan 2012	83,833	79,668	- CIT 2012
- PPh Badan 2013	13,002	-	- CIT 2013
	96,835	124,957	
Pajak lainnya			Other taxes
- Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	16,609	24,502	- Value added tax ("VAT")
- Pajak dalam proses banding *)	54,799	67,048	- Taxes in dispute *)
- Pajak impor	1,740	-	- Import tax
	73,148	91,550	
Jumlah	169,983	216,507	Total
Bagian jangka pendek	(111,841)	(89,622)	Current portion
Bagian jangka panjang	58,142	126,885	Non-current portion

*) Lihat Catatan 14e untuk rincian pajak dalam proses banding.

*) Refer to Note 14e for details of taxes in dispute.

b. Utang pajak

b. Taxes payable

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)			
Utang pajak lainnya			Other taxes payable
- PPN terhutang	3,564	3,117	- VAT payable
- PPh pasal 23 dan 26	1,979	619	- Withholding tax ("WHT") articles 23 and 26
- PPh pasal 21	1,362	918	- WHT article 21
Jumlah	6,905	4,654	Total

14. Perpajakan (lanjutan)

14. Taxation (continued)

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expense

Beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The income tax expense for the years ended December 31, 2013 and 2012 were as follows:

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)			
Kini	21,093	29,115	Current
Tanggungan	(6,129)	(5,186)	Deferred
Penyesuaian periode sebelumnya	1,843	-	Prior period adjustment
Jumlah	16,807	23,929	Total

Perhitungan pajak penghasilan kini adalah berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Jumlah tersebut mungkin disesuaikan ketika surat pemberitahuan pajak tahunan disampaikan ke kantor pajak.

Current income tax calculations are based on estimated taxable income. The amounts may be adjusted when annual tax returns are filed with the tax authorities.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before income tax as shown in these financial statements and the estimated taxable income for the years ended December 31, 2013 and 2012 is as follows:

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)			
Laba sebelum pajak penghasilan	55,459	91,423	Profit before income tax
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Perbedaan antara penyusutan dan amortisasi komersial dan fiskal	16,073	12,121	Difference between commercial and tax depreciation and amortization
Liabilitas imbalan pascakerja	(4,617)	10,494	Post-employment benefit liabilities
Penyisihan untuk bahan pembantu usang	1,132	(72)	Provision for obsolete supplies
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	3,732	2,305	Provision for asset retirement
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	416	(29)	Share-based payment liabilities
Akrual/Provisi lain-lain	7,777	(4,075)	Other accruals/provisions
	79,972	112,167	
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Pendapatan keuangan kena pajak final	(127)	(82)	Finance income subject to final tax
Beban yang tidak dapat dikurangkan	4,525	4,375	Non-deductible expenses
	4,398	4,293	
Penghasilan kena pajak	84,370	116,460	Taxable income
Pajak penghasilan – kini, pada tarif 25%	21,093	29,115	Income tax – current, at 25%
Pajak dibayar dimuka	(34,095)	(108,783)	Prepaid tax
Lebih bayar pajak	(13,002)	(79,668)	Overpayment of tax

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perhitungan teoritis dari laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The reconciliation of income tax expense to the theoretical tax amount on the Company's profit before income tax for the years ended December 31, 2013 and 2012 is as follows:

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)			
Laba sebelum pajak penghasilan	55,459	91,423	Profit before income tax
Pajak penghasilan dihitung pada tarif 25%	13,865	22,856	Income tax calculated at 25%
Pendapatan keuangan kena pajak final	(32)	(21)	Finance income subject to final tax
Beban yang tidak dapat dikurangkan	1,131	1,094	Non-deductible expense
Jumlah	14,964	23,929	Total
Penyesuaian periode sebelumnya	1,843	-	Prior period adjustment
Beban pajak penghasilan	16,807	23,929	Income tax expense

14. Perpajakan (lanjutan)

14. Taxation (continued)

d. Liabilitas pajak tangguhan

d. Deferred tax liabilities

Perubahan liabilitas pajak tangguhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012:

Changes in the deferred tax liabilities for the years ended December 31, 2013 and 2012 are shown below:

	1 Januari/ January 1, 2013	(Dikreditkan)/ Dibebankan ke laporan laba rugi/ (Credited)/ Charged to profit or loss	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	31 Desember/ December 31, 2013	
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)					
Penyusutan dan amortisasi	181,446	(4,018)	-	177,428	Depreciation and amortization
Liabilitas imbalan pascakerja	(5,556)	1,154	1,426	(2,976)	Post-employment benefit liabilities
Penyisihan untuk bahan pembantu usang	(273)	(283)	-	(556)	Provision for obsolete supplies
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	(10,528)	(933)	-	(11,461)	Provision for asset retirement
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	(4)	(104)	-	(108)	Share-based payment liabilities
Akrual/Provisi lain-lain	(3,080)	(1,945)	-	(5,025)	Other accruals/provisions
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	162,005	(6,129)	1,426	157,302	Deferred tax liabilities, net

	1 Januari/ January 1, 2012	(Dikreditkan)/ Dibebankan ke laporan laba rugi/ (Credited)/ Charged to profit or loss	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	31 Desember/ December 31, 2012	
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)					
Penyusutan dan amortisasi	184,476	(3,030)	-	181,446	Depreciation and amortization
Liabilitas imbalan pascakerja	(2,932)	(2,624)	-	(5,556)	Post-employment benefit liabilities
Penyisihan untuk bahan pembantu usang	(291)	18	-	(273)	Provision for obsolete supplies
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	(9,952)	(576)	-	(10,528)	Provision for asset retirement
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	(11)	7	-	(4)	Share-based payment liabilities
Akrual/Provisi lain-lain	(4,099)	1,019	-	(3,080)	Other accruals/provisions
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	167,191	(5,186)	-	162,005	Deferred tax liabilities, net

e. Surat ketetapan pajak

e. Tax assessment letters

Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2008

Tax audit results for 2008 fiscal year

PPH Badan 2008

CIT 2008

Pada tanggal 26 Maret 2010, Perseroan menerima surat hasil pemeriksaan pajak untuk PPH Badan tahun 2008 yang menyetujui kelebihan pembayaran pajak sebesar AS\$68,5 juta dibandingkan dengan AS\$71,7 juta nilai awal yang ditagihkan dan dicatat sebagai pajak dibayar dimuka pada laporan keuangan 31 Desember 2009 (nilai penuh). Pembayaran oleh Direktorat Jendral Pajak ("DJP") telah diterima pada tanggal 14 April 2010 yang terdiri dari penerimaan kas sebesar IDR603,7 milyar (setara dengan AS\$66,3 juta) (nilai penuh) dan beberapa pemindahbukuan berkaitan dengan hasil pemeriksaan pajak tahun 2008 lainnya sebesar IDR22,4 milyar (setara dengan AS\$2,2 juta) (nilai penuh). Perseroan telah menyetujui hasil pemeriksaan sebesar AS\$1,3 juta dan mengakuinya sebagai beban di laporan laba rugi, sementara untuk sisa tagihan sebesar AS\$1,9 juta telah dikirimkan surat keberatan ke DJP pada tanggal 24 Juni 2010 (nilai penuh). Jumlah keberatan atas kelebihan pembayaran pajak untuk PPH Badan ini dicatat pada akun pajak dalam proses banding di bagian pajak dibayar dimuka (lihat Catatan 14a).

On March 26, 2010, the Company received a tax assessment letter for CIT 2008 which confirmed a CIT overpayment of US\$68.5 million compared to the US\$71.7 million originally claimed by the Company and booked in its financial statements as prepaid taxes as at December 31, 2009 (full amount). Payment of US\$68.5 million by the Directorate General of Tax ("DGT") was received on April 14, 2010 which consisted of a cash transfer amounting to IDR603.7 billion (equivalent to US\$66.3 million) (full amount) and several overbookings related to other 2008 tax assessments of IDR22.4 billion (equivalent to US\$2.2 million) (full amount). While the Company has agreed with part of the assessment amounting to US\$1.3 million which was recognized as an expense in profit or loss, the remaining US\$1.9 million has been objected to by the Company in its objection letter to the DGT submitted on June 24, 2010 (full amount). This objected amount of CIT overpayment is currently recognized as part of the tax in dispute account under prepaid taxes (refer to Note 14a).

14. Perpajakan (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2008 (lanjutan)

PPh Badan 2008 (lanjutan)

Pada tanggal 26 Februari 2013, Pengadilan Pajak telah menolak permohonan banding Perseroan terkait dengan PPh Badan 2008. Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dikirimkan ke Perseroan pada tanggal 15 Maret 2013. Perseroan telah menyampaikan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung pada tanggal 12 Juni 2013. Oleh karenanya, Perseroan masih mempertahankan kelebihan pembayaran pajak atas PPh Badan 2008 sebagai piutang.

Pajak-pajak lainnya - 2008

Pada tanggal 26 Maret 2010, Perseroan juga menerima beberapa surat pemeriksaan pajak lainnya berkaitan dengan pajak penghasilan lainnya dan PPN sebesar AS\$25,2 juta dengan rincian sebagai berikut:

Jenis pajak/Tax article	Kurang bayar (IDR nilai penuh)/ Underpayment (IDR full amount)	Setara AS\$ (nilai penuh)/ Equivalent US\$ (full amount)	Jumlah yang disetujui (setara AS\$ nilai penuh)/ Amount agreed (equivalent US\$ full amount)		Jumlah yang diajukan keberatan (AS\$ nilai penuh)/ Amount objected (US\$ full amount)		Jumlah yang keberatan yang ditolak (AS\$ nilai penuh)/ Objection amount rejected (US\$ full amount)	Jumlah yang diajukan banding (AS\$ nilai penuh)/ Amount to be appealed (US\$ full amount)
PPh pasal 15/ WHT article 15	50,463,553	4,137	4,137	-	-	-	-	
PPh pasal 23/ WHT article 23	5,201,652,257	426,438	1,782	424,656	-	-	-	
PPh pasal 26/ WHT article 26	296,887,634,509	24,339,202	1,367,952	22,971,250	22,971,250	22,971,250	-	
PPh pasal 4(2)/ WHT article 4(2)	13,263,097	1,087	1,087	-	-	-	-	
PPN/VAT	5,579,010,679	457,374	225,123	232,251	49,699	-	-	
Jumlah/Total	307,732,024,095	25,228,238	1,600,081	23,628,157	23,020,949	22,971,250		

Jumlah yang telah disetujui diatas telah diakui sebagai biaya pada laporan laba rugi dan pembayaran ke DJP dilakukan melalui pemindahbukuan (lihat penjelasan PPh Badan 2008 diatas). Selain jumlah yang telah disetujui seperti dijelaskan diatas, manajemen berkeyakinan bahwa hasil pemeriksaan tidak memiliki dasar yang kuat. Terutama interpretasi Kontrak Karya mengenai keharusan pemotongan PPh pasal 26 untuk dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham pendiri. Manajemen percaya bahwa interpretasi Perseroan atas klausul di Kontrak Karya saat ini telah tepat yang didukung oleh pendapat penasehat hukum Perseroan. Lebih lanjut, praktik Perseroan saat ini telah konsisten dengan praktik-praktik di tahun-tahun sebelumnya tanpa sanggahan dari DJP.

Pada tanggal 7 Februari 2011, Perseroan menerima Surat Ketetapan Pajak ("SKP") No. KEP-62/WPI.19/BD.05/2011 tanggal 2 Februari 2011 yang menolak keberatan kurang bayar pajak untuk PPh pasal 26 mengenai pengenaan PPh atas pembayaran dividen kepada pemegang saham pendiri sebesar IDR278 milyar atau setara dengan AS\$22,8 juta (nilai penuh).

Pada akhir bulan Maret 2011, Perseroan juga menerima Surat Keputusan Keberatan tanggal 28 Februari 2011 dan 24 Maret 2011, yang menolak keberatan atas SKP PPh pasal 26 mengenai perjanjian bantuan manajemen (*Management Assistance Agreement* "MAA"), SKP PPh Badan mengenai MAA, dan SKP PPh pasal 23 atas jasa yang diberikan oleh Vale Technology Development (Canada) Limited ("VTDCL") karena dianggap sebagai Bentuk Usaha Tetap ("BUT") di Indonesia. Jumlah keberatan yang ditolak terkait SKP-SKP ini adalah ekuivalen dengan AS\$3,1 juta (nilai penuh).

14. Taxation (continued)

e. Tax assessment letters (continued)

Tax audit results for 2008 fiscal year (continued)

CIT 2008 (continued)

On February 26, 2013, the Tax Court rejected the Company's appeal against the Decision Letter from the DGT in relation to the CIT 2008 matter. The decision was sent to the Company on March 15, 2013. The Company has submitted a Reconsideration Request to the Supreme Court on June 12, 2013. Therefore, the Company still maintains the CIT overpayment for 2008 as a receivable.

Other taxes - 2008

On March 26, 2010, the Company also received several other tax assessment letters concerning the underpayment of several withholding taxes and VAT totaling US\$25.2 million as follows:

The amount agreed by the Company has been recognized as an expense in profit or loss and payment to the DGT was made through several overbookings (refer to explanation for CIT 2008 above). Other than the agreed amounts noted above, management believes that these assessments are without merit. In particular, the disputed portion of the WHT article 26 assessment relates to the DGT's interpretation of a clause in the Company's CoW relating to WHT to be applied to dividends paid to founding shareholders of the Company. Management believes that the Company's interpretation of the clause is correct, and the Company has received legal advice to that effect. Furthermore, the Company's treatment is consistent with the treatment that has been adopted in previous years without challenge from the DGT.

On February 7, 2011, the Company received a Tax Decision Letter No. KEP-62/WPI.19/BD.05/2011 dated February 2, 2011 which rejected the Company's objection to the tax underpayment for WHT article 26 regarding the WHT on the dividend payments to the founding shareholders amounting to IDR278 billion or equivalent to US\$22.8 million (full amount).

At the end of March 2011, the Company also received Tax Objection Decision Letters dated February 28, 2011 and March 24, 2011 that rejected the Company's objection to Tax Assessment Letters for WHT article 26 regarding Management Assistance Agreement ("MAA"), Tax Assessment Letter for CIT regarding MAA and Tax Assessment Letters for article 23 for services that have been delivered by Vale Technology Development (Canada) Limited ("VTDCL") which the DGT considered to have a Permanent Establishment ("PE") in Indonesia. Total objections that have been declined related to these Tax Assessment Letters is equivalent to US\$3.1 million (full amount).

14. Perpajakan (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2008 (lanjutan)

Paia-pajak lainnya - 2008 (lanjutan)

Perseroan telah mengajukan banding ke pengadilan pajak pada tanggal 27 April 2011, 27 Mei 2011, dan 20 Juni 2011 atas seluruh keberatan diatas. Perseroan juga telah melakukan pembayaran sebesar IDR139 milyar atau setara dengan AS\$11,4 juta (nilai penuh) (50% dari jumlah SKPKB untuk PPh pasal 26 atas dividen kepada pemegang saham pendiri) pada tanggal 15 April 2011 sebagai persyaratan pengajuan banding ke Pengadilan Pajak. Pembayaran sebesar 50% juga dilakukan atas SKP PPh pasal 23 atas jasa yang diberikan oleh VTDCL.

Perseroan mengakui pembayaran ini sebagai bagian dari pajak dibayar dimuka (lihat Catatan 14a) dikarenakan Perseroan berharap agar pembayaran tersebut dapat dikembalikan dari Kantor Pajak setelah keputusan dikeluarkan untuk kepentingan Perseroan. Sidang pengadilan yang terkait dengan semua kasus di atas telah dilakukan dan sampai dengan tanggal laporan keuangan, Perseroan telah menerima putusan Pengadilan Pajak atas semua sengketa banding tahun 2008.

Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa banding PPh pasal 23 dibacakan pada tanggal 23 Juli 2013 yang menyatakan Pengadilan Pajak mengabulkan seluruhnya banding Perseroan. Oleh karenanya, atas pembayaran 50% nilai sengketa yang diajukan sebesar IDR2,6 milyar (setara dengan AS\$212 ribu) (nilai penuh), telah dikembalikan kepada Perseroan pada tanggal 17 September 2013.

Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa banding PPh pasal 26 sehubungan dengan pembayaran dividen kepada pemegang saham pendiri tertanggal 12 Desember 2013 yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Perseroan. Atas pembayaran sebesar IDR139 milyar (setara AS\$11,4 juta) yang merupakan 50% dari total SKPKB sebesar IDR278 milyar (setara AS\$22,8 juta) (nilai penuh), Perseroan memperkirakan akan menerima pengembalian di kuartal pertama 2014.

Terkait dengan sengketa banding PPh pasal 26 sehubungan dengan Pembayaran MAA, Pengadilan pajak memutuskan menolak permohonan banding Perseroan melalui putusan Pengadilan Pajak tertanggal 29 Nopember 2013. Tidak terdapat sengketa nilai atas banding ini yang dicatat sebagai pajak dibayar dimuka, karena lebih terkait sengketa jenis objek transaksi, dimana DJP memandang sebagai pembayaran dividen, sementara Perseroan menganggap sebagai pembayaran royalti. Putusan atas sengketa banding PPh pasal 26 ini sejalan dengan putusan atas sengketa PPh Badan yang sudah diputus terlebih dahulu. Manajemen sedang mempertimbangkan untuk menyampaikan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun-tahun pajak 2004 dan 2006

Pada tanggal 1 Maret 2011, Perseroan menerima surat ketetapan pajak dari Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar Satu untuk tahun-tahun pajak 2004 dan 2006 tanggal 22 dan 24 Februari 2011, secara berturut-turut. Surat pemeriksaan pajak ini menyatakan kurang bayar pajak sebesar AS\$12,8 juta untuk tahun pajak 2004 dan AS\$28,3 juta untuk tahun pajak 2006. Pada tanggal 17 Maret 2011, Perseroan juga telah menerima surat ketetapan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo untuk PPh pasal 21 tahun-tahun pajak 2004 dan 2006 tanggal 7 Maret 2011. Surat pemeriksaan pajak ini menyatakan kurang bayar pajak sebesar AS\$0,4 juta untuk tahun pajak 2004 dan AS\$1,2 juta untuk tahun pajak 2006.

14. Taxation (continued)

e. Tax assessment letters (continued)

Tax audit results for 2008 fiscal year (continued)

Other taxes - 2008 (continued)

The Company has submitted appeal letters on April 27, 2011, May 27, 2011 and June 20, 2011 for the above objections. The Company has made a payment of IDR139 billion or equivalent to US\$11.4 million (full amount) (i.e. 50% of the total tax underpayment assessment from WHT article 26 on dividend payments to founding shareholders) on April 15, 2011 as a prerequisite of appeal submission to the Tax Court. Payment in the amount of 50% was also made for Tax Assessment Letters on WHT article 23 for the services provided by VTDCL.

The Company recognised these payments as part of prepaid taxes (refer to Note 14a) as it is expected to be refunded once a decision is issued in the Company's favour. The court hearings related to all cases above have been conducted and as of the date of these financial statements, the Company has received Tax Court decision for all 2008 tax cases.

The Tax Court decision on the tax dispute of WHT article 23 received on July 23, 2013 states that the Tax Court accepted all of the Company's appeals. Therefore the payment of 50% of the value of the dispute at an amount of IDR2.6 billion (equivalent to US\$212 thousand) (full amount), has been refunded to the Company on September 17, 2013.

The Tax Court decision on the tax dispute of WHT article 26 related to the dividend payment to founding shareholders received on December 12, 2013 states that the Tax Court accepted all of the Company's appeal. For the Company's payment of IDR139 billion (equivalent to US\$11.4 million), which was 50% of total underpayment assessment of IDR278 billion (equivalent to US\$22.8 million), the Company expects to receive the refund in the first quarter of 2014.

With regard to the tax dispute of WHT article 26 related to the MAA payment, the Tax Court decision dated November 29, 2013 rejected the Company's appeal. No dispute amount was recorded as prepaid taxes since the dispute is more related to the nature of transaction, in which the DGT views them as dividends while the Company views them as royalties. The decision on the tax dispute of WHT article 26 is in line with the decision on the dispute on CIT. Management is considering submission of a Reconsideration Request to the Supreme Court on this case.

Tax audit results for 2004 and 2006 fiscal years

On March 1, 2011, the Company received tax assessment letters from the Large Taxpayer Office One for the 2004 and 2006 fiscal years dated February 22 and 24, 2011, respectively. These tax assessment letters indicated tax underpayments of US\$12.8 million for the 2004 fiscal year and US\$28.3 million for the 2006 fiscal year. On March 17, 2011, the Company also received a tax decision letter from Palopo Tax Office for the 2004 and 2006 fiscal years for WHT article 21 dated March 7, 2011. The tax letter indicated tax underpayment of US\$0.4 million for the 2004 fiscal year and US\$1.2 million for the 2006 fiscal year.

14. Perpajakan (lanjutan)

14. Taxation (continued)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

e. Tax assessment letters (continued)

Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun-tahun pajak 2004 dan 2006
(lanjutan)

Tax audit results for 2004 and 2006 fiscal years (continued)

Jenis pajak/Tax article	Kurang bayar (IDR nilai penuh)/ Underpayment (IDR full amount)	Setara AS\$ (nilai penuh)/ Equivalent US\$ (full amount)	Jumlah yang disetujui (setara AS\$ nilai penuh)/ Amount agreed (equivalent US\$ full amount)	Jumlah yang diajukan keberatan/banding (AS\$ nilai penuh)/ Amount to be appealed (US\$ full amount)
PPh Badan/CIT	-	5,005,780	1,488,942	3,516,838
PPh pasal 15/WHT article 15	512,598,073	42,023	42,023	-
PPh pasal 23/WHT article 23	183,786,080	15,067	15,067	-
PPh pasal 26/WHT article 26	85,570,290,753	7,015,154	1,575,393	5,439,761
PPh pasal 4(2)/WHT article 4(2)	28,370,801	2,326	2,326	-
PPN JKP LN/VAT on Offshore Service	8,688,169,590	712,266	712,266	-
Penalti atas PPN JKP LN/ Tax Penalty from Offshore Service VAT	106,310,508	8,715	8,715	-
Jumlah/Total	95,089,525,805	12,801,331	3,844,732	8,956,599
PPh pasal 21/WHT article 21	5,431,101,672	445,248	-	445,248
Tambahan keputusan keberatan PPh pasal 21/Additional WHT article 21 assessment as per objection result	7,090,293,338	581,271	-	581,271
Audit pajak 2006/2006 Tax Audit				
PPh Badan/CIT	-	7,790,035	1,850,019	5,940,016
PPh pasal 15/WHT article 15	185,158,881	15,180	15,180	-
PPh pasal 23/WHT article 23	158,803,106	13,019	13,019	-
PPh pasal 26/WHT article 26	197,126,302,498	16,160,649	2,682,658	13,477,991
PPN Barang dan Jasa/VAT on Goods and Services	35,500,667,606	2,910,387	8,444	2,901,943
PPN Wajib Pungut/VAT Collector	5,906,016,201	484,182	-	484,182
PPN JKP LN/VAT on Offshore Service	10,303,250,094	844,673	-	844,673
Penalti atas PPN JKP LN/ Tax Penalty from Offshore Service VAT	1,232,144,159	101,013	101,013	-
Jumlah/Total	250,412,342,545	28,319,138	4,670,333	23,648,805
PPh pasal 21/WHT article 21	14,571,825,622	1,194,616	-	1,194,616
Tambahan keputusan keberatan PPh pasal 21/Additional WHT article 21 assessment as per objection result	6,726,124,516	551,416	-	551,416

Perseroan telah melakukan pembayaran atas seluruh kurang bayar pajak berdasarkan surat ketetapan pajak dari Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar Satu yang ada pada tabel diatas pada tanggal 21 Maret 2011. Dari jumlah AS\$43,9 juta, Perseroan telah menyetujui kurang bayar pajak sebesar AS\$8,5 juta (nilai penuh) dan mengakuinya sebagai beban di laporan laba rugi. Saat ini, Perseroan telah mengajukan surat keberatan kepada Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar tanggal 20 Mei 2011 untuk sisa kurang bayar pajak sebesar AS\$35,4 juta (nilai penuh) dan mengakuinya sebagai pajak dibayar dimuka (lihat Catatan 14a).

The Company has paid the total tax underpayments based on the tax assessment letters from the Large Taxpayer Office One as noted in the table above on March 21, 2011. From the total of US\$43.9 million (full amount) of tax underpayments, the Company has accepted US\$8.5 million (full amount) of the underpayments and recognized the amount as an expense in profit or loss. The Company has filed an objection letter to the Regional Large Taxpayer Office on May 20, 2011 for the remaining underpayments assessed of US\$35.4 million (full amount) and recognized the amount as prepaid taxes (refer to Note 14a).

14. Perpajakan (lanjutan)

14. Taxation (continued)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

e. Tax assessment letters (continued)

Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun-tahun pajak 2004 dan 2006
(lanjutan)

Tax audit results for 2004 and 2006 fiscal years
(continued)

Perseroan telah melakukan pembayaran atas kurang bayar PPh pasal 21 berdasarkan surat ketetapan pajak dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ("Kanwil DJP") Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara yang ada pada tabel diatas pada tanggal 4 April 2011. Perseroan juga telah mengajukan surat keberatan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo tanggal 6 Juni 2011 untuk kurang bayar pajak sebesar AS\$1,6 juta dan mengakuinya sebagai pajak dibayar dimuka (lihat Catatan 14a). Pada tanggal 4 Juni 2012, Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara telah menerbitkan Keputusan Keberatan yang isinya menolak Permohonan Keberatan dan menambah kurang bayar pajak PPh pasal 21 tahun 2004 dan 2006 berturut-turut dari yang sebelumnya sebesar IDR5.431.101.672 (setara dengan AS\$445.248) dan IDR14.571.825.622 (setara dengan AS\$1.194.616) menjadi IDR12.521.395.101 (setara dengan AS\$1.026.519) dan IDR21.297.950.138 (setara dengan AS\$1.746.032). Perseroan telah mengajukan banding atas putusan keberatan ini pada tanggal 3 September 2012. Atas tambahan kekurangan pembayaran pajak ini, Perseroan juga telah melakukan pembayaran seluruhnya pada tanggal 3 Juli 2012.

The Company has paid the underpayment of WHT article 21 based on the tax assessment letters from the Directorate General of Tax Regional Office – South, West and Southeast Sulawesi as noted in the table above on April 4, 2011. The Company has also filed an objection letter to the Palopo Tax Office on June 6, 2011 for the underpayments of US\$1.6 million and recognized this amount as prepaid taxes (refer to Note 14a). On June 4, 2012, the Directorate General of Tax Regional Office – South, West and Southeast Sulawesi issued an objection decision which rejected the Company's objection and added tax underpayment of tax assessment for WHT article 21 for the years 2004 and 2006 from IDR5,431,101,672 (equivalent to US\$445,248) and IDR14,571,825,622 (equivalent to US\$1,194,616) to IDR12,521,395,010 (equivalent to US\$1,026,519) and IDR21,297,950,138 (equivalent to US\$1,746,032). The Company has submitted an appeal on this objection decision on September 3, 2012. On the additional underpayment assessment, the Company has paid taxes on July 3, 2012.

Selama Januari hingga Desember 2012, Perseroan telah menerima surat keputusan keberatan atas :

During January to December 2012, the Company received objection decision letters on :

- SKPKB PPh Badan tahun pajak 2004
- SKPKB PPh Badan tahun pajak 2006
- SKPKB PPN Barang dan Jasa tahun pajak 2006
- SKPKB PPN Jasa Kena Pajak Luar Negeri tahun pajak 2006
- SKPKB PPN Pemungut tahun pajak 2006
- SKPKB PPN Jasa Kena Pajak Luar Negeri tahun pajak 2004
- SKPKB PPh pasal 26 tahun pajak 2004
- SKPKB PPh pasal 26 tahun pajak 2006
- SKPKB PPh pasal 21 tahun pajak 2004
- SKPKB PPh pasal 21 tahun pajak 2006

- Tax Assessment of CIT for the year 2004
- Tax Assessment of CIT for the year 2006
- Tax Assessment of VAT on Goods and Services year 2006
- Tax Assessment of VAT on Offshore Services year 2006
- Tax Assessment of VAT Collector year 2006
- Tax Assessment of VAT on Offshore Services year 2004
- Tax Assessment of WHT article 26 year 2004
- Tax Assessment of WHT article 26 year 2006
- Tax Assessment of WHT article 21 year 2004
- Tax Assessment of WHT article 21 year 2006

Seluruh hasil putusan keberatan di atas pada dasarnya menolak permohonan keberatan Perseroan. Perseroan telah mengajukan permohonan banding atas seluruh hasil keputusan keberatan di atas sesuai batas waktu tanggal keputusan keberatan (tiga bulan dari tanggal keputusan keberatan).

The above objection decision results were basically to reject the Company's objections. The Company has submitted an appeal letter for several objections and is preparing for the others in accordance to the due date of objection decision (3 months from the objection decision date).

Pada tanggal 9 Oktober 2012, Perseroan menerima Hasil Putusan Pengadilan Pajak atas PPN Jasa Kena Pajak Luar Negeri tahun pajak 2004 sebesar AS\$712.266 (nilai penuh) yang menyatakan bahwa permohonan banding Perseroan ditolak karena alasan formal. Perseroan menerima hasil putusan ini dan karenanya telah membiayai jumlah tersebut di atas beserta penaltinya dalam laporan keuangan Perseroan. Sementara atas upaya banding-banding lainnya yang diajukan, tetap diproses dalam persidangan dan tidak ada penolakan karena alasan formal.

On October 9, 2012, the Company received a Tax Court Decision for the year 2004 VAT on Offshore Services of US\$712,266 (full amount) which stated that the appeal against the Directorate General of Taxation was rejected due to formality reasons. The Company agreed with the result and subsequently charged such amount to expense along with the tax penalty amount. Meanwhile, the other appeal letters which have been submitted, are still in the court process and no rejection has arisen due to formality reasons.

Terkait dengan Banding PPh Badan tahun 2004 dan 2006, Perseroan telah memutuskan untuk melakukan pencabutan Banding PPh Badan tahun 2004 dan 2006 dan saat ini sedang melakukan Permohonan *Mutual Agreement Procedure* ("MAP") melalui otoritas Pajak Kanada dan Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. MAP ini dilakukan untuk menilai koreksi atas biaya MAA, yang dianggap sebagai beban yang tidak dapat dikurangkan, oleh Pemeriksa Pajak. Sementara atas koreksi-koreksi biaya lainnya yang sebelumnya juga diajukan banding bersama dengan MAA, Perseroan telah melakukan reklasifikasi dari Pajak dibayar dimuka menjadi biaya. Total reklasifikasi tersebut untuk tahun 2004 dan 2006 berturut-turut adalah US\$1,1 juta dan US\$466 ribu (nilai penuh), dan ini diakui di kuartal kedua 2013.

In relation to the appeal on CIT year 2004 and 2006, the Company has decided to withdraw the appeal and change the strategy by applying for a Mutual Agreement Procedure ("MAP") to the Tax Authority of Canada and Indonesia according to the tax regulation. The MAP was intended to assess the correction from the Tax Auditor related to MAA, which was treated as non deductible. While on the other expenses which were appealed together with the MAA, the Company has made a reclassification from prepaid taxes to expense. Total reclassification for the year 2004 and 2006 was US\$1.1 million and US\$466 thousand (full amount) respectively, and this was recognized in the second quarter of 2013.

Manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki dasar yang kuat bahwa upaya banding akan diterima dan oleh sebab itu tidak ada kewajiban untuk jumlah sisa kurang bayar pajak tersebut yang perlu diakui dalam laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2013.

Management believes that the Company has strong grounds to believe that the appeals will be accepted and as such no liability for the remaining amount of tax underpayment has been recognized in the financial statements as at December 31, 2013.

14. Perpajakan (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2011

Pada tanggal 10 April 2013, Perseroan menerima SKP dari Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar Satu untuk 2011. SKP ini terkait dengan Pemeriksaan Pajak untuk tahun 2011 karena Perseroan melaporkan kelebihan pembayaran pajak sebesar AS\$45,3 juta (nilai penuh). Berdasarkan hasil pemeriksaan, nilai yang menjadi kelebihan bayar pajak PPh Badan Perseroan adalah sebesar AS\$40,2 juta (nilai penuh). Koreksi-koreksi yang dilakukan pemeriksa pajak, sebagian besar berkaitan dengan MAA, biaya bunga dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pinjaman SEFA.

Atas SKPLB PPh Badan sebesar AS\$40,2 juta tersebut, Perseroan telah menerima pengembalian pada tanggal 1 Mei 2013 dalam rupiah sebesar IDR390,5 milyar setelah memperhitungkan SKPKB atas PPN sebesar IDR487,7 juta (setara dengan AS\$44 ribu) (nilai penuh).

Terkait dengan koreksi-koreksi PPh Badan yang terkait dengan MAA, biaya bunga, dan biaya-biaya lain yang terkait pinjaman SEFA, Perseroan telah mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 1 Juli 2013. Jumlah keberatan atas SKPLB PPh Badan ini dicatat pada akun pajak dalam proses banding di bagian pajak dibayar dimuka (lihat Catatan 14a).

f. Administrasi

Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Indonesia, Perseroan menyampaikan surat pemberitahuan pajak berdasarkan metode *self-assessment* (menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang serta melaporkannya). Sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak Karya 1968, Direktorat Jenderal Pajak berhak melakukan pemeriksaan pajak dan menerbitkan surat ketetapan dalam kurun waktu lima tahun sejak tanggal terhutangnya pajak (sepuluh tahun berdasarkan Persetujuan Perpanjangan efektif 1 April 2008). Dalam Kontrak Karya 1968 juga disebutkan bahwa pajak penghasilan harus dihitung dan dibayar dalam Dolar AS. Hal ini dipertegas lagi dalam Persetujuan Perpanjangan yang menyatakan bahwa perhitungan dan pembayaran pajak Perseroan harus dilakukan dalam Dolar AS berdasarkan pendapatan bersih kena pajak yang juga dinyatakan dalam Dolar AS. Kelebihan cicilan pembayaran pajak penghasilan atas pajak yang terhutang dicatat sebagai pajak dibayar dimuka.

g. Revaluasi nilai sengketa pajak

Sebagaimana dinyatakan dalam Catatan 14e, Perseroan telah mengukur kembali nilai sengketa pajak yang dibayarkan dalam Rupiah sebagai akibat fluktuasi Rupiah terhadap mata uang Dolar AS. Melemahnya nilai Rupiah terhadap Dolar AS telah menyebabkan nilai sengketa pajak dalam Dolar AS yang dicatat sebagai pajak dibayar dimuka menurun dibandingkan nilai sebelumnya. Penurunan ini menyebabkan Perseroan mengakui kerugian selisih nilai tukar atas revaluasi pajak dibayar dimuka (kurs yang digunakan pada tanggal neraca 31 Desember 2013 adalah AS\$1 (nilai penuh) = IDR12.198, sementara kurs pada saat pencatatan awal adalah berkisar AS\$1 (nilai penuh) = IDR8.800).

14. Taxation (continued)

e. Tax assessment letters (continued)

Tax audit results for 2011 fiscal year

On April 10, 2013, the Company received a Tax Assessment Letter from the Large Taxpayer Office One for 2011. This assessment related to the Tax Audit Result for 2011 since the Company reported a CIT overpayment of US\$45.3 million (full amount). Based on the tax assessment, the amount of overpayment of CIT 2011 was US\$40.2 million (full amount). The correction made by tax office, mainly related to the MAA, interest expenses, and other costs related to the SEFA loan.

With regard to the overpayment assessment on CIT amounting to US\$40.2 million, the Company received the refund on May 1, 2013 in rupiah of IDR390.5 billion after deducting a VAT underpayment assessment of IDR487.7 million (equivalent to US\$44 thousand) (full amount).

With regard to the correction of CIT related to the MAA, interest expenses, and other costs related to SEFA loan, the Company has submitted an objection letter to the Director General of Taxation on July 1, 2013. The objected amount on the CIT overpayment assessment is recorded as part of the tax in dispute account under prepaid taxes (refer to Note 14a).

f. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on a self-assessment basis. As provided under the 1968 Contract, the tax authorities may audit the tax returns and issue an assessment within five years (ten years under the Extension Agreement effective April 1, 2008) from the due date of the tax liability. Also under the terms of the 1968 Contract, corporation taxes should be calculated in US Dollars and paid in US Dollars. It was confirmed in the Extension Agreement that the calculation of the tax payment to be made by the Company in any year will be made in US Dollars based on the net taxable income of the Company expressed in US Dollars, and that all payments of income tax should be made in US Dollars. Installments paid in excess of tax payable are classified as prepaid taxes.

g. Revaluation on tax dispute

As mentioned in Note 14e, the Company has remeasured the tax disputes paid in IDR as a result of fluctuations of Rupiah to US Dollars. The weakening of the Rupiah to US Dollars has resulted in a lower tax in dispute amount recorded as prepaid taxes from its original conversion. The Company has recognised a loss on the currency translation adjustment on revaluation of prepaid tax (exchange rate used in December 31, 2013 is US\$1 (full amount) = IDR12,198, while exchange rate used in original record is approximately US\$1 (full amount) = IDR8,800).

15a. Akrual

31 Desember	2013	2012	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Barang dan jasa	20,741	21,505	Goods and services
Royalti, retribusi air, sewa tanah, dan lain-lain	4,929	4,011	Royalties, water levy, land rent and others
Beban keuangan	2,630	3,316	Finance costs
Barang modal	1,672	2,782	Capital Items
Jumlah	29,972	31,614	Total

Karena sifatnya yang jangka pendek, nilai wajar dari akrual diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Lihat Catatan 31f untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

15a. Accruals

2012	December 31
(US Dollars, in thousands)	
21,505	Goods and services
4,011	Royalties, water levy, land rent and others
3,316	Finance costs
2,782	Capital Items
31,614	Total

Due to their short-term nature, the carrying amount of accruals approximates their fair value.

Refer to Note 31f for details of related party balances and transactions.

15b. Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya

31 Desember	2013	2012	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Utang dividen	1,798	1,032	Dividends payable
Utang non-operasional lainnya	1,422	-	Other non-operational payable
Uang jaminan yang ditahan	-	338	Guarantee retention
Lainnya	-	52	Others
Jumlah	3,220	1,422	Total

Karena sifatnya yang jangka pendek, nilai wajar dari liabilitas keuangan jangka pendek lainnya diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Due to their short-term nature, the carrying amount of other current financial liabilities approximates their fair value.

16. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

31 Desember	2013	2012	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Gaji, upah, dan manfaat karyawan lainnya	16,650	12,914	Salaries, wages and other employee benefits

Karena sifatnya yang jangka pendek, nilai wajar dari liabilitas imbalan kerja jangka pendek diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Due to their short-term nature, the carrying amount of short-term employee benefit liabilities approximates their fair value.

Lihat Catatan 31f untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 31f for details of related party balances and transactions.

17. Pinjaman bank jangka panjang

31 Desember	2013	2012	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd.	150,000	175,000	Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd.
Mizuho Corporate Bank, Ltd.	75,000	87,500	Mizuho Corporate Bank, Ltd.
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(5,885)	(6,866)	Unamortized debt issuance costs
219,115	255,634		
Bagian lancar:			Current portion:
Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd.	(25,000)	(25,000)	Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd.
Mizuho Corporate Bank, Ltd.	(12,500)	(12,500)	Mizuho Corporate Bank, Ltd.
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	1,637	1,857	Unamortized debt issuance costs
(35,863)	(35,643)		
Bagian jangka panjang	183,252	219,991	Non-current portion

Catatan atas Laporan Keuangan
PT Vale Indonesia Tbk
31 Desember 2013 dan 2012

17. Pinjaman bank jangka panjang (lanjutan)

Nilai wajar pinjaman bank jangka panjang saat ini mendekati nilai tercatatnya.

Biaya keuangan yang dibebankan pada laporan laba rugi selama tahun berjalan sebesar AS\$10,95 juta (2012: AS\$13,2 juta) (nilai penuh).

Pada tanggal 30 Nopember 2009, Perseroan ("Peminjam") menandatangani SEFA dengan Mizuho Corporate Bank, Ltd. dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. ("Pemberi Pinjaman"), dengan Vale S.A. (entitas pengendali utama Perseroan) bertindak sebagai penjamin ("Penjamin").

Fasilitas sebesar AS\$300 juta (terdiri dari pinjaman dari bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. sebesar AS\$200 juta dan Mizuho Corporate Bank, Ltd. sebesar AS\$100 juta) (nilai penuh) dibebani tingkat bunga LIBOR ditambah 1,5% per tahun untuk tiap periode pembayaran bunga yang di mulai dari tanggal 19 Februari 2010. Pokok utang akan dibayar dalam 16 kali tengah tahunan mulai tanggal 19 Februari 2012.

Pada saat penarikan pinjaman pada tahun 2009, Peminjam telah membayar biaya dimuka dan biaya agen sebesar AS\$4,5 juta; premi asuransi yang terikat kepada perjanjian ini sebesar AS\$5,7 juta; dan biaya-biaya lainnya sebesar AS\$240 ribu (nilai penuh).

Biaya-biaya berikut merupakan biaya yang harus dibayar sepanjang umur pinjaman:

- Biaya agen kepada *Facility Agent* sebesar AS\$20 ribu (nilai penuh) per tahun yang dibayarkan setiap tanggal 30 Nopember sampai seluruh pinjaman dilunasi.
- Biaya jaminan kepada Penjamin dihitung dari 1,5% per tahun dari jumlah pinjaman yang belum dilunasi (lihat Catatan 31f).

Fasilitas tersebut terikat pada persyaratan-persyaratan tertentu, antara lain:

- Untuk menyerahkan kepada *Facility Agent* dalam jangka waktu masing-masing 180 hari dan 90 hari pada setiap akhir tahun dan setiap kuartal, laporan keuangan yang telah diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan laporan keuangan kuartalan yang tidak diaudit.
- Dana dari pinjaman akan digunakan hanya untuk membiayai konstruksi, pembangunan dan pengoperasian dari Proyek Karebbe.
- Memastikan paling tidak perlakuan *pari passu* dengan semua pinjaman senior lain yang dimiliki Penjamin baik yang tidak dijamin maupun yang bersifat *unsubordinated* yang ada saat ini maupun di masa datang (Pemberi Pinjaman dan Penjamin).
- Sehubungan dengan Periode Penilaian (setiap enam bulan), nilai pasar dari *Designated Off-take Agreement* (setiap perjanjian ekspor awal dan setiap perjanjian ekspor lainnya yang dibentuk oleh Peminjam dari waktu ke waktu) tidak kurang dari 110% *debt service* (bunga ditambah dengan pokok angsuran).
- Selalu menjaga agar nilai pasar dari *Designated Off-take Agreement* tidak kurang dari 110% jumlah komitmen ditambah dengan jumlah pokok pinjaman dan jumlah *debt service coverage*.
- Peminjam akan memerintahkan JP Morgan Chase Bank, N.A. untuk mentransfer cicilan sebagai berikut:
 - Periode bulan kalender pertama bunga 20%
 - Periode bulan kalender kedua bunga 40%
 - Periode bulan kalender ketiga bunga 60%
 - Periode bulan kalender keempat bunga 80%
 - Periode bulan kalender kelima bunga 100%

Notes to the Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk
December 31, 2013 and 2012

17. Long-term bank borrowings (continued)

The fair value of the long-term bank borrowings approximates the carrying amount.

Finance costs charged to the profit or loss during the year amounting to US\$10.95 million (2012: US\$13.2 million) (full amount).

On November 30, 2009, the Company (the "Borrower") entered into a SEFA with Mizuho Corporate Bank, Ltd. and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., with Vale S.A. (the Company's ultimate parent entity) acting as the guarantor (the "Guarantor").

The facility of US\$300 million (consisting of loans from the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. of US\$200 million and from Mizuho Corporate Bank, Ltd. of US\$100 million) (full amount) is subject to interest at LIBOR plus 1.5% per annum for the relevant interest period; interest is payable commencing February 19, 2010. The principal will be repaid in 16 semi-annual installments commencing February 19, 2012.

On draw-down of the facility in 2009, the Borrower paid upfront fees and agency fees of US\$4.5 million; insurance premium tied to the agreement of US\$5.7 million; and other fees of US\$240 thousand (full amount).

The following fees are to be paid over the life of the loan by the Company:

- Agency fee to the Facility Agent, amounting to US\$20 thousand (full amount) per annum, paid on every November 30, until all loans have been paid in full.
- Guarantee fee to the Guarantor of 1.5% per annum on the outstanding loan amount (refer to Note 31f).

The facility is subject to certain covenants, among others:

- To furnish to the Facility Agent within 180 days and 90 days of the end of each fiscal year and quarter, respectively, the audited financial statements with an unqualified opinion and the unaudited quarterly financial statements.
- Proceeds of the loan will be used solely to finance the construction, development and operation of the Karebbe Project.
- Ensure at least *pari passu* ranking with all other present and future senior unsecured and unsubordinated indebtedness of the Obligor (Borrower and Guarantor).
- With respect to each Measurement Period (six-month basis), the market value of the Designated Off-take Agreements (each of the initial Export Agreements and each other Export Agreement from time to time designated by the Borrower) will be not less than 110% of the debt service amount (interest plus principal installment).
- At all times the market value of the Designated Off-take Agreements will be not less than 110% of the sum of the commitments plus the outstanding principal amount of the loans together with the debt service coverage amount.
- The Borrower will instruct JP Morgan Chase Bank, N.A. to transfer the installment portion as follows:
 - in the 1st calendar month of the interest period 20%
 - in the 2nd calendar month of the interest period 40%
 - in the 3rd calendar month of the interest period 60%
 - in the 4th calendar month of the interest period 80%
 - in the 5th calendar month of the interest period 100%

Catatan atas Laporan Keuangan
PT Vale Indonesia Tbk
31 Desember 2013 dan 2012

17. Pinjaman bank jangka panjang (lanjutan)

Peminjam tidak akan memberikan hak atas penjaminan asetnya kepada Pemberi Pinjaman lain selain dari Pemberi Pinjaman yang disebutkan dalam Perjanjian Penjaminan.

Peminjam dan Penjamin tidak akan melakukan penggabungan usaha dengan perusahaan lain atau memindahkan keseluruhan atau bagian signifikan dari asetnya ke pihak lain, tanpa ijin dari Pemberi Pinjaman.

Tidak diperbolehkan menghapus aset yang berkaitan dengan Proyek Karebbe tanpa mendapat ijin terlebih dahulu.

Penjamin akan menjaga, agar setiap akhir periode semester fiskal dari Penjamin, persyaratan posisi keuangan sebagai berikut:

- Rasio Utang terhadap Laba sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi ("LBPDA") yang telah disesuaikan tidak lebih dari 4,5 : 1,0.
- Rasio LBPDA yang telah disesuaikan terhadap biaya bunga tidak kurang dari 2,0 : 1,0.

Kejadian *default*: tidak membayar pokok pinjaman; tidak membayar *fee* atau bunga; tidak memenuhi persyaratan perjanjian; kebangkrutan atau tidak solven.

Pada tanggal 25 Maret 2011, Peminjam melakukan penarikan tambahan atas sisa fasilitas kredit sebesar AS\$150 juta (nilai penuh) (tidak ada biaya pinjaman tambahan yang harus dibayar oleh Peminjam untuk penarikan tersebut). Sehingga, pada tanggal 31 Desember 2013, Peminjam telah melakukan penarikan atas keseluruhan fasilitas kredit SEFA sebesar AS\$300 juta (nilai penuh).

Fasilitas kredit diatas digunakan untuk mendanai Proyek Karebbe. Pada tanggal 31 Desember 2013, Peminjam telah mematuhi persyaratan-persyaratan perjanjian fasilitas kredit ini.

SEFA telah diubah pada Nopember 2012 sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/20/PBI/2011 mengenai Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri melalui Bank Devisa dimana penempatan dana dilakukan melalui sistem perbankan Indonesia.

18. Liabilitas imbalan pascakerja

Perseroan memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. Kep-434/KM.17/1997, tertanggal 31 Juli 1997 seperti diumumkan dalam Berita Negara No. 73/1997 tanggal 12 September 1997 untuk mendirikan DPI, suatu dana pensiun yang dikelola secara tersendiri, dimana karyawan tertentu yang diterima sebagai karyawan sebelum 1 Januari 2011 yang telah memenuhi persyaratan masa kerja yang disyaratkan berhak untuk memperoleh tunjangan pensiun berdasarkan manfaat pasti, apabila karyawan tersebut pensiun, cacat atau meninggal dunia.

Pada tanggal 17 Desember 2012, Perseroan menerima surat dari Menteri Keuangan No.733/KM.10/2012 mengenai persetujuan untuk likuidasi DPI.

Dengan dilikuidasinya DPI, program dana pensiun karyawan Perseroan telah dipindahkan dan dikelola oleh suatu Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") yang telah ditunjuk oleh Perseroan. Hal ini termasuk dana pensiun yang telah ada yang sebelumnya dikelola oleh DPI maupun dana pensiun yang akan datang yang dibayarkan berdasarkan program *defined contribution* ("DC"). Seluruh karyawan Perseroan yang sebelumnya merupakan peserta DPI dalam program DB akan diikutsertakan dalam program DC yang dikelola oleh DPLK tersebut. Proses likuidasi ini saat ini sedang berlangsung.

Notes to the Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk
December 31, 2013 and 2012

17. Long-term bank borrowings (continued)

The Borrower will not create or permit to exist any lien on any collateral, except for the lien created by the Security Agreement.

The Borrower and Guarantor will not consolidate with or merge into any other corporation or convey or transfer all or significant part of its assets to any other parties, without the consent of the Lenders.

No disposal of assets related to Karebbe Project without prior consent.

The Guarantor will maintain, for each financial test period ending on the last day of each fiscal semester of the Guarantor, the following financial covenants:

- Debt to Adjusted Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ("EBITDA") ratio of not more than 4.5 : 1.0.
- Adjusted EBITDA to Interest Expense ratio of not less than 2.0 : 1.0.

Events of default: non-payment of principal; non-payment of fee or interest; failure to satisfy any covenant; involuntary proceedings for bankruptcy or insolvency.

On March 25, 2011, the Borrower made an additional drawdown of the remaining credit facility of US\$150 million (full amount) (there was no additional borrowing cost to be paid by the Borrower for the drawdown). Therefore, as at December 31, 2013, the Borrower has fully drawn down the SEFA facility of US\$300 million (full amount).

The above credit facilities were utilized for financing the Karebbe Project. As at December 31, 2013, the Borrower was in compliance with the covenants under this facility.

The SEFA was amended on November 2012 in accordance with the Bank Indonesia Regulation No. 13/20/PBI/2011 concerning Receipt of Export Proceeds and Withdrawal of Foreign Exchange from External Debt through Foreign Exchange Banks in which placement of funds conducted through the Indonesian banking system.

18. Post-employment benefit liabilities

The Company obtained the approval from the Minister of Finance ("MoF") of the Republic of Indonesia through its Decision Letter No. Kep-434/KM.17/1997 dated July 31, 1997, as published in the State Gazette No. 73/1997 dated September 12, 1997, to establish DPI, a separate trustee established to administer the pension fund, whereby certain employees hired prior to January 1, 2011 after serving for a certain period, are entitled to a defined benefit ("DB") pension fund upon retirement, disability or death.

On December 17, 2012 the Company received a letter from The Minister of Finance No.733/KM.10/2012 regarding the approval for the liquidation of DPI.

As a consequence of liquidating DPI, the pension plan funds of the Company's employees have been transferred and managed by a pension fund financial institution ("DPLK") that has been appointed by the Company. This will include the current pension funds previously managed by DPI and future pension funds paid based on a defined contribution ("DC") approach. All of the Company's employees who were previously participants of DPI DB plan will be included in the DC plan managed by the DPLK. The liquidation process is currently in progress.

18. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan)

18. Post-employment benefit liabilities (continued)

Liabilitas atas imbalan kerja 31 Desember 2013 dan 2012 dihitung oleh PT Towers Watson Purbajaga, aktuaris independen yang laporannya masing-masing tertanggal 12 Februari 2014 dan 29 Januari 2013. Liabilitas pada laporan posisi keuangan terdiri dari:

The employee benefit liabilities as at December 31, 2013 and 2012 were calculated by PT Towers Watson Purbajaga, an independent actuary with its reports dated February 12, 2014 and January 29, 2013. The liability in the statements of financial position consists of:

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Imbalan kesehatan pascakerja	8,415	15,555	Post-retirement medical benefits
Imbalan pensiun dan imbalan berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan	3,487	6,665	Pension and Labor Law benefits
Jumlah	11,902	22,220	Total
Bagian lancar	(345)	(345)	Current portion
Bagian jangka panjang	11,557	21,875	Non-current portion

Asumsi aktuarial pokok yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

31 Desember	2013	2012	December 31
Asumsi ekonomi:			Economic assumptions:
Tingkat diskonto	9.00%	6.00%	Discount rate
Pengembalian yang diharapkan dari aset program	5.00%	6.75%	Expected return on plan assets
Kenaikan gaji di masa depan	6.00%	4.50%	Future salary increases
Asumsi lainnya :			Other assumptions:
Tingkat mortalita	TMI III 2011	TMI III 2011	Rates of mortality
Tingkat cacat	10% dari tingkat mortalita/	10% dari tingkat mortalita/	Disability rate
	10% of mortality rate	10% of mortality rate	
Usia pensiun normal	55 tahun/years	55 tahun/years	Normal retirement age

Perseroan mengakui keuntungan/(kerugian) aktuarial secara keseluruhan melalui pendapatan komprehensif lainnya pada laporan keuangan tahunan.

The Company uses the OCI approach for the recognition of actuarial gains/(losses) in its annual financial statements.

Kewajiban imbalan pascakerja yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The post-employment benefits obligation recognized in the statements of financial position is determined as follows:

31 Desember	Imbalan pensiun/ Pension benefits		Imbalan kesehatan pascakerja/ Post-retirement medical benefits		Jumlah/ Total		December 31
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	
(Dalam ribuan Dolar AS)							(US Dollars, in thousands)
Nilai kini dari kewajiban	(3,387)	(6,532)	(8,830)	(16,459)	(12,217)	(22,991)	Present value of obligations
Nilai wajar dari aset program	-	-	290	726	290	726	Fair value of plan assets
Biaya jasa lalu yang belum diakui	(100)	(133)	125	178	25	45	Unrecognized past service cost
	(3,487)	(6,665)	(8,415)	(15,555)	(11,902)	(22,220)	

18. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan)

18. Post-employment benefit liabilities (continued)

Mutasi kewajiban imbalan pascakerja yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The movement of post-employment benefits obligation recognized in the statements of financial position is as follows:

31 Desember	Imbalan pensiun/ Pension benefits		Imbalan kesehatan pascakerja/ Post-retirement medical benefits		Jumlah/ Total		December 31
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	
(Dalam ribuan Dolar AS)							(US Dollars, in thousands)
Pada awal tahun	(6,665)	(1,720)	(15,555)	(10,006)	(22,220)	(11,726)	At the beginning of the year
Beban tahun berjalan	2,382	(5,467)	1,915	(692)	4,297	(6,159)	Expense for the year
luran pemberi kerja	-	-	(19)	21	(19)	21	Employer's contributions
Imbalan yang dibayarkan	335	381	19	-	354	381	Benefits paid
Keuntungan/(Kerugian) aktuarial yang belum diakui pada tanggal 1 Januari dan dibebankan pada laba komprehensif lain	-	365	-	(6,595)	-	(6,230)	Unrecognized actuarial gains/(losses) as at January 1 and charged to other comprehensive income
(Kerugian)/Keuntungan aktuarial di tahun berjalan yang dibebankan pada laba rugi komprehensif lain	461	(224)	5,225	1,717	5,686	1,493	Actuarial (losses)/gains for the year charged to other comprehensive income
	(3,487)	(6,665)	(8,415)	(15,555)	(11,902)	(22,220)	

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial dari tanggal 1 Januari 2012 dibebankan ke laba rugi komprehensif lainnya.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions incurred from January 1, 2012 are charged to other comprehensive income.

Biaya bersih yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

Net expenses recognized in the profit or loss is as follows:

31 Desember	Imbalan pensiun/ Pension benefits		Imbalan kesehatan pascakerja/ Post-retirement medical benefits		Jumlah/ Total		December 31
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	
(Dalam ribuan Dolar AS)							(US Dollars, in thousands)
Biaya jasa kini	(888)	4,630	(3,140)	400	(4,028)	5,030	Current service cost
Biaya bunga	266	3,335	888	319	1,154	3,654	Interest cost
Hasil aset program yang diharapkan	-	(2,987)	(27)	(1,566)	(27)	(4,553)	Expected return on plan assets
Biaya jasa lalu	(1,760)	287	81	1,539	(1,679)	1,826	Past service cost
Penyesuaian lainnya	-	-	283	-	283	-	Other adjustments
Biaya kurtailmen	-	202	-	-	-	202	Cost of curtailments
	(2,382)	5,467	(1,915)	692	(4,297)	6,159	

(Pemulihan)/Beban imbalan pascakerja pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar AS\$4,3 juta dan 2012: AS\$6,2 juta (nilai penuh) dialokasikan ke beban pokok pendapatan.

The post-employment benefits (recovery)/expenses for the years ended December 31, 2013 and 2012 amounting to US\$4.3 million and US\$6.2 million, respectively, (full amount) were allocated to cost of revenue.

Hasil aktual aset program pensiun imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2013 adalah nil (2012: AS\$1,8 juta) (nilai penuh).

The actual return on plan assets of the defined benefit pension plan as at December 31, 2013 was nil (2012: US\$1.8 million) (full amount).

Mutasi nilai kini kewajiban adalah sebagai berikut:

The movement in the present value of obligations is as follows:

31 Desember	Imbalan pensiun/ Pension benefits		Imbalan kesehatan pascakerja/ Post-retirement medical benefits		Jumlah/ Total		December 31
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	
(Dalam ribuan Dolar AS)							(US Dollars, in thousands)
Pada awal tahun	(6,532)	(54,623)	(16,459)	(19,500)	(22,991)	(74,123)	At beginning of the year
Biaya jasa kini	888	(4,630)	3,140	(400)	4,028	(5,030)	Current service cost
Biaya bunga	(266)	(3,335)	(888)	(319)	(1,154)	(3,654)	Interest cost
Imbalan yang dibayarkan	335	4,985	19	280	354	5,265	Benefits paid
Kurtailmen	-	58,459	-	-	-	58,459	Curtailments
(Kerugian)/Keuntungan aktuarial bersih yang diakui selama tahun berjalan	461	(7,388)	5,358	3,480	5,819	(3,908)	Net actuarial (losses)/gains recognized during the year
Perubahan program	1,727	-	-	-	1,727	-	Plan change
	(3,387)	(6,532)	(8,830)	(16,459)	(12,217)	(22,991)	

Catatan atas Laporan Keuangan
PT Vale Indonesia Tbk
31 Desember 2013 dan 2012

18. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan)

Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

31 Desember	Imbalan pensiun/ Pension benefits		Imbalan kesehatan pascakerja/ Post-retirement medical benefits		Jumlah/ Total		December 31
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)							
Pada awal tahun	-	48,775	726	1,181	726	49,956	At beginning of the year
Hasil aktual aset program	-	2,038	(1)	(196)	(1)	1,842	Actual return on plan assets
Iuran pemberi kerja	-	-	(19)	21	(19)	21	Employer's contributions
Imbalan yang dibayarkan	-	(4,604)	19	(280)	19	(4,884)	Benefits paid
Penyesuaian lainnya	-	-	(435)	-	(435)	-	Other adjustments
Kurtailmen	-	(46,209)	-	-	-	(46,209)	Curtailments
	-	-	290	726	290	726	

Hasil yang diharapkan dari aset program ditentukan atas dasar pengembalian yang diharapkan tersedia oleh aset yang berasal dari kebijakan investasi masa kini. Tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi atas bunga tetap didasarkan oleh pengembalian kotor di akhir periode pelaporan. Hasil yang diharapkan dari investasi ekuitas menggambarkan tingkat pengembalian oleh pasar yang bersangkutan.

Kontribusi yang diharapkan untuk program imbalan pascakerja untuk sisa periode yang berakhir pada 2014 adalah sebesar AS\$0,2 juta (nilai penuh).

Karena likuidasi DPI, tidak terdapat aset program untuk program manfaat pasti pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

Penyesuaian pengalaman dalam periode lima tahun adalah sebagai berikut:

31 Desember	2013	2012	2011	2010	2009	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)						
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	(12,217)	(22,991)	(74,123)	(66,370)	(44,457)	Present value of defined benefit obligation
Nilai wajar aset program	290	726	49,956	62,592	52,364	Fair value of plan assets
Status pendanaan	(11,927)	(22,265)	(24,167)	(3,778)	7,907	Funded status
Penyesuaian pengalaman pada aset program	26	2,711	5,568	(6,685)	(5,868)	Experience adjustments on plan assets
Penyesuaian pengalaman pada liabilitas program	5,715	3,908	8,932	19,088	(208)	Experience adjustments on plan liabilities

19. Modal saham

Pemegang saham Perseroan, jumlah kepemilikan saham dan nilai nominal IDR25 (nilai penuh) per saham pada 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2013	Jumlah saham/ Total shares	Ribuan AS\$/ US\$ in thousands	%	December 31, 2013
Vale Canada Limited	5,835,607,960	80,115	58.73	Vale Canada Limited
Publik	2,036,346,880	27,957	20.49	Public
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	1,996,281,680	27,406	20.09	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
Vale Japan Limited	54,083,720	743	0.55	Vale Japan Limited
Sumitomo Corporation	14,018,480	192	0.14	Sumitomo Corporation
Jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh	9,936,338,720	136,413	100	Total shares issued and fully paid

Notes to the Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk
December 31, 2013 and 2012

18. Post-employment benefit liabilities (continued)

The movement in the fair value of plan assets is as follows:

31 Desember	Imbalan kesehatan pascakerja/ Post-retirement medical benefits		Jumlah/ Total		December 31
	2013	2012	2013	2012	
(US Dollars, in thousands)					
Pada awal tahun	-	48,775	726	1,181	726
Hasil aktual aset program	-	2,038	(1)	(196)	(1)
Iuran pemberi kerja	-	-	(19)	21	(19)
Imbalan yang dibayarkan	-	(4,604)	19	(280)	19
Penyesuaian lainnya	-	-	(435)	-	(435)
Kurtailmen	-	(46,209)	-	-	(46,209)
	-	-	290	726	290

The expected return on plan assets is determined by considering the expected returns available on the assets' underlying current investment policy. Expected yields on fixed interest investments are based on gross redemption yields as at the end of the reporting period. Expected returns on equity investments reflect long-term real rates of return experienced in the respective markets.

Expected contributions to post employment benefit plans for the remainder of 2014 are US\$0.2 million (full amount).

Due to the liquidation of DPI, there are no plan assets for the defined benefit plan as at December 31, 2013 and 2012.

The five year history of experience adjustments is as follows:

31 Desember	2013	2012	2011	2010	2009	December 31
(US Dollars, in thousands)						
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	(12,217)	(22,991)	(74,123)	(66,370)	(44,457)	Present value of defined benefit obligation
Nilai wajar aset program	290	726	49,956	62,592	52,364	Fair value of plan assets
Status pendanaan	(11,927)	(22,265)	(24,167)	(3,778)	7,907	Funded status
Penyesuaian pengalaman pada aset program	26	2,711	5,568	(6,685)	(5,868)	Experience adjustments on plan assets
Penyesuaian pengalaman pada liabilitas program	5,715	3,908	8,932	19,088	(208)	Experience adjustments on plan liabilities

19. Share capital

The Company's shareholders, number of shares and the related par value IDR25 (full amount) per share as at December 31, 2013 and 2012 were as follows:

31 Desember 2013	Jumlah saham/ Total shares	Ribuan AS\$/ US\$ in thousands	%	December 31, 2013
Vale Canada Limited	5,835,607,960	80,115	58.73	Vale Canada Limited
Publik	2,036,346,880	27,957	20.49	Public
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	1,996,281,680	27,406	20.09	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
Vale Japan Limited	54,083,720	743	0.55	Vale Japan Limited
Sumitomo Corporation	14,018,480	192	0.14	Sumitomo Corporation
Jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh	9,936,338,720	136,413	100	Total shares issued and fully paid

Catatan atas Laporan Keuangan
PT Vale Indonesia Tbk
31 Desember 2013 dan 2012

19. Modal saham (lanjutan)

31 Desember 2012	Jumlah saham/ Total shares	Ribuan AS\$/ US\$ in thousands	%	December 31, 2012
Vale Canada Limited	5,835,607,960	80,115	58.73	Vale Canada Limited
Publik	2,036,332,880	27,957	20.49	Public
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	1,996,281,680	27,406	20.09	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
Vale Japan Limited	54,083,720	743	0.55	Vale Japan Limited
Sumitomo Corporation	14,018,480	192	0.14	Sumitomo Corporation
Michael J. O'Sullivan	14,000	-	-	Michael J. O'Sullivan
Jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh	9,936,338,720	136,413	100	Total shares issued and fully paid

Tidak ada pemegang saham publik yang memiliki lebih dari 5% dari jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

20. Deklarasi dividen

Dividen yang telah diumumkan selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	Tanggal dideklarasikan/ Date declared	Tanggal pembayaran/ Date paid	Dividen per lembar saham AS\$ (nilai penuh)/ Dividend per share US\$ (full amount)	Jumlah AS\$, dalam ribuan/ Amount US\$, in thousands	
Dividen interim 2013	12 Nopember/ November 12, 2013	18 Desember/ December 18, 2013	0.00252	25,040	Interim dividend for 2013
Dividen final 2012	23 April/ April 23, 2013	31 Mei/ May 31, 2013	0.00252	25,040	Final dividend for 2012
Dividen interim 2012	13 Nopember/ November 13, 2012	27 Desember/ December 27, 2012	0.00252	25,040	Interim dividend for 2012
Dividen akhir 2011	25 April/ April 25, 2012	1 Juni/ June 1, 2012	0.00860	85,452	Final dividend for 2011

21. Tambahan modal disetor

Perseroan mempunyai saldo Tambahan Modal Disetor senilai AS\$277,76 juta (2012: AS\$277,76 juta) (nilai penuh) merupakan sisa atas surplus yang terjadi akibat penerbitan saham di atas nilai nominal dan penurunan nilai nominal saham yang terjadi di tahun 1983. Di tahun 1983, Perseroan melakukan restrukturisasi modal (kuasi-reorganisasi) sehingga terjadi alokasi bersih sebesar AS\$205,9 juta (nilai penuh) ke Akumulasi Defisit pada saat itu.

22. Cadangan modal

a. Cadangan jaminan reklamasi

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)			
Saldo awal	7,583	12,641	Beginning balance
Ditransfer ke/(dari) cadangan pada tahun berjalan	28,039	(5,058)	Transferred to/(from) reserve during the year
Jumlah	35,622	7,583	Total

Notes to the Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk
December 31, 2013 and 2012

19. Share capital (continued)

31 Desember 2012	Jumlah saham/ Total shares	Ribuan AS\$/ US\$ in thousands	%	December 31, 2012
Vale Canada Limited	5,835,607,960	80,115	58.73	Vale Canada Limited
Publik	2,036,332,880	27,957	20.49	Public
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	1,996,281,680	27,406	20.09	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
Vale Japan Limited	54,083,720	743	0.55	Vale Japan Limited
Sumitomo Corporation	14,018,480	192	0.14	Sumitomo Corporation
Michael J. O'Sullivan	14,000	-	-	Michael J. O'Sullivan
Jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh	9,936,338,720	136,413	100	Total shares issued and fully paid

No public shareholder owned more than 5% of the total shares issued and fully paid.

20. Dividends declared

Dividends declared during the years ended December 31, 2013 and 2012 were as follows:

	Tanggal dideklarasikan/ Date declared	Tanggal pembayaran/ Date paid	Dividen per lembar saham AS\$ (nilai penuh)/ Dividend per share US\$ (full amount)	Jumlah AS\$, dalam ribuan/ Amount US\$, in thousands	
Dividen interim 2013	12 Nopember/ November 12, 2013	18 Desember/ December 18, 2013	0.00252	25,040	Interim dividend for 2013
Dividen final 2012	23 April/ April 23, 2013	31 Mei/ May 31, 2013	0.00252	25,040	Final dividend for 2012
Dividen interim 2012	13 Nopember/ November 13, 2012	27 Desember/ December 27, 2012	0.00252	25,040	Interim dividend for 2012
Dividen akhir 2011	25 April/ April 25, 2012	1 Juni/ June 1, 2012	0.00860	85,452	Final dividend for 2011

21. Additional paid-in capital

The Company has an Additional Paid-in Capital balance of US\$277.76 million (2012: US\$277.76 million) (full amount) representing the remaining surplus arising from the issuance of shares in excess of par value and a reduction in the par value of its shares in 1983. In 1983, the Company underwent a capital restructuring (quasi reorganization) that resulted in the allocation of a net amount of US\$205.9 million (full amount) to the Accumulated Deficit at the time.

22. Capital reserves

a. Reclamation guarantee reserve

31 Desember	2013	2012	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Saldo awal	7,583	12,641	Beginning balance
Ditransfer ke/(dari) cadangan pada tahun berjalan	28,039	(5,058)	Transferred to/(from) reserve during the year
Jumlah	35,622	7,583	Total

22. Cadangan modal (lanjutan)

a. Cadangan jaminan reklamasi (lanjutan)

Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 ("PP 78/2010") yang mengharuskan Perseroan menyediakan jaminan keuangan atau jaminan reklamasi. Peraturan tersebut mengharuskan setiap perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia untuk melakukan studi tahunan yang memperkirakan besarnya jumlah biaya reklamasi dan melaporkan rencana reklamasinya kepada Pemerintah. Rencana tersebut mencakup perkiraan biaya dari pekerjaan untuk pemulihan lahan tambang bila dikerjakan oleh kontraktor luar. Untuk setiap pekerjaan yang tidak dilaksanakan sendiri oleh perusahaan sesuai dengan rencana pada periode tersebut, Pemerintah dapat menuntut pembayaran untuk pekerjaan yang masih harus dikerjakan oleh para kontraktor. Jaminan tersebut dapat berupa rekening bersama, deposito berjangka, bank garansi atau, pada kondisi tertentu yang menyangkut perusahaan-perusahaan publik, dapat berupa cadangan akuntansi yang dicatat dalam buku Perseroan.

Sebelum dikeluarkannya PP 78/2010 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan No. 336.K/271/DDJP/1996 pada tanggal 1 Agustus 1996, Perseroan membentuk cadangan pada tahun 1998 dengan cara mengalokasikan dari saldo laba suatu jumlah yang dianggap cukup untuk menutup biaya langsung dan biaya tidak langsung yang direncanakan untuk reklamasi pada lima tahun mendatang.

Kegiatan reklamasi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 telah disetujui oleh Pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara No. 961/30/DJB/2012 tanggal 12 Maret 2013 untuk wilayah Sorowako dan Surat Keputusan No. 4166/37/DJB/2011 tanggal 8 Desember 2011 untuk wilayah Pomalaa. Selama tahun 2012, Perseroan memindahkan sejumlah AS\$5.058 ribu (nilai penuh) dari cadangan jaminan reklamasi ke saldo laba untuk merefleksikan pengurangan cadangan seperti yang diharuskan dalam surat di atas.

Pada tanggal 10 Oktober 2013, Perseroan menerima surat keputusan mengenai penetapan cadangan jaminan reklamasi untuk periode 2013 – 2017 untuk wilayah Sorowako dari Pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara No. 1718/30/DJB/2013. Perseroan juga menerima surat keputusan mengenai penetapan cadangan jaminan reklamasi untuk periode 2012 - 2016 untuk wilayah Pomalaa dari Pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara No. 786/37/DJB/2013 tanggal 8 Mei 2013. Berdasarkan surat tersebut, Perseroan telah memindahkan sejumlah AS\$28,0 juta (nilai penuh) dari saldo laba ke cadangan jaminan reklamasi untuk merefleksikan penambahan cadangan seperti yang diharuskan dalam surat di atas.

b. Cadangan umum

Sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007, Perseroan membentuk cadangan umum sebesar AS\$12,1 juta (2012: AS\$5,3 juta), berdasarkan jumlah modal ditempatkan dan disetor sebesar IDR248.408.468.000 (nilai penuh) atau setara dengan AS\$136,4 juta.

Pada tanggal 23 April 2013, pemegang saham menyetujui mengalokasikan sebagian dari laba bersih Perseroan pada tahun 2012 sebagai tambahan dana cadangan umum sebesar AS\$6.749.337 (nilai penuh).

22. Capital reserves (continued)

a. Reclamation guarantee reserve (continued)

A financial surety, or reclamation guarantee, is required under Government Regulation No. 78 ("GR 78") of 2010. The regulation requires that an annual study be undertaken by a mining company operating in Indonesia to estimate its reclamation costs and that a plan be submitted to the Government. The plan includes an estimate of the cost of performing the rehabilitation work by an outside contractor. For any work a company does not carry out in the period pursuant to the plan, the Government can require payment for the outstanding work to be carried out by the contractor. The surety can be in the form of a joint account, time deposit, bank guarantee or, in certain circumstances involving public companies, an accounting reserve recorded in the accounts of the Company.

Prior to the issuance of GR 78/2010 in accordance with the Decision Letter of the Director General of Mining No. 336.K/271/DDJP/1996 dated August 1, 1996, the Company established in 1998 a financial reserve, by transferring from retained earnings, an amount sufficient to cover its planned direct and indirect costs of reclamation for the next five years.

The reclamation activities were agreed upon with the Government for the year ended December 31, 2012, as set out in the Decision Letters of the Directorate General of Minerals and Coal No. 961/30/DJB/2012 dated March 12, 2012 for Sorowako area and the Decision Letter No. 4166/37/DJB/2011 dated December 8, 2011 for the Pomalaa area. During 2012, the Company transferred US\$5,058 thousand (full amount) from the reclamation guarantee reserve to retained earnings to reflect the reduction in the reserve as required in the above mentioned letters.

On October 10, 2013, the Company received a decision letter regarding the establishment of the reclamation guarantee reserve for the period 2013 – 2017 for the Sorowako area from the Government in accordance with its Decision Letters of the Directorate General of Minerals and Coal No. 1718/30/DJB/2013. The Company also received a decision letter regarding the establishment of the reclamation guarantee reserve for the period 2012 – 2016 for the Pomalaa area from the Government in its Decision Letters of the Directorate General of Minerals and Coal No. 786/37/DJB/2013 dated May 8, 2013. Based on the letters, the Company transferred US\$28.0 million (full amount) from retained earnings to the reclamation guarantee reserve to reflect the addition in the reserve as required in the above mentioned letters.

b. General reserve

In accordance with Indonesian Limited Company Law No. 40/2007, the Company set up a reserve amounting to US\$12.1 million (2012: US\$5.3 million), based upon the issued and paid up capital of IDR248,408,468,000 (full amount) or equivalent to US\$136.4 million.

On April 23, 2013, the shareholders approved the allocation of US\$6,749,337 (full amount) of the Company's net profit in 2012 as an additional general reserve.

23. Beban pokok pendapatan

Beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Bahan bakar minyak dan pelumas	290,665	305,350	Fuels and lubricants
Bahan pembantu	141,095	131,947	Supplies
Depresiasi, amortisasi, dan depleksi	110,748	102,286	Depreciation, amortization and depletion
Biaya karyawan	100,360	105,979	Employee costs
Kontrak dan jasa	88,608	90,240	Services and contracts
Pajak dan asuransi	27,191	24,920	Taxes and insurance
Royalti	7,093	5,663	Royalties
Lainnya	16,003	17,936	Others
	781,763	784,321	
Persediaan dalam proses			In process inventory
Persediaan awal	38,391	56,900	Beginning balance
Persediaan akhir	(40,699)	(38,391)	Ending balance
Beban pokok produksi	779,455	802,830	Cost of production
Barang jadi			Finished goods
Persediaan awal	13,282	11,074	Beginning balance
Persediaan akhir	(10,993)	(13,282)	Ending balance
Beban pokok pendapatan	781,744	800,622	Cost of revenue

Lihat Catatan 31d untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Refer to Note 31d for details of related party balances and transactions.

Rincian pemasok dengan transaksi pembelian yang melebihi 10% dari jumlah pembelian: Details of suppliers having transactions representing more than 10% of total purchases:

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Pihak ketiga			Third parties
Kuo Oil (S) Pte Ltd.	246,325	278,538	Kuo Oil (S) Pte Ltd.

24. Beban usaha

Rincian beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Beban jasa manajemen, lisensi dan royalti	8,760	-	Management service, license and royalty fees
Beban bantuan manajemen dan teknis	-	4,658	Management and technical assistance fees
Biaya Karyawan	1,706	1,346	Employee costs
Biaya jasa profesional	1,125	3,570	Professional fees
Lainnya	1,450	3,039	Others
Jumlah	13,041	12,613	Total

Lihat Catatan 31c untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Refer to Note 31c for details of related party balances and transactions.

Catatan atas Laporan Keuangan
PT Vale Indonesia Tbk
31 Desember 2013 dan 2012

Notes to the Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk
December 31, 2013 and 2012

25a. Pendapatan lainnya

Rincian pendapatan lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)			
Pendapatan keuangan	(455)	(564)	Finance income

25b. Beban lainnya

Rincian beban lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)			
Biaya pengembangan proyek	36,484	38,704	Project development costs
Rugi selisih kurs	22,505	6,353	Loss on currency translation adjustments
Lainnya	(1,818)	2,691	Others
Jumlah	57,171	47,748	Total

Lihat Catatan 31d untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

25a. Other income

The components of other income for the years ended December 31, 2013 and 2012 were as follows:

25b. Other expenses

The components of other expenses for the years ended December 31, 2013 and 2012 were as follows:

Refer to Note 31d for details of related party balances and transactions.

26. Provisi atas penghentian pengoperasian aset

Beban akresi diakui sebagai bagian dari beban keuangan dalam laporan laba rugi komprehensif. Pergerakan di saldo provisi atas penghentian pengoperasian aset adalah sebagai berikut:

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)			
Saldo awal	42,110	39,805	Beginning balance
Beban akresi	3,732	2,305	Accretion expense
Saldo akhir	45,842	42,110	Ending balance

27. Pengeluaran untuk lingkungan hidup lainnya

Pada tahun 1993, Perseroan memperoleh persetujuan Pemerintah atas Studi Evaluasi Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. Laporan-laporan tersebut memberikan informasi dan rencana-rencana pendahuluan kepada Pemerintah mengenai program-program pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan Perseroan saat ini. Selama tahun yang berakhir 31 Desember 2013, sejumlah inisiatif, yang merupakan sebagian dari komitmen Perseroan di dalam rencana-rencana tersebut, telah diselesaikan, sementara yang lainnya masih sedang berlangsung. Inisiatif-inisiatif yang kini sedang terus berlangsung termasuk penghijauan daerah purna tambang untuk menyeimbangkannya dengan tingkat pembukaan wilayah tambang yang baru.

Pengeluaran untuk lingkungan hidup yang dibebankan ke laporan laba rugi adalah sebesar AS\$6,0 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 (2012: AS\$7,08 juta) (nilai penuh). Pengeluaran barang modal yang berhubungan dengan proyek lingkungan hidup berjumlah AS\$9,3 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 (2012: AS\$1,85 juta) (nilai penuh). Di samping itu, Cadangan Jaminan Reklamasi telah dibentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku (lihat Catatan 22a).

26. Provision for asset retirement

Accretion expense is recognized as part of finance costs in the statement of comprehensive income. Movement in the provision for the asset retirement balance is as follows:

27. Other environmental expenditures

In 1993, the Company received approval from the Government for its Environmental Evaluation Study, Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan. These reports provided the Government with information and preliminary plans regarding the Company's current environmental programs. During the year ended December 31, 2013, a number of initiatives, representing part of the Company's commitments under these plans, were completed while others were still in progress. Ongoing initiatives include the revegetation of mined-out areas to match the stripping rates of new mining areas.

Environmental expenditures charged to the profit or loss were US\$6.0 million for the year ended December 31, 2013 (2012: US\$7.08 million) (full amount). Capital expenditures for environmental projects were US\$9.3 million for the year ended December 31, 2013 (2012: US\$1.85 million) (full amount). In addition, a Reclamation Guarantee Reserve has been set up in accordance with applicable Government requirements (refer to Note 22a).

Catatan atas Laporan Keuangan
PT Vale Indonesia Tbk
31 Desember 2013 dan 2012

Notes to the Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk
December 31, 2013 and 2012

28. Biaya karyawan

Jumlah biaya karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar AS\$104,3 juta (2012: AS\$112,5 juta) (nilai penuh).

29. Laba per saham dasar

Labanya per saham dasar dihitung dengan membagi jumlah laba yang diperuntukkan kepada pemegang saham dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode bersangkutan. Tidak ada laba per saham yang terdilusi.

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS, kecuali nilai laba per saham dasar) (US Dollars, in thousands, except basic earnings per share)			
Jumlah laba tahun berjalan yang tersedia bagi pemegang saham	38,652	67,494	Total profit for the year attributable to the shareholders
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa beredar (dalam ribuan)	9,936,339	9,936,339	Weighted average number of ordinary shares outstanding (in thousands)
Labanya per saham dasar (dalam AS\$)	0.004	0.007	Basic earnings per share (in US\$)

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 tidak ada efek yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba per saham terdilusi sama dengan laba per saham dasar.

30. Ikatan dan perjanjian-perjanjian penting yang signifikan

Perseroan memiliki beberapa perjanjian penting seperti disebutkan di bawah ini:

Pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Jenis perjanjian/ Agreement type	Periode perjanjian/ Agreement period
Kuo Oil (S) Pte. Ltd.	Pembelian Minyak Berkadar Sulfur Tinggi/ Purchase of High Sulphur Fuel Oil (HSFO)	1 Januari 2014 - 31 Maret 2014/ January 1, 2014 - March 31, 2014
PT Pertamina (Persero)	Pembelian Solar Berkecepatan Tinggi/ Purchase of High Speed Diesel (HSD)	1 Januari 2014 - 30 April 2014/ January 1, 2014 - April 30, 2014
PT Marunda Graha Mineral	Pembelian batu bara/ Purchase of coal	1 Januari 2013 - 31 Maret 2014/ January 1, 2013 - March 31, 2014
PT Trakindo Utama	Pembelian suku cadang/ Purchase of spare parts	31 Desember 2013 - 31 Mei 2014/ December 31, 2013 - May 31, 2014
Halcon Primo Logistics Pte. Ltd.	Jasa freight forwarding global/ Global freight forwarding	1 Nopember 2010 - 30 Nopember 2014/ November 1, 2010 - November 30, 2014

28. Employee costs

Total employee costs for the year ended December 31, 2013 amounted to US\$104.3 million (2012: US\$112.5 million) (full amount).

29. Basic earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing total profit attributable to the shareholders by the weighted average number of common shares outstanding during the period.

As at December 31, 2013 and 2012, there were no existing instruments which could result in the issue of further ordinary shares. Therefore, diluted earnings per share are equivalent to basic earnings per share.

30. Significant commitments and agreements

The Company has entered into various significant agreements as mentioned below:

Catatan atas Laporan Keuangan
PT Vale Indonesia Tbk
31 Desember 2013 dan 2012

Notes to the Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk
December 31, 2013 and 2012

30. Ikatan dan perjanjian-perjanjian penting yang signifikan (lanjutan)

30. Significant commitments and agreements (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Perseroan memiliki komitmen pembelian barang dan jasa yang terkait dengan biaya operasi dan biaya capital dengan pemasok pihak ketiga, yang harus dilunasi dalam periode sebagai berikut:

As at December 31, 2013 and 2012, the Company had purchase commitments for goods and services related to operating expenses and capital expenses with third party suppliers, which are payable within the periods as shown below:

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Tidak lebih dari 1 tahun	137,992	292,653	No later than 1 year
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	38,170	71,576	Later than 1 year and no later than 5 years
Lebih dari 5 tahun	405	1,314	Later than 5 years
Jumlah	176,567	365,543	Total

31. Informasi mengenai pihak-pihak berelasi

31. Related party information

Perseroan berada di bawah pengendalian Vale Canada Limited. Perusahaan pengendali utama Perseroan adalah Vale S.A. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The Company is controlled by Vale Canada Limited. The ultimate parent company is Vale S.A. Transactions with related parties are as follows:

a. Pendapatan

a. Revenue

Seluruh penjualan Perseroan dilakukan berdasarkan kontrak-kontrak penjualan "harus ambil" jangka panjang dalam mata uang Dolar AS, di mana harga ditentukan dengan formula yang didasarkan atas harga tunai nikel di Pasar Bursa Logam London ("the London Metal Exchange" atau "LME") dan harga realisasi rata-rata nikel Vale Canada Limited. Pasal 6 dari Kontrak Karya 1968 menyatakan bahwa Perseroan harus menjual hasil produksinya dengan harga dan syarat-syarat yang sesuai dengan keadaan pasar dunia. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa Pemerintah berhak untuk meninjau setiap perubahan atas perumusan harga. Semua penjualan merupakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

The Company's sales are made based on long-term, "must take", US Dollar-denominated sales contracts, with prices determined by a formula that is based on the London Metal Exchange ("LME") cash price for nickel and Vale Canada Limited's average net realized price for nickel. Article 6 of the 1968 Contract states that the Company is obliged to sell its product at prices and on terms compatible with world market conditions. The article also states that the Government has the right to review adjustments in the pricing formula. All amounts represent sales to related parties.

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 terdiri dari:

Revenue for the years ended December 31, 2013 and 2012 consist of:

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Penjualan kepada Vale Canada Limited	737,258	773,119	Sales to Vale Canada Limited
Penjualan kepada Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	184,380	194,208	Sales to Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
Jumlah	921,638	967,327	Total
(Persentase penjualan kepada pihak-pihak berelasi terhadap jumlah pendapatan)	100%	100%	(Related party sales as a percentage of total revenue)

b. Kompensasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi

b. Compensation of the Boards of Commissioners and Directors

Dewan Komisaris dan Direksi adalah personil manajemen kunci Perseroan.

The Boards of Commissioners and Directors are the key management personnel of the Company.

Kompensasi yang dibayar atau terutang kepada Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

The compensation paid or payable to the Board of Commissioners and Directors is shown below:

	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013/ For the year ended December 31, 2013			
	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners		Direksi/ Board of Directors	
(Dalam ribuan Dolar AS) / (US Dollars, in thousands)	% ¹⁾	Amount	% ¹⁾	Amount
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek/ Salaries and short-term employee benefits	0.32%	338	0.97%	1,015
Imbalan pascakerja/ Post-employment benefits	-	-	1.62%	1,686
Pembayaran berbasis saham/ Share-based payments	-	-	-	-
	0.32%	338	2.59%	2,701

¹⁾% terhadap jumlah biaya karyawan/% of total employee costs

Catatan atas Laporan Keuangan
PT Vale Indonesia Tbk
31 Desember 2013 dan 2012

Notes to the Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk
December 31, 2013 and 2012

31. Informasi mengenai pihak-pihak berelasi (lanjutan)

31. Related party information (continued)

b. Kompensasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

b. Compensation of the Boards of Commissioners and Directors (continued)

	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012/ For the year ended December 31, 2012			
	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners		Direksi/ Board of Directors	
(Dalam ribuan Dolar AS) / (US Dollars, in thousands)	% ¹⁾	Amount	% ¹⁾	Amount
Gaji dan imbalan pekerjaan jangka pendek/ Salaries and short-term employee benefits	0.23	257	1.24%	1,392
Imbalan pascakerja/ Post-employment benefits	-	-	2.08%	2,336
Pembayaran berbasis saham/ Share-based payments	-	-	0.16%	182
	0.23	257	3.48%	3,910

¹⁾% terhadap jumlah biaya karyawan/% of total employee costs

Perseroan juga memberi opsi kepada personil manajemen kunci untuk membeli "opsi setara saham" Perseroan dengan harga yang telah ditentukan terlebih dahulu. "Opsinya setara saham" mempunyai nilai yang sama dengan saham Perseroan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Pengekuksian opsi biasanya dilakukan dengan pembayaran kas. Opsi yang dieksekusi dicatat sebagai biaya karyawan. Opsi yang dieksekusi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012 adalah nil. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 biaya kompensasi setara saham adalah nihil.

The Company has also awarded key management personnel options to purchase "share option equivalents" of the Company at a predetermined exercise price. A "share option equivalent" has the same value as a common share of the Company traded on the Indonesia Stock Exchange. The exercise of such options is usually settled in cash. Options exercised are included in employee costs. Options exercised for the year ended December 31, 2013 and 2012 were nil. For the years ended December 31, 2013 and 2012, share equivalent compensation costs were nil.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, terdapat opsi yang belum dilaksanakan untuk membeli 127.000 setara saham, dengan harga yang ditentukan terlebih dahulu berkisar antara IDR1.804 sampai dengan IDR7.350 dalam nilai penuh. Pada tanggal 31 Desember 2013 and 2012, kewajiban Perseroan sehubungan dengan imbalan ini adalah nihil.

As at December 31, 2013 and 2012, there were outstanding options to purchase an aggregate of 127,000 share equivalents with predetermined prices ranging from IDR1,804 to IDR7,350 in full amount. As at December 31, 2013 and 2012, the Company's obligation relating to this benefit were nil.

c. Beban Jasa Manajemen, Lisensi dan Royalti

c. Management Service, License and Royalty fees

Di tahun 2013, Perseroan telah melakukan pembaharuan atas perjanjian bantuan manajemen dan teknis yang merupakan bantuan Vale Canada Limited untuk merealisasikan proyek-proyek Perseroan, mekanisme pembiayaannya, konstruksi dan operasi dari fasilitas Perseroan, dan pemasaran produk Perseroan. Pembaharuan perjanjian ini dilakukan untuk mencerminkan kondisi praktik bisnis yang umum digunakan saat ini untuk jasa-jasa yang sifatnya serupa. Perjanjian bantuan manajemen dan teknis dengan Vale Canada Limited diganti dengan perjanjian jasa manajemen dan perjanjian lisensi dan royalti yang secara substansi mengatur jenis dan ruang lingkup yang sama.

In 2013, the Company decided to amend the management and technical assistance agreements which previously represented Vale Canada Limited's assistance for realization of the Company's projects, its financing scheme, the construction and operation of the Company's facilities, and the marketing of the Company's products. The amendment is applied to reflect the prevailing business practice for these types of service arrangement. The management and technical assistance agreement with Vale Canada Limited was changed with the management service agreement and license and royalty agreement which substantively sets a similar type and scope of work.

Beban untuk jasa manajemen dan lisensi dan royalti digolongkan sebagai beban usaha (lihat Catatan 24) di dalam laporan laba rugi. Berdasarkan pembaharuan perjanjian, beban jasa manajemen dihitung dari biaya aktual ditambah biaya jasa 10%, sementara beban lisensi dan royalti dihitung dari 0,8% dari nilai pendapatan kotor. Formula perhitungan ini merupakan pembaharuan dari formula beban bantuan manajemen dan teknis berdasarkan perjanjian terdahulu yang dihitung dari nilai terendah antara 1,8% dari nilai pendapatan bersih atau 4% dari laba kena pajak, tetapi dengan syarat jumlah terutang per kuartal tidak kurang dari AS\$25.000 (nilai penuh).

Management service, license and royalty fees are classified as operating expenses (refer to Note 24) in the profit or loss. Based on the amendment, the management service fee is calculated at actual cost plus a service fee of 10%, while the license and royalty fee is calculated at 0.8% of gross proceeds. These formulas replace the previous management and technical assistance agreement in which the management and technical assistance fees are calculated as the lower of 1.8% of net revenue or 4% of net taxable income, provided that the amount payable for each quarter should not be less than US\$25,000 (full amount).

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Vale Canada Limited	8,760	4,658	Vale Canada Limited
(Sebagai persentase terhadap jumlah beban usaha)	67.17%	36.93%	(As a percentage of total operating expenses)

31. Informasi mengenai pihak berelasi (lanjutan)

31. Related party information (continued)

d. Beban lainnya

d. Other costs

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Vale Europe Limited	36	368	Vale Europe Limited
Vale Japan Limited	77	918	Vale Japan Limited
Jumlah	113	1,286	Total
(Sebagai persentase terhadap jumlah beban pokok pendapatan)	0.01%	0.16%	(As a percentage of total cost of revenue)

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)

Vale Technology Development (Canada) Limited	860	4,200	Vale Technology Development (Canada) Limited
(Sebagai persentase terhadap jumlah beban pengembangan proyek)	2.36%	10.85%	(As a percentage of total project development costs)

e. Aset

e. Assets

i) Piutang usaha

i) Trade receivables

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Vale Canada Limited	52,295	76,587	Vale Canada Limited
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	13,607	36,053	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
Jumlah	65,902	112,640	Total
(Sebagai persentase terhadap piutang usaha)	100%	100%	(As a percentage of trade receivables)

ii) Aset keuangan lancar lainnya

ii) Other current financial assets

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Pinjaman kepada personil manajemen kunci diatas IDR1 milyar*)	307	148	Loans to key management personnel above IDR1 billion*)
Pinjaman kepada personil manajemen kunci dibawah IDR1 milyar	81	-	Loans to key management personnel below IDR1 billion
Jumlah pinjaman kepada personil manajemen kunci Dikurangi: Bagian jangka panjang	388 (305)	148 (111)	Total loans to key management personnel Less: Non-current portion
Bagian jangka pendek	83	37	Current portion
(Sebagai persentase terhadap aset keuangan lancar lainnya)	1.06%	0.35%	(As a percentage of other current financial assets)

*) Personil manajemen kunci yang mempunyai saldo pinjaman lebih dari IDR1 milyar per 31 Desember 2013 hanyalah Febriany Eddy (2012: Bernardus Irmanto).

*) Key management personnel with a loan balance of more than IDR1 billion as at December 31, 2013 is only Febriany Eddy (2012: Bernardus Irmanto).

31. Informasi mengenai pihak berelasi (lanjutan)

31. Related party information (continued)

e. Aset (lanjutan)

e. Assets (continued)

iii) Piutang pihak berelasi non-usaha

iii) Non-trade receivables from related parties

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Pinjaman kepada personil manajemen kunci – jangka panjang	305	111	Loans to key management personnel – non-current
(Sebagai persentase terhadap piutang pihak berelasi non-usaha)	100%	100%	(As a percentage of non-trade receivables from related parties)
Jumlah aset yang terkait dengan pihak-pihak berelasi	66,290	112,788	Total assets associated with related parties
(Sebagai persentase terhadap jumlah aset)	2.91%	4.83%	(As a percentage of total assets)

f. Liabilitas

f. Liabilities

i) Utang usaha

i) Trade payables

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Vale Canada Limited	9,367	6,754	Vale Canada Limited
Vale Technology Development (Canada) Limited	1,800	3,836	Vale Technology Development (Canada) Limited
Vale Japan Limited	30	20	Vale Japan Limited
Vale Europe Limited	14	278	Vale Europe Limited
Jumlah	11,211	10,888	Total
(Sebagai persentase terhadap jumlah utang usaha)	14.85%	13.77%	(As a percentage of total trade payables)

ii) Akruai

ii) Accruals

Berkaitan dengan SEFA (lihat Catatan 17), Perseroan dan Vale S.A., entitas pengendali utama dari Perseroan, melakukan perjanjian jaminan dimana Vale S.A. setuju untuk menjamin AS\$300 juta fasilitas utang yang diterima Perseroan. Biaya jaminan sebesar 1,5% per tahun dari setiap jumlah pinjaman yang diambil oleh Perseroan dari SEFA akan terutang kepada Vale S.A. Selanjutnya, biaya sebesar 1,5% per tahun dari jumlah pinjaman yang belum dilunasi harus dibayar sepanjang umur pinjaman. Biaya tersebut akan terutang oleh Perseroan pada setiap tanggal pembayaran bunga (tanggal pembayaran bunga pertama adalah hari kerja terakhir pada Februari 2010, dan selanjutnya pada hari kerja terakhir pada Agustus dan Februari).

In connection with the SEFA (refer to Note 17), the Company and Vale S.A., the ultimate parent entity of the Company, entered into a loan guarantee agreement whereby Vale S.A. has agreed to guarantee a US\$300 million debt facility obtained by the Company. A guarantee fee of 1.5% per annum on each loan drawdown made by the Company under the SEFA is payable to Vale S.A. Subsequently, the fee of 1.5% per annum on the outstanding loan amount is to be paid over the life of the loan. The fee is payable by the Company on each interest payment date (the first interest payment date was the last business day in February 2010, and thereafter the last business day of each August and February).

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Biaya garansi yang masih harus dibayar	1,163	1,334	Accrued guarantee fee
(Sebagai persentase terhadap jumlah akrual)	3.88%	4.22%	(As a percentage of total accrual)

iii) Liabilitas atas pembayaran berbasis saham

iii) Share-based payment liabilities

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham Diantas IDR1 milyar*	-	-	Share-based payment liabilities Above IDR1 billion*
Dibawah IDR1 milyar	15	14	Below IDR1 billion
Jumlah	15	14	Total
(Sebagai persentase terhadap liabilitas atas pembayaran berbasis saham)	3.49%	100%	(As a percentage of share-based payment liabilities)
Jumlah liabilitas yang terkait dengan pihak-pihak berelasi	12,389	12,236	Total liabilities associated with related parties
(Sebagai persentase terhadap jumlah liabilitas)	2.19%	2.00%	(As a percentage of total liabilities)

* Pembayaran berbasis saham telah diberikan kepada beberapa karyawan kunci (lihat Catatan 31b). Tidak ada pihak yang mempunyai saldo pembayaran berbasis saham dengan nilai pasar lebih dari IDR1 milyar (nilai penuh) per 31 Desember 2013 dan 2012.

* Share based payments have been provided to certain key personnel (refer to Note 31b). There is no individual with a balance of share based payments with a market value of more than IDR1 billion (full amount) at December 31, 2013 and 2012.

31. Informasi mengenai pihak berelasi (lanjutan)

31. Related party information (continued)

g. Pihak-pihak berelasi

g. Related parties

Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of transactions and relationships with related parties are as follows:

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi/ Nature of relationship with the related parties	Transaksi/ Transaction
Vale S.A.	Entitas pengendali utama/ <i>Ultimate parent entity</i>	Penjamin dari pinjaman Perseroan dengan kompensasi biaya jaminan/ <i>Guarantor of loans of the Company in return for guarantee fee</i>
Vale Canada Limited	Perusahaan induk/ <i>Parent entity</i>	Penjualan barang jadi; Jasa profesional; Jasa manajemen, lisensi dan royalti/ <i>Sale of finished goods; Professional services; Management service, license and royalty fees</i>
Vale Europe Limited	Perusahaan Afiliasi/ <i>Affiliated Company</i>	Tagihan atas beban yang dibayarkan atas nama Perseroan/ <i>Expense reimbursement of the Company</i>
Vale Japan Limited	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Tagihan atas beban yang dibayarkan atas nama Perseroan/ <i>Expense reimbursement of the Company</i>
Vale Australia Pty Ltd	Perusahaan Afiliasi/ <i>Affiliated Company</i>	Tagihan atas beban yang dibayarkan atas nama Perseroan/ <i>Expense reimbursement of the Company</i>
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Penjualan barang jadi/ <i>Sale of finished goods</i>
Vale Technology Development (Canada) Limited	Perusahaan Afiliasi/ <i>Affiliated Company</i>	Jasa teknis/ <i>Technical services</i>
Dana Pensiun International Nickel Indonesia	Dana pensiun pemberi kerja sebelumnya untuk karyawan Perseroan/ <i>Former trustee administered pension fund for Company employees</i>	Pendanaan program pension pada tahun 2012/ <i>Funding of pension plan in 2012</i>
Manajemen kunci/ Key management	Personil manajemen kunci dari Perseroan/ <i>Key management personnel of the Company</i>	Kompensasi dan remunerasi; pinjaman rumah dan pinjaman pribadi; opsi setara saham/ <i>Compensation and remuneration; housing and personal loans; share option equivalents</i>

Kebijakan Perseroan terkait penetapan harga untuk transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The Company's pricing policies related to the transactions with related parties are as follows:

- Penjualan barang jadi: Berdasarkan kontrak-kontrak penjualan "harus ambil" jangka panjang dalam mata uang Dolar AS dengan penentuan harga jual berdasarkan harga tunai nikel di Pasar Bursa Logam London (*"the London Metal Exchange"*) dan harga realisasi rata-rata nikel Vale Canada Limited (lihat Catatan 31a).
- Beban jasa manajemen, lisensi dan royalti: Pembayaran jasa manajemen dihitung dari biaya aktual ditambah jasa 10%. Untuk lisensi dan royalti dihitung dari 0.8% dari penjualan kotor (lihat Catatan 31c).
- Pembayaran jasa teknis, dihitung dari biaya aktual ditambah 10% jasa, sedangkan tagihan atas beban yang dibayarkan atas nama Perseroan dibayarkan sesuai biaya aktualnya.
- Biaya jaminan terhadap pinjaman jangka panjang sebesar AS\$300 juta dihitung dari 1,5% dari setiap utang yang diambil oleh Perseroan berdasarkan perjanjian jaminan pinjaman antara Perseroan dan Vale S.A. (lihat Catatan 31f).
- Sale of finished goods: Based on long-term, "must take" US Dollar denominated sales contracts, with price determined based on the London Metal Exchange cash price for nickel and Vale Canada Limited's average net realized price for nickel (refer to Note 31a).
- Management service, license and royalty fees: The fee for management service fee is calculated at actual cost plus a service fee of 10%. The license and royalty fee is calculated at 0.8% of gross proceeds (refer to Note 31c).
- The fee for technical service is calculated at actual cost plus a service fee of 10%, while reimbursement of expenses and expenditures on the Company's behalf are charged at cost.
- Guarantee fee on US\$300 million long-term borrowings is 1.5% of each loan drawdown by the Company based on a loan guarantee agreement between the Company and Vale S.A. (refer to Note 31f).

32. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar AS

32. Monetary assets and liabilities denominated in currencies other than US Dollars

Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang Rupiah pada 31 Desember 2013 telah dikonversikan ke dalam mata uang Dolar AS dengan menggunakan kurs AS\$1 (nilai penuh) = IDR12.198.

As at December 31, 2013 monetary assets and liabilities denominated in Rupiah have been translated into US Dollars using an exchange rate of US\$1 (full amount) = IDR12,198.

Pada 26 Februari 2014 kurs bergerak dari AS\$1 (nilai penuh) = IDR12.198 menjadi AS\$1 (nilai penuh) = IDR11.681. Ada kemungkinan bahwa Rupiah akan makin berfluktuasi di masa yang akan datang, dan mungkin akan terdepresiasi atau terapresiasi secara signifikan.

As at February 26, 2014 the exchange rate has moved from US\$1 (full amount) = IDR12,198 to US\$1 (full amount) = IDR11,681. It is possible that the Indonesian Rupiah may become more volatile in the future, and may depreciate or appreciate significantly.

Tidak terdapat pergerakan aset moneter bersih dalam mata uang asing yang signifikan apabila aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal 26 Februari 2014.

There is no significant movement in net foreign currency monetary assets if assets and liabilities in foreign currency as at December 31, 2013 was translated using the exchange rate at February 26, 2014.

	31 Desember 2013		December 31 2013	
	Mata Uang Asing (Jutaan)/ Foreign Currencies (Millions)	Setara AS\$ (Ribuan)/ US\$ Equivalent (Thousands)		
Aset			Assets	
Kas dan setara kas	IDR 112,343	9,210	Cash and cash equivalents	
Aset keuangan lancar lainnya	IDR 84,080	6,893	Other current financial assets	
Pajak dibayar dimuka	IDR 691,884	56,721	Prepaid taxes	
Piutang pihak berelasi non-usaha	IDR 3,720	305	Non-trade receivables from related parties	
Aset keuangan tidak lancar lainnya	IDR 163,635	13,415	Other non-current financial assets	
Jumlah aset moneter dalam mata uang asing		86,544	Total monetary assets in foreign currencies	
Liabilitas			Liabilities	
Utang usaha			Trade payables	
Pihak ketiga	IDR (79,238)	(6,496)	Third parties	
	EUR (2)	(3,063)		
	AUD (1)	(1,035)		
	Others (4)	(2,034)		
Pihak-pihak berelasi	JPY (3)	(30)	Related parties	
Utang pajak	IDR (84,231)	(6,905)	Taxes payable	
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	IDR (203,095)	(16,650)	Short-term employee benefit liabilities	
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	IDR (15,164)	(1,242)	Other current financial liabilities	
Jumlah liabilitas moneter dalam mata uang asing		(37,455)	Total monetary liabilities in foreign currencies	
Aset moneter bersih dalam mata uang asing		49,089	Net monetary assets in foreign currencies	

Perseroan tidak melakukan lindung nilai atas risiko fluktuasi nilai tukar Rupiah karena seluruh penjualan dan sebagian besar biaya Perseroan dilakukan dalam mata uang Dolar AS, sehingga secara tidak langsung merupakan lindung nilai alami (lihat Catatan 35).

The Company does not hedge the risk of fluctuations in the exchange rate of Rupiah since all sales and most of the Company's expenses are carried out in US Dollars which indirectly represents a natural hedge (refer to Note 35).

33. Informasi segmen

33. Segment information

Perseroan beroperasi hanya dalam satu segmen usaha dan geografis, yaitu penambangan dan pengolahan nikel di Indonesia. Seluruh produk Perseroan dijual berdasarkan kontrak penjualan jangka panjang (lihat Catatan 31a).

The Company operates in only one business and geographical segment: nickel mining and processing in Indonesia. All of the Company's products are delivered under long-term sales contracts (refer to Note 31a).

34. Aset dan liabilitas keuangan

Informasi di bawah ini berkaitan dengan aset dan liabilitas keuangan berdasarkan kategori akun:

34. Financial assets and liabilities

The information given below relates to the Company's financial assets and liabilities by category:

31 Desember 2013	Jumlah/ Total	Pinjaman dan piutang/ Loans and receivables	Nilai wajar diakui pada laba-rugi/ Fair value through profit or loss	Aset keuangan lainnya/ Other financial assets	December 31, 2013
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)					
Aset keuangan:					
Kas dan setara kas	200,020	200,020	-	-	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	16,723	16,723	-	-	Restricted cash
Piutang usaha	65,902	65,902	-	-	Trade receivables
Aset keuangan lancar lainnya	7,804	7,804	-	-	Other current financial assets
Piutang pihak berelasi non-usaha	305	305	-	-	Non-trade receivables from related parties
Aset keuangan tidak lancar lainnya	13,415	13,415	-	-	Other non-current financial assets
Jumlah aset keuangan	304,169	304,169	-	-	Total financial assets

31 Desember 2012 December 31, 2012

(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)

31 Desember 2012	Jumlah/ Total	Pinjaman dan piutang/ Loans and receivables	Nilai wajar diakui pada laba-rugi/ Fair value through profit or loss	Aset keuangan lainnya/ Other financial assets	December 31, 2012
Aset keuangan:					
Kas dan setara kas	172,239	172,239	-	-	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	17,333	17,333	-	-	Restricted cash
Piutang usaha	112,640	112,640	-	-	Trade receivables
Aset keuangan lancar lainnya	10,548	10,548	-	-	Other current financial assets
Piutang pihak berelasi non-usaha	111	111	-	-	Non-trade receivables from related parties
Aset keuangan tidak lancar lainnya	16,623	16,623	-	-	Other non-current financial assets
Jumlah aset keuangan	329,494	329,494	-	-	Total financial assets

31 Desember 2013	Jumlah/ Total	Nilai wajar diakui pada laba-rugi/ Fair value through profit or loss	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortized cost	December 31, 2013
------------------	------------------	---	---	-------------------

(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)

Liabilitas keuangan:				
Utang usaha	(75,515)	-	(75,515)	Trade payables
Akrual	(29,972)	-	(29,972)	Accruals
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	(16,650)	-	(16,650)	Short-term employee benefit liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	(3,220)	-	(3,220)	Other current financial liabilities
Pinjaman bank	(219,115)	-	(219,115)	Bank borrowings
Jumlah liabilitas keuangan	(344,472)	-	(344,472)	Total financial liabilities

34. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

34. Financial assets and liabilities (continued)

31 Desember 2012	Jumlah/ Total	Nilai wajar diakui pada laba-rugi/ Fair value through profit or loss	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortized cost	December 31, 2012
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)				
Liabilitas keuangan:				
Utang usaha	(79,059)	-	(79,059)	Trade payables
Akrual	(31,614)	-	(31,614)	Accruals
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	(12,914)	-	(12,914)	Short-term employee benefit liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	(1,422)	-	(1,422)	Other current financial liabilities
Pinjaman bank	(255,634)	-	(255,634)	Bank borrowings
Jumlah liabilitas keuangan	(380,643)	-	(380,643)	Total financial liabilities

35. Pengelolaan risiko keuangan

Aktivitas Perseroan terpengaruh oleh berbagai jenis risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar, risiko harga dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Secara umum, program pengelolaan risiko keuangan Perseroan berfokus kepada ketidakpastian pasar keuangan dan berusaha meminimalkan efek tidak wajar terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Pengelolaan risiko dilakukan oleh Direksi Perseroan. Direksi mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatur risiko keuangan, sesuai keperluan. Direksi menyediakan prinsip-prinsip keseluruhan untuk pengelolaan risiko, termasuk risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas.

Manajemen risiko permodalan

Tujuan Perseroan dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perseroan guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal dan mengurangi untuk mengurangi biaya modal.

Konsisten dengan entitas lain dalam industri yang sama, Perseroan memonitor permodalan berdasarkan rasio *gearing*. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah utang neto dengan jumlah modal. Utang neto dihitung dari jumlah pinjaman dikurangi kas dan setara kas. Jumlah modal dihitung dari "ekuitas" seperti yang ada pada laporan posisi keuangan ditambah utang neto.

Strategi Perseroan selama tahun 2013 dan 2012 adalah mempertahankan rasio *gearing* berkisar di atas 15%. Rasio *gearing* pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)			
Pinjaman bank (Catatan 17)	219,115	255,634	Bank borrowings (Note 17)
Dikurangi:			Less:
Kas dan setara kas (Catatan 5)	(200,020)	(172,239)	Cash and cash equivalents (Note 5)
Utang neto	19,095	83,395	Net debt
Jumlah ekuitas	1,714,266	1,721,434	Total equity
Jumlah modal	1,733,361	1,804,829	Total capital
Rasio <i>gearing</i>	1%	5%	Gearing ratio

Perubahan atas rasio *gearing* selama 2013 terutama dikarenakan kenaikan kas dan setara kas dan pengurangan pada pinjaman yang mengakibatkan perubahan dalam utang neto.

35. Financial risk management

The Company's activities expose it to a variety of financial risks: market risk (including foreign exchange risk, price risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Company's overall financial risk management program focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimize potential adverse effects on the financial performance of the Company.

Risk management is carried out by the Company's Board of Directors. The Board identifies, evaluates and manages financial risks, where considered appropriate. The Board of Directors provides principles for overall risk management, including market risk, credit risk and liquidity risks.

Capital risk management

The Company's objective when maintaining capital is to safeguard the Company's ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

Consistent with others in the industry, the Company monitors capital on the basis of the gearing ratio. This ratio is calculated as net debt divided by total capital. Net debt is calculated as total borrowings as shown in the statements of financial position less cash and cash equivalents excluding restricted cash. Total capital is calculated as "equity" as shown in the statements of financial position plus net debt.

The Company's strategy, during 2013 and 2012, was to maintain the gearing ratio within up to 15%. The gearing ratios as at December 31, 2013 and 2012 were as follows:

35. Pengelolaan risiko keuangan (lanjutan)

Risiko pasar

(i) **Risiko nilai tukar**

Penjualan, pendanaan dan mayoritas pengeluaran operasional Perseroan dilakukan dalam mata uang Dolar AS, sehingga Perseroan tidak terekspos secara signifikan terhadap fluktuasi nilai tukar.

Pada 31 Desember 2013, jika mata uang Dolar AS melemah/menguat sebesar 3% dibandingkan dengan mata uang Rupiah dengan semua variabel lainnya tetap, maka laba sesudah pajak untuk tahun berjalan akan menjadi AS\$0,9 juta (2012: AS\$1,6 juta) (nilai penuh) lebih rendah/tinggi, terutama disebabkan oleh penjabaran aset dan liabilitas dalam mata uang Rupiah seperti dijelaskan pada Catatan 32.

(ii) **Risiko harga**

Perseroan terpengaruh oleh fluktuasi dalam harga nikel dan bahan bakar. Operasi dan kinerja keuangan dapat terpengaruh negatif dari harga nikel, dimana akan ditentukan lebih lanjut oleh permintaan dan penawaran nikel dunia, harga minyak dan faktor lainnya seperti curah hujan yang cukup untuk menjamin keberlanjutan operasi PLTA. Perseroan mengelola secara aktif risiko-risiko ini dengan melakukan penyesuaian seperlunya atas jadwal dan operasi pertambangan untuk mengurangi dampak fluktuasi.

Pada tanggal 31 Desember 2013, harga rata-rata nikel meningkat/menurun sebesar 10%, dengan semua variabel lain tetap, pendapatan Perseroan meningkat/menurun sebesar AS\$92,2 juta (2012: AS\$96,7 juta) (nilai penuh).

Pada 31 Desember 2013 dan 2012, tidak terdapat instrumen keuangan yang nilainya terkait langsung dengan pergerakan harga nikel dunia. Sehingga, fluktuasi harga nikel dunia tidak akan berdampak terhadap nilai buku dari instrumen keuangan Perseroan.

(iii) **Risiko suku bunga**

Paparan suku bunga dimonitor untuk meminimalkan akibat negatifnya terhadap Perseroan. Pinjaman yang diterima pada suku bunga variabel membuat arus kas Perseroan terpengaruh oleh risiko suku bunga.

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Perseroan yang terpengaruh oleh suku bunga.

31 Desember/December 31, 2013

	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate		Suku bunga tetap/ Fixed interest rate		Tidak terikat bunga/ Non interest bearing	Jumlah/ Total	
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Lebih dari satu tahun/ More than one year	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Lebih dari satu tahun/ More than one year			
(Dalam ribuan Dolar AS)							(US Dollars, in thousands)
Aset						Assets	
Kas dan setara kas	84,272	-	115,740	-	8	200,020	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	-	16,723	16,723	Restricted cash
Piutang usaha	-	-	-	-	65,902	65,902	Trade receivables
Aset keuangan lancar lainnya	-	-	-	-	7,804	7,804	Other current financial assets
Piutang pihak berelasi non-usaha	-	-	-	-	305	305	Non-trade receivables from related parties
Aset keuangan tidak lancar lainnya	-	-	-	-	13,415	13,415	Other non-current financial assets
Jumlah aset keuangan	84,272	-	115,740	-	104,157	304,169	Total financial assets

35. Financial risk management (continued)

Market risk

(i) **Foreign exchange risk**

The Company's sales, financing and the majority of its operating expenditures are denominated in US Dollars, and as such the Company does not have a significant exposure to fluctuations in foreign exchange rates.

As at December 31, 2013, if the US Dollar had weakened/strengthened by 3% against the Rupiah with all other variables held constant, post-tax profit for the year would have been US\$0.9 million (2012: US\$1.6 million) (full amount) lower/higher, mainly as a result of foreign exchange gains/losses on translation of the Rupiah denominated monetary assets and liabilities as detailed in Note 32.

(ii) **Price risk**

The Company is exposed to fluctuations in nickel and fuel prices. The operations and financial performance may be adversely affected by the price of nickel, which in turn will be determined by worldwide nickel supply and demand, oil price and other factors such as sufficient rainfall to maintain hydroelectric operations. The Company actively manages these risks by adjusting production schedules and mining operations as necessary to reduce the impact of volatility.

As at December 31, 2013, if the average price of nickel had increased/decreased by 10%, with all variables held constant, the Company's revenue would have increased/decreased by US\$92.2 million (2012: US\$96.7 million) (full amount).

At December 31, 2013 and 2012, there was no financial instrument whose value was directly linked to movement of the world nickel price. Therefore, fluctuation of world nickel price will have no impact on the carrying amount of the Company's financial instruments.

(iii) **Interest rate risk**

Interest rate exposure is monitored to minimize any negative impact to the Company. Borrowings issued at variable rates expose the Company to cash flow interest rate risk.

The following table presents a breakdown of the Company's financial assets and liabilities which are impacted by interest rates.

35. Pengelolaan risiko keuangan (lanjutan)

Risiko pasar (lanjutan)

(iii) **Risiko suku bunga** (lanjutan)

35. Financial risk management (continued)

Market risk (continued)

(iii) **Interest rate risk** (continued)

31 Desember/December 31, 2013

	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate		Suku bunga tetap/ Fixed interest rate		Tidak terikat bunga/ Non interest bearing	Jumlah/ Total	
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Lebih dari satu tahun/ More than one year	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Lebih dari satu tahun/ More than one year			
(Dalam ribuan Dolar AS)							(US Dollars, in thousands)
Liabilitas						Liabilities	
Utang usaha	-	-	-	-	(75,515)	(75,515)	Trade payables
Akrual	-	-	-	-	(29,972)	(29,972)	Accruals
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	-	-	-	-	(16,650)	(16,650)	Short-term employee benefit liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	-	-	-	-	(3,220)	(3,220)	Other current financial liabilities
Pinjaman bank	(35,863)	(183,252)	-	-	-	(219,115)	Bank borrowings
Jumlah liabilitas keuangan	(35,863)	(183,252)	-	-	(125,357)	(344,472)	Total financial liabilities

Pada tanggal 31 Desember 2013 jika suku bunga lebih tinggi/rendah 0,25% dengan semua variabel lain tetap, maka laba tahun berjalan akan menjadi lebih tinggi/rendah AS\$677 ribu (2012: AS\$785 ribu) (nilai penuh) yang timbul sebagai akibat beban bunga yang lebih tinggi/rendah atas pinjaman jangka panjang.

Risiko kredit

Risiko kredit cukup rendah karena produk nikel dalam matte Perseroan, yang merupakan produk setengah jadi, dijual di pasar ekspor menggunakan kontrak "harus ambil" jangka panjang dalam mata uang Dolar AS dengan Vale Canada Limited (induk Perseroan) dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. yang merupakan salah satu pemegang saham mayoritas Perseroan. Risiko kredit juga muncul dari kas dan setara kas, terutama kas di bank dan deposito berjangka. Untuk bank, Perseroan hanya menyimpan dana di bank lokal maupun internasional yang bereputasi bagus untuk memperkecil risiko kredit (lihat Catatan 5a).

Tidak terdapat piutang yang melebihi batasan kredit selama tahun pelaporan ini dan manajemen percaya tidak terdapat kerugian dari buruknya kinerja pelanggan.

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia) atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur:

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			
Piutang dagang:			Trade receivables:
Dengan pihak yang memiliki peringkat kredit eksternal:			Counterparties with external credit rating:
Fitch			Fitch
BBB+	52,295	76,587	BBB+
Japan Credit Rating Agency			Japan Credit Rating Agency
AA- (Sebelumnya A+)	13,607	36,053	AA- (Previously A+)
Berperingkat	65,902	112,640	Rated

35. Pengelolaan risiko keuangan (lanjutan)

35. Financial risk management (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Bank dan deposito berjangka (Moody's):			Cash in bank and time deposits (Moody's):
P-1	197,608	119,507	P-1
P-2	-	22,426	P-2
P-3	2,404	29,871	P-3
Berperingkat	200,012	171,804	Rated
Tidak berperingkat	-	409	Not rated

Risiko likuiditas

Liquidity risk

Risiko likuiditas muncul dalam situasi dimana Perseroan mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Pengelolaan risiko likuiditas dengan kehati-hatian mengimplikasikan pemeliharaan kecukupan kas dan setara kas. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan melakukan pengawasan berkala atas arus kas yang direncanakan dan arus kas aktual dan memasang profil jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan.

Liquidity risk arises in situations where the Company has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Company manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

Tabel dibawah ini menganalisa liabilitas keuangan yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang disajikan adalah arus kas kontraktual dan tidak didiskontokan.

The table below analyses the Company's financial liabilities into relevant maturity grouping based on the remaining period to the contractual maturity date. The amount disclosed in the table is the contractual undiscounted cash flow.

31 Desember 2013	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	Antara 3 bulan dan 1 tahun/ Between 3 months and 1 year	Antara 1 dan 2 tahun/ Between 1 and 2 years	Antara 2 dan 5 tahun/ Between 2 and 5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years	December 31, 2013
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)				
Utang usaha	(75,515)	-	-	-	-	Trade payables
Akrual	(29,972)	-	-	-	-	Accruals
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	(12,337)	(4,313)	-	-	-	Short-term employee benefit liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	(3,220)	-	-	-	-	Other current financial liabilities
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	(430)	-	-	-	-	Share-based payment liabilities
Pinjaman bank	(18,750)	(18,750)	(37,500)	(112,500)	(37,500)	Bank borrowings
31 Desember 2012	December 31, 2012					
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)				
Utang usaha	(79,059)	-	-	-	-	Trade payables
Akrual	(31,614)	-	-	-	-	Accruals
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	(9,056)	(3,858)	-	-	-	Short-term employee benefit liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	(1,422)	-	-	-	-	Other current financial liabilities
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	(14)	-	-	-	-	Share-based payment liabilities
Pinjaman bank	(18,750)	(18,750)	(37,500)	(112,500)	(75,000)	Bank borrowings

Estimasi nilai wajar

Fair value estimation

Nilai wajar adalah nilai dimana aset dapat dipertukarkan atau liabilitas dibayarkan antara pihak-pihak mengetahui dan ikut serta dalam transaksi pada tingkat yang wajar.

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged or liability settled between knowledgeable and willing parties in an arms's length transaction.

Manajemen berpendapat bahwa nilai buku dari aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai wajar pada 31 Desember 2013.

Management is of the opinion that the carrying value of its financial assets and liabilities approximates the fair value of the financial assets and liabilities as at December 31, 2013.

36. Aset dan liabilitas kontinjensi

36. Contingent assets and liabilities

a. Perihal lingkungan hidup

a. Environmental matters

Kehutanan

Forestry

Pada tanggal 4 Februari 2008, Peraturan Pemerintah No. 2/2008 ("PP No. 2/2008") mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dikeluarkan. Penerimaan negara bukan pajak tersebut dihitung berdasarkan suatu formula tertentu atas tarif-tetap tergantung pada maksud, rencana, penggunaan dan jenis kawasan hutan yang digunakan dikalikan dengan luasnya kawasan hutan yang digunakan. Tarif tersebut berkisar antara IDR1,2 sampai IDR3 juta per hektar per tahun. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 43/Menhut-II/2008 tanggal 10 Juli 2008, (yang digantikan dengan Peraturan No. P. 18/Menhut-II/2011 tanggal 4 April 2011, diubah dengan Peraturan No. P. 38/Menhut-II/2012 tanggal 2 Oktober 2012 dan terakhir diubah dengan Peraturan No. P. 14/Menhut-II/2013 tanggal 25 Februari 2013), mewajibkan 13 pemegang ijin atau perjanjian pertambangan perusahaan tambang (termasuk Perseroan) untuk mengajukan ijin pinjam pakai. Oleh karena itu, Perseroan telah mengajukan permohonan ijin pinjam pakai bagi kawasan hutan di dalam wilayah Kontrak Karya Perseroan, tetapi dengan penegasan bahwa hak-hak Perseroan sebagaimana tertuang dalam Kontrak Karya Perseroan tidak diabaikan. Kontrak Karya telah memberikan Perseroan semua lisensi dan ijin yang diperlukan untuk membangun dan menjalankan perusahaannya serta kewenangan yang diperlukan untuk melakukan aktivitas pertambangan di dalam area yang tercakup dalam Kontrak Karya.

On February 4, 2008 Government Regulation No. 2/2008 ("GR No. 2/2008") regarding the type and tariff of non-tax state revenue from the use of forestry land for non-forestry development was issued. The non-tax state revenue is calculated based on a specific formula of fixed tariff depending on the purpose of the proposed use and type of forest area being used, multiplied by the size of forest area being used. The tariffs range from IDR1.2 to IDR3 million per hectare per annum. Regulation of the Minister of Forestry No. P.43/Menhut-II/2008 dated July 10, 2008, (which was replaced by Regulation No. P.18/Menhut-II/2011 dated April 4, 2011, amended by Regulation No. P.38/Menhut-II/2012 dated October 2, 2012 and lastly amended by Regulation No. P.14/Menhut-II/2013 dated February 25, 2013), requires 13 holders of permits or contract mining companies (including the Company) to apply for a lend-use permit. Therefore, the Company has applied for a lend-use permit for forest areas within its CoW area, but with strong reservation that its rights as provided in the CoW are not abrogated. The CoW provides the Company with all licenses and permits to construct and operate the enterprise as well as all authorizations needed to conduct mining activities in the areas covered by the CoW.

Perseroan belum menerima ijin pinjam-pakai kawasan hutan di wilayah Kontrak Karya Perseroan. Perseroan telah menerima ijin pinjam-pakai hanya untuk kawasan hutan untuk Proyek Karebbe di luar wilayah Kontrak Karya melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.299/Menhut-II/2007 (yang diperpanjang dengan Surat Keputusan SK.436/Menhut-II/2013). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.02/2009 tanggal 8 Mei 2009 penerimaan negara bukan pajak terhutang berdasarkan area hutan yang tercantum dalam ijin pinjam-pakai. Oleh karena itu per tanggal 31 Desember 2012, Perseroan telah melakukan pembayaran pendapatan negara bukan pajak untuk kawasan hutan yang terganggu di wilayah proyek Karebbe sebesar IDR277 juta (setara dengan AS\$29 ribu) (nilai penuh) untuk periode bulan Agustus 2012 – Agustus 2013. Per Tanggal 31 Desember 2013, Perseroan telah melakukan pembayaran pendapatan negara bukan pajak untuk kawasan hutan yang terganggu di wilayah proyek Karebbe sebesar IDR278 juta (setara dengan AS\$27 ribu) untuk periode bulan Juni 2013 – Juni 2014. Belum terdapat akrual atas pembayaran untuk pendapatan negara bukan pajak sebagaimana diatur dalam PP No. 2/2008 untuk area dalam wilayah Kontrak Karya dikarenakan ijin pinjam pakai untuk area tersebut belum dikeluarkan. Hal ini konsisten dengan perlakuan yang diterapkan pada kebanyakan perusahaan tambang yang ada di Indonesia.

The Company has not yet received a lend-use permit for the forest areas within the Company's CoW area. The Company has received a lend-use permit only for the forestry areas for the Karebbe Project that are outside of the CoW area under Decision Letter of the Minister of Forestry No. SK.299/Menhut-II/2007 (which further extended under Decision Letter SK.436/Menhut-II/2013). Based on Regulation of the Minister of Finance No. 91/PMK.02/2009 dated May 8, 2009 the non-tax state revenue is payable for forest areas covered by a valid lend-use permit. Therefore as at December 31, 2012, the Company made the payment of non-tax state revenue for the affected area in the Karebbe Project in the amount of IDR 277 million (equivalent to US\$29 thousand) (full amount) for the August 2012 – August 2013 period. As at December 31, 2013, the Company made the payment of non-tax state revenue for the affected area in the Karebbe Project in the amount of IDR 278 million (equivalent to US\$27 thousand) for the June 2013 – June 2014 period. No accrual has been made for the non-tax state revenue regulated by GR No. 2/2008 for areas within the CoW area, as lend-use permits have not been issued. This is consistent with the treatment being adopted by most mining companies in Indonesia.

Berdasarkan hasil analisa, Perseroan berkeyakinan bahwa pendapatan negara bukan pajak tahunan untuk area hutan yang ijin pinjam pakainya belum diterbitkan adalah sekitar AS\$2 juta per tahun (nilai penuh).

Based on the result of the analysis, the Company believes the annual non-tax state revenue payable for forest areas for which lend-use permits have not yet been issued would be approximately US\$2 million per annum (full amount).

Pada tanggal 1 Februari 2010, Peraturan Pemerintah No. 24/2010 ("PP No. 24/2010") terkait dengan penggunaan area kehutanan diterbitkan, yang telah diubah melalui PP No. 61/2012. Peraturan tersebut mengatur penggunaan area kehutanan (baik untuk tujuan komersial maupun non komersial) harus dilakukan berdasarkan ijin pinjam pakai. Untuk penggunaan kawasan dimana luas kawasan hutan adalah 30% atau kurang, pemegang ijin pinjam pakai diharuskan untuk menyediakan kompensasi lahan dengan rasio 1:1 untuk tujuan non komersial dan 1:2 untuk tujuan komersial. Untuk penggunaan kawasan dimana luas kawasan hutannya adalah lebih dari 30%, pemegang ijin pinjam pakai diharuskan membayar pendapatan negara bukan pajak dan melakukan rehabilitasi untuk area yang terganggu dengan rasio 1:1 untuk tujuan non komersial dan sedikitnya 1:1 untuk tujuan komersial. Pemegang ijin pinjam pakai dapat melakukan aktivitas pembukaan lahan namun, selain itu, harus membayar kompensasi dalam bentuk iuran tetap, provisi sumber daya hutan dan /atau dana reboisasi.

On February 1, 2010, Government Regulation No. 24/2010 ("GR No. 24/2010") regarding the use of forestry areas was issued, as amended by GR No. 61/2012. The regulation requires that any use of forestry areas (whether it is for commercial or non-commercial usage) must be based on a lend-use permit. For the use of an area where 30% or less is covered by forest, the holder of a lend-use permit is required to provide land compensation in a ratio of 1:1 for non commercial use and 1:2 for commercial use. For the use of an area with more than 30% covered by forest, the holder of a lend-use permit is required to pay non-tax state revenue and perform rehabilitation of the affected area in a ratio of 1:1 for non-commercial use and at least 1:1 for commercial use. The holder of a lend-use permit may perform deforestation activities but, in addition, must pay compensation in the form of a fixed fee, a charge for forest resources and/or reforestation funds.

Catatan atas Laporan Keuangan
PT Vale Indonesia Tbk
31 Desember 2013 dan 2012

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

a. Perihal lingkungan hidup (lanjutan)

Kehutanan (lanjutan)

Oleh karena Perseroan telah menerima ijin pinjam pakai hanya untuk kawasan hutan di wilayah Proyek Karebbe (yang sebagian areanya berada diluar wilayah Kontrak Karya), Perseroan telah membayar sebesar AS\$62 ribu dalam bentuk dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan ("PSDH") untuk wilayah hutan yang terganggu sebesar IDR157 juta (setara dengan AS\$16,8 ribu) (nilai penuh) pada tanggal 28 Juni 2006 ketika Perseroan pertama kali memperoleh ijin pinjam pakai per tanggal laporan keuangan ini, belum terdapat akrual dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan untuk wilayah hutan yang terganggu dalam wilayah Kontrak Karya Perseroan karena ijin pinjam pakai belum dikeluarkan untuk wilayah ini.

Peraturan pelaksanaan PP No. 24/2010 dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 4 April 2011, yaitu Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2011 ("PerMen P.18/2011") (yang mencabut P.43/Menhut-II/2008 tanggal 10 Juli 2008), yang mengatur mengenai penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Pada dasarnya PerMen P.18/2011 mengatur tentang prosedur ijin pinjam pakai secara umum dan jangka waktu mendapatkan ijin pinjam pakai, termasuk untuk 13 perusahaan-perusahaan tambang yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden No. 41 Tahun 2004. Suatu ijin pinjam pakai dapat diberikan untuk tahap eksplorasi atau tahap eksploitasi (produksi). Apabila untuk tahap eksplorasi (kecuali untuk contoh ruah), persyaratan-persyaratannya lebih lunak, dimana Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ("AMDAL") dan gambar satelit tidak diwajibkan. Durasinya juga lebih pendek, yakni dua tahun, namun dapat diperpanjang. Untuk tahap eksploitasi (produksi), durasinya adalah lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan durasi pemegang ijin untuk beroperasi (misalnya Kontrak Karya).

Pada 2 Oktober 2012, PerMen P.18/2011 diubah dengan Peraturan No. P.38/Menhut-II/2012 ("PerMen P.38/2012"). PerMen P.38/2012 menambahkan beberapa kewajiban kepada pemegang ijin pinjam pakai, termasuk untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar area pinjam pakai.

Pada 25 Februari 2013, PerMen P.18/2011 kembali diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2013 ("PerMen P.14/2013"). Berdasarkan PerMen P.14/2013, masa berlaku ijin pinjam pakai untuk kegiatan operasi produksi adalah sama dengan jangka waktu perizinan operasionalnya.

Salah satu dokumen penting yang disyaratkan oleh pihak Kementerian untuk mengeluarkan ijin pinjam pakai adalah surat rekomendasi dari Gubernur dari lokasi area Kontrak Karya. Perseroan sudah memperoleh surat rekomendasi dari Gubernur Sulawesi Tengah (pada Februari 2013) dan Gubernur Sulawesi Selatan (pada Januari 2013), dan juga dari Gubernur Sulawesi Tenggara (pada Mei 2013).

Diluar dari hal diatas, pemegang ijin pinjam pakai diharuskan untuk melakukan reboisasi atas area aliran sungai (*watershed*). Kewajiban ini diatur melalui Ketentuan Menteri Kehutanan No. P.63/Menhut-II/2011 mengenai petunjuk reboisasi untuk pemegang ijin pinjam pakai dalam kerangka rehabilitasi dari daerah aliran sungai ("PerMen P.63/2011"), yang diterbitkan tanggal 5 September 2011 untuk menerapkan GR No. 24/2010. PerMen P.63/2011 menentukan lokasi dan prosedur untuk reboisasi. Luas wilayah reboisasi ditentukan berdasarkan ijin pinjam pakai tersebut digunakan untuk keperluan komersial atau non komersial. Untuk keperluan non komersial, luas wilayah minimum adalah dengan rasio minimum 1:1. Untuk keperluan komersial, luas yang diwajibkan adalah dengan rasio minimum 1:1 ditambah dengan area yang terkena dampak dari kategori L3 (area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat permanen yang secara teknis tidak dapat dilakukan reklamasi).

Melihat kondisi di atas, Perseroan berkeyakinan bahwa kewajiban keuangan belum jatuh tempo karena ijin pinjam pakai untuk area hutan dalam wilayah Kontrak Karya belum diterbitkan.

Notes to the Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk
December 31, 2013 and 2012

36. Contingent assets and liabilities (continued)

a. Environmental matters (continued)

Forestry (continued)

As the Company has received a lend-use permit only for the forestry areas for the Karebbe Project (half of the area being located outside the CoW area), the Company paid US\$62 thousand in reforestation funds and a charge for forest resources for the affected forest area in the amount of IDR157 million (equivalent to US\$16.8 thousand) (full amount) on June 28, 2006 when the Company first obtained the lend-use permit. As at the date of these financial statements, no accrual has been made for the reforestation funds and a charge for forest resources for the affected forest area within the Company's CoW area as lend-use permits have not yet been issued for these areas.

An implementing regulation for GR No. 24/2010 was issued by the Minister of Forestry on April 4, 2011, i.e. Regulation of the Minister of Forestry No. P.18/Menhut-II/2011 ("Reg P.18/2011") (which revoked P.43/Menhut-II/2008 dated July 10, 2008), regulating the use of forest areas for non-forestry development purposes and timeline of obtaining the lend-use permit. Reg P.18/2011 basically regulates the general lend-use permit procedure, including for the holders of 13 mining licenses stipulated under Presidential Decree No. 41 of 2004. A lend-use permit can be given for the exploration phase or the exploitation (production) phase. If for the exploration phase (except for bulk sampling), the requirements are more lenient, an Environmental Impact Assessment ("AMDAL") and satellite imaging are not required. The duration is also shorter, namely two years, but is extendable. For the exploitation (production) phase, the duration is five years and can be extended in accordance with the duration of the holder's permit to operate (e.g. a CoW).

On October 2, 2012, Reg P.18/2011 was amended by Regulation No. P.38/Menhut-II/2012 ("Reg P.38/2012"). Reg P.38/2012 adds more obligations to lend-use permit holders, including conducting empowerment of the community surrounding the lend-use permit area.

On February 25, 2013, Reg P.18/2011 was further amended by Minister of Forestry Regulation No. P.14/Menhut-II/2013 ("Reg P.14/2013"). Based on Reg P.14/2013, the validity of the lend-use permit for production is in accordance with the terms of the operational license.

One of the critical documents required by the Ministry to issue a lend-use permit is a recommendation letter from the Governor of the province where the CoW area is located. The Company obtained a recommendation letter from the Governor of Central Sulawesi (in February 2013) and the Governor of South Sulawesi (in January 2013) and also a letter from the Governor of South East Sulawesi (in May 2013).

Apart from the above, the holder of a lend-use permit is required to conduct forestation of river flow areas (*watershed*). This requirement is governed under the Minister of Forestry Regulation No. P.63/Menhut-II/2011 regarding forestation guidelines for the holders of lend-use permits in the framework of the rehabilitation of watershed ("Reg P.63/2011"), which was issued on September 5, 2011 to implement GR No. 24/2010. Reg P.63/2011 determines locations and forestation procedures. The size of the area of forestation depends on whether the permit held is for commercial or non-commercial purposes. For non-commercial purposes, the size is in a minimum ratio of 1:1. For non-commercial use, the size is in a minimum ratio of 1:1 plus the planned affected area of L3 category (disturbed area due to permanent usage of the forestry area which technically is not possible for reclamation).

Given the above conditions, the Company believes that the financial obligations have not yet come due as the lend-use permits for the forestry within the CoW area have not yet been issued.

Catatan atas Laporan Keuangan
PT Vale Indonesia Tbk
31 Desember 2013 dan 2012

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

a. Perihal lingkungan hidup (lanjutan)

Kehutanan (lanjutan)

Pada 14 Mei 2012, Kementerian Kehutanan menerbitkan Keputusan No. 2626/Menhut-V/PHL/2012 tentang Penetapan Lokasi Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai atas nama Perseroan. Surat Keputusan ini diterbitkan untuk menetapkan area rehabilitasi daerah aliran sungai atas ijin pinjam pakai Karebbe. Luas area rehabilitasi berdasarkan keputusan ini ditetapkan seluas 250 hektar (Ha). Perseroan akan mengeluarkan IDR15 juta/Ha untuk memenuhi kewajiban reboisasi ini (setara dengan perkiraan AS\$0.4 juta).

Peraturan Pemerintah No. 27/2012 tentang Ijin Lingkungan dikeluarkan pada bulan Februari 2012 sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan ketentuan baru ini, seluruh perusahaan diwajibkan untuk memperoleh Ijin Lingkungan sebagai syarat untuk memperoleh ijin usaha.

Perseroan telah memperoleh persetujuan AMDAL dari Pemerintah mencakup seluruh area yang saat ini diusahakannya di wilayah Sorowako. Oleh karena persetujuan AMDAL tersebut diperoleh sebelum peraturan baru ini berlaku, AMDAL tersebut akan dengan sendirinya dianggap sebagai Ijin Lingkungan bagi Perseroan. Perseroan tidak perlu mengajukan permohonan akan hal tersebut. Pada September 2013, Perseroan memperoleh AMDAL dan Ijin Lingkungan untuk area Bahodopi. Perseroan telah mulai melakukan studi AMDAL untuk mencakup pengembangan operasional di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah ("Growth AMDAL"). Perseroan juga dalam proses melakukan studi AMDAL untuk wilayah Pomalaa. Target diperolehnya persetujuan untuk Growth AMDAL dan Pomalaa AMDAL adalah tahun 2014.

b. Reklamasi tambang dan penutupan tambang

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah mengumumkan peraturan pelaksanaan bagi UU Pertambangan Mineral dan Batubara No. 4/2009 ("UU Pertambangan 2009"), yaitu Peraturan Pemerintah No. 78/2010 ("PP No. 78") yang mengatur reklamasi dan kegiatan pasca penambangan baik untuk pemegang Ijin Usaha Pertambangan-Eksplorasi ("IUP")-Eksplorasi maupun Ijin usaha Pertambangan-Operasi Produksi ("IUP-Operasi Produksi"). Peraturan ini memperbaharui Peraturan Menteri No. 18/2008 yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("KESDM") pada tanggal 29 Mei 2008. Pemegang IUP-Eksplorasi diwajibkan antara lain untuk menyertakan rencana reklamasi dalam rencana kerja dan anggaran eksplorasi dan menyediakan jaminan reklamasi dalam bentuk deposito berjangka yang ditempatkan pada bank milik pemerintah.

Pemegang IUP-Operasi Produksi diwajibkan antara lain untuk mempersiapkan (1) rencana reklamasi lima tahun; (2) rencana pasca tambang; (3) jaminan reklamasi yang dapat dalam bentuk rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah, bank garansi atau cadangan akuntansi (jika memenuhi syarat); dan (4) garansi pasca tambang dalam bentuk deposito berjangka pada bank milik pemerintah. Kewajiban untuk menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang tidak membebaskan pemegang IUP dari kewajiban untuk melakukan reklamasi dan kegiatan pasca tambang. Provisi transisi dalam PP No. 78 menetapkan bahwa pemegang Kontrak Karya juga diwajibkan untuk mematuhi peraturan ini.

Penempatan (deposito) tersebut tidak disebutkan atau dipersyaratkan dalam Kontrak Karya. Berkaitan dengan hal ini, Perseroan telah atau akan mengambil tindakan-tindakan berikut:

- Untuk reklamasi tambang, Perseroan telah membentuk cadangan akuntansi sesuai dengan surat keputusan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (lihat Catatan 22a).

Notes to the Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk
December 31, 2013 and 2012

36. Contingent assets and liabilities (continued)

a. Environmental matters (continued)

Forestry (continued)

On May 14, 2012, the Ministry of Forestry issued Decree No. 2626/Menhut-V/PHL/2012 regarding stipulation on Forestation Location in the Framework of Watershed Rehabilitation under the name of the Company. This Decree is issued to determine the watershed forestation area with respect to the Karebbe lend-use permit. The size of the forestation area based on this decree is 250 hectares (Ha). The Company shall incur IDR15 million/Ha to fulfil this forestation obligation (equivalent to approximately US\$0.4 million).

Government Regulation No. 27/2012 on Environmental Licenses was issued in February 2012 as an implementation from Law No. 32/2009 on Environmental Management and Protection. Under the new regulation, all companies are required to obtain an Environmental License as a pre-requisite for their business license.

The Company already has an approved AMDAL from the Government covering its existing activities in the Sorowako area. As the approval pre-dates the new Government Regulation, this AMDAL is automatically deemed as the Company Environmental License. No formal action is required by the Company for this matter. In September 2013, the Company obtained an AMDAL approval and Environmental License for the Bahodopi area. The Company has started the AMDAL study which covers its operational expansions in South Sulawesi and Central Sulawesi ("Growth AMDAL"). The Company is also in the process of preparing an AMDAL study for the Pomalaa area. The target for obtaining approvals for both the Growth AMDAL and Pomalaa AMDAL is 2014.

b. Mine reclamation and mine closure

On December 20, 2010, the Government released an implementing regulation for Law No. 4/2009 on Mineral and Coal Mining ("2009 Mining Law"), i.e. Government Regulation No. 78/2010 ("GR 78") that deals with reclamation and post-mining activities for both "Ijin Usaha Pertambangan" ("IUP")-Exploration and "Ijin Usaha Pertambangan" ("IUP")-Production Operation holders. This regulation updates Ministerial Regulation No. 18/2008 issued by the Ministry of Energy and Mineral Resources ("MEMR") on May 29, 2008. An IUP-Exploration holder, among other requirements, must include a reclamation plan in its exploration work plan and budget and provide a reclamation guarantee in the form of a time deposit placed at a state-owned bank.

An IUP-Production Operation holder, among other requirements, must (1) prepare a five-year reclamation plan; (2) prepare a post-mining plan; (3) provide a reclamation guarantee which may be in the form of a joint account or time deposit placed at a state-owned bank, a bank guarantee or an accounting reserve (if eligible); and (4) provide a post-mine guarantee in the form of a time deposit at a state-owned bank. The requirement to provide reclamation and post-mine guarantees does not release the IUP holder from the requirement to perform reclamation and post-mine activities. The transitional provisions in GR 78 make it clear that CoW holders are also required to comply with this regulation.

No such placement (deposit) is contemplated or required under the CoW. In view of the foregoing, the Company has taken, or will take, the following actions:

- For mining reclamation, the Company has established an accounting reserve through decision letters from Directorate General of Minerals and Coal (refer to Note 22a).

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

b. Reklamasi tambang dan penutupan tambang (lanjutan)

▪ Untuk penutupan tambang, Perseroan telah beberapa kali berkorespondensi dengan KESDM untuk membahas revisi rencana penutupan tambang. Menyusul keputusan KESDM berdasarkan surat tanggal 13 Oktober 2009, Perseroan harus membentuk deposito berjangka untuk penyediaan penutupan tambang. Sesuai ketentuan tersebut, setelah beberapa korespondensi, pada awal Juli 2011 Perseroan mengajukan rencana revisi rencana pasca penutupan tambang yang meliputi jaminan pasca penutupan tambang yang diusulkan untuk persetujuan KESDM tersebut.

▪ Pada tanggal 10 Oktober 2013, Perusahaan menerima surat keputusan mengenai pembentukan cadangan jaminan reklamasi untuk area Sorowako periode 2013 hingga 2017 dan area Pomalaa periode 2013 hingga 2017. Berdasarkan surat-surat tersebut, Perusahaan telah memindahkan AS\$28 juta dari laba ditahan ke cadangan jaminan reklamasi.

Manajemen percaya bahwa tidak akan ada dampak material atas ketentuan rehabilitasi atau penutupan tambang yang disebabkan oleh revisi terhadap rencana. Selain itu, kewajiban mengadakan deposito berjangka tidak akan berdampak signifikan terhadap sumber kas atau posisi keuangan Perseroan.

c. Kesanggupan Kontrak Karya

Umum

Berdasarkan Kontrak Karya, Perseroan menyanggupi untuk membangun pabrik produksi di Pomalaa (Sulawesi Tenggara) dan Bahodopi (Sulawesi Tengah), bergantung pada kelayakan ekonomis dan teknis. Kontrak Karya menyebutkan bahwa pabrik pertama akan beroperasi sekitar tahun 2005 dan pabrik kedua sekitar tahun 2010 (namun Kontrak Karya tidak menyebutkan pabrik mana yang harus pertama dibangun). Sampai dengan tanggal dibuatnya laporan ini, Perseroan belum melakukan pembangunan pabrik produksi di Pomalaa ataupun di Bahodopi, karena hasil studi menunjukkan bahwa pembangunan pabrik tidak layak secara ekonomis.

Sesuai dengan Pasal 171 dari UU Pertambangan 2009, Perseroan menyampaikan Rencana Kerja Jangka Panjang ("RKJP") pada tahun 2010. RKJP tersebut menjelaskan rencana kegiatan Perseroan didalam wilayah Kontrak Karya sampai dengan periode 2045 (sampai lebih dari masa berakhirnya Kontrak Karya pada Desember 2025), termasuk penjelasan mengenai rencana kegiatan di wilayah Bahodopi. Kegiatan yang dijelaskan dalam RKJP Perseroan terkait dengan Bahodopi secara material berbeda dengan apa yang dimuat dalam Kontrak Karya.

Pada April 2011, Perseroan mempresentasikan rencana strategis 5 tahun yang berbeda dengan RKJP Perseroan and kesanggupan Kontrak Karya. Pada Mei 2011, KESDM menyampaikan tanggapan atas rencana strategis 5 tahun; yang pada intinya, KESDM meminta informasi tambahan dan menyampaikan catatannya atas beberapa aspek tertentu dari proyek.

36. Contingent assets and liabilities (continued)

b. Mine reclamation and mine closure (continued)

▪ For mine closure, the Company has corresponded with MEMR on several occasions for discussion of the revised mine closure plan. Following the decision of the MEMR, based on the letter dated October 13, 2009, the Company should establish a time deposit for the mine closure provision. In compliance thereof, after several correspondences, in early July 2011 the Company submitted a revised post mine closure plan which includes the proposed post mine closure guarantee for the MEMR's approval.

▪ On October 10, 2013 the Company received a decision letter regarding the establishment of a reclamation guarantee reserve for the Sorowako area for the period from 2013 to 2017 and also for the Pomala area for the period from 2012 to 2016. Based on those letters, the Company transferred US\$28 million from retained earnings to the reclamation guarantee reserve.

Management believes that there will be no material impact on rehabilitation or mine closure provisions as a result of revisions to the plan. Further, the requirement to establish a time deposit will not significantly impact the Company's cash resources or financial position.

c. Contract of Work undertaking

General

Based on the CoW, the Company undertakes to construct production plants in Pomalaa (Southeast Sulawesi) and Bahodopi (Central Sulawesi), subject to economical and technical feasibility. The CoW provides that the first plant would be in operation by about 2005 and the second plant by about 2010 (but the CoW does not specify which plant was to be constructed first). Until the date of this report, the Company has not constructed a production plant in Pomalaa or Bahodopi, as the results of the studies showed that the plant constructions are not economically feasible.

In accordance with Article 171 of the 2009 Mining Law, the Company submitted its Long-Term Plan (the "LTP") in 2010. The LTP sets out the Company's planned activity in the CoW Area covering the period up to 2045 (beyond the expiration of the CoW in December 2025), including a discussion of activity planned for the Bahodopi area. The activities set out in the Company's LTP relating to Bahodopi are materially different than those set forth in the CoW.

In April 2011, the Company presented its 5-year strategic plan to the MEMR, which is different from the Company's LTP submission and the CoW undertakings. In May 2011, the MEMR responded to the Company's 5-year strategic plan; essentially, the MEMR requested more information and expressed concern on certain aspects of projects.

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

c. Kesanggupan Kontrak Karya (lanjutan)

Umum (lanjutan)

Pada Juli 2012, Perseoran menyampaikan strategi pengembangan yang telah direvisi untuk pembangunan dan investasi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara ("Proposal Tumbuh Bersama 2012"). Pada Juni 2013, Perseroan menyampaikan proposal strategi pertumbuhan yang direvisi, yang menjelaskan strategi pertumbuhan dan investasi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara ("Proposal Tumbuh Bersama 2013"). Strategi pertumbuhan Perseroan sehubungan dengan Pomalaa dan Bahodopi, sebagaimana dijelaskan dalam Proposal Tumbuh Bersama 2013, mencakup pembangunan antara lain, potensi pembangunan proyek HPAL melalui *joint venture* di Pomalaa dan potensi pembangunan fasilitas pengolahan hilir dan fasilitas pengolahan utama di Bahodopi. Studi sehubungan dengan proyek HPAL saat ini sedang dilakukan, begitu pula dengan studi sehubungan dengan opsi Bahodopi untuk penambangan, pengolahan, pemurnian dan infrastruktur. Diskusi dengan Pemerintah sehubungan dengan strategi pertumbuhan Perseroan saat ini saat ini masih berlangsung. Apabila Proposal Tumbuh Bersama 2013 diterima oleh Pemerintah (dalam hal ini, KESDM), Perseroan berencana untuk menyampaikan revisi RKJP berdasarkan Pasal 171 UU Pertambangan (yang akan menggantikan kesanggupan dalam Kontrak Karya, RKJP 2010, rencana strategis 5 tahun yang dipresentasikan pada tahun 2011, dan Proposal Tumbuh Bersama 2012 dan 2013).

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya laporan ini, KESDM belum secara formal menyetujui maupun menolak rencana jangka panjang yang telah disampaikan oleh para pemegang kontrak karya berdasarkan Pasal 171 UU Pertambangan 2009 (termasuk RKJP Perseroan).

Wilayah Pomalaa

Pada 3 Februari 2003, Pemerintah mengindikasikan bahwa pelaksanaan kesanggupan Perseroan untuk membangun pabrik pengolahan di Pomalaa sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Perpanjangan dianggap telah terpenuhi sampai dengan yang lebih akhir antara tanggal 31 Desember 2008 atau pada saat berakhirnya Perjanjian Kerjasama Sumberdaya dengan PT Antam (Persero) Tbk., dimana setelahnya Perseroan diharuskan untuk melaporkan kepada Pemerintah evaluasi keekonomian dan kelayakan teknis pembangunan pabrik pengolahan tersebut. Dengan telah tidak dilanjutkannya Perjanjian Kerjasama Sumberdaya, Perseroan diwajibkan untuk menyiapkan laporan tersebut.

Berdasarkan surat bulan Februari 2003 tersebut, Perseroan mempunyai kesempatan selama 120 hari waktu tunggu terhitung sejak tanggal 31 Desember 2008 untuk melaporkan evaluasi keekonomian dan kelayakan pembangunan pabrik pengolahan di Pomalaa.

Pada bulan April 2009, Perseroan telah menyampaikan laporan studi kelayakan pembangunan pabrik di Pomalaa kepada KESDM yang menjelaskan bahwa pembangunan pabrik pengolahan di Pomalaa belum layak secara ekonomis untuk kondisi saat itu. Perseroan meminta waktu dua tahun untuk mengoptimalkan hasil studi kelayakan dimaksud. Akan tetapi, KESDM meminta Perseroan untuk melaporkan hasil studi kelayakan terbaru paling lambat pada akhir tahun 2009. Pemerintah daerah, di sisi lain, memberikan waktu kepada Perseroan untuk mengoptimalkan studi kelayakan hingga 1 Juli 2010.

Sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh pemerintah daerah, pada tanggal 1 Juli 2010, Perseroan mengirimkan revisi studi kelayakan terbaru ke KESDM menjelaskan bahwa pembangunan pabrik pengolahan di Pomalaa belum layak secara ekonomis untuk saat ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Belum cukupnya bukti dari tempat lain atas keberhasilan proyek sejenis dengan yang diusulkan;
- Potensi harga nikel jangka panjang yang mungkin kurang menguntungkan akibat potensi kelebihan pasokan;
- Ketidakpastian di sektor pertambangan sehubungan penerapan UU Pertambangan 2009 (lihat Catatan 36e dibawah ini).

Namun demikian, Perseroan masih berkomitmen untuk mengembangkan tambang dan membangun pabrik pengolahan di Pomalaa sepanjang didukung oleh kelayakan ekonomisnya.

36. Contingent assets and liabilities (continued)

c. Contract of Work undertaking (continued)

General (continued)

In July 2012, the Company submitted its revised growth strategy for development and investment in South Sulawesi, Central Sulawesi and Southeast Sulawesi (the "2012 Growing Together Proposal"). In June 2013, the Company submitted a revised growth strategy proposal which details the Company's growth strategy for development and investment in South Sulawesi, Central Sulawesi and Southeast Sulawesi (the "2013 Growing Together Proposal"). The Company's growth strategy with respect to Pomalaa and Bahodopi, as outlined in the 2013 Growing Together Proposal, provides for, among other items, the potential joint venture development of an HPAL project in Pomalaa and the potential construction of a downstream processing facility and primary processing facility in Bahodopi. Studies in relation to the HPAL project are ongoing as are studies in relation to the Bahodopi options of mining, processing, refinery and infrastructure. Discussions with the Government relating to the Company's current growth strategy are ongoing. If the 2013 Growing Together Proposal is accepted by the Government (in this regard, the MEMR), the Company plans to submit a revised LTP under Article 171 of the 2009 Mining Law (which would replace the CoW undertakings, the 2010 LTP submission, the 5-year strategic plan presented in 2011, and the 2012 and 2013 Growing Together Proposal).

Until the date of this report, the MEMR has not formally approved or rejected any long term plans that have been submitted by contract of work holders under Article 171 of the 2009 Mining Law (including the Company's LTP).

Pomalaa area

On February 3, 2003, the Government indicated that the Company's undertaking to construct a production plant in Pomalaa, as stipulated in the Extension Agreement, will be deemed satisfied until the later of December 31, 2008 or upon the termination of the Cooperative Resources Agreement ("CRA") with PT Antam (Persero) Tbk., following which the Company will be obliged to report to the Government on the economic and technical feasibility of constructing such a production plant. As the CRA has been discontinued, the Company was required to prepare such a report.

Based on the February 2003 letter, there is a 120 day waiting period from December 31, 2008 for the Company to submit a report evaluating the economic and technical feasibility of constructing a production plant in Pomalaa.

In April 2009, the Company submitted the feasibility report to the MEMR, explaining that the construction of a production plant in Pomalaa is not currently economically feasible. The Company requested a two-year waiting period for an optimization of feasibility study. The MEMR requested that the Company submit a new study by the end of 2009. The local governments, on the other hand, gave the Company a waiting period for the optimization of feasibility study until July 1, 2010.

In accordance with the timeline given by the local governments, on July 1, 2010, the Company submitted the revised study to the MEMR which concluded that the construction of a production plant in Pomalaa is not currently economically viable, emphasizing the following considerations:

- There is not enough evidence about the success of a similar project elsewhere;
- Potential for long-term unfavourable nickel price due to potential nickel over supply; and
- Uncertainty in the mining sector due to implementation of the 2009 Mining Law (refer to Note 36e below).

However, the Company is committed to developing the mine and to constructing a production plant in Pomalaa subject to economic feasibility of the project.

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

c. Kesanggupan Kontrak Karya (lanjutan)

Wilayah Pomalaa (lanjutan)

Perseroan menerima tiga surat resmi dari Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 2 dan 26 Nopember 2010 dan 15 Desember 2010 yang mengharuskan adanya tindakan segera untuk mendirikan fasilitas produksi di Pomalaa atau langkah-langkah hukum akan dilakukan dengan tujuan agar Perseroan melepaskan area Pomalaa. Beberapa pertemuan dengan aparat provinsi telah dilakukan, beberapa diantaranya pada tanggal 21 Desember 2010 dan 31 Januari 2011, dimana diskusi lebih lanjut telah dimulai untuk penyelesaian secara damai.

Perseroan telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Gubernur Sulawesi Tenggara yang meliputi konsep umum kerjasama potensial dalam mengembangkan area Pomalaa. Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tersebut, Perseroan sedang melakukan pembahasan lanjutan dengan Gubernur; untuk mengembangkan lebih lanjut kerjasama yang bersangkutan untuk dapat diimplementasikan dengan investor yang direkomendasikan dan difasilitasi oleh Gubernur.

Pada 14 Juni 2012, Perseroan, Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. menandatangani Nota Kesepahaman, dimana para pihak secara bersama-sama akan melaksanakan studi untuk mengetahui potensi pengembangan, konstruksi dan operasional fasilitas pabrik HPAL di Pomalaa (dalam area Kontrak Karya) untuk menghasilkan ~40ktpy nikel dan juga *cobalt*, dalam produk setengah jadi (seperti *Mixed Sulfide Precipitate*), serta pemasaran produk, termasuk kepada para pihak tersebut di atas.

Karena tidak terdapat aset yang berkaitan dengan Pomalaa yang tercatat di laporan keuangan 31 Desember 2013, kondisi ini tidak mempengaruhi secara material posisi keuangan Perseroan per 31 Desember 2013.

Wilayah Bahodopi

Perseroan merencanakan untuk menambang bijih nikel saprolitik di Bahodopi. Bijih dari Bahodopi akan digabungkan dengan bijih dari Sorowako untuk menjadi pengumpan/bahan baku bagi fasilitas pengolahan pyrometalurgi di Sorowako. Perseroan mengkaji berbagai opsi sehubungan dengan pembangunan fasilitas pengolahan di Bahodopi. Perseroan juga sedang mengevaluasi pembangunan jalan dari Bahodopi ke Sorowako.

Rencana tambang jangka menengahnya adalah sebagai berikut:

- Pembangunan jalan dari Bahodopi ke Sorowako yang juga terbuka untuk digunakan umum;
- Pembukaan tambang di wilayah Bahodopi; dan
- Pembangunan infrastruktur terkait.

Perseroan sedang mengajukan permohonan ijin kepada Pemerintah untuk memulai pembangunan jalan.

d. Tumpang tindih IUP

Berdasarkan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Perseroan, Perseroan menetapkan bahwa terdapat IUP pihak ketiga atau kegiatan pertambangan yang tumpang tindih didalam wilayah Kontrak Karya Perseroan di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Untuk mengatasi masalah perambahan di dalam wilayah Kontrak Karya Perseroan, Perseroan terus bekerja dengan instansi pemerintah terkait, termasuk dengan Kementerian ESDM, Kementerian Negara Lingkungan Hidup ("KLH") dan pemerintah daerah (misalnya, Gubernur dan Bupati). Perseroan ini siap untuk mengambil tindakan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada, mengajukan laporan polisi, mengajukan gugatan perdata dan pengajuan gugatan tata usaha negara.

Berkenaan dengan masalah tumpang tindih IUP dalam wilayah Kontrak Karya di Sulawesi Tengah, pada 26 Juli 2012, Perseroan menandatangani Nota Kesepahaman dengan Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali. Salah satu poin penting dari Nota Kesepahaman adalah bahwa Bupati bertanggung jawab atas penyelesaian masalah tumpang tindih IUP di Kabupaten Morowali. Namun demikian, sampai dengan saat ini, komitmen Bupati berdasarkan Nota Kesepahaman untuk menyelesaikan masalah perambahan ini belum dipenuhi.

36. Contingent assets and liabilities (continued)

c. Contract of Work undertaking (continued)

Pomalaa area (continued)

The Company received three official letters from the Governor of the Province of Southeast Sulawesi on November 2 and 26, 2010 and December 15, 2010 which required immediate action to construct a production plant in Pomalaa or legal action will be initiated towards a relinquishment by the Company of the Pomalaa area. There have been several meetings with Provincial Officials, among others, on December 21, 2010 and January 31, 2011, where further discussions were commenced for an amicable resolution.

The Company has signed a Memorandum of Understanding ("MoU") with the Governor of Southeast Sulawesi which covers the general concept of potential cooperation in developing the Pomalaa area. As a follow-up to the MoU, the Company is currently having continuing discussions with the Governor; to develop the concept for cooperation which can be used with an investor recommended and facilitated by the Governor.

On June 14, 2012, the Company, Vale Canada Limited and Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. signed a Memorandum of Understanding, in which the parties agreed to jointly undertake a study for the purposes of determining the viability of developing, constructing and operating a HPAL-based processing facility in Pomalaa (within the CoW) to produce ~40ktpy of nickel as well as cobalt, in an intermediate product (likely Mixed Sulfide Precipitate), as well as to market the product, including to the parties mentioned above.

As there are no assets related to Pomalaa recorded in the financial statements as at December 31, 2013, this situation does not materially impact the Company's financial position as at December 31, 2013.

Bahodopi area

In Bahodopi, the Company plans to mine a saprolitic nickel ore body. Ore from Bahodopi would be combined with ore from the Sorowako area to feed the existing pyrometallurgical processing facility in Sorowako. The Company is studying various options with respect to constructing a processing facility in Bahodopi. The Company is also evaluating the construction of a road from Bahodopi to Sorowako.

Medium-term plans are as follows:

- Construction of a road from Bahodopi to Sorowako open for public use;
- Open a mine in Bahodopi area; and
- Construction of related infrastructure.

The Company is seeking Government permits to begin the road construction.

d. Overlapping IUP

Based on the Company's field verifications, the Company determined that there are third party IUPs or mining activities that overlap the Company's CoW area in Central Sulawesi and Southeast Sulawesi. To address the issue of encroachment inside of the Company's CoW area, the Company continues to work with the relevant government institutions, including the MEMR, the State Ministry of Environment (the "SMOE") and local governments (e.g., Governors and Regents). The Company is prepared to take legal action including, but not limited to, filing a police report, filing a civil tort claim and filing an administrative court claim.

With regard to the issue of overlapping IUPs within the CoW areas in Central Sulawesi, on July 26, 2012, the Company signed a MoU with the Governor of Central Sulawesi and the Regent of Morowali. One of the key points of the MoU is that the Regent shall be responsible for settlement of the IUP overlapping issues in the Morowali Regency. To date, however, the local Regent's commitment under the MoU to settle the encroachment issue has not been fulfilled.

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

d. Tumpang tindih IUP (lanjutan)

Tidak terdapat perambahan pertambangan pihak ketiga di Pomalaa namun, mungkin terdapat beberapa masyarakat atau perambahan individu. Pada saat ini, perambahan tidak menimbulkan risiko material terhadap kemampuan Perseroan untuk melanjutkan dengan strategi pertumbuhan di Sulawesi Tenggara.

Pada 31 Desember 2013, Perseroan terus bekerja dengan pemerintah daerah di Sulawesi Tengah untuk mengatasi masalah perambahan ini. Selain itu, beberapa pihak berwenang telah memulai penyelidikan mengenai hal ini. Perseroan terus memantau perkembangan di lapangan dan mempersiapkan tindakan hukum yang tepat apabila dianggap perlu.

e. UU Pertambangan 2009

Pada tanggal 16 Desember 2008, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara ("Undang-undang"), yang telah disahkan oleh Presiden pada tanggal 12 Januari 2009 dan menjadi UU Pertambangan 2009. UU Pertambangan 2009 tersebut mengindikasikan bahwa walaupun Kontrak Karya yang ada sekarang, seperti yang dimiliki oleh Perseroan, akan tetap berlaku namun ketentuan peralihan dalam Undang-undang memuat substansi yang tidak jelas. Ada beberapa hal yang sedang dikaji oleh para pemegang Kontrak Karya, termasuk oleh Perseroan, antara lain:

- Ketentuan peralihan sehubungan dengan Kontrak Karya. UU Pertambangan 2009 menyatakan bahwa Kontrak Karya yang ada pada saat ini akan tetap berlaku hingga akhir masa berlakunya. Namun UU Pertambangan 2009 juga menyatakan bahwa Kontrak Karya harus disesuaikan dalam jangka waktu satu tahun dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (selain dari ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Penerimaan Negara – yang tidak dijelaskan, tetapi mungkin termasuk royalti dan pajak). Pada tanggal 16 Juni 2009, Perseroan bersama-sama dengan perusahaan tambang lainnya menghadiri rapat yang diadakan oleh KESDM dimana KESDM untuk pertama kalinya tentang rancangan usulan penyesuaian atas struktur Kontrak Karya yang berlaku saat ini pada seluruh pemegang Kontrak Karya. Perseroan telah mengirimkan tanggapan resminya ke Kementerian yang menjelaskan maksudnya untuk berdialog lebih lanjut mengenai rancangan usulan penyesuaian dimaksud. Diskusi renegotiasi Kontrak Karya terus berlangsung secara intensif mulai sejak September 2013 sampai dengan saat ini sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dibawah;
- Kewajiban para pemegang Kontrak Karya yang telah memulai aktivitasnya, dalam jangka waktu satu tahun sejak berlakunya UU Pertambangan 2009, untuk menyerahkan rencana aktivitas penambangannya di seluruh wilayah kontrak. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka wilayah kontrak karyanya akan disesuaikan, sesuai dengan UU Pertambangan 2009 (yang tidak dijelaskan lebih lanjut). Pemenuhan persyaratan oleh Perseroan telah didiskusikan diatas (lihat Catatan 36c).

Terdapat kemungkinan bahwa hal ini akan dibawa ke tingkat arbitrase jika Pemerintah memaksakan kehendaknya untuk merubah ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kontrak Karya tanpa persetujuan dari para pemegang kontrak terkait. Perseroan sedang menganalisa dampak dari Undang-undang baru ini, dan berkeyakinan bahwa dalam waktu dekat ini tidak akan ada dampak yang signifikan, karena para pelaku industri dan Pemerintah kini sedang berusaha untuk mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah ini.

Pada tanggal 4 Januari 2010, Perseroan menyerahkan rencana aktivitas penambangannya kepada KESDM dalam rangka memenuhi persyaratan tersebut diatas. Pada tanggal 1 Juli 2010, Perseroan menyerahkan revisi rencana aktivitas penambangan kepada KESDM.

Perseroan telah mempresentasikan rencana bisnis strategis 5-tahunan kepada KESDM di bulan April 2011, dan telah ditanggapi oleh KESDM pada bulan Mei 2011 yang mengklarifikasi beberapa hal tertentu. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, belum ada persetujuan resmi dari KESDM mengenai rencana bisnis strategis 5-tahunan Perseroan ini.

36. Contingent assets and liabilities (continued)

d. Overlapping IUP (continued)

There is no third party mining encroachment in Pomalaa, however, there may be some community or individual encroachment. At this time, the encroachment does not pose any material risk to the Company's ability to proceed with its growth strategy in Southeast Sulawesi.

As of December 31, 2013, the Company continues to work with the local governments in Central Sulawesi to have the encroachment issue resolved. Furthermore, some authorities have started investigations on this matter. The Company is monitoring the developments on the field and preparing for appropriate legal actions should they be deemed necessary.

e. The 2009 Mining Law

On December 16, 2008, the Indonesian Parliament passed a Law on Mineral and Coal Mining (the "Law"), which received the assent of the President on January 12, 2009, becoming the 2009 Mining Law. While the 2009 Mining Law indicates that existing CoWs, such as the Company's, will be honoured, the transitional provisions contain areas that are unclear. There are a number of issues that existing CoW holders, including the Company, are currently analyzing. Among others these are:

- The transitional provisions related to CoWs. The 2009 Mining Law notes that existing CoWs will be honoured until their expiration. However, it also states that existing CoWs must be adjusted within one year to conform with the provisions of the 2009 Mining Law (other than terms related to State Revenue – which is not defined, but presumably includes royalties and taxes). On June 16, 2009 the Company, together with other mining companies, attended a meeting held by the MEMR in which the Ministry for the first time announced the proposed adjustments to the current CoW structure applicable to all CoW holders. The Company has submitted a formal response to the Ministry explaining its intention to conduct further dialogue to discuss the best solution in response to the proposed changes. Discussions of CoW renegotiation continued intensively since September 2013 up to the present as further described below;
- The requirement for CoW holders that have already commenced some form of activity to, within one year of enactment of the 2009 Mining Law, submit a mining activity plan for the entire contract area. If this plan is not fulfilled, the contract area may be adjusted in accordance with the 2009 Mining Law (which is not further explained). The Company's fulfillment of the requirement is discussed above (refer to Note 36c).

It is possible that the arbitration provisions of the CoWs will be invoked if the Government attempts to force changes in CoW terms without the agreement of the CoW holders. The Company is analyzing the impact of this situation on its operations, and believes that there will be no significant impact in the near term, as the industry and Government work towards a consensus on these issues.

On January 4, 2010, the Company submitted a mining activity plan to the MEMR in order to satisfy the requirement noted above. On July 1, 2010, the Company submitted a revised mining activity plan.

The Company presented to the MEMR its 5 year business strategic plans in April 2011. The MEMR responded in May 2011 and asked for some items to be clarified. As at the date of these financial statements, there has been no official approval from the MEMR of the Company's 5 year business strategic plans.

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

e. UU Pertambangan 2009 (lanjutan)

Lebih lanjut, pada tanggal 1 Februari 2010, Presiden Republik Indonesia menandatangani dua Peraturan Pemerintah ("PP"), yaitu PP No. 22/2010 dan PP No. 23/2010, yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang – Undang Pertambangan baru ini (telah diubah melalui PP No. 24/2012). PP No. 22/2010 pada dasarnya mengatur tentang pembentukan area pertambangan di Indonesia. PP No. 23/2010 menjelaskan lebih rinci beragam tipe perijinan pertambangan yang dapat diperoleh dalam hubungannya dengan Undang-undang ini, dan menjelaskan syarat dan kondisi yang wajib dipenuhi oleh pihak yang mengajukan maupun pihak berwenang mengeluarkan ijin pertambangan. Pada tanggal 5 Juli 2010, PP No. 55/2010 dikeluarkan. PP ini mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Pada tanggal 20 Desember 2010, PP No. 78/2010 dikeluarkan. PP ini mengatur mengenai reklamasi dan pasca-tambang.

Pada tanggal 10 Januari 2012, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 3/2012 yang secara resmi membentuk tim evaluasi Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ("PKP2B") yang ada, untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang baru yang disahkan di Januari 2009. Undang-undang mengharuskan semua Kontrak Karya dan PKP2B yang ada agar diubah dan diharmonisasikan sesuai dengan Undang-undang per 12 Januari 2010 (yang batas waktunya telah berlalu). Tugas dari tim ini adalah dengan Desember 2013, meskipun diskusi masih terus berlangsung pada saat tanggal laporan ini.

Pada tahun 2012, rapat formal renegotiasi Kontrak Karya Perseoran dilakukan pada tanggal 11 September 2012. Pemerintah Pusat menekankan enam butir renegotiasi dalam rapat tersebut untuk didiskusikan lebih lanjut, sebagai berikut: (1) luas wilayah Kontrak Karya; (2) jangka waktu dan bentuk perpanjangan; (3) kewajiban keuangan (royalti dan pajak); (4) kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri; (5) kewajiban divestasi (51%); dan (6) kewajiban penggunaan barang dan jasa dalam negeri. Rapat renegotiasi telah dilanjutkan dengan beberapa rapat untuk mendiskusikan hal-hal teknis, mayoritas dari rapat lanjutan tersebut adalah untuk mendiskusikan mengenai kewajiban keuangan dan luas wilayah Kontrak Karya. Perseroan dan Pemerintah telah mencapai beberapa kemajuan dalam proses renegotiasi Kontrak Karya dan Perseroan berharap bahwa renegotiasi dapat selesai dalam waktu dekat. Sampai dengan proses renegotiasi selesai, Perseroan belum dapat menentukan sepenuhnya sejauh apa dampak renegotiasi terhadap Kontrak Karya.

Disisi lain Perseroan terus memonitor perkembangan dalam peraturan pelaksanaan dari UU Pertambangan 2009 ini dan mengkaji pengaruhnya terhadap operasional Perseroan.

f. Peraturan Menteri No. 17/2010

Pada tanggal 23 September 2010, Peraturan KESDM No. 17 tahun 2010 telah disahkan. Sebagaimana dijelaskan dalam peraturan ini, terdapat kewajiban dari seluruh pemegang Ijin Usaha Pertambangan ("IUP")/Ijin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK") untuk menggunakan harga patokan dalam penjualan mineral (atau batubara), baik penjualan kepada pasar domestik maupun ekspor, termasuk kepada afiliasi. Dalam peraturan peralihan, semua pemegang Kontrak Karya diwajibkan untuk mentaati peraturan ini dan persyaratan kontrak yang sudah ada sebelum diimplementasikannya peraturan ini harus disesuaikan agar memenuhi persyaratan peraturan ini (sebagai contoh, formula harga jual) dalam waktu 12 bulan.

Selain itu, sebagai kewajiban berkelanjutan dalam peraturan ini, penerapan harga dalam persyaratan kontrak harus disesuaikan setiap 12 bulan. Karena formula harga yang digunakan Perseroan telah sesuai dengan peraturan KESDM ini (LME dapat dikualifikasikan sebagai "pasar internasional"), Perseroan berpendapat bahwa tidak diperlukan penyesuaian terhadap kontrak penjualan jangka panjang Perseroan terhadap ketentuan ini. Meskipun demikian, peraturan ini tidak mengecualikan kontrak penjualan jangka panjang Perseroan dari lingkup kebertlakuan peraturan ini.

36. Contingent assets and liabilities (continued)

e. The 2009 Mining Law (continued)

Furthermore, on February 1, 2010, the President of the Republic of Indonesia signed two implementing regulations for the new Law, i.e. Government Regulation ("GR") No. 22/2010 and GR No. 23/2010 (as amended by GR No. 24/2012). GR No. 22/2010 deals with the establishment of mining areas in Indonesia. GR No. 23/2010 offers further details of different types of mining licenses which may be made available under this Law, and sets out the basic terms and conditions which need to be satisfied by license applicants and issuing authorities. On July 5, 2010, GR No. 55/2010 was issued. This GR regulates the guidance and supervision of mineral and coal mining business in Indonesia. On December 20, 2010, GR No. 78/2010 was issued. This GR regulates the reclamation and post-mining.

On January 10, 2012, the Indonesian Government issued Presidential Decree No. 3/2012 formally establishing a team tasked with evaluating existing mineral CoWs and Coal Contracts of Work ("CCoWs"), to bring them into line with the provisions of the new Law passed in January 2009. The Law requires all existing CoWs and CCoWs to be amended to harmonize them with the Law by January 12, 2010 (a deadline which has passed). The team's assignment is valid up to December 2013, although discussions still continue as at the date of this report. .

In 2012, the Company's first formal CoW renegotiation meeting was held on September 11, 2012. The Central Government emphasized six points of renegotiation during this meeting for further discussions, as follows: (1) size of the CoW area; (2) term and form of CoW extension; (3) financial obligations (royalty and taxes); (4) domestic processing and refining; (5) mandatory divestment (51%); and (6) priority use of domestic goods and services. The renegotiation meeting has been followed-up by a number of technical meetings, most of which were to discuss financial obligations and the size of CoW area issues. The Company and the Government have made some progress on the CoW renegotiation process and the Company expects that the renegotiation can be concluded soon. Until the renegotiation process is completed, the Company is unable to fully determine to what extent the CoW will be affected.

On the other hand, The Company is closely monitoring the progress of the implementing regulations for the 2009 Mining Law and is currently assessing the impact on its operations.

f. Ministerial Regulation No. 17/2010

On September 23, 2010, MEMR Regulation No. 17 of 2010 was issued. Pursuant to this regulation, there is an obligation on all "Ijin Usaha Pertambangan" ("IUP")/Ijin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK") holders to refer to prescribed benchmark prices for the sale of minerals (or coal), whether sales are being made to domestic users or are for export, including to affiliates. Under the transitional provision, all CoW holders are obligated to comply with the regulation and any term contracts existing prior to the implementation of this regulation must be adjusted to comply with the terms (i.e., the selling price formula) of this regulation within 12 months.

In addition, as an ongoing obligation under the regulation, pricing in term contracts must be adjusted every 12 months. As the Company's selling price formula is in line with the MEMR regulation (LME qualifies as an "international market"), the Company does not believe that any adjustment will be necessary to the Company's long-term sales agreements under either provision. Notwithstanding the foregoing, the regulation does not grandfather the Company's long-term sales contracts.

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

f. Peraturan Menteri No. 17/2010 (lanjutan)

Harga patokan akan ditentukan berdasarkan mekanisme pasar atau sejalan dengan harga yang berlaku pada pasar internasional. Harga patokan untuk mineral logam (misalnya nikel dalam *matte*) akan ditentukan oleh Direktur Jenderal setiap bulannya. Peraturan ini mengharuskan harga patokan digunakan sebagai referensi penjualan.

Harga patokan akan didasarkan pada basis "*free on board*". Formula untuk harga patokan akan diatur oleh peraturan Direktur Jenderal yang belum ditetapkan saat ini. Perlu dicatat bahwa yang mengalami perubahan setiap bulannya adalah harga patokan, dan bukan formulanya.

Penyesuaian harga yang diatur di dalam peraturan ini termasuk biaya angkutan dengan menggunakan tongkang, biaya surveyor, biaya perpindahan kapal, biaya pengolahan, biaya pemurnian, biaya logam terhitung dan/atau biaya asuransi. Referensi metal terhitung mengacu kepada harga yang akan dibayar oleh pembeli berdasarkan kandungan metal dalam produk; terdapat kesan adanya pengakuan harga pasar internasional untuk produk nikel setengah jadi (berupa persentase harga LME).

Penilaian awal Perseroan adalah bahwa peraturan ini mengakui atau memperbolehkan penyesuaian terhadap standar harga pasar internasional (misalnya sejumlah persentase tertentu dari harga LME). Saat ini, pada level minimum, peraturan ini akan menggunakan harga LME sebagai referensi dalam menghitung harga patokan. Peraturan Direktur Jenderal yang menetapkan mengenai rentang penyesuaian harga masih belum ditetapkan dan perlu dipastikan bahwa harga patokan aktual yang diatur oleh Direktorat Jenderal akan sejalan dengan formula harga yang digunakan Perseroan. Manajemen belum akan mengetahui lebih jauh mengenai hal ini hingga Peraturan Direktur Jenderal dikeluarkan.

g. Peraturan KESDM mengenai Peningkatan Nilai Tambah

Pada tanggal 6 Februari 2012, KESDM mengeluarkan Peraturan No. 07 tahun 2012 mengenai Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Pengolahan Mineral dan Proses Pemurnian ("PerMen No. 7/2012"). Peraturan ini dikeluarkan untuk penerapan Pasal 96 dan 111 dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP No.23/2010, telah diubah melalui PP No. 24/2012").

Berdasarkan PP No. 23/2010 dan PerMen No. 7/2012, logam mineral tertentu, termasuk nikel, dianggap sebagai komoditas pertambangan, nilai yang dapat ditambahkan melalui pengolahan dan/atau kegiatan pemurnian. Dengan demikian, nikel harus diproses dan/atau dimurnikan di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum yang ditetapkan dalam PerMen No. 7/2012.

Pemegang Kontrak Karya yang telah melakukan produksi sebelum Peraturan ini diterbitkan diwajibkan untuk :

- a. melakukan penyesuaian terhadap batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan batas yang ditentukan diatas dalam waktu 5 tahun setelah UU Pertambangan 2009 ini dikeluarkan;
- b. dan menyampaikan laporan berkala mengenai penyesuaian terhadap batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian kepada Direktur Jenderal Batubara dan Pertambangan untuk evaluasi.

Dalam hal pemegang Kontrak Karya tidak dapat membuat penyesuaian tersebut di atas atau tidak dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, mereka harus berkonsultasi dengan Direktur Jenderal.

36. Contingent assets and liabilities (continued)

f. Ministerial Regulation No. 17/2010 (continued)

Benchmark prices will be determined pursuant to market mechanisms or in accordance with prices generally applicable in the international market. Benchmark price for metal minerals (e.g. nickel in *matte*) will be established by the Director General on a monthly basis. The regulation requires that the benchmark prices be used as a reference for sales.

The benchmark price will be on a "free on board" basis. The formula for the benchmark prices will be regulated by a Director General regulation, which is yet to be issued. Note that it is the benchmark price that will change monthly, not the formula.

The "cost adjustments" set out in the regulation include barging cost, surveyor cost, transshipment cost, treatment cost, refinery cost, metal payable and/or insurance cost. The reference to "metal payable" refers to the price which the customer will pay on the contained metal of the product; it arguably recognizes the international market price practice for nickel intermediate products (i.e., a percentage of LME price).

Management's initial assessment is that, this regulation recognizes or permits adjustments to the international market price standard (e.g. a percentage of LME price). At the present time, at a minimum, it appears that the regulation will set LME price as a reference point in calculating the benchmark price. What remains is the outstanding regulation of the Director General on the methods of determining the quantum for the cost adjustments and to make sure that the actual benchmark price posted by the Director General is in line with the Company's pricing formula. Management will not know this until the Director General regulation is issued.

g. MEMR Regulation on Domestic Value-Add

On February 6, 2012, the MEMR issued Regulation No. 07 of 2012 on Increase in Value-Add from Minerals through Mineral Processing and Refining ("Reg No. 7/2012"). This Regulation was issued to further implement Articles 96 and 111 of Government Regulation No. 23 of 2010 on the Implementation of Mineral and Coal Mining Activities ("GR No. 23/2010, as amended by GR No. 24/2012").

Pursuant to GR No. 23/2010 and Reg No. 7/2012, certain metal minerals, including nickel, are regarded as mining commodities, the value of which can be added to through processing and/or refining activities. As such, nickel must be processed and/or refined within the country in accordance with the minimum threshold provided in Reg No. 7/2012.

CoW holders that have been producing prior to the issuance of the Regulation must:

- a. make adjustment to the processing and/or refining minimum threshold plan to be in accordance with the limit set out above within 5 years of the issuance of the 2009 Mining Law; and
- b. submit periodic reports on the development of the adjustment to the processing and/or refining minimum limit plan to the Director General of Minerals and Coal for evaluation.

In the event that CoW holders cannot make the above mentioned adjustment or cannot do so through cooperation with other parties, they must consult with the Director General.

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

Pada 16 Mei 2012, KESDM menerbitkan Peraturan No. 11 Tahun 2012 ("PerMen No. 11/2012") yang merupakan amandemen atas PerMen No. 7/2012. PerMen No. 11/2012 ini menegaskan bahwa pemegang IUP dan Ijin Pertambangan Rakyat ("IPR") dapat melakukan ekspor bijih/bahan mentah setelah memperoleh rekomendasi dari KESDM, apabila telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. Direktur Jenderal Batubara dan Pertambangan akan menerbitkan peraturan-peraturan lebih lanjut terkait dengan implementasi PerMen No. 11/2012 ini.

Pada 12 September 2012, Mahkamah Agung mengabulkan sebagian dari tuntutan *judicial review* yang diajukan oleh anggota dari Asosiasi Nikel Indonesia yang menentang PerMen No. 7/2012. Keputusan Mahkamah Agung membatalkan empat pasal dari PerMen No. 7/2012, termasuk ketentuan yang melarang ekspor mineral mentah sejak 6 Mei 2012. Perseroan berpendapat bahwa Keputusan tersebut tidak memiliki pengaruh langsung terhadap Perseroan.

Pada 6 Agustus 2013, KESDM menerbitkan Peraturan No. 20 Tahun 2013 ("PerMen No. 20/2013") yang merupakan amandemen atas PerMen No. 7/2012. PerMen No. 20/2013 ini menegaskan bahwa pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan kerjasama dengan pihak lainnya yang memiliki ijin usaha dengan persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, gubernur, bupati atau walikota. Di samping itu, pemegang IUP dan IPR dapat melakukan ekspor bijih/bahan mentah setelah memperoleh ijin ekspor dari Menteri Perdagangan.

Pada bulan Nopember 2013, putusan Mahkamah Agung No. 13 P/HUM/2012 tentang pencabutan atas PerMen No. 7/2012 ("Putusan") dipublikasikan, meskipun Putusan tersebut telah dibacakan pada bulan April 2013. Meskipun gugatan yang diajukan hanya terkait Pasal 21 PerMen No.7/2012, Putusan menetapkan pembatalan terhadap keseluruhan peraturan dan memerintahkan Kementerian ESDM untuk mencabut peraturan tersebut.

Manajemen berpendapat bahwa produk Perseroan telah memenuhi ketentuan ini. Namun, Perseroan masih mengevaluasi dampak dari ketentuan ini terhadap kegiatan operasinya.

Pemerintah telah menerbitkan peraturan-peraturan terkait bea ekspor, yaitu, antara lain, Peraturan Menteri Perdagangan No. 29 of 2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan, Peraturan Direktur Jenderal Batubara dan Pertambangan No. 574.K/30/DJB/2012 tentang Ketentuan Tata Cara dan Persyaratan Ekspor Produk Pertambangan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar. Manajemen berpendapat bahwa secara keseluruhan peraturan-peraturan ini tidak berdampak terhadap Perseroan. Produk Ni dalam Matte yang dihasilkan oleh Perseroan masuk dalam kategori HS 7501.10.00.00 (tidak termasuk dalam peraturan-peraturan tersebut).

h. PP No. 24/2012

PP No. 24/2012 yang menggantikan PP No. 23/2010 ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada 21 Februari 2012. PP No. 24/2012 mengharuskan pemegang IUP dan IUPK melakukan divestasi bertahap, sehingga paling tidak 51% saham dimiliki oleh investor Indonesia pada tahun ke-10 semenjak produksi berlangsung. PP No. 24/2012 juga memberikan konfirmasi bahwa perpanjangan Kontrak Karya adalah dalam bentuk IUP dan dibawah wewenang KESDM. Manajemen berkeyakinan bahwa kewajiban divestasi ini tidak berdampak pada pemegang Kontrak Karya, dan akan tetap menegosiasikan hal ini dengan KESDM dalam rapat renegotiasi Kontrak Karya.

36. Contingent assets and liabilities (continued)

On May 16, 2012, Regulation No. 11 of 2012 ("Reg No. 11/2012") was issued by the MEMR to amend Reg No. 7/2012. Under this Reg No. 11/2012, IUP and "Ijin Pertambangan Rakyat" ("IPR") holders may export ore/raw materials after obtaining recommendation from the MEMR, subject to certain requirements being fulfilled by the IUP and IPR holders. Certain Director General regulations shall be issued to further implement this regulation.

On September 12, 2012, the Supreme Court granted parts of a judicial review challenge filed by members of the Indonesian Nickel Association which contested Reg No. 7/2012. The Supreme Court decision nullified four articles of the Reg No. 7/2012, including the provision banning the exports of raw minerals since May 6, 2012. The Company believes that the Decision does not have any direct impact to the Company.

On August 6, 2013, the MEMR issued Regulation No. 20 of 2013 ("Reg No. 20/2013") to further amend Reg No. 7/2012. Under this Reg No. 20/2013, IUP and IUPK holders may cooperate with other IUP and IUPK holders with approval from Minister of Energy and Mineral Resources, governor, regent or mayor. In addition, IUP and IPR holders may export ore/raw materials after obtaining export permit from Minister of Trade.

In November 2013, a Supreme Court decision No. 13 P/HUM/2012 on the revocation of Reg. No. 7/2012 ("Decision") was published, though the Decision was read out in April 2013. Although the lawsuit was only about Article 21 of Reg No. 7/2012, the Decision declares an annulment of the entire regulation and ordered the MEMR to revoke it.

Management believes that the Company's products have satisfied the requirement. However, the Company is currently assessing any further impacts on its operations.

The Government has issued an export duty regulations package, consisting of, amongst others, the Minister of Trade Regulation No. 29 of 2012 on Export Control and Clearance Scheme, Director General of Minerals and Coal Regulation No. 574.K/30/DJB/2012 on Procedures and Requirements for Mining Product Export Recommendation, and Minister of Finance Regulation No. 75/PMK.011/2012 on Stipulation of Export Products which are Subject to Export Duty and Tariff. Overall, the management believes that these regulations should not be applicable to the Company. The Company's Nickel in Matte product is HS 7501.10.00.00 (i.e., different from what is covered in the regulations).

h. GR No. 24/2012

GR No. 24/2012 which amends GR No. 23/2010 was signed by the President of the Republic of Indonesia on February 21, 2012. GR No. 24/2012 requires a gradual divestment scheme applicable for IUP and IUPK holders, such that in the tenth year from their production commissioning at least 51% of their shares shall be owned by Indonesian participant(s). GR No. 24/2012 also provides confirmation that an extension of a CoW in the form of an IUP is under the authority of the MEMR. Management believes that the divestment requirement will not apply to CoW holders, and continues negotiating this matter with the MEMR through the ongoing CoW renegotiation meetings.

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

i. Peraturan KESDM tentang Divestasi

Pada 13 September 2012, KESDM menerbitkan Peraturan No. 27 Tahun 2013 ("PerMen No. 27/2013"). PerMen No. 27/2013, yang merupakan salah satu peraturan pelaksana terpenting dari PP No. 23/2010 dan PP No. 24/2012, menjelaskan tata cara dan penetapan harga divestasi saham, serta perubahan penanaman modal di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara.

PerMen No. 27/2013 menjelaskan bahwa seluruh pemegang Kontrak karya wajib mengikuti tata cara divestasi, tata cara pembayaran, dan mekanisme penetapan harga yang diatur dalam PerMen No. 27/2013 sejak tanggal berlakunya peraturan ini. Perseoran masih menganalisa dampak PerMen No. 27/2013 terhadap Perseroan. Mengingat bahwa divestasi merupakan salah satu butir dalam renegotiasi Kontrak Karya, Perseroan akan terus mendiskusikan hal ini bersama Pemerintah.

j. Peristiwa setelah tanggal neraca

Pada tanggal 11 Januari 2014, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 sebagai perubahan kedua atas PP No. 23/2010, telah diubah melalui PP No. 24/2012 ("PP No. 1/2014"). Untuk melaksanakan PP No. 1/2014, pada tanggal yang sama, Menteri ESDM juga mengeluarkan Peraturan No. 1 Tahun 2014 ("PerMen ESDM 1/2014") untuk menggantikan PerMen No. 7/2012 dan PerMen No. 20/2013. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, pada prinsipnya, setiap bijih mentah tidak diperbolehkan untuk diekspor terhitung sejak 12 Januari 2014. Konsentrat didefinisikan sebagai produk olahan. Berdasarkan PerMen ESDM 1/2014, pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan pemegang IUP Operasi Produksi non-logam harus melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri sesuai dengan batas minimum sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan tersebut. Sebagai bagian dari peraturan larangan ekspor, produk Perseroan saat ini, yaitu *nickel in matte*, memenuhi batas minimum yang ditetapkan dalam PerMen ESDM 1/2014.

Selain itu, Menteri Keuangan menerbitkan pajak ekspor produk mineral melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.011/2014 tanggal 11 Januari 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 Peraturan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Pajak dan Tarif Pajak. Tarif ekspor ini hanya berlaku untuk konsentrat. Konsentrat didefinisikan sebagai produk olahan.

Untuk memperjelas ketentuan dalam PP No. 1/2014 dan PerMen ESDM 1/2014 yang menyatakan "jumlah tertentu", terdapat juga Peraturan Menteri No. 04/M-DAG/PER/1/2014 yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan. Peraturan tersebut mengatur kewajiban untuk memverifikasi klasifikasi dari produk mineral, kewajiban untuk mendaftarkan sebagai eksportir resmi pada Kementerian Perdagangan dan kewajiban untuk memperoleh persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan. Persyaratan ini berlaku untuk konsentrat.

Bagi Perseroan, yang produknya termasuk dalam Lampiran 1 dari Peraturan Menteri Perdagangan ini, kewajiban tambahannya adalah untuk melakukan verifikasi atas klasifikasi produk Perseroan dan untuk mendaftar sebagai eksportir resmi. Kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Menteri Perdagangan tidak berlaku bagi Perseroan. Manajemen saat ini bekerja sama dengan kantor kepabeanan untuk memenuhi kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Perseroan terus memantau setiap perkembangan yang relevan dan menilai setiap dampak lebih lanjut terhadap operasinya, apabila ada.

Pada tanggal 18 Februari 2014, Perseroan telah memperoleh surat pengakuan dari Menteri Perdagangan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian sesuai surat No. 5/DAGLU/ET-PPHPP/2/2014.

37. Informasi tambahan untuk Laporan Arus Kas

Kegiatan signifikan yang tidak mempengaruhi arus kas:

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Pembelian aset tetap yang dibiayai melalui utang	(1,110)	(3,863)	Acquisition of fixed assets through incurring of payables

36. Contingent assets and liabilities (continued)

i. MEMR Regulation on Divestment

On September 13, 2013, MEMR issued Regulation No. 27 of 2013 ("Reg No. 27/2013"). Reg No. 27/2013, which is one of the most important implementing regulations of GR No. 23/2010 and GR No. 24/2012, outlining the procedures and determination of share divestment prices and also changes of investment particulars in the mineral and coal mining business.

Reg No. 27/2013 provides that all CoW holders must follow the divestment procedure, payment procedure, and pricing mechanism provided in Reg No 27/2013 from its issuance date. The Company is analyzing the impact of Reg No. 27/2013 to the Company. As divestment is one of the CoW renegotiation items, the Company shall continue to discuss this matter with the Government.

j. Subsequent events

On January 11, 2014, the Government issued Government Regulation No. 1 of 2014 as the second amendment to GR No.23 as amended by GR No.24/2012 ("GR No. 1/2014"). To implement GR No.1/2014, on the same date, the MEMR also issued Regulation No. 1 of 2014 ("MEMR Reg 1/2014") to replace Reg No. 7/2012 and Reg No. 20/2013. Based on these regulations, in principle, any raw material is prohibited to be exported as from January 12, 2014. Concentrate is defined as processed product. Under MEMR Reg 1/2014, metal mineral IUP Operation Production holders and non-metal mineral IUP Operation Production holders must conduct domestic processing and refining in accordance with the minimum threshold as provided in the attachment to this regulation. As part of the export ban regulations, the Company's current product, i.e. nickel in matte, satisfies the minimum thresholds set out in the MEMR Reg 1/2014.

In addition, the Minister of Finance issued an export tax of mineral products through Minister of Finance Regulation No. 6/PMK.011/2014 dated 11 January 2014 on the Second Amendment to the Minister of Finance Regulation No. 75/PMK.011/2012 on the Stipulation of Export Goods Subject to Tax and Tax Tariff. This export tariff only applies to concentrate. Concentrate is defined as processed product.

To clarify provisions in GR No. 1/2014 and MEMR Reg 1/2014 stating "certain amount", there is also Ministerial Regulation No. 04/M-DAG/PER/1/2014 issued by the Minister of Trade. It regulates obligations to verify classification of mineral products, obligation to register as an official exporter and obligations to obtain export approval from the Minister of Trade. These requirements apply to concentrate.

For the Company, whose product falls under Attachment 1 of the Trade Ministerial regulation, the additional obligations are to verify the classification of the Company's product and to register as an official exporter. The obligation to obtain approval from the Minister of Trade does not apply to the Company. Management is working together with the customs office to pursue the compliance. The Company continues to monitor any relevant development and assess any further impacts on its operations, if any.

On February 18, 2014, the Company has already obtained the recognition letter from the Minister of Trade as a Registered Exporter for Processed and Refined Mining Products as stated in its letter No. 5/DAGLU/ET-PPHPP/2/2014.

37. Supplementary information for Statement of Cash Flows

Significant activities not affecting cash flows:

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

INFORMASI PERSEROAN

Corporate Information



Jejak langkah Corporate history

Jejak Langkah Corporate history

Contributing to Indonesia's prosperity for 45 years

1968

Persetujuan Anggaran Dasar pembentukan PT International Nickel Indonesia (PT Inco) dimana 61% sahamnya dimiliki Inco Limited. Penandatanganan Kontrak Karya antara PT Inco dan Pemerintah Indonesia untuk konsesi berjangka 30 tahun sejak dimulainya produksi komersial (yaitu dari 1 April 1978 sampai 31 Maret 2008).

Article of Association was approved to establish PT International Nickel Indonesia (PT Inco), which 61% of shares owned by Inco Limited. Contract of Work (CoW) was signed between PT Inco and the Indonesian government for a 30-year period from start of first commercial production (or from April 1, 1978 to March 31, 2008).

1974

Keputusan untuk mengganti sumber energi dari bahan bakar fosil menjadi pembangkitan listrik tenaga air. Kapasitas fasilitas peleburan ditingkatkan tiga kali lipat untuk mengurangi biaya per unit serta mengimbangi kapasitas pembangkit listrik tenaga air.

The decision was made to move from fossil fuels to hydroelectric power generation. The smelter is tripled in size to reduce unit costs and to match the capacity of the hydroelectric plant.

1970

Sampel pertama dari bijih Sulawesi sebanyak 50 ton dikirim ke fasilitas penelitian Inco di Port Colborne, Ontario, Kanada. Percobaan di fasilitas peleburan reduksi baru menunjukkan bahwa bahan dari Sorowako bisa diolah.

The first bulk sample of Sulawesi ore totaling 50 tons is delivered to Inco's research facilities in Port Colborne, Ontario. A new reduction smelting plant demonstrated that the Sorowako material could be successfully processed.

1976

Sekitar 10.000 tenaga kerja Indonesia dan 1.000 pekerja asing dikerahkan untuk membangun fasilitas pengolahan nikel dan pembangkit listrik tenaga air, bersama dengan jalan, fasilitas di kota, fasilitas pelabuhan, bandar udara, dan infrastruktur lain yang diperlukan.

Some 10,000 Indonesians and 1,000 expatriates are employed to build the nickel processing facility and the power-generating plant, along with roads, town sites, port facilities, airports and other required infrastructure.

1988

Produksi meningkat dari 36.000 ton menjadi 45.300 ton per tahun.

Production expands from 36,000 tons to 45,300 tons per year.

1973

Pembangunan fasilitas pengolahan pyrometalurgi satu-lini di Sorowako.

Construction of a single pyrometallurgical processing line begins at the Sorowako site.

1977

Presiden Soeharto berkunjung ke Sorowako dan meresmikan fasilitas penambangan dan pengolahan nikel.

President Soeharto travels to Sorowako and officially opens the nickel mining and processing facilities.

1978

PT Inco memulai produksi komersial. PT Inco begins commercial production.

1990

Inco Limited menjual 20% kepemilikan sahamnya di PT Inco kepada publik dan dicatatkan di bursa saham Indonesia. Inco Limited masih memegang 58,19% saham PT Inco.

Inco Limited sells 20% of its shares in PT Inco to the public and is listed on the Indonesian stock exchanges. Inco Limited continues to own 58.19% of PT Inco's shares.

1996

Penandatanganan perubahan dan perpanjangan Kontrak Karya untuk periode 30 tahun, yaitu hingga 2025.

Signing of the modification and extension of CoW for another 30-year period, to 2025.

2003

Pengembangan areal tambang PT Inco yang baru di Petea (sebelah timur Danau Matano, bersebelahan dengan areal East Block).

A new mining area in Petea is developed (east of Lake Matano, adjacent to PT Inco's East Block ore body).

2011

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Karebbe diresmikan dan mulai beroperasi. PLTA senilai AS\$410 juta ini mampu menghasilkan rata-rata 90 MW listrik dan menambah total kapasitas pembangkit listrik tenaga air menjadi rata-rata 365 MW, sehingga memberikan peluang strategis untuk peningkatan volume produksi.

The Karebbe Hydroelectric Power Generating Plant is inaugurated and fully commissioned. This US\$410 million power plant will generate an average of 90 MW of electric power and bring total hydro generation capacity to an average of 365 MW, providing a strategic opportunity to increase production volume.

1999

Proyek Perluasan Lini Produksi Keempat, termasuk areal Balambano, dengan kapasitas 93 MW.

Fourth Line Expansion Project, including Balambano area, with capacity of 93 megawatts (MW).

2005

Instalasi perangkat Bag House System pada Tanur Listrik 3 untuk mengurangi emisi debu dari tanur listrik diselesaikan dengan sukses.

Successfully installed the Bag House System on Electric Furnace #3 to reduce dust emission from electric furnaces..

Pemegang saham menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT International Nickel Indonesia Tbk menjadi PT Vale Indonesia Tbk. Perubahan nama ini sejalan dengan evolusi Perseroan untuk lebih selaras dengan kegiatan Vale lainnya yang telah beroperasi di seluruh dunia. Hal ini pun juga sekaligus mencerminkan posisi Vale sebagai bagian dari perusahaan penambangan terbesar kedua di dunia.

Shareholders approve the change of name from PT International Nickel Indonesia Tbk to PT Vale Indonesia Tbk. This change is a natural step in the company's evolution that aligns it more fully with other Vale operations worldwide, reflecting its position as part of the world's second-largest mining company.

2000

Produksi meningkat 30% menjadi 59.000 ton nikel dalam matte.

Production increases by 30% to 59,000 tons of nickel in matte.

2007

Perseroan mencatat rekor produksi tahunan tertinggi sebesar 76.748 ton nikel matte.

PTI records the highest annual production volume – 76,748 tons of nickel in matte.

2012

PT Vale mencatat rekor produksi triwulanan tertinggi sepanjang sejarahnya pada triwulan IV 2012 sebesar 21.306 ton nikel dalam matte.

PT Vale records the all-time-highest quarterly production in the fourth quarter of the year – a record of 21,306 tons of nickel in matte.

2013

PT Vale telah memasuki tahap pertama Proyek Konversi Batubara, yaitu mengganti HSFO dengan batu bara serbuk untuk dimasukkan ke dalam tanur pengering. Selain karena batubara lebih hemat, batubara juga merupakan sumber daya lokal, sehingga penggunaannya dapat lebih meningkatkan kontribusi PT Vale bagi perekonomian Indonesia.

PT Vale implements the first phase of the Coal Conversion Project, replacing HSFO with pulverized coal in its dryers. Not only is coal more cost-efficient, it is a locally sourced resource that further enhances PT Vales' contribution to the Indonesian economy



Tentang PT Vale Indonesia

About PT Vale Indonesia

Tentang PT Vale Indonesia

About PT Vale Indonesia

PT Vale mengoperasikan salah satu operasi tambang dan pengolahan nikel laterit terpadu terbesar di dunia yang berlokasi di dekat Sorowako di Pulau Sulawesi, Indonesia.

PT Vale operates one of the world's largest integrated lateritic nickel mining and processing operations, located near Sorowako on the Island of Sulawesi in the Republic of Indonesia.

Kami memproduksi nikel dalam matte, yaitu produk yang digunakan dalam pembuatan nikel rafinasi. Dengan cadangan dan sumber daya nikel kami yang sangat baik, kami menyediakan pasokan jangka panjang yang handal ke konsumen nikel hilir, khususnya di Jepang, negara tujuan pengapalan kami. Semua produksi nikel dalam matte kami terikat dalam penjualan kepada Vale Canada Limited (VCL) dan Sumitomo Metal Mining Co, Ltd (SMM), dimana perjanjian penjualan tersebut mengatur bahwa 80% dari produksi tahunan kami dibeli oleh VCL dan 20% lainnya oleh SMM berdasarkan formula harga LME.

VCL, yang merupakan bagian dari Vale Base Metals dan merupakan produsen nikel kedua terbesar di dunia, saat ini memiliki 58,73% saham kami, sementara SMM, salah satu perusahaan pertambangan dan peleburan terbesar di Jepang, memiliki 20,09% saham kami. Sisanya, sebesar 21,18% dari saham tersebut dimiliki oleh pemegang saham publik dan lainnya.

We produce nickel in matte, a product used in making refined nickel. Given our excellent nickel reserves and resources, we provide a reliable, long-term supply to downstream nickel consumers, especially in Japan, where our output is shipped. All our nickel in matte production is committed to be sold to Vale Canada Limited (VCL) and Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (SMM), with sales agreements that provide for 80% of our annual production being purchased by VCL and 20% by SMM, based on a formula derived from the LME price.

VCL, which is part of Vale's base-metals business and the world's second-largest nickel producer, currently owns 58.73% of our shares; and SMM, one of Japan's largest mining and smelting companies, owns 20.09% of our shares. The remaining 21.18% of our shares is owned by the public and other shareholders.



Operasi bisnis kami terdiri dari penambangan dan pengolahan bijih menjadi produk nikel dalam matte yang dijual berdasarkan perjanjian penjualan. Didorong oleh keanekaragaman mutu bijih dalam wilayah konsesi kami, perencanaan, pengujian, dan pencampuran sumber daya bijih yang seksama tentu diperlukan untuk memastikan dan mempertahankan pasokan yang konsisten bagi pabrik pengolahan. Bijih dari tambang melalui berbagai proses penyaringan dan menjadi produk yang kami sebut produk stasiun penyaringan, yang mengandung nikel, besi magnesia, mineral-mineral silika, kerikil, dan sejumlah kecil kobalts. Di pabrik pengolahan, produk stasiun penyaringan ini masuk melalui sebuah trammel yang secara mekanis membuang sebagian material, untuk kemudian dipanaskan dengan proses kalsinasi dan dilebur sehingga diperoleh produk nikel dalam matte yang mengandung sekitar 78% nikel dan 20% sulfur.

Our business operations consist of mining and processing ore to an intermediate nickel in matte product, which is sold pursuant to our sales agreements. Due to the variability of ore chemistry within our concession area, careful planning, sampling and blending of ore is required to ensure a consistent feed to the processing plant. Mined ore goes through various screening processes to become screening station product, which contains nickel, iron, magnesia, silica, boulders and minor amounts of cobalt. At the processing plant, the screening station product is run through a trommel to mechanically remove some of these materials; then it's heated and reduced using a calcining process; and finally it's smelted to recover and produce a saleable nickel in matte product containing approximately 78% nickel and 20% sulphur.

Tentang PT Vale Indonesia

About PT Vale Indonesia

Pabrik pengolahan kami di Sorowako memiliki tiga tanur pengering berbahan bakar minyak, lima tanur pereduksi berbahan bakar minyak, empat tanur listrik, dan tiga converter Pierce-Smith. Kami telah membangun dan memelihara infrastruktur pendukung yang mencakup fasilitas pelabuhan dan jalan untuk mengangkut dan mengapalkan produk akhir kami serta terminal bahan bakar minyak di Mangkasa Point yang didukung dengan pompa bahan bakar minyak bertekanan tinggi dan dihubungkan dengan pipa-pipa 12-inci ke tangki penyimpanan bahan bakar minyak di wilayah pabrik kami.

Kami telah membangun dan memelihara kota modern dengan fasilitas yang lengkap mencakup rumah sakit, sekolah dari TK sampai SLTA, fasilitas perbankan, kantor pos, kantor polisi, layanan transportasi bis, pasar swalayan dan pusat perbelanjaan, pasar, masjid, gereja, bandara, dan fasilitas olah raga dan rekreasi. Kota ini juga dilengkapi dengan sistem air minum dan pembuangan air kotor.

Kami juga memiliki dan mengoperasikan tiga fasilitas pembangkit listrik tenaga air dengan total kapasitas rata-rata 365 megawatt (MW). Selain itu, kami juga memiliki fasilitas pembangkit listrik thermal yang terdiri dari 5 unit generator diesel Mirrless Blackstone 6 MW, 23 unit generator diesel Caterpillar 1 MW, dan satu unit generator turbin uap 24 MW di Sorowako. Namun, dengan selesainya proyek PLTA Karebbe, kami akan menggunakan pembangkit listrik bertenaga BBM ini dengan lebih selektif dan lebih menggunakan energi dari PLTA, dan dengan demikian dapat mengurangi biaya energi kami secara keseluruhan.

Our processing plant, located at Sorowako, includes three oil-fired rotary dryers, five oil-fired reduction kilns, four electric furnaces and three Pierce-Smith converters. We have established and maintain the supporting infrastructure, including port facilities, roads to transport and ship our final granulated product, and a fuel terminal at Mangkasa Point, which is equipped with fuel pumps and is connected to fuel storage tanks at the plant by a 12-inch pipeline.

We have built and maintain modern towns and full facilities, including hospitals, schools from nursery through college, banks, post offices, police stations, bus services, supermarkets, markets, mosques, churches, airport facilities, and sports and recreational centres. The towns are also equipped with potable water and sewage systems.

We also own and operate three of our own hydroelectric power-generating facilities, with a total sustainable average generating capacity of 365 megawatts (MW). In addition, we have thermal power facilities comprising five 6-MW Mirrless Blackstone diesel generators and 23 1-MW Caterpillar diesel generators, and one 24-MW steam turbine generator located at Sorowako. However, with the completion of the Karebbe hydroelectric dam project, we have reduced the use of these fuel-fired electricity generators by using them on an as-required basis, and have shifted the majority of our energy source to hydroelectricity, significantly reducing overall energy costs.

Fasilitas pembangkit listrik tenaga air yang dimiliki oleh PT Vale dibangun dan dioperasikan sesuai dengan keputusan Pemerintah Indonesia tahun 1975. Keputusan ini mencakup kapasitas pembangkit listrik Balambano dan Karebbe, selain fasilitas awal di Lorano. Keputusan ini memberikan hak kepada Pemerintah Indonesia untuk mengambil alih fasilitas pembangkit listrik tenaga air tersebut dengan pemberitahuan tertulis kepada PT Vale dua tahun sebelum pengambilalihan. Sampai saat ini, tidak ada pemberitahuan tertulis yang diterima oleh kami. Jika hak ini digunakan, menurut keputusan tersebut, fasilitas pembangkit listrik tenaga air akan dialihkan sebesar nilai bukunya dengan ketentuan bahwa Kementerian akan menyediakan tenaga listrik bagi PT Vale yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasinya, pada tingkat harga berdasarkan biaya ditambah selisih keuntungan normal, sepanjang masa berlaku Kontrak Karya.

Nikel – Sumber Daya Alam Indonesia yang Vital

Nikel adalah logam serba guna dengan kombinasi sifat-sifat yang unik sehingga cocok dipakai untuk beragam keperluan. Nikel bersifat keras namun mudah ditempa, tahan karat, dan tetap mempertahankan ciri-ciri mekanis dan fisiknya sekalipun dipanaskan hingga suhu yang sangat tinggi.

Berasal dari bijih nikel, logam yang diproduksi oleh PT Vale dikenal sebagai nikel 'primer' karena berasal dari penambangan (nikel 'sekunder' berasal dari pengolahan material yang mengandung nikel). Secara khusus, PT Vale memproduksi nikel dalam matte, dari bijih laterit di fasilitas penambangan dan pengolahan terpadu kami.

Tentang PT Vale Indonesia

About PT Vale Indonesia

PT Vale's existing hydroelectric facilities were constructed and are currently operated pursuant to a 1975 decree of the Indonesian Government. This decree effectively covers the Balambano and Karebbe generating capacity in addition to the original Larona facility. It vests the Indonesian Government with the right, upon two years' prior written notice to PT Vale, to acquire the hydroelectric facilities. No such notice has been given to date. If this right is exercised, the decree also provides that the hydroelectric facilities would be acquired at their net book value, subject to the ministry providing PT Vale with sufficient power to meet its operating requirements, at a rate based on cost plus a normal profit margin, for the remaining term of the CoW.

Nickel – Indonesia's Vital Natural Resource

Nickel is a versatile metal with a unique combination of qualities that make it suitable for many uses. It is hard, yet malleable; it resists corrosion; and it retains its mechanical and physical properties even when heated to very high temperatures.

Derived from nickel ore, the metal produced by PT Vale is known as primary nickel because it comes directly from a mine (whereas secondary nickel comes from other sources). Specifically, we produce nickel in matte, which is made from lateritic ores at our integrated mining and processing facilities. All of PT Vale's nickel in

Tentang PT Vale Indonesia

About PT Vale Indonesia

Seluruh produksi nikel dalam matte kami dijual ke dua pemegang saham pendiri terbesar Perseroan, yakni Vale Canada Ltd. Dan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. untuk diolah lebih lanjut di pabrik-pabrik lain di Asia. Di sinilah diproduksi nikel yang akan dipakai dalam beragam aplikasi.

Penggunaan utama nikel adalah pada baja tahan-karat, yang mengkonsumsi sekitar dua per tiga produksi tahunan nikel dunia. Baja tahan-karat dapat dijumpai mulai dari alat yang sederhana sampai peralatan dengan teknologi canggih. Baja tahan-karat merupakan bagian penting dalam ribuan produk, mulai dari tampilan luar gedung apartemen dan pencakar langit sampai wastafel dapur. Baja tahan karat pun sering digunakan pada beragam perkakas dapur dan peralatan lainnya karena sifatnya yang tahan lama dan mudah dibersihkan.

Masih banyak lagi manfaat nikel yang lain. Baja campuran rendah, umumnya dengan kandungan nikel kurang dari 1%, banyak digunakan dalam produk-produk seperti tiang penyangga pada bangunan dan jembatan, serta pada perkakas dan peralatan elektrik. Logam campuran non-besi, yang mengandung nikel dan sedikit besi ataupun tanpa besi, banyak digunakan dalam industri penerbangan dan pembuatan komponen-komponen berkekuatan tinggi. Contoh pemakaian yang lebih umum misalnya adalah sebagai bahan utama uang logam.

matte is sold to our two largest founding shareholders, Vale Canada Ltd. and Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., for further processing at facilities in Asia. It is there that refined nickel is produced for use in a wide range of applications.

The main application for nickel is in stainless steel, which accounts for approximately two-thirds of world nickel consumption. Stainless steel can be seen almost everywhere, from simple tools to sophisticated technological equipment. It is an integral part of thousands of products, from the facades of condominiums to kitchen sinks; and it's present in a broad range of utensils and instruments because it's durable and easy to clean.

And the benefits of nickel don't end there. Low-alloy steel, with a nickel content typically less than 1%, is frequently used in such products as support beams for buildings and bridges, and in tools and electrical appliances. Non-ferrous alloys, containing nickel and little or no iron, are widely used in the manufacture of aeronautical and many other high-strength components. The use of nickel as a key ingredient in coins is an example of its more general applications.

Daftar penggunaan produk nikel primer masih sangat panjang; nikel adalah material terbaik untuk produk sepuhan seperti perabot logam; garam nikel digunakan sebagai katalis di industri petrokimia; sementara baterai isi-ulang yang mengandung nikel dapat ditemui di berbagai produk seperti peralatan elektrik, perkakas listrik dan kendaraan listrik hibrida.

Penggunaan yang sangat beragam serta banyaknya keunggulan dari nikel merupakan indikasi kuat akan prospek pertumbuhan PT Vale secara berkelanjutan, serta kemampuan kami untuk terus menciptakan nilai lebih, tidak hanya bagi pemegang saham, pelanggan dan karyawan Perseroan, namun juga bagi masyarakat Indonesia dan pengguna nikel di seluruh dunia.

The list of uses of pure primary nickel is almost endless: nickel is the best material for plating products such as metal furniture; nickel salts are used as catalysts in the petrochemical industry; and rechargeable batteries containing nickel can be found in many different products, such as electrical equipment, power tools and hybrid electric vehicles.

The vast range of uses and the many advantages of nickel are a strong indication of PT Vale's sustainable growth prospects and our ongoing capacity to deliver value, not only for the Company's shareholders, customers and employees, but also for the people of Indonesia and users of nickel worldwide.

Tentang PT Vale Indonesia

About PT Vale Indonesia

Administrasi Saham, Auditor, dan Penasehat Hukum

Share Administration, Auditors and Legal Counsel

Auditor

Kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun 2013 adalah: Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan - PricewaterhouseCoopers
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No. 6
Jakarta 12940 Indonesia
T: +62-21-521 2901
F: +62-21-5290 5555
www.pwc.com/id

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan dan semua partner penanda tangan hanya memberikan jasa audit bagi Perseroan. Perseroan membayar sejumlah kompensasi atas jasa yang diberikan dan mencatat seluruh pembayaran sebagai biaya profesional di bawah beban usaha dalam laporan keuangan tahun berjalan.

Daftar akuntan publik dan mitra auditor terdahulu

Auditor

The following public accounting firm provided audit service for the Company's 2013 financial statement: Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan - PricewaterhouseCoopers
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No. 6
Jakarta 12940 Indonesia
T: +62-21-521 2901
F: +62-21-5290 5555
www.pwc.com/id

The above-mentioned firm and therefore all its signing partners only provided audit service for the Company. The Company paid some compensation for services provided and recorded those payments as professional fees under operating expenses in the financial statements for the year.

List of previously engaged audit firms and signing auditors

2012	Audit Firm	Signing Partner	Date
Kantor Akuntan Publik Partner Penandatanganan Tanggal	Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan	Drs. Haryanto Sahari, CPA	March 22, 2013
2011	Audit Firm	Signing Partner	Date
Kantor Akuntan Publik Partner Penandatanganan Tanggal	Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan	Dwi Wahyu Daryoto, Ak., CPA	March 22, 2012
2010	Audit Firm	Signing Partner	Date
Kantor Akuntan Publik Partner Penandatanganan Tanggal	Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan	Dwi Wahyu Daryoto, Ak., CPA	March 4, 2011
2009	Audit Firm	Signing Partner	Date
Kantor Akuntan Publik Partner Penandatanganan Tanggal	Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan	Drs. Haryanto Sahari, CPA	February 25, 2010
2008	Audit Firm	Signing Partner	Date
Kantor Akuntan Publik Partner Penandatanganan Tanggal	Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan	Drs. Haryanto Sahari, CPA	March 18, 2009

Administrasi Saham, Auditor, dan Penasehat Hukum

Share Administration, Auditors and Legal Counsel

Penasihat Hukum

Penasihat hukum yang menyediakan jasa konsultasi legal bagi Perseroan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: Mochtar Karuwin Komar
Wisma Metropolitan II 14th floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31
Jakarta 12920 Indonesia
T: +62-21-571 1130
F: +62 21 571 1162, 570 1686
www.mkklaw.net

Perseroan membayar sejumlah kompensasi atas jasa-jasa yang diberikan dan mencatat seluruh pembayaran sebagai biaya profesional di bawah beban usaha dalam laporan keuangan tahun berjalan.

Secara keseluruhan, biaya profesional yang dibayarkan kepada auditor, penasihan hukum dan penyedia jasa lainnya adalah sebesar AS\$1,1 juta pada tahun 2013.

Biro Administrasi Efek

Perseroan menyediakan jasa administrasi efek secara *in-house* bagi para pemegang saham. Biro tersebut dapat dihubungi melalui kontak berikut:

PT Vale Indonesia Tbk

Administrasi Saham
Plaza Bapindo, Citibank Tower, lantai 22
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190 Indonesia
T: +62-21-524 9000
F: +62-21-524 9030
E: ptvi.shareadmin@vale.com

Perseroan mengeluarkan biaya operasional untuk memastikan bahwa fungsi administrasi efek ini berjalan dengan baik. Namun, Perseroan tidak memisahkan biaya ini karena jumlahnya tidak material.

Legal Counsel

The following legal counsel firm provided legal services for the Company in 2013: Mochtar Karuwin Komar
Wisma Metropolitan II 14th floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31
Jakarta 12920 Indonesia
T: +62-21-571 1130
F: +62 21 571 1162, 570 1686
www.mkklaw.net

The Company paid some compensation for services provided and recorded those payments as professional fees under operating expenses in the financial statements for the year.

Together, professional fees paid to the auditor, legal counsel and other service providers totaled US\$1.1 million in 2013.

Share Registrar

The Company provides in-house share registration services for its shareholders. The registrar can be contacted at below contact details:

PT Vale Indonesia Tbk

Share Registrar
Plaza Bapindo, Citibank Tower, 22nd floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190 Indonesia
T: +62-21-524 9000
F: +62-21-524 9030
E: ptvi.shareadmin@vale.com

The Company incurred operational expenses to ensure the registrar functions properly. However the Company does not separate these expenses due to their immateriality.

Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile

Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile

Ricardo De Carvalho

Presiden Komisaris /

President Commissioner

Kewarganegaraan : Brazil

Lahir : 1957

Ricardo de Carvalho diangkat sebagai Presiden Komisaris PT Vale pada Februari 2012.

Ricardo de Carvalho menjabat sebagai Direktur Vale Base Metals – Asia Pasifik & Afrika sejak Januari 2012. Sebelumnya beliau adalah Direktur Vale Metals – Atlantik Selatan, dan pernah bekerja sebagai Direktur Departemen Aluminium Vale. Beliau memiliki pengalaman 30 tahun lebih di bisnis pertambangan dan metal.

Saat ini beliau bertanggung jawab mengelola operasi Vale di Kaledonia Baru dan di Indonesia, dan juga sebagai perwakilan Vale untuk implementasi proyek tambang tembaga Konkola North di Zambia di Teal Minerals, perusahaan patungan Vale dengan African Rainbow Minerals (ARM). Beliau ditunjuk oleh Vale sebagai Presiden dari Vale Nouvelle Caledonie SAS.

Sebagai Direktur Vale Base Metals – Asia Pasifik & Afrika, Ricardo de Carvalho berbasis di kantor cabang Vale SA di Singapura.

Citizenship: Brazilian

Born: 1957

Mr. de Carvalho was appointed President Commissioner of PT Vale in February 2012.

Mr. de Carvalho became Vale Base Metals Director, Asia-Pacific and Africa, in January 2012. He was previously ValeBase Metals Director, South Atlantic, and before that, he served as Vale's Aluminum Department Director. He has worked in the mining and metals business for more than 30 years.

He is currently responsible for managing Vale's operations in New Caledonia and Indonesia and also represents the company in Teal Minerals, a Vale and ARM (African Rainbow Minerals) Joint Venture for the Konkola North copper project implementation in Zambia. He was appointed by Vale to be the President of Vale Nouvelle Caledonie.

As Vale Base Metals Director, Asia-Pacific and Africa, Mr. de Carvalho is based in Vale SA Singapore Branch Office.

Arief T. Surowidjojo

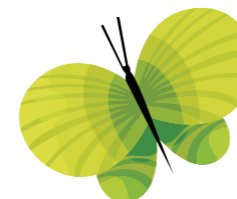
Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen /

Vice President Commissioner and Independent Commissioner

Kewarganegaraan : Indonesia

Lahir : 1953

Arief T. Surowidjojo diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Vale pada September 2011 dan telah menjadi Komisaris Independen Perseroan sejak April 2009. Beliau adalah pendiri dan partner senior di firma hukum Lubis Ganie dan Surowidjojo. Beliau memiliki lebih dari 35 tahun pengalaman dalam hukum korporat dan telah menerbitkan banyak buku, makalah, dan artikel mengenai hukum dan tata kelola.



Beberapa peranan utama dalam karir hukumnya adalah menjabat sebagai penasihat hukum utama untuk Pemerintah Indonesia dalam merestrukturisasi industri perbankan selama krisis keuangan tahun 1997-2003; mewakili pemerintah dalam melakukan audit tata kelola dan kepatuhan; membantu komite yang didirikan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan krisis yang mungkin terjadi di industri perbankan dan keuangan.

Arief T. Surowidjojo adalah Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan, anggota Komite Audit PT Holcim Indonesia Tbk., Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Sampoerna Agro Tbk., Ketua Komite Tata Kelola Perusahaan PT Indika Energy Tbk., serta PT Petrosea Tbk.

Komitmen Arief T. Surowidjojo pada pendidikan hukum terlihat dari berbagai macam peran yang diembannya. Beliau menjadi dosen senior di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia sejak 1990. Menjabat sebagai Editor Utama pada Jentera, sebuah jurnal hukum Indonesia sejak tahun 2004. Pada 1993-1998, menjabat sebagai editor Indonesia pada Asia Business Law Review, Singapura. Sejak tahun 2000, beliau menjadi anggota Dewan Pengawas dari Yayasan Putera Sampoerna.

Beliau adalah pendiri dan anggota Dewan Pengawas dari Institut Tata Kelola Indonesia, sebuah institusi yang didirikan untuk mempromosikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Arief T. Surowidjojo adalah pendiri dan Ketua Dewan Pengawas WWF Indonesia, yang didirikan untuk mempromosikan konservasi lingkungan. Beliau juga adalah pendiri dan Ketua Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, yang mempromosikan reformasi hukum dan institusional.

Arief T. Surowidjojo menamatkan pendidikan S-1 di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, pada tahun 1977. Pada tahun 1984, beliau meraih gelar magister dalam bidang Hukum dengan fokus studi pada transaksi bisnis internasional dari School of Law, University of Washington, Seattle.

Citizenship: Indonesian

Born: 1953

Mr. Surowidjojo was appointed Vice President Commissioner of PT Vale in September 2011 and has been an Independent Commissioner since April 2009. He is a founding and senior partner of the law firm of Lubis Ganie and Surowidjojo. He has 35 years of corporate law experience and has published books, papers and articles on legal and good governance matters.

Key assignments in his legal career include serving as lead lawyer for the Indonesian Government in restructuring the banking industry during the financial crisis of 1997-2003; conducting governance and compliance audits on behalf of the Government of Indonesia's biggest debtors in 2000 and in 2008-2009; and assisting a committee established by the Governor of the Indonesian Central Bank and the Indonesian Ministry of Finance in matters pertaining to possible crisis in the banking and financial industries.

Mr. Surowidjojo is also the Vice President and Independent Commissioner, and a member of the Audit Committee of PT Holcim Indonesia Tbk., Independent Commissioner and Chairman of the Audit Committee of PT Sampoerna Agro Tbk., and Chairman of the Good Corporate Governance Committee of PT Indika Energy Tbk., and PT Petrosea Tbk.

Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile

Mr. Surowidjo demonstrates his commitment to legal education through a wide range of roles. Since 1990, he has been a senior lecturer at the Faculty of Law, University of Indonesia. Since 2004, he has served as Chief Editor of the *Jentera*, an Indonesian law journal. From 1993 to 1998, he was Indonesian Editor of the *Asia Business Law Review*, Singapore. Since 2000, he has served as a member of the Board of Supervision of Putera Sampoerna Foundation.

He is a Founder and Member of the Board of Supervision of the Indonesia Institute for Corporate Governance, an institute established to promote good corporate governance principles. Mr. Surowidjo is a Founder and Chairman of the Board of Supervision of WWF Indonesia, which was established to promote environmental conservation. He is also a Founder and Chairman of the Indonesian Law and Policy Study Center, which promotes legal and institutional reforms.

Mr. Surowidjo obtained his bachelor of law degree from the Faculty of Law, University of Indonesia, in 1977. In 1984, he obtained a master's degree in law, focusing on international business transactions, from the School of Law, University of Washington, in Seattle.

Kevin Graham

Komisaris /

Commissioner

Kewarganegaraan : Kanada

Lahir : 1978

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada 23 April 2013, pemegang saham memutuskan untuk menunjuk Kevin Graham sebagai Komisaris, efektif sejak dari penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2013 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2014.

Kevin Graham menjabat sebagai Chief Strategy & Technology Office di Vale Base Metal. Beliau mengawasi bidang Strategic dan Business Planning, Vale Technical Excellence Centre dan Operational Excellence, Brownfield Exploration, MRMR, Market Intelligence, dan seluruh kegiatan korporasi dalam cakupan bidang Keberlanjutan (Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan) yang lebih luas.

Sebelum bergabung dengan Vale, Kevin Graham bekerja sebagai Engagement Manager di McKinsey & Company, dimana ia fokus mempersiapkan peluang-peluang strategis yang akan mendatangkan nilai tambah bagi klien yang bergerak di industri metal, pertambangan industri basic materials dan lainnya. Kevin Graham juga pernah bekerja di Hatch sebagai project manager dan lead process engineer di sejumlah proyek operasional dan kapital dalam industri non-ferrous metals.

Kevin Graham meraih gelar PhD dalam bidang proses metalurgi dari McMaster University (Kanada) dan gelar sarjananya dari McGill University (Canada).



Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile

Citizenship: Canadian

Born: 1978

At the Annual General Meeting of Shareholders, held on April 23, 2013, the shareholders resolved to approve the appointment of Kevin Graham, effective from the close of the Annual General Meeting of Shareholders of 2013 until the close of the Annual General Meeting of Shareholders in 2014.

Mr. Graham is currently the Chief Strategy & Technology Office for Vale Base Metal. In this role, Mr. Graham oversees Strategic and Business Planning, Vale Technical Excellence Centre and Operational Excellence, Brownfield Exploration, MRMR, Market Intelligence, and all corporate actions in the broader Sustainability (Safety, Health and Environment) field.

Prior to joining Vale, Mr. Graham worked as an Engagement Manager for McKinsey & Company, where he focused on strategic and value-creation opportunities for clients within the metals, mining, and other basic material industries. Mr. Graham has also previously worked for Hatch, serving as project manager and lead process engineer on a number of operational and capital projects within the non-ferrous metals industry.

Mr. Graham obtained his PhD in process metallurgy from McMaster University (Canada) and his bachelor of engineering in metallurgical engineering from McGill University (Canada).

Jennifer Maki

Komisaris /

Commissioner

Kewarganegaraan : Kanada

Lahir : 1970

Jennifer Maki dipilih sebagai anggota Dewan Komisaris pada tahun 2007 dan merupakan Chief Financial dan Administrative Officer di Vale Base Metals. Sejak Januari 2013, Jennifer Maki juga mengemban peran di Divisi Human Resources dan Corporate Affairs, selain bertanggung jawab sebagai Chief Finance sejak 2007.

Jennifer Maki bergabung dengan Vale Canada pada tahun 2003 sebagai Assistant Comptroller, Financial Planning dan Analysis dan juga bertugas sebagai Assistant Comptroller, Financial Accounting dan Reporting dan Vice President serta Treasurer.

Sebelum bergabung dengan Vale Canada, Jennifer Maki bekerja di PricewaterhouseCoopers LLP selama 10 tahun pada jabatan yang terus meningkat. Jennifer Maki memiliki gelar sarjana dari Queen's University dan merupakan akuntan bersertifikat di Kanada.



Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile

Citizenship: Canadian

Born: 1970

Ms. Maki was elected to the Board of Commissioners in 2007. She is the Chief Financial and Administrative Officer of Vale Base Metals. As of January 2013, Ms. Maki also assumed the Human Resources and Corporate Affairs portfolios, in addition to the Chief Finance role, which she has held since 2007.

Ms. Maki joined Vale Canada in 2003 as Assistant Comptroller, Financial Planning and Analysis and has also held the roles of Assistant Comptroller, Financial Accounting and Reporting and Vice President and Treasurer.

Prior to joining Vale Canada, Ms. Maki spent 10 years at PricewaterhouseCoopers LLP in positions of increasing responsibility. Ms. Maki has a bachelor of commerce degree from Queen's University and is a chartered accountant in Canada.

Akira Nozaki

Komisaris /

Commissioner

Kewarganegaraan : Jepang

Lahir : 1960

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 24 September 2013, pemegang saham memutuskan untuk menunjuk Akira Nozaki sebagai Komisaris Perseroan, terhitung mulai dari penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2014.

Akira Nozaki saat ini bekerja sebagai Executive Officer dan Deputy General Manager Divisi Non-Ferrous Metals di Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., sejak Juni 2013. Selama menjabat, ia bertanggung jawab atas pengelolaan kinerja dan strategi, serta pengembangan bisnis di non-ferrous metals.

Sebelum memegang jabatannya sekarang, ia pernah menangani beberapa operasi dan proyek di bidang baja, nikel dan katalis di Sumitomo, serta menjabat sebagai General Manager di Departemen Penjualan Nikel and Bahan Baku dan Deputy General Manager di Departemen Administrasi pada Divisi Sierra Gorda Project (Chili).

Akira Nozaki meraih gelar sarjananya dari Waseda University dan bergabung dengan Sumitomo pada 1984.

Citizenship: Japanese

Born: 1960

In the Extraordinary General Meeting of Shareholders on September 24, 2013, the shareholders resolved the appointment of Akira Nozaki as Commissioner of the Company, effective until the close of the Annual General Meeting of Shareholders in 2014.



Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile

Akira Nozaki is currently the Executive Officer and Deputy General Manager of Non-Ferrous Metals Division of Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., a position he has held since June 2013. In this role, he is responsible for strategy and performance management, and business development in non-ferrous metals.

Prior to assuming his present position, he held various operations and project management positions in the fields of copper, nickel and catalysts at Sumitomo, and served as a General Manager of the Nickel Sales and Raw Materials Department, and Deputy General Manager of the Administration Department of the Sierra Gorda Project (Chile) Division.

Mr. Nozaki has a BA from Waseda University, and joined Sumitomo in 1984.

Mikinobu Ogata

Komisaris /

Commissioner

Kewarganegaraan : Jepang

Lahir : 1954

Mikinobu Ogata saat ini menjabat sebagai Executive Officer di Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. Sebagai Executive Officer, Mikinobu Ogata bertanggung jawab atas pengembangan bisnis pertambangan dan peleburan baru, pemasaran dan pengadaan bahan baku di Divisi *Non-Ferrous Metals*. Beliau bergabung dengan Sumitomo pada 1978 di *non-ferrous metals industry*.

Sebelum diangkat sebagai Executive Officer pada 2008, Mikinobu Ogata menjabat sebagai General Manager bidang Pemasaran dan Pengadaan Bahan Baku untuk tembaga dan emas. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Senior Vice President di Jinlong Copper Co., Ltd dan bertanggung jawab atas pemasaran produk-produk Jinlong ke pasar internasional dan mewakili kepentingan Sumitomo di industri tembaga di Cina.

Mikinobu Ogata meraih gelar sarjana di bidang Ekonomi dan Manajemen.

Citizenship: Japanese

Born: 1954

Mr. Mikinobu Ogata is currently the Executive Officer of Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. As the Executive Officer, Mr. Ogata conducts new mining/smeltering business development, marketing and raw materials procurement in the Non-Ferrous Metals Division. Mr. Ogata joined Sumitomo in 1978 and has over 34 years of professional experience in the non-ferrous metals industry.

Prior to his appointment as an Executive Officer in 2008, Mr. Ogata acted as General Manager of Marketing/Raw Materials Procurement of copper and gold. Before that, Mr. Ogata served as a Senior Vice President of Jinlong Copper Co., Ltd. to promote their products to the international market and to represent Sumitomo's interest in the Chinese copper business.

Mr. Ogata holds a bachelor's degree in economics and management.



Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile

Peter Poppinga

Komisaris /

Commissioner

Kewarganegaraan : Brazil

Lahir : 1959

Peter Poppinga menjabat Presiden Komisaris sejak 2009 hingga Februari 2012. Beliau adalah Chief Executive Officer Vale Canada Ltd. dan Direktur Eksekutif, Base Metals, Vale.

Peter Poppinga bergabung dengan Vale pada tahun 1999 dan menjabat sebagai Direktur bidang Bijih Besi pada Rio Doce America, Inc di kantor New York pada tahun 2000. Tahun berikutnya, beliau pindah ke Rio Doce International di Belgia, semula sebagai Direktur Penjualan Bijih Besi untuk Eropa, Timur Tengah dan Afrika, dan kemudian menjadi Senior Managing Director. Beliau bertanggung jawab atas penjualan mangan dan logam campurannya, dan juga atas negosiasi tolak ukur dunia dalam bidang bijih besi.

Pada Februari 2006, Peter Poppinga diangkat menjadi Senior Managing Director, CVRD International S.A. di Swiss. Pada bulan Oktober 2007, Peter Poppinga bergabung dengan Vale Canada sebagai Executive Vice-President bidang Strategi dan Teknologi Informasi.

Peter Poppinga memulai karir sebagai ahli geologi dan insinyur pertambangan di SAMITRI, perusahaan tambang di Brasil, dimana beliau bekerja selama 15 tahun di bidang eksplorasi, perencanaan tambang, produksi, pemasaran dan penjualan di berbagai posisi manajerial di dalam dan luar negeri.

Beliau meraih gelar magister bidang Administrasi Bisnis dari Fundação Dom Cabral dari Brazil dan gelar sarjana dalam bidang geologi dari Universität Clausthal di Jerman.

Citizenship: Brazilian

Born: 1959

Mr. Poppinga served as President Commissioner from 2009 to February 2012. He is Chief Executive Officer of Vale Canada Ltd., and Executive Director, Base Metals, Vale.

Mr. Poppinga joined Vale in 1999 and assumed the New York-based position of Director for Iron Ore of Rio Doce America, Inc., in 2000. The following year, he moved to Rio Doce International in Belgium, initially as Iron Ore Sales Director for Europe, Middle East and Africa, and later as Senior Managing Director. His responsibilities included the sale of manganese and alloys, as well as world benchmark negotiations in iron ore.

In February 2006, Mr. Poppinga was appointed Senior Managing Director, CVRD International S.A., in Switzerland. In October 2007, when Mr. Poppinga joined Vale Canada, he assumed the role of Executive Vice President, Strategy and Information Technology.

Mr. Poppinga began his career as a geologist and mining engineer at SAMITRI, a Brazilian mining company, where he worked for 15 years in exploration, mine planning, production, marketing and sales in managerial positions domestically and abroad.



Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile

He holds a master's degree in business administration from Fundação Dom Cabral in Brazil and a bachelor's degree in geology from the Universität Clausthal in Germany.

Mark Travers

Komisaris /

Commissioner

Kewarganegaraan : Kanada

Lahir : 1966

Mark Travers dipilih sebagai anggota Dewan Komisaris pada Agustus 2009. Beliau saat ini adalah Executive Vice President, Legal, Vale Base Metals dimana beliau mengawasi semua hal yang berhubungan dengan legal di seluruh Base Metals.

Mark Travers bergabung dengan Inco Limited (sekarang menjadi Vale, Base Metals) pada bulan Juni 2001 sebagai Assistant General Counsel. Beliau diangkat menjadi Associate General Counsel pada bulan Januari 2005 dan ditunjuk sebagai Deputy General Counsel, Asia-Pasifik pada bulan September 2007. Pada bulan Mei 2008, Mark Travers ditunjuk sebagai General Counsel Vale Canada. Pada bulan Mei 2009, beliau juga dipercaya untuk menangani Corporate Affairs. Pada tahun 2012, ia kini menjabat sebagai Executive Vice President, Legal, Vale Base Metals.

Sebelum bergabung dengan Inco Limited, Mark Travers adalah seorang pengacara korporasi di firma hukum Smith Lyons di Toronto, Kanada.

Mr Travers memiliki gelar Bachelor of Arts (Honors) dari University of Western Ontario dan gabungan Master of Business Administration gabungan dan Bachelor of Laws degree dari York University/ Osgood Hall Law School di Toronto, Kanada.

Citizenship: Canadian

Born: 1966

Mr. Travers was elected to the Board of Commissioners in August 2009. He is Executive Vice President, Legal, Vale Base Metals where he oversees all legal-matters across the Base Metals business.

Mark Travers joined Inco Limited (now Vale, Base Metals) in June 2001 as Assistant General Counsel. He was named Associate General Counsel in January 2005, and appointed Deputy General Counsel, Asia-Pacific, in September 2007. In May 2008, Mr. Travers was appointed General Counsel of Vale Canada. In May 2009, he took on additional responsibilities for Corporate Affairs. In 2012 his current role was established and renamed Executive Vice President, Legal, Vale Base Metals.

Prior to joining Inco Limited, Mark Travers was a corporate securities lawyer practicing at the Smith Lyons law firm in Toronto, Canada.

Mr Travers has a Bachelor of Arts (Honors) from University of Western Ontario and a combined Masters of Business Administration and Bachelor of Laws degree from York University/Osgood Hall Law School in Toronto, Canada.



Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile

Irwandy Arif

Komisaris Independen /

Independent Commissioner



Kewarganegaraan : Indonesia

Lahir : 1951

Irwandy Arif lulus dari Departemen Teknik Pertambangan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1976. Sejak itu, beliau telah menjadi dosen senior di Departemen Teknik Pertambangan, Fakultas Ilmu Bumi dan Teknologi Mineral di ITB dan Ketua Komite Anggaran Majelis Wali Amanat (MWA) ITB. MWA adalah organ tertinggi di ITB, mewakili dan bertindak atas nama pemerintah sebagai pemilik/pemegang saham dan publik/masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

Irwandy Arif juga memangku jabatan sebagai Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) dan Ketua Umum Komisi Akreditasi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Beliau adalah Komisaris Independen perusahaan tambang batu bara PT Multi Harapan Utama dan anggota Komite Audit PT Adaro Energy Tbk.

Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Aneka Tambang Tbk, serta Dekan Fakultas Ilmu Bumi dan Teknologi Mineral di ITB.

Irwandy Arif memiliki pengalaman yang luas dalam bidang peningkatan produktivitas, stabilitas lereng, dan aspek timbunan (stockpile). Beliau juga telah memimpin beberapa studi kelayakan untuk perusahaan-perusahaan batu bara.

Beliau mendapat gelar PhD dari Ecole des Mines de Nancy, Perancis pada tahun 1991.

Citizenship: Indonesian

Born: 1951

Mr. Arif graduated from the Department of Mining Engineering at the Bandung Institute of Technology (ITB) in 1976. Since his graduation, Mr. Arif has been a senior lecturer at the Department of Mining Engineering, Faculty of Earth Sciences and Mineral Technology at ITB and Head of the Budget Committee of Majelis Wali Amanat (MWA) (Board of Trustees) ITB. MWA is the supreme body at ITB, representing and acting on behalf of the government as the owner/shareholder and the public/community as the stakeholders.

He has also held the positions of Chairman of the Association of Indonesian Mining Professionals (PERHAPI) and Chairman of the Accreditation Commission with the Indonesia Ministry of Energy and Mineral Resources. Mr. Arif is an Independent Commissioner of PT Multi Harapan Utama, a coal mining company; and a member of the Audit Committee of PT Adaro Energy Tbk.

Previously, he was Independent Commissioner and Head of the Audit Committee of PT Aneka Tambang Tbk, and Dean of Faculty of Earth Sciences and Mineral Technology at ITB.

Mr. Arif has extensive experience in productivity improvement, slope stability and stockpile aspect. He has also led several feasibility studies for coal mining companies.

Mr. Arif obtained his PhD from Ecole des Mines de Nancy, France in 1991.

Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile

Idrus A. Paturusi

Komisaris Independen /

Independent Commissioner



Kewarganegaraan : Indonesia

Lahir : 1950

Idrus A. Paturusi bergabung dengan Universitas Hasanudin, Makassar sebagai staf senior di Lab Bedah, Fakultas Kedokteran, tahun 1978. Sejak tahun 2002 hingga 2006, beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan, sejak tahun 2006 sampai sekarang, menjabat sebagai Rektor Universitas Hasanudin. Tulisan-tulisan dan karya tulis beliau mengenai kedokteran, kesehatan dan penanganan bencana telah banyak dipublikasikan secara nasional.

Selama lebih dari 10 tahun, beliau menjabat sebagai Koordinator Brigade Tanggap Bencana untuk wilayah timur Indonesia dan berpartisipasi membantu tim-tim medis pada berbagai aktivitas tanggap bencana di Indonesia dan luar negeri, termasuk Pakistan, Afganistan, Iran, Jepang, Aceh, Yogyakarta, Nias, Padang, dan Papua. Pada tahun 1998, beliau ditunjuk sebagai Kepala Advance Crisis Center Team di RS Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Makassar.

Idrus A. Paturusi adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar. Beliau kemudian mengambil spesialisasi bedah tulang dan ortopedi di Universitas Indonesia, serta gelar doctoral di bidang ortopedi di Universitas Hasanudin dan Hiroshima University. Beliau menjalani berbagai pelatihan bedah ortopedi di Perancis dan Singapura.

Citizenship: Indonesian

Born: 1950

Mr. Idrus A. Paturusi joined Hasanuddin University, Makassar, as senior staff in the Surgeon Lab, Medical Faculty, in 1978. From 2002 to 2006, he served as Dean of the Medical Faculty, and from 2006 to the present, has been a Rector of Hasanuddin University. Many of his writings and books have been published nationally, particularly on medicine, health and disaster management.

For over 10 years, he has served as Coordinator of the Stand-by Disaster Brigade in the eastern part of Indonesia and has assisted medical teams in numerous disaster countermeasures in Indonesia and internationally, including Pakistan, Afghanistan, Iran, Japan, Aceh, Yogyakarta, Nias, Padang, and Papua. He has experience working in conflict areas, including Ambon, North Maluku, and Poso. In 1998, he was appointed Head of the Advance Crisis Center Team at Dr. Wahidin Sudiro Husodo Hospital, Makassar.

Mr. Paturusi graduated from the Medical Faculty, Hasanuddin University, Makassar. He obtained a specialist degree in bone surgery and orthopedics from the University of Indonesia and also a doctoral degree in orthopedics from Hasanuddin University and Hiroshima University. His orthopedic surgery trainings were in France and Singapore.

Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile

Harumasa Kurokawa

Komisaris /

Commissioner



Kewarganegaraan : Jepang

Lahir : 1957

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang digelar pada 24 September 2013, pemegang saham memutuskan untuk menerima pengunduran diri Harumasa Kurokawa sebagai Komisaris Perseroan.

Harumasa Kurokawa adalah General Manager pada Divisi Non-Ferrous Metals, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd, jabatan yang diembannya sejak April 2008. Sebelumnya, beliau bertugas sebagai General Manager Nickel Refinery, Sumitomo, sejak Januari 2007.

Harumasa Kurokawa meraih gelar sarjana di bidang metalurgi pada 1981 dari Tokyo University, Jepang, dan PhD di bidang Teknik pada 2003 di universitas yang sama.

Citizenship: Japanese

Born: 1957

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders on September 24, 2013, the shareholders resolved to accept the resignation of Harumasa Kurokawa as a Commissioner of the Company.

Mr. Kurokawa is General Manager, Non-Ferrous Metals Division, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., a position he has held since April 2008. Prior to this, he was General Manager of Nickel Refinery, Sumitomo, a position he assumed in January 2007.

Mr. Kurokawa obtained his degree in metallurgy in 1981 from Tokyo University, Japan, and a PhD in engineering in 2003, from the same university.

Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile

Conor Spollen

Komisaris /

Commissioner



Kewarganegaraan : Irlandia

Lahir : 1966

Pada Rapat Umum Pemegang Saham yang digelar pada 23 April 2013, pemegang saham memutuskan untuk menerima pengunduran diri Conor Spollen sebagai Komisaris Perseroan.

Conor Spollen merupakan Direktur Proyek Atlantik Utara. Pada jabatan ini, ia bertugas mengawasi seluruh proyek penting di Kanada dan Inggris.

Conor Spollen memegang gelar sarjana dalam Mineral Engineering dari Camborne School of Mines, Inggris, serta gelar MBA dari Chifley School of Business, Australia.

Citizenship: Irish

Born: 1966

At the Annual General Meeting of Shareholders, held on April 23, 2013, the shareholders resolved to accept the resignation of Conor Spollen as a Commissioner of the Company.

Mr. Spollen is Director of North Atlantic Projects. In this role, he oversees all major capital projects in Canada and the U.K.

Mr. Spollen has a bachelor of engineering in minerals engineering from Camborne School of Mines, United Kingdom and a MBA from Chifley School of Business, Australia.



Profil Direksi

Board of Directors' Profile

Profil Direksi

Board of Directors' Profile

Nico Kanter

Presiden Direktur /

President Director

Kewarganegaraan : Indonesia

Lahir : 1958

Nico Kanter diangkat sebagai Presiden Direktur pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 27 September 2011. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Vale sejak April 2009. Sebelum bergabung dengan PT Vale, Nico Kanter menjabat sebagai Head of Country, British Petroleum (BP) Indonesia, dimana beliau mengawasi dan bertanggung jawab mengintegrasikan seluruh operasional BP di Indonesia. Sebelumnya, beliau adalah Executive Vice President, Sumber Daya Manusia dan Hubungan di BP, posisi yang diemban sejak tahun 2005.

Nico Kanter mengawali karir di BP Indonesia sejak tahun 1984 sebagai penasihat hukum. Sejak tahun 1987 hingga 1996, beliau bekerja dalam berbagai departemen, termasuk Purchasing, Finance, Control & Planning, dan Marketing & Commercial. Beliau menjabat sebagai Human Resources Manager pada tahun 1996 hingga 1999 dan kemudian dipromosikan menjadi Vice President, Public & Government affairs. Beliau menjabat sebagai Senior Vice President Human Resources & General Support di Vico Indonesia (diakuisisi oleh BP) pada tahun 2001 sampai 2002, dan setelah itu ditugaskan di BP Asia Pacific & Middle East (Hong Kong) sebagai Executive Assistant bagi Group Vice President Upstream.

Sejak kembali ke Indonesia pada tahun 2003, Nico Kanter menjabat sebagai Senior Vice President, Public dan Government Affairs. Selanjutnya beliau dipromosikan menjadi Executive Vice President Human Resources & Relations.

Nico Kanter meraih gelar magister dalam bidang Hukum dari Universitas Indonesia dan gelar magister dalam Administrasi Bisnis (Bisnis Internasional) dari University of Southern California, Amerika Serikat.

Citizenship: Indonesian

Born: 1958

Mr. Kanter was appointed President Director at the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders on September 27, 2011. Prior to this, he had served as an Independent Commissioner of PT Vale since April 2009. Before to joining PT Vale, Mr. Kanter served as Head of Country, British Petroleum (BP) Indonesia, where he oversaw and was responsible for integrating all of BP's operations in Indonesia. Previously, he was Executive Vice President, Human Resources and Relations of BP, a position he assumed in 2005.

Mr. Kanter's career at BP began in 1984 as a lawyer. From 1987 to 1996, he worked in a number of departments at BP, including Purchasing, Finance, Control and Planning and Marketing and Commercial. He served as Human Resources Manager from 1996 to 1999 and was promoted to Vice-President Public and Government Affairs. Mr. Kanter was named Senior Vice-President, Human Resources and General Support of Vico Indonesia (acquired by BP) from 2001 to 2002, and thereafter was seconded to BP Asia-Pacific and Middle East (Hong Kong) as Executive Assistant to the Group Vice-President Upstream.



Returning to Indonesia in 2003, Mr. Kanter was named Senior Vice President, Public and Government Affairs. He was subsequently promoted to Executive Vice President, Human Resources and Relations.

Mr. Kanter has a master of law degree from the University of Indonesia and an MBA (international business) from the University of Southern California.

Bernardus Irmanto

Wakil Presiden Direktur /

Vice President Director

Kewarganegaraan : Indonesia

Lahir : 1975

Bernardus Irmanto diangkat sebagai anggota Direksi pada 28 Oktober 2010. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai General Manager dan bertanggung jawab untuk *shared services operations* PT Vale.

Bernardus Irmanto bergabung dengan PT Vale pada bulan Agustus 2004 sebagai Analis Sistem Senior. Sejak itu, beliau telah memegang posisi dengan tanggung jawab yang terus meningkat di departemen TI. Pada Februari 2007, beliau diangkat sebagai General Manager TI. Sebelum bergabung dengan PT Vale, Bernardus Irmanto telah memegang berbagai posisi dengan tanggung jawab yang terus meningkat di Newmont Nusa Tenggara, Fujitsu Asia Pacific Pty. Ltd., Bali Camp, University of New South Wales dan PT Freeport Indonesia.

Beliau meraih gelar sarjana dalam bidang Ilmu Komputer dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tahun 1997, dan gelar magister dalam bidang ilmu dan teknik komputer dari University of New South Wales di Sydney, Australia, pada tahun 2003.

Pada 16 Februari 2011, PT Vale mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menyetujui pengangkatan Bernardus Irmanto sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan.

Citizenship: Indonesian

Born: 1975

Mr. Irmanto was first appointed to the Board of Directors on October 28, 2010. Prior to this appointment, Mr. Irmanto served as General Manager and was responsible for the shared services operation of PT Vale.

Mr. Irmanto joined PT Vale in August 2004 as a Senior Systems Analyst. Since then, he has held positions of increasing responsibility in the IT department. In February 2007, Mr. Irmanto was appointed to the position of General Manager of IT. Prior to joining PT Vale, he held various positions of increasing responsibility in Newmont Nusa Tenggara; Fujitsu Asia Pacific Pty Ltd.; Bali Camp; University of New South Wales; and PT Freeport Indonesia.

Mr. Irmanto obtained a bachelor's degree in computer science from Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia in 1997, and a master's degree of engineering science in computer science and engineering from the University of New South Wales, Sydney, Australia in 2003.

On February 16, 2011, PT Vale held an Extraordinary General Meeting of Shareholders that approved the appointment of Mr. Irmanto as Vice President Director of the Company.



Profil Direksi Board of Directors' Profile

Profil Direksi Board of Directors' Profile

Josimar Pires

Direktur /

Director



Kewarganegaraan : Brazil

Lahir : 1961

Josimar Pires diangkat sebagai Direktur PT Vale pada bulan September 2011. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Chief Operating Officer untuk Perseroan. Beliau bergabung dengan Vale pada bulan Januari 2009 sebagai General Manager untuk Tambang Mangaan.

Josimar Pires telah memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman profesional di dalam industri pertambangan. Beliau telah bekerja untuk beberapa perusahaan besar dan menangani berbagai proyek-proyek prestisius di tambang mineral dan industri semen. Sebelum bergabung dengan Vale, beliau menjabat sebagai General Manager Perencanaan Tambang di Carajas Iron Ore di Vale, Brazil, sejak Oktober 2009. Sebelumnya, beliau bekerja untuk Votorantim Metais Niquel selama empat tahun. Beliau memiliki pengetahuan yang luas dalam pengelolaan kompleks tambang dan metalurgi, operasi tambang, perencanaan tambang, geostatistik, pengolahan mineral dan metalurgi.

Josimar Pires memiliki beberapa gelar di bidang pertambangan dan manajemen pertambangan dan keuangan. Beliau juga menjabat sebagai Professor of Mining Engineering di Escola de Minas de Ouro Preto pada tahun 1986 hingga 1992.

Citizenship: Brazilian

Born: 1961

Mr. Pires was appointed as a Director of PT Vale in September 2011. Prior to his appointment to the Board of Directors, he served as the Company's Chief Operating Officer. Mr. Pires joined Vale in January 2009 as General Manager of Manganese Mining.

Mr. Pires has more than 25 years of professional experience within the mining industry, including working with several large companies and dealing with various high profile projects in the mineral mining and cement industries. Prior to joining the Company, Mr. Pires assumed the position of Mining Planning General Manager of the Carajas Iron Ore, at Vale, in Brazil, in October 2009. Before that, he worked for Votorantim Metais Niquel for four years. He has a broad knowledge in the management of mining and metallurgical complexes, the operation of mines, mining planning, geostatistics, mineral processing and metallurgy.

Mr. Pires has several degrees in mining and the management of mining and finance. He was also Professor of Mining Engineering of Escola de Minas de Ouro Preto from 1986 to 1992.

Febriany Eddy

Direktur /

Director



Kewarganegaraan : Indonesia

Lahir: 1977

Febriany Eddy diangkat menjadi Direktur pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada 23 April 2013. Beliau memiliki 14 tahun pengalaman kerja dalam bidang akuntansi, audit, uji tuntas keuangan, evaluasi keuangan, pengendalian proyek-proyek capital dan manajemen kinerja operasional.

Febriany Eddy bergabung dengan PT Vale Indonesia Tbk pada September 2007 sebagai Manager Capital Projects Control dan Financial Evaluation, dimana ia berperan penting dalam kegiatan operasional yang berfokus untuk meningkatkan efisiensi biaya, mengevaluasi dan mengelola proyek-proyek capital dan menyokong perencanaan strategis. Pada Oktober 2010, ia pindah ke kantor regional Vale Base Metals Asia Pasifik dan Afrika di Brisbane, Australia. Beliau bertanggung jawab atas kegiatan operasional Base Metals di Indonesia, Jepang, Cina, Taiwan dan Afrika.

Sebelum bergabung dengan Vale, Febriany Eddy bekerja di PricewaterhouseCoopers selama lima tahun di Jakarta dan satu setengah tahun di Amsterdam, Belanda. Beliau terlibat mengerjakan banyak proyek internasional dalam bidang akuntansi, audit, dan uji tuntas keuangan.

Febriany Eddy meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang akuntansi dari Universitas Indonesia dan merupakan seorang Akuntan Publik yang telah disertifikasi. Beliau tengah menyelesaikan gelar MBA-nya dari UCLA Anderson School of Management dan National University of Singapore.

Citizenship: Indonesian

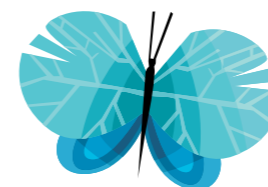
Born: 1977

Ms. Eddy was appointed to the Board of Directors at the Company's Annual General Meeting of Shareholders on April 23, 2013. She has 14 years of working experience in accounting, auditing, financial due diligence, financial evaluation, capital projects control and operational performance management.

Ms. Eddy joined PT Vale Indonesia Tbk in September 2007 as Manager for Capital Projects Control and Financial Evaluation, where she had significant involvement with operations, focusing on improving cost efficiencies, evaluating and managing capital projects and supporting strategic planning. In October 2010, she was transferred to regional office of Vale Base Metals Asia Pacific and Africa, based in Brisbane, Australia. Her responsibilities there included Base Metals operations in Indonesia, Japan, China, Taiwan and Africa.

Prior to Vale, Ms. Eddy worked for PricewaterhouseCoopers, spending five and a half years in Jakarta and one and a half years in Amsterdam, The Netherlands. She was involved in a broad range of international projects in accounting, auditing and financial due diligence.

Ms. Eddy has a Bachelor of Economics, majoring in accounting, from the University of Indonesia, and is an Indonesian Certified Public Accountant. She is currently completing an MBA from UCLA Anderson School of Management and National University of Singapore.



Profil Direksi Board of Directors' Profile

Fabio Bechara

Direktur /

Director

Kewarganegaraan : Brazil

Lahir : 1970

Fabio Bechara diangkat sebagai Direktur PT Vale pada Februari 2011 dan mengundurkan diri sejak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada 23 April 2013. Fabio Bechara bergabung dengan Vale tahun 1993 sebagai trainee. Beliau menjabat sebagai Financial General Manager untuk Vale di Mozambique, Afrika, dan Managing Director untuk Vale Emirates di Dubai. Beliau juga adalah kepala dari Project Management Office untuk proyek-proyek batu bara di Afrika dan Australia. Sebelumnya, Fabio Bechara memegang berbagai posisi di departemen keuangan Vale, dan di Ferrovias Centro-Atlântica, perusahaan kereta api yang dikuasai Vale.

Fabio Bechara meraih gelar sarjana bidang ekonomi dari UERJ, State University of Rio de Janeiro; gelar MBA di bidang keuangan dari IBMEC, Brazil, dan gelar pascasarjana di bidang administrasi bisnis dari Fundação Dom Cabral, Brazil. Beliau juga mengikuti program-program eksekutif di London Business School, Columbia University dan MIT.

Citizenship: Brazilian

Born: 1970

Mr. Bechara was appointed as a Director of PT Vale in February 2011, and resigned that position at the Company's Annual General Meeting of Shareholders on April 23, 2013. Mr. Bechara joined Vale as a trainee in 1993. He has served as Vale's Financial General Manager in Mozambique, Africa, and Managing Director of Vale Emirates in Dubai. He was also the head of the Project Management Office for Coal Projects in Africa and Australia. Prior to that, Mr. Bechara held various positions in Vale's financial department and Ferrovias Centro-Atlântica, a railway company controlled by Vale.

Mr. Bechara holds a bachelor's degree in economics from UERJ, the State University of Rio de Janeiro, a MBA in finance from IBMEC, Brazil, and a post graduate degree in business administration from Fundação Dom Cabral, Brazil. He has attended executive programs at London Business School, Columbia University, and MIT.

Daftar istilah Glossary of Terms

ISTILAH PERTAMBANGAN DAN PROSESNYA		GLOSSARY OF MINING AND PROCESSING TERMS
area yang secara operational sudah berjalan sustain sudah memiliki infrastruktur dan pabrik pengolahan.	Brownfield	A sustained operational area equipped with infrastructure and processing plants.
area yang masih baru yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur dan pabrik pengolahan	Greenfield	A new area that still requires development in infrastructure and processing plants.
Kalsin adalah produk yang dihasilkan tanur pereduksi dan berfungsi sebagai bahan untuk tanur peleburan listrik.	Kalsin Calcine	The output of a reduction kiln. Calcine serves as the feed material for our electric smelting furnaces.
Jenis bijih yang banyak terdapat di blok pertambangan Sorowako Timur dan juga di daerah pertambangan Petea. Kandungan mineral dari tipe bijih ini lebih seragam bila dibandingkan dengan tipe bijih di Sorowako Barat, karena bijih itu berada dalam batu-batuan peridotite yang mengandung mineral serpentine dan tanah liat saprolite dengan kandungan serpentine.	Bijih Dari Timur East-Type Ore	The type of ore prevalent in our Sorowako East mining block and also in our Petea mining location. Mineralization in this type of ore is more uniform than in West-type ore, since it is contained within serpentinized peridotite boulders and serpentine saprolite clay.
Matte tanur adalah hasil dari proses peleburan, dan digunakan sebagai umpan untuk alat pengubah.	Matte Tanur Furnace Matte	The product of the smelting process, used as the feed product for the converters.
Tanah merah yang terdiri dari tanah liat yang diperkaya dengan kandungan nikel, sebagai bahan untuk membuat bijih nikel. Laterite juga mengandung banyak besi, magnesium dan kobalt. Laterite merupakan hasil dari proses laterisasi batu yang terbentuk oleh panas, peridotite. Laterite terdiri dari dua lapisan, lapisan bawah yang mengandung saprolite dan lapisan di atasnya yang mengandung limonite.	Laterite	A red-colored soil composed of clay that is sufficiently enriched in nickel to make nickel ore. Laterite is also enriched in iron, magnesium and cobalt. It results from the laterization (a weathering process) of a type of igneous rock called peridotite. Laterite consists of two layers: a lower layer of saprolite and an overlying zone of limonite.
Bursa Logam London adalah pasar komoditas untuk perdagangan bahan dasar dan logam, termasuk nikel. Setiap hari, produsen, pembeli dan penjual menggunakan LME sebagai akses ke harga nikel di pasar terbuka yang banyak digunakan di industri sebagai harga acuan dalam transaksi.	Bursa Logam London London Metal Exchange	The London Metal Exchange, (LME) is a terminal market for the trading of materials and metals, including nickel. Producers, consumers and traders use the LME to reach, on a daily basis, open market prices for nickel, which are widely used throughout the industry as reference prices for physical transactions.
1.000.000 watt, ukuran untuk tenaga.	Megawatt (Mw)	1,000,000 watts; a measure of power.
Kumpulan mineral dengan kandungan logam secara alami yang memiliki nilai jual.	Endapan Mineral Mineral Deposit	A naturally occurring concentration of minerals containing metals of economic interest.
Produk setengah jadi yang dapat dijual secara komersial yang berasal dari bijih yang mengandung nikel. Nikel dalam matte adalah produk utama kami.	Nikel Dalam Matte Nickel In Matte	An intermediate product in the production of commercially saleable nickel, made from nickel containing ores. Nickel in matte is our principal product.
Jenis pertambangan dimana seluruh kegiatan penambangannya dilakukan di permukaan tanah.	Tambang Terbuka Open Pit Mining	A type of mining where all activity occurs on surface.
Bagian dari endapan mineral yang diekstraksi.	Bijih Ore	The economic portion of a mineral deposit that is extracted and processed.

Daftar istilah Glossary of Terms

ISTILAH PERTAMBANGAN DAN PROSESNYA		GLOSSARY OF MINING AND PROCESSING TERMS
Lapisan sisa bernilai rendah yang harus dibuang untuk mencapai bijih di daerah pertambangan kami.	Lapisan Sisa Overburden	The low-value waste layer that must be removed at a mining site in order to access ore.
Tabung panjang berputar dengan diameter besar yang digunakan untuk memanaskan bijih sampai 750 derajat Celcius dan pada titik tersebut, bijih bereaksi secara kimiawi dan sudah siap untuk dimasukkan kedalam tanur peleburan listrik.	Tanur Pereduksi Reduction Kiln	A long, large diameter rotating cylinder that is used to heat ore to about 750 degrees Celsius. At this temperature the ore undergoes a chemical reaction, making it suitable for introduction into the electric smelting furnace.
Persiapan dan pembentukan permukaan tanah dari daerah purna tambang untuk mengatur erosi dan memungkinkan revegetasi.	Reklamasi Reclamation	The preparation and landscaping of formerly mined-out areas in order to control erosion and allow revegetation.
Penanaman dengan tanaman penutup dan pelopor pada daerah paska reklamasi.	Revegetasi Revegetation	The planting with cover crops and pioneer trees of areas post-reclamation.
Penanaman tanaman lokal di daerah revegetasi setelah satu sampai dua tahun untuk mengembalikan daerah ke bentuk alaminya.	Rehabilitasi Rehabilitation	Planting of native trees in areas one to two years after revegetation in order to return each area to its original state.
Lokasi pada pertambangan kami, dimana bahan mentah dimasukkan ke dalam proses pengolahan awal, termasuk pembersihan dari batu-batuan dan lain lainnya.	Stasiun Penyaring Screening Station	A location at a mining site where mineralized material is brought for initial processing, including removal of low-grade boulders and other waste material.
Proses pengolahan kalsin, sebagai hasil dari tanur pereduksi, dilebur dengan tanur listrik untuk memisahkan terak dari campuran nikel-sulfur-besi yang terdapat dalam kalsin. Proses ini menghasilkan matte tanur listrik.	Peleburan Smelting	A process whereby calcine, the output of the reduction kiln, is melted through the use of an electric arc furnace, separating slag from the denser nickel-sulphur-iron mixture. This process produces electric furnace matte.
Jenis bijih ini banyak terdapat di blok tambang Sorowako Barat. Mineralisasi bijih dari jenis ini terkonsentrasi di tanah liat saprolite yang kaya dengan goethite; batu-batuan peridotite yang tidak mengandung mineral serpentine di dalam bijih jenis ini termasuk berkadar nikel sangat rendah.	Bijih Dari Barat West-Type Ore	The type of ore prevalent in our Sorowako West mining block. Mineralization in this type of ore is concentrated in goethite-rich saprolite clay. The unserpentinized peridotite boulders present in this ore type has a very low nickel content.
Satu ton material, termasuk berat air yang terkandung di dalamnya.	Ton Basah Wet Ton	One ton of material and the free water associated with it.

Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Annual Report Contents Reference To The Financial Services Authority Regulation

REFERENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) / Financial Services Authority Reference				
KRITERIA / CRITERIA	PENJELASAN / DESCRIPTION			HALAMAN / PAGE
I. Umum / General				
Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris.	Annual Report is presented in good and correct Indonesian and it is recommended to present the report also in English.			✓
Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca.	Annual report is printed in good quality and use type and font so that the text is easy to read.			✓
Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas.	Annual report should state clearly the identity of the company.	Nama Perusahaan dan Tahun Annual Report ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Sampul; 3. Sampul belakang; 4. Setiap halaman	Name of company and year of the annual report is placed on: 1. The front cover; 2. Side; 3. Back Cover; 4. Each page	✓
Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan	Annual Report is presented in the company's website			✓
II. Ikhtisar Data Keuangan Penting / Financial data Highlights				
Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.	Financial information in comparative form over a period of 3 financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 years.	Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha 2. Laba (rugi) 3. Total laba (rugi) komprehensif 4. Laba (rugi) per saham	The information includes: 1. Sales/income from business 2. Gross profit (loss) 3. Comprehensive profit (loss) 4. Profit (loss) per share	62
Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.	Financial position information in comparative form over a period of 3 financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 years.	Informasi memuat antara lain: 1. Modal kerja bersih 2. Jumlah investasi pada entitas asosiasi dan/atau joint venture 3. Jumlah aset 4. Jumlah liabilitas 5. Jumlah ekuitas	The information includes: 1. Net operating capital 2. Total investment in associate entities and/or joint venture 3. Total Assets 4. Total Liabilities 5. Total equities	62
Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.	Financial ratio in comparative form over a period of 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years.	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.	Information includes 5 (five) financial ratios that are common and relevant to the industry the company.	62-63
Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik.	Share price information in the form of chart and table.	Informasi dalam bentuk tabel dan grafik yang memuat: 1. Jumlah saham yang beredar; 2. Kapitalisasi pasar; 3. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan 4. Volume perdagangan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada).	Information in the form of chart and table includes: 1. Total outstanding shares 2. Market capitalization 3. The highest, lowest, and closing price of share 4. Trading volume on a quarterly basis during the last 2 (two) fiscal years.	67
Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.	Information on outstanding bond, sukuk or convertible bond within the last 2 (two) fiscal years.	Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding) 2. Tingkat bunga/imbilan 3. Tanggal jatuh tempo 4. Peringkat obligasi/sukuk	The information contains: 1. The number of bonds/sukuk/outstanding bonds 2. The interest rate / exchange 3. Date of maturity 4. The rating of bonds / sukuk	N.A.
III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi / Board of Commissioners and Board of Directors Report				
Laporan Dewan Komisaris	Board of Commissioners' Report	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi. 3. Perubahan komposisi Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada)	Contains the following items: 1. Assessment on the performance of the Board of Directors in managing the company. 2. View on the prospects of the company's business as established by the Board of Directors. 3. Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any).	36-42
Laporan Direksi	Board of Directors' Report	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan 2. Gambaran tentang prospek usaha 3. Penerapan tata kelola perusahaan 4. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada)	Contains the following items: 1. Analysis of company's performance, encompassing strategic policies, comparison between achievement of results and targets and challenges faced by the company 2. Description of business outlooks 3. The implementation of good corporate governance 4. Changes in the composition of the Board of Directors (if any)	44-59
Tanda tangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Signature of members of the Board of Directors and Board of Commissioners	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri 2. Pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan. 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau: penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan	Contains the following items: 1. Signatures are set on a separate page. 2. Statement that the Board of Directors and the Board of Commissioners are fully responsible for the accuracy of the annual report. 3. Signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors, stating their names and titles/positions. 4. A written explanation in a separate letter from each member of the Board of Commissioners or Board of Directors who refuses to sign the annual report, or: written explanation in a separate letter from the other members in the event that there is no written explanation provided by the said member.	224-225

REFERENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) / Financial Services Authority Reference				
KRITERIA / CRITERIA	PENJELASAN / DESCRIPTION			HALAMAN / PAGE
IV. Profil Perusahaan / Company Profile				
Nama dan alamat lengkap perusahaan	Name and address of the Company	Informasi memuat antara lain nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website	Information on name and address, zip code, telephone and or facsimile, email, website.	1
Riwayat singkat perusahaan	Brief history of the company	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama perusahaan (jika ada).	Includes date/year of establishment, name, and change in the company name (if any)	306-311
Bidang usaha	Line of Business	Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; dan 2. Penjelasan mengenai produk dan/atau jasa yang dihasilkan	Description about: 1. Line of business based on the latest articles of association; and 2. Description of products/services	22-25
Struktur organisasi	Organizational Structure	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah direksi	In the form of a chart, giving the names and titles at the least until one level below the Board of Directors.	30-31
Visi dan misi perusahaan	Company Vision and Mission	Mencakup: 1. visi perusahaan; 2. misi perusahaan; dan 3. keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris	Including: 1. Corporate vision 2. Mission; and 3. Statement that the vision and mission has been approved by the Board of Directors/Board of Commissioners	20-21
Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris	Identity and brief curriculum vitae of the members of the Board of Commissioners;	Informasi memuat antara lain: 1. Nama 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain) 3. Umur 4. Pendidikan 5. Pengalaman kerja 6. Tanggal penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris	The information should contain: 1. Name 2. Position (including position in other companies/institutions) 3. Age 4. Education 5. Working experience 6. The first appointment date as member of Board of Commissioners	314-325
Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi	Identity and brief curriculum vitae of the members of the Board of Directors;	Informasi memuat antara lain: 1. Nama 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain) 3. Umur 4. Pendidikan 5. Pengalaman kerja 6. Tanggal penunjukan pertama kali sebagai anggota Direksi	The information should contain: 1. Name 2. Position (including position in other companies/institutions) 3. Age 4. Education 5. Working experience 6. The first appointment date as member of Board of Directors	326-330
Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan)	Number of employees (comparative in 2 years) and description of competence building (for example: education and training of employees)	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan 3. Pelatihan karyawan yang telah dilakukan dengan mencerminkan adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan 4. Biaya yang telah dikeluarkan	The information should contain: 1. The number of employees for each level of the organization. 2. The number of employees for each level of education 3. Training of employee that has been and will be conducted 4. Availability of equal opportunity to all employees	218-219
Komposisi pemegang saham	Composition of shareholders	Mencakup antara lain: 1. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham 2. Nama direktur dan komisaris yang memiliki saham 3. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%, dan persentase kepemilikannya	Should include: 1. Names of shareholders having 5% or more shares. 2. Names of Directors and Commissioners owning shares 3. Public shareholders having respective share ownership of less than 5% and its percentage	64-65
Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi	List of subsidiaries and/or affiliated companies	Informasi memuat antara lain : 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi 2. Persentase kepemilikan saham 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi)	The information should include: 1. Name of subsidiaries/affiliated companies 2. Percentage of share ownership 3. Information on the line of business of subsidiaries and/or associate entities 4. Explanation regarding the operational status of the subsidiary or affiliated company (already operating or not yet operating)	N.A.
Struktur grup perusahaan	Structure of company's group	Struktur grup perusahaan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV), atau pernyataan tidak memiliki grup	Structure of company's group describing subsidiaries, associate entities, joint venture, and special purpose vehicle (SPV), or statement of having no group.	N.A.
Kronologis pencatatan saham	Share-listing chronology	Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan saham 2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah saham 3. Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku 4. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan	Includes: 1. Share-listing chronology 2. Types of corporate action causing changes in the number of shares 3. Changes in the number of shares from the beginning of listing up to the end of the financial year 4. Name of Stock Exchange where the company's shares are listed	67
Kronologis pencatatan efek lainnya;	Other securities listing chronology	Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan efek lainnya 2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya 3. Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku 4. Nama Bursa dimana efek lainnya dicatatkan 5. Peringkat efek	Includes: 1. Other securities listing chronology 2. Types of corporate action causing changes in the number of securities 3. Changes in the number of securities from the initial listing up to the end of the financial year 4. Name of Stock Exchange where the company's securities are listed 5. Rating of the securities	N.A.

REFERENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) / Financial Services Authority Reference			
KRITERIA / CRITERIA	PENJELASAN / DESCRIPTION		HALAMAN / PAGE
Nama dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal	Name and address of institution and/or profession supporting the capital market	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik 3. Nama dan alamat Perusahaan Pemeringkat Efek	The information contains: 1. Name and address of BAE 2. Name and address of Public Accounting Firm 3. Name and address of share registrar 312-313
Penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional	Awards and/or certificates received by the company, both at national and international level	Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi 2. Tahun perolehan 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi)	Information should include: 1. Name of the awards and/or certification 2. Year when awards are received 3. Institution presenting the awards/certification 4. Period of validity (for certification) 18-19
Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)	Name and address of subsidiaries and/or branch office or representative office (if any)		N.A.
V. Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan / Management Discussion and Analysis			
Tinjauan operasi per segmen usaha	Operational review per business segment	Memuat uraian mengenai: 1. Produksi/kegiatan usaha; 2. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; 3. Penjualan/pendapatan usaha; 4. Profitabilitas; untuk masing-masing segmen usaha yang diungkapkan dalam laporan keuangan (jika ada)	Includes description of: 1. Products/line of business; 2. Increase/decrease in production capacity 3. Sales/operating income 4. Profitability For each business segment disclosed in the financial statement (if any) 79
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	Description of company's financial performance	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas 3. Ekuitas 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugl), pendapatan komprehensif lain, dan total laba (rugl) komprehensif 5. Arus kas	An analysis of financial performance which includes a comparison between the financial performance of the current year and that of the previous year (in the form of narration and tables) concerning: 1. Current assets, non-current assets, and amount of assets 2. Short term and long term liabilities and total liabilities 3. Equity 4. Sales/operating income, expenses and profit (loss), other comprehensive revenue, and total comprehensive profit (loss) 5. Cash flow 80-112
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan	Discussion and analysis on the capacity to pay debts and the company's level of receivables collectability by presenting relevant ratio calculation	Penjelasan tentang: 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang 2. Tingkat kolektibilitas piutang	Explanation on: 1. Capacity to pay short term and long term debts 2. Receivables collectability level 112
Bahasan tentang struktur modal (capital structure), dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy)	Discussion on capital structure, management policies on capital structure	Penjelasan atas: 1. Struktur modal (capital structure), dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies)	Explanation on: 1. Capital structure, and 2. Capital structure policies 110
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal	Discussion on material ties for the investment of capital goods	Penjelasan tentang: 1. Tujuan dari ikatan tersebut 2. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut 3. Mata uang yang menjadi denominasi 4. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal, agar diungkapkan	Explanation on: 1. The purpose of the ties 2. Fund resources expected to fulfill the said ties 3. Currency of denomination 4. Steps taken by the company to protect the position of related currency against risks. Notes: if the company does not have tie related to investment of capital goods, the information should be disclosed. 110
Jika laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan/pendapatan bersih, maka berikan bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan dengan jumlah barang atau jasa yang dijual, dan/atau adanya produk atau jasa baru.	If the financial statement discloses a material increase or decrease in the sales or net income, an explanation should be disclosed concerning the extent to which such changes can be linked to the amount of goods or service offered and/or new products/services.	Penjelasan mengenai: 1. Besaran peningkatan/penurunan penjualan atau pendapatan bersih 2. Faktor penyebab peningkatan/penurunan material dari penjualan atau pendapatan bersih yang dikaitkan dengan jumlah barang atau jasa yang dijual, dan/atau adanya produk atau jasa baru.	Description of: 1. Amount of an increase/decrease of sales/net income 2. Factors causing the material increase/decrease from sales or net income related to total goods or services and/or new products/services. N.A.
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, struktur permodalan, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan	Information on the comparison between target set at the beginning of the fiscal year and the realization and target or projection for the next year concerning revenue, profit, capital structure, and others considered important for the company.	Informasi memuat antara lain: 1. perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi) 2. target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam satu tahun mendatang	Information should include: 1. Comparison between target of the beginning of the year and the realization 2. Target or projection for the next year N.A.
Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan	Information and material fact subsequent to the date of accountant	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan	Description of important events after the date of the accountant's report, including the effects on the performance and business risk in the future Note: if there is no important event after the date of the accountant report, such information should be disclosed 128
Uraian tentang prospek usaha perusahaan	Description of the company's business prospects	Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya	Description of the company's prospects related to overall industry and economy, complete with quantitative data and reliable sources 129-132
Uraian tentang aspek pemasaran	Description of marketing aspects	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar	Description of marketing aspect of products and/or services, such as marketing strategy and market share 124
Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir	Description on dividend policy and amount of cash dividend per share and amount of dividend per year published/paid for the last 2 (two) financial years.	Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah dividen kas 2. Jumlah dividen kas per saham 3. Payout ratio untuk masing-masing tahun Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya	Information includes: 1. Total cash dividend 2. Total cash dividend per year 3. Payout ratio for each year Notes: if there is no dividend distribution, the reason should be disclosed 122-124

REFERENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) / Financial Services Authority Reference			
KRITERIA / CRITERIA	PENJELASAN / DESCRIPTION		HALAMAN / PAGE
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	Realization of fund utilization from public offering (should the company be required to submit the report of fund utilization)	Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana, 2. Rencana penggunaan dana, 3. Rincian penggunaan dana, 4. Saldo dana, dan 5. Tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana (jika ada)	The information should include: 1. total funds obtained, 2. budget plan, 3. details of budget plan, 4. balance, and 5. Date of approval from General Meeting of Shareholders regarding the changes in fund utilization (if any) N.A.
Informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi atau restrukturisasi utang/modal.	Material information concerning investment, expansion, divestment, consolidation/merger, acquisition or debt/capital restructuring.	Memuat uraian mengenai: 1. Tujuan dilakukannya transaksi; 2. Nilai transaksi atau jumlah yg direstrukturisasi; 3. Sumber dana. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan	The information should include: 1. The purpose of transaction 2. Transaction value or number of transaction 3. Fund resource Note: if there is no such transaction, the information should be disclosed 118
Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi.	Transaction information material conflict of interest and / or transactions with affiliated parties.	Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode berjalan; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan	The information should include: 1. Name of the parties involved in the transactions and related affiliation 2. Explanation on fairness of transaction 3. Reason for transaction 4. Realization of transaction within the period 5. Corporate policy related to review mechanism of the transaction; and 6. Compliance to provisions and concerned regulation Note: if there is no such transaction, such information should be disclosed 124
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan	Description on changes in regulation having significant effect on the company	Uraian memuat antara lain: perubahan peraturan perundang-undangan dan dampaknya terhadap perusahaan Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan, agar diungkapkan	Description should include: changes in the regulation and its effect on the company Note: if there is no change in the regulation having significant effect on the company, such information should be disclosed N.A.
Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi	Description on changes in the accounting policy	Uraian memuat antara lain: perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi, agar diungkapkan	Description includes changes in accounting policy, its reasons and impacts on financial report Notes: if there is no change in accounting policy, such information should be disclosed 128
VI. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik / Good Corporate Governance			
Uraian Dewan Komisaris	Description of Board of Commissioners	Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris 2. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris/Dewan Komisaris) 4. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam pertemuan 5. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris 6. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris)	Description includes: 1. Description of responsibilities of Board of Commissioners 2. Disclosure of procedures of determining remuneration 3. Remuneration structure that represents remuneration component and amount per component for each member of Board of Commissioners 4. Meeting frequency and attendance level of Board of Commissioners 5. Training programs to increase the competency of Board of Commissioners 6. Disclosure of Board Charter (regulation of Board of Commissioners) 144-153
Uraian Direksi	Description of Board of Directors	Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi 2. Frekuensi pertemuan 3. Tingkat kehadiran anggota direksi dalam pertemuan 4. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi direksi 5. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi)	Description includes: 1. Scope of works and responsibility of each member of the Board of Directors 2. Meeting frequency 3. Attendance level of each member of the Board 4. Training programs for improving the competence of the Board 5. Disclosure on Board Charter (regulation of Board of Directors) 153-162
Assessment terhadap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi	Assessment on Board of Commissioners and Board of Directors	Mencakup antara lain: 1. Proses pelaksanaan assessment atas kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi 2. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan assessment atas kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi 3. Pihak yang melakukan assessment	Includes: 1. Assessment on performance of Board of Commissioners and/or Board of Directors' performance 2. Criteria used in the assessment process 3. Parties conducting assessment N.A.
Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi	Description on remuneration policies for Board of Directors	Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi 2. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Direksi 3. Pengungkapan indikator kinerja untuk mengukur performance Direksi	Includes: 1. Disclosure of procedure of determining remuneration 2. Remuneration structure which shows type and total short term and long term returns, post employment, and other long term kinds of remuneration for each member of the Board of Directors 3. Disclosure of performance indicator to assess the performance of the Board of Directors. N.A.
Informasi mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu	Information on the Majority and Controlling Shareholders, direct and indirectly, and the individual shareholder	Dalam bentuk skema atau diagram	In the form of scheme or diagram N.A.
Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali	Disclosure of affiliation among Board of Directors, Board of Commissioners, and Majority and/or Controlling Shareholders	Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya	Include: 1. Affiliation among internal members of the Board of Directors 2. Affiliation between the Board of Directors and the Board of Commissioners 3. Affiliation between the member of the Board of Directors and Majority and/or Controlling Shareholders 4. Affiliation among internal members of the Board of Commissioners N.A.

REFERENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) / Financial Services Authority Reference			
KRITERIA / CRITERIA	PENJELASAN / DESCRIPTION		HALAMAN / PAGE
		5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan	5. Affiliation between the member of the Board of Commissioners and Majority and/or Controlling Shareholders Note: if there is no such transaction, such information should be disclosed
Komite Audit	Audit Committee	Mencakup antara lain: 1. Nama dan jabatan anggota komite audit 2. Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota komite audit 3. Independensi anggota komite audit 4. Uraian tugas dan tanggung jawab 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit	Includes: 1. Name and position of each member of audit committee 2. Educational background and working experience of audit committee member 3. Independence of audit committee member 4. Description of roles and responsibilities 5. Brief report of the implementation of audit committee activity 6. Meeting frequency and attendance level of audit committee
Komite Nominasi dan Remunerasi	Nomination and Remuneration Committee	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi 2. Independensi anggota komite nominasi dan/atau remunerasi 3. Uraian tugas dan tanggung jawab 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi	Includes: 1. Name, position, and brief curriculum vitae of member of remuneration and nomination committee 2. Independence of remuneration and nomination committee member 3. Description of roles and responsibilities 4. Description of the implementation of remuneration and/or nomination committee's activity 5. Meeting frequency and attendance level of remuneration and/or nomination committee
Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan	Other committees under the Board of Commissioners	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain 2. Independensi anggota komite lain 3. Uraian tugas dan tanggung jawab 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain	Includes: 1. Name, position, and brief curriculum vitae of other committees 2. Independence of other committee member 3. Description of roles and responsibilities 4. Description of the implementation of other committee's activity 5. Meeting frequency and attendance level of other committees
Uraian tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan	Description on roles and functions of corporate secretary	Mencakup antara lain: 1. Nama dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan 2. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan	Includes: 1. Name and professional record of corporate secretary 2. Description on the implementation of corporate secretary's duties
Uraian mengenai unit audit internal	Description on internal audit unit	Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal 3. Kualifikasi/sertifikasi sebagai profesi audit internal 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan 5. Uraian pelaksanaan tugas 6. Pihak yang mengangkat/memberhentikan ketua unit audit internal	Includes: 1. Name of head of internal audit unit 2. Number of employees (internal auditor) within internal audit unit 3. Qualification/certification as professional internal audit 4. Position of internal audit unit in the company structure 5. Description of duty implementation 6. Parties appointing/dismissing head of internal audit unit
Akuntan Perseroan	Company accountant	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah periode akuntan telah melakukan audit laporan keuangan tahunan 2. Jumlah periode Kantor Akuntan Publik telah melakukan audit laporan keuangan tahunan 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik 4. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa audit laporan keuangan tahunan Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan	Information includes: 1. Total period when the accountant has audited the yearly financial statements 2. Total period when the Public Accounting Firm has audited yearly financial statements 3. The amount of fee for each service given by the public accountant 4. Other service given by the accountant other than audit for financial reports Note: if there is no such transaction, such information should be disclosed
Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan	Description on risk management	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko 2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut	Includes: 1. Explanation on risk management system 2. Explanation on evaluation of risk management system effectiveness 3. Explanation on risks posed to the company 4. Efforts to manage such risks
Uraian mengenai sistem pengendalian intern	Description on internal control system	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional/ COSO (control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring activities) 3. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem pengendalian intern	Includes: 1. Brief explanation on internal control system, including financial and operational control 2. Explanation of the conformity of internal control system to the internationally-recognized framework/ COSO (control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring activities) 3. Explanation of the evaluation on the effectiveness of internal control system.
Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup	Description on corporate social responsibility program that relates to environment	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan, 2. Kegiatan yang dilakukan, dan 3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, dan lain-lain 4. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki	Includes: 1. Policies, 2. Activities, and 3. Financial impacts from the environmental programs that relates the company's operational activity, such as the use of eco-friendly and recyclable material, energy saving, waste management, and others 4. Certification for environmental programs

REFERENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) / Financial Services Authority Reference			
KRITERIA / CRITERIA	PENJELASAN / DESCRIPTION		HALAMAN / PAGE
Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja	Explanation on corporate social responsibility related to employment, occupational health and safety	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan, 2. Kegiatan yang dilakukan, dan 3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, dan lain-lain	Includes: 1. Policies, 2. Activities, and 3. Financial impacts from the activities related to employment and occupational health and safety such as gender equality, facilities for safety, employee turnover level, accident at work rate, etc
Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan	Explanation on corporate social responsibility related to social and community development	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan, 2. Kegiatan yang dilakukan, dan 3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain.	Includes: 1. Policies, 2. Activities, and 3. Financial impacts from the activities related to social and community development programs, such as the empowerment of local manpower and society in the vicinity of the company, the improvement of social facilities and infrastructure, donation, others.
Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen	Explanation on corporate social responsibility related to responsibility to customers	Mencakup antara lain: 1. Kebijakan, 2. Kegiatan yang dilakukan, dan 3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain	Includes: 1. Policies, 2. Activities, and 3. Financial impacts from the activities related to product reliability, such as aspects of customer health and safety, product information, facilities, number of customer complaint management, etc
Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada periode laporan tahunan	Litigation faced by the company, subsidiaries, members of Board of Directors and/or members of Board of Commissioners for the period	Mencakup antara lain: 1. pokok perkara/gugatan 2. status penyelesaian perkara/gugatan 3. pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan 4. sanksi administrasi yang dikenakan kepada entitas, anggota Direksi dan Dewan Komisaris, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi) Catatan: dalam hal tidak berperkara, agar diungkapkan	Includes: 1. Material of the case/claim 2. Status of settlement of the case/claim 3. Potential impacts on the company 4. Administrative sanctions imposed to the entity, members of the Board of Directors and Board of Commissioners, which is imposed by the authorities concerned (capital market, banking, etc) for the last financial year (including statements of having no administrative sanction, if any) Note: if there is no litigation, such information should be disclosed
Akses informasi dan data perusahaan	Information access and corporate data	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya	Description on the availability of access to corporate information and data for public, such as through website (in Bahasa and English), mass media, mailing list, bulletin, meeting with analysts, etc.
Bahasan mengenai kode etik	Description on code of conduct	Memuat uraian antara lain: 1. Isi kode etik 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi 3. Upaya dalam penerapan dan penegakannya 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan	Includes: 1. Content of code of conduct 2. Disclosure that code of conduct prevails to all organizational levels 3. Efforts in its implementation and enforcement 4. Statement of corporate culture owned by the company
Pengungkapan mengenai whistleblowing system	Disclosure on whistleblowing system	Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran 2. Perlindungan bagi whistleblower 3. Penanganan pengaduan 4. Pihak yang mengelola pengaduan 5. Hasil dari penanganan pengaduan	Includes description on whistleblowing system such as: 1. Submission of violation reports 2. Protection for the whistleblowers 3. Complaint management 4. Parties managing the complaint 5. Results from the complain handling
VII. Informasi Keuangan / Financial Information			
pernyataan direksi dan/atau dewan komisaris tentang tanggung jawab atas laporan keuangan	Statement by the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the responsibility of financial reports	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang tanggung jawab atas laporan keuangan	Conformity to the regulation applied concerning the responsibility on the financial statements
Opini auditor independen atas laporan keuangan	Opinion of independent auditor on the financial reports		
Deskripsi auditor independen di opini	Description of the independent auditor in the opinion	Deskripsi memuat tentang: 1. Nama & tanda tangan 2. Tanggal Laporan Audit 3. No. ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik	Description includes: 1. Name & signature 2. Date of Audit Report 3. PAF and Public Accountant license
Laporan keuangan yang lengkap	Complete financial statements	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan (neraca) 2. Laporan laba rugi komprehensif 3. Laporan perubahan ekuitas 4. Laporan arus kas 5. Catatan atas laporan keuangan 6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan)	Contains all elements of the financial statements: 1. Balance sheet 2. Income statement 3. Equity statement 4. Cash flow report 5. Notes to the financial statements 6. Statement of financial position at the beginning of the comparative period presented when an entity implements accounting policy retrospectively or makes restatement of financial statement items, or when the entity reclassify items in its financial statements (if relevant)
Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya	Disclosure in the notes to the financial statements when the entity implements accounting policy retrospectively or to make the restatement of financial statements items, or when the entity reclassify items in financial statements.	Ada atau tidak ada pengungkapan sesuai dengan PSAK	In the event that there is disclosure according to PSAK or otherwise, the information should be disclosed

REFERENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) / Financial Services Authority Reference

KRITERIA / CRITERIA	PENJELASAN / DESCRIPTION	HALAMAN / PAGE
Perbandingan tingkat profitabilitas	Comparison of the levels of profitability	Perbandingan laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya
Laporan arus kas	Cash flow report	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan 2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan/atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan
Ikhtisar kebijakan akuntansi	Accounting policy highlights	Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan 3. Pengakuan pendapatan dan beban 4. Aset Tetap 5. Instrumen Keuangan
Pengungkapan transaksi pihak berelasi	Disclosure of transaction from related parties	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas.
Pengungkapan yang berhubungan dengan Perpajakan	Disclosure related to taxation	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.
Pengungkapan yang berhubungan dengan Aset Tetap	Disclosure related to fixed asset	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi
Kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan imbalan kerja	Accounting policies related to benefit	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Jenis imbalan kerja yang diberikan kepada karyawan; 2. Deskripsi umum mengenai jenis program imbalan pascakerja yang diselenggarakan oleh perusahaan; 3. Kebijakan akuntansi perusahaan dalam mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial; dan 4. Pengakuan keuntungan dan kerugian untuk kurtailmen dan penyelesaian.
Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan	Disclosure related to financial instrument	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Persyaratan, kondisi dan kebijakan akuntansi untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 2. Klasifikasi instrumen keuangan; 3. Nilai wajar tiap kelompok instrumen keuangan; 4. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko; 5. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; dan 6. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.
Penerbitan laporan keuangan	Publishing of financial statements	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan

Hubungi Kami

Contact Us

Hubungi Kami

PT Vale menyebarkan pengumuman tentang kegiatan-kegiatan dan informasi perusahaan termasuk hasil laporan keuangan per triwulan lewat IDX E-Reporting dan situs Internetnya, distribusi jejaring surat elektronik dan lewat situs kami di www.vale.com/indonesia.

Pemegang saham maupun anggota masyarakat lain yang tertarik untuk mendapatkan informasi tambahan tentang PT Vale kami persilakan menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan di alamat yang tertera di bawah ini.

Kantor Pusat Corporate Office

PT Vale Indonesia Tbk
Plaza Bapindo, Citibank Tower, 22nd floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190 Indonesia
T: +62-21-524 9000
F: +62-21-524 9020
W: www.vale.com/indonesia

Administrasi Saham Share Registrar

PT Vale Indonesia Tbk
Plaza Bapindo, Citibank Tower, 22nd floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190 Indonesia
T: +62-21-524 9000
F: +62-21-524 9030
E: ptvi.shareadmin@vale.com

Contact Us

PT Vale disseminates releases announcing corporate material events and information as well as its quarterly financial results through IDX E-Reporting and website, an email distribution list, as well as our website at www.vale.com/indonesia.

Shareholders or other members of the public who are interested in obtaining additional information about PT Vale are invited to contact the Corporate Secretary of the Company at the address shown below.

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

PT Vale Indonesia Tbk
Plaza Bapindo, Citibank Tower, 22nd floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190 Indonesia
T: +62-21-524 9000
F: +62-21-524 9020
E: ptvi.corpsec@vale.com

Kantor Operasi Operations Offices

Sorowako 92984
South Sulawesi Indonesia
Jl. Somba Opu
PO Box 1143 Makassar 90001
South Sulawesi Indonesia

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

